



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 76 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 17 TAHUN 2016  
TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)  
KOTA SURABAYA TAHUN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 33 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2017;
  - b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 33 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2017, sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2017.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 95);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 874);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014–2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2005 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 5/D);
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 17);
22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
24. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 31 Seri E);

25. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 33 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 37).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KOTA SURABAYA TAHUN 2017.**

**Pasal I**

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 33 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 37) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 11 Nopember 2016

**WALIKOTA SURABAYA**

ttd.

**TRI RISMAHARINI**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 11 Nopember 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA**

ttd.

**HENDRO GUNAWAN**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2016 NOMOR 80**

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**IRA TURSILOWATI, SH. MH.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006



## DAFTAR ISI

|   |                |
|---|----------------|
| Daftar Isi .....  | i              |
| Daftar Tabel .....  | ii             |
| Daftar Gambar .....   | xi             |
| <br>  |                |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>  | <b>I – 1</b>   |
| 1.1 Latar Belakang .....  | I – 1          |
| 1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....  | I – 1          |
| 1.3 Hubungan Antar Dokumen .....  | I – 4          |
| 1.4 Sistematika Dokumen RKPD .....  | I – 6          |
| 1.5 Maksud dan Tujuan .....   | I – 6          |
| <br>  |                |
| <b>BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN<br/>KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN .....</b> | <b>II – 1</b>  |
| 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah .....  | II – 1         |
| 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun<br>Berjalan dan Realisasi RPJMD .....               | II – 95        |
| 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah .....   | II – 192       |
| <br>  |                |
| <b>BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH DAN<br/>KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH .....</b>                      | <b>III – 1</b> |
| 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....   | III – 1        |
| 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....  | III – 23       |
| <br>  |                |
| <b>BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH .....</b>  | <b>IV – 1</b>  |
| 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan .....  | IV – 1         |
| 4.2 Prioritas Pembangunan .....   | IV – 7         |
| <br>  |                |
| <b>BAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH .....</b>   | <b>V – 1</b>   |
| <b>BAB VI PENUTUP .....</b>   | <b>VI – 1</b>  |

## DAFTAR TABEL

|   |         |
|---|---------|
| Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kota Surabaya menurut Kecamatan Tahun<br>2014 – 2015 .....  | II – 3  |
| Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2010<br>- Tahun 2015 .....  | II – 4  |
| Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Usia Sekolah<br>Tahun 2015 .....  | II – 6  |
| Tabel 2.4 Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Menurut<br>Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Seri Tahun Dasar<br>2010 Tahun 2014 – 2015 (dalam Juta Rp) .....     | II – 8  |
| Tabel 2.5 Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Menurut<br>Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Seri Tahun Dasar<br>2010 Tahun 2014–2015 (dalam Juta Rp) .....       | II – 9  |
| Tabel 2.6 Perkembangan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Atas<br>Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan (ADHK) Seri Tahun<br>Dasar 2010 Tahun 2014 –2015 (dalam Juta Rp) ..... | II – 10 |
| Tabel 2.7 Inflasi Kota Surabaya (%) Tahun 2010-2015 dan Proyeksi<br>Tahun 2016 .....  | II – 12 |
| Tabel 2.8 PDRB Perkapita Dan Pendapatan Regional Perkapita Kota Surabaya<br>Tahun 2014-2015 .....   | II – 12 |
| Tabel 2.9 Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Surabaya Tahun<br>2014 – 2015 .....   | II – 14 |
| Tabel 2.10 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Surabaya Tahun<br>2014-2015 .....  | II – 14 |
| Tabel 2.11 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Surabaya Tahun<br>2010-2015 .....  | II – 15 |
| Tabel 2.12 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Surabaya Tahun<br>2010 – 2014 .....  | II – 16 |
| Tabel 2.13 Perkembangan Balita Gizi Buruk Kota Surabaya Tahun<br>2014 – 2015 .....  | II – 16 |

|   |         |
|---|---------|
| Tabel 2.14 Rasio Penduduk Yang Bekerja Kota Surabaya Menurut Golongan Umur<br>Tahun 2014-2015 .....           | II – 17 |
| Tabel 2.15 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kota Surabaya Tahun<br>2014 – 2015 .....                    | II – 18 |
| Tabel 2.16 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Surabaya Tahun<br>2014-2015 .....                  | II – 19 |
| Tabel 2.17 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Surabaya Menurut Kecamatan<br>Tahun 2015 .....                  | II – 20 |
| Tabel 2.18 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Surabaya Tahun<br>2014-2015 .....                  | II – 21 |
| Tabel 2.19 Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Surabaya Menurut Kecamatan<br>Tahun 2015 .....                  | II – 22 |
| Tabel 2.20 Perkembangan Angka Kelulusan (AL) Kota Surabaya Tahun<br>2014 – 2015 .....                         | II – 23 |
| Tabel 2.21 Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) Kota Surabaya Tahun<br>2014 – 2015 .....                    | II – 24 |
| Tabel 2.22 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kota Surabaya<br>Tahun 2014 – 2015 .....            | II – 25 |
| Tabel 2.23 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kota Surabaya<br>Menurut Kecamatan Tahun 2015 ..... | II – 27 |
| Tabel 2.24 Jumlah Posyandu dan Balita Kota Surabaya Tahun 2014-2015 .....                                     | II – 30 |
| Tabel 2.25 Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Kota Surabaya Tahun<br>2014-2015 .....                      | II – 30 |
| Tabel 2.26 Jumlah Rumah Sakit Kota Surabaya Tahun 2014-2015 .....   | II – 31 |
| Tabel 2.27 Jumlah Dokter Kota Surabaya Tahun 2010-2015 .....  | II – 31 |
| Tabel 2.28 Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Kota Surabaya Tahun<br>2014 – 2015 .....                          | II – 32 |
| Tabel 2.29 Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya Tahun 2014-2015 .....   | II – 33 |
| Tabel 2.30 Rumah Tidak Layak Huni menurut Kecamatan Kota Surabaya Tahun<br>2014 – 2015 .....                  | II – 33 |
| Tabel 2.31 IMB yang diterbitkan Kota Surabaya Tahun 2014-2015 .....   | II – 34 |
| Tabel 2.32 Dokumen Perencanaan Kota Surabaya Tahun 2014-2015 .....  | II – 35 |

|  |         |
|--|---------|
| Tabel 2.33 Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD Kota Surabaya Tahun<br>2014-2015 .....  | II – 36 |
| Tabel 2.34 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Kota Surabaya Tahun<br>2014 – 2015 .....                                     | II – 36 |
| Tabel 2.35 Rasio Ijin Trayek Kota Surabaya Tahun 2010-2015 .....   | II – 37 |
| Tabel 2.36 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kota Surabaya Tahun<br>2014 – 2015 .....   | II – 37 |
| Tabel 2.37 Volume Produksi Sampah dan Jumlah Sampah Yang Ditangani di TPA<br>Kota Surabaya Tahun 2014-2015 .....                 | II – 38 |
| Tabel 2.38 Rasio Daya Tampung Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan<br>Penduduk Kota Surabaya Tahun 2014-2015 .....          | II – 38 |
| Tabel 2.39 Permasalahan Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun<br>2014 – 2015 .....  | II – 39 |
| Tabel 2.40 Daftar Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2014<br>- 2015 .....   | II – 41 |
| Tabel 2.41 Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Surabaya Tahun<br>2014 – 2015 .....                                  | II – 43 |
| Tabel 2.42 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Surabaya Tahun 2014 –<br>2015 .....   | II – 43 |
| Tabel 2.43 KDRT Kota Surabaya Tahun 2014 – 2015 .....  | II – 44 |
| Tabel 2.44 Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari<br>Tindak Kekerasan Kota Surabaya Tahun 2014 – 2015 ..... | II – 45 |
| Tabel 2.45 Rasio Akseptor KB Kota Surabaya Tahun 2014- 2015 .....  | II – 46 |
| Tabel 2.46 Cakupan Peserta KB Aktif Kota Surabaya Tahun 2014- 2015 ...   | II – 46 |
| Tabel 2.47 Penanganan PMKS Kota Surabaya Tahun 2014 – 2015 .....   | II – 48 |
| Tabel 2.48 Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kota Surabaya Tahun<br>2014 – 2015 .....   | II – 49 |
| Tabel 2.49 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Kota Surabaya Tahun<br>2014 – 2015 .....   | II – 49 |
| Tabel 2.50 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya Tahun<br>2014 – 2015 .....   | II – 50 |
| Tabel 2.51 Pencari Kerja yang Difasilitasi dan Ditempatkan Kota Surabaya Tahun<br>2014 – 2015 .....                              | II – 51 |



|  |         |
|--|---------|
| Tabel 2.52 Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun<br>2014-2015 .....                    | II – 51 |
| Tabel 2.53 Persentase Koperasi Aktif Kota Surabaya Tahun 2014 – 2015   | II – 52 |
| Tabel 2.54 Persentase Usaha Mikro dan Kecil Kota Surabaya Tahun<br>2014 – 2015 .....                           | II – 53 |
| Tabel 2.55 Jumlah Proyek PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2014 - 2015  | II – 53 |
| Tabel 2.56 Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2014<br>- 2015 .....                                  | II – 54 |
| Tabel 2.57 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun 2014<br>- 2015 .....                              | II – 55 |
| Tabel 2.58 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kota Surabaya Tahun<br>2014 – 2015 .....                   | II – 56 |
| Tabel 2.59 Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya Kota Surabaya Tahun<br>2014 – 2015 .....                     | II – 57 |
| Tabel 2.60 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Kota<br>Surabaya Tahun 2014 – 2015 .....    | II – 57 |
| Tabel 2.61 Jumlah Gelanggang/Balai Remaja (Selain Milik Swasta) Kota Surabaya<br>Tahun 2014 – Tahun 2015 ..... | II – 58 |
| Tabel 2.62 Lapangan Olahraga di Kota Kota Surabaya Tahun 2014 – 2015   | II – 69 |
| Tabel 2.63 Jumlah Ormas Kota Surabaya Tahun 2014 – 2015 .....  | II – 60 |
| Tabel 2.64 Kegiatan Pembinaan terhadap Ormas Kota Surabaya Tahun<br>2014 – 2015 .....                          | II – 60 |
| Tabel 2.65 Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Kota Surabaya Tahun<br>2014 – 2015 .....                          | II – 61 |
| Tabel 2.66 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kota Surabaya Tahun<br>2014 – 2015 .....                           | II – 61 |
| Tabel 2.67 Cakupan Patroli Petugas Satpol PP Kota Surabaya Tahun<br>2014 – 2015 .....                          | II – 62 |
| Tabel 2.68 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Kota Surabaya Tahun<br>2014 – 2015 .....                        | II – 62 |
| Tabel 2.69 Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk Kota Surabaya Tahun<br>2014 – 2015 .....                    | II – 62 |
| Tabel 2.70 Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya Tahun 2014 – 2015 .....   | II – 63 |

|  |         |
|--|---------|
| Tabel 2.71 Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Online Kota Surabaya Tahun 2014 – 2015 ..... | II – 64 |
| Tabel 2.72 Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Surabaya Tahun 2014 – 2015 .....                                    | II – 64 |
| Tabel 2.73 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota Surabaya Tahun 2014 – 2015 .....                           | II – 68 |
| Tabel 2.74 Tingkat Waktu Tanggap ( <i>Response Time Rate</i> ) Kota Surabaya Tahun 2014 – 2015 .....           | II – 68 |
| Tabel 2.75 Cakupan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran Kota Surabaya Tahun 2014 – 2015 .....                 | II - 68 |
| Tabel 2.76 Jumlah Sanksi Pelanggaran Disiplin Aparatur Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2014 – 2015 .....        | II – 69 |
| Tabel 2.77 Ketersediaan Pangan Utama Kota Surabaya Tahun 2014 – 2015 .....                                     | II – 70 |
| Tabel 2.78 Kelompok Binaan PKK Menurut Kecamatan Kota Surabaya Tahun 2014–2015 .....                           | II – 71 |
| Tabel 2.79 Kelompok Binaan PKK Kota Surabaya Tahun 2014 – 2015 .....   | II – 73 |
| Tabel 2.80 Keluarga Miskin Yang Melakukan Usaha Ekonomi Produktif di Kota Surabaya Tahun 2014 – 2015 .....     | II – 73 |
| Tabel 2.81 Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat Kota Surabaya Tahun 2014 - 2015 .....            | II – 74 |
| Tabel 2.82 Pengelolaan Arsip Secara Baku Kota Surabaya Tahun 2014 – 2015 .....                                 | II – 75 |
| Tabel 2.83 Peningkatan SDM Pengelola Kersipan Kota Surabaya Tahun 2014 – 2015 .....                            | II – 75 |
| Tabel 2.84 Jaringan Komunikasi Kota Surabaya Tahun 2014 – 2015 .....   | II – 76 |
| Tabel 2.85 Website Milik Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2014 – 2015 ..   | II – 76 |
| Tabel 2.86 Jumlah Perpustakaan Kota Surabaya Tahun 2014 – 2015 .....   | II – 77 |
| Tabel 2.87 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kota Surabaya Tahun 2014 – 2015 .....                                | II – 77 |
| Tabel 2.88 Penambahan Koleksi Buku Baru di Perpustakaan Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 – 2015 .....           | II – 78 |

|  |         |
|--|---------|
| Tabel 2.89 Kontribusi Kategori Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya Tahun 2014-2015 .....                               | II – 78 |
| Tabel 2.90 Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Kota Surabaya Tahun 2014 – 2015 .....  | II – 79 |
| Tabel 2.91 Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Kota Surabaya Tahun 2014-2015 .....                       | II – 79 |
| Tabel 2.92 Produksi Hasil Pertanian Menurut Jenis Komoditi Kota Surabaya Tahun 2014 – 2015 .....   | II – 80 |
| Tabel 2.93 Pelaksanaan Audit Energi pada Kegiatan/ Usaha Tahun 2014 – 2015 .....   | II – 82 |
| Tabel 2.94 Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara dan Nusantara ke Kota Surabaya Tahun 2014 – 2015 .....                                    | II – 83 |
| Tabel 2.95 Obyek Kunjungan Wisata Kota Surabaya Tahun 2014 – 2015 .  | II – 83 |
| Tabel 2.96 Kontribusi Kategori Pariwisata Terhadap PDRB Kota Surabaya Tahun 2014 – 2015 .....  | II – 84 |
| Tabel 2.97 Jumlah Produksi Perikanan Kota Surabaya Tahun 2014 – 2015   | II – 84 |
| Tabel 2.98 Konsumsi Ikan Kota Surabaya Tahun 2014 – 2015 .....   | II – 85 |
| Tabel 2.99 Kontribusi Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Terhadap PDRB Kota Surabaya Tahun 2014-2015 | II – 85 |
| Tabel 2.100 Ekspor Bersih Perdagangan Kota Surabaya Tahun 2014 - 2015 .....  | II – 86 |
| Tabel 2.101 Jumlah Investor PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2014 - 2015 .....   | II – 87 |
| Tabel 2.102 Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2014 – 2015 .....  | II – 87 |
| Tabel 2.103 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun 2014 – 2015 .....  | II – 87 |
| Tabel 2.104 Angka Konsumsi RT per Kapita Kota Surabaya Tahun 2014 - 2015 .....   | II – 88 |
| Tabel 2.105 Persentase Konsumsi RT Non-Pangan Kota Surabaya Tahun 2014 – 2015 .....  | II – 89 |
| Tabel 2.106 Produktivitas Per Sektor Kota Surabaya Tahun 2014 – 2015 ..  | II – 90 |

|  |          |
|--|----------|
| Tabel 2.107 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kota Surabaya Tahun 2010-2015 .....   | II – 91  |
| Tabel 2.108 Rasio Luas Wilayah Genangan Kota Surabaya Tahun 2014 - 2015 .....  | II – 92  |
| Tabel 2.109 Persentase Cakupan Layanan Air Bersih Kota Surabaya Tahun 2014 – 2015 .....  | II – 92  |
| Tabel 2.110 Jumlah Demonstrasi Kota Surabaya Tahun 2014-2015 .....   | II – 93  |
| Tabel 2.111 Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha Kota Surabaya Tahun 2014-2015 .....  | II – 94  |
| Tabel 2.112 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kota Surabaya Tahun 2014-2015 ....  | II – 94  |
| Tabel 2.113 Rasio Ketergantungan Kota Surabaya Tahun 2014 – 2015 .....   | II – 95  |
| Tabel 2.114 Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah Tahun 2014-2015 Kota Surabaya .....                                      | II – 97  |
| Tabel 2.115 Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah Tahun Berjalan Kota Surabaya .....                                       | II – 148 |
| Tabel 2.116 Tabel Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah .....                         | II – 205 |
| Tabel 2.117 Tabel Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah .....   | II – 221 |
| Tabel 3.1 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Surabaya Tahun 2015 dan Perkiraan Tahun 2016 (dalam juta) .....                   | III – 2  |
| Tabel 3.2 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surabaya Tahun 2015 dan Perkiraan Tahun 2016 (dalam juta) .....                   | III – 3  |
| Tabel 3.3 Peranan Ekonomi PerKategori Terhadap PDRB Kota Surabaya Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2015 dan Perkiraan Tahun 2016 ..... | III – 4  |
| Tabel 3.4 Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya Tahun 2015 dan Perkiraan Tahun 2016 (dalam persen) .....                                 | III – 5  |
| Tabel 3.5 Tingkat Inflasi Kota Surabaya Tahun 2015 dan Perkiraan Tahun 2016 (dalam persen) .....                                     | III – 6  |
| Tabel 3.6 Realisasi Nilai Investasi Kota Surabaya Tahun 2010-2015 dan Perkiraan Tahun 2016 .....                                     | III – 9  |
| Tabel 3.7 Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kota Surabaya Tahun 2010-2013 dan Perkiraan Tahun 2015 .....                       | III - 10 |

|   |          |
|---|----------|
| Tabel 3.8 Ekspor Kota Surabaya Tahun 2015 dan Perkiraan Tahun 2015 .  | III – 10 |
| Tabel 3.9 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur<br>Tahun 2015 dan Perkiraan Tahun 2016 .....            | III – 12 |
| Tabel 3.10 Incremental Labour Output Ratio (ILOR) Kota Surabaya Tahun 2010-<br>2013 dan Perkiraan Tahun 2015 .....                      | III – 13 |
| Tabel 3.11 Perkiraan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Surabaya<br>Perkiraan Tahun 2017 dan 2018 (dalam Juta) .....              | III – 19 |
| Tabel 3.12 Perkiraan Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Surabaya<br>Perkiraan Tahun 2017 dan 2018 ADHK (dalam Persen) ..... | III – 20 |
| Tabel 3.13 Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya Tahun 2017 dan<br>2018(dalam Persen) .....                                       | III – 21 |
| Tabel 3.14 Perkiraan Inflasi Kota Surabaya Tahun 2017 dan 2018 .....  | III – 21 |
| Tabel 3.15 Proyeksi Nilai Investasi PMA dan PMDN Kota Surabaya Tahun 2017 dan<br>2018 .....   | III – 22 |
| Tabel 3.16 Perkiraan Ekspor – Impor Kota Surabaya Tahun 2017 dan 2018 (dalam<br>US\$) .....   | III – 22 |
| Tabel 3.17 Perkiraan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya Tahun 2017 dan<br>2018 (dalam persen) .....                             | III – 23 |
| Tabel 3.18 Kontribusi PAD terhadap Pendapatan daerah Tahun 2014-2017  | III – 23 |
| Tabel 3.19 Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Tahun 2014 – 2017 .....   | III – 24 |
| Tabel 3.20 Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD Tahun 2014 – 2017   | III – 24 |
| Tabel 3.21 Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap<br>PAD Tahun 2014 – 2017 .....                         | III – 25 |
| Tabel 3.22 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terhadap Pendapatan Asli<br>Daerah (PAD) Tahun 2014 – 2017 .....                   | III – 25 |
| Tabel 3.23 Kontribusi Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2014<br>– 2017 .....  | III – 25 |
| Tabel 3.24 Kontribusi Bagi Hasil Pajak terhadap Dana Perimbangan Tahun 2014 –<br>2017 .....   | III – 26 |
| Tabel 3.25 Kontribusi Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Dana Perimbangan Tahun<br>2014– 2017 .....  | III – 26 |
| Tabel 3.26 Kontribusi Dana Alokasi Umum terhadap Dana Perimbangan Tahun<br>2014 – 2017 .....  | III – 27 |

|   |          |
|---|----------|
| Tabel 3.27 Kontribusi Dana Alokasi Khusus terhadap Dana Perimbangan Tahun 2014 – 2017 .....   | III – 27 |
| Tabel 3.28 Kontribusi Lain-lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2014 – 2017 .....  | III – 28 |
| Tabel 3.29 Kontribusi Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya terhadap Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2014 – 2017 ..... | III – 28 |
| Tabel 3.30 Kontribusi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2014 – 2017 .....                    | III - 29 |
| Tabel 3.31 Pendapatan Daerah Kota Surabaya Realisasi 2014-2015, Target 2016, Proyeksi 2017 .....  | III – 29 |
| Tabel 3.32 Belanja Daerah Kota Surabaya Realisasi Tahun 2014-2015, Target 2016, Estimasi 2017 .....   | III – 36 |
| Tabel 3.33 Pembiayaan Daerah Kota Surabaya Realisasi 2014-2015, Target 2016, Estimasi 2017 .....  | III – 37 |
| Tabel 4.1 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan .....   | IV – 2   |
| Tabel 4.2 Perumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Surabaya .....  | IV – 8   |
| Tabel 4.3. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2017 dengan Bidang-Bidang Pembangunan Nasional .....                      | IV – 37  |
| Tabel 4.4. Penjelasan Program Pembangunan Kota Surabaya Tahun 2017  | IV – 48  |
| Tabel 5.1 Program dan Kegiatan SKPD Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2017 .....   | V – 2    |

**DAFTAR GAMBAR**

|  |         |
|--|---------|
| Gambar 1.1 Alur Penyusunan RKPD .....  | I – 5   |
| Gambar 2.1 Grafik Penduduk Kota Surabaya Tahun 2015 .....                                | II – 5  |
| Gambar 2.2 Inflasi Kota Surabaya (%) Tahun 2010-2015 .....                               | II – 11 |
| Gambar 3.1 Inflasi Kota Surabaya Tahun 2010-2015 dan Perkiraan 2016 (dalam persen) ..... | III – 7 |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan, salah satu dokumen perencanaan pembangunan tersebut adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Hal tersebut berarti, RKPD sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS) yang selanjutnya KUA-PPAS yang telah disepakati digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan RAPBD.

### 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
15. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 nomor 694);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
20. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019;
21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2017;
22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
  24. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005-2025;
  25. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034;
  26. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021;
  27. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya;

### **1.3 Hubungan Antar Dokumen**

Dokumen RKPD merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, maka seharusnya RKPD Kota Surabaya Tahun 2017 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RPJMD Propinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dan RPJMN Tahun 2015-2019. Pada lingkup pemerintah daerah, RKPD digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

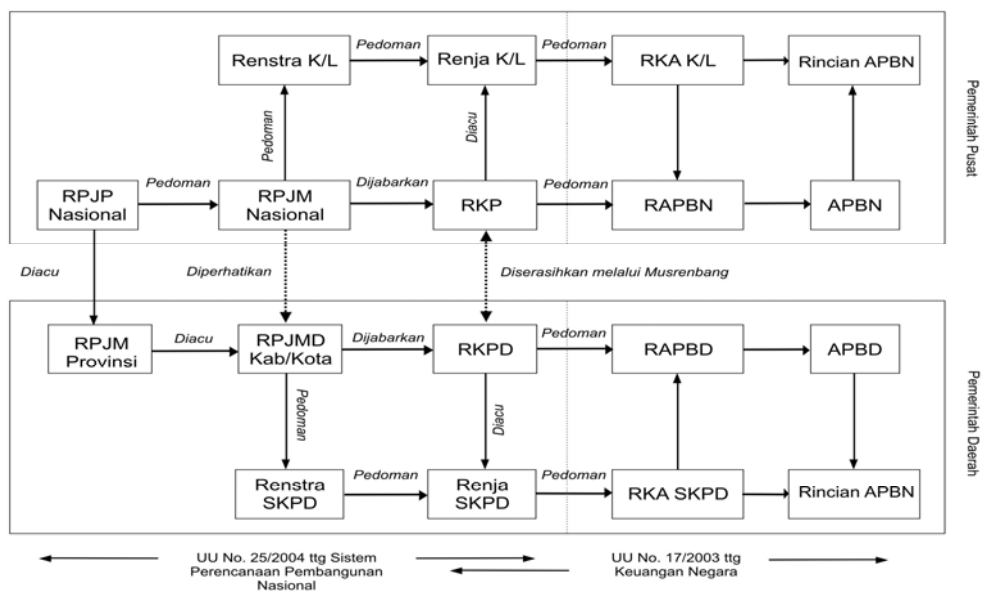
Selanjutnya, dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka RKPD Kota Surabaya akan dijadikan landasan bagi penyusunan KUA serta PPAS dalam rangka penyusunan RAPBD Kota Surabaya Tahun 2017.

Sesuai tahapan penyusunan RKPD dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyebutkan bahwa RKPD perlu mengacu pada RPJMD provinsi dan RPJMN melalui penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota dengan pembangunan provinsi dan prioritas pembangunan nasional. RKPD digunakan untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD Kota Surabaya menyusun Renja SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. Serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam perumusan RKPD meliputi pengolahan data dan informasi, analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis ekonomi dan keuangan daerah sampai dengan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta perumusan program prioritas.

Adapun gambaran tentang hubungan antara RKPD Kota Surabaya dengan dokumen perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.1.

Gambar 1.1  
Alur Penyusunan RKPD



Sumber : UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 17 tentang Keuangan Negara

#### **1.4 Sistematika Dokumen RKPD**

RKPD ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **I. Pendahuluan**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan antar Dokumen
- 1.4. Sistematika Dokumen RKPD
- 1.5. Maksud dan Tujuan

##### **II. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah**

- 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
- 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

##### **III. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan**

- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

##### **IV. Prioritas Dan Sasaran Pembangunan**

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 4.2. Prioritas Pembangunan

##### **V. Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah**

##### **VI. Penutup**

#### **1.5 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya RKPD Tahun 2017 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuan disusunnya RKPD tahun 2017 adalah untuk:

1. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;

2. Menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rancangan Renja SKPD;
3. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
4. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

## **BAB II**

# **EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

### **2. 1. Gambaran Umum Kondisi Daerah**

#### **2.1.1. Aspek Geografis dan Demografi**

Kota Surabaya merupakan ibukota Provinsi Jawa Timur yang terletak antara 07°9' s.d 07°21' Lintang Selatan dan 112°36' s.d 112°54' Bujur Timur. Luas wilayah Kota Surabaya seluruhnya kurang lebih 326,36 km<sup>2</sup> yang terbagi dalam 31 Kecamatan dan 154 Desa/Kelurahan. Batas wilayah Kota Surabaya antara lain; batas sebelah utara adalah Laut Jawa dan Selat Madura, batas sebelah selatan merupakan Kabupaten Sidoarjo dan batas sebelah barat merupakan Kabupaten Gresik, dan batas sebelah timur adalah Selat Madura.

Secara topografi, sebagian besar 0,26 km<sup>2</sup> wilayah Kota Surabaya merupakan dataran rendah dengan ketinggian 3-6 meter di atas permukaan laut pada kemiringan kurang dari 3 persen, sebagian lagi wilayah pada sebelah barat (12,77 persen) dan sebelah selatan (6,52 persen) merupakan daerah perbukitan landai dengan ketinggian 25-50 meter di atas permukaan laut dan pada kemiringan 5-15 persen.

Jenis batuan yang ada terdiri dari 4 jenis yang pada dasarnya merupakan tanah liat atau unit-unit pasir. Sedangkan jenis tanah, sebagian besar berupa tanah alluvial, selebihnya tanah dengan kadar kapur yang tinggi (daerah perbukitan). Sebagaimana daerah tropis lainnya, Surabaya mengenal 2 musim yaitu musim hujan dan kemarau. Curah hujan rata-rata 172 mm, dengan temperatur berkisar maksimum 30°C dan minimum 25°C.

Secara geografis, Kota Surabaya terletak di hilir sebuah Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas yang bermuara di Selat Madura. Beberapa sungai besar yang berfungsi membawa dan menyalurkan banjir yang berasal dari hulu mengalir melintasi Kota Surabaya, antara lain Kali Surabaya dengan debit (Q) rata-rata = 26,70 m<sup>3</sup>/detik, Kali Mas dengan Q rata-rata = 6,26 m<sup>3</sup>/detik dan Kali Jagir dengan Q rata-rata = 7,06 m<sup>3</sup>/detik. Sebagai daerah

hilir, Kota Surabaya dengan sendirinya merupakan daerah limpahan debit air dari sungai yang melintas dan mengakibatkan terjadinya banjir pada musim penghujan.

Secara administrasi pemerintahan Kota Surabaya dikepalai oleh Walikota yang juga membawahi koordinasi atas wilayah administrasi kecamatan yang dikepalai oleh Camat. Jumlah kecamatan yang ada di Kota Surabaya sebanyak 31 kecamatan dan jumlah kelurahan sebanyak 154 kelurahan dan terbagi lagi menjadi 1368 Rukun Warga (RW) dan 9118 Rukun Tetangga (RT). Sebagai kota metropolitan kedua setelah Jakarta, Surabaya secara pola ruang perkembangannya terbagi menjadi:

Area permukiman vertikal baik berupa rumah susun (sederhana) maupun apartemen atau kondominium tersebar di hampir seluruh penjuruk Kota Surabaya, sedangkan area permukiman diarahkan berkembang ke arah barat, timur dan selatan kota.

Area untuk kegiatan jasa dan perdagangan yang dipusatkan di kawasan pusat kota dan pusat-pusat sub kota dan unit pengembangan serta di kawasan yang ditetapkan menjadi kawasan strategis ekonomi antara lain di kawasan kaki jembatan Suramadu dan kawasan teluk Lamong;

Area untuk kegiatan industri dan pergudangan terkonsentrasi di kawasan pesisir utara di kawasan sekitar Pelabuhan Tanjung Perak dan Terminal Multipurpose Teluk Lamong, dan kawasan selatan kota yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Gresik dan Sidoarjo;

Wilayah pesisir khususnya ruang darat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi antara lain permukiman nelayan, tambak garam dan ikan, pergudangan, militer, industri kapal, pelabuhan, wisata pesisir sampai dengan fungsi kawasan lindung di Pantai Timur Surabaya serta terdapat aksesibilitas berupa jalan dan jembatan yang menghubungkan Kota Surabaya dan Pulau Madura (Jembatan Suramadu) dan Jembatan Sukolilo Lor – THP Kenjeran yang membuka akses di kawasan sisi timur laut Kota Surabaya;

Wilayah Ruang laut Surabaya selain dimanfaatkan untuk kegiatan pelayaran baik interinsulair maupun internasional, juga dikembangkan untuk kegiatan penangkapan ikan tradisional, wisata pantai di Kenjeran dan sekitarnya dan kawasan lindung laut di sekitar Pantai Timur Surabaya.



Data klimatologi diperoleh dari 3 sumber yang berbeda yaitu Stasiun Meteorologi dan Geofisika Perak I, Perak II dan Juanda. Ketiga Stasiun ini mempunyai kepentingan yang berbeda, dan diharapkan dapat memberikan informasi klimatologi yang saling melengkapi untuk wilayah Kota Surabaya. Stasiun Perak I yang terletak di Jln. Tanjung Sadari semula mempunyai kepentingan terutama bagi penerbangan pesawat TNI AL di Lanudal Morokrembangan. Saat ini kegiatan penerbangan di Lanudal Morokrembangan sudah tidak ada, dipindah ke Juanda. Meskipun demikian Stasiun Perak I ini masih tetap difungsikan untuk mengetahui pengaruh cuaca daratan Surabaya Utara. Stasiun Perak II terletak di Jln. Kalimas Baru, mempunyai kepentingan terutama bagi dunia pelayaran. Stasiun ini banyak dipengaruhi cuaca laut. Stasiun Juanda sebenarnya terletak di kabupaten Sidoarjo. Sesuai fungsinya, stasiun ini diperlukan bagi dunia penerbangan, baik pesawat sipil maupun pesawat TNI AL. Letaknya yang berbatasan dengan wilayah Surabaya Timur dapat memberikan informasi keadaan cuaca daratan Surabaya Tenggara.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Surabaya memiliki penduduk hingga akhir tahun 2010 2.929.528 jiwa, di tahun 2011 sebesar 3.024.321 jiwa, 3.125.576 jiwa pada tahun 2012, tahun 2013 sebesar 3.200.454 jiwa dan tahun 2014 menjadi 2.853.661 jiwa, sedangkan tahun 2015 sebesar 2.943.528 jiwa. Berikut adalah rincian jumlah penduduk Kota Surabaya menurut Kecamatan pada tahun 2014 dan 2015.

Tabel 2.1  
Jumlah Penduduk Kota Surabaya menurut Kecamatan  
Tahun 2014 - 2015

| No. | KECAMATAN    | 2014    | 2015    |
|-----|--------------|---------|---------|
| 1   | ASEMROWO     | 42.973  | 45.901  |
| 2   | BENOWO       | 55.754  | 58.613  |
| 3   | BUBUTAN      | 101.812 | 103.942 |
| 4   | BULAK        | 40.642  | 42.176  |
| 5   | DUKUH PAKIS  | 58.429  | 60.048  |
| 6   | GAYUNGAN     | 44.092  | 45.415  |
| 7   | GENTENG      | 59.273  | 60.462  |
| 8   | GUBENG       | 136.621 | 139.355 |
| 9   | GUNUNG ANYAR | 52.120  | 54.127  |
| 10  | JAMBANGAN    | 47.548  | 49.310  |

| No.           | KECAMATAN        | 2014             | 2015             |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 11            | KARANG PILANG    | 70.322           | 72.379           |
| 12            | KENJERAN         | 146.757          | 154.531          |
| 13            | KREMBANGAN       | 115.638          | 119.159          |
| 14            | LAKARSANTRI      | 53.472           | 55.403           |
| 15            | MULYOOREJO       | 82.773           | 85.344           |
| 16            | PABEAN CANTIAN   | 82.383           | 82.601           |
| 17            | PAKAL            | 48.484           | 50.866           |
| 18            | RUNGKUT          | 104.046          | 108.494          |
| 19            | SAMBIKEREP       | 58.566           | 60.375           |
| 20            | SAWAHAN          | 201.721          | 207.101          |
| 21            | SEMAMPIR         | 182.531          | 190.158          |
| 22            | SIMOKERTO        | 97.713           | 100.050          |
| 23            | SUKOLILO         | 104.893          | 108.292          |
| 24            | SUKOMANUNGGAL    | 97.909           | 100.794          |
| 25            | TAMBAKSARI       | 217.100          | 223.906          |
| 26            | TANDES           | 89.469           | 91.497           |
| 27            | TEGALSARI        | 101.716          | 104.109          |
| 28            | TENGGILIS MEJOYO | 54.861           | 56.482           |
| 29            | WIYUNG           | 65.742           | 68.080           |
| 30            | WONOCOLO         | 78.337           | 80.436           |
| 31            | WONOKROMO        | 159.964          | 164.122          |
| <b>JUMLAH</b> |                  | <b>2.853.661</b> | <b>2.943.528</b> |

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2015

Tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, komposisi penduduk Surabaya berdasarkan jenis kelamin relatif seimbang antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan dengan jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih besar dari jumlah penduduk perempuan. Secara detail perbandingan jumlah penduduk tersebut dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut.

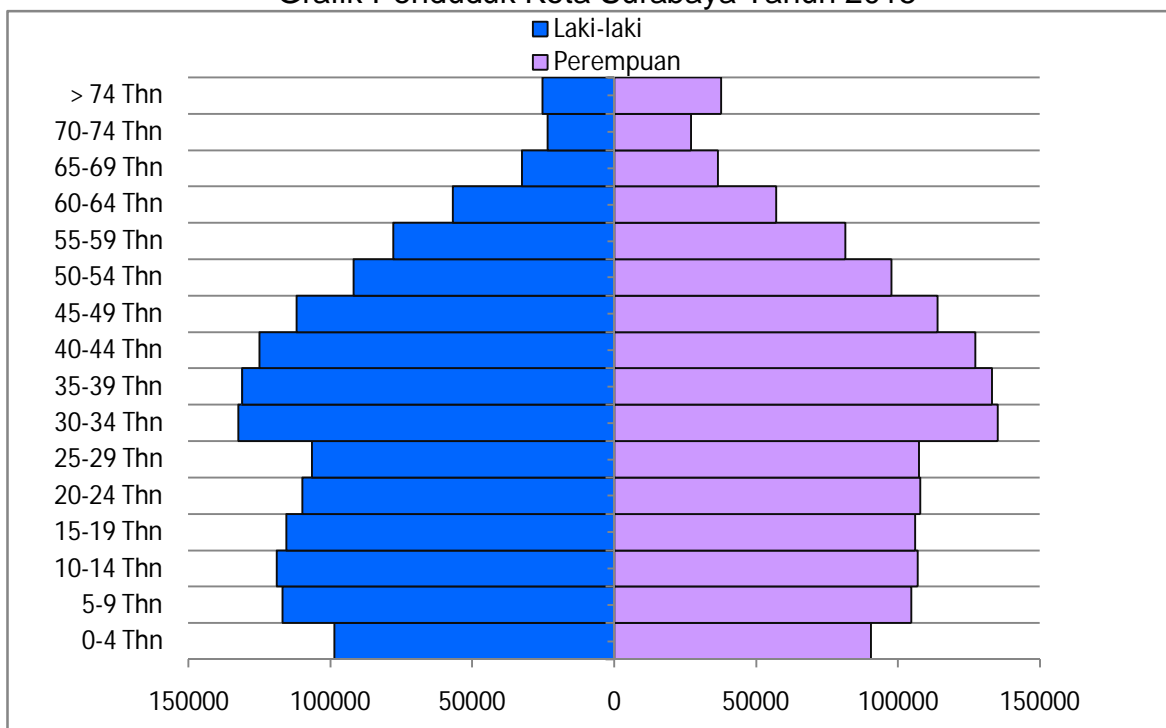
Tabel 2.2  
Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Jenis Kelamin  
Tahun 2014 - Tahun 2015

| Tahun | Laki-laki (Jiwa) | Perempuan (Jiwa) | Jumlah (Jiwa) |
|-------|------------------|------------------|---------------|
| 2014  | 1.430.985        | 1.422.676        | 2.853.661     |
| 2015  | 1.473.640        | 1.469.888        | 2.943.528     |

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2015

Apabila dilihat berdasarkan strukturnya, sampai dengan tahun 2015 penduduk Kota Surabaya lebih banyak berusia produktif yaitu 35 tahun sampai 54 tahun atau sebesar 31,65 persen dari total penduduk, selanjutnya pada usia 15 tahun sampai 34 tahun atau sebesar 31,26 persen. Sedangkan proporsi penduduk usia muda atau anak-anak dengan usia kurang dari 14 tahun sebesar 21,62 persen dan sisanya proporsi penduduk usia tua hanya sebesar 15,47 persen. Dibandingkan dengan tahun 2010 dan 2014, proporsi penduduk usia muda atau anak-anak meningkat sebesar 2,25 persen; proporsi penduduk usia tua sedikit meningkat dari 14,89 persen di tahun 2014 dan proporsi penduduk usia produktif 15-54 tahun cenderung tetap. Grafik Penduduk Kota Surabaya Tahun 2015 pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1  
Grafik Penduduk Kota Surabaya Tahun 2015



Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2015 diolah

Komposisi penduduk kota Surabaya berdasarkan usia sekolah tahun 2015 yaitu usia 0-6 tahun sebanyak 275.069 jiwa, usia 7-12 tahun sebanyak 270.157 jiwa, usia 13-15 tahun sebanyak 138.173 jiwa dan usia 16-18 tahun sebanyak 128.721 jiwa. Rincian data penduduk kota Surabaya berdasarkan usia sekolah tahun 2015 disajikan pada Tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3  
Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Usia Sekolah  
Tahun 2015

| No            | KECAMATAN        | 0-6<br>TAHUN   | 7-12<br>TAHUN  | 13-15<br>TAHUN | 16-18<br>TAHUN |
|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1             | KARANG PILANG    | 6.717          | 6.569          | 3.494          | 3.144          |
| 2             | WONOCOLO         | 7.203          | 6.895          | 3.694          | 3.398          |
| 3             | RUNGKUT          | 10.601         | 9.821          | 5.209          | 4.736          |
| 4             | WONOKROMO        | 13.946         | 14.935         | 7.885          | 7.590          |
| 5             | TEGALSARI        | 8.807          | 8.721          | 4.695          | 4.441          |
| 6             | SAWAHAN          | 19.132         | 19.332         | 9.884          | 9.036          |
| 7             | GENTENG          | 5.052          | 5.061          | 2.726          | 2.538          |
| 8             | GUBENG           | 12.088         | 12.136         | 6.327          | 5.904          |
| 9             | SUKOLILO         | 10.244         | 9.587          | 4.793          | 4.473          |
| 10            | TAMBAK SARI      | 20.718         | 20.100         | 10.327         | 9.490          |
| 11            | SIMOKERTO        | 9.135          | 8.821          | 4.537          | 4.380          |
| 12            | PABEAN CANTIAN   | 7.004          | 7.282          | 3.636          | 3.567          |
| 13            | BUBUTAN          | 9.283          | 9.544          | 5.015          | 4.733          |
| 14            | TANDES           | 9.065          | 8.615          | 4.062          | 3.711          |
| 15            | KREMBANGAN       | 10.808         | 10.628         | 5.564          | 5.214          |
| 16            | SEMAMPIR         | 18.323         | 18.143         | 9.080          | 8.513          |
| 17            | KENJERAN         | 16.118         | 15.745         | 7.899          | 7.541          |
| 18            | LAKAR SANTRI     | 5.659          | 5.526          | 2.751          | 2.476          |
| 19            | BENOWO           | 5.952          | 5.979          | 2.983          | 2.885          |
| 20            | WIYUNG           | 6.537          | 6.240          | 3.318          | 3.062          |
| 21            | DUKUH PAKIS      | 5.497          | 5.231          | 2.688          | 2.445          |
| 22            | GAYUNGAN         | 3.899          | 3.844          | 2.051          | 1.893          |
| 23            | JAMBANGAN        | 4.885          | 4.543          | 2.225          | 2.057          |
| 24            | TENGGILIS MEJOYO | 5.175          | 4.878          | 2.461          | 2.280          |
| 25            | GUNUNG ANYAR     | 5.374          | 5.040          | 2.436          | 2.365          |
| 26            | MULYOOREJO       | 7.803          | 7.536          | 3.893          | 3.462          |
| 27            | SUKOMANUNGGAL    | 9.600          | 9.195          | 4.543          | 4.234          |
| 28            | ASEMROWO         | 4.776          | 4.807          | 2.322          | 2.153          |
| 29            | BULAK            | 4.355          | 4.322          | 2.235          | 1.984          |
| 30            | PAKAL            | 5.171          | 5.314          | 2.637          | 2.484          |
| 31            | SAMBI KEREP      | 6.142          | 5.767          | 2.803          | 2.532          |
| <b>JUMLAH</b> |                  | <b>275.069</b> | <b>270.157</b> | <b>138.173</b> | <b>128.721</b> |

Sumber Data: Dinas Pendidikan, 2015

## 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi

#### a. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu wilayah dalam satu

tahun. PDRB umumnya digunakan sebagai indikator kinerja perekonomian suatu negara. Penghitungan PDRB menggunakan dua macam harga, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dapat digunakan untuk melihat struktur ekonomi, sementara PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) digunakan untuk melihat nilai pertumbuhan ekonomi.

Berbeda dengan perhitungan PDRB sebelumnya, dasar perhitungan PDRB saat ini tidak lagi menggunakan angka tahun dasar 2000 melainkan menggunakan angka tahun dasar 2010. Perubahan tahun dasar PDRB dilakukan BPS setiap 5 atau 10 tahun sekali yang mana perubahan tersebut bertujuan untuk mengukur keakuratan perkembangan perekonomian terkini. Perubahan tahun dasar PDRB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 System of National Accounts (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka Supply and Use Tables (SUT). Salah satu implikasi perubahan ini adalah meningkatnya nominal PDRB dan perubahan struktur ekonomi yang mulanya 9 sektor ekonomi menjadi 17 kategori lapangan usaha.

Untuk mengetahui perkembangan PDRB Kota Surabaya Atas Dasar Harga Berlaku Seri Tahun Dasar 2010 pada tahun 2014 – 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.4. Dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa PDRB Kota Surabaya ADHB menunjukkan tren yang semakin meningkat meskipun peningkatannya mengalami sedikit perlambatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nilai PDRB ADHB Kota Surabaya pada tahun 2014 sebesar Rp365.073.140,3 juta dan pada tahun 2015 sebesar Rp407.703.251,8 juta.

Berdasarkan strukturnya, sampai saat ini kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masih menjadi leading sector dalam pembentukan PDRB Kota Surabaya, dengan kontribusi sebesar 26,97 persen pada tahun 2015. Pada urutan kedua, kategori dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB yaitu kategori industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 19,46 persen pada tahun 2015, diikuti kategori penyediaan akomodasi makan dan minum dengan kontribusi sebesar 15,30 persen. Berikut ini adalah rekapitulasi nilai dan kontribusi kategori dalam PDRB ADHB Tahun 2014-2015.

Tabel 2.4  
 Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan  
 Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Seri Tahun Dasar 2010  
 Tahun 2014 – 2015 (dalam Juta Rp)

| kategori | Uraian   | 2014                  |               | 2015*                 |               |
|----------|--|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
|          |  | (Juta Rp)             | (%)           | (Juta Rp)             | (%)           |
| A        | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                            | 671.564,32            | 0,18          | 750.070,84            | 0,18          |
| B        | Pertambangan dan Penggalian                                    | 24.336,14             | 0,01          | 27.587,48             | 0,01          |
| C        | Industri Pengolahan  | 70.661.843,08         | 19,36         | 79.334.006,95         | 19,46         |
| D        | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 1.978.907,22          | 0,54          | 1.997.909,41          | 0,49          |
| E        | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 572.049,35            | 0,16          | 613.427,06            | 0,15          |
| F        | Konstruksi   | 37.891.835,80         | 10,38         | 41.833.616,63         | 10,26         |
| G        | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 99.966.844,35         | 27,38         | 109.971.647,28        | 26,97         |
| H        | Transportasi dan Pergudangan                                   | 18.927.734,93         | 5,18          | 21.544.921,57         | 5,28          |
| I        | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 54.062.910,64         | 14,81         | 62.389.404,16         | 15,30         |
| J        | Informasi dan Komunikasi                                       | 20.137.828,27         | 5,52          | 22.080.942,63         | 5,42          |
| K        | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 19.275.906,51         | 5,28          | 21.872.423,78         | 5,36          |
| L        | Real Estate  | 9.372.176,45          | 2,57          | 10.420.100,50         | 2,56          |
| M,N      | Jasa Perusahaan  | 8.889.028,16          | 2,43          | 9.814.203,90          | 2,41          |
| O        | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 5.183.606,08          | 1,42          | 5.420.318,82          | 1,33          |
| P        | Jasa Pendidikan  | 9.259.950,73          | 2,54          | 10.444.758,10         | 2,56          |
| Q        | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 2.814.318,82          | 0,77          | 3.210.798,99          | 0,79          |
| R,S,T,U  | Jasa lainnya   | 5.382.299,44          | 1,47          | 5.977.113,72          | 1,47          |
|          | <b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>                          | <b>365.073.140,32</b> | <b>100,00</b> | <b>407.703.251,80</b> | <b>100,00</b> |

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2016 \*) Angka Sementara

Tabel 2.5  
 Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan  
 Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Seri Tahun Dasar 2010  
 Tahun 2014–2015 (dalam Juta Rp)

| kategori | Uraian   | 2014                  |               | 2015*                 |               |
|----------|--|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
|          |  | (Juta Rp)             | (%)           | (Juta Rp)             | (%)           |
| A        | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                            | 522.264,93            | 0,17          | 544.254,16            | 0,17          |
| B        | Pertambangan dan Penggalian                                    | 18.674,88             | 0,01          | 19.287,42             | 0,01          |
| C        | Industri Pengolahan  | 59.358.226,45         | 19,44         | 63.544.418,51         | 19,36         |
| D        | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 1.569.076,33          | 0,51          | 1.519.805,94          | 0,47          |
| E        | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 474.422,91            | 0,16          | 479.309,46            | 0,15          |
| F        | Konstruksi   | 31.368.882,67         | 10,27         | 32.287.990,94         | 9,98          |
| G        | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 86.711.515,05         | 28,4          | 91.681.928,75         | 28,32         |
| H        | Transportasi dan Pergudangan                                   | 14.843.763,22         | 4,86          | 15.878.997,20         | 4,91          |
| I        | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 42.503.082,56         | 13,92         | 45.780.530,20         | 14,14         |
| J        | Informasi dan Komunikasi                                       | 19.701.365,86         | 6,45          | 20.938.611,64         | 6,47          |
| K        | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 14.842.875,73         | 4,86          | 15.852.550,77         | 4,90          |
| L        | Real Estate  | 8.264.384,54          | 2,71          | 8.774.297,06          | 2,71          |
| M,N      | Jasa Perusahaan  | 7.011.356,21          | 2,3           | 7.437.646,67          | 2,30          |
| O        | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 4.004.411,47          | 1,31          | 4.032.041,91          | 1,25          |
| P        | Jasa Pendidikan  | 7.144.694,86          | 2,34          | 7.593.381,70          | 2,35          |
| Q        | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 2.348.390,77          | 0,77          | 2.527.338,14          | 0,78          |
| R,S,T,U  | Jasa lainnya   | 4.620.617,78          | 1,51          | 4.790.194,45          | 1,48          |
|          | <b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>                          | <b>305.308.006,20</b> | <b>100,00</b> | <b>323.682.584,92</b> | <b>100,00</b> |

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2016 \*) Angka Sementara

Tabel 2.5 menunjukkan bahwa PDRB Kota Surabaya ADHK terus mengalami peningkatan selaras dengan peningkatan pada PDRB ADHB. Peningkatan ini didukung oleh seluruh peningkatan kategori ekonomi pembentuk PDRB. Nilai PDRB ADHK Kota Surabaya pada tahun 2014 sebesar Rp305.308.006,2 juta dan pada tahun 2015 sebesar Rp323.682.584,9 juta.

Berdasarkan komposisinya, sama halnya dengan PDRB ADHB, kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 menjadi leading sector dalam pembentukan PDRB Kota Surabaya terbesar dengan kontribusi masing-masing tahun dengan nilai Rp86.711.515,1 juta pada tahun 2014, dan pada tahun 2015 sebesar Rp91.681.928,7 juta. Adapun kategori lapangan usaha lainnya yang memberikan kontribusi tinggi selanjutnya yaitu kategori industri pengolahan dan penyedia akomodasi dan makanan minuman. Berikut ini

disajikan tabel kontribusi kategori lapangan usaha PDRB ADHB dan ADHK Kota Surabaya tahun 2014-2015 dalam satuan persentase

Tabel 2.6  
Perkembangan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan (ADHK) Seri Tahun Dasar 2010 Tahun 2014 –2015 (dalam Juta Rp)

| kategori | Uraian   | 2014          |               | 2015*         |               |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |  | ADHB          | ADHK          | ADHB          | ADHK          |
| A        | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                            | 0,18          | 0,17          | 0,18          | 0,17          |
| B        | Pertambangan dan Penggalian                                    | 0,01          | 0,01          | 0,01          | 0,01          |
| C        | Industri Pengolahan  | 19,36         | 19,44         | 19,46         | 19,36         |
| D        | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 0,54          | 0,51          | 0,49          | 0,47          |
| E        | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 0,16          | 0,16          | 0,15          | 0,15          |
| F        | Konstruksi   | 10,38         | 10,27         | 10,26         | 9,98          |
| G        | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 27,38         | 28,4          | 26,97         | 28,32         |
| H        | Transportasi dan Pergudangan                                   | 5,18          | 4,86          | 5,28          | 4,91          |
| I        | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 14,81         | 13,92         | 15,30         | 14,14         |
| J        | Informasi dan Komunikasi                                       | 5,52          | 6,45          | 5,42          | 6,47          |
| K        | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 5,28          | 4,86          | 5,36          | 4,90          |
| L        | Real Estate  | 2,57          | 2,71          | 2,56          | 2,71          |
| M,N      | Jasa Perusahaan  | 2,43          | 2,3           | 2,41          | 2,30          |
| O        | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 1,42          | 1,31          | 1,33          | 1,25          |
| P        | Jasa Pendidikan  | 2,54          | 2,34          | 2,56          | 2,35          |
| Q        | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 0,77          | 0,77          | 0,79          | 0,78          |
| R,S,T,U  | Jasa lainnya   | 1,47          | 1,51          | 1,47          | 1,48          |
|          | <b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>                          | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2016 \*) Angka Sementara

## b. Inflasi

Mencermati perkembangan inflasi selama 5 tahun terakhir, inflasi rata-rata Kota Surabaya mulai tahun 2011-2015 sebesar 5,59 persen. Angka tersebut tergolong dalam inflasi ringan yang nilainya dibawah angka 10 persen. Inflasi yang ringan dibutuhkan dalam perekonomian untuk mendorong produsen agar memproduksi lebih banyak barang dan jasa sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

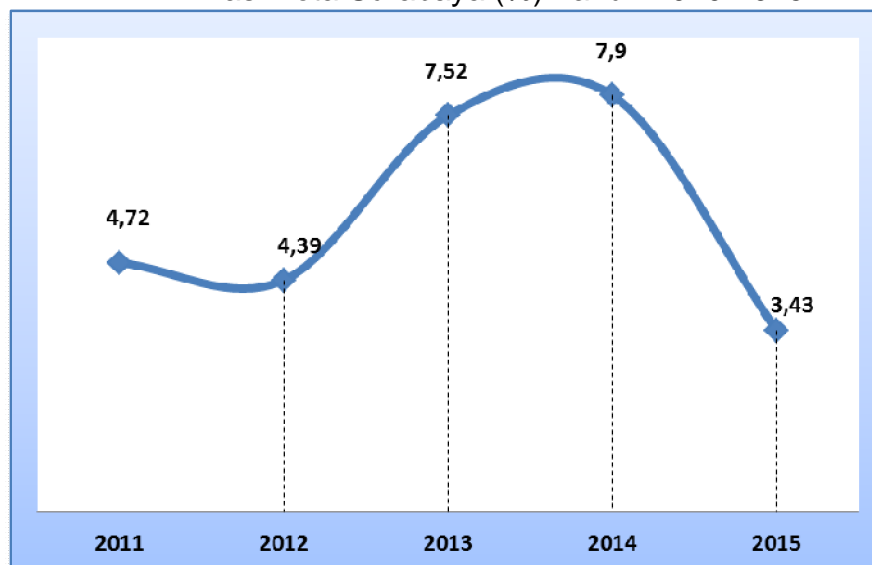
Inflasi Kota Surabaya pada tahun 2014 mencapai 7,90 persen. Tekanan inflasi terbesar sepanjang tahun 2014 terjadi pada inflasi yang berasal dari kelompok administered price seperti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, kenaikan tarif listrik serta kenaikan harga bahan



bakar rumah tangga. Ditambah lagi, pemicu inflasi tahun 2014 yaitu meningkatnya harga tarif angkutan kota sebagai dampak dari kenaikan harga bahan bakar ditahun tersebut.

Tekanan inflasi mereda di tahun 2015 yang ditunjukkan oleh capaian inflasi Kota Surabaya pada tahun 2015 yang terkendali sebesar 3,43 persen. Capaian realisasi tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh faktor permintaan dan ketersediaan. Sehingga pada tahun 2015, inflasi lebih banyak disumbang oleh komoditi dalam kelompok *volatile food* (bahan makanan) sementara kelompok administered price cenderung menjadi penahan laju inflasi selama tahun 2015 ini. Inflasi pada kelompok volatile food tersebut dipengaruhi oleh kemarau panjang yang disebabkan oleh adanya fenomena El Nino yang mengakibatkan pola tanam dan panen tidak berjalan sesuai dengan pola normalnya yang akhirnya mengganggu ketersediaan pasokan bahan makanan. Komoditi-komoditi penyumbang terbesar inflasi Kota Surabaya selama tahun 2015 beras, daging ayam ras, tarif kereta api, tarif listrik, nasi dengan lauk, soto, daging sapi, bawang merah dan telur ayam ras. Meskipun rata-rata inflasi Kota Surabaya tergolong dalam inflasi rendah namun tetap perlu dilakukan pemantauan (kontrol) secara berkala terhadap komoditas-komoditas yang berpotensi memicu inflasi Kota Surabaya meningkat lebih tinggi.

Gambar 2.2  
Inflasi Kota Surabaya (%) Tahun 2010-2015



Sumber: BPS Kota Surabaya, 2016

Tabel 2.7  
Inflasi Kota Surabaya (%) Tahun 2010-2015

| Tahun       | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|
| Inflasi (%) | 7,33 | 4,72 | 4,39 | 7,52 | 7,9  | 3,43 |

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2016

### c. PDRB Per Kapita

Kinerja ekonomi suatu wilayah dapat dinilai dengan berbagai ukuran. Secara umum, kinerja tersebut diukur melalui sebuah besaran yaitu PDRB perkapita. PDRB per kapita merupakan konsep yang paling sering dipakai sebagai tolok ukur tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk di suatu wilayah. PDRB perkapita merupakan gambaran pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk sebagai keikutsertaannya dalam proses produksi. PDRB per kapita atas harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah. Besaran PDRB per kapita diperoleh dari output yang dihasilkan pada tahun tertentu dibagi jumlah penduduk pada tahun tersebut. Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk membandingkan kesejahteraan atau standar hidup suatu wilayah dari tahun ke tahun. Dengan melakukan perbandingan seperti itu, kita dapat mengamati apakah kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah secara rata-rata telah meningkat. Berikut rangkuman data yang menggambarkan tingkat pendapatan perkapita penduduk di Kota Surabaya tahun 2014-2015.

Tabel 2.8  
PDRB Perkapita Dan Pendapatan Regional Perkapita Kota Surabaya Tahun 2014-2015

| Tahun                             | 2014*      | 2015**     |
|-----------------------------------|------------|------------|
| Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun | 2.853.661  | 2.870.200  |
| ATAS DASAR HARGA BERLAKU          |            |            |
| PDRB (Milyar Rp)                  | 365.073,14 | 407.303,25 |
| PDRB Per Kapita (Juta Rp)         | 127,93     | 141,91     |
| ATAS DASAR HARGA KONSTAN          |            |            |
| PDRB (Milyar Rp)                  | 305.308,01 | 323.682,58 |
| PDRB Per Kapita (Juta Rp)         | 106,99     | 112,77     |

Sumber: BPS Kota Surabaya, \*)Angka Sementara \*\*)Data Proyeksi, data dirilis tahun (t+1)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, PDRB perkapita Kota Surabaya Atas Dasar Harga Konstan menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2014 sebesar Rp106,99 juta/jiwa/tahun. Sedangkan pada tahun 2015 PDRB perkapita meningkat menjadi Rp112,77 juta/jiwa/tahun.

### **2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial**

#### **a. Pendidikan**

Kesejahteraan sosial di bidang pendidikan diukur melalui beberapa indikator, di antaranya meliputi Angka Melek Huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, serta Angka Partisipasi Murni.

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang berperandalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Semakin baik tingkat pendidikan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Semakin baik kualitas sumber daya manusia menjadikan semakin baik pula kualitas hidup masyarakat.

Dalam rangka peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan, Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan berbagai macam program dan kegiatan di bidang pendidikan baik melalui jalur pendidikan formal maupun non formal. Adapun indikator yang menunjukkan hasil kinerja bidang pendidikan pada jalur non formal adalah angka melek huruf (AMH). Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka melek huruf ini dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program pemberantasan buta huruf, menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media serta menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis.

Angka melek huruf penduduk Kota Surabaya sebesar 100 persen pada tahun 2014-2015. Pada tahun 2014 jumlah penduduk Kota Surabaya dengan usia 15 tahun ke atas tercatat sebanyak 2.199.721 jiwa, pada tahun 2015 sebanyak 2.121.329 dan seluruhnya dapat membaca dan menulis.

Rekapitulasi data perkembangan AMH Kota Surabaya disajikan pada tabel 2.9 sebagai berikut.

Tabel 2.9  
Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Surabaya  
Tahun 2014 - 2015

| No | Uraian   | 2014      | 2015      |
|----|--|-----------|-----------|
| 1  | Jumlah Penduduk Usia Diatas 15 tahun yang Bisa Membaca dan Menulis | 2.199.721 | 2.121.329 |
| 2  | Jumlah Penduduk Usia 15 tahun Keatas                               | 2.199.721 | 2.121.329 |
| 3  | Angka Melek Huruf (%)  | 100,00%   | 100,00%   |

Sumber: Dinas Pendidikan, 2016

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. APM merupakan indikator yang melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar usia siswa di jenjang tersebut.

APM tahun 2014 jenjang SD/MI sebesar 97,02, jenjang SMP/MTs sebesar 95,87 persen; jenjang SMA/MA/SMK sebesar 93,47 persen. APM tahun 2015 jenjang SD/MI sebesar 95,02, jenjang SMP/MTs sebesar 95,03 persen, jenjang SMA/MA/SMK sebesar 92,55 persen. Rekap data APM Kota Surabaya tahun 2014-2015 disajikan pada tabel 2.10 sebagai berikut.

Tabel 2.10  
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Surabaya  
Tahun 2014-2015

| No. | Jenjang Pendidikan  | 2014    | 2015    |
|-----|---|---------|---------|
| 1   | SD/MI   |         |         |
| 1.1 | Jumlah Siswa Kelompok usia 7-12 Tahun yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SD/MI       | 252.434 | 256.703 |
| 1.2 | Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun  | 260.193 | 270.157 |
| 1.3 | APM SD/MI (%)   | 97,02   | 95,02   |
| 2   | SMP/MTs   |         |         |
| 2.1 | Jumlah Siswa Kelompok usia 13-15 Tahun yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SMP/MTs    | 124.018 | 131.306 |
| 2.2 | Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun   | 129.367 | 138.173 |
| 2.3 | APM SMP/MTs (%)   | 95,87   | 95,03   |
| 3   | SMA/MA/SMK  |         |         |
| 3.1 | Jumlah Siswa Kelompok usia 16-18 Tahun yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SMA/MA/SMK | 118.692 | 119.131 |
| 3.2 | Jumlah Penduduk Kelompok Usia 16-18 Tahun   | 126.983 | 128.721 |
| 3.3 | APM SMA/MA/SMK (%)  | 93,47   | 92,55   |

Sumber: Dinas Pendidikan, 2016

Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK ini berfungsi untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan sekaligus merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

APK jenjang SD/MI pada tahun 2014 sebesar 108,3 persen, dan pada tahun 2015 sebesar 105,24 persen. Sedangkan APK jenjang SMP/MTs, tahun 2014 sebesar 100,37 persen, dan pada tahun 2015 sebesar 105,03 persen. APK jenjang SMA/MA/SMK pada tahun 2014 sebesar 121,85 persen, dan pada tahun 2015 sebesar 105,08 persen. Rekap data APK Kota Surabaya tahun 2014-2015 disajikan pada Tabel 2.11 sebagai berikut.

Tabel 2.11  
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Surabaya  
Tahun 2010-2015

| No. | Jenjang Pendidikan  | 2014    | 2015    |
|-----|---|---------|---------|
| 1   | SD/MI   |         |         |
| 1.1 | Jumlah Seluruh Siswa yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SD/MI      | 281.789 | 284.313 |
| 1.2 | Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun                              | 260.193 | 270.157 |
| 1.3 | APK SD/MI (%)   | 108,3   | 105,24  |
| 2   | SMP/MTs   |         |         |
| 2.1 | Jumlah Seluruh Siswa yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SMP/MTs    | 129.845 | 145.123 |
| 2.2 | Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun                             | 129.367 | 138.173 |
| 2.3 | APK SMP/MTs (%)   | 100,37  | 105,03  |
| 3   | SMA/MA/SMK  |         |         |
| 3.1 | Jumlah Seluruh Siswa yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SMA/MA/SMK | 154.732 | 135.260 |
| 3.2 | Jumlah Penduduk Kelompok Usia 16-18 Tahun                             | 126.983 | 128.721 |
| 3.3 | APK SMA/MA/SMK (%)  | 121,85  | 105,08  |

Sumber: Dinas Pendidikan, 2016

## b. Kesehatan

Kesejahteraan sosial di bidang kesehatan diukur melalui beberapa indikator, diantaranya meliputi Angka Kelangsungan Hidup Bayi dan Angka Usia Harapan Hidup.

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah salah satunya dapat diukur dengan meningkatnya angka harapan hidup (AHH) dan penurunan balita gizi buruk. Pada tahun 2010 hingga 2013, AHH selalu mengalami peningkatan yakni 71,01 persen pada tahun 2010, 71,27 persen pada tahun 2011, 71,53 persen pada tahun 2012 dan 72,12 persen pada tahun 2013 dan pada tahun 2014 sebesar 73,85. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Surabaya disajikan pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12  
Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Surabaya Tahun 2010- 2014

| Indikator               | Tahun |       |       |       |       |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                         | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  |
| Angka Harapan Hidup (%) | 71,01 | 71,27 | 71,53 | 72,12 | 73,85 |

Sumber: BPS Kota Surabaya, April 2015

Status gizi masyarakat pada balita di Kota Surabaya secara umum terus menunjukkan kemajuan signifikan yang ditandai dengan menurunnya angka prevalensi gizi buruk pada balita. Persentase gizi buruk tahun 2014 sebesar 0,21 persen dan 0,16 persen pada tahun 2015. Berikut ini merupakan rekapitulasi data persentase balita gizi buruk tahun 2014-2015.

Tabel 2.13  
Perkembangan Balita Gizi Buruk Kota Surabaya  
Tahun 2014-2015

| Tahun | Jumlah Balita Gizi Buruk | Jumlah Balita Disurvey | % Gizi Buruk |
|-------|--------------------------|------------------------|--------------|
| 2014  | 366                      | 174.087                | 0,21         |
| 2015  | 282                      | 176.728                | 0,16         |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2015

### c. Ketenagakerjaan

Dengan semakin bertambahnya penduduk maka tidak bisa dipungkiri bahwa jumlah penduduk usia kerja (tenaga kerja) dari tahun ke tahun semakin meningkat. Mengingat jumlah penduduk Kota Surabaya didominasi oleh penduduk usia produktif, maka ketersediaan lapangan kerja menjadi indikator yang penting, di samping mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat usia produktif.

Peningkatan kegiatan ekonomi di berbagai sektor akan memberikan dampak positif baik langsung maupun tidak langsung terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan. Peningkatan kesempatan kerja yang diikuti dengan peningkatan produktivitas diharapkan mampu menambah penghasilan/pendapatan masyarakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.14 menunjukkan jumlah angkatan kerja Kota Surabaya yang bekerja dan mencari pekerjaan. Berikut adalah rekap data penduduk bekerja dan mencari kerja di Kota Surabaya tahun 2014-2015.

Tabel 2.14  
Rasio Penduduk Yang Bekerja Kota Surabaya Menurut Golongan Umur  
Tahun 2014-2015

| No. | Golongan Umur | 2014           |                   |           | 2015           |                   |           |
|-----|---------------|----------------|-------------------|-----------|----------------|-------------------|-----------|
|     |               | Angkatan Kerja |                   | Jumlah    | Angkatan Kerja |                   | Jumlah    |
|     |               | Bekerja        | Mencari Pekerjaan |           | Bekerja        | Mencari Pekerjaan |           |
| 1   | 15-19         | 51,799         | 25,307            | 77,106    | 45,923         | 23,289            | 69,212    |
| 2   | 20-24         | 134,873        | 31,449            | 166,322   | 156,253        | 38,194            | 194,447   |
| 3   | 25-29         | 188,850        | 8,725             | 197,575   | 188,405        | 19,949            | 208,354   |
| 4   | 30-34         | 230,950        | 5,255             | 236,205   | 201,262        | 5,362             | 206,624   |
| 5   | 35-39         | 177,735        | 4,686             | 182,421   | 178,120        | 2,001             | 180,121   |
| 6   | 40-44         | 188,379        | 1,071             | 189,450   | 162,859        | 3,730             | 166,589   |
| 7   | 45-49         | 128,094        | 2,192             | 130,286   | 141,305        | 3,140             | 144,445   |
| 8   | 50-54         | 126,944        | 1,190             | 128,134   | 120,863        | 2,543             | 123,406   |
| 9   | 55-59         | 73,830         | 3,730             | 77,560    | 90,158         | 2,576             | 92,734    |
| 10  | 60+           | 78,703         | 1,840             | 80,543    | 80,032         | 2,130             | 82,162    |
|     | Jumlah        | 1,380,157      | 85,445            | 1,465,602 | 1,365,180      | 102,914           | 1,468,094 |

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2014

### 2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan seni, budaya dan olahraga merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari pembinaan dan pembangunan bangsa dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Insani, terutama diarahkan pada peningkatan kesehatan jasmani dan rohani, serta untuk membentuk watak dan kepribadian yang memiliki disiplin dan sportivitas yang tinggi. Di samping itu, pembangunan seni, budaya dan olahraga juga dijadikan sebagai alat untuk memperlihatkan eksistensi bangsa melalui pembinaan prestasi yang setinggi-tingginya. Untuk melaksanakan pembangunan seni, budaya dan olahraga, perlu dilakukan berbagai upaya penggalangan dan penggalian terhadap potensi yang ada, baik dalam bidang sistem pembinaan,

lembaga/organisasi, maupun adanya landasan hukum yang digunakan sebagai dasar pembangunan seni, budaya dan keolahragaan.

Dasar pembangunan seni budaya tentu adalah minat masyarakat kota Surabaya terhadap seni budaya itu sendiri, terutama minat akan budaya lokal. Jumlah grup kesenian yang ada di Kota Surabaya tahun 2014 sebanyak 226, dan tahun 2015 sebanyak 70 grup kesenian. Sedangkan jumlah gedung kesenian, klub olahraga, gedung olahraga jumlahnya tetap.

Tabel 2.15  
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kota Surabaya  
Tahun 2014-2015

| No. | Capaian Pembangunan    | 2014 | 2015 |
|-----|------------------------|------|------|
| 1   | Jumlah Grup Kesenian   | 226  | 70   |
| 2   | Jumlah Gedung Kesenian | 4    | 4    |
| 3   | Jumlah Klub Olahraga   | 43   | 43   |
| 4   | Jumlah Gedung Olahraga | 3    | 3    |

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Dinas Pemuda dan Olahraga, 2015

### 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

#### 2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

Penganalisisan gambaran umum kondisi daerah dilakukan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan:

##### a. Pendidikan

Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pembangunan pendidikan Kota Surabaya di arahkan pada perluasan dan pemerataan pendidikan. Hal ini dapat dijelaskan antara lain melalui Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Kelulusan (AL) dan Angka Putus Sekolah (APS).

##### Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah persentase jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK ini berfungsi untuk menunjukkan tingkat



partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan sekaligus merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

APK jenjang SD/MI pada tahun pada tahun 2014 sebesar 108,3 persen, dan pada tahun 2015 sebesar 105,24 persen. Sedangkan APK jenjang SMP/MTs 100,37 persen tahun 2014, dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 105,03 persen. APK jenjang SMA/MA/SMK pada tahun 2014 sebesar 121,85 persen dan pada tahun 2015 sebesar 105,08 persen. Rekapitulasi data perkembangan APK Kota Surabaya tahun 2014-2015 disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.16  
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Surabaya  
Tahun 2014-2015

| No. | Jenjang Pendidikan  | 2014    | 2015    |
|-----|---|---------|---------|
| 1   | SD/MI   |         |         |
| 1.1 | Jumlah Seluruh Siswa yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SD/MI      | 281.789 | 284.313 |
| 1.2 | Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun                              | 260.193 | 270.157 |
| 1.3 | APK SD/MI (%)   | 108,3   | 105,24  |
| 2   | SMP/MTs   |         |         |
| 2.1 | Jumlah Seluruh Siswa yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SMP/MTs    | 129.845 | 145.123 |
| 2.2 | Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun                             | 129.367 | 138.173 |
| 2.3 | APK SMP/MTs (%)   | 100,37  | 105,03  |
| 3   | SMA/MA/SMK  |         |         |
| 3.1 | Jumlah Seluruh Siswa yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SMA/MA/SMK | 154.732 | 135.260 |
| 3.2 | Jumlah Penduduk Kelompok Usia 16-18 Tahun                             | 126.983 | 128.721 |
| 3.3 | APK SMA/MA/SMK (%)  | 121,85  | 105,08  |

Sumber: Dinas Pendidikan, 2016

Tabel 2.17  
Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Surabaya Menurut Kecamatan  
Tahun 2015

| KECAMATAN         | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI |                                       |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs |   |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK |  |         |
|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------|---------------------------------------|---|---------|--|--|---------|
|                   | jumlah penduduk usia 7-12 tahun     | jumlah seluruh siswa di jenjang SD/MI | APK     | jumlah penduduk usia 13-15 tahun      | jumlah seluruh siswa di jenjang SMP/MTs | APK     | Jumlah penduduk usia 16-18 tahun         | jumlah seluruh siswa di jenjang SMA/MA/SMK | APK     |
| Asemrowo          | 4807                                | 3777                                  | 78,57%  | 2322                                  | 1786                                    | 76,92%  | 2153                                     | 643  | 29,87%  |
| Benowo            | 5979                                | 6436                                  | 107,64% | 2983                                  | 1460                                    | 48,94%  | 2885                                     | 2360                                       | 81,80%  |
| Bubutan           | 9544                                | 9275                                  | 97,18%  | 5015                                  | 2804                                    | 55,91%  | 4733                                     | 2545                                       | 53,77%  |
| Bulak             | 4322                                | 5950                                  | 137,67% | 2235                                  | 2712                                    | 121,34% | 1984                                     | 1900                                       | 95,77%  |
| Dukuh Pakis       | 5231                                | 6322                                  | 120,86% | 2688                                  | 2981                                    | 110,90% | 2445                                     | 2961                                       | 121,10% |
| Gayungan          | 3844                                | 6546                                  | 170,29% | 2051                                  | 2953                                    | 143,98% | 1893                                     | 5706                                       | 301,43% |
| Genteng           | 5061                                | 7256                                  | 143,37% | 2726                                  | 5973                                    | 219,11% | 2538                                     | 13065                                      | 514,78% |
| Gubeng            | 12136                               | 11924                                 | 98,25%  | 6327                                  | 4521                                    | 71,46%  | 5904                                     | 11618                                      | 196,78% |
| Gununganyar       | 5040                                | 4710                                  | 93,45%  | 2436                                  | 1602                                    | 65,76%  | 2365                                     | 570  | 24,10%  |
| Jambangan         | 4543                                | 4325                                  | 95,20%  | 2225                                  | 3878                                    | 174,29% | 2057                                     | 3372                                       | 163,93% |
| Karangpilang      | 6569                                | 7167                                  | 109,10% | 3494                                  | 4432                                    | 126,85% | 3144                                     | 1509                                       | 48,00%  |
| Kenjeran          | 15745                               | 16344                                 | 103,80% | 7899                                  | 8538                                    | 108,09% | 7541                                     | 3595                                       | 47,67%  |
| Krembangan        | 10628                               | 12888                                 | 121,26% | 5564                                  | 9531                                    | 171,30% | 5214                                     | 6211                                       | 119,12% |
| Lakarsantri       | 5526                                | 6850                                  | 123,96% | 2751                                  | 4950                                    | 179,93% | 2476                                     | 2229                                       | 90,02%  |
| Mulyorejo         | 7536                                | 9546                                  | 126,67% | 3893                                  | 6163                                    | 158,31% | 3462                                     | 5484                                       | 158,41% |
| Pabean Cantian    | 7282                                | 4552                                  | 62,51%  | 3636                                  | 1970                                    | 54,18%  | 3567                                     | 2444                                       | 68,52%  |
| Pakal             | 5314                                | 6784                                  | 127,66% | 2637                                  | 3667                                    | 139,06% | 2484                                     | 796  | 32,05%  |
| Rungkut           | 9821                                | 10477                                 | 106,68% | 5209                                  | 5744                                    | 110,27% | 4736                                     | 2926                                       | 61,78%  |
| Sambikerep        | 5767                                | 4916                                  | 85,24%  | 2803                                  | 2749                                    | 98,07%  | 2532                                     | 1416                                       | 55,92%  |
| Sawahan           | 19332                               | 16526                                 | 85,49%  | 9884                                  | 5058                                    | 51,17%  | 9036                                     | 9402                                       | 104,05% |
| Semampir          | 18143                               | 20208                                 | 111,38% | 9080                                  | 6207                                    | 68,36%  | 8513                                     | 3944                                       | 46,33%  |
| Simokerto         | 8821                                | 6615                                  | 74,99%  | 4537                                  | 4134                                    | 91,12%  | 4380                                     | 1748                                       | 39,91%  |
| Sukolilo          | 9587                                | 11675                                 | 121,78% | 4793                                  | 7093                                    | 147,99% | 4473                                     | 9284                                       | 207,56% |
| Sukomanunggal     | 9195                                | 10316                                 | 112,19% | 4543                                  | 6795                                    | 149,57% | 4234                                     | 5390                                       | 127,30% |
| Tambaksari        | 20100                               | 17656                                 | 87,84%  | 10327                                 | 7285                                    | 70,54%  | 9490                                     | 4900                                       | 51,63%  |
| Tandes            | 8615                                | 11172                                 | 129,68% | 4062                                  | 5296                                    | 130,38% | 3711                                     | 3315                                       | 89,33%  |
| Tegalsari         | 8721                                | 10760                                 | 123,38% | 4695                                  | 4286                                    | 91,29%  | 4441                                     | 2667                                       | 60,05%  |
| Tenggiling Mejoyo | 4878                                | 5725                                  | 117,36% | 2461                                  | 3358                                    | 136,45% | 2280                                     | 1746                                       | 76,58%  |
| Wiyung            | 6240                                | 6492                                  | 104,04% | 3318                                  | 2903                                    | 87,49%  | 3062                                     | 1384                                       | 45,20%  |
| Wonocolo          | 6895                                | 8961                                  | 129,96% | 3694                                  | 4508                                    | 122,04% | 3398                                     | 11226                                      | 330,37% |
| Wonokromo         | 14935                               | 12162                                 | 81,43%  | 7885                                  | 9786                                    | 124,11% | 7590                                     | 8904                                       | 117,31% |

Sumber: Dinas Pendidikan, 2016

### Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. APM merupakan indikator yang melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar usia siswa di jenjang tersebut.

APM jenjang SD/MI tahun 2014 sebesar 97,02 dan tahun 2015 sebesar 95,02 persen. APM jenjang SMP/MTs tahun 2014 sebesar 95,87 persen dan tahun 2015 sebesar 95,03 persen. APM jenjang SMA/MA/SMK tahun 2014 sebesar 93,47 persen dan tahun 2015 sebesar 92,55 persen. Rekap data perkembangan APM Kota Surabaya tahun 2014-2015 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.18  
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Surabaya  
Tahun 2014-2015

| No. | Jenjang Pendidikan  | 2014    | 2015    |
|-----|---|---------|---------|
| 1   | SD/MI   |         |         |
| 1.1 | Jumlah Siswa Kelompok usia 7-12 Tahun yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SD/MI       | 252.434 | 256.703 |
| 1.2 | Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun  | 260.193 | 270.157 |
| 1.3 | APM SD/MI (%)   | 97,02   | 95,02   |
| 2   | SMP/MTs   |         |         |
| 2.1 | Jumlah Siswa Kelompok usia 13-15 Tahun yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SMP/MTs    | 124.018 | 131.306 |
| 2.2 | Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun   | 129.367 | 138.173 |
| 2.3 | APM SMP/MTs (%)   | 95,87   | 95,03   |
| 3   | SMA/MA/SMK  |         |         |
| 3.1 | Jumlah Siswa Kelompok usia 16-18 Tahun yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SMA/MA/SMK | 118.692 | 119.131 |
| 3.2 | Jumlah Penduduk Kelompok Usia 16-18 Tahun   | 126.983 | 128.721 |
| 3.3 | APM SMA/MA/SMK (%)  | 93,47   | 92,55   |

Sumber: Dinas Pendidikan, 2016

Tabel 2.19  
Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Surabaya Menurut Kecamatan  
Tahun 2015

| KECAMATAN         | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI           |                                 |         | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs            |                                  |         | Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK            |                                  |         |
|-------------------|---|---------------------------------|---------|--|----------------------------------|---------|---|----------------------------------|---------|
|                   | Jumlah siswa usia 7-12 tahun di jenjang SD/MI | Jumlah penduduk usia 7-12 tahun | APM     | Jumlah siswa usia 13-15 tahun di jenjang SMP/MTs | Jumlah penduduk usia 13-15 tahun | APM     | Jumlah siswa usia 16-18 tahun di jenjang SMA/MA/SMK | Jumlah penduduk usia 16-18 tahun | APM     |
| Asemrowo          | 3413  | 4807                            | 71,00%  | 1614   | 2322                             | 69,51%  | 565   | 2153                             | 26,24%  |
| Benowo            | 5809  | 5979                            | 97,16%  | 1319   | 2983                             | 44,22%  | 2077  | 2885                             | 71,99%  |
| Bubutan           | 8377  | 9544                            | 87,77%  | 2532   | 5015                             | 50,49%  | 2240  | 4733                             | 47,33%  |
| Bulak             | 5374  | 4322                            | 124,34% | 2450   | 2235                             | 109,62% | 1672  | 1984                             | 84,27%  |
| Dukuh Pakis       | 5709  | 5231                            | 109,14% | 2691   | 2688                             | 100,11% | 2605  | 2445                             | 106,54% |
| Gayungan          | 5913  | 3844                            | 153,82% | 2669   | 2051                             | 130,13% | 5022  | 1893                             | 265,29% |
| Genteng           | 6547  | 5061                            | 129,36% | 5399   | 2726                             | 198,06% | 11500   | 2538                             | 453,11% |
| Gubeng            | 10764   | 12136                           | 88,69%  | 4084   | 6327                             | 64,55%  | 10222   | 5904                             | 173,14% |
| Gununganyar       | 4252  | 5040                            | 84,37%  | 1446   | 2436                             | 59,36%  | 501   | 2365                             | 21,18%  |
| Jambangan         | 3906  | 4543                            | 85,98%  | 3504   | 2225                             | 157,48% | 2966  | 2057                             | 144,19% |
| Karangpilang      | 6472  | 6569                            | 98,52%  | 4005   | 3494                             | 114,63% | 1325  | 3144                             | 42,14%  |
| Kenjeran          | 14758   | 15745                           | 93,73%  | 7716   | 7899                             | 97,68%  | 3164  | 7541                             | 41,96%  |
| Krembangan        | 11639   | 10628                           | 109,51% | 8614   | 5564                             | 154,82% | 5467  | 5214                             | 104,85% |
| Lakarsantri       | 6182  | 5526                            | 111,87% | 4472   | 2751                             | 162,56% | 1959  | 2476                             | 79,12%  |
| Mulyorejo         | 8614  | 7536                            | 114,30% | 5565   | 3893                             | 142,95% | 4825  | 3462                             | 139,37% |
| Pabean Cantian    | 4112  | 7282                            | 56,47%  | 1779   | 3636                             | 48,93%  | 2150  | 3567                             | 60,27%  |
| Pakal             | 6131  | 5314                            | 115,37% | 3315   | 2637                             | 125,71% | 699   | 2484                             | 28,14%  |
| Rungkut           | 9461  | 9821                            | 96,33%  | 5191   | 5209                             | 99,65%  | 2573  | 4736                             | 54,33%  |
| Sambikerep        | 4438  | 5767                            | 76,96%  | 2481   | 2803                             | 88,51%  | 1240  | 2532                             | 48,97%  |
| Sawahan           | 14916   | 19332                           | 77,16%  | 4570   | 9884                             | 46,24%  | 8275  | 9036                             | 91,58%  |
| Semampir          | 18246   | 18143                           | 100,57% | 5605   | 9080                             | 61,73%  | 3468  | 8513                             | 40,74%  |
| Simokerto         | 5977  | 8821                            | 67,76%  | 3737   | 4537                             | 82,37%  | 1537  | 4380                             | 35,09%  |
| Sukolilo          | 10539   | 9587                            | 109,93% | 6408   | 4793                             | 133,69% | 8169  | 4473                             | 182,63% |
| Sukomanunggal     | 9313  | 9195                            | 101,28% | 6139   | 4543                             | 135,13% | 4739  | 4234                             | 111,93% |
| Tambaksari        | 15941   | 20100                           | 79,31%  | 6581   | 10327                            | 63,73%  | 4310  | 9490                             | 45,42%  |
| Tandes            | 10086   | 8615                            | 117,07% | 4785   | 4062                             | 117,80% | 2917  | 3711                             | 78,60%  |
| Tegalsari         | 9714  | 8721                            | 111,39% | 3873   | 4695                             | 82,49%  | 2348  | 4441                             | 52,87%  |
| Tenggiling Mejoyo | 5169  | 4878                            | 105,97% | 3033   | 2461                             | 123,24% | 1537  | 2280                             | 67,41%  |
| Wiyung            | 5860  | 6240                            | 93,91%  | 2622   | 3318                             | 79,02%  | 1218  | 3062                             | 39,78%  |
| Wonocolo          | 8088  | 6895                            | 117,30% | 4074   | 3694                             | 110,29% | 9881  | 3398                             | 290,79% |
| Wonokromo         | 10983   | 14935                           | 73,54%  | 8842   | 7885                             | 112,14% | 7832  | 7590                             | 103,19% |

Sumber: Dinas Pendidikan, 2016

### Angka Kelulusan (AL)

Angka kelulusan dihitung berdasarkan jumlah siswa pada setiap jenjang pendidikan yang lulus dibandingkan dengan jumlah seluruh siswa yang mengikuti ujian tingkat akhir.

AL untuk jenjang SD/MI tahun 2014 sampai 2015 mencapai angka 100 persen. Sedangkan AL untuk jenjang SMP/MTs tahun 2014 sebesar 99,99 persen dan tahun 2015 mencapai 100 persen. Sedangkan untuk jenjang SMA/MA/SMK nilai AL sebesar 99,95 persen pada tahun 2014 dan 99,97 persen pada tahun 2015. Untuk jenjang SMK, nilai AL tahun 2014 sebesar 99,95 persen dan 99,97 persen pada tahun 2015. Rekapitulasi data

perkembangan Angka Kelulusan Kota Surabaya tahun 2014-2015 disajikan pada Tabel 2.20.

Tabel 2.20  
Perkembangan Angka Kelulusan (AL) Kota Surabaya  
Tahun 2014-2015

| No. | Jenjang Pendidikan                       | 2014   | 2015   |
|-----|--|--------|--------|
| 1   | SD/MI                                    |        |        |
| 1.1 | Jumlah siswa SD/MI yang lulus            | 45.498 | 45.990 |
| 1.2 | Jumlah Keseluruhan Siswa SD/MI Kelas 6   | 45.498 | 45.990 |
| 1.3 | AL SD/MI (%)                             | 100    | 100    |
| 2   | SMP/MTs                                  |        |        |
| 2.1 | Jumlah siswa SMP/MTs yang lulus          | 38.319 | 43.090 |
| 2.2 | Jumlah Keseluruhan Siswa SMP/MTs Kelas 9 | 38.321 | 43.090 |
| 2.3 | AL SMP/MTs (%)                           | 99,99  | 100    |
| 3   | SMA/MA                                   |        |        |
| 3.1 | Jumlah siswa SMA/MA yang lulus           | 18.785 | 17.573 |
| 3.2 | Jumlah Keseluruhan Siswa SMK Kelas 12    | 18.794 | 17.578 |
| 3.3 | AL SMA/MA (%)                            | 99,95  | 99,97  |
| 4   | SMK                                      |        |        |
| 4.1 | Jumlah siswa SMK yang lulus              | 18.785 | 18.183 |
| 4.2 | Jumlah Keseluruhan Siswa SMK Kelas 12    | 18.794 | 18.189 |
| 4.3 | AL SMK (%)                               | 99,95  | 99,97  |

Sumber: Dinas Pendidikan, 2016

#### Angka Putus Sekolah (APS)

APS diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah siswa putus sekolah dengan jumlah siswa seluruhnya. APS SD/MI tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 mengalami fluktuasi, di mana pada tahun 2011 tidak terdapat anak putus sekolah (0 persen), terdapat 8 anak putus sekolah (0,003 persen) pada tahun 2012, mengalami penurunan pada tahun 2013 menjadi 0 persen atau tidak terdapat anak putus sekolah dan meningkat kembali menjadi 0,0025 persen atau terdapat 7 anak putus sekolah pada tahun 2014.

APS SMP/MTs maupun SMA/MA dan SMK mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2012 . APS SMP/MTs pada tahun 2010 sebesar 0,05 persen dan mengalami fluktuasi selama tahun 2012-2014 secara urut sebesar 0,002 persen; 0,003 persen; 0,002 persen dan pada tahun 2015 menjadi 0 persen. APS SMA/MA menurun secara signifikan dari tahun 2011 sebesar 0,05 persen menjadi 0,003 persen pada tahun 2012 kemudian mengalami fluktuasi pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 dengan

nilai secara urut 0,009 persen; 0,01 persen dan 0,004 persen pada tahun 2015. APS SMK terus mengalami penurunan dengan nilai 0,05 persen pada tahun 2011 dan menurun pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 secara urut sebesar 0,026 persen; 0,01 persen; 0,01 persen dan 0,007 persen pada tahun 2015. Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) Kota Surabaya Tahun 2014-2015 dapat dilihat pada Tabel 2.21.

Tabel 2.21  
Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) Kota Surabaya  
Tahun 2014-2015

| No. | Jenjang Pendidikan                       | 2014    | 2015    |
|-----|--|---------|---------|
| 1   | SD/MI                                    |         |         |
| 1.1 | Jumlah siswa SD/MI putus sekolah         | 7       | 0       |
| 1.2 | Jumlah Keseluruhan Siswa SD/MI Kelas 6   | 281.789 | 284.313 |
| 1.3 | APS SD/MI (%)                            | 0,0025  | 0       |
| 2   | SMP/MTs                                  |         |         |
| 2.1 | Jumlah siswa SMP/MTs yang putus sekolah  | 3       | 0       |
| 2.2 | Jumlah Keseluruhan Siswa SMP/MTs Kelas 9 | 129.845 | 145.123 |
| 2.3 | APS SMP/MTs (%)                          | 0,002   | 0       |
| 3   | SMA/MA                                   |         |         |
| 3.1 | Jumlah siswa SMA/MA yang putus sekolah   | 5       | 3       |
| 3.2 | Jumlah Keseluruhan Siswa SMK Kelas 12    | 77.448  | 67.280  |
| 3.3 | APS SMA/MA (%)                           | 0,01    | 0,004   |
| 4   | SMK                                      |         |         |
| 4.1 | Jumlah siswa SMK yang putus sekolah      | 6       | 5       |
| 4.2 | Jumlah Keseluruhan Siswa SMK Kelas 12    | 77.284  | 67.980  |
| 4.3 | APS SMK (%)                              | 0,01    | 0,007   |

Sumber: Dinas Pendidikan, 2016

#### Rasio Ketersediaan Sekolah/penduduk Usia Sekolah

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan juga merupakan faktor penting dalam upaya pemerataan dan perluasan pendidikan, baik dari ketersediaan sekolah, kelas ataupun guru. Dengan demikian jika ketersediaan ruang kelas dan guru pengajar masih kurang memadai maka dibutuhkan perhatian untuk memperlancar proses belajar mengajar pada tingkat pendidikan dasar.

Pada tahun 2014, jumlah gedung sekolah SD/MI yang ada sebanyak 971 gedung. Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun sebanyak 260.193 orang, berarti rasio/ketersediaan sekolah sebesar 1:268. Diukur kembali pada tahun 2015, sejumlah 862 gedung

sekolah SD/MI dengan jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun sebanyak 270.157, maka rasio/ketersediaan sekolah sebesar 1:313, di mana 1 gedung sekolah dipakai untuk menampung 313 orang penduduk usia sekolah jenjang SD/MI.

Pada tingkat pendidikan SMP/MTs, jumlah gedung sekolah yang ada pada tahun 2014 sebanyak 375 gedung. Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun sebanyak 129.367 orang, berarti rasio/ketersediaan sekolah sebesar 1:345. Diukur kembali pada tahun 2015, sejumlah 356 gedung sekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun sebanyak 138.173 orang, maka rasio/ketersediaan sekolah sebesar 1:388 di mana 1 gedung sekolah dipakai untuk menampung 388 orang penduduk usia sekolah jenjang SD/MI. Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kota Surabaya Tahun 2014 - 2015 disajikan pada Tabel 2.22.

Tabel 2.22  
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kota Surabaya  
Tahun 2014 – 2015

| No   | Jenjang Pendidikan                        | 2014    | 2015    |
|------|---|---------|---------|
| 1    | SD/MI                                     |         |         |
| 1.1. | Jumlah gedung sekolah                     | 971     | 862     |
| 1.2. | Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun  | 260.193 | 270.157 |
| 1.3. | Rasio                                     | 1 : 268 | 1 : 313 |
| 2    | SMP/MTs                                   |         |         |
| 2.1. | Jumlah gedung sekolah                     | 375     | 356     |
| 2.2. | Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun | 129.367 | 138.173 |
| 2.3. | Rasio                                     | 1 : 345 | 1 : 388 |

Sumber : Dinas Pendidikan, 2016

Melihat pada Tabel 2.23, rasio antara jumlah penduduk dibandingkan dengan jumlah sekolah di kota Surabaya menurut kecamatan pada tahun 2015 menunjukkan bahwa untuk tingkat SD/MI, kecamatan yang memiliki rasio terbesar adalah kecamatan Gununganyar dengan nilai rasio sebesar 1:418 dimana rata-rata 1 SD/MI di kecamatan Tenggilis Mejoyo menampung 418 siswa sebaliknya kecamatan yang memiliki rasio terkecil adalah kecamatan Dukuh Pakis dengan nilai rasio sebesar 1:169 dimana rata-rata 1 SD/MI di kecamatan Dukuh Pakis menampung 169 siswa. Pada tingkat SMP/MTs kecamatan Benowo memiliki rasio tertinggi yaitu 1:609 dimana 1 SMP/MTs di Benowo rata-rata menampung 609 siswa dan kecamatan Dukuh

Pakis merupakan kecamatan dengan rasio terendah yaitu 1:181 dimana 1 SMP/MTs di Semampir rata-rata menampung 181 siswa. Pada tingkat SMA/MA/SMK kecamatan Wiyung memiliki rasio tertinggi yaitu 1:1576 dimana 1 SMA/MA/SMK di Wiyung rata-rata menampung 1576 siswa dan kecamatan Genteng merupakan kecamatan dengan rasio terendah yaitu 1:143 dimana 1 SMA/MA/SMK di Genteng rata-rata menampung 143 siswa. Rasio antara jumlah penduduk usia sekolah dibandingkan dengan jumlah gedung sekolah menurut kecamatan di kota Surabaya pada tahun 2015 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.23  
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kota Surabaya Menurut Kecamatan Tahun 2015

| KECAMATAN      | SD/MI     |           |       |                           |       | SMP/MTs    |            |       |                            |       | SMA/MA/SMK |           |            |       |                            |                            |       |
|----------------|-----------|-----------|-------|---------------------------|-------|------------|------------|-------|----------------------------|-------|------------|-----------|------------|-------|----------------------------|----------------------------|-------|
|                | Jumlah SD | Jumlah MI | Total | Jumlah Penduduk Usia 7-12 | Rasio | Jumlah SMP | Jumlah MTs | Total | Jumlah Penduduk Usia 13-15 | Rasio | Jumlah SMA | Jumlah MA | Jumlah SMK | Total | Jumlah Penduduk Usia 16-18 | Jumlah Siswa Per Kecamatan | Rasio |
| Asemrowo       | 15        | 5         | 20    | 4782                      | 1:240 | 4          | 0          | 4     | 2340                       | 1:585 | 1          | 0         | 1          | 2     | 2181                       | 565                        | 1 : 1 |
| Benowo         | 11        | 5         | 16    | 5897                      | 1:369 | 3          | 2          | 5     | 3044                       | 1:609 | 2          | 1         | 1          | 4     | 2843                       | 2075                       | 1 : 1 |
| Bubutan        | 37        | 2         | 39    | 9422                      | 1:242 | 9          | 0          | 9     | 4972                       | 1:553 | 1          | 0         | 3          | 4     | 4754                       | 1374                       | 1 : 1 |
| Bulak          | 16        | 5         | 21    | 4306                      | 1:206 | 5          | 1          | 6     | 2257                       | 1:377 | 2          | 0         | 1          | 3     | 2028                       | 1675                       | 1 : 1 |
| Dukuh Pakis    | 30        | 1         | 31    | 5228                      | 1:169 | 14         | 1          | 15    | 2702                       | 1:181 | 6          | 0         | 0          | 6     | 2489                       | 2588                       | 1 : 2 |
| Gayungan       | 18        | 1         | 19    | 3798                      | 1:200 | 8          | 1          | 9     | 2035                       | 1:227 | 5          | 0         | 2          | 7     | 1953                       | 4995                       | 1 : 3 |
| Genteng        | 23        | 1         | 24    | 4993                      | 1:209 | 11         | 0          | 11    | 2727                       | 1:248 | 13         | 0         | 5          | 18    | 2568                       | 11432                      | 1 : 5 |
| Gubeng         | 44        | 4         | 48    | 12085                     | 1:252 | 18         | 0          | 18    | 6268                       | 1:349 | 9          | 0         | 8          | 17    | 6008                       | 9744                       | 1 : 2 |
| Gununganyar    | 12        | 0         | 12    | 5014                      | 1:418 | 7          | 0          | 7     | 2438                       | 1:349 | 0          | 0         | 2          | 2     | 2398                       | 496                        | 1 : 1 |
| Jambangan      | 11        | 4         | 15    | 4508                      | 1:301 | 6          | 0          | 6     | 2282                       | 1:381 | 3          | 0         | 3          | 6     | 2054                       | 2791                       | 1 : 2 |
| Karangpilang   | 19        | 3         | 22    | 6453                      | 1:294 | 12         | 0          | 12    | 3550                       | 1:296 | 5          | 0         | 4          | 9     | 3234                       | 1314                       | 1 : 1 |
| Kenjeran       | 27        | 23        | 50    | 15519                     | 1:311 | 14         | 4          | 18    | 8062                       | 1:448 | 3          | 0         | 2          | 5     | 7447                       | 3165                       | 1 : 1 |
| Krembangan     | 31        | 8         | 39    | 10493                     | 1:270 | 17         | 1          | 18    | 5592                       | 1:311 | 7          | 0         | 2          | 9     | 5331                       | 5458                       | 1 : 2 |
| Lakarsantri    | 19        | 5         | 24    | 5502                      | 1:230 | 7          | 2          | 9     | 2771                       | 1:308 | 6          | 0         | 1          | 7     | 2467                       | 1933                       | 1 : 1 |
| Mulyorejo      | 36        | 2         | 38    | 7365                      | 1:194 | 12         | 0          | 12    | 3933                       | 1:328 | 5          | 0         | 3          | 8     | 3550                       | 4800                       | 1 : 2 |
| Pabean Cantian | 18        | 4         | 22    | 7202                      | 1:328 | 8          | 0          | 8     | 3700                       | 1:463 | 3          | 0         | 2          | 5     | 3564                       | 2113                       | 1 : 1 |
| Pakal          | 17        | 7         | 24    | 5233                      | 1:219 | 6          | 3          | 9     | 2650                       | 1:295 | 4          | 1         | 1          | 6     | 2532                       | 699                        | 1 : 1 |
| Rungkut        | 23        | 5         | 28    | 9820                      | 1:351 | 7          | 2          | 9     | 5133                       | 1:571 | 5          | 2         | 2          | 9     | 4874                       | 2543                       | 1 : 1 |
| Sambikerep     | 13        | 6         | 19    | 5682                      | 1:300 | 9          | 1          | 10    | 2894                       | 1:290 | 7          | 1         | 4          | 12    | 2508                       | 1223                       | 1 : 1 |

| KECAMATAN        | SD/MI     |           |       |                           |       | SMP/MTs    |            |       |                            |       | SMA/MA/SMK |           |            |       |                            |                            |       |
|------------------|-----------|-----------|-------|---------------------------|-------|------------|------------|-------|----------------------------|-------|------------|-----------|------------|-------|----------------------------|----------------------------|-------|
|                  | Jumlah SD | Jumlah MI | Total | Jumlah Penduduk Usia 7-12 | Rasio | Jumlah SMP | Jumlah MTs | Total | Jumlah Penduduk Usia 13-15 | Rasio | Jumlah SMA | Jumlah MA | Jumlah SMK | Total | Jumlah Penduduk Usia 16-18 | Jumlah Siswa Per Kecamatan | Rasio |
| Sawahan          | 57        | 1         | 58    | 19154                     | 1:331 | 16         | 2          | 18    | 9882                       | 1:549 | 7          | 0         | 9          | 16    | 9317                       | 8322                       | 1 : 1 |
| Semampir         | 50        | 31        | 81    | 17875                     | 1:221 | 22         | 5          | 27    | 9240                       | 1:343 | 4          | 1         | 4          | 9     | 8614                       | 3446                       | 1 : 1 |
| Simokerto        | 27        | 6         | 33    | 8702                      | 1:264 | 9          | 2          | 11    | 4611                       | 1:420 | 6          | 1         | 3          | 10    | 4395                       | 1527                       | 1 : 1 |
| Sukolilo         | 39        | 0         | 39    | 9531                      | 1:245 | 17         | 1          | 18    | 4821                       | 1:268 | 12         | 0         | 10         | 22    | 4482                       | 8164                       | 1 : 2 |
| Sukomanunggal    | 39        | 1         | 40    | 9123                      | 1:229 | 18         | 0          | 18    | 4562                       | 1:254 | 6          | 1         | 8          | 15    | 4339                       | 4724                       | 1 : 2 |
| Tambaksari       | 50        | 8         | 58    | 19867                     | 1:343 | 18         | 5          | 23    | 10478                      | 1:456 | 8          | 2         | 4          | 14    | 9650                       | 4279                       | 1 : 1 |
| Tandes           | 21        | 9         | 30    | 8574                      | 1:286 | 13         | 2          | 15    | 4112                       | 1:275 | 1          | 2         | 1          | 4     | 3749                       | 2902                       | 1 : 1 |
| Tegalsari        | 36        | 3         | 39    | 8634                      | 1:222 | 17         | 0          | 17    | 4646                       | 1:274 | 4          | 0         | 0          | 4     | 4496                       | 2365                       | 1 : 1 |
| Tenggilis Mejoyo | 18        | 0         | 18    | 4842                      | 1:269 | 9          | 0          | 9     | 2468                       | 1:275 | 3          | 0         | 0          | 3     | 2366                       | 1537                       | 1 : 1 |
| Wiyung           | 17        | 1         | 18    | 6123                      | 1:341 | 6          | 0          | 6     | 3329                       | 1:555 | 1          | 1         | 0          | 2     | 3151                       | 1214                       | 1 : 1 |
| Wonocolo         | 25        | 3         | 28    | 6828                      | 1:244 | 10         | 2          | 12    | 3671                       | 1:306 | 9          | 3         | 7          | 19    | 3429                       | 9912                       | 1 : 3 |
| Wonokromo        | 42        | 7         | 49    | 14666                     | 1:300 | 19         | 1          | 20    | 7985                       | 1:400 | 11         | 0         | 9          | 20    | 7623                       | 7866                       | 1 : 2 |

Sumber: Dinas Pendidikan, 2016

Kebutuhan guru yang memenuhi kualifikasi menjadi sangat penting dalam upaya peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan di semua jenjang pendidikan. Dengan pendidikan guru yang sesuai dengan standar kualifikasi maka diharapkan akan mampu menghasilkan kualitas siswa didik yang lebih berkualitas pula. Dan tentunya juga dibutuhkan ketersediaan guru yang berkompetensi di setiap sekolah.

Pada tahun 2015, jumlah guru di jenjang SD/MI yang ada sebanyak 12.011 orang dengan jumlah murid sebanyak 284.313 orang, sehingga rasio guru SD/MI sebesar 1:24. Jumlah guru di jenjang SMP/MTs pada tahun 2015 sebanyak 6.225 orang dengan jumlah murid sebanyak 145.123 orang, sehingga rasio guru SMP/MTs sebesar 1:24.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, rasio minimal jumlah peserta didik terhadap gurunya untuk SD dan SMP atau yang sederajat sebesar 20:1, sedangkan untuk MI dan MTs atau yang sederajat sebesar 1:15. Dengan demikian, rasio guru Kota Surabaya telah memenuhi standar dan telah dioptimalkan fungsi dan perannya.

#### **b. Kesehatan**

Jumlah posyandu balita dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 mengalami peningkatan, hal ini disebabkan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan terus meningkat. Tujuan peningkatan sarana kesehatan tersebut adalah untuk menekan angka gizi buruk serta meningkatkan derajat kesehatan agar lebih maksimal dan terjangkau oleh masyarakat umum. Upaya promotif dan preventif tetap dilaksanakan diantaranya pemberian makanan tambahan penyuluhan untuk anak balita serta adanya penimbangan balita yang dilakukan secara berkala di seluruh Posyandu Kota Surabaya. Pada tahun 2014 jumlah posyandu 2.820 unit dengan jumlah balita sebanyak 218.774 jiwa sehingga rasio Posyandu per 1.000 penduduk sebesar 12,89 dan pada tahun 2015 sebesar 12,97. Jumlah posyandu dan balita Kota Surabaya Tahun 2014-2015 dapat dilihat dalam Tabel 2.24.

Tabel 2.24  
Jumlah Posyandu dan Balita Kota Surabaya Tahun 2014-2015

| No. | Uraian                            | 2014    | 2015    |
|-----|-----------------------------------|---------|---------|
| 1   | Jumlah Posyandu                   | 2.820   | 2.826   |
| 2   | Jumlah Balita                     | 218.774 | 217.873 |
| 3   | Rasio Posyandu per 1.000 penduduk | 12,89   | 12,97   |

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2016

Jumlah puskesmas dan jumlah klinik juga mengalami penambahan dari tahun 2014 sampai 2015. Pada tahun 2014 jumlah puskesmas sebanyak 62 puskesmas dan jumlah penduduk sebanyak 2.853.661 sehingga rasio puskesmas per 1.000 penduduk sebesar 0,022. dan pada tahun 2015 sebesar 0,022. Peningkatan rasio juga terjadi pada rasio klinik per 1.000 penduduk dari 0,085 pada tahun 2014 menjadi 0,090 pada tahun 2015. Rasio puskesmas pembantu mengalami penurunan akibat jumlah puskesmas pembantu yang juga mengalami penurunan. Selengkapnya rekapitulasi data dapat dilihat pada tabel 2.25.

Tabel 2.25  
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Kota Surabaya  
Tahun 2014-2015

| No. | Uraian                             | 2014      | 2015      |
|-----|------------------------------------|-----------|-----------|
| 1   | Jumlah Penduduk                    | 2.853.661 | 2.902.736 |
| 2   | Puskesmas                          |           |           |
| 2.1 | Jumlah Puskesmas                   | 62        | 63        |
| 2.2 | Rasio Puskesmas per 1.000 penduduk | 0,022     | 0,022     |
| 3   | Klinik                             |           |           |
| 3.1 | Jumlah                             | 243       | 261       |
| 3.2 | Rasio Klinik per 1.000 penduduk    | 0,085     | 0,090     |
| 4   | Pustu                              |           |           |
| 4.1 | Jumlah                             | 60        | 59        |
| 4.2 | Rasio Pustu per 1.000 penduduk     | 0,021     | 0,020     |

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2016

Sebagai fasilitas kesehatan rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, rumah sakit berperan dalam memberikan layanan kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif. Pada tahun 2014 jumlah penduduk Kota Surabaya sebanyak 2.853.661 jiwa dan jumlah rumah sakit 61 unit dengan demikian rasio rumah sakit per 1.000 penduduk adalah 0,0214 dan pada

tahun 2015 sebesar 0,0210. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.26.

Tabel 2.26  
Jumlah Rumah Sakit Kota Surabaya Tahun 2014-2015

| No                                   | Uraian   | 2014      | 2015      |
|--------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 1                                    | Jumlah Penduduk  | 2.853.661 | 2.902.736 |
| 2                                    | Rumah Sakit Umum (Pemerintah)                                      | 3         | 2         |
| 3                                    | Rumah Sakit Jiwa/Paru dan Penyakit Khusus Lainnya Milik Pemerintah | 5         | 3         |
| 4                                    | Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI   | 7         | 8         |
| 5                                    | Rumah Sakit Daerah   | 2         | 2         |
| 6                                    | Rumah Sakit Swasta   | 44        | 46        |
| Jumlah Rumah Sakit                   |  | 61        | 61        |
| Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk |  | 0,0214    | 0,0210    |

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2016

Pada tahun 2014 jumlah penduduk Kota Surabaya sebanyak 2.853.661 jiwa dan jumlah dokter sebanyak 6.364 orang. Dengan demikian rasio dokter per 1.000 penduduk adalah 2,23. Jumlah dokter mengalami peningkatan pada tahun 2015 sehingga rasio dokter per 1.000 penduduk adalah menjadi 2.36. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.27.

Tabel 2.27  
Jumlah Dokter Kota Surabaya Tahun 2010-2015

| No. | Uraian                          | 2014      | 2015      |
|-----|---------------------------------|-----------|-----------|
| 1   | Jumlah Penduduk                 | 2.853.661 | 2.902.736 |
| 2   | Jumlah Dokter                   | 6.364     | 6.839     |
| 3   | Rasio Dokter per 1.000 penduduk | 2,23      | 2,36      |

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2016

### c. Pekerjaan Umum

Panjang jalan dalam kondisi baik pada tahun 2010 adalah 1.459,696 Km dari total panjang jalan 1.504,348 Km, sehingga persentase panjang jalan kondisi baik adalah sebesar 97,032%. Persentase panjang jalan kondisi baik mengalami peningkatan dikarenakan jumlah panjang jalan dalam kondisi baik juga mengalami peningkatan. Persentase panjang jalan kondisi baik yaitu pada tahun 2011 menjadi 97,033%, pada tahun 2012 menjadi 97,095%, pada tahun 2013 menjadi 98,187%, pada tahun 2014 menjadi 98,196%, dan pada

tahun 2015 menjadi 98,64%. Untuk panjang jalan dalam kondisi baik Kota Surabaya dapat dilihat pada Tabel 2.28.

Tabel 2.28  
Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Kota Surabaya  
Tahun 2014-2015

| No. | Uraian                                    | 2014      | 2015      |
|-----|---|-----------|-----------|
| 1   | Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik (Km)     | 1.648,840 | 1.660,174 |
| 2   | Panjang Jalan (Km)                        | 1.679,140 | 1.683,116 |
| 3   | Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik (%) | 98,196%   | 98,64%    |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan, 2016

#### d. Perumahan Rakyat

Pertumbuhan penduduk secara pesat terutama di perkotaan umumnya merupakan akibat dari urbanisasi, di mana timbul ancaman tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk dengan pelayanan kota. Hal ini mengakibatkan meluasnya lingkungan hunian atau permukiman kumuh di perkotaan. Untuk itu, Pemerintah Kota Surabaya mengupayakan penanganan multisektoral. Program Perumahan dan Permukiman diarahkan untuk mengatasi permasalahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar mendapat manfaat rumah layak huni.

Sejalan dengan gerakan 100-0-100, yaitu pemenuhan 100 persen akses air minum, 0 persen luasan permukiman kumuh perkotaan dan pemenuhan 100 persen akses sanitasi yang dicanangkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pembangunan di bidang perumahan dan permukiman di Kota Surabaya tidak hanya membangun perumahan atau permukiman baru, akan tetapi juga menjaga kualitas sarana prasarana permukiman itu menjadi lebih baik, lebih sehat dan tidak kumuh.

Pemerintah Kota Surabaya juga mengupayakan penyediaan lahan bagi terbangunnya rumah sederhana layak huni yang memiliki konsep pembangunan vertikal untuk mengatasi permasalahan lahan. Pembangunan tersebut juga didukung oleh dana dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi yang diperuntukkan bagi MBR di Kota Surabaya agar bisa mendapatkan manfaat rumah layak huni. Selain mengupayakan konsep pembangunan rumah sederhana layak huni vertikal, Pemerintah Kota

Surabaya mengupayakan pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana di lingkungan permukiman kumuh/tidak layak huni melalui kegiatan rutin antara lain Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Permukiman, Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa, Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Makam serta Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin melalui Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK). Data perbaikan rumah tidak layak huni melalui RSDK tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.29 berikut.

Tabel 2.29  
Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya  
Tahun 2014-2015

| No. | Uraian                                | 2014    | 2015    |
|-----|---------------------------------------|---------|---------|
| 1   | Jumlah Seluruh Rumah                  | 679.091 | 679.091 |
| 2   | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni         | 602     | 723     |
| 3   | Persentase Rumah Tidak Layak Huni (%) | 0,09    | 0,11    |

Sumber: Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D) Kota Surabaya 2008, Dinas Sosial Kota Surabaya, 2016 (diolah)

Rekapitulasi data rumah tidak layak huni di Kota Surabaya juga disajikan dalam data per kecamatan seperti pada Tabel 2.30 berikut ini.

Tabel 2.30  
Rumah Tidak Layak Huni menurut Kecamatan Kota Surabaya  
Tahun 2014-2015

| No. | Kecamatan         | 2014                 |                               |      | 2015                 |                               |     |
|-----|-------------------|----------------------|-------------------------------|------|----------------------|-------------------------------|-----|
|     |                   | Jumlah Seluruh Rumah | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni | %    | Jumlah Seluruh Rumah | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni | %   |
| 1   | Kec. Asemrowo     | 9.290                | 0                             | 0,00 | 9.290                | 0                             | 0,0 |
| 2   | Kec. Benowo       | 18.382               | 24                            | 0,13 | 18.382               | 12                            | 0,1 |
| 3   | Kec. Bubutan      | 21.014               | 58                            | 0,28 | 21.014               | 32                            | 0,2 |
| 4   | Kec. Bulak        | 9.760                | 5                             | 0,05 | 9.760                | 25                            | 0,3 |
| 5   | Kec. Dukuh Pakis  | 14.793               | 22                            | 0,15 | 14.793               | 20                            | 0,1 |
| 6   | Kec. Gayungan     | 15.687               | 0                             | 0,00 | 15.687               | 47                            | 0,3 |
| 7   | Kec. Genteng      | 14.117               | 6                             | 0,04 | 14.117               | 68                            | 0,5 |
| 8   | Kec. Gubeng       | 34.124               | 0                             | 0,00 | 34.124               | 30                            | 0,1 |
| 9   | Kec. Gunung Anyar | 13.796               | 5                             | 0,04 | 13.796               | 20                            | 0,1 |
| 10  | Kec. Jambangan    | 10.276               | 22                            | 0,21 | 10.276               | 22                            | 0,2 |
| 11  | Kec. Karangpilang | 18.486               | 1                             | 0,01 | 18.486               | 0                             | 0,0 |
| 12  | Kec. Kenjeran     | 25.116               | 55                            | 0,22 | 25.116               | 8                             | 0,0 |
| 13  | Kec. Krembangan   | 26.586               | 5                             | 0,02 | 26.586               | 40                            | 0,2 |

| No.          | Kecamatan             | 2014                 |                               |             | 2015                 |                               |             |
|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------|----------------------|-------------------------------|-------------|
|              |                       | Jumlah Seluruh Rumah | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni | %           | Jumlah Seluruh Rumah | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni | %           |
| 14           | Kec. Lakarsantri      | 14.883               | 28                            | 0,19        | 14.883               | 3                             | 0,0         |
| 15           | Kec. Mulyorejo        | 30.705               | 5                             | 0,02        | 30.705               | 33                            | 0,1         |
| 16           | Kec. Pabean Cantian   | 19.190               | 10                            | 0,05        | 19.190               | 40                            | 0,2         |
| 17           | Kec. Pakal            | 9.896                | 0                             | 0,00        | 9.896                | 20                            | 0,2         |
| 18           | Kec. Rungkut          | 24.924               | 10                            | 0,04        | 24.924               | 0                             | 0,0         |
| 19           | Kec. Sambikerep       | 11.125               | 5                             | 0,04        | 11.125               | 20                            | 0,2         |
| 20           | Kec. Sawahan          | 44.444               | 36                            | 0,08        | 44.444               | 14                            | 0,0         |
| 21           | Kec. Semampir         | 32.550               | 30                            | 0,09        | 32.550               | 26                            | 0,1         |
| 22           | Kec. Simokerto        | 20.794               | 5                             | 0,02        | 20.794               | 36                            | 0,2         |
| 23           | Kec. Sukolilo         | 22.733               | 25                            | 0,11        | 22.733               | 44                            | 0,2         |
| 24           | Kec. Sukomanunggal    | 24.929               | 44                            | 0,18        | 24.929               | 34                            | 0,1         |
| 25           | Kec. Tambaksari       | 59.463               | 44                            | 0,07        | 59.463               | 13                            | 0,0         |
| 26           | Kec. Tandes           | 27.716               | 23                            | 0,08        | 27.716               | 41                            | 0,1         |
| 27           | Kec. Tegalsari        | 19.779               | 55                            | 0,28        | 19.779               | 15                            | 0,1         |
| 28           | Kec. Tenggilis Mejoyo | 16.312               | 35                            | 0,21        | 16.312               | 8                             | 0,0         |
| 29           | Kec. Wiyung           | 9.847                | 22                            | 0,22        | 9.847                | 21                            | 0,2         |
| 30           | Kec. Wonocolo         | 19.275               | 22                            | 0,11        | 19.275               | 0                             | 0,0         |
| 31           | Kec. Wonokromo        | 39.099               | 0                             | 0,00        | 39.099               | 31                            | 0,1         |
| <b>Total</b> |                       | <b>679.091</b>       | <b>602</b>                    | <b>0,09</b> | <b>679.091</b>       | <b>723</b>                    | <b>0,11</b> |

Sumber : Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D) Kota Surabaya 2008, Dinas Sosial Kota Surabaya, 2016

#### e. Penataan Ruang

Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah merupakan salah satu bentuk upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan pengendalian pemanfaatan ruang kota. Berdasarkan jenisnya, terdapat 3 (tiga) jenis IMB yang diterbitkan Pemerintah Kota Surabaya yaitu IMB rumah tinggal, IMB non rumah tinggal serta IMB Reklame. Jumlah IMB yang diterbitkan oleh pemerintah Kota Surabaya disajikan pada Tabel 2.31.

Tabel 2.31

IMB yang diterbitkan Kota Surabaya Tahun 2014-2015

| No.   | Uraian            | 2014  | 2015  |
|-------|-------------------|-------|-------|
| 1     | Rumah Tinggal     | 4.461 | 6.411 |
| 2     | Non Rumah Tinggal | 1.306 | 1.239 |
| 3     | Reklame           | 1.413 | 902   |
| Total |                   | 7.180 | 8.552 |

Sumber : Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, 2016



#### f. Perencanaan Pembangunan

Dokumen RPJMD kota Surabaya merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Renstra SKPD merupakan petunjuk bagi penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya dan Rencana Kerja (Renja) SKPD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di tahun bersangkutan.

Pada tahun 2012, Pemerintah Kota Surabaya telah menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2010-2015. Dokumen tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 tahun 2012 untuk RPJPD dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 18 tahun 2012 untuk RPJMD. Dengan ditetapkannya dokumen perencanaan tersebut sebagai peraturan daerah, Pemerintah Kota telah memiliki dokumen perencanaan yang memiliki kekuatan hukum. Pada saat ini dokumen RPJMD 2016-2020 masih dalam proses penyusunan. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.32 berikut.

Tabel 2.32  
Dokumen Perencanaan Kota Surabaya Tahun 2014-2015

| No. | Jenis Dokumen                                      | 2014 | 2015 |
|-----|--|------|------|
| 1   | Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)  | Ada  | Ada  |
| 2   | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) | Ada  | Ada  |
| 3   | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)            | Ada  | Ada  |

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, 2016

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rencana capaian kinerja program pembangunan yang dijabarkan melalui program dan kegiatan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Program pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD tahun 2010-2015 telah mengacu pada dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur. Program-program pembangunan yang dituangkan di dalam dokumen RPJMD tahun 2010-2015 merupakan instrumen kebijakan untuk

mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Implementasi kebijakan dilaksanakan melalui program pembangunan daerah. Sampai dengan tahun 2015 sesuai RPJMD Kota Surabaya Tahun 2014-2015 Pemerintah Kota Surabaya melaksanakan 60 program, dengan rincian 58 program strategi dan 2 program non urusan dan seluruhnya telah dilaksanakan melalui RKPD Kota Surabaya. Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD disajikan dalam Tabel 2.33 berikut.

Tabel 2.33  
Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD Kota Surabaya  
Tahun 2014-2015

| No. | Uraian  | 2014 | 2015 |
|-----|---|------|------|
| 1   | Jumlah Program RPJMD yang harus dilaksanakan          | 60   | 60   |
| 2   | Jumlah Program RKPD                                   | 60   | 60   |
| 3   | Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD (%) | 100  | 100  |

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, 2016

#### g. Perhubungan

Kota Surabaya sampai dengan saat ini masih memiliki 4 terminal yang melayani angkutan umum dengan jenis bis dan angkutan kota (angkot) yang terdiri dari 2 terminal tipe A yaitu Terminal Purabaya dan Terminal Tambak Oso Wilangun, 1 terminal tipe B yaitu Terminal Joyoboyo dan 1 terminal tipe C yaitu Terminal Bratang dengan jumlah angkutan darat pada tahun 2014 sebanyak 10.256 kendaraan, dan pada tahun 2015 menjadi 10.369 kendaraan, seperti yang disajikan pada Tabel 2.34.

Tabel 2.34  
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Kota Surabaya  
Tahun 2014-2015

| No. | Uraian                | 2014   | 2015   |
|-----|-----------------------|--------|--------|
| 1   | Jumlah Terminal Bis   | 4      | 4      |
| 2   | Jumlah Angkutan Darat | 10.256 | 10.369 |

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2016

Jumlah izin trayek yang dikeluarkan dari tahun 2014 sampai tahun 2015 mengalami kenaikan. Pada tahun 2014 sebanyak 6.870 ijin dengan jumlah penduduk sebanyak 2.853.661 jiwa sehingga rasio ijin trayek sebesar 0,0024 dan pada tahun 2015 sebanyak 7.370 ijin dengan jumlah penduduk

sebanyak 2.943.528 sehingga rasio ijin trayek sebesar 0,0025, seperti yang disajikan pada Tabel 2.35.

Tabel 2.35  
Rasio Ijin Trayek Kota Surabaya Tahun 2010-2015

| No. | Uraian                              | 2014      | 2015      |
|-----|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 1   | Jumlah Penduduk                     | 2.853.661 | 2.943.528 |
| 2   | Jumlah Ijin Trayek yang Dikeluarkan | 6.870     | 7.370     |
| 3   | Rasio Ijin Trayek                   | 0,0024    | 0,0025    |

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2016

Selain untuk meningkatkan pelayanan angkutan umum di Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan pemeriksaan kendaraan melalui uji Kir. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara berkala dengan jumlah kendaraan yang lulus uji pada tahun 2014 sebanyak 104.069 kendaraan, dan pada tahun 2015 sebanyak 103.902 kendaraan, di mana rekapitulasi data disajikan ke dalam Tabel 2.36.

Tabel 2.36  
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kota Surabaya  
Tahun 2014-2015

| No. | Uraian                          | 2014    | 2015    |
|-----|---------------------------------|---------|---------|
| 1   | Jumlah Uji Kir Angkutan Umum    | 33.071  | 33.971  |
| 2   | Jumlah kendaraan wajib uji KIR  | 100.091 | 102.052 |
| 3   | Jumlah kendaraan yang diuji KIR | 109.191 | 141.742 |
| 4   | Jumlah kendaraan lulus uji KIR  | 104.069 | 103.902 |

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2016

Upaya peningkatan keselamatan lalu lintas tetap dilakukan baik melalui sosialisasi/pembinaan keselamatan bagi pelajar dan warga kota, uji emisi simpatik, serta melalui penyediaan perlengkapan jalan dan APILL. Salah satu bentuk penyediaan perlengkapan jalan adalah berupa pemasangan rambu baik rambu peringatan, rambu larangan, rambu perintah maupun rambu petunjuk. Jumlah pemasangan rambu-rambu pada tahun 2014 sejumlah 9.910 buah, dan pada tahun 2015 sejumlah 11.283 buah. Dengan penambahan jumlah rambu tersebut, diharapkan mampu mengubah perilaku para pengguna jalan dalam berkendara serta lebih taat terhadap peraturan.

## h. Lingkungan Hidup

Volume produksi sampah Kota Surabaya didasarkan pada asumsi timbulan sampah yang dihasilkan tiap orang per hari. Volume produksi sampah Kota Surabaya dalam satuan m<sup>3</sup>/hari yaitu pada tahun 2014 sebanyak 9.185,94, dan pada tahun 2015 sebanyak 9.475,21, dimana rekap data dapat dilihat pada Tabel 2.37.

Tabel 2.37  
Volume Produksi Sampah dan Jumlah Sampah Yang Ditangani di  
TPA Kota Surabaya Tahun 2014-2015

| No | Uraian   | 2014     | 2015     |
|----|--|----------|----------|
| 1  | Volume Produksi Sampah (m <sup>3</sup> /hari)              | 9.185,94 | 9.475,21 |
| 2  | Jumlah Sampah yang Ditangani di TPA (m <sup>3</sup> /hari) | 4.853    | 4.926    |
| 3  | Persentase Sampah yang Ditangani di TPA (%)                | 53       | 52       |

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan, 2016

Untuk memberikan pelayanan persampahan kepada penduduk Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya telah menyediakan dan meningkatkan jumlah TPS yaitu pada tahun 2014 ada sebanyak 184, dan pada tahun 2015 sebanyak 185. Nilai rasio TPS dapat dilihat pada Tabel 2.38 berikut ini.

Tabel 2.38  
Rasio Daya Tampung Tempat Pembuangan Sampah (TPS)  
per Satuan Penduduk Kota Surabaya  
Tahun 2014-2015

| No  | Uraian                    | 2014      | 2015      |
|-----|---------------------------|-----------|-----------|
| 1   | Jumlah Penduduk           | 2.853.661 | 2.943.528 |
| 2   | TPS                       |           |           |
| 2.1 | Jumlah (Unit)             | 184       | 185       |
| 2.2 | Jumlah Daya Tampung (Ton) | 1.270     | 1.321,8   |
| 3   | Rasio TPS                 | 0,000445  | 0,000449  |

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan, 2016

Disamping masalah persampahan diatas terdapat pula permasalahan lingkungan lainnya, yaitu pencemaran lingkungan. Berdasarkan pengaduan masyarakat atas dugaan pencemaran lingkungan pada tahun 2014 ada sebanyak 81 kasus, dan pada tahun 2015 ada sebanyak 78 kasus. Berikut rekapitulasi data persentase penyelesaian permasalahan lingkungan hidup di Kota Surabaya tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 yang disajikan pada Tabel 2.39.

Tabel 2.39  
Permasalahan Lingkungan Hidup Kota Surabaya  
Tahun 2014-2015

| No | Uraian  | 2014 | 2015 |
|----|---|------|------|
| 1  | Jumlah Kasus Lingkungan yang ada                          | 81   | 78   |
| 2  | Jumlah Kasus Lingkungan yang diselesaikan Pemerintah Kota | 81   | 78   |
| 3  | Persentase Penegakan Hukum (%)                            | 100  | 100  |

Sumber : Badan Lingkungan Hidup, 2016

Penyelesaian permasalahan lingkungan hidup di Kota Surabaya dilakukan melalui rangkaian proses penanganan atas pengaduan yang ditujukan terhadap instansi, atau pelayan publik atau tingkah laku aparat pengadilan dengan melakukan monitoring dan atau observasi dan atau konfirmasi dan atau klarifikasi dan atau investigasi (pemeriksaan) untuk mengungkapkan benar tidaknya hal yang diadukan tersebut. Kasus lingkungan dianggap selesai jika:

1. Hasil uji laboratorium dan pantau pengukuran saat di lapangan tidak melebihi baku mutu lingkungan yang dipersyaratkan;
2. Pelimpahan ke Satpol PP untuk dilakukan penertiban (untuk kegiatan usaha tidak memilik izin);
3. Sudah ada kesepakatan antar pihak;
4. Pernyataan dari pengadu/ pelapor bahwa sudah tidak merasakan dampak gangguan/ pencemaran.

#### i. Pertanian

Pemerintah Kota Surabaya memiliki cukup banyak aset khususnya aset tak bergerak berupa tanah yang tersebar di tiap-tiap wilayah Kota Surabaya. Dalam mengelola dan mengawasi tanah sebanyak itu tentu bukan perkara mudah, perlu adanya bukti kepemilikan memadai, pengawasan dan pemeliharaan reguler agar tanah itu bermanfaat dan menghasilkan pendapatan. Ini yang sekarang tengah dihadapi Pemerintah Kota Surabaya.

Dalam pengurusan aset-aset tanah tersebut Pemerintah Kota berpedoman pada regulasi yang ada, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan barang milik negara/daerah, Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan barang milik daerah dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pengamanan barang milik daerah, yang mana dalam pengawasan dan pengamanan aset tanah disyaratkan bahwa barang milik negara/ daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/ pemerintah daerah. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.40.

Tabel 2.40  
Daftar Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2014-2015

| No  | Status Tanah  | 2010         |                |                           | 2011         |                |                           | 2012         |                |                           | 2013         |                |                           | Jan - Mei 2014 |                |                           | 2015         |                |                           |
|-----|---|--------------|----------------|---------------------------|--------------|----------------|---------------------------|--------------|----------------|---------------------------|--------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|--------------|----------------|---------------------------|
|     |   | Jumlah (M2)  | Persentase (%) | Jumlah Sertifikat /Bidang | Jumlah (M2)  | Persentase (%) | Jumlah Sertifikat /Bidang | Jumlah (M2)  | Persentase (%) | Jumlah Sertifikat /Bidang | Jumlah (M2)  | Persentase (%) | Jumlah Sertifikat /Bidang | Jumlah (M2)    | Persentase (%) | Jumlah Sertifikat /Bidang | Jumlah (M2)  | Persentase (%) | Jumlah Sertifikat /Bidang |
| 1.  | Hak Pengelolaan (HPL)                                       | 7.687.775,00 | 33,93          | 86 sertifikat             | 7.687.775,00 | 32,65          | 86 Sertifikat             | 7.704.855,00 | 32,27          | 87 Bidang                 | 7.704.855,00 | 31,99          | 87 BIDANG                 | 7.704.855,00   | 31,99          | 87 BIDANG                 | 7.687.775,00 | 32,78          | 87 BIDANG                 |
| 2.  | HAK PAKAI (HP)  | 1.143.386,50 | 5,05           | 154 sertifikat            | 5.440.014,50 | 23,11          | 507 Sertifikat            | 5.693.428,50 | 23,85          | 531 Bidang                | 5.901.705,50 | 24,54          | 555 BIDANG                | 5.901.705,50   | 24,54          | 555 BIDANG                | 5.371.239,00 | 22,9           | 601 BIDANG                |
| 3.  | BA P2TUN  | 3.525.644,00 | 15,56          | 297 sertifikat            | 622.669,50   | 2,64           | 10 Bidang                 | 622.669,50   | 2,61           | 10 Bidang                 | 622.669,50   | 2,59           | 10 BIDANG                 | 622.669,50     | 2,59           | 10 BIDANG                 | 622.669,50   | 2,66           | 10 BIDANG                 |
| 4.  | BESLIT  | 622.669,50   | 2,75           | 10 Bidang                 | 379.993,29   | 1,61           | 177 Bidang                | 379.993,29   | 1,59           | 177 Bidang                | 379.993,29   | 1,58           | 177 BIDANG                | 379.993,29     | 1,58           | 177 BIDANG                | 379.993,29   | 1,62           | 177 BIDANG                |
| 5.  | EIGENDOM  | 379.993,29   | 1,68           | 177 Bidang                | 4.171.741,00 | 17,72          | 46 Bidang                 | 4.171.741,00 | 17,47          | 46 Bidang                 | 4.171.741,00 | 17,32          | 46 BIDANG                 | 4.171.741,00   | 17,32          | 46 BIDANG                 | 4.171.741,00 | 17,79          | 46 BIDANG                 |
| 6.  | Tanah Negara  | 4.171.741,00 | 18,41          | 46 Bidang                 | 978.044,00   | 4,15           | 11 Bidang                 | 978.044,00   | 4,1            | 11 Bidang                 | 978.044,00   | 4,06           | 11 BIDANG                 | 978.044,00     | 4,06           | 11 BIDANG                 | 978.044,00   | 4,17           | 11 BIDANG                 |
| 7.  | Fasum/Fasos Penyerahan dari Pengembang                      | 978.044,00   | 4,32           | 11 Bidang                 | 896.107,00   | 3,81           | 354 Bidang                | 896.107,00   | 3,8            | 351 Bidang                | 969.266,51   | 4,02           | 451 BIDANG                | 969.266,51     | 4,02           | 451 BIDANG                | 896.107,00   | 3,82           | 451 BIDANG                |
| 8.  | Petok D BTKD penyerahan dari Bagian Pemerintahan            | 896.107,00   | 3,96           | 354 Bidang                | 3.249.919,00 | 13,8           | 116 Petok D               | 3.249.919,00 | 13,77          | 116 Petok D               | 3.249.919,00 | 13,49          | 116 PETOK D               | 3.249.919,00   | 13,49          | 116 PETOK D               | 3.249.919,00 | 13,86          | 116 PETOK D               |
| 9.  | Hak Milik (SHM)   | 3.249.919,00 | 14,35          | 116 Petok D               | 98.231,00    | 0,42           | 6 Sertifikat              | 91.376,00    | 0,38           | 4 Bidang                  | 91.376,00    | 0,38           | 4 BIDANG                  | 91.376,00      | 0,38           | 4 BIDANG                  | 91.376,00    | 0,39           | 6 BIDANG                  |
| 10. | Hak Guna Bangunan (HGB) Penyerahan dari Bagian Perlengkapan | -            | -              | -                         | 788          | 0              | 1 Sertifikat              | 788          | 0              | 1 Bidang                  | 788          | 0              | 1 BIDANG                  | 788            | 0              | 1 BIDANG                  | 788          | 0              | 1 BIDANG                  |
| 11. | Pembelian/Pelepasan Tanah                                   | -            | -              | -                         | 6.948,00     | 0,03           | 4 Sertifikat              | -            | -              | -                         | -            | -              | -                         | -              | -              | -                         | -            | -              | -                         |
|     |   | -            | -              | -                         | 10.805,70    | 0,05           | 4 Bidang                  | 11.908,70    | 0,05           | 5 Bidang                  | 4.799,70     | 0,03           | 3 BIDANG                  | 4.799,70       | 0,03           | 3 BIDANG                  | 3019         | 0,01           | 7 BIDANG                  |

Sumber : Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, 2016

**j. Kependudukan dan Catatan Sipil**

Dalam aspek perencanaan, aspek kependudukan adalah aspek yang paling penting untuk menentukan strategi perencanaan yang akan diambil. Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2013 tentang perubahan ke empat atas Peraturan Presiden nomor 26 tahun 2009 tentang penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 KTP non elektronik tidak berlaku lagi dan hanya berlaku KTP elektronik, diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih tertib lagi dalam pengurusan dokumennya.

Pada tahun 2014 berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya per 31 Desember 2014, jumlah penduduk yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah sejumlah 2.026.310 jiwa dari total 2.160.362 wajib KTP. Sampai dengan 31 Desember 2015 jumlah penduduk yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah sejumlah 2.043.450 jiwa dari total 2.193.282 wajib KTP.

**k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan untuk menuju kesetaraan gender.

Jumlah Perempuan yang Bekerja di Pemerintah Kota Surabaya

Pada tahun 2014 jumlah pekerja perempuan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 10.112 orang dari 566.649 orang atau sebesar 1,78 persen dari keseluruhan pekerja perempuan yang ada di Surabaya. Pada tahun 2015 jumlah pekerja perempuan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 10.525 orang dari 559.357



orang atau sebesar 1,88 persen dari keseluruhan pekerja perempuan yang ada di Surabaya. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.41.

Tabel 2.41  
Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Surabaya  
Tahun 2014 –2015

| No. | Uraian  | 2014    | 2015    |
|-----|---|---------|---------|
| 1   | Jumlah Pekerja Perempuan                                  | 566.649 | 559.357 |
| 2   | Jumlah Perempuan yang Bekerja di Pemerintah Kota Surabaya | 10.112  | 10.525  |
| 3   | % partisipasi perempuan di lembaga pemerintah kota        | 1,78    | 1,88    |

Sumber : Badan Kepegawaian dan Diklat, 2016

#### Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat dan pola partisipasi angkatan kerja cenderung bergantung pada ketersediaan kesempatan kerja dan perbedaan pada tuntutan memperoleh pendapatan antar kelompok penduduk. Dibandingkan dengan laki-laki, tingkat partisipasi perempuan cenderung lebih rendah, tidak hanya karena peran ganda mereka dalam rumah tangga tetapi juga berkaitan dengan komitmen perempuan dalam angkatan kerja selama kehidupannya. Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan pada tahun 2014 sebanyak 599.414 orang dan yang bekerja sebanyak 566.649 orang atau sebesar 94,53 persen dari angkatan kerja perempuan, pada tahun 2015 jumlah angkatan kerja sebanyak 585.114 orang dan yang bekerja sebanyak 559.357 orang atau sebesar 95,59 persen dari angkatan kerja perempuan, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.42

Tabel 2.42  
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Surabaya  
Tahun 2014-2015

| No. | Uraian                                      | 2014    | 2015    |
|-----|---|---------|---------|
| 1   | Jumlah angkatan kerja perempuan             | 599.414 | 585.144 |
| 2   | Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan | 566.649 | 559.357 |
| 3   | % partisipasi angkatan kerja perempuan      | 94,53   | 95,59   |

Sumber : BPS dan Dinas Tenaga Kerja, 2016

### Kasus Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.43 di bawah ini.

Tabel 2.43  
KDRT Kota Surabaya Tahun 2014- 2015

| No. | Uraian              | 2014    | 2015    |
|-----|---------------------|---------|---------|
| 1   | Jumlah Rumah Tangga | 846.472 | 896.967 |
| 2   | Jumlah KDRT         | 70      | 41      |
| 3   | Rasio KDRT          | 0,008   | 0,005   |

Sumber : Bapemas dan KB Kota Surabaya, 2016

Jumlah kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2014 sebanyak 70 kasus dan pada tahun 2015 terdapat 41 kasus. Pemerintah Kota Surabaya telah mampu melakukan fasilitasi terhadap semua kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penanganan atas tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut dilakukan dengan tindakan konseling, medis berupa rujukan ke pusat pelayanan terpadu/rumah sakit, hukum berupa konsultasi hukum serta pendampingan ke Polisi, Pengadilan Agama (PA) maupun Pengadilan Negeri (PN), Psikososial meliputi identifikasi kasus, konseling, home visit, out reach, sosialisasi serta reintegrasi (pelatihan ketrampilan) dan pemberdayaan (bimbingan rohani, pemberian ketrampilan serta pendampingan pemulangan dan *shelter* (Rumah Aman).

### Penyelesaian Pengaduan Perempuan dan Anak

Kepedulian Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat digambarkan dalam indikator jumlah penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak umumnya adalah tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), non KDRT dan *Trafficking* (perdagangan

orang), untuk rekap data penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dapat dilihat pada Tabel 2.44.

Tabel 2.44  
Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak  
dari Tindak Kekerasan Kota Surabaya Tahun 2014 - 2015

| No. | Uraian  | 2014 | 2015 |
|-----|---|------|------|
| 1   | Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak                    | 219  | 287  |
| 2   | Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak yang terselesaikan | 219  | 287  |
| 3   | % penyelesaian pengaduan  | 100  | 100  |

Sumber : Bapemas dan KB kota Surabaya, 2016

Jumlah pengaduan kasus KDRT, non KDRT dan *trafficking* terhadap perempuan dan anak pada tahun 2014 sebanyak 219 kasus dan pada tahun 2015 sebanyak 287 kasus, semua pengaduan kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga terselesaikan seluruhnya.

#### I. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga yang berkualitas dilakukan melalui pengendalian angka kelahiran. Pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kota Surabaya telah mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB.

##### Jumlah Akseptor KB

Jumlah akseptor KB pada tahun 2014 sebanyak 62.205 atau sebesar 12,91 persen dari jumlah PUS 481.687 sedangkan pada tahun 2015 sebanyak 53.989 akseptor KB atau sebesar 10,62 persen dari 508.380 PUS. Akseptor KB dimaksud merupakan akseptor KB baru yaitu Pasangan Usia Subur (PUS) yang pertama kali menggunakan alat kontrasepsi atau PUS yang kembali menggunakan alat kontrasepsi setelah mengalami keguguran/melahirkan. Selengkapnya untuk rekap data pasangan usia subur dan jumlah akseptor KB dapat dilihat pada Tabel 2.45.

Tabel 2.45  
Rasio Akseptor KB Kota Surabaya Tahun 2014- 2015

| No. | Uraian                     | 2014    | 2015    |
|-----|----------------------------|---------|---------|
| 1   | Jumlah Pasangan Usia Subur | 481.687 | 508.380 |
| 2   | Jumlah Akseptor KB         | 62.205  | 53.989  |
| 3   | Rasio Akseptor KB (%)      | 12,91   | 10,62   |

Sumber : Bapemas dan KB Kota Surabaya, tahun 2016

#### Jumlah Cakupan Peserta KB Aktif

Jumlah peserta KB Aktif pada tahun 2014 sebanyak 392.206 atau sebesar 81,42 persen dari 481.687 Pasangan Usia Subur (PUS), dan pada tahun 2015, jumlah peserta KB Aktif tahun 2015 sebanyak 407.724 atau sebesar 80,20 persen dari 508.380 Pasangan Usia Subur (PUS). Terjadinya penurunan peserta program KB aktif tidak dapat dilepaskan dari angka *Drop Out* peserta KB jenis Pil, Suntik dan Kondom. Selengkapnya untuk rekap data jumlah pasangan usia subur dan jumlah peserta program KB aktif dapat dilihat pada Tabel 2.46.

Tabel 2.46  
Cakupan Peserta KB Aktif Kota Surabaya Tahun 2014- 2015

| No. | Uraian                          | 2014    | 2015    |
|-----|---------------------------------|---------|---------|
| 1   | Jumlah Pasangan Usia Subur      | 481.687 | 508.380 |
| 2   | Jumlah Peserta Program KB Aktif | 392.206 | 407.724 |
| 3   | Cakupan Peserta KB Aktif        | 81,42   | 80,20   |

Sumber : Bapemas dan KB Kota Surabaya, tahun 2016

#### Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Masyarakat miskin dengan tingkat pendidikan dan kesejahteraan yang rendah memiliki angka kelahiran total yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat dengan tingkat pendidikan dan kesejahteraan lebih tinggi. Upaya Pemerintah Kota mengendalikan laju pertumbuhan penduduk memberikan prioritas kepada kelompok masyarakat miskin dengan cara menurunkan angka kelahiran melalui Program Keluarga Berencana. Salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan adalah penyediaan pelayanan KB gratis bagi masyarakat yang berasal dari Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera I (KS-I). Selain itu, secara mikro kegiatan tersebut juga bertujuan

meningkatkan kualitas keluarga dengan kecilnya jumlah anggota suatu keluarga maka keluarga tersebut diharapkan dapat meningkatkan gizi makanan, tingkat kesehatan dan pendidikan anggota keluarganya. Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasarnya (*basic needs*) seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, papan, sandang dan kesehatan sedangkan Keluarga Sejahtera Tahap I adalah keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal yaitu 1) melaksanakan ibadah menurut agama oleh masing-masing anggota keluarga; 2) pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih; 3) seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian; 4) bagian yang terluas dari lantai rumah bukan dari tanah; 5) bila anak sakit atau pasangan usia subur ingin ber KB dibawa ke sarana/petugas kesehatan.

Pada tahun 2014 jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I sebanyak 193.550 atau 27,18 persen dari 712.172 keluarga. Jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I tahun 2015 masih dalam proses pendataan.

#### **m. Sosial**

Pemerintah Kota Surabaya telah berupaya untuk menangani permasalahan sosial khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). PMKS adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan kejadian bencana. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012, PMKS terdiri dari 26 jenis yaitu abak balita terlantar, anak terlantar, anak yang berhadapan dengannhukum, anak jalanan, anak dengan kedisabilitas, anak korban tindak kekerasan, anak yang memerlukan

perlindungan khusus, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, tuna susila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, bekas narapidana, orang dengan HIV/AIDS, korban penyalahgunaan napza, korban trafficking, korban tindak kekerasan, pekerja migran yang bermasalah sosial, korban bencana alam, korban bencana sosial, perempuan rawan sosial ekonomi, fakir miskin, keluarga bermasalah sosial psikologis, dan komunitas adat terpencil.

#### PMKS yang Memperoleh Bantuan dan yang Ditangani

Pada tahun 2014 jumlah PMKS terdata sebanyak 47.199 orang dan yang ditangani sebanyak 27.652 orang. Sedangkan, selama tahun 2015 jumlah PMKS terdata sebanyak 49.881 orang dan yang ditangani sebanyak 28.907 orang. Adapun penanganan yang dilakukan oleh Dinas Sosial meliputi pembinaan dan pelatihan keterampilan, pemulangan PMKS ke daerah asal, perbaikan rumah tidak layak huni, pemberian permakanaan, dan pelayanan di 5 (lima) Liponsos di bawah UPTD Dinas Sosialis . Data PMKS yang ditangani dapat dilihat pada tabel 2.47.

Tabel 2.47  
Penanganan PMKS Kota Surabaya Tahun 2014 - 2015

| No. | Uraian                             | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   |
|-----|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1   | Jumlah PMKS yang ada               | 41.805 | 42.236 | 44.597 | 47.199 | 49.881 |
| 2   | Jumlah PMKS yang ditangani         | 33.937 | 16.241 | 17.718 | 27.652 | 28.907 |
| 3   | Persentase PMKS yang ditangani (%) | 81,18  | 38,45  | 39,73  | 58,59  | 57,95  |

Sumber : Dinas Sosial Kota Surabaya, 2016

#### n. Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan di Kota Surabaya menunjukkan perkembangan yang semakin membaik. Peningkatan jumlah kesempatan kerja yang tercipta turut mendukung kondisi tersebut. Hal ini ditandai dengan peningkatan angka partisipasi angkatan kerja.

### Angka Partisipasi Kerja

Dari tabel 2.49 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Surabaya mengalami peningkatan dari tahun 2014 sebanyak 1.465.502 menjadi 1.468.094 pada tahun 2015.

Tabel 2.48  
Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kota Surabaya  
Tahun 2014-2015

| No. | Uraian                                | 2014      | 2015      |
|-----|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 1   | Angkatan Kerja 15 Tahun Keatas        | 1.465.502 | 1.468.094 |
| 2   | Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas | 2.201.854 | 2.334.871 |
| 3   | Rasio angkatan kerja                  | 0,66      | 0,62      |

Sumber : BPS Kota Surabaya, 2016

### Sengketa Pengusaha dan Pekerja

Jumlah perusahaan di Kota Surabaya mengalami peningkatan dari sebanyak 12.690 perusahaan di tahun 2014 menjadi 12.782 perusahaan pada tahun 2015. Dengan meningkatnya jumlah perusahaan tersebut di Kota Surabaya ternyata tidak diikuti dengan bertambahnya jumlah sengketa antara pekerja dan pengusaha. Pada tahun 2014 terdapat 366 kasus sengketa pengusaha dengan pekerja dan pada tahun 2015 jumlah sengketa pekerja pengusaha sebanyak 244. Faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa antara pekerja dengan pengusaha antara lain adanya pengaduan terkait masalah jamsostek, masalah upah pekerja, dan sistem kontrak kerja waktu tertentu. Secara rinci rekap data sengketa pekerja-pengusaha dapat dilihat pada Tabel 2.49.

Tabel 2.49  
Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Kota Surabaya  
Tahun 2014 - 2015

| No. | Uraian                            | 2014   | 2015   |
|-----|-----------------------------------|--------|--------|
| 1   | Jumlah Sengketa Pekerja Pengusaha | 366    | 244    |
| 2   | Jumlah Perusahaan                 | 12.690 | 12.782 |
| 3   | Rasio sengketa                    | 2,88   | 1,91   |

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, 2016

### Tingkat Pengangguran Terbuka

Banyaknya perusahaan yang ada di Surabaya diikuti dengan persaingan pencari kerja. Dari pencari kerja tersebut ada yang sudah ditempatkan dan ada yang masih mencari atau pengangguran terbuka. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan semakin tingginya tingkat pengangguran di Surabaya antara lain faktor kependudukan yang terdiri dari jumlah penduduk usia produktif yang cukup tinggi namun tidak dibekali dengan ketrampilan dan mental kerja, tingkat pendidikan rendah, tingkat urbanisasi yang tinggi serta faktor jumlah lapangan kerja terbatas, faktor tenaga kerja kontrak (*outsourcing*) dan faktor pemutusan hubungan kerja.

Angka pengangguran terbuka di tahun 2014 sebesar 5,82 persen dan tahun 2015 sebesar 7,01 persen. Berikut adalah rekap data tentang tingkat pengangguran terbuka Tahun 2014 - 2015 disajikan pada Tabel 2.50.

Tabel 2.50  
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya  
Tahun 2014 -2015

| No | Uraian  | 2014      | 2015      |
|----|---|-----------|-----------|
| 1  | Jumlah Penganggur Terbuka Usia Angkatan Kerja | 85.345    | 102.914   |
| 2  | Jumlah Penduduk Angkatan Kerja                | 1.465.502 | 1.468.094 |
| 3  | % pengangguran terbuka                        | 5,82      | 7,01      |

Sumber : BPS Kota Surabaya, 2016

### Pencari Kerja yang Ditempatkan dan Difasilitasi

Untuk menurunkan angka pengangguran terbuka, Pemerintah Kota Surabaya berupaya mengurangi angka tersebut dengan cara memfasilitasi para pencari kerja dengan kegiatan pelatihan ketrampilan kerja, pemagangan, bimbingan *softskill*, bursa kerja, dan sebagainya. Kegiatan tersebut diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran terbuka dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi para pengangguran. Secara rinci pencari kerja yang difasilitasi dan ditempatkan dapat dilihat pada Tabel 2.51.



Tabel 2.51  
Pencari Kerja yang Difasilitasi dan Ditempatkan Kota Surabaya  
Tahun 2014 - 2015

| No. | Uraian  | 2014   | 2015   |
|-----|---|--------|--------|
| 1   | Jumlah Pencari Kerja yang Difasilitasi dan berhasil ditempatkan | 3.902  | 5.225  |
| 2   | Jumlah Pencari Kerja yang difasilitasi                          | 12.307 | 85.345 |

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, 2016

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa dengan adanya pelatihan jumlah angkatan kerja yang ditempatkan semakin meningkat setiap tahunnya, yang mana dapat ditarik kesimpulan bahwa program kegiatan pelatihan ketrampilan kerja, pemagangan, bimbingan *softskill*, bursa kerja, dan sebagainya tersebut sangat membantu pengurangan angka pengangguran terbuka di Kota Surabaya.

Pada tahun 2014 pencari kerja yang difasilitasi sebanyak 3.902 orang, sedangkan pada 2015 jumlah pencari kerja yang difasilitasi dan ditempatkan berjumlah 5.225 orang.

#### Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Keselamatan dan perlindungan Tenaga Kerja merupakan aspek yang penting dalam masalah pekerjaan. Dengan adanya keselamatan dan perlindungan tenaga kerja atau K3, dapat memberikan dampak banyaknya masyarakat yang berkerja dan menurunkan angka pengangguran terbuka. Secara rinci rekap data presentase perusahaan yang menerapkan K3 dapat dilihat pada Tabel 2.52.

Tabel 2.52  
Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja  
Kota Surabaya Tahun 2014-2015

| No | Uraian                                       | 2014   | 2015   |
|----|--|--------|--------|
| 1  | Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3         | 3.242  | 3.303  |
| 2  | Jumlah Perusahaan                            | 12.476 | 12.782 |
| 3  | Persentase Perusahaan yang Menerapkan K3 (%) | 25,98  | 25,84  |

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, 2016

Jumlah perusahaan yang menerapkan K3 pada tahun 2014 sebanyak 3.242 perusahaan dari 12.476 perusahaan atau sebesar 25,98 persen, sedangkan pada tahun 2015 perusahaan yang menerapkan sistem K3 terdapat 3.303 perusahaan dari 12.782 perusahaan yang ada di Surabaya, yaitu sebesar 25,84 persen.

#### **o. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**

Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan Koperasi merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian, Dengan demikian upaya untuk memberdayakan UMKM harus terencana, sistematis dan menyeluruh baik pada tataran makro, meso dan mikro.

#### **Koperasi**

Pada tahun 2014 jumlah koperasi aktif mencapai 82,90 persen atau sebanyak 1.357 unit dari 1.637 total jumlah koperasi sedangkan sampai dengan tahun 2015 jumlah koperasi aktif sebanyak 1.403 unit atau sebesar 84,06 persen dari jumlah total koperasi yang ada sebanyak 1.669 unit. Secara rinci presentase koperasi aktif dapat dilihat pada Tabel 2.53.

Tabel 2.53  
Persentase Koperasi Aktif Kota Surabaya Tahun 2014 - 2015

| <b>No.</b> | <b>Uraian</b>         | <b>2014</b> | <b>2015</b> |
|------------|-----------------------|-------------|-------------|
| 1          | Jumlah koperasi       | 1.637       | 1.669       |
| 2          | Jumlah koperasi aktif | 1.357       | 1.403       |
| 3          | % koperasi aktif      | 82,90       | 84,06       |

Sumber : Dinas Koperasi & UMKM, 2016

#### **UMKM**

Upaya Pemerintah Kota Surabaya untuk memperkuat dasar perekonomian juga ditunjukkan dengan peningkatan jumlah UMKM. Pada tahun 2014 jumlah UMKM di Kota Surabaya tercatat sebanyak 28.759 UMKM yang terdiri dari 18.921 Usaha Mikro, 7.116 Usaha Kecil dan 2.722 Usaha Menengah. Sampai tahun 2015 tercatat sebanyak 29.507 UMKM yang terdiri dari 19.650 Usaha Mikro, 7.150 Usaha Kecil dan 2.707 Usaha

Menengah. Secara rinci rekap data presentase usaha mikro dan kecil Kota Surabaya dapat dilihat pada Tabel 2.54.

Tabel 2.54  
Persentase Usaha Mikro dan Kecil  
Kota Surabaya Tahun 2014 2015

| No. | Uraian                       | 2014   | 2015   |
|-----|------------------------------|--------|--------|
| 1   | Jumlah seluruh UMKM          | 28.759 | 29.507 |
| 2   | Jumlah Usaha Mikro dan Kecil | 26.037 | 26.800 |
| 3   | %Usaha Mikro dan Kecil       | 90,54  | 90,83  |

Sumber : Dinas Koperasi & UMKM, 2016

#### p. Penanaman Modal

Pengaruh penanaman modal atau investasi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah dapat di lihat melalui *multiplier effect* yang di timbulkannya. *Multiplier effect* atau efek pengganda dari investasi dipengaruhi oleh besarnya minat masyarakat untuk mengkonsumsi.

#### PMA dan PMDN

Penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing dapat dilakukan dalam bentuk penanaman modal langsung (*direct investment*) maupun penanaman modal portofolio surat berharga (*portofolio investment*). Berikut ini tabel realisasi penanaman modal langsung PMDN dan PMA di Kota Surabaya. Jumlah proyek PMDN dan PMA kota Surabaya selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.55 di bawah ini.

Tabel 2.55  
Jumlah Proyek PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2014- 2015

| No. | Uraian             | 2014 | 2015 |
|-----|--------------------|------|------|
| 1   | Jumlah Proyek PMDN | 9    | 8    |
| 2   | Jumlah Proyek PMA  | 24   | 13   |
| 3   | Total              | 33   | 21   |

Sumber : Badan Koordinasi Pelayanan dan penanaman Modal, 2016

Pada tahun 2014 jumlah investasi PMA dan PMDN sebanyak 33 proyek, dan sampai dengan tahun 2015 tercatat sejumlah 21 proyek PMA dan PMDN yang berinvestasi.

### Jumlah Investasi PMA dan PMDN

Kegiatan perekonomian baik yang di lakukan lewat Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mampu memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Surabaya. Laporan realisasi Penanaman Modal di Surabaya merupakan potret atas aktifitas penanaman modal berdasarkan persetujuan perijinan baik berupa Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.56 di bawah ini.

Tabel 2.56  
Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2014- 2015

| No. | Uraian                      | 2014     | 2015     |
|-----|-----------------------------|----------|----------|
| 1   | Persetujuan                 |          |          |
| 1.1 | Jumlah Proyek               | 76       | 83       |
| 1.2 | Nilai Investasi (Rp Milyar) | 1.653,75 | 3.658,70 |
|     | (USD Juta)                  | 184,17   | 100,44   |
| 2   | Realisasi                   |          |          |
| 2.1 | Jumlah Proyek               | 33       | 21       |
| 2.2 | Nilai Investasi (Rp Milyar) | 639,63   | 828,42   |
|     | (USD Juta)                  | 45,29    | 14,67    |

Sumber : Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal, 2016

Pada tahun 2014 nilai realisasi investasi PMA dan PMDN sebesar 639,63 milyar rupiah dan 45,29 juta USD. Sampai dengan 2015 dari nilai realisasi investasi PMA dan PMDN di kota Surabaya mengalami peningkatan menjadi 828,42 milyar rupiah yang diperoleh dari investasi 21 unit PMA dan PMDN. Investasi / penanaman modal langsung (*direct investment*) berkontribusi dalam membuka lapangan kerja baru.

### Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Adanya investasi PMA dan PMDN di Kota Surabaya menimbulkan dampak positif terhadap tingkat tenaga kerja di Surabaya. Peningkatan nilai dan proyek investasi PMA dan PMDN berkontribusi dalam membuka lapangan kerja baru yang mana berkaitan dengan daya serap tenaga kerja sebagai dampak investasi langsung, dimana rekap tabel dapat dilihat pada Tabel 2.57 di bawah ini.

Tabel 2.57  
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun 2014- 2015

| No. | Uraian  | 2014  | 2015  |
|-----|---|-------|-------|
| 1   | Jumlah PMA/PMDN   | 33    | 21    |
| 2   | Jumlah Tenaga Kerja Yang Bekerja Pada Perusahaan PMA/PMDN | 2.171 | 1.223 |
| 3   | Rasio Daya Serap Tenaga Kerja                             | 94,39 | 58,24 |

Sumber : Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal, 2016

Berdasarkan realisasi penanaman modal PMA dan PMDN, pada tahun 2014 terdapat 33 proyek realisasi PMA dan PMDN dengan jumlah tenaga kerja terserap 2.171 orang dan rasio daya serap tenaga kerja sebesar 94,39. Sampai dengan tahun 2015 jumlah realisasi proyek PMA dan PMDN sebanyak 21 proyek dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 1.223 orang dengan rasio daya serap tenaga kerja sebesar 58,24.

#### q. Kebudayaan

Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka mendukung bidang kepariwisataan banyak mengadakan kegiatan festival seni dan budaya, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah kota maupun pihak swasta.

##### Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Pada tahun 2014 sebanyak 449 festival seni dan budaya yang diselenggarakan di Kota Surabaya, sedangkan tahun 2015 sebanyak 613 festival seni dan budaya. Banyaknya penyelenggaraan festival seni dan budaya bertujuan untuk mendukung peningkatan kunjungan wisatawan serta memberi kesempatan pada seniman – seniman kota Surabaya untuk menampilkan karyanya, dimana untuk rekap penyelenggaraan festival seni dan budaya dapat dilihat pada Tabel 2.58 di bawah ini.

Tabel 2.58  
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kota Surabaya  
Tahun 2014- 2015

| Tahun | Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya |
|-------|---|
| 2014  | 449   |
| 2015  | 613   |

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2016

#### Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya

Pemerintah Kota Surabaya dalam mendukung perkembangan kesenian menyediakan sarana berupa gedung / tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatan kesenian / berekspresi. Pada tahun 2014 terdapat 18 sarana penyelenggaraan seni dan budaya di Kota Surabaya, dan sampai dengan tahun 2015 terdapat 17 sarana penyelenggaraan seni dan budaya karena 1 gedung sedang di renovasi yaitu gedung merah putih. Adapun 17 sarana penyelenggaraan seni dan budaya tersebut adalah:

1. Gedung Pringgodani di UPTD THR
2. Gedung Srimulat di UPTD THR
3. Gedung Ludruk di UPTD THR
4. Gedung serbaguna di UPTD THR
5. Pendopo di UPTD THR
6. Teater terbuka di UPTD THR
7. Lapangan di UPTD THR
8. Panggung musik di UPTD Kenjeran
9. Pendopo agung di UPTD Kenjeran
10. Lapangan di UPTD Kenjeran
11. Gedung Balai Budaya
12. Gedung Balai Pemuda Barat
13. Halaman Balai Pemuda
14. Pendopo gedung GNI
15. Gedung serbaguna di UPTD Ampel
16. Lapangan di Tugu Pahlawan
17. Auditorium di Museum 10 Nopember 1945

Tabel 2.59  
Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya Kota Surabaya  
Tahun 2014-2015

| Tahun | Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya |
|-------|---|
| 2014  | 18  |
| 2015  | 17  |

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2016

### Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya

Dalam rangka perlindungan dan pelestarian terhadap cagar budaya yang ada di kota Surabaya, pemerintah kota melakukan upaya perlindungan dan pelestarian dalam bentuk pemberian penetapan terhadap benda, situs dan kawasan sebagai cagar budaya dan pengawasan agar jika ada proses renovasi tidak sampai merubah bentuk aslinya. Jumlah benda, situs dan kawasan yang dilindungi dan dilestarikan oleh Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2014 sebanyak 257 pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 sebanyak 266.

Pada tahun 2014 dan 2015, seluruh benda, situs dan kawasan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya dilindungi dan dilestarikan, di mana 257 Benda, Situs dan Kawasan pada tahun 2014 dan 266 benda, situs dan kawasan pada tahun 2015 dilindungi dan dilestarikan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Berikut ini adalah rekapitulasi data jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dapat dilihat pada Tabel 2.60 di bawah ini

Tabel 2.60  
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan  
Kota Surabaya Tahun 2014 - 2015

| No. | Uraian   | 2014 | 2015 |
|-----|--|------|------|
| 1   | Total Benda, Situs dan Kawasan yang Dimiliki Daerah            | 257  | 266  |
| 2   | Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan | 257  | 266  |
| 3   | % pelestarian  | 100  | 100  |

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2016

#### r. **Kepemudaan dan Olah Raga**

Dalam pembinaan kegiatan kepemudaan sangat memerlukan ketersediaan sarana dan prasarana baik bersifat outdoor maupun indoor antara lain seperti gelanggang/balai remaja yang sangat dibutuhkan sebagai pusat kegiatan-kegiatan aktif remaja dan pemuda di perkotaan. Salah satu yang masih dimiliki Pemerintah Kota Surabaya adalah Gedung Gelanggang Remaja di Kecamatan Tambaksari, yang termasuk dalam Kawasan Kompleks Olahraga Gelora 10 Nopember. Gelanggang Remaja masih aktif digunakan untuk kegiatan olahraga, kesenian, dan sosial kemasyarakatan lainnya. Selain itu juga terdapat sekitar 116 gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) yang tersebar di lingkungan permukiman, kawasan militer, perguruan tinggi, pendidikan kedinasan, KONI, maupun Pemerintah Provinsi yang dapat digunakan warga dan masyarakat umum Kota Surabaya, sehingga rasio Gelanggang/Balai Remaja 0,547 dan pada tahun 2015 sebesar 0,44.

Tabel 2.61  
Jumlah Gelanggang/Balai Remaja (Selain Milik Swasta) Kota Surabaya  
Tahun 2014 – Tahun 2015

| No. | Uraian                                    | 2014    | 2015    |
|-----|---|---------|---------|
| 1   | Jumlah Penduduk Usia Remaja (15-20 tahun) | 212.152 | 261.248 |
| 2   | Jumlah Gelanggang/Balai Remaja            | 116     | 116     |
| 3   | Rasio Gelanggang/Balai Remaja             | 0,547   | 0,44    |

Sumber: Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil dan Dinas Pemuda & Olahraga, 2016

Pencapaian prestasi cabang olahraga tidak lepas dari fasilitas sarana dan prasarana olahraga yang sesuai dengan standar. Prasarana olahragamilik Pemerintah Kota Surabaya yang bersifat terbuka (lapangan olahraga) maupun tertutup (gelanggang olahraga) yang tersebar di seluruh wilayah Kota Surabaya diantaranya adalah Lapangan THOR, Lapangan Softball, Lapangan Hockey, Gelora 10 Nopember, Gelora Bung Tomo dan pada tahun 2015 telah dibangun sebanyak 67 lapangan olahraga. Selain itu terdapat juga Lapangan maupun Gelanggang milik instansi lain (selain milik swasta) yang tersebar pada lingkungan perumahan, perguruan tinggi, pendidikan kedinasan, kawasan militer, KONI dan Pemerintah Provinsi



yaitu sebanyak 557 lapangan pada tahun 2014 dan sampai dengan tahun 2015 jumlah lapangan olahraga di Kota Surabaya meningkat menjadi 624 lapangan olahraga. Untuk rincian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.62  
Lapangan Olahraga di Kota Kota Surabaya  
Tahun 2014 - 2015

| No. | Uraian                   | 2014      | 2015      |
|-----|--------------------------|-----------|-----------|
| 1   | Jumlah Penduduk          | 2.853.661 | 2.902.736 |
| 2   | Jumlah Lapangan Olahraga | 557       | 624       |
| 3   | Rasio Lapangan Olahraga  | 0,195     | 0,215     |

Sumber: Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil dan Dinas Pemuda & Olahraga, 2016

#### s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Sesuai dengan ketentuan umum Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan disebutkan bahwa Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dengan pengertian ini bahwa dapat dijelaskan semua Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Kepemudaan (OKP) merupakan bagian dari Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Dalam rangka tertib administrasi terkait keberadaan organisasi masyarakat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah maka setiap Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Indonesia wajib mendaftarkan diri ke pemerintah, baik pusat maupun daerah, sesuai dengan ruang lingkupnya masing-masing. Ormas yang tidak berbadan hukum dan memenuhi persyaratan akan mendapat Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari lembaga yang berwenang, sedangkan bagi Ormas tidak berbadan hukum yang tidak memenuhi persyaratan untuk diberi surat keterangan terdaftar dilakukan pendataan sesuai dengan alamat dan domisili. Untuk Ormas yang

berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2014 jumlah Ormas terdaftar dan aktif sebanyak 146 Ormas. Jumlah ini meningkat sampai dengan tahun 2015 menjadi 151 Ormas terdaftar dan aktif. Untuk rincian dapat dilihat pada Tabel 2.63 berikut.

Tabel 2.63  
Jumlah Ormas Kota Surabaya Tahun 2014 – 2015

| No. | Uraian                   | 2014 | 2015 |
|-----|--------------------------|------|------|
| 1   | Jumlah Ormas Aktif       | 146  | 151  |
| 2   | Jumlah Ormas Tidak Aktif | -    | -    |
| 3   | Jumlah Ormas Terdaftar   | 146  | 151  |

Sumber: Bakesbangpol dan Linmas 2016

Pemerintah Kota Surabaya melakukan pembinaan/pemberdayaan Ormas untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Ormas. Dalam melakukan pemberdayaan Ormas, Pemerintah Kota Surabaya menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran, dan integritas Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bentuk pemberdayaan Ormas melalui fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk rincian dapat dilihat pada Tabel 2.64 berikut.

Tabel 2.64  
Kegiatan Pembinaan terhadap Ormas Kota Surabaya  
Tahun 2014 – 2015

| Uraian                                   | 2014 | 2015 |
|--|------|------|
| Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap Ormas | 3    | 2    |

Sumber: Bakesbangpol dan Linmas 2016

Disamping melakukan pembinaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Kota Surabaya juga telah melakukan pembinaan terhadap Organisasi Politik. Pembinaan ini bertujuan untuk memberikan pendidikan dan pengetahuan politik bagi masyarakat khususnya anggota organisasi politik. Untuk rincian dapat dilihat pada Tabel 2.65 berikut.

Tabel 2.65  
Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Kota Surabaya  
Tahun 2014 – 2015

| Uraian                                   | 2014 | 2015 |
|--|------|------|
| Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah | 2    | 2    |

Sumber : Bakesbangpol dan Linmas 2016

**t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**

**Penegakan Perda**

Sebagai salah satu unsur strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah kepatuhan masyarakat dan disiplin aparatur dalam menegakkan peraturan.

Anggota Polisi Pamong Praja di Kota Surabaya pada tahun 2014 berjumlah sebanyak 497 orang. Dengan jumlah penduduk Kota Surabaya pada tahun 2014 sebesar 2.853.661 jiwa maka rasio jumlah tenaga Polisi Pamong Praja per 10.000 orang penduduk adalah sebanyak 1,74 orang. Sedangkan sampai dengan tahun 2015 jumlah Polisi Pamong Praja adalah sebanyak 532 orang, maka rasio jumlah tenaga Polisi Pamong Praja per 10.000 orang penduduk adalah sebanyak 1,80 orang dari total jumlah penduduk sebanyak 2.943.528 jiwa. Untuk rincian dapat dilihat pada tabel 2.66 berikut.

Tabel 2.66  
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kota Surabaya Tahun 2014 - 2015

| No. | Uraian   | 2014      | 2015      |
|-----|--|-----------|-----------|
| 1   | Jumlah Polisi Pamong Praja                           | 497       | 532       |
| 2   | Jumlah Penduduk                                      | 2.853.661 | 2.943.528 |
| 3   | Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk | 1,74      | 1,80      |

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja 2016

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2005 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya memberikan ketentuan bahwa Satpol PP bertugas untuk memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Salah satu upaya untuk melaksanakan tugas tersebut melalui patroli dalam rangka pemantauan dan penertiban pelanggaran perda/K3.

Pada tahun 2014 jumlah patroli petugas Satuan Polisi Pamong Praja pemantauan dan penyelesaian pelanggaran K3 yaitu sejumlah 147 kali patroli dalam 24 jam/setiap harinya, dan padatahun 2015 jumlah patroli dilaksanaka dengan frekuensi yang sama, yaitu 147 kali patroli dalam 24 jam/setiap harinya. Untuk rincian dapat dilihat pada tabel 2.67 berikut.

Tabel 2.67  
Cakupan Patroli Petugas Satpol PP Kota Surabaya  
Tahun 2014 - 2015

| Tahun | Jumlah Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 |
|-------|---|
| 2014  | 147 kali  |
| 2015  | 147 Kali  |

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja 2016

Tabel 2.68  
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Kota Surabaya  
Tahun 2014 - 2015

| No. | Uraian                             | 2014   | 2015   |
|-----|------------------------------------|--------|--------|
| 1   | Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3 | 84,382 | 72,218 |
| 2   | Jumlah Pelanggaran K3              | 84,382 | 72,218 |
| 3   | % penyelesaian pelanggaran K3      | 100    | 100    |

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja 2016

Anggota Linmas di kota Surabaya pada tahun 2014 berjumlah sebanyak 35.556 orang. Dengan jumlah penduduk Kota Surabaya pada tahun 2014 sebesar 2.853.661 jiwa maka rasio jumlah tenaga linmas per 10.000 orang penduduk adalah sebanyak 124,6 orang. Sedangkan sampai dengan 2015 jumlah linmas adalah sebanyak 36.969 orang, maka rasio jumlah tenaga linmas per 10.000 orang penduduk adalah sebesar 125,59 orang dari total jumlah penduduk sebanyak 2.943.528 jiwa.

Tabel 2.69  
Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk Kota Surabaya  
Tahun 2014 – 2015

| No. | Uraian                                  | 2014      | 2015      |
|-----|---|-----------|-----------|
| 1   | Jumlah Linmas                           | 35.556    | 36.969    |
| 2   | Jumlah Penduduk                         | 2.853.661 | 2.943.528 |
| 3   | Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk | 124,60    | 125,59    |

Sumber: Bakesbangpol dan Linmas 2016

Dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk Kota Surabaya dari tahun ke tahun maka perlu peningkatan kemampuan tenaga Linmas. Peningkatan kemampuan Linmas dilakukan setiap tahun salah satunya adalah pelatihan tentang penanggulangan bencana, sehingga bila sewaktu-waktu terjadi bencana dapat melakukan tindakan penanggulangan bencana di wilayah masing-masing.

#### Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kota Surabaya pada tahun 2015 tumbuh sebesar 6,02 persen yang tumbuh sedikit melambat dibandingkan tahun 2014. Perlambatan ekonomi yang terjadi pada tahun 2015 dipengaruhi oleh tekanan-tekanan baik dari ketidakstabilan perekonomian nasional maupun perekonomian global. Sistem ekonomi Kota Surabaya yang menganut sistem *small open economy* sehingga interaksi dengan negara lain tentu saja akan mempengaruhi perekonomian domestik. Kondisi perekonomian global yang mengalami perlambatan tentunya berimbas kepada perekonomian Kota Surabaya khususnya terhadap kinerja ekspor impor. Meskipun demikian, tingginya daya beli masyarakat Kota Surabaya mampu menstimulus kinerja ekonomi pada aktivitas Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta Industri Pengolahan seiring meningkatnya permintaan barang dan jasa.

Tabel 2.70  
Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya Tahun 2014 - 2015

| No. | Uraian                  | 2014           | 2015           |
|-----|-------------------------|----------------|----------------|
| 1   | PDRB (n)                | 351.509.065,03 | 407.703.251,80 |
| 2   | PDRB (n-1)              | 305.689.586,81 | 365.073.140,32 |
| 3   | Pertumbuhan Ekonomi (%) | 7,02           | 6,02           |

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2016

#### Pelayanan Publik

Selama tahun 2014, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Komunikasi dan Informasi telah melakukan pembangunan sebanyak 5 sistem informasi pelayanan perijinan dan 5 sistem informasi pelayanan non perijinan guna mendukung kinerja pemerintah kota Surabaya. Adapun sampai dengan

tahun 2015 Pemerintah Kota telah membangun 5 sistem informasi pelayanan perijinan dan 5 sistem informasi pelayanan non perijinan.

Tabel 2.71  
Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Online Kota Surabaya Tahun 2014 – 2015

| No. | Uraian                                   | 2014 | 2015 |
|-----|--|------|------|
| 1   | Sistem Informasi Pelayanan Perijinan     | 5    | 5    |
| 2   | Sistem Informasi Pelayanan Non Perijinan | 5    | 5    |

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2016

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan. IKM menjadi salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan Pemerintah Kota Surabaya dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Surabaya disajikan pada tabel 2.72 berikut.

Tabel 2.72  
Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Surabaya Tahun 2014 – 2016

| Uraian     | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------|------|------|------|
| Survey IKM | Ada  | Ada  | Ada  |

Sumber: Bagian Organisasi dan Tata Laksana, 2016

Penyusunan IKM mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan atas kerjasama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dengan BPS, diperoleh 18 (delapan belas) unsur yang menjadi acuan pengukuran IKM. Kedelapan belas unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kejelasan dan kepastian petugas pelayanan;
2. Kedisiplinan petugas pelayanan;
3. Tanggung jawab petugas pelayanan;
4. Kemampuan petugas pelayanan;

5. Kecepatan pelayanan;
6. Keadilan mendapatkan pelayanan;
7. Kesopanan dan keramahan petugas pelayanan;
8. Kesesuaian waktu pelayanan;
9. Kenyamanan lingkungan pelayanan;
- 10.Keamanan pelayanan;
- 11.Kemudahan informasi prosedur pelayanan;
- 12.Kecepatan penanganan pengaduan masyarakat;
- 13.Prosedur pelayanan;
- 14.Kesesuaian biaya pelayanan;
- 15.Kewajaran biaya pelayanan;
- 16.Kesesuaian persyaratan dengan jenis layanan;
- 17.Ketersediaan dan kelengkapan prasarana dan sarana pelayanan;
- 18.Transparansi biaya pelayanan

Nilai IKM dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan dengan nilai interval 25-43,75 masuk kategori tidak baik, nilai interval 43,76-62,50 masuk kategori kurang baik, nilai interval 62,51-81,25 masuk kategori baik dan nilai interval 81,26-100 masuk kategori sangat baik. Survey IKM tahun 2014 dilaksanakan pada 31 Kecamatan, 62 Puskesmas dan 22 Dinas/Lembaga Teknis/BUMD di Kota Surabaya. Dari survey tersebut diperoleh hasil untuk Kecamatan sejumlah 24 Kecamatan masuk kategori baik dan 7 Kecamatan masuk kategori sangat baik serta untuk Puskesmas sejumlah 59 Puskesmas masuk kategori baik dan 3 Puskesmas masuk kategori sangat baik. Sedangkan untuk 22 Dinas/Lembaga Teknis/BUMD di Kota Surabaya masuk dalam kategori baik.

Pada tahun 2014 terbit Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik sehingga Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku. Substansi materi Survei Kepuasan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014, terdapat 9 unsur, yakni:

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan, pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Maklumat Pelayanan



Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.

#### 9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat pada tahun 2015 telah mengikuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Survey IKM tahun 2015 dilaksanakan pada 31 Kelurahan, 31 Kecamatan, 62 Puskesmas dan 1 Laboratorium Kesehatan di Kota Surabaya. Dari survey tersebut diperoleh hasil untuk Kelurahan sejumlah 25 Kelurahan masuk kategori baik dan 6 Kelurahan masuk kategori sangat baik, serta untuk Kecamatan sejumlah 26 Kecamatan masuk kategori baik dan 5 Kecamatan masuk kategori sangat baik. Sedangkan untuk 62 Puskesmas dan 1 Laboratorium Kesehatan, keseluruhannya masuk kategori baik.

Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat pada tahun 2016 masih dalam tahap survey sehingga hasilnya akan diketahui pada bulan September 2016. Terdapat penambahan sasaran penyelenggara pelayanan publik sehingga mencakup 154 Kelurahan, 31 Kecamatan, 62 Puskesmas, 2 Rumah Sakit, 1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2 UPTSA dan 1 Laboratorium Kesehatan di Kota Surabaya.

Salah satu pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani bencana kebakaran yakni cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kota Surabaya. Cakupan tersebut diukur dari persentase jumlah mobil pemadam kebakaran terhadap jumlah penduduk. Pada tahun 2014, persentase jumlah mobil pemadam kebakaran adalah 0,0019 persen dari total jumlah penduduk sebanyak 2.853.661 orang, dan sampai dengan tahun 2015 persentase jumlah mobil pemadam kebakaran adalah 0,002 persen dari total jumlah penduduk sebanyak 2.943.528 orang sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 2.73  
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota Surabaya  
Tahun 2014 - 2015

| No. | Uraian                                  | 2014      | 2015      |
|-----|---|-----------|-----------|
| 1   | Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran          | 57        | 60        |
| 2   | Jumlah Penduduk                         | 2.853.661 | 2.943.528 |
| 3   | Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran (%) | 0,0019    | 0,0020    |

Sumber : Dinas Kebakaran dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, 2016

Sepanjang tahun 2014 tercatat telah terjadi 596 kejadian dengan jumlah kejadian yang waktu tanggapnya  $\leq 15$  menit setelah pengaduan sebanyak 536 kejadian. Pada tahun 2015, dari 608 kejadian kebakaran yang tercatat, 604 kejadian di antaranya dengan waktu tanggap  $\leq 15$  menit sebagaimana tabel 2.74 dan tabel 2.75.

Tabel 2.74  
Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Kota Surabaya  
Tahun 2014 – 2015

| No. | Uraian   | 2014 | 2015 |
|-----|--|------|------|
| 1   | Jumlah kejadian kebakaran dengan waktu tanggap ( <i>Response Time Rate</i> ) $\leq 15$ menit | 536  | 604  |
| 2   | Jumlah Kejadian Kebakaran  | 596  | 608  |

Sumber: Dinas Kebakaran Kota Surabaya, 2016

Tabel 2.75  
Cakupan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran Kota Surabaya  
Tahun 2014 - 2015

| No. | Uraian                       | 2014      | 2015      |
|-----|------------------------------|-----------|-----------|
| 1   | Jumlah Pos Pemadam Kebakaran | 19        | 20        |
| 2   | Jumlah Penduduk              | 2.853.661 | 2.943.528 |

Sumber: Dinas Kebakaran dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, 2016

#### Aparatur dan Pemerintahan

Salah satu unsur yang menandai pelaksanaan *good governance* adalah aparatur pemerintahan yang bersih, disiplin serta bertanggung jawab. Pada tahun 2014 orang aparatur yang mendapatkan sanksi sebanyak 27 orang aparatur dan pada tahun 2015 terdapat 27 orang aparatur yang mendapat sanksi pelanggaran disiplin aparatur pemerintah Kota Surabaya. Pelanggaran disiplin aparatur Pemerintah Kota Surabaya disebabkan karena banyak terjadi kasus baru dan penjatuhan sanksi kasus tahun 2013 di tahun

2014. Jumlah Sanksi Pelanggaran Disiplin Aparatur Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2014 - 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.76  
Jumlah Sanksi Pelanggaran Disiplin Aparatur Pemerintah  
Kota Surabaya Tahun 2014 – 2015

| JENIS SANKSI     |  | Tahun |      |
|------------------|--|-------|------|
|                  |  | 2014  | 2015 |
| Hukuman Disiplin |  |       |      |
| a.               | Ringan :   |       |      |
|                  | Tegoran Lisan  | 0     | 3    |
|                  | Tegoran Tertulis   | 0     | 0    |
|                  | Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis  | 4     | 2    |
|                  | Jumlah Disiplin Ringan   | 4     | 5    |
| b.               | Sedang :   |       |      |
|                  | Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Untuk Paling Lama 1 (Satu) Tahun   | 1     | 1    |
|                  | Penurunan Gaji Sebesar Satu Kali Kenaikan Gaji Berkala Untuk Paling Lama 1 ( Satu ) Tahun (PP.30 Tahun 1980) | 0     | 0    |
|                  | Penundaan Kenaikan Pangkat Untuk Paling Lama 1 ( Satu ) Tahun  | 3     | 2    |
|                  | Penurunan Pangkat Pada Pangkat Yang Setingkat Lebih Rendah Untuk Paling Lama 1 ( Satu ) Tahun                | 0     | 0    |
|                  | Jumlah Disiplin Sedang   | 4     | 3    |
| c.               | Berat :  |       |      |
|                  | Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun   | 1     | 5    |
|                  | Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan setingkat Lebih Rendah   | 0     | 0    |
|                  | Pembebasan Dari Jabatan  | 2     | 4    |
|                  | Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil                       | 7     | 4    |
|                  | Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil   | 2     | 3    |
|                  | Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai CPNS  | 0     | 0    |
|                  | Jumlah Disiplin Berat  | 12    | 16   |
|                  | TOTAL PERTAHUN DISIPLIN  | 20    | 24   |
| d                | Pemberhentian Sementara (PP. No. 04 Tahun 1966)  | 7     | 2    |
| e                | Pencabutan Pemberhentian Sementara   | 0     | 1    |
| f                | Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri / Pensiun Dini / Mengundurkan diri                       | 0     | 0    |
| g                | Pemberhentian Dengan Hormat Karena Menjadi Anggota Parpol  | 0     | 0    |
| h                | Rehabilitasi   | 0     |      |
|                  | Jumlah   | 7     | 3    |
|                  | TOTAL PERTAHUN   | 27    | 27   |

Sumber : Inspektorat, 2016

Untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh aparaturnya Pemerintah Kota Surabaya maka dilakukan pembinaan dan sosialisasi tentang disiplin pegawai, disamping itu pemberian sanksi yang tegas (sampai dengan pemberhentian kerja) kepada pegawai yang melakukan tindakan-tindakan indisipliner merupakan langkah untuk memberikan *shock therapy* yang berimplikasi kepada seluruh pegawai.

#### u. Ketahanan Pangan

Jumlah ketersediaan pangan utama (beras) di Kota Surabaya pada tahun 2014 sebesar 443.021.157 kg, dengan jumlah penduduk sebesar 2.853.661 jiwa maka rata-rata ketersediaan pangan per kapita sebesar 155,24 kg/kapita/th. Pada tahun 2015 jumlah ketersediaan pangan sebesar 404.158.210 kg, dengan jumlah penduduk sebesar 2.902.736 jiwa maka rata-rata ketersediaan pangan per kapita sebesar 139,23 kg/kapita/th.

Tabel 2.77  
Ketersediaan Pangan Utama Kota Surabaya  
Tahun 2014 - 2015

| No | Uraian  | 2014        | 2015        |
|----|---|-------------|-------------|
| 1  | Rata-rata Jumlah Ketersediaan Pangan Utama (Kg) | 443,021,157 | 404,158,210 |
| 2  | Jumlah Penduduk (jiwa)                          | 2,853,661   | 2,902,736   |
| 3  | Ketersediaan Pangan Utama (kg/kapita/th)        | 155.24      | 139.23      |

Sumber: Kantor Ketahanan Pangan Kota Surabaya dan Dispendukcapil, 2016

Tingkat konsumsi beras masyarakat Kota Surabaya pada tahun 2015 berdasarkan data dari Kantor Ketahanan Pangan Kota Surabaya rata-rata sebesar 64,97 kg/kapita/th, sehingga rata-rata ketersediaan pangan masih dapat mencukupi tingkat konsumsi beras masyarakat Kota Surabaya.

#### v. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan

masyarakat. Jenis Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari a) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain; b) Lembaga Adat; c) Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan; d) RT/RW; e) Karang Taruna; f) Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga, Lembaga Kemasyarakatan yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya adalah LKMK yaitu wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra perangkat daerah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. LKMK dibentuk di setiap kelurahan dan mempunyai tugas a) Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif; b) Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat; c) Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Jumlah lembaga LKMK di Kota Surabaya sebanyak 154 lembaga berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang penggabungan kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

Tim Penggerak PKK Kelurahan di Pemerintah Kota Surabaya adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.78.

Tabel 2.78  
Kelompok Binaan PKK Menurut Kecamatan Kota Surabaya  
Tahun 2014–2015

| No. | Kecamatan   | 2014       |                        |                                      | 2015       |                        |                                      |
|-----|-------------|------------|------------------------|--------------------------------------|------------|------------------------|--------------------------------------|
|     |             | Jumlah PKK | Jumlah Kelompok Binaan | Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK | Jumlah PKK | Jumlah Kelompok Binaan | Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK |
| 1   | Asemrowo    | 3          | 593                    | 198                                  | 3          | 593                    | 198                                  |
| 2   | Benowo      | 4          | 734                    | 184                                  | 4          | 734                    | 184                                  |
| 3   | Bubutan     | 5          | 1390                   | 232                                  | 5          | 1390                   | 232                                  |
| 4   | Bulak       | 4          | 513                    | 103                                  | 4          | 513                    | 103                                  |
| 5   | Dukuh Pakis | 4          | 732                    | 183                                  | 4          | 732                    | 183                                  |
| 6   | Gayungan    | 4          | 604                    | 121                                  | 4          | 604                    | 121                                  |
| 7   | Genteng     | 5          | 1007                   | 252                                  | 5          | 1007                   | 252                                  |
| 8   | Gubeng      | 6          | 1593                   | 266                                  | 6          | 1593                   | 266                                  |

| No.          | Kecamatan        | 2014       |                        |                                      | 2015       |                        |                                      |
|--------------|------------------|------------|------------------------|--------------------------------------|------------|------------------------|--------------------------------------|
|              |                  | Jumlah PKK | Jumlah Kelompok Binaan | Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK | Jumlah PKK | Jumlah Kelompok Binaan | Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK |
| 9            | Gunung Anyar     | 4          | 745                    | 149                                  | 4          | 745                    | 149                                  |
| 10           | Jambangan        | 4          | 774                    | 129                                  | 4          | 774                    | 129                                  |
| 11           | Karangpilang     | 4          | 1028                   | 171                                  | 4          | 1028                   | 171                                  |
| 12           | Kenjeran         | 4          | 4970                   | 1243                                 | 4          | 4970                   | 1243                                 |
| 13           | Krembangan       | 5          | 1168                   | 292                                  | 5          | 1168                   | 292                                  |
| 14           | Lakarsantri      | 6          | 761                    | 152                                  | 6          | 761                    | 152                                  |
| 15           | Mulyorejo        | 6          | 657                    | 131                                  | 6          | 657                    | 131                                  |
| 16           | Pabean Cantian   | 5          | 1201                   | 240                                  | 5          | 1201                   | 240                                  |
| 17           | Pakal            | 4          | 820                    | 205                                  | 4          | 820                    | 205                                  |
| 18           | Rungkut          | 6          | 1474                   | 211                                  | 6          | 1474                   | 211                                  |
| 19           | Sambikerep       | 4          | 587                    | 147                                  | 4          | 587                    | 147                                  |
| 20           | Sawahan          | 6          | 3679                   | 736                                  | 6          | 3679                   | 736                                  |
| 21           | Semampir         | 5          | 3974                   | 662                                  | 5          | 3974                   | 662                                  |
| 22           | Simokerto        | 5          | 1230                   | 308                                  | 5          | 1230                   | 308                                  |
| 23           | Sukolilo         | 7          | 1527                   | 255                                  | 7          | 1527                   | 255                                  |
| 24           | Sukomanunggal    | 6          | 1119                   | 280                                  | 6          | 1119                   | 280                                  |
| 25           | Tambaksari       | 8          | 2598                   | 325                                  | 8          | 2598                   | 325                                  |
| 26           | Tandes           | 6          | 1347                   | 269                                  | 6          | 1347                   | 269                                  |
| 27           | Tegalsari        | 5          | 1339                   | 335                                  | 5          | 1339                   | 335                                  |
| 28           | Tenggilis Mejoyo | 4          | 1285                   | 214                                  | 4          | 1285                   | 214                                  |
| 29           | Wiyung           | 4          | 755                    | 189                                  | 4          | 755                    | 189                                  |
| 30           | Wonocolo         | 5          | 1060                   | 177                                  | 5          | 1060                   | 177                                  |
| 31           | Wonokromo        | 6          | 2856                   | 714                                  | 6          | 2856                   | 714                                  |
| <b>Total</b> |                  | <b>154</b> | <b>44.120</b>          | <b>286</b>                           | <b>154</b> | <b>44.120</b>          | <b>286</b>                           |

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, 2016

Jumlah PKK di Kota Surabaya sebanyak 44.120 atau rata-rata 286 dari jumlah PKK pada tahun 2014 dan tahun 2015 jumlah kelompok binaan PKK di Kota Surabaya sebanyak 44.120 atau rata-rata 286 dari jumlah PKK.

Kelompok binaan PKK merupakan kelompok-kelompok masyarakat yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Kelurahan meliputi PKK RW, PKK RT dan Dasa Wisma. Besarnya rata-rata jumlah kelompok binaan PKK juga menunjukkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui PKK. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.79.

Tabel 2.79  
Kelompok Binaan PKK Kota Surabaya Tahun 2014 - 2015

| No | Uraian                               | 2014  | 2015  |
|----|--------------------------------------|-------|-------|
| 1  | Jumlah PKK                           | 154   | 154   |
| 2  | Jumlah Kelompok Binaan               | 44,12 | 44,12 |
| 3  | Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK | 286   | 286   |

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, 2016

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menyebutkan salah satu program penanggulangan kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pemberdayaan masyarakat yaitu dengan penyelenggaraan kegiatan peningkatan keterampilan yang terdiri dari bidang usaha makanan dan minuman, handycraft, menjahit, pijat refleksi, dan aneka usaha seperti salon, tata rias, membatik, pembuatan pembersih rumah tangga. Pasca program pemberdayaan masyarakat yaitu terbentuknya Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sedangkan Program Pemberdayaan Masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara masyarakat adalah KSM yang aktif melakukan usaha ekonomi produktif.

Kepedulian Pemerintah Kota Surabaya dalam pemberdayaan masyarakat dapat digambarkan dalam indikator jumlah keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif. Pada tahun 2014, jumlah keluarga miskin yang telah melakukan usaha ekonomi produktif sebanyak 1.655 orang dan pada tahun 2015 sebanyak 1.725 orang telah melakukan usaha ekonomi produktif melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Jenis usaha ekonomi produktif yang telah dilakukan terdiri dari bidang usaha *handycraft*, menjahit, makanan dan aneka produk rumah tangga, seperti pada tabel 2.80.

Tabel 2.80  
Keluarga Miskin Yang Melakukan Usaha Ekonomi Produktif di Kota Surabaya Tahun 2014 - 2015

| Uraian  | 2014 | 2015 |
|---|------|------|
| Jumlah Keluarga Miskin Yang Telah Melakukan Usaha Ekonomi Produktif | 1655 | 1725 |

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, 2016

Pada tahun 2014 dan 2015, Program Pemberdayaan Masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara masyarakat sebanyak 100 persen dari total Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara berupa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di tingkat dasar yang telah dibentuk, baik yang bersifat aktif maupun pasif dalam pengembangan hasil produknya. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.81  
Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat  
Kota Surabaya Tahun 2014 - 2015

| No. | Uraian  | 2014 | 2015 |
|-----|---|------|------|
| 1   | Total Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat                                 | 431  | 95   |
| 2   | Program Pemberdayaan Masyarakat yang Dikembangkan dan Dipelihara Masyarakat | 431  | 95   |
| 3   | % Program Pemberdayaan Masyarakat   | 100  | 100  |

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, 2016

#### w. Kearsipan

Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya. Program yang dijalankan dalam penyelenggaraan kearsipan pemerintah daerah adalah program perbaikan sistem administrasi kearsipan, dengan indikatornya adalah persentase unit kerja yang melaksanakan sistem kearsipan pola baru (sistem baku).

SKPD yang menerapkan arsip secara baku merupakan SKPD yang memiliki tenaga arsip dan telah mengikuti pembekalan serta pelatihan sistem kearsipan pola baru, menggunakan kartu kendali dengan sistem dosir (berdasarkan per kegiatan), sistem rubrik (berdasarkan permasalahan), sistem seri (berdasarkan kesamaan jenis), penataan arsipnya telah berdasarkan kode klasifikasi, memiliki sarana dan prasarana antara lain meliputi: almari katalog, filling cabinet, map gantung, lembar disposisi, lembar pengantar, daftar pengendali, kartu kendali masuk dan keluar. Data pengelolaan arsip secara baku selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.83.



Tabel 2.82  
Pengelolaan Arsip Secara Baku Kota Surabaya Tahun 2014 –2015

| No. | Uraian  | 2014 | 2015 |
|-----|---|------|------|
| 1   | Jumlah SKPD yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku | 193  | 226  |
| 2   | Jumlah SKPD   | 232  | 226  |
| 3   | Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku (%)        | 83   | 100  |

Sumber: Badan Arsip dan Perpustakaan, 2016

Berdasarkan data tersebut diatas, pada tahun 2014 SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku sebanyak 193 SKPD atau 83 persen. Sedangkan tahun 2015 dari 226 SKPD yang ada (sesuai Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2014) telah menerapkan arsip secara baku. Berikut ini adalah tabel 2.84 tentang peningkatan SDM pengelola kearsipan Kota Surabaya pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015.

Tabel 2.83  
Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kota Surabaya  
Tahun 2014 – 2015

| Uraian  | 2014 | 2015 |
|---|------|------|
| Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan | 3    | 3    |

Sumber: Badan Arsip dan Perpustakaan, 2016

Pada tahun 2014, kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan dilaksanakan melalui pendampingan dan evaluasi serta lomba teknis sistem tata kearsipan pola baru. Pendampingan dan monitoring dilakukan dengan penerapan penggunaan sistem pola baru yang akan dikembangkan dengan sistem aplikasi kearsipan berbasis IT Sistem Informasi Kearsipan Daerah (SIKD) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dan kegiatan tersebut dilakukan sampai dengan tahun 2015.

Atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan kualitas kearsipan, Pemerintah Kota Surabaya berhasil meraih predikat. Juara I Lomba Kearsipan Desa/Kelurahan Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Timur untuk

Kelurahan Karah, serta meraih predikat Juara Pertama Lomba Kearsipan Daerah Kota Teladan Tingkat Nasional Tahun 2013.

#### x. Komunikasi dan Informatika

Selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 untuk mendukung Komunikasi di Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Komunikasi dan Informasi telah melakukan pemeliharaan terhadap tower sebanyak 90 Unit dengan rincian tower dengan ketinggian 12 meter sebanyak 21 unit, 16 meter sebanyak 10 unit, 20 meter sebanyak 24 unit, 24 meter sebanyak 7 unit, 30 meter sebanyak 13 unit, 40 meter sebanyak 14 unit, dan 105 meter sebanyak 1 unit.

Tabel 2.84  
Jaringan Komunikasi Kota Surabaya Tahun 2014 - 2015

| Uraian                | 2014 | 2015 |
|-----------------------|------|------|
| Menara (Tower) (unit) | 91   | 90   |

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2016

Pemerintah Kota Surabaya memiliki situs resmi yang dapat diakses pada alamat <http://www.surabaya.go.id>. Selain halaman utama, juga terdapat Terdapat 26 sub domain dalam website tersebut yang dikelola oleh masing-masing SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Tabel 2.85  
Website Milik Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2014 - 2015

| Uraian                        | 2014 | 2015 |
|-------------------------------|------|------|
| Website Milik Pemerintah Kota | Ada  | Ada  |

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2016

#### y. Perpustakaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2009, perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka termasuk didalamnya taman bacaan dan sudut baca.

Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya dalam mengembangkan perpustakaan yang dapat mendukung tumbuhnya minat dan budaya baca masyarakat dengan menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan dan TBM, menyelenggarakan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di Kecamatan, Kelurahan, RW, Rumah Sakit, Taman, Dinas, Rusun, Liponsos dan Terminal serta menyediakan layanan TBM yaitu perpustakaan keliling.

Tabel 2.86  
Jumlah Perpustakaan Kota Surabaya Tahun 2014 - 2015

| No. | Uraian                       | 2014 | 2015 |
|-----|------------------------------|------|------|
| 1   | Perpustakaan Milik Pemda     | 2    | 2    |
| 2   | Perpustakaan Milik Non Pemda | 59   | 59   |
| 3   | Total                        | 61   | 61   |

Sumber: Badan Arsip dan Perpustakaan, 2016

Berdasarkan data pada tabel 2.88, pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 jumlah perpustakaan milik Pemda dan Perpustakaan milik Non Pemda tetap sebanyak 61 unit.

Jumlah pengunjung perpustakaan daerah setiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 jumlah pengunjung perpustakaan sebanyak 3.243.366 orang, sedangkan pada tahun 2015 sebanyak 4.711.419 orang.

Tabel 2.87  
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kota Surabaya Tahun 2014 – 2015

| Uraian                                      | 2014      | 2015      |
|---|-----------|-----------|
| Jumlah Pengunjung Perpustakaan Milik Pemkot | 3.243.366 | 4,711,419 |

Sumber: Badan Arsip dan Perpustakaan, 2016

Pada tahun 2014, penambahan jumlah koleksi buku baru sebanyak 141.716 buku dan penambahan jumlah koleksi judul buku baru sebanyak 6.843 judul buku. Rata-rata 1 koleksi judul buku tersedia sebanyak 20 buku. Pada tahun 2015 terdapat penambahan koleksi buku baru sebanyak 74.488 buku dengan penambahan koleksi judul buku baru sebanyak 6.230 judul buku. Rata-rata 1 koleksi judul buku tersedia sebanyak 11 buku.

Atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, Pemerintah Kota Surabaya berhasil mendapatkan penghargaan yaitu Perpustakaan Kelurahan Pagesangan Kecamatan

Jambangan meraih predikat Juara II Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2014, dan Perpustakaan Kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut meraih predikat Juara II Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2015.

Tabel 2.88  
Penambahan Koleksi Buku Baru di Perpustakaan Daerah Kota Surabaya  
Tahun 2014 - 2015

| No. | Uraian   | 2014    | 2015   |
|-----|--|---------|--------|
| 1   | Jumlah Penambahan Koleksi Buku Baru yang Tersedia di Perpustakaan Daerah       | 141,716 | 74,488 |
| 2   | Jumlah Penambahan Koleksi Judul Buku Baru yang Tersedia di Perpustakaan Daerah | 6,843   | 6,230  |
| 3   | Rasio Koleksi Judul Buku   | 0.05    | 0.08   |

Sumber: Badan Arsip dan Perpustakaan, 2016

### 2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

Penganalisisan gambaran umum kondisi daerah dilakukan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota, yaitu bidang urusan:

#### a. Pertanian

Kontribusi kategori pertanian/perkebunan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Surabaya cenderung tetap, hal ini dapat dilihat pada tahun 2014 yaitu sebesar 0,18 persen dan pada tahun 2015 kontribusi kategori pertanian tercatat sebesar 0,18 persen terhadap pembentukan PDRB Kota Surabaya Atas Dasar Harga Berlaku. Selengkapnya untuk rekap tabel Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB ADHB dapat dilihat pada tabel 2.89.

Tabel 2.89  
Kontribusi Kategori Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB ADHB Kota  
Surabaya Tahun 2014-2015

| No | Uraian  | 2014          | 2015           |
|----|---|---------------|----------------|
| 1. | Jumlah Kontribusi PDRB dari Kategori Pertanian/Perkebunan (Juta Rp) | 671.564,30    | 750.070,80     |
| 2. | Jumlah PDRB (Juta Rp)   | 365.073.140,3 | 407.7.03.251,8 |
| 3. | Kontribusi Kategori Pertanian / Perkebunan terhadap PDRB (%)        | 0,18          | 0,18           |

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2016

Pada tabel 2.90, kontribusi sektor pertanian terhadap jumlah total produksi sektor pertanian (palawija) terhadap jumlah total produksi sektor pertanian/perkebunan Kota Surabaya mengalami kenaikan. Pada tahun 2014, kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap jumlah total produksi sektor pertanian/perkebunan sebesar 3,24 persen, sedangkan pada tahun 2015 kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap total produksi sektor pertanian/perkebunan tercatat sebesar 6,54 persen.

Tabel 2.90  
Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Kota Surabaya  
Tahun 2014-2015

| No. | Uraian  | 2014      | 2015      |
|-----|---|-----------|-----------|
| 1.  | Jumlah Produksi Sektor Pertanian (Palawija) (ton)       | 501,90    | 1.052,19  |
| 2.  | Jumlah Total Produksi Sektor Pertanian/Perkebunan (ton) | 15.492,93 | 16.309,86 |
| 3.  | Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) (%)              | 3,24      | 6,45      |

Sumber: Dinas Pertanian Kota Surabaya, 2016

Pelaksanaan program nasional yaitu upaya khusus swasembada pangan, dengan mengoptimalkan lahan pertanian melalui penerapan teknologi jajar legowo, memberikan pengaruh terhadap peningkatan produktivitas tanaman padi/bahan pangan utama lokal yang dihasilkan di Kota Surabaya. Produktivitas tanaman padi meningkat dari 5,59 ton/hektar pada tahun 2014 menjadi 6,35 ton per hektar di tahun 2015. Sedangkan luas areal tanam padi yang meingkat disebabkan adanya perubahan pola tanam yang semula 1 kali tanam dalam setahun, ada yang menjadi 2 kali tanam dalam setahun.

Tabel 2.91  
Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar  
Kota Surabaya Tahun 2014-2015

| No. | Uraian  | 2014     | 2015      |
|-----|---|----------|-----------|
| 1.  | Produksi Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (ton)  | 9.424,51 | 11.177,96 |
| 2.  | Luas Areal Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (ha) | 1.687,00 | 1.760,31  |
| 3.  | Produktivitas (ton/ha)  | 5,59     | 6,35      |

Sumber: Dinas Pertanian Kota Surabaya, 2016

Produksi hasil pertanian mulai dari padi, jagung, lombok, sayur sebagian besar mengalami kenaikan, kecuali produksi buah yang mengalami penurunan. Produksi padi mengalami peningkatan, pada tahun 2014 sebesar 9.424,51 ton menjadi 11.177,96 ton pada tahun 2015. Produksi jagung, lombok dan sayur pada tahun 2014 secara berurutan sebesar 366,43 ton; 115,43 ton dan 566,37 ton; produksi ketiganya mengalami peningkatan pada tahun 2015 secara berurutan menjadi 948,79 ton; 299 ton dan 584,81 ton. Produksi buah mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2014 sebesar 5.020,19 ton menjadi 3.299,30 ton pada tahun 2015 Rincian jumlah produksi hasil pertanian dapat dilihat pada tabel 2.92 berikut.

Tabel 2.92  
Produksi Hasil Pertanian Menurut Jenis Komoditi Kota Surabaya  
Tahun 2014- 2015

| No. | Uraian                       | 2014     | 2015      |
|-----|------------------------------|----------|-----------|
| 1.  | Jumlah Produksi Padi (ton)   | 9.424,51 | 11.177,96 |
| 2.  | Jumlah Produksi Jagung (ton) | 366,43   | 948,79    |
| 3.  | Jumlah Produksi Lombok (ton) | 115,43   | 299,00    |
| 4.  | Jumlah Produksi Sayur (ton)  | 566,37   | 584,81    |
| 5.  | Jumlah Produksi Buah (ton)   | 5.020,19 | 3.299,30  |

Sumber: Dinas Pertanian Kota Surabaya, 2016

#### b. Energi dan Sumber Daya Mineral

Berdasarkan undang-undang No. 30 tahun 2007 tentang Energi pasal 25 menyatakan bahwa konservasi energi nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pengusaha, dan masyarakat, mencakup seluruh tahap pengelolaan energi. Dalam undang-undang ini juga disebutkan dalam pasal 21 bahwa Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal ini diperkuat dengan adanya Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Listrik.

Konversi energi adalah perubahan bentuk energi dari yang satu menjadi bentuk energi lain. Energi listrik adalah produk konversi energi dari energi lain seperti energi kinetik air terjun, energi uap/panas bumi, energi

minyak diesel, energi batubara dan lain sebagainya. Yang menjadi prioritas saat ini adalah bagaimana mendapatkan energi listrik yang murah, bersih, aman dan dapat terbarukan. Minyak, batubara termasuk energi yang tidak terbarukan karena sumber energi ini terbatas dan suatu saat akan habis. Energi matahari misalnya dikonversi dengan solar cell, disimpan kedalam baterai penyimpan dan inverter DC/AC serta disebut sebagai energi terbarukan karena sumbernya melimpah dan selalu tersedia.

Sedangkan penghematan energi atau konservasi energi adalah tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi. Penghematan energi dapat dicapai dengan penggunaan energi secara efisien dimana manfaat yang sama diperoleh dengan menggunakan energi lebih sedikit, ataupun dengan mengurangi konsumsi dan kegiatan yang menggunakan energi. Penghematan energi dapat menyebabkan berkurangnya biaya, serta meningkatnya nilai lingkungan, keamanan negara, keamanan pribadi, serta kenyamanan. Masyarakat dapat menghemat biaya dengan melakukan penghematan energi, sedangkan pengguna komersial dan industri dapat meningkatkan efisiensi dan keuntungan dengan melakukan penghematan energi.

Saat ini Pemerintah Kota Surabaya telah melaksanakan upaya konversi dan konservasi energi. Upaya konversi energi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya antara lain dengan pemasangan solar sel pada lampu PJU dan gedung-gedung sekolah, pembangunan kincir angin dan biogas sampah. Konservasi energi dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan mengadakan audit energi di beberapa sektor kegiatan/ usaha yang ada di Kota Surabaya. Dengan adanya audit energi dan pendampingan diharapkan akan diketahui konsumsi energi dan rekomendasi terkait penghematan energi. Pada tahun 2015 telah dibangun 4 unit kincir angin di THP Kenjeran. Audit energi telah dilakukan sejak tahun 2013, dan pada tabel 2.93 disajikan Audit energi yang dilaksanakan pada tahun 2014-2015.

Tabel 2.93  
Pelaksanaan Audit Energi pada Kegiatan/ Usaha  
Tahun 2014 - 2015

| Tahun | Audit Energi        | Keterangan  |
|-------|---------------------|---|
| 2014  | Rumah Sakit         | Audit awal energi 3 Rumah Sakit, audit rinci energi 1 rumah sakit |
| 2015  | Hotel               | Audit awal energi 52 Hotel, audit rinci energi 9 Hotel            |
|       | Mall                | Audit awal energi 1 Mall  |
|       | Kantor              | Audit awal energi 5 kantor  |
|       | Kantor Pemerintahan | Audit awal energi 21 Kantor Pemerintahan                          |
|       | Puskesmas           | Audit awal energi 62 Puskesmas                                    |
|       | Industri            | Audit awal energi 16 Industri                                     |

Sumber: Badan Lingkungan Hidup, 2016

### c. Pariwisata

Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya untuk meningkatkan kualitas obyek-obyek wisata sehingga mampu menjadi daya tarik bagi wisatawan dan berdampak pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Surabaya. Jumlah kunjungan wisatawan ke obyek-obyek wisata sebagaimana tertera pada tabel 2.97 hanya memperhitungkan jumlah wisatawan yang berkunjung pada 20 obyek wisata yang ada di kota Surabaya, belum memperhitungkan wisatawan yang berkunjung ke tempat-tempat wisata kuliner, lapangan golf, mall, maupun obyek wisata lainnya seperti hutan mangrove, museum Bank Indonesia, rumah pahlawan, dsb.

Dari data pada tabel 2.97 dapat dilihat bahwa kunjungan wisatawan ke obyek-obyek wisata tersebut pada tahun 2014 sebanyak 5.583.822 orang dan pada tahun 2015 sebanyak 6.034.129 orang dengan obyek wisata yang paling banyak dikunjungi adalah kawasan wisata religi Ampel.

Semakin berkembangnya sektor pariwisata di kota Surabaya berdampak pada meningkatnya kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara ke kota. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.94 mengenai jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara ke Kota Surabaya.



Tabel 2.94  
Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara dan Nusantara keKota Surabaya  
Tahun 2014-2015

| No.    | Uraian                                 | 2014       | 2015       |
|--------|--|------------|------------|
| 1.     | Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara | 742.084    | 638.583    |
| 2.     | Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara   | 15.929.745 | 15.099.061 |
| Jumlah |  | 16.671.829 | 15.737.644 |

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2016

Tabel 2.95  
Obyek Kunjungan Wisata Kota Surabaya Tahun 2014-2015

| No. | Uraian                                     | 2014             |       | 2015             |       |
|-----|--|------------------|-------|------------------|-------|
|     |  | Jumlah Kunjungan | (%)   | Jumlah Kunjungan | (%)   |
| 1   | THP Kenjeran                               | 526.617          | 9,43  | 493.191          | 0,082 |
| 2   | Kenjeran Park                              | 670.529          | 12,01 | 715.690          | 0,119 |
| 3   | Taman Prestasi                             | 32.872           | 0,59  | 31.553           | 0,005 |
| 4   | Taman Hiburan Rakyat                       | 15.359           | 0,28  | 16.960           | 0,003 |
| 5   | Taman Remaja Surabaya                      | 382.276          | 6,85  | 354.230          | 0,059 |
| 6   | Monumen Tugu Pahlawan                      | 166.565          | 2,98  | 223.463          | 0,037 |
| 7   | Kawasan Wisata Religi Ampel                | 1.950.698        | 34,93 | 2.040.476        | 0,338 |
| 8   | Masjid Al-Akbar                            | 25.149           | 0,45  | 38.027           | 0,006 |
| 9   | Masjid Cheng Ho                            | 18.583           | 0,33  | 24.914           | 0,004 |
| 10  | Kebun Binatang                             | 1.121.246        | 20,08 | 1.148.465        | 0,190 |
| 11  | Monumen Kapal Selam                        | 18.286           | 0,33  | 181.032          | 0,030 |
| 12  | Monumen Jalesveva Jayamahe                 | 43.734           | 0,78  | 15.065           | 0,002 |
| 13  | Loka Jala Srana                            | 42.217           | 0,76  | 30.762           | 0,005 |
| 14  | Makam WR. Soepratman                       | 960              | 0,02  | 470              | 0,000 |
| 15  | Makam DR. Soetomo                          | 9.602            | 0,17  | 3.554            | 0,001 |
| 16  | Patung Djoko Dolog                         | 3.114            | 0,06  | 1.627            | 0,000 |
| 17  | Balai Pemuda                               | 80.241           | 1,44  | 264.875          | 0,044 |
| 18  | House Of Sampoerna                         | 176.710          | 3,16  | 194.700          | 0,032 |
| 19  | Ciputra Water Park                         | 283.722          | 5,08  | 233.388          | 0,039 |
| 20  | Museum Kesehatan                           | 15.342           | 0,27  | 21.687           | 0,004 |
|     | Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Obyek Wisata | 5.583.822        | 100   | 6.034.129        | 100   |

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 2016

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan di Kota Surabaya berdampak pada peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB.

Pada tahun 2014 kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kota Surabaya sebesar 14,85 persen atau sebesar Rp52.210.919,56 rupiah dari total PDRB sebesar Rp305.308.006,20 rupiah. Sedangkan pada tahun 2015 kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kota Surabaya sebesar 15,30 persen atau sebesar Rp62.389.404,20 juta rupiah dari total PDRB sebesar Rp407.703.251,80 juta rupiah. Berikut adalah rekap tabel kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kota Surabaya tahun 2014-2015.

Tabel 2.96  
Kontribusi Kategori Pariwisata Terhadap PDRB Kota Surabaya  
Tahun 2014-2015

| No. | Uraian  | 2014*          | 2015**         |
|-----|---|----------------|----------------|
| 1.  | Jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor Pariwisata (Juta Rp) | 52.210.919,56  | 62.389.404,20  |
| 2.  | Jumlah PDRB (Juta Rp)                                   | 305.308.006,20 | 407.703.251,80 |
| 3.  | Kontribusi PDRB dari Sektor Pariwisata (%)              | 14,85          | 15,30          |

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 2016

#### d. Kelautan dan Perikanan

Perubahan cuaca (anomali iklim) yang berakibat pada penurunan jumlah tangkapan sehingga terjadi penurunan produksi pada perikanan laut. Jumlah produksi perikanan pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 2,04%. Pada tahun 2014 jumlah produksi perikanan sebesar 15.266,08 ton. dan pada tahun 2015 tercatat 14.954,15 ton.

Tabel 2.97  
Jumlah Produksi Perikanan Kota Surabaya  
Tahun 2014-2015

| No.    | Jenis Usaha      | Jumlah Produksi (ton) |           |
|--------|------------------|-----------------------|-----------|
|        |                  | 2014                  | 2015      |
| 1.     | Perikanan Laut   | 7.292,45              | 6.840,06  |
| 2.     | Perikanan Tambak | 6.530,32              | 6.785,15  |
| 3.     | Perairan umum    | 277,02                | 88,49     |
| 4.     | Kolam            | 1.025,88              | 1101,27   |
| 5.     | Jaring Apung     | 140,41                | 139,18    |
| Jumlah |                  | 15.266,08             | 14.954,15 |

Sumber: Dinas Pertanian Kota Surabaya. 2016

Meskipun jumlah produksi perikanan Kota Surabaya mengalami penurunan tetapi capaian konsumsi ikan dari yang ditargetkan nasional

mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2014 sebesar 84,37 persen menjadi 88 persen pada tahun 2015. Salah satu upaya pemerintah daerah untuk mencapai target nasional tingkat konsumsi ikan adalah dengan menggalakkan gerakan gemar makan ikan. urban farming bidang perikanan. serta melalui kegiatan pengembangan diversifikasi pangan produk perikanan.

Tabel 2.98  
Konsumsi Ikan Kota Surabaya Tahun 2014-2015

| No. | Uraian                            | 2014  | 2015 |
|-----|-----------------------------------|-------|------|
| 1   | Jumlah Konsumsi Ikan (kg/kap/thn) | 32,06 | 35,2 |
| 2   | Target Nasional (Kg/kap/thn)      | 38    | 40   |
| 3   | Persentase Konsumsi Ikan (%)      | 84,37 | 88   |

Sumber: Dinas Pertanian Kota Surabaya. 2016

#### e. Perdagangan

Selama ini capaian pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya yang tinggi ditopang oleh kontribusi lapangan usaha kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Pembentukan PDRB dari kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun 2014 sebesar Rp99.966.844,30 juta dan pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp109.971.647,30 juta. Besarnya kontribusi kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor didukung oleh tingginya perilaku masyarakat Kota Surabaya akan konsumsi barang dan jasa yang akhirnya mendorong tingginya pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya. Berikut tabel terkait kontribusi kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB Kota Surabaya pada tahun 2014-2015.

Tabel 2.99  
Kontribusi Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Terhadap PDRB Kota Surabaya Tahun 2014-2015

| No | Uraian  | 2014           | 2015           |
|----|---|----------------|----------------|
| 1  | Jumlah Kontribusi PDRB dari Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Juta Rp) | 99.966.844.30  | 109.971.647.30 |
| 2  | Jumlah PDRB (Juta Rp)   | 365.073.140.30 | 407.703.251.80 |
| 3  | Kontribusi Kategori Perdagangan (%)   | 27.38          | 26.97          |

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2016

Dari sisi permintaan, selain dari tingkat konsumsi masyarakat dan besarnya investasi yang ditanamkan, PDRB Kota Surabaya juga dikontribusi oleh kinerja ekspor impor. Pada tahun 2014 neraca perdagangan non migas Kota Surabaya mengalami surplus sebesar US\$965.797.636, yang disebabkan oleh lebih tingginya nilai ekspor non migas yaitu sebesar US\$ 18.022.413.011 jika dibandingkan dengan nilai impor non migas yaitu sebesar US\$ 17.056.615.375. Hal yang sama juga terjadi di tahun 2015, di mana kinerja neraca perdagangan non migas Kota Surabaya mengalami surplus yaitu sebesar US\$1.564.305.491. Meskipun mengalami surplus, kinerja ekspor impor non migas Kota Surabaya pada tahun 2015 mengalami perlambatan dibanding tahun 2014. Perlambatan kinerja tersebut sejalan dengan penurunan permintaan ekspor dari mitra dagang Kota Surabaya dan nilai tukar rupiah yang mengalami depresiasi memicu menurunnya permintaan barang-barang impor.

Tabel 2.100  
Ekspor Bersih Perdagangan Kota Surabaya  
Tahun 2014- 2015

| No. | Uraian                      | 2014              | 2015              |
|-----|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 1   | Nilai Ekspor (US \$)        | 18.022.413.011,00 | 16.452.486.419,00 |
| 2   | Nilai Impor (US \$)         | 17.056.615.375,00 | 14.888.180.928,00 |
| 3   | Nilai Ekspor Bersih (US \$) | 965.797.636       | 1.564.305.491     |

Sumber: Bank Indonesia. 2016

#### Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing dapat dilakukan dalam bentuk penanaman modal langsung (*direct investment*) maupun penanaman modal portofolio surat berharga (*portofolio investment*). Berikut ini disajikan tabel jumlah investor Kota Surabaya Tahun 2014-2015 serta jumlah proyek dan nilai investasi PMDN dan PMA di Kota Surabaya.

Tabel 2.101  
Jumlah Investor PMDN/PMA Kota Surabaya  
Tahun 2014 - 2015

| Uraian | 2014 | 2015 |
|--------|------|------|
| PMDN   | 9    | 8    |
| PMA    | 24   | 13   |
| Total  | 33   | 21   |

Sumber : Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal, 2016

Tabel 2.102  
Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Surabaya  
Tahun 2014 - 2015

| Tahun | Persetujuan   |  | Realisasi     |   |
|-------|---------------|--|---------------|---|
|       | Jumlah Proyek | Nilai Investasi                            | Jumlah Proyek | Nilai Investasi                         |
| 2014  | 76            | Rp. 1.653.750.400.500<br>US \$ 184.170.400 | 33            | Rp. 1.072.942.200<br>US \$ 45.152.500   |
| 2015  | 83            | Rp. 3.658.697.400.000<br>US \$ 100.436.700 | 21            | Rp. 828.418.000.000<br>US \$ 14.675.100 |

Sumber : Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal, 2016

#### Rasio daya serap tenaga kerja

Investasi/penanaman modal langsung (*direct investment*) berkontribusi dalam membuka lapangan kerja baru. Pada tabel 2.105 berikut ini disajikan rasio daya serap tenaga kerja sebagai dampak investasi langsung. Berdasarkan realisasi penanaman modal PMA dan PMDN tahun 2014 terdapat 33 proyek realisasi PMA dan PMDN dengan jumlah tenaga kerja terserap 2.170 orang dan rasio daya serap tenaga kerja sebesar 65.76. Sampai dengan tahun 2015 jumlah realisasi proyek PMA dan PMDN sebanyak 21 proyek dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 1.223 orang dengan rasio daya serap tenaga kerja sebesar 58.24.

Tabel 2.103  
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Surabaya  
Tahun 2014 - 2015

| No | Uraian  | 2014  | 2015  |
|----|---|-------|-------|
| 1  | Jumlah seluruh PMA/PMDN                                   | 33    | 21    |
| 2  | Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN | 2.170 | 1.223 |
| 3  | Rasio daya serap tenaga kerja                             | 65.76 | 58.24 |

Sumber : Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal, 2016

#### 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

##### 2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Konsumsi merupakan salah satu faktor penunjang perekonomian Kota Surabaya dari sisi permintaan. Konsumsi dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, konsumsi memiliki keterkaitan langsung dengan aspek pendapatan. Konsumsi sendiri memiliki hubungan yang searah dengan tingkat pendapatan, di mana semakin tinggi tingkat pendapatan maka semakin besar konsumsi yang akan dikeluarkan. Maka dapat disimpulkan jika semakin besar anggaran yang dianggarkan untuk konsumsi meningkat dapat diindikasikan jika tingkat pendapatan seseorang tersebut semakin meningkat.

Sampai saat ini, peranan konsumsi masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi cukup tinggi. Tingginya tingkat konsumsi masyarakat akan mendorong naiknya permintaan barang dan jasa. Peningkatan tersebut selanjutnya akan mendorong perkembangan sektor industri dan sektor perdagangan yang secara otomatis akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, jumlah pengeluaran perkapita rumah tangga di Kota Surabaya pada tahun 2013 sebesar Rp1.402.088 perbulan dan meningkat ditahun 2014 menjadi sebesar Rp1.388.848 per bulan.

Tabel 2.104  
Angka Konsumsi RT per Kapita Kota Surabaya  
Tahun 2013 - 2014

| No | Uraian               | 2013      | 2014*     |
|----|----------------------|-----------|-----------|
| 1  | Total Pengeluaran RT | 1.042.088 | 1.388.848 |
| 2  | Jumlah RT            | 822.669   | 775.559   |
| 3  | Rasio                | 1,26      | 1,79      |

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2016

Jika diuraikan berdasarkan jenisnya, pengeluaran konsumsi rumah tangga dibagi menjadi 2 (dua), yakni pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita atas konsumsi pangan dan pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita atas konsumsi non pangan. Nampak data pada tabel 2.107 yang menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi non pangan mengalami peningkatan, yakni pada tahun 2013 sebesar Rp612.342 dan pada tahun 2014 sebesar Rp877.523. Besarnya komponen pengeluaran rumah tangga akan non pangan mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Surabaya meningkat.

Tabel 2.105  
Persentase Konsumsi RT Non-Pangan Kota Surabaya  
Tahun 2014 - 2015

| No | Uraian                          | 2013      | 2014      |
|----|---------------------------------|-----------|-----------|
| 1  | Total Pengeluaran RT Non Pangan | 612.342   | 877.523   |
| 2  | Total Pengeluaran               | 1.042.088 | 1.388.848 |
| 3  | Rasio                           | 58,76%    | 63.18%    |

Sumber: BPS Kota Surabaya. 2016

Pasang surutnya perekonomian suatu wilayah tampak dari perkembangan nilai peroduktivitasnya. Semakin besar produktivitas yang dihasilkan maka dipastikan semakin banyak kegiatan arus perekonomiannya. Pada tahun 2014 nilai PDRB ADHB Kota Surabaya sebesar Rp365.073.140,30 juta sehingga nilai produktivitas per kategori Kota Surabaya sebesar Rp249,11 juta per orang. Tingginya produktivitas Kota Surabaya tersebut berasal dari meningkatnya produktivitas dari setiap kategori setiap tahunnya, yang utamanya disumbang oleh kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan serta kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Kategori tersebut terus menunjukkan perkembangan yang positif searah dengan perkembangan Kota Surabaya sebagai kota bisnis sehingga peran ketiga kategori tersebut menjadi lebih dominan dibanding kategori lainnya. Masih tingginya aktivitas ekonomi di Kota Surabaya mendorong produktivitas total daerah meningkat menjadi Rp277,71 juta per orang pada tahun 2015.

Rincian terkait produktivitas total daerah Kota Surabaya terangkum dalam tabel berikut.

Tabel 2.106  
Produktivitas Per Sektor Kota Surabaya  
Tahun 2014-2015

| Kategori       | Uraian   | 2014           |        | 2015*          |        |
|----------------|--|----------------|--------|----------------|--------|
|                |  | (Juta Rp)      | %      | (Juta Rp)      | %      |
| A              | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                            | 671.564,30     | 0,18   | 750.070,80     | 0,18   |
| B              | Pertambangan dan Penggalian                                    | 24.336,10      | 0,01   | 27.587,50      | 0,01   |
| C              | Industri Pengolahan  | 70.661.843,10  | 19,36  | 79.334.006,90  | 19,46  |
| D              | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 1.978.907,20   | 0,54   | 1.997.909,40   | 0,49   |
| E              | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 572.049,40     | 0,16   | 613.427,10     | 0,15   |
| F              | Konstruksi   | 37.891.835,80  | 10,38  | 41.833.616,60  | 10,26  |
| G              | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 99.966.844,30  | 27,38  | 109.971.647,30 | 26,97  |
| H              | Transportasi dan Pergudangan                                   | 18.927.734,90  | 5,18   | 21.544.921,60  | 5,28   |
| I              | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 54,062,910.60  | 14,81  | 62.389.404,20  | 15,3   |
| J              | Informasi dan Komunikasi                                       | 20.137.828,30  | 5,52   | 22.080.942,60  | 5,42   |
| K              | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 19.275.906,50  | 5,28   | 21.872.423,80  | 5,36   |
| L              | Real Estate  | 9.372.176,50   | 2,57   | 10.420.100,50  | 2,56   |
| M,N            | Jasa Perusahaan  | 8.889.028,20   | 2,43   | 9.814.203,90   | 2,41   |
| O              | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 5.183.606,10   | 1,42   | 5.420.318,80   | 1,33   |
| P              | Jasa Pendidikan  | 9.259.950,70   | 2,54   | 10.444.758,10  | 2,56   |
| Q              | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 2.814.318,80   | 0,77   | 3.210.799,00   | 0,79   |
| R,S,T,U        | Jasa lainnya   | 5.382.299,40   | 1,47   | 5.977.113,70   | 1,47   |
| PDRB           |  | 365.073.140,30 | 100,00 | 407.703.251,80 | 100,00 |
| Angkatan Kerja |  | 1.465.502      |        | 1.468.094      |        |
| Produktivitas  |  | 249,11         |        | 277,71         |        |

Sumber: BPS Kota Surabaya. 2016



### 2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

#### a. Perhubungan

Jumlah kendaraan di Kota Surabaya selalu mengalami peningkatan. Hal ini dipengaruhi oleh tingginya penggunaan kendaraan bermotor, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Untuk memenuhi kebutuhan volume kendaraan yang semakin tinggi, Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya untuk melakukan peningkatan yaitu dengan cara membangun jalan baru dengan menghubungkan jaringan jalan yang ada serta menambah kapasitas jalan yang ada. Hal tersebut dapat terlihat pada tabel berikut, di manapada tahun 2014 jumlah kendaraan sebanyak 2.285.382 kendaraan dan meningkat menjadi 2.361.250 kendaraan pada tahun 2015.

Tabel 2.107  
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kota Surabaya  
Tahun 2010-2015

| No. | Uraian              | 2014      | 2015      |
|-----|---------------------|-----------|-----------|
| 1   | Panjang Jalan (m)   | 1.679.140 | 1.683.116 |
| 2   | Jumlah Kendaraan    | 2.285.382 | 2.361.250 |
| 3   | Rasio Panjang Jalan | 0.734     | 0.712     |

Sumber: Dinas Perhubungan, 2016

#### b. Penataan Ruang

Sebagian besar luasan wilayah budidaya di Kota Surabaya adalah berupa wilayah produktif yaitu sebesar 93,27 persen. Wilayah produktif di Kota Surabaya antara lain berupa kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum, komersial, industri dan militer.

Berdasarkan luasannya, wilayah industri di Kota Surabaya terbagi menjadi kawasan industri dan zona industri. Kawasan industri berlokasi di kawasan Rungkut dan kawasan Margomulyo, sedangkan zona industri berlokasi tersebar di beberapa tempat antara lain kawasan Kalirungkut, kawasan Karangpilang, kawasan Tanjungsari dan kawasan Kalianak.

Berdasarkan tabel 2.109, dapat terlihat bahwa luasan wilayah genangan Kota Surabaya mengalami penurunan. Pada tahun 2014 luasan wilayah genangan Kota Surabaya sebesar 1.303 ha dan pada tahun 2015 sebesar 1.271 ha.

Tabel 2.108  
Rasio Luas Wilayah Genangan Kota Surabaya  
Tahun 2014-2015

| Uraian                     | 2014  | 2015  |
|----------------------------|-------|-------|
| Luas Wilayah Genangan (ha) | 1.303 | 1.271 |

Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Pematusan, 2016

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan. pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan. pelayanan sosial. dan kegiatan ekonomi. Seluruh kawasan budidaya yang ada di Kota Surabaya adalah merupakan kawasan perkotaan karena kegiatan utama pada kawasan budidaya di Kota Surabaya adalah bukan pertanian.

### c. Lingkungan Hidup

Seiring meningkatnya jumlah penduduk. perkembangan jumlah penduduk yang terlayani air bersih dari tahun 2014 ke 2015 juga mengalami peningkatan. Apabila jumlah penduduk yang terlayani air bersih dibandingkan dengan jumlah penduduk secara keseluruhan. maka prosentase cakupan layanan air bersih mengalami peningkatan. Cakupan layanan air bersih pada tahun 2014 sebesar 92.64 persen dan pada tahun 2015 sebesar 92.66 persen.

Tabel 2.109  
Persentase Cakupan Layanan Air Bersih Kota Surabaya  
Tahun 2014- 2015

| No. | Uraian                                     | 2014      | 2015      |
|-----|--|-----------|-----------|
| 1   | Total Jumlah Penduduk Terlayani Air Bersih | 2.585.137 | 2.997.360 |
| 2   | Jumlah Penduduk*                           | 2.790.414 | 3.234.925 |
| 3   | Cakupan Layanan Air Bersih (%)             | 92.64     | 92.66     |

Sumber: PDAM Surya Sembada Kota Surabaya. 2016

### 2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

#### a. Keamanan dan Ketertiban

Untuk meningkatkan iklim investasi. Pemerintah Kota Surabaya perlu melakukan pengendalian terhadap demonstrasi atau unjuk rasa. Adapun jumlah kejadian unjuk rasa di Surabaya pada tahun 2014-2015 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.110  
Jumlah Demonstrasi Kota Surabaya  
Tahun 2014-2015

| No | Uraian                | 2014 | 2015 |
|----|-----------------------|------|------|
| 1  | Bidang politik        | 86   | 90   |
| 2  | Ekonomi               | 91   | 126  |
| 3  | Kasus pemogokan kerja | 63   | 115  |
| 4  | Jumlah unjuk rasa     | 240  | 331  |

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, 2016

Seperti ditampilkan pada tabel di atas. jumlah unjuk rasa di kota Surabaya mengalami peningkatan. namun kondisi keamanan dan ketertiban di Surabaya masih tetap kondusif dan tidak menimbulkan kerusuhan. hal ini dikarenakan adanya pendekatan persuasif dan antisipasi dini yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya bersama dengan instansi terkait serta masih tingginya kesadaran warga kota Surabaya akan pentingnya menjaga ketentraman dan ketertiban kota sebagai modal utama dalam meningkatkan kegiatan perekonomian di Kota Surabaya.

Seperti disajikan pada tabel 2.113. dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif. Pemerintah Kota Surabaya berupaya untuk menerbitkan peraturan yang mendukung iklim usaha Kota Surabaya. antara lain perda terkait perijinan. lalu lintas barang dan jasa. serta perda terkait ketenagakerjaan. Pada tahun 2014 diterbitkan 3 Peraturan Daerah terkait Perijinan. dan pada tahun 2015 telah diterbitkan 1 Peraturan Daerah terkait Perijinan dan 1 Peraturan Daerah terkait Ketenagakerjaan.

Tabel 2.111  
Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha Kota Surabaya  
Tahun 2014-2015

| No. | Uraian   | 2014 | 2015 |
|-----|--|------|------|
| 1.  | Jumlah Perda Terkait Perijinan                   | 3    | 1    |
| 2.  | Jumlah Perda Terkait Lalu Lintas Barang Dan Jasa | 0    | 0    |
| 3.  | Jumlah Perda Terkait Ketenagakerjaan             | 0    | 1    |

Sumber : Bagian Hukum, 2016

#### 2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

##### a. Ketenagakerjaan

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam rangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja. Peningkatan kualitas SDM merupakan hal yang penting. disebabkan adanya kesenjangan antara kualitas tenaga kerja dengan yang dibutuhkan oleh dunia usaha/industri.

Tabel 2.112  
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kota Surabaya  
Tahun 2014-2015

| No | Uraian                  | 2014      | 2015      |
|----|-------------------------|-----------|-----------|
| 1  | Jumlah lulusan S1       | 291.423   | 297.023   |
| 2  | Jumlah lulusan S2       | 18.914    | 19.647    |
| 3  | Jumlah lulusan S3       | 1.100     | 1.204     |
| 4  | Jumlah lulusan S1/S2/S3 | 311.437   | 317.874   |
| 5  | Jumlah penduduk         | 2.853.661 | 2.943.528 |
| 6  | Rasio lulusan S1/S2/S3  | 0.109     | 0.108     |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2016

Seperti tampak pada tabel di atas. rasio kelulusan S1/S2/S3 Kota Surabaya terhadap jumlah penduduk masih cukup rendah dan mengalami penurunan dari tahun 2014 sebesar 0.109 menjadi 0.108 pada tahun 2015.

Menyambut iklim Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). penduduk Indonesia perlu mempersiapkan diri dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk dapat bersaing dengan penduduk negara-negara ASEAN lainnya. Rasio lulusan S1/S2/S3 menjadi salah satu indikasi potensi daerah untuk mengembangkan dan memajukan wilayahnya dengan kekuatan

ekonomi yang prima melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

#### b. Tingkat ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif, yaitu usia 15-64 tahun dengan jumlah penduduk yang belum/tidak produktif, yaitu penduduk usia 0-14 tahun dan penduduk usia 65 tahun ke atas. Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif, demikian pula sebaliknya.

Tabel 2.113  
Rasio Ketergantungan Kota Surabaya  
Tahun 2014 - 2015

| No | Uraian                               | 2014      | 2015      |
|----|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 1  | Jumlah penduduk usia <15 tahun       | 613.554   | 636.425   |
| 2  | Jumlah penduduk usia >64 tahun       | 170.895   | 182.446   |
| 3  | Jumlah penduduk usia tidak produktif | 784.449   | 818.871   |
| 4  | Jumlah penduduk usia 15-64 tahun     | 2.069.212 | 2.124.657 |
| 6  | Rasio ketergantungan                 | 0.379     | 0.385     |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2016

Tabel 2.115 menunjukkan struktur usia penduduk dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu (1) kelompok usia muda, di bawah 15 tahun; (2) kelompok umur produktif, usia 15-64 tahun dan (3) kelompok umur tua yaitu usia 64 tahun ke atas. Dari tabel di atas ditunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Kota Surabaya mengalami kenaikan. Pada tahun 2014, rasio ketergantungan sebesar 0.379 dan mengalami peningkatan pada tahun 2015 menjadi 0.385.

## 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Perumusan strategi dan kebijakan pembangunan Tahun 2016, sebagaimana dituangkan dalam RKPD ini, berpijak pada capaian kinerja pembangunan daerah pada tahun tahun 2015, juga memperhatikan isu dan permasalahan strategis yang dihadapi daerah.

Adapun capaian kinerja pembangunan Kota Surabaya berdasarkan urusan pemerintahan daerah, program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015, serta triwulan I Tahun 2016 dijelaskan pada Tabel 2.114 dan 2.115 tentang Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Tahun Berjalan sebagaimana berikut.

Tabel 2.114  
Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah Tahun 2014-2015  
Kota Surabaya

| Urusan-Program-Kegiatan  | 2014   |             |               |         | 2015   |              |              |          | SKPD   |
|--|--|-------------|---------------|---------|--|--------------|--------------|----------|--|
|  | Indikator  | Target      | Realisasi     | Capaian | Indikator  | Target       | Realisasi    | Capaian  |  |
| <b>1.01 Pendidikan</b>   |  |             |               |         |  |              |              |          |  |
| <b>1.01.15 Program Pendidikan Anak Usia</b>  | Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD   | 97,00%      | 97,02%        | 100,02% | Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD   | 99%          | 99,01%       | 100,01%  |  |
|  | Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD   | 97,00%      | 97,50%        | 100,52% | Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD   | 99%          | 99,02%       | 100,02%  |  |
| 0067 Pelatihan Bina Keluarga Balita  | Jumlah peserta pelatihan bina keluarga balita  | 800 Orang   | 800 Orang     | 100,00% | Jumlah peserta pelatihan bina keluarga balita  | 1.000 Orang  | 834 Orang    | 83,40%   | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana |
| 0059 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini   | Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di 2477 lembaga                               | 5 kegiatan  | 5 kegiatan    | 100,00% | Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini                                   | 4 kegiatan   | 4 kegiatan   | 100,00%  | Dinas Pendidikan                                     |
| <b>1.01.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>   | Angka Kelulusan (AL) SD/MI   | 100,00%     | 100,00%       | 100,00% | Angka Kelulusan (AL) SD/MI   | 100%         | 100,00%      | 100,00%  |  |
|  | Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs   | 99,30%      | 99,99%        | 100,69% | Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs   | 99,50%       | 100,00%      | 100,50%  |  |
|  | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI  | 95,00%      | 97,02%        | 102,13% | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI  | 95,00%       | 95,02%       | 100,02%  |  |
|  | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI  | 105,20%     | 108,30%       | 102,95% | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI  | 105,20%      | 105,24%      | 100,038% |  |
|  | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs  | 95,00%      | 95,87%        | 100,92% | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs  | 95,00%       | 95,03%       | 100,03%  |  |
|  | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs  | 105,00%     | 100,37%       | 95,59%  | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs  | 105,00%      | 105,03%      | 100,03%  |  |
|  | Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI  | 0,00%       | 0,00%         | N/A     | Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI  | 0%           | 0%           | 100,00%  |  |
|  | Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs  | 0,00%       | 0,00%         | N/A     | Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs  | 0,00%        | 0,0000%      | 100,00%  |  |
|  | Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs  | 99,50%      | 99,60%        | 100,10% | Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs  | 0,995        | 99,54%       | 100,04%  |  |
| 0082 Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan   | Jumlah pelajar yang mendapatkan pendidikan tentang pengelolaan lingkungan hidup                                    | 680 orang   | 700 orang     | 102,94% | Jumlah pelajar yang mendapatkan pendidikan tentang pengelolaan lingkungan hidup                        | 700 orang    | 700 orang    | 100,00%  | Badan Lingkungan Hidup                               |
| 0083 Pengadaan Sarana Sekolah Pendidikan Dasar Sembilan Tahun  | Jumlah sarana sekolah Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang tersedia  | 29 Item     | 30 Item       | 103,45% |  |              |              |          | Bagian Perlengkapan                                  |
| 0080 Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Dasar Sembilan Tahun   | Jumlah lokasi sekolah pendidikan dasar sembilan tahun yang dibangun/direhabilitasi                                 | 102 lokasi  | 105 lokasi    | 102,94% | Jumlah lokasi sekolah pendidikan dasar sembilan tahun yang dibangun/direhabilitasi                     | 105 lokasi   | 105 lokasi   | 100,00%  | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang                     |
| 1081 pembangunan/rehabilitasi fasilitas gedung pendidikan dasar pendidikan dasar jamak/multiyear                             | Jumlah gedung pendidikan dasar sembilan tahun yang dibangun dalam tahun jamak                                      | 10 unit     | 9 unit        | 90,00%  |  |              |              |          | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang                     |
| 0089 Pemanfaatan Jasa Internet Untuk Pendidikan  | Jumlah lokasi pendidikan yang memanfaatkan layanan Internet 578 titik  | 12 Bulan    | 12 Bulan      | 100,00% | Waktu pelaksanaan pemanfaatan layanan internet pada 5 lokasi   | 12 Bulan     | 12 Bulan     | 100,00%  | Dinas Komunikasi dan Informatika                     |
| 0084 Penyediaan Sarana Peningkatan Mutu Dan Rehabilitasi Gedung Pendidikan (DIKDAS) Yang Dibiayai Dari DAK Bidang Pendidikan | Waktu penyediaan sarana peningkatan mutu dan rehabilitasi gedung pendidikan dasar                                  | 12 Bulan    | 7 Bulan       | 58,33%  | Jumlah jenis kegiatan yang dibiayai dari DAK bidang pendidikan   | 2 jenis      | 0 jenis      | 0,00%    | Dinas Pendidikan                                     |
| 0085 Pelaksanaan Ujian Nasional DIKDAS   | Jumlah peserta ujian nasional SD dan SMP   | 86002 siswa | 128,129 siswa | 148,98% | Jumlah peserta ujian nasional SD dan SMP   | 85.020 siswa | 90.174 siswa | 106,06%  | Dinas Pendidikan                                     |
| 0086 Peningkatan Mutu Pembelajaran DIKDAS  | Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan mutu pembelajaran  | 2680 orang  | 3,417 orang   | 127,50% | Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan mutu pembelajaran  | 4.824 orang  | 2.710 orang  | 56,18%   | Dinas Pendidikan                                     |
| 0087 Pembinaan Pelayanan Pendidikan Dasar  | Waktu pelaksanaan pembinaan kepada 102 lembaga pelayanan pendidikan dasar  | 12 bulan    | 12 bulan      | 100,00% | Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan  | 102 lembaga  | 102 lembaga  | 100,00%  | Dinas Pendidikan                                     |
| 0088 Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) Jenjang Pendidikan Dasar   | Waktu pelaksanaan pemberian BOPDA kepada 463 SD Negeri, 52 SMP Negeri, dan 12 SMP Terbuka                          | 12 bulan    | 12 bulan      | 100,00% | Jumlah lembaga yang mendapatkan BOPDA  | 424 lembaga  | 424 lembaga  | 100,00%  | Dinas Pendidikan                                     |
| 0092 Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Dasar  | Waktu pelaksanaan operasional sekolah pendidikan dasar di 516 lembaga  | 12 bulan    | 12 bulan      | 100,00% | Jumlah lembaga yang mendapatkan fasilitas operasional sekolah  | 413 lembaga  | 441 lembaga  | 106,78%  | Dinas Pendidikan                                     |
| 0093 Sosialisasi Tentang Pelaksanaan Akreditasi Sekolah DIKDAS   | Jumlah lembaga yang mengikuti sosialisasi pelaksanaan akreditasi sekolah DIKDAS                                    | 400 lembaga | 400 lembaga   | 100,00% |  |              |              |          | Dinas Pendidikan                                     |
| 0094 Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar, Dan Lokakarya Serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu Pendidikan                  | Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan, Seminar, dan Lokakarya serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu Pendidikan | 70689 orang | 67,779 orang  | 95,88%  | Jumlah kegiatan Pelatihan, Seminar, dan Lokakarya serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu Pendidikan | 14 kegiatan  | 14 kegiatan  | 100,00%  | Dinas Pendidikan                                     |

| Urusan-Program-Kegiatan   | Indikator   | 2014  |              |          | 2015  |   |              | SKPD     |                                      |                     |
|---|---|---|--------------|----------|---|---|--------------|----------|--------------------------------------|---------------------|
|   |   | Target  | Realisasi    | Capaian  | Indikator   | Target  | Realisasi    |          | Capaian                              |                     |
| 0095 Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa DIKDAS  | Jumlah siswa yang mendapatkan Pengembangan minat, bakat, dan kreatifitas  | 1784 orang  | 4,061 orang  | 227.63%  | Jumlah siswa yang mendapatkan pengembangan minat, bakat, dan kreatifitas siswa DIKDAS                 | 9.582 siswa   | 10.895 siswa | 113,70%  | Dinas Pendidikan                     |                     |
| 0096 Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKDAS  | Jumlah sekolah yang mendapatkan sarana pendidikan dasar   | 22 sekolah  | 22 sekolah   | 100.00%  | Jumlah jenis sarana pendidikan yang diberikan   | 6 jenis   | 6 jenis      | 100,00%  | Dinas Pendidikan                     |                     |
| 0097 Pengembangan Pelayanan Pendidikan Dasar (Bantuan Keuangan Provinsi)  | Jumlah kegiatan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Dasar (Bantuan Keuangan Provinsi) yang dilaksanakan   | 2 kegiatan  | 0 kegiatan   | 0.00%    | Jumlah kegiatan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Dasar (Bantuan Keuangan Provinsi) yang dilaksanakan | 1 kegiatan  | 1 kegiatan   | 100,00%  | Dinas Pendidikan                     |                     |
| 0097 Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk Sarana Pendidikan  |   |   |              |          | Lokasi pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk sarana pendidikan                                      | 1 lokasi  | 0 lokasi     | 0,00%    | Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah |                     |
| 0090 Operasional Bis Sekolah  | Waktu pelaksanaan pelayanan angkutan 4 bus sekolah  | 12 bulan  | 12 bulan     | 100.00%  | Waktu pelaksanaan pelayanan angkutan 4 bus sekolah  | 12 Bulan  | 12 Bulan     | 100,00%  | Dinas Perhubungan                    |                     |
| 0079 Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Anak Luar Biasa di UPTD Pondok Sosial Kalijudan dan pemberian beasiswa kepada 425 mahasiswa | Waktu pelaksanaan 10 kegiatan Pelayanan yang diberikan kepada 100 orang penghuni UPTD Pondok Sosial Kalijudan dan pemberian beasiswa kepada 425 mahasiswa | 12 Bulan  | 12 Bulan     | 100.00%  |   |   |              |          | Dinas Sosial                         |                     |
| 1.01.17 Program Pendidikan Menengah   | Angka Kelulusan (AL) SMA/MA   | 99,15%  | 99,93%       | 100,79%  | Angka Kelulusan (AL) SMA/MA   | 99,50%  | 99,97%       | 100,47%  |                                      |                     |
|   | Angka Kelulusan (AL) SMK  | 99,11%  | 99,95%       | 100,85%  | Angka Kelulusan (AL) SMK  | 99,21%  | 99,97%       | 100,77%  |                                      |                     |
|   | Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK  | 92,50%  | 93,47%       | 101,05%  | Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK  | 92,50%  | 92,55%       | 100,05%  |                                      |                     |
|   | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK  | 105,00%   | 121,85%      | 116,05%  | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK  | 105,00%   | 105,08%      | 100,08%  |                                      |                     |
|   | Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke jenjang SMA/MA  | 95,00%  | 110,42%      | 116,23%  | Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke jenjang SMA/MA  | 95,00%  | 100,04%      | 105,31%  |                                      |                     |
|   | Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA  | 0,00%   | 0,01%        | N/A      | Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA  | 0,00%   | 0,004%       | 100,00%  |                                      |                     |
|   | Angka Putus Sekolah (APS) SMK   | 0,00%   | 0,01%        | N/A      | Angka Putus Sekolah (APS) SMK   | 0,00%   | 0,007%       | 99,99%   |                                      |                     |
|   | Persentase lulusan SMK yang diterima di dunia kerja/wirausaha   | 65,00%  | 61,40%       | 94,46%   | Persentase lulusan SMK yang diterima di dunia kerja/wirausaha   | 70,00%  | 67,00%       | 95,72%   |                                      |                     |
|   | 0070 Fasilitasi Pengiriman Delegasi Pendidikan Ke Luar Negeri   | Jumlah Delegasi Pendidikan yang Difasilitasi Ke Luar Negeri | 88 Orang     | 89 Orang | 101.14%   | Jumlah Delegasi Pendidikan yang Difasilitasi Ke Luar Negeri | 78 orang     | 79 orang | 101,28%                              | Bagian Kerjasama    |
|   | 0073 Pengadaan Sarana Sekolah Pendidikan Menengah   | Jumlah sarana sekolah Pendidikan Menengah yang tersedia     | 21 Item      | 21 Item  | 100.00%   |   |              |          |                                      | Bagian Perlengkapan |
| 0071 Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Menengah (Dana Insentif Daerah)   | Jumlah lokasi sekolah Pendidikan Menengah yang dibangun/direhabilitasi  | 13 lokasi   | 13 lokasi    | 100.00%  | Jumlah gedung sekolah pendidikan menengah yang dibangun/direhabilitasi                                | 13 lokasi   | 13 lokasi    | 100,00%  | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang     |                     |
| 1072 pembangunan/rehabilitasi fasilitas gedung pendidikan menengah (tahun jamak/multiyear)  | Jumlah gedung pendidikan menengah yang dibangun dalam tahun jamak   | 5 unit  | 5 unit       | 100.00%  |   |   |              |          | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang     |                     |
| 0066 Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan industri  | Jumlah sekolah yang difasilitasi dalam peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan industri  | 189 sekolah   | 119 sekolah  | 62.96%   |   |   |              |          | Dinas Pendidikan                     |                     |
| 0074 Pelaksanaan Ujian Nasional DIKMEN  | Jumlah peserta ujian nasional SMA dan SMK   | 37625 siswa   | 37,960 siswa | 100.89%  | Jumlah peserta ujian nasional SMA dan SMK   | 37.625 siswa  | 38.768 siswa | 103,04%  | Dinas Pendidikan                     |                     |
| 0075 Peningkatan Mutu Pembelajaran DIKMEN   | Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan mutu pembelajaran   | 520 orang   | 812 orang    | 156.15%  | Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan mutu pembelajaran   | 6.970 orang   | 9.171 orang  | 131,58%  | Dinas Pendidikan                     |                     |
| 0076 Penerimaan Peserta Didik Baru  | Waktu persiapan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru   | 3 bulan   | 3 bulan      | 100.00%  | Jumlah kegiatan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru   | 3 kegiatan  | 3 kegiatan   | 100,00%  | Dinas Pendidikan                     |                     |
| 0077 Pembinaan Pelayanan Pendidikan Menengah  | waktu pelaksanaan pembinaan kepada 7 lembaga pelayanan pendidikan menengah  | 12 bulan  | 11 bulan     | 91.67%   | Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan   | 7 lembaga   | 7 lembaga    | 100,00%  | Dinas Pendidikan                     |                     |
| 0078 Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) Jenjang Pendidikan Negeri   | Waktu pelaksanaan pemberian BOPDA kepada 22 SMA Negeri, 2 SMA Terbuka dan 10 SMK Negeri   | 12 bulan  | 12 bulan     | 100.00%  | Jumlah lembaga yang mendapatkan BOPDA   | 33 lembaga  | 33 lembaga   | 100,00%  | Dinas Pendidikan                     |                     |
| 0079 Penyediaan Sarana Peningkatan Mutu dan Rehabilitasi Gedung Pendidikan (DIKMEN) yang dibiayai dari DAK Bidang Pendidikan                          | Waktu penyediaan sarana peningkatan mutu dan rehabilitasi gedung pendidikan (DIKMEN)  | 12 bulan  | 12 bulan     | 100.00%  |   |   |              |          | Dinas Pendidikan                     |                     |
| 0081 Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Menengah  | Waktu pelaksanaan operasional sekolah pendidikan menengah di 32 lembaga   | 12 bulan  | 11 bulan     | 91.67%   | Jumlah lembaga yang mendapatkan fasilitas operasional sekolah   | 32 lembaga  | 32 lembaga   | 100,00%  | Dinas Pendidikan                     |                     |



| Urusan-Program-Kegiatan   | 2014   |             |              |         | 2015   |             |             |         | SKPD              |
|---|--|-------------|--------------|---------|--|-------------|-------------|---------|-------------------|
|   | Indikator  | Target      | Realisasi    | Capaian | Indikator  | Target      | Realisasi   | Capaian |                   |
| 0082 Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa DIKMEN                                  | Jumlah siswa yang mendapatkan Pengembangan minat, bakat, dan kreatifitas   | 2075 orang  | 750 orang    | 36.14%  | Jumlah siswa yang mendapatkan pengembangan minat, bakat, dan kreatifitas siswa DIKMEN                            | 8.827 siswa | 5.822 siswa | 65,96%  | Dinas Pendidikan  |
| 0083 Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKMEN  | Jumlah sekolah yang mendapatkan sarana pendidikan menengah   | 30 sekolah  | 37 sekolah   | 123.33% | Jumlah jenis sarana pendidikan yang diberikan  | 3 jenis     | 1 jenis     | 33,33%  | Dinas Pendidikan  |
| 0084 Pengembangan Pelayanan Pendidikan Menengah (Bantuan Keuangan Provinsi)                   | Jumlah kegiatan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Menengah (Bantuan Keuangan Provinsi) yang dilaksanakan   | 4 kegiatan  | 0 kegiatan   | 0.00%   | Jumlah kegiatan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Menengah (Bantuan Keuangan Provinsi) yang dilaksanakan         | 3 kegiatan  | 2 kegiatan  | 66,67%  | Dinas Pendidikan  |
| 0084 Fasilitasi Promosi Kompetensi Siswa Pendidikan Menengah                                  |  |             |              |         | Jumlah sekolah yang difasilitasi dalam promosi kompetensi siswa pendidikan menengah                              | 200 sekolah | 122 sekolah | 61,00%  | Dinas Pendidikan  |
| 0080 Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas Bagi Pelajar   | Jumlah Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas Bagi Pelajar  | 24 kali     | 24 kali      | 100.00% | Jumlah Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas Bagi Pelajar  | 24 Kali     | 24 Kali     | 100,00% | Dinas Perhubungan |
| <b>1.01.18 Program Pendidikan Non Formal</b>  | Angka Melek Huruf (AMH)  | 100,00%     | 100,00%      | 100,00% | Angka Melek Huruf (AMH)  | 100%        | 100,00%     | 100,00% |                   |
| 0014 Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah  | Waktu pembinaan peningkatan mutu kepada 13062 tenaga pendidik dan tenaga kependidikan luar sekolah   | 12 bulan    | 11 bulan     | 91.67%  | Jumlah kegiatan pelaksanaan pembinaan pendidikan luar sekolah  | 12 kegiatan | 12 kegiatan | 100,00% | Dinas Pendidikan  |
| 0015 Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa PLS                                     | Jumlah kegiatan pengembangan minat, bakat, dan kreatifitas siswa PLS yang dilaksanakan bagi 1435 siswa   | 5 kegiatan  | 5 kegiatan   | 100.00% | Jumlah kegiatan pengembangan minat, bakat, dan kreatifitas siswa PLS   | 5 kegiatan  | 5 kegiatan  | 100,00% | Dinas Pendidikan  |
| 0016 Pengembangan Pelayanan Pendidikan Luar Sekolah (Bantuan Keuangan Provinsi)               | Jumlah kegiatan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Luar Sekolah (Bantuan Keuangan Provinsi) yang dilaksanakan   | 2 kegiatan  | 0 kegiatan   | 0.00%   | Jumlah kegiatan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Luar Sekolah (Bantuan Keuangan Provinsi) yang dilaksanakan     | 1 kegiatan  | 0 kegiatan  | 0,00%   | Dinas Pendidikan  |
| <b>1.01.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga</b>                                   | Persentase Tenaga Pendidik yang memenuhi standar kualifikasi   | 96,08%      | 97,05%       | 101,01% | Persentase Tenaga Pendidik yang memenuhi standar kualifikasi   | 100%        | 97,50%      | 97,50%  |                   |
| 0007 Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi                     | Jumlah guru yang mengikuti pendidikan lanjutan S1 dan S2   | 152 orang   | 304 orang    | 200.00% | Jumlah guru yang mengikuti pendidikan lanjutan S1 dan S2   | 68 orang    | 68 orang    | 100,00% | Dinas Pendidikan  |
| 0014 Fasilitasi Pengembangan Mutu Program Pendidikan  | Jumlah kegiatan fasilitasi pengembangan mutu program pendidikan bagi 38050 orang   | 7 kegiatan  | 6 kegiatan   | 85.71%  | Jumlah kegiatan fasilitasi pengembangan mutu program pendidikan  | 6 kegiatan  | 7 kegiatan  | 116,67% | Dinas Pendidikan  |
| 0015 Peningkatan Mutu Guru Swasta SD/MI/SDLB/SLB/Salafiyah Ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah Wustho | Waktu Pelaksanaan Penunjang BOSDA Madin didalam pemberian biaya penyelenggaraan pendidikan Guru Swasta SD/MI/SDLB/SLB/Salafiyah Ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah Wustho | 6 bulan     | 6 bulan      | 100.00% | Jumlah guru swasta SD/MI/SDLB/SLB/Salafiyah Ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah Wustho yang mendapatkan peningkatan mutu | 1.595 orang | 1.486 orang | 93,17%  | Dinas Pendidikan  |
| 0016 Pengembangan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Bantuan Keuangan Provinsi)           | Jumlah kegiatan Pengembangan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Bantuan Keuangan Provinsi) yang dilaksanakan   | 2 kegiatan  | 0 kegiatan   | 0.00%   | Jumlah kegiatan Pengembangan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Bantuan Keuangan Provinsi) yang dilaksanakan | 1 kegiatan  | 0 kegiatan  | 0,00%   | Dinas Pendidikan  |
| <b>x.xx.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                                     |  |             |              |         |  |             |             |         |                   |
| 0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran   | Waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran   | 12 bulan    | 12 bulan     | 100.00% | Waktu pelaksanaan penyediaan 8 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran                                       | 12 bulan    | 12 bulan    | 100,00% | Dinas Pendidikan  |
| <b>x.xx.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>                              |  |             |              |         |  |             |             |         |                   |
| 0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran                              | Waktu pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran  | 12 bulan    | 12 bulan     | 100.00% | Waktu pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran                            | 12 bulan    | 12 bulan    | 100,00% | Dinas Pendidikan  |
| <b>1.02 Kesehatan</b>   |  |             |              |         |  |             |             |         |                   |
| <b>1.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>   | Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin  | 100,00%     | 100,00%      | 100,00% | Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin  | 100%        | 100,00%     | 100,00% |                   |
|   | Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam  | 100,00%     | 100,00%      | 100,00% | Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam  | 100%        | 100,00%     | 100,00% |                   |
| 0007 Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan   | Waktu penyediaan pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan  | 12 Bulan    | 12 Bulan     | 100.00% | Tersedianya penyediaan pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan  | 12 Bulan    | 12 Bulan    | 100,00% | Dinas Kesehatan   |
| 0009 Peningkatan Kesehatan Masyarakat   | Waktu pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat  | 12 Bulan    | 12 Bulan     | 100.00% | Waktu pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat  | 12 Bulan    | 12 Bulan    | 100,00% | Dinas Kesehatan   |
| 0014 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan  | Jumlah sampel sanitasi lingkungan yang diuji   | 5258 sampel | 5,258 sampel | 100.00% | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyehatan Lingkungan   | 12 Bulan    | 12 Bulan    | 100,00% | Dinas Kesehatan   |

| Urusan-Program-Kegiatan  | 2014  |              |              |         | 2015  |              |              |         | SKPD                                 |
|--|---|--------------|--------------|---------|---|--------------|--------------|---------|--------------------------------------|
|  | Indikator   | Target       | Realisasi    | Capaian | Indikator   | Target       | Realisasi    | Capaian |                                      |
| 0017 Peningkatan Surveyans Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah   | Jumlah kegiatan Peningkatan Surveyans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah yang dilaksanakan | 893 Kegiatan | 893 Kegiatan | 100.00% | Jumlah kegiatan Peningkatan Surveyans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah yang dilaksanakan | 497 Kegiatan | 497 Kegiatan | 100,00% | Dinas Kesehatan                      |
| 0018 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus  | Waktu Pelaksanaan 4 layanan Kesehatan Khusus di 62 Puskesmas                                  | 12 Bulan     | 12 Bulan     | 100.00% | Terlaksananya 5 layanan Kesehatan Khusus di 62 Puskesmas                                      | 12 Bulan     | 12 Bulan     | 100,00% | Dinas Kesehatan                      |
| 0019 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Dan Bahan Berbahaya  | Jumlah sampel makanan dan minuman yang diuji  | 534 sampel   | 534 sampel   | 100.00% | Jumlah sampel makanan dan minuman yang diuji  | 534 Sampel   | 534 Sampel   | 100,00% | Dinas Kesehatan                      |
| 0020 Peningkatan Profesionalisme SDM Kesehatan   | Jumlah pelatihan kepada 1371 kader dan tenaga kesehatan yang dilaksanakan                     | 19 Pelatihan | 19 Pelatihan | 100.00% | Jumlah kegiatan peningkatan profesionalisme SDM Kesehatan yang dilaksanakan                   | 11 Kegiatan  | 11 Kegiatan  | 100,00% | Dinas Kesehatan                      |
| 0021 Sertifikasi dan Akreditasi SDM Kesehatan  | Jumlah tenaga kesehatan yang difasilitasi dalam Sertifikasi dan Akreditasi                    | 900 orang    | 900 orang    | 100.00% | Jumlah tenaga kesehatan yang difasilitasi dalam Sertifikasi dan Akreditasi                    | 900 Orang    | 900 Orang    | 100,00% | Dinas Kesehatan                      |
| 0022 Pembinaan Dan Pengembangan SDM Kesehatan  | Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengembangan SDM Kesehatan yang dilaksanakan                    | 5 kegiatan   | 5 kegiatan   | 100.00% | Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengembangan SDM Kesehatan yang dilaksanakan                    | 5 Kegiatan   | 5 Kegiatan   | 100,00% | Dinas Kesehatan                      |
| 0023 Pengadaan Obat Dan Pelayanan Kesehatan Dasar Di Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)                            | Ketersediaan Obat dan Pelayanan Kesehatan Dasar di puskesmas                                  | 92 Item      | 74 Item      | 80.43%  | Ketersediaan Obat dan Pelayanan Kesehatan Dasar di puskesmas                                  | 45 Item      | 45 Item      | 100,00% | Dinas Kesehatan                      |
| 0024 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di puskesmas dan jaringannya / rumah sakit                              | Persentase Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Jaminan Pelayanan Kesehatan                     | 100 Persen   | 100 Persen   | 100.00% |   |              |              |         | Dinas Kesehatan                      |
| 0026 Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular  | Waktu Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi 2.170 Penderita Penyakit Menular                   | 12 Bulan     | 12 Bulan     | 100.00% | Waktu Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penderita Penyakit Menular                         | 12 Bulan     | 12 Bulan     | 100,00% | Dinas Kesehatan                      |
| 0016 Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Sarana Penunjang Fasilitas Kesehatan                                | Pengadaan Tanah dan/atau bangunan untuk Sarana Kesehatan                                      | 1 Lokasi     | 0 Lokasi     | 0.00%   |   |              |              |         | Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah |
| 0027 Jaminan Kesehatan Masyarakat  |   |              |              |         | Persentase Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Jaminan Pelayanan Kesehatan                     | 100 Persen   | 100 Persen   | 100,00% | Dinas Kesehatan                      |
| 0024 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Dan Jaringannya / Rumah Sakit                              | Persentase Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Jaminan Pelayanan Kesehatan                     | 100 Persen   | 100 Persen   | 100.00% | Persentase Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Jaminan Pelayanan Kesehatan                     | 100 Persen   | 100 Persen   | 100,00% | RSUD Bhakti Dharma Husada            |
| 0025 Pelayanan perawatan dan gizi pasien rumah sakit   | Waktu Penyediaan Pelayanan Perawatan dan Gizi Pasien Rumah Sakit                              | 12 Bulan     | 12 Bulan     | 100.00% |   |              |              |         | RSUD Bhakti Dharma Husada            |
| 0024 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Dan Jaringannya / Rumah Sakit                              | Persentase Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Jaminan Pelayanan Kesehatan                     | 100 Persen   | 100 Persen   | 100.00% | Persentase Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Jaminan Pelayanan Kesehatan                     | 100 Persen   | 100 Persen   | 100,00% | RSUD Dr. Mohamad Soewandie           |
| 0025 Pelayanan perawatan dan gizi pasien rumah sakit   | Waktu Penyediaan Pelayanan Perawatan dan Gizi Pasien Rumah Sakit                              | 12 bulan     | 12 bulan     | 100.00% |   |              |              |         | RSUD Dr. Mohamad Soewandie           |
| <b>1.02.25 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan</b>  | Jumlah puskesmas induk yang meningkat menjadi puskesmas rawat inap                            | 19           | 20           | 105,26% | Jumlah puskesmas induk yang meningkat menjadi puskesmas rawat inap                            | 21           | 21           | 100,00% |                                      |
|  | Jumlah puskesmas pembantu yang meningkat menjadi puskesmas induk                              | 8            | 9            | 112,50% | Jumlah puskesmas pembantu yang meningkat menjadi puskesmas induk                              | 10           | 10           | 100,00% |                                      |
| 0024 Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Puskesmas/Puskesmas Pembantu  | Jumlah Puskesmas/Puskesmas Pembantu yang dibangun/direhabilitasi dan diawasi                  | 6 unit       | 6 unit       | 100.00% | Jumlah puskesmas/puskesmas pembantu yang dibangun/direhabilitasi dan diawasi:                 | 5 lokasi     | 8 lokasi     | 160,00% | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang     |
| 0025 Pelayanan Kesehatan Puskesmas   | Waktu layanan kesehatan spesialis di 9 puskesmas yang dilaksanakan                            | 12 Bulan     | 12 Bulan     | 100.00% | Waktu layanan kesehatan spesialis di 9 puskesmas yang dilaksanakan                            | 12 Bulan     | 12 Bulan     | 100,00% | Dinas Kesehatan                      |
| 0026 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan   | Jumlah dokumen pengembangan standart pelayanan kesehatan                                      | 3 dokumen    | 3 dokumen    | 100.00% | Jumlah Sistem pengembangan standart pelayanan kesehatan                                       | 1 Sistem     | 1 Sistem     | 100,00% | Dinas Kesehatan                      |
| 0027 Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas  | Jumlah alat kesehatan puskesmas yang diadakan   | 79 Item      | 79 Item      | 100.00% | Jumlah alat kesehatan puskesmas yang diadakan   | 81 Jenis     | 81 Jenis     | 100,00% | Dinas Kesehatan                      |
| 0028 Operasional Pelayanan Kesehatan   | Terpenuhinya penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan kesehatan                          | 12 Bulan     | 12 Bulan     | 100.00% | Terpenuhinya penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan kesehatan                          | 12 Bulan     | 12 Bulan     | 100,00% | Dinas Kesehatan                      |
| 0029 Pengadaan Sarana Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok yang Bersumber dari Cukai Hasil Tembakau | Tersedianya Alat dan Perlengkapan Kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok           | 2 Jenis      | 2 Jenis      | 100.00% | Tersedianya Alat dan Perlengkapan Kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok           | 8 Jenis      | 8 Jenis      | 100,00% | Dinas Kesehatan                      |

| Urusan-Program-Kegiatan  | 2014  |            |             |         | 2015  |             |             |         | SKPD                             |
|--|---|------------|-------------|---------|---|-------------|-------------|---------|----------------------------------|
|  | Indikator   | Target     | Realisasi   | Capaian | Indikator   | Target      | Realisasi   | Capaian |                                  |
| 1.02.32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak  | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Tolinakes) yang memiliki kompetensi kebidanan | 96%        | 96,45%      | 100,47% | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Tolinakes) yang memiliki kompetensi kebidanan | 96%         | 96,92%      | 100,96% | Dinas Kesehatan                  |
|  | Cakupan bayi 0 - 11 bulan yang mendapat imunisasi BCG   | 90,00%     | 97,10%      | 107,89% | Cakupan bayi 0 - 11 bulan yang mendapat imunisasi BCG   | 90%         | 92,15%      | 102,39% |                                  |
|  | Cakupan bayi 0 - 11 bulan yang mendapat imunisasi DPT 1 + HB 1                                      | 90,00%     | 93,59%      | 103,99% | Cakupan bayi 0 - 11 bulan yang mendapat imunisasi DPT 1 + HB 1                                      | 90%         | 92,91%      | 103,23% |                                  |
|  | Cakupan bayi 0 - 11 bulan yang mendapat imunisasi DPT 3 + HB 3                                      | 90,00%     | 88,85%      | 98,72%  | Cakupan bayi 0 - 11 bulan yang mendapat imunisasi DPT 3 + HB 3                                      | 90%         | 91,49%      | 101,66% |                                  |
|  | Cakupan bayi 0 - 11 bulan yang mendapat imunisasi Polio 4   | 90,00%     | 88,66%      | 98,51%  | Cakupan bayi 0 - 11 bulan yang mendapat imunisasi Polio 4   | 90%         | 91,02%      | 101,13% |                                  |
|  | Cakupan bayi 0 - 11 bulan yang mendapat imunisasi Campak  | 90,00%     | 94,13%      | 104,59% | Cakupan bayi 0 - 11 bulan yang mendapat imunisasi Campak  | 90%         | 93,04%      | 103,38% |                                  |
|  | Balita gizi buruk mendapat perawatan  | 100,00%    | 100,00%     | 100,00% | Balita gizi buruk mendapat perawatan  | 100%        | 100,00%     | 100,00% |                                  |
|  | Cakupan kunjungan ibu hamil K4  | 98,00%     | 98,22%      | 100,22% | Cakupan kunjungan ibu hamil K4  | 98%         | 98,41%      | 100,42% |                                  |
|  | Cakupan kunjungan bayi  | 90,00%     | 94,71%      | 105,23% | Cakupan kunjungan bayi  | 90%         | 93,69%      | 104,10% |                                  |
| 0004 Pelayanan Kesehatan Keluarga  | Waktu pelayanan kesehatan keluarga yang dilaksanakan  | 12 Bulan   | 12 Bulan    | 100,00% | Tertindaknya pelayanan kesehatan keluarga   | 12 Bulan    | 12 Bulan    | 100,00% | Dinas Kesehatan                  |
| 0005 Peningkatan Dan Perbaikan Gizi Masyarakat   | Jumlah balita dan Ibu Hamil/menyusui yang mendapat peningkatan dan perbaikan gizi                   | 4108 orang | 4,108 orang | 100,00% | Jumlah balita dan Ibu Hamil/menyusui yang mendapat peningkatan dan perbaikan gizi                   | 3.640 Orang | 3.640 Orang | 100,00% | Dinas Kesehatan                  |
| 1.02.33 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah   | Peningkatan Klasifikasi Rumah Sakit RSUD dr. M. Soewandhi   | Kelas B    | Kelas B     | Kelas B | Peningkatan Klasifikasi Rumah Sakit RSUD dr. M. Soewandhi   | Kelas B     | Kelas B     | 100%    |                                  |
|  | Peningkatan Klasifikasi Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada  | Kelas B    | Kelas C     | Kelas C | Peningkatan Klasifikasi Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada  | Kelas B     | Kelas C     | -       |                                  |
| 0009 Pembangunan Gedung Dan Peralatan RSUD Dr. Soewandhi (Tahun Jamak/Multiyears)                                | Jumlah Gedung RSUD Dr. Soewandhi yang dibangun  | 1 Unit     | 0 Unit      | 0,00%   | Jumlah gedung RSUD Dr. Soewandhi yang dibangun  | 1 unit      | 1 unit      | 100,00% | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang |
| 0001 Pengadaan Dan Pemeliharaan Alat Kesehatan Rumah Sakit   | Waktu penyediaan 15 jenis dan pemeliharaan alat kesehatan   | 12 Bulan   | 12 Bulan    | 100,00% | Jumlah alat kesehatan yang tersedia   | 16 Jenis    | 16 Jenis    | 100,00% | RSUD Bhakti Dharma Husada        |
| 0002 Promosi Kesehatan Rumah Sakit   | Waktu pelaksanaan 8 kegiatan Promosi Kesehatan Rumah Sakit  | 12 Bulan   | 12 Bulan    | 100,00% | Jumlah promosi kesehatan yang dilaksanakan  | 8 Kegiatan  | 8 Kegiatan  | 100,00% | RSUD Bhakti Dharma Husada        |
| 0003 Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit   | Jumlah fasilitasi pengembangan manajemen dan pelayanan administrasi RS                              | 5 Kali     | 5 Kali      | 100,00% | Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pendidikan pelatihan   | 375 Orang   | 411 Orang   | 109,60% | RSUD Bhakti Dharma Husada        |
| 0004 Pengadaan Sarana Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok yang Bersumber dari Cukai Hasil Tembakau | Jumlah sarana kesehatan bagi penderita Akibat Dampak Asap Rokok yang tersedia                       | 1 Jenis    | 1 Jenis     | 100,00% | Jumlah sarana kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok yang tersedia                       | 1 Jenis     | 1 Jenis     | 100,00% | RSUD Bhakti Dharma Husada        |
| 0011 Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan  | Waktu penyediaan pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan                                     | 12 Bulan   | 12 Bulan    | 100,00% | Jumlah obat dan bahan medis yang tersedia   | 5 Jenis     | 5 Jenis     | 100,00% | RSUD Bhakti Dharma Husada        |
| 0012 Pelayanan Perawatan Dan Gizi Pasien Rumah Sakit   |   |            |             |         | Persentase pasien rumah sakit yang terlayani  | 100 Persen  | 100 Persen  | 100,00% | RSUD Bhakti Dharma Husada        |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan yang bersumber dari DAK Bidang Kesehatan                                |   |            |             |         | Tertindaknya pengadaan sarana dan prasarana kesehatan yang bersumber dari DAK bidang kesehatan      | 6 Jenis     | 6 Jenis     | 100,00% | RSUD Bhakti Dharma Husada        |
| 0001 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan Rumah Sakit   | waktu penyediaan 3 jenis dan pemeliharaan alat kesehatan  | 12 Bulan   | 12 Bulan    | 100,00% |   |             |             |         | RSUD Dr. Mohamad Soewandhie      |
| 0003 Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit   | Jumlah aplikasi sistem informasi manajemen rumah sakit yang dikembangkan                            | 1 Aplikasi | 1 Aplikasi  | 100,00% | Jumlah aplikasi sistem informasi manajemen rumah sakit yang dikembangkan                            | 1 Aplikasi  | 1 Aplikasi  | 100,00% | RSUD Dr. Mohamad Soewandhie      |
| 0004 Pengadaan Sarana Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok yang Bersumber dari Cukai Hasil Tembakau | Tersedianya Alat dan Perlengkapan Kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok                 | 5 Jenis    | 5 Jenis     | 100,00% | Tersedianya Alat dan Perlengkapan Kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok                 | 5 Jenis     | 5 Jenis     | 100,00% | RSUD Dr. Mohamad Soewandhie      |
| 0005 Peningkatan Mutu SDM Rumah Sakit  | Waktu penyediaan alokasi jasa pelayanan bagi tenaga kesehatan                                       | 12 Bulan   | 12 Bulan    | 100,00% | Waktu penyediaan alokasi jasa pelayanan bagi tenaga kesehatan                                       | 12 Bulan    | 12 Bulan    | 100,00% | RSUD Dr. Mohamad Soewandhie      |
| 0006 Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit  | Jumlah pelayanan rumah sakit yang terlaksana  | 6 Kegiatan | 6 Kegiatan  | 100,00% | Jumlah pelayanan rumah sakit yang terstandarisasi   | 3 Kegiatan  | 3 Kegiatan  | 100,00% | RSUD Dr. Mohamad Soewandhie      |
| 0010 Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit  |   |            |             |         | waktu penyediaan 3 jenis dan pemeliharaan alat kesehatan selama                                     | 12 Bulan    | 12 Bulan    | 100,00% | RSUD Dr. Mohamad Soewandhie      |

| Urusan-Program-Kegiatan  | 2014   |             |                           |         | 2015  |            |             |         | SKPD  |
|--|--|-------------|---------------------------|---------|---|------------|-------------|---------|---|
|  | Indikator  | Target      | Realisasi                 | Capaian | Indikator   | Target     | Realisasi   | Capaian |   |
| 0011 Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan                                      | Waktu penyediaan pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan                        | 12 Bulan    | 12 Bulan                  | 100,00% | Waktu penyediaan pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan                                 | 12 Bulan   | 12 Bulan    | 100,00% | RSUD Dr. Mohamad Soewandie                    |
| 0012 Pelayanan Perawatan Dan Gizi Pasien Rumah Sakit                                     |  |             |                           |         | Waktu Penyediaan Pelayanan Perawatan dan Gizi Pasien Rumah Sakit                                | 12 Bulan   | 12 Bulan    | 100,00% | RSUD Dr. Mohamad Soewandie                    |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan yang bersumber dari DAK Bidang Kesehatan        |  |             |                           |         | Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kesehatan yang bersumber dari DAK bidang kesehatan | 16 Jenis   | 16 Jenis    | 100,00% | RSUD Dr. Mohamad Soewandie                    |
| <b>x.xx.01 Program Pelayanan Administrasi</b>  |  |             |                           |         |   |            |             |         |   |
| 0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran  | Waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran             | 12 Bulan    | 12 Bulan                  | 100,00% | Waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran                      | 12 Bulan   | 12 Bulan    | 100,00% | Dinas Kesehatan                               |
| 0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran  | Waktu Pelaksanaan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran RSUD. Bhakti Dharma Husada    | 12 Bulan    | 12 Bulan                  | 100,00% | Waktu Pelaksanaan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran  | 12 Bulan   | 12 Bulan    | 100,00% | RSUD Bhakti Dharma Husada                     |
| 0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran  | Waktu pelaksanaan penyediaan jenis Kebutuhan Barang dan Jasa Perkantoran               | 12 Bulan    | 12 Bulan                  | 100,00% | Waktu pelaksanaan penyediaan jenis Kebutuhan Barang dan Jasa Perkantoran                        | 12 Bulan   | 12 Bulan    | 100,00% | RSUD Dr. Mohamad Soewandie                    |
| <b>x.xx.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>                         |  |             |                           |         |   |            |             |         |   |
| 0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran                         | Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perkantoran yang Layak                               | 12 Bulan    | 12 Bulan                  | 100,00% | Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perkantoran yang Layak  | 12 Bulan   | 12 Bulan    | 100,00% | Dinas Kesehatan                               |
| 0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran                         | Waktu Pelaksanaan Pengadaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa RSUD Bhakti Dharma Husada | 12 Bulan    | 12 Bulan                  | 100,00% | Waktu Pelaksanaan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran                       | 12 Bulan   | 12 Bulan    | 100,00% | RSUD Bhakti Dharma Husada                     |
| 0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran                         | Waktu pelaksanaan pemeliharaan dan Pengadaan Jenis Sarana Prasarana Perkantoran        | 12 Bulan    | 12 Bulan                  | 100,00% | Waktu pelaksanaan pemeliharaan dan Pengadaan Jenis Sarana Prasarana Perkantoran                 | 12 Bulan   | 12 Bulan    | 100,00% | RSUD Dr. Mohamad Soewandie                    |
| <b>1.03 Pekerjaan Umum</b>   |  |             |                           |         |   |            |             |         |   |
| <b>1.03.28 Program pengendalian banjir</b>   |  |             |                           |         |   |            |             |         |   |
|  | Luas wilayah genangan  | 2111 ha     | 1303.13 Ha                | 138,27% | Luas wilayah genangan   | 2027 ha    | 1270,55 Ha  | 137,32% |   |
|  | rata-rata Lama terjadinya genangan   | 60 menit    | 54,75 menit atau 0,91 jam | 108,75% | rata-rata Lama terjadinya genangan  | 60 menit   | 53,38 menit | 111,03% |   |
|  | rata-rata Tinggi genangan yang terjadi   | 20 cm       | 16.82 cm                  | 115,90% | rata-rata Tinggi genangan yang terjadi  | 20 cm      | 16,40 cm    | 118,00% |   |
| 0012 Pembangunan Sarana Prasarana Pematusan  | Jumlah lokasi saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun                             | 23 lokasi   | 23 lokasi                 | 100,00% |   |            |             |         | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan |
| 0013 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong | Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan/rehab pematusan                     | 37 dokumen  | 38 dokumen                | 102,70% | Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan/rehab pematusan                              | 30 dokumen | 53 dokumen  | 176,67% | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan |
| 0014 Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Saluran Pematusan                          | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan dan rehabilitasi pematusan kota                 | 110 dokumen | 105 dokumen               | 95,45%  | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan dan rehabilitasi pematusan kota                          | 82 dokumen | 127 dokumen | 154,88% | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan |
| 0015 Pengadaan Sarana Prasarana Pematusan  | Jumlah pengadaan dan pembangunan sarana prasarana pematusan kota                       | 3 jenis     | 3 jenis                   | 100,00% |   |            |             |         | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan |
| 0016 Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Pematusan                                       | Waktu Pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pematusan              | 12 bulan    | 12 bulan                  | 100,00% | Waktu Pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pematusan                       | 12 kali    | 12 kali     | 100,00% | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan |
| 0018 Posko Pengendalian dan Penanggulangan Banjir  | waktu pelaksanaan posko pengendalian dan penanggulangan banjir                         | 12 bulan    | 12 bulan                  | 100,00% |   |            |             |         | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan |
| 0021 Rehabilitasi Saluran Drainase/Sungai  | Jumlah lokasi rehabilitasi/peningkatan saluran drainase/gorong-gorong                  | 604 lokasi  | 496 lokasi                | 82,12%  |   |            |             |         | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan |
| 0022 Pengerukan/Normalisasi Saluran Drainase/Sungai                                      | Terpeliharanya saluran pematusan/sungai/kali   | 12 bulan    | 12 bulan                  | 100,00% |   |            |             |         | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan |
| 1019 Pembangunan Sarana Prasarana Pematusan (tahun jamak/multiyears)                     | Jumlah lokasi saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun                             | 2 lokasi    | 2 lokasi                  | 100,00% |   |            |             |         | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan |

| Urusan-Program-Kegiatan   | Indikator  | 2014           |                |         | 2015   |                |                | SKPD  |   |
|---|--|----------------|----------------|---------|--|----------------|----------------|---|---|
|   |  | Target         | Realisasi      | Capaian | Indikator  | Target         | Realisasi      |   | Capaian                                       |
| 1020 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong (tahun jamak/multiyears) | Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan/rehab pematusan           | 2 dokumen      | 2 dokumen      | 100.00% |  |                |                | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan |   |
| 0024 Pembangunan, Penyediaan Dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Pematusan  |  |                |                |         | Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Pematusan                      | 523 Lokasi     | 586 Lokasi     | 112,05%                                       | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan |
| 0025 Pengendalian Dan Normalisasi Saluran Drainase Dan Boezem   |  |                |                |         | Terpeliharanya Saluran Pematusan/Sungai/Kali                                 | 12 Kali        | 12 Kali        | 100,00%                                       | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan |
| <b>1.03.31 Program Pembangunan Jaringan Air Bersih</b>  | % Cakupan Layanan Air Bersih   | 88,06%         | 92,64%         | 105,20% | % Cakupan Layanan Air Bersih   | 90,00%         | 92,66%         | 102,96%                                       |   |
|   | % kebocoran air bersih   | 31,95%         | 26,80%         | 116,12% | % kebocoran air bersih   | 31,45%         | 25,74%         | 118,16%                                       |   |
| 0002 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK Bidang Infrastruktur Air Minum)                               | Jumlah lokasi jaringan pipa air bersih yang dibangun                         | 33 lokasi      | 1 lokasi       | 3,03%   | Jumlah lokasi jaringan pipa air bersih yang dibangun                         | 22 lokasi      | 16 lokasi      | 72,73%  | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan |
| 0003 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Jaringan Air Bersih   | Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan/rehab jaringan air bersih | 2 dokumen      | 2 dokumen      | 100.00% | Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan/rehab jaringan air bersih | 1 dokumen      | 1 dokumen      | 100,00%                                       | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan |
| <b>1.03.32 Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan</b>   | Lama jam sibuk   | 6 jam 37 menit | 6 jam 30 menit | 101,76% | Lama jam sibuk   | 6 jam 21 menit | 6 jam 22 menit | 100,26%                                       | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan |
| 0001 Pembangunan/Peringkatan Jalan  | Jumlah lokasi jalan yang dibangun/ditingkatkan                               | 15 lokasi      | 30 lokasi      | 200.00% |  |                |                |   | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan |
| 0002 Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan  | Jumlah lokasi jembatan yang dibangun dan direhab                             | 39 lokasi      | 8 lokasi       | 20.51%  |  |                |                |   | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan |
| 0003 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan   | Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan/rehab jalan               | 40 dokumen     | 43 dokumen     | 107.50% |  |                |                |   | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan |
| 0004 Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan   | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan dan rehabilitasi jalan                | 123 dokumen    | 92 dokumen     | 74.80%  |  |                |                |   | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan |
| 0005 Rehabilitasi untuk Kemantapan Jalan  | Jumlah lokasi jalan yang direhab/dipelihara                                  | 54 lokasi      | 16 lokasi      | 29.63%  |  |                |                |   | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan |
| 0006 Pengadaan Tanah  | Jumlah lokasi lahan yang dibebaskan  | 12 lokasi      | 8 lokasi       | 66.67%  | Jumlah lokasi lahan yang dibebaskan  | 8 lokasi       | 13 lokasi      | 162,50%                                       | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan |
| 0007 Pembangunan Kelengkapan Jalan  | Jumlah lokasi pembangunan kelengkapan jalan                                  | 15 lokasi      | 4 lokasi       | 26.67%  | Jumlah lokasi pembangunan kelengkapan jalan                                  | 20 lokasi      | 36 lokasi      | 180,00%                                       | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan |
| 0008 Operasional Dan Pemeliharaan Peralatan Dan Alat Angkut   | Waktu pelaksanaan operasional dan pemeliharaan sarana prasarana bina marga   | 12 bulan       | 12 bulan       | 100.00% | Waktu pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Peralatan dan Alat Angkut     | 12 kali        | 12 kali        | 100,00%                                       | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan |
| 0009 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jembatan  | Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan/rehab jembatan            | 4 dokumen      | 5 dokumen      | 125.00% |  |                |                |   | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan |
| 0010 Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan  | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan dan rehabilitasi jembatan             | 12 dokumen     | 24 dokumen     | 200.00% |  |                |                |   | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan |
| 0011 Pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan (tahun jamak/multiyears)                                     | jumlah lokasi jalan dan jembatan yang dibangun                               | 1 lokasi       | 0 lokasi       | 0.00%   |  |                |                |   | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan |
| 0012 Koordinasi Jaringan Utilitas   | waktu pelaksanaan koordinasi jaringan utilitas                               | 12 bulan       | 12 bulan       | 100.00% | waktu pelaksanaan koordinasi jaringan utilitas                               | 12 kali        | 12 kali        | 100,00%                                       | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan |
| 0013 Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya  | waktu pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan, jembatan dan kelengkapannya      | 12 bulan       | 17 bulan       | 141.67% |  |                |                |   | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan |

| Urusan-Program-Kegiatan   | 2014  |                      |                       |                | 2015  |                       |                       |         | SKPD  |
|---|---|----------------------|-----------------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|---------|---|
|   | Indikator   | Target               | Realisasi             | Capaian        | Indikator   | Target                | Realisasi             | Capaian |   |
| 0017 Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan  |   |                      |                       |                | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan                                     | 46 Lokasi             | 52 Lokasi             | 113,04% | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan |
| 0018 Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jalan, Jembatan Dan Kelengkapannya                                 |   |                      |                       |                | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya                    | 35 Lokasi             | 45 Lokasi             | 128,57% | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan |
| 0019 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan                          | jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan jalan dan jembatan               | 1 dokumen            | 1 dokumen             | 100.00%        | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan dan Jembatan             | 32 Dokumen            | 63 Dokumen            | 196,88% | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan |
| 1014 Pembangunan dan rehabilitasi jembatan (tahun jamak/multiyears)                                   | jumlah lokasi jembatan yang dibangun dan direhab                                    | 2 lokasi             | 5 lokasi              | 250.00%        |   |                       |                       |         | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan |
| 1015 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jembatan (tahun jamak/multiyears)           | jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan/rehab jembatan                   | 2 dokumen            | 2 dokumen             | 100.00%        |   |                       |                       |         | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan |
| 0020 Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan                                      |   |                      |                       |                | Jumlah Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan yang disusun     | 95 Dokumen            | 137 Dokumen           | 144,21% | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan |
| 1014 Pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan (tahun jamak/multiyears)                         |   |                      |                       |                | jumlah lokasi jembatan yang dibangun  | 1 lokasi              | 1 lokasi              | 100,00% | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan |
| 1015 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan dan Jembatan (tahun jamak/multiyears) |   |                      |                       |                | jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan/rehab jembatan                   | 1 dokumen             | 1 dokumen             | 100,00% | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan |
| <b>x.xx.01 Program Pelayanan Administrasi</b>   |   |                      |                       |                |   |                       |                       |         |   |
| 0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran   | Waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis barang dan jasa perkantoran                    | 12 bulan             | 12 bulan              | 100.00%        | Waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis barang dan jasa perkantoran                    | 12 bulan              | 12 bulan              | 100,00% | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan |
| <b>x.xx.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>                                      |   |                      |                       |                |   |                       |                       |         |   |
| 0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran                                      | Waktu pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan 3 jenis sarana prasarana perkantoran   | 12 bulan             | 12 bulan              | 100.00%        | Waktu pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan 3 jenis sarana prasarana perkantoran   | 12 bulan              | 12 bulan              | 100,00% | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan |
| <b>1.04 Perumahan Rakyat</b>  |   |                      |                       |                |   |                       |                       |         |   |
| <b>1.04.21 Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran</b>  | Frekuensi kebakaran per satu juta penduduk  | 101                  | 209                   | belum tercapai | Frekuensi kebakaran per satu juta penduduk  | 101                   | 206                   | -3,96%  |   |
|   | Pencapaian Waktu tanggap kurang < 15 menit  | 82,00%               | 89,93%                | 109,67%        | Pencapaian Waktu tanggap kurang < 15 menit  | 85%                   | 99,34%                | 116,87% |   |
|   | Cakupan pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran                                       | 91,00%               | 92,56%                | 101,71%        | Cakupan pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran                                       | 95%                   | 92,56%                | 97,43%  |   |
| 0001 Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran  | Jumlah gedung Pos Pemadam Kebakaran (PMK) yang dibangun                             | 1 unit               | 1 unit                | 100.00%        | Jumlah gedung pos Pemadam Kebakaran (PMK) yang dibangun                             | 2 unit                | 2 unit                | 100,00% | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang              |
| 0002 Penanggulangan Bahaya Kebakaran  | waktu pelaksanaan penanggulangan bahaya kebakaran                                   | 12 bulan             | 12 bulan              | 100.00%        | Waktu pelaksanaan penanggulangan bahaya kebakaran                                   | 12 Bulan              | 12 Bulan              | 100,00% | Dinas Kebakaran                               |
| 0003 Koordinasi Dan Pemeriksaan Keandalan Sistem Proteksi Kebakaran Pada Gedung/Bangunan              | Jumlah Gedung/Bangunan yang keandalan sistem proteksi kebakarannya diperiksa        | 5940 gedung/bangunan | 5,334 gedung/bangunan | 89.80%         | Jumlah Gedung/Bangunan yang keandalan sistem proteksi kebakarannya diperiksa        | 6.534 Gedung/Bangunan | 5.047 Gedung/Bangunan | 77,24%  | Dinas Kebakaran                               |
| 0004 Pembinaan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran  | Pembinaan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran yang dilakukan                  | 132 kegiatan         | 124 kegiatan          | 93.94%         | Pembinaan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran yang dilakukan                  | 145 Kegiatan          | 154 Kegiatan          | 106,21% | Dinas Kebakaran                               |
| 0005 Simulasi Dan Latihan Bersama Penanggulangan Kebakaran  | Jumlah peserta simulasi dan latihan bersama penanggulangan kebakaran                | 715 orang            | 704 orang             | 98.46%         | Jumlah peserta simulasi dan latihan bersama penanggulangan kebakaran                | 787 Orang             | 752 Orang             | 95,55%  | Dinas Kebakaran                               |
| 0006 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran                                   | Jumlah pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran               | 1701 unit            | 1,689 unit            | 99.29%         | Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran yang diadakan           | 2.009 Unit            | 2.140 Unit            | 106,52% | Dinas Kebakaran                               |
| 0007 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran                                | Waktu pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran | 12 bulan             | 12 bulan              | 100.00%        | Waktu pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran | 12 Bulan              | 12 Bulan              | 100,00% | Dinas Kebakaran                               |



| Urusan-Program-Kegiatan  | 2014   |            |             |         | 2015   |                       |                       |         | SKPD  |
|--|--|------------|-------------|---------|--|-----------------------|-----------------------|---------|---|
|  | Indikator  | Target     | Realisasi   | Capaian | Indikator  | Target                | Realisasi             | Capaian |   |
| 1008 Pengadaan sarana penanggulangan bahaya kebakaran (tahun jamak/multiyears)             | Jumlah pengadaan sarana penanggulangan bahaya kebakaran  | 1 unit     | 1 unit      | 100.00% |  |                       |                       |         | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan |
| <b>1.04.22 Program Utilitas Perkotaan</b>  | Rasio Panjang Jalan yang sudah mendapatkan penerangan terhadap seluruh panjang jalan                               | 83,36%     | 94,54%      | 113,41% | Rasio Panjang Jalan yang sudah mendapatkan penerangan terhadap seluruh panjang jalan                               | 86,76%                | 99,43%                | 114,60% | Dinas Kebersihan dan Pertamanan               |
| 0001 Pemasangan Penerangan Jalan Umum  | Jumlah titik PJU yang dipasang   | 4000 titik | 6,173 titik | 154.33% | Jumlah titik PJU yang dipasang   | 3.000 titik           | 3.880 titik           | 129,33% | Dinas Kebersihan dan Pertamanan               |
| 0002 Pemeliharaan Dan Pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum                            | Waktu pelaksanaan pembayaran biaya rekening listrik untuk PJU  | 12 bulan   | 12 bulan    | 100.00% | Waktu pelaksanaan pembayaran biaya rekening listrik untuk PJU  | 12 bulan              | 12 bulan              | 100,00% | Dinas Kebersihan dan Pertamanan               |
| <b>1.04.23 Program Perumahan dan Permukiman</b>  | Jumlah MBR yang telah mendapatkan manfaat rumah layak huni (KK)  | 3361       | 3242        | 96,46%  | Jumlah MBR yang telah mendapatkan manfaat rumah layak huni (KK)  | 3649                  | 3479                  | 95,34%  |   |
|  | Luas kawasan kumuh yang mendapat peningkatan layanan prasarana permukiman (Ha)                                     | 508        | 510,91      | 100,57% | Luas kawasan kumuh yang mendapat peningkatan layanan prasarana permukiman (Ha)                                     | 604                   | 630,97                | 104,47% | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang              |
|  | Rasio angka ketersediaan makam selama lima tahun ke depan  | 0,47       | 0,21        | 155,32% | Rasio angka ketersediaan makam selama lima tahun ke depan  | 0,85                  | 16,88                 | 171,56% |   |
| 0001 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dasar Permukiman                                     | Jumlah permukiman yang dibangun sarana dan prasarana dasarnya  | 7 lokasi   | 6 lokasi    | 85.71%  | Jumlah permukiman yang dibangun sarana dan prasarana dasarnya  | 6 lokasi              | 7 lokasi              | 116,67% | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang              |
| 0002 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi)                         | Waktu operasional pengadaan sarana dan prasarana sanitasi yang dilaksanakan  | 12 bulan   | 0 bulan     | 0.00%   | Terlaksananya pembangunan dan pendampingan sarana prasarana sanitasi di 9 kelurahan                                | 12 bulan              | 9 bulan               | 75,00%  | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang              |
| 0005 Pemeliharaan Dan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Makam                               | Waktu pemeliharaan 13 makam dan pembangunan sarana dan prasarana makam di 59 lokasi                                | 12 bulan   | 12 bulan    | 100.00% | Waktu pemeliharaan 13 makam dan pembangunan sarana dan prasarana makam   | 12 bulan              | 12 bulan              | 100,00% | Dinas Kebersihan dan Pertamanan               |
| 0004 Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Permukiman                              | Jumlah lokasi pembangunan/pemeliharaan sarana prasarana permukiman   | 419 lokasi | 140 lokasi  | 33.41%  | Jumlah lokasi pembangunan/pemeliharaan sarana prasarana permukiman   | 425 lokasi            | 440 lokasi            | 103,53% | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan |
| 0003 Pengelolaan Dan Pemeliharaan Rumah Susun Sederhana Sewa                               | waktu pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan rumah susun sederhana sewa  | 12 bulan   | 12 bulan    | 100.00% | Waktu pelaksanaan pengelolaan rumah susun sederhana sewa   | 12 bulan              | 12 bulan              | 100,00% | Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah          |
| <b>x.xx.01 Program Pelayanan Administrasi</b>  |  |            |             |         |  |                       |                       |         |   |
| 0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran  | Tersedianya 6 jenis barang dan jasa perkantoran  | 12 bulan   | 12 bulan    | 100.00% | Tersedianya 6 jenis barang dan jasa perkantoran selama   | 12 Bulan              | 12 Bulan              | 100,00% | Dinas Kebakaran                               |
| 0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran  | Waktu pelaksanaan penyediaan 7 jenis Barang dan Jasa Perkantoran   | 12 bulan   | 12 bulan    | 100.00% | Waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis Barang dan Jasa Perkantoran   | 12 bulan              | 12 bulan              | 100,00% | Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah          |
| <b>x.xx.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>                           |  |            |             |         |  |                       |                       |         |   |
| 0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran                           | Waktu pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan 4 jenis sarana dan prasarana perkantoran yang diadakan dan dipelihara | 12 bulan   | 12 bulan    | 100.00% | Waktu pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan 4 jenis sarana dan prasarana perkantoran yang diadakan dan dipelihara | 12 Bulan              | 12 Bulan              | 100,00% | Dinas Kebakaran                               |
| 0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran                           | Waktu pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan 3 jenis sarana perkantoran  | 12 bulan   | 12 bulan    | 100.00% | Waktu pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan 3 jenis sarana perkantoran  | 12 bulan              | 12 bulan              | 100,00% | Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah          |
| 0047 Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk Sarana Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan | Lokasi tanah dan/atau bangunan yang dibebaskan untuk prasarana kantor pemerintahan                                 | 5 Lokasi   | 1 Lokasi    | 20.00%  | Lokasi tanah dan/atau bangunan yang dibebaskan untuk sarana penunjang pemerintahan                                 | 2 lokasi              | 2 lokasi              | 100,00% | Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah          |
| <b>1.05 Penataan Ruang</b>   |  |            |             |         |  |                       |                       |         |   |
| <b>1.05.18 Program Penataan Ruang</b>  |  |            |             |         |  |                       |                       |         |   |
|  | Proporsi luas area yang telah terlayani oleh rencana tata ruang  | 81,12%     | 88,92%      | 109,62% | Proporsi luas area yang telah terlayani oleh rencana tata ruang  | 100%                  | 92,31%                | 92,31%  | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang              |
| 0018 Pendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Penataan Ruang                    |  |            |             |         | Tersusunnya dokumen Pendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang                             | 2 dokumen             | 2 dokumen             | 100,00% | Badan Perencanaan Pembangunan Kota            |
| 0019 Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Surabaya                         |  |            |             |         | Tersusunnya Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Surabaya   | 1 dokumen             | 1 dokumen             | 100,00% | Badan Perencanaan Pembangunan Kota            |
| 0001 Penyusunan Review Rencana Detail Tata Ruang Kota                                      | Jumlah dokumen Regulasi Zoning RDTRK yang disusun  | 6 dokumen  | 6 dokumen   | 100.00% |  |                       |                       |         | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang              |
| 0001 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota   |  |            |             |         | Tersusunnya Raperda Rencana Detail Tata Ruang Kota   | 12 unit pengembang an | 12 unit pengembang an | 100,00% | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang              |

| Urusan-Program-Kegiatan   | Indikator  | 2014        |             |         | 2015  |             |              | SKPD    |                                      |
|---|--|-------------|-------------|---------|---|-------------|--------------|---------|--------------------------------------|
|   |  | Target      | Realisasi   | Capaian | Indikator   | Target      | Realisasi    |         | Capaian                              |
| 0002 Survey Dan Pemetaan Peningkatan Infrastruktur Kota   | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan survey dan pemetaan peningkatan infrastruktur kota  | 12 dokumen  | 12 dokumen  | 100,00% | Terlaksananya pelayanan tata ruang/tata bangunan berupa survey dan pemetaan peningkatan infrastruktur kota yang dilakukan pemohon | 12 bulan    | 12 bulan     | 100,00% | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang     |
| 0003 Pendataan Dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang   | Jumlah dokumen hasil pendataan dan pemetaan pemanfaatan ruang  | 24 dokumen  | 24 dokumen  | 100,00% | Tersusunnya hasil pendataan dan pemetaan pemanfaatan ruang  | 24 dokumen  | 24 dokumen   | 100,00% | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang     |
| 0004 Penataan Dan Penyelenggaraan Bangunan  | Jumlah dokumen hasil penataan dan penyelenggaraan bangunan yang disusun  | 3 dokumen   | 2 dokumen   | 66,67%  | Tersusunnya hasil penataan dan penyelenggaraan bangunan   | 3 dokumen   | 3 dokumen    | 100,00% | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang     |
| 0005 Pengawasan Pengendalian Dan Penertiban Tata Bangunan   | Waktu Pengawasan Pengendalian dan Penertiban bangunan di 31 Kecamatan  | 12 bulan    | 12 bulan    | 100,00% | Terselenggaranya Pengawasan Pengendalian dan Penertiban bangunan di 31 Kecamatan  | 12 bulan    | 12 bulan     | 100,00% | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang     |
| 0006 Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota   | Jumlah dokumen hasil pengendalian terhadap pemanfaatan rencana ruang kota  | 12 buku     | 12 buku     | 100,00% | Tersusunnya hasil pengendalian terhadap pemanfaatan rencana ruang kota  | 12 dokumen  | 12 dokumen   | 100,00% | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang     |
| 0007 Penunjang Sekretariat Verifikasi Prasarana, Sarana Dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan Dan Perkotaan | waktu Kegiatan Sekretariat Verifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman | 12 bulan    | 12 bulan    | 100,00% | Terlaksananya Verifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman              | 12 bulan    | 12 bulan     | 100,00% | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang     |
| 0008 Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (I.I.I.K)  | Jumlah ijin usaha jasa konstruksi yang diterbitkan   | 500 berkas  | 775 berkas  | 155,00% | Terbitnya ijin usaha jasa konstruksi  | 500 berkas  | 1.188 berkas | 237,60% | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang     |
| 0009 Pendataan Bidang Tata Kota Dan Bangunan Berbasis GIS   | Jumlah dokumen hasil pendataan bidang tatakota dan bangunan berbasis GIS yang disusun  | 19 dokumen  | 19 dokumen  | 100,00% | Tersusunnya hasil pendataan bidang tatakota dan bangunan berbasis GIS   | 15 dokumen  | 14 dokumen   | 93,33%  | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang     |
| 0010 Penanganan Pembelaan Gugatan Hukum Terhadap Penataan Ruang dan Perijinan Bangunan                                      | Jumlah kasus penataan ruang dan perijinan bangunan yang ditangani  | 6 kasus     | 8 kasus     | 133,33% |   |             |              |         | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang     |
| 0011 Penyusunan Peraturan Tentang Pengelolaan Dan Ijin Tanah/Bangunan Aset Pemkot   | Jumlah peraturan tentang pengelolaan dan ijin tanah/bangunan aset Pemkot Surabaya yang disusun                               | 1 Peraturan | 1 Peraturan | 100,00% | Jumlah peraturan tentang pengelolaan dan ijin tanah/bangunan aset Pemkot Surabaya yang disusun                                    | 1 peraturan | 1 peraturan  | 100,00% | Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah |
| 0012 Penanganan Masalah Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya   | Jumlah masalah tanah aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani  | 20 Kasus    | 20 Kasus    | 100,00% | Jumlah masalah tanah aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani   | 20 kasus    | 20 kasus     | 100,00% | Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah |
| 0013 Penanganan Masalah Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya  | Jumlah masalah bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani   | 10 Kasus    | 10 Kasus    | 100,00% | Jumlah masalah bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani  | 10 kasus    | 10 kasus     | 100,00% | Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah |
| 0014 Pengendalian Dan Penertiban Pemanfaatan Tanah/Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya                                   | Jumlah laporan Pengendalian dan Penertiban Pemanfaatan Tanah/ Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya                         | 12 Buku     | 12 Buku     | 100,00% | Jumlah pengendalian dan penertiban Pemanfaatan Tanah/ Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya                                      | 12 buku     | 12 buku      | 100,00% | Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah |
| 0015 Pendataan Dan Pemanfaatan Terhadap BTKD  | Jumlah laporan pendataan dan pemanfaatan terhadap BTKD   | 2 Dokumen   | 2 Dokumen   | 100,00% | Jumlah pendataan dan pemanfaatan terhadap BTKD  | 2 Dokumen   | 2 Dokumen    | 100,00% | Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah |
| 0016 Survey Dan Pemetaan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya  | Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya  | 4 Dokumen   | 4 Dokumen   | 100,00% | Jumlah dokumen hasil pemetaan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya   | 4 dokumen   | 4 dokumen    | 100,00% | Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah |
| 0017 Verifikasi Bangunan Dikuasai/Dikelola Pemerintah Kota Surabaya   | Jumlah laporan hasil verifikasi bangunan yang dikuasai/dikelola Pemerintah kota Surabaya                                     | 10 Dokumen  | 10 Dokumen  | 100,00% | Jumlah laporan hasil verifikasi bangunan dikuasai/dikelola Pemkot Surabaya  | 10 dokumen  | 10 dokumen   | 100,00% | Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah |
| <b>x.xx.01 Program Pelayanan Administrasi</b>   |  |             |             |         |   |             |              |         |                                      |
| 0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran   | Waktu pelaksanaan penyediaan 10 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran  | 12 Bulan    | 12 Bulan    | 100,00% | Waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran  | 12 bulan    | 12 bulan     | 100,00% | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang     |
| <b>x.xx.02 Program peningkatan sarana dan prasarana anapatur</b>  |  |             |             |         |   |             |              |         |                                      |
| 0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran  | Waktu pelaksanaan Pemeliharaan 3 Jenis Sarana dan Prasarana Perkantoran  | 12 Bulan    | 12 Bulan    | 100,00% | Waktu pelaksanaan Pemeliharaan 3 Jenis Sarana dan Prasarana Perkantoran   | 12 bulan    | 12 bulan     | 100,00% | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang     |
| 0046 Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah Daerah   | Jumlah gedung fisik praja/pemerintahan dan budaya lokal yang dibangun/rehabilitasi dan diawasi                               | 84 unit     | 82 unit     | 97,62%  | Jumlah gedung fisik praja/pemerintahan dan budaya lokal yang dibangun/rehabilitasi dan diawasi                                    | 58 lokasi   | 58 lokasi    | 100,00% | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang     |
| <b>1.06 Perencanaan</b>   |  |             |             |         |   |             |              |         |                                      |
| 1.06.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah  | % Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan   | 100,00%     | 100,00%     | 100,00% | % Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan  | 100%        | 100%         | 100,00% | Badan Perencanaan Pembangunan        |



| Urusan-Program-Kegiatan  | 2014  |            |            |         | 2015   |            |            |         | SKPD                               |
|--|---|------------|------------|---------|--|------------|------------|---------|------------------------------------|
|  | Indikator   | Target     | Realisasi  | Capaian | Indikator  | Target     | Realisasi  | Capaian |                                    |
| 0005 Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2015-2020 |   |            |            |         | jumlah dokumen Rancangan RPJMD Tahun 2015-2020 yang disusun  | 1 dokumen  | 1 dokumen  | 100,00% | Badan Perencanaan Pembangunan Kota |
| 0009 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD   | Jumlah kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan yang diselenggarakan   | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 100,00% | Jumlah kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan yang diselenggarakan  | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 100,00% | Badan Perencanaan Pembangunan Kota |
| 0013 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah                             | Jumlah dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang disusun                                | 5 dokumen  | 5 dokumen  | 100,00% | Jumlah dokumen hasil Monitoring ,Evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta dokumen hasil data dan informasi yang disusun | 7 dokumen  | 7 dokumen  | 100,00% | Badan Perencanaan Pembangunan Kota |
| 0014 Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)  | Jumlah dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disusun  | 2 dokumen  | 2 dokumen  | 100,00% | Jumlah dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disusun   | 2 dokumen  | 2 dokumen  | 100,00% | Badan Perencanaan Pembangunan Kota |
| 0015 Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Serta Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)         | Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun  | 4 dokumen  | 4 dokumen  | 100,00% | Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun   | 4 dokumen  | 4 dokumen  | 100,00% | Badan Perencanaan Pembangunan Kota |
| 0016 Penyusunan Nota Keuangan Rancangan APBD   | Jumlah dokumen Nota Keuangan Rancangan APBD yang disusun  | 2 dokumen  | 2 dokumen  | 100,00% | Jumlah dokumen Nota Keuangan Rancangan APBD yang disusun   | 2 dokumen  | 2 dokumen  | 100,00% | Badan Perencanaan Pembangunan Kota |
| 0018 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah  | Jumlah dokumen LKPJ Kepala Daerah yang disusun  | 1 dokumen  | 1 dokumen  | 100,00% | Jumlah dokumen LKPJ Kepala Daerah yang disusun   | 2 dokumen  | 2 dokumen  | 100,00% | Badan Perencanaan Pembangunan Kota |
| 0025 Monitoring Dan Evaluasi Sistem Transportasi Berkelanjutan   | Jumlah dokumen hasil kegiatan monitoring dan evaluasi sistem transportasi berkelanjutan   | 2 Dokumen  | 2 Dokumen  | 100,00% | Jumlah dokumen hasil kegiatan monitoring dan evaluasi sistem transportasi berkelanjutan  | 2 Dokumen  | 5 Dokumen  | 250,00% | Badan Perencanaan Pembangunan Kota |
| 0026 Pendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang                                    | Tersusunnya dokumen Pendukung Kegiatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang                                 | 5 dokumen  | 5 dokumen  | 100,00% |  |            |            |         | Badan Perencanaan Pembangunan Kota |
| 0028 Penunjang Perencanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Dan Teknologi Informasi Dan Komunikasi     | Jumlah dokumen perencanaan pencegahan/penanggulangan kebakaran dan Teknologi Informasi dan Komunikasi                           | 1 Dokumen  | 1 Dokumen  | 100,00% | Jumlah dokumen penunjang perencanaan pencegahan/ penanggulangan kebakaran dan Teknologi Informasi dan Komunikasi                                   | 1 Dokumen  | 2 Dokumen  | 200,00% | Badan Perencanaan Pembangunan Kota |
| 0029 Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Surabaya   | Tersusunnya dokumen Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Surabaya yang disusun   | 1 dokumen  | 1 dokumen  | 100,00% |  |            |            |         | Badan Perencanaan Pembangunan Kota |
| 0031 Penyusunan Perencanaan Bidang Aparatur Pemerintahan   | Jumlah dokumen penunjang penyusunan perencanaan bidang aparatur pemerintahan  | 2 Dokumen  | 2 Dokumen  | 100,00% | Jumlah dokumen penunjang penyusunan perencanaan bidang aparatur pemerintahan   | 1 dokumen  | 1 dokumen  | 100,00% | Badan Perencanaan Pembangunan Kota |
| 0032 Penyusunan Perencanaan Bidang Kesehatan   | Jumlah dokumen penunjang perencanaan bidang kesehatan   | 1 Dokumen  | 1 Dokumen  | 100,00% | Jumlah dokumen penunjang perencanaan bidang kesehatan  | 1 dokumen  | 1 dokumen  | 100,00% | Badan Perencanaan Pembangunan Kota |
| 0033 Penyusunan Perencanaan Bidang Pendidikan  | Jumlah dokumen penunjang perencanaan bidang pendidikan  | 1 Dokumen  | 1 Dokumen  | 100,00% | Jumlah dokumen penunjang perencanaan bidang pendidikan   | 1 dokumen  | 1 dokumen  | 100,00% | Badan Perencanaan Pembangunan Kota |
| 0034 Penyusunan Perencanaan Bidang Sosial  | Jumlah Dokumen Penunjang Penyusunan Perencanaan Bidang Sosial   | 1 Dokumen  | 1 Dokumen  | 100,00% | Jumlah Dokumen Penunjang Penyusunan Perencanaan Bidang Sosial  | 1 dokumen  | 1 dokumen  | 100,00% | Badan Perencanaan Pembangunan Kota |
| 0035 Monitoring Dan Evaluasi Dana Dekonsentrasi , Tugas Pembantuan Dan Dana Alokasi Khusus                 | Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi dana pembangunan dari dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus | 2 dokumen  | 2 dokumen  | 100,00% | Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi dana pembangunan dari dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus                    | 2 dokumen  | 2 dokumen  | 100,00% | Badan Perencanaan Pembangunan Kota |
| 0036 Penyusunan Dan Analisa Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi                                 | Jumlah dokumen penyusunan dan analisa data / informasi  | 3 dokumen  | 3 dokumen  | 100,00% | Jumlah dokumen penyusunan dan analisa data / informasi   | 2 dokumen  | 2 dokumen  | 100,00% | Badan Perencanaan Pembangunan Kota |
| 0037 Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Kota Surabaya   | Jumlah dokumen indikator ekonomi daerah dan PDRB yang disusun   | 8 Dokumen  | 8 Dokumen  | 100,00% | Jumlah dokumen indikator ekonomi daerah yang disusun   | 1 dokumen  | 1 dokumen  | 100,00% | Badan Perencanaan Pembangunan Kota |
| 0038 Penyusunan Rencana Pengembangan Potensi Unggulan Di Kota Surabaya                                     | Jumlah dokumen penyusunan rencana pengembangan potensi unggulan di kota Surabaya  | 4 Dokumen  | 4 Dokumen  | 100,00% | Jumlah dokumen penyusunan rencana pengembangan potensi unggulan di kota Surabaya   | 3 dokumen  | 3 dokumen  | 100,00% | Badan Perencanaan Pembangunan Kota |
| 0039 Penyusunan Strategi Pengembangan Potensi PAD  | Jumlah dokumen penyusunan strategi pengembangan potensi PAD yang disusun  | 2 Dokumen  | 2 Dokumen  | 100,00% | Jumlah dokumen penyusunan strategi pengembangan potensi PAD yang disusun   | 2 dokumen  | 2 dokumen  | 100,00% | Badan Perencanaan Pembangunan Kota |
| 0042 Penunjang Perhubungan Dan Pematusan   | Jumlah dokumen penunjang perhubungan dan pematusan  | 4 Dokumen  | 4 Dokumen  | 100,00% | Jumlah dokumen hasil penunjang kegiatan perhubungan dan pematusan  | 3 Dokumen  | 5 Dokumen  | 166,67% | Badan Perencanaan Pembangunan Kota |

| Urusan-Program-Kegiatan   | Indikator  | 2014       |            |         | 2015   |            |            | SKPD    |                                      |
|---|--|------------|------------|---------|--|------------|------------|---------|--------------------------------------|
|   |  | Target     | Realisasi  | Capaian | Indikator  | Target     | Realisasi  |         | Capaian                              |
| 0040 Pelaksanaan Penyusunan Bahan RAPBD Dan Perubahan APBD                  | Dokumen Penyusunan Bahan RAPBD dan Perubahan APBD yang disusun   | 5 Dokumen  | 6 Dokumen  | 120,00% | Dokumen Penyusunan Bahan RAPBD dan Perubahan APBD yang disusun   | 5 Dokumen  | 7 Dokumen  | 140,00% | Bagian Bina Program                  |
| 0041 Monitoring Dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan                       | Waktu Pelaksanaan Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan   | 12 Bulan   | 12 Bulan   | 100,00% | Waktu Pelaksanaan Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan   | 12 Bulan   | 12 Bulan   | 100,00% | Bagian Bina Program                  |
| 0019 Evaluasi Program Bidang Kesehatan                                      | Jumlah dokumen hasil perumusan kebijakan bidang kesehatan yang disusun   | 2 Dokumen  | 2 Dokumen  | 100,00% | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan evaluasi program bidang kesehatan yang disusun                                      | 3 Dokumen  | 3 Dokumen  | 100,00% | Bagian Kesejahteraan Rakyat          |
| 0020 Evaluasi Program Bidang Kesejahteraan Sosial Dan Pemberdayaan Keluarga | Jumlah dokumen hasil perumusan kebijakan bidang kesejahteraan sosial dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga yang disusun | 3 Dokumen  | 3 Dokumen  | 100,00% | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan evaluasi program bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan keluarga yang disusun | 5 Dokumen  | 5 Dokumen  | 100,00% | Bagian Kesejahteraan Rakyat          |
| 0021 Evaluasi Program Bidang Pendidikan                                     | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan evaluasi kebijakan bidang pendidikan yang disusun   | 4 Dokumen  | 4 Dokumen  | 100,00% | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan evaluasi program bidang pendidikan yang disusun                                     | 2 Dokumen  | 2 Dokumen  | 100,00% | Bagian Kesejahteraan Rakyat          |
| 0024 Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Perekonomian Kota Surabaya            | monitoring dan evaluasi  | 12 bulan   | 12 bulan   | 100,00% | monitoring dan evaluasi  | 12 bulan   | 12 bulan   | 100,00% | Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah |
| 0023 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan                      | Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan   | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100,00% | Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan   | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100,00% | Kec. Asemrowo                        |
| 0023 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan                      | Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan   | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100,00% | Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan   | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100,00% | Kec. Benowo                          |
| 0023 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan                      | Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan   | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100,00% | Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan   | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 100,00% | Kec. Bubutan                         |
| 0023 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan                      | Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan   | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 100,00% | Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan   | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 100,00% | Kec. Bulak                           |
| 0023 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan                      | Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan   | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 100,00% | Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan   | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 100,00% | Kec. Dukuh Pakis                     |
| 0023 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan                      | Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan   | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 100,00% | Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan   | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 100,00% | Kec. Gayungan                        |
| 0023 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan                      | Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan   | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 100,00% | Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan   | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 100,00% | Kec. Genteng                         |
| 0023 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan                      | Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan   | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100,00% | Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan   | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100,00% | Kec. Gubeng                          |
| 0023 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan                      | Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan   | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100,00% | Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan   | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100,00% | Kec. Gunung Anyar                    |
| 0023 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan                      | Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan   | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 100,00% | Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan   | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 100,00% | Kec. Jambangan                       |
| 0023 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan                      | Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan   | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 100,00% | Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan   | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 100,00% | Kec. Karangpilang                    |
| 0023 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan                      | Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan   | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 100,00% | Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan   | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 100,00% | Kec. Kenjeran                        |
| 0023 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan                      | Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan   | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 100,00% | Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan   | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 100,00% | Kec. Krembangan                      |
| 0023 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan                      | Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan   | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100,00% | Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan   | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 100,00% | Kec. Lakarsantri                     |
| 0023 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan                      | Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan   | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100,00% | Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan   | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100,00% | Kec. Mulyorejo                       |
| 0023 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan                      | Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan   | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 100,00% | Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan   | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 100,00% | Kec. Pabean Cantian                  |
| 0023 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan                      | Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD tingkat kecamatan   | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100,00% | Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan   | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100,00% | Kec. Pakal                           |
| 0023 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan                      | Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan   | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100,00% | Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan   | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 100,00% | Kec. Rungkut                         |
| 0023 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan                      | Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan   | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100,00% | Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan   | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100,00% | Kec. Sambikerep                      |

| Urusan-Program-Kegiatan  | 2014  |            |            |                | 2015  |            |            |         | SKPD                               |
|--|---|------------|------------|----------------|---|------------|------------|---------|------------------------------------|
|  | Indikator   | Target     | Realisasi  | Capaian        | Indikator   | Target     | Realisasi  | Capaian |                                    |
| 0023 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan   | Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan  | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 100.00%        | Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan  | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 100,00% | Kec. Sawahan                       |
| 0023 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan   | Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan  | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 100.00%        | Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan  | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100,00% | Kec. Semampir                      |
| 0023 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan   | Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan  | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 100.00%        | Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD tingkat Kecamatan  | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 100,00% | Kec. Simokerto                     |
| 0023 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan   | Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan  | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100.00%        | Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan  | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 100,00% | Kec. Sukolilo                      |
| 0023 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan   | Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan  | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100.00%        | Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan  | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100,00% | Kec. Sukomanunggal                 |
| 0023 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan   | Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan  | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100.00%        | Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan  | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100,00% | Kec. Tambaksari                    |
| 0023 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan   | Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan  | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100.00%        | Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan  | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100,00% | Kec. Tandes                        |
| 0023 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan   | Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan  | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 100.00%        | Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan  | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 100,00% | Kec. Tegalsari                     |
| 0023 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan   | Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan  | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 100.00%        | Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan  | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 100,00% | Kec. Tenggilis Mejoyo              |
| 0023 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan   | Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan  | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 100.00%        | Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan  | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 100,00% | Kec. Wiyung                        |
| 0023 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan   | Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan  | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 100.00%        | Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan  | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 100,00% | Kec. Wonocolo                      |
| 0023 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan   | Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan  | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 100.00%        | Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan  | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 100,00% | Kec. Wonokromo                     |
| <b>x.xx.01 Program Pelayanan Administrasi</b>  |   |            |            |                |   |            |            |         |                                    |
| 0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran  | Waktu pelaksanaan penyediaan 10 jenis barang dan jasa perkantoran                                   | 12 Bulan   | 12 Bulan   | 100.00%        | Waktu pelaksanaan penyediaan 10 jenis barang dan jasa perkantoran                                   | 12 Bulan   | 12 Bulan   | 100,00% | Badan Perencanaan Pembangunan Kota |
| <b>x.xx.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>                               |   |            |            |                |   |            |            |         |                                    |
| 0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran                               | Waktu pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan 4 jenis sarana dan prasarana perkantoran               | 12 Bulan   | 12 Bulan   | 100.00%        | Waktu pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan 4 jenis sarana dan prasarana perkantoran               | 12 Bulan   | 12 Bulan   | 100,00% | Badan Perencanaan Pembangunan Kota |
| <b>1.07 Perhubungan</b>  |   |            |            |                |   |            |            |         |                                    |
| <b>1.07.21 Program Pengembangan Sistem Transportasi</b>  |   |            |            |                |   |            |            |         |                                    |
|  | Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri primer                                     | 23,73      | 31,23      | 131,61%        | Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri primer                                     | 25,63      | 28,88      | 112,68% |                                    |
|  | Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri sekunder                                   | 21,47      | 28,75      | 133,91%        | Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri sekunder                                   | 23,19      | 28,79      | 124,15% |                                    |
|  | Headway angkutan umum (menit) untuk mikrolet  | 14,72      | 25,91      | 23,98%         | Headway angkutan umum (menit) untuk mikrolet  | 14,72      | 26,21      | 21,94%  |                                    |
|  | Headway angkutan umum (menit) untuk biskota   | 20         | 43,12      | belum tercapai | Headway angkutan umum (menit) untuk biskota   | 20         | 43,86      | -19,30% |                                    |
| 0001 Pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk fasilitas penunjang sarana transportasi perkotaan | Lokasi yang dibebaskan untuk fasilitas penunjang sarana transportasi perkotaan                      | 2 Lokasi   | 0 Lokasi   | 0.00%          |   |            |            |         | Dinas Perhubungan                  |
| 0002 Pengadaan / Pemeliharaan Perlengkapan Jalan   | Jumlah jenis rambu lalu lintas dan marka yang disediakan  | 17 jenis   | 17 jenis   | 100.00%        | Jumlah jenis rambu lalu lintas dan marka yang disediakan  | 22 Jenis   | 23 Jenis   | 104,55% | Dinas Perhubungan                  |
| 0003 Pengadaan / Pemeliharaan APILL ITS-ATCS   | Waktu pengadaan/pemeliharaan 6 jenis APILL dan prasarana ITS-ATCS                                   | 12 bulan   | 12 bulan   | 100.00%        | Waktu pengadaan/pemeliharaan 6 jenis APILL dan prasarana ITS-ATCS                                   | 12 Bulan   | 12 Bulan   | 100,00% | Dinas Perhubungan                  |
| 0004 Penyelenggaraan Manajemen Lalu Lintas   | Jumlah dokumen penyelenggaraan manajemen lalu lintas  | 8 dokumen  | 8 dokumen  | 100.00%        | Jumlah dokumen penyelenggaraan manajemen lalu lintas  | 6 Dokumen  | 15 Dokumen | 250,00% | Dinas Perhubungan                  |
| 0005 Peningkatan/Pembangunan Terminal Angkutan Umum  | Jumlah terminal angkutan umum yang dibangun/ditingkatkan  | 7 lokasi   | 6 lokasi   | 85.71%         | Jumlah terminal angkutan umum yang dibangun/ditingkatkan  | 4 Lokasi   | 4 Lokasi   | 100,00% | Dinas Perhubungan                  |
| 0006 Pengembangan Sarana Prasarana Perhubungan   | Jumlah Lokasi pengembangan prasarana perhubungan untuk mendukung penyelenggaraan transportasi darat | 3 lokasi   | 3 lokasi   | 100.00%        | Jumlah Lokasi pengembangan prasarana perhubungan untuk mendukung penyelenggaraan transportasi darat | 2 Lokasi   | 2 Lokasi   | 100,00% | Dinas Perhubungan                  |

| Urusan-Program-Kegiatan   | 2014   |              |               |         | 2015   |             |             |         | SKPD                   |
|---|--|--------------|---------------|---------|--|-------------|-------------|---------|------------------------|
|   | Indikator  | Target       | Realisasi     | Capaian | Indikator  | Target      | Realisasi   | Capaian |                        |
| 0007 Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan                          | Terlaksananya Sosialisasi Angkutan Umum  | 6 kali       | 5 kali        | 83.33%  | Terlaksananya Sosialisasi Angkutan Umum  | 6 Kali      | 6 Kali      | 100,00% | Dinas Perhubungan      |
| 0008 Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor                             | Waktu Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor   | 12 bulan     | 12 bulan      | 100.00% | Waktu Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor   | 12 Bulan    | 12 Bulan    | 100,00% | Dinas Perhubungan      |
| 0009 Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Angkutan Umum                    | Waktu Penyelenggaraan Pelayanan perijinan angkutan umum                                | 12 bulan     | 12 bulan      | 100.00% | Waktu Penyelenggaraan Pelayanan perijinan angkutan umum  | 12 Bulan    | 12 Bulan    | 100,00% | Dinas Perhubungan      |
| 0010 Peningkatan Pelayanan Dan Keselamatan Jasa Angkutan                  | Waktu pelaksanaan peningkatan pelayanan dan keselamatan jasa angkutan                  | 12 bulan     | 12 bulan      | 100.00% | Waktu pelaksanaan peningkatan pelayanan dan keselamatan jasa angkutan                                      | 12 Bulan    | 12 Bulan    | 100,00% | Dinas Perhubungan      |
| 0012 Penertiban, Pengawasan Dan Pengendalian Parkir, Terminal Dan I L A J | Waktu penertiban, pengawasan dan pengendalian parkir, terminal dan I L A J             | 12 bulan     | 12 bulan      | 100.00% | Waktu penertiban, pengawasan dan pengendalian parkir, terminal dan I L A J                                 | 12 Bulan    | 12 Bulan    | 100,00% | Dinas Perhubungan      |
| 0013 Pengelolaan Terminal Angkutan Umum                                   | Waktu pengelolaan terminal angkutan umum   | 12 bulan     | 12 bulan      | 100.00% | Waktu pengelolaan terminal angkutan umum   | 12 Bulan    | 12 Bulan    | 100,00% | Dinas Perhubungan      |
| 0014 Pembinaan Dan Pengawasan Lalu Lintas                                 | Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Lalu Lintas                                   | 5 kali       | 5 kali        | 100.00% | Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Lalu Lintas   | 5 Kali      | 5 Kali      | 100,00% | Dinas Perhubungan      |
| 0015 Keselamatan Transportasi Darat Yang Dibiayai Dari DAK                | Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Guard Rail   | 1 lokasi     | 1 lokasi      | 100.00% | Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Guard Rail   | 1 Lokasi    | 1 Lokasi    | 100,00% | Dinas Perhubungan      |
| 0017 Pembangunan Sarana Prasarana Perhubungan (Tahun Jamak/Multivears)    | Pembangunan Park and Ride  | 1 lokasi     | 0 lokasi      | 0.00%   | Pembangunan Park and Ride  | 1 Lokasi    | 1 Lokasi    | 100,00% | Dinas Perhubungan      |
| <b>x.xx.01 Program Pelayanan Administrasi</b>                             |  |              |               |         |  |             |             |         |                        |
| 0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran                               | Waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis barang dan jasa perkantoran                       | 12 bulan     | 12 bulan      | 100.00% | Waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis barang dan jasa perkantoran   | 12 Bulan    | 12 Bulan    | 100,00% | Dinas Perhubungan      |
| <b>x.xx.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>          |  |              |               |         |  |             |             |         |                        |
| 0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran          | Waktu Pemeliharaan dan Pengadaan 4 Jenis Sarana Prasarana Perkantoran                  | 12 bulan     | 12 bulan      | 100.00% | Waktu Pemeliharaan dan Pengadaan 4 Jenis Sarana Prasarana Perkantoran                                      | 12 Bulan    | 12 Bulan    | 100,00% | Dinas Perhubungan      |
| <b>1.08 Lingkungan Hidup</b>  |  |              |               |         |  |             |             |         |                        |
| <b>1.08.16 Program Pengendalian</b>                                       | Kualitas air limbah industri   |              |               |         | Kualitas air limbah industri   |             |             |         |                        |
|   | BOD  | 72,00%       | 73,26%        | 101,75% | BOD  | 76,00%      | 77,91%      | 102,51% |                        |
|   | COD  | 66,00%       | 67,67%        | 102,53% | COD  | 70,00%      | 71,77%      | 102,53% |                        |
|   | TSS  | 66,00%       | 67,40%        | 102,12% | TSS  | 72,00%      | 74,07%      | 102,88% |                        |
|   | Kualitas air limbah domestik   |              |               |         | Kualitas air limbah domestik   |             |             |         |                        |
|   | BOD  | 46,00%       | 49,50%        | 107,61% | BOD  | 52,00%      | 56,02%      | 107,73% |                        |
|   | TSS  | 48,00%       | 48,51%        | 101,06% | TSS  | 54,00%      | 55,26%      | 102,33% |                        |
|   | Kualitas air limbah RS   |              |               |         | Kualitas air limbah RS   |             |             |         |                        |
|   | BOD  | 63,00%       | 64,58%        | 102,51% | BOD  | 70,00%      | 72,09%      | 102,99% |                        |
|   | COD  | 62,00%       | 63,87%        | 103,02% | COD  | 70,00%      | 72,65%      | 103,79% |                        |
|   | TSS  | 60,00%       | 61,18%        | 101,97% | TSS  | 72,00%      | 74,01%      | 102,79% |                        |
|   | Kualitas air limbah hotel  |              |               |         | Kualitas air limbah hotel  |             |             |         |                        |
|   | BOD  | 48,00%       | 49,83%        | 103,81% | BOD  | 56,00%      | 58,42%      | 104,32% |                        |
|   | COD  | 36,00%       | 36,57%        | 101,58% | COD  | 46,00%      | 47,05%      | 102,28% |                        |
|   | TSS  | 42,00%       | 43,72%        | 104,10% | TSS  | 50,00%      | 52,58%      | 105,16% |                        |
|   | Kualitas udara emisi di kawasan industri   |              |               |         | Kualitas udara emisi di kawasan industri   |             |             |         |                        |
|   | SO2  | 80,00%       | 81,37%        | 101,71% | SO2  | 85,00%      | 87,15%      | 102,53% |                        |
|   | NO2  | 70,00%       | 70,85%        | 101,21% | NO2  | 85,00%      | 86,24%      | 101,46% |                        |
| 0001 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura                              | jumlah koordinasi dalam rangka penilaian Kota Sehat/Adipura yang dilaksanakan          | 55 kali      | 55 kali       | 100.00% | jumlah koordinasi dalam rangka penilaian Kota Sehat/Adipura yang dilaksanakan                              | 50 kali     | 50 kali     | 100,00% | Badan Lingkungan Hidup |
| 0017 Pemantauan Kualitas Air Laut Di Kawasan Pesisir Dan Laut             | Jumlah sampel air laut yang diambil dan diuji guna pemantauan kualitas air laut        | 32 sampel    | 32 sampel     | 100.00% | Jumlah sampel air laut yang diambil dan diuji untuk pengendalian pencemaran kawasan pesisir dan laut       | 32 sampel   | 32 sampel   | 100,00% | Badan Lingkungan Hidup |
| 0018 Pelaksanaan Car Free Day   | Jumlah car free day yang dilaksanakan dalam rangka pengendalian dampak perubahan iklim | 157 kali     | 156 kali      | 99.36%  | Jumlah car free day yang dilaksanakan dalam rangka pengendalian dampak perubahan iklim                     | 160 kali    | 160 kali    | 100,00% | Badan Lingkungan Hidup |
| 0019 Peningkatan Edukasi Dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan   | Jumlah peserta yang mendapatkan pengetahuan di bidang lingkungan hidup                 | 1100 peserta | 1,100 peserta | 100.00% | Jumlah peserta yang mendapatkan pengetahuan di bidang lingkungan hidup                                     | 1.100 orang | 1.264 orang | 114,91% | Badan Lingkungan Hidup |
| 0020 Pengembangan Sistem Informasi Kualitas Lingkungan (SIKUALI)          | Jumlah aplikasi sistem informasi lingkungan hidup yang dikembangkan                    | 1 aplikasi   | 1 aplikasi    | 100.00% | jumlah aplikasi sistem informasi lingkungan hidup yang dikembangkan  | 1 aplikasi  | 1 aplikasi  | 100,00% | Badan Lingkungan Hidup |
| 0021 Pemantauan Kualitas Air  | waktu pelaksanaan pemantauan kualitas air  | 12 bulan     | 12 bulan      | 100.00% | Pelaksanaan Pemantauan Air Lmbah terhadap 151 IPAL kegiatan Usaha dan 194 IPAL Rumah Tangga                | 12 bulan    | 12 bulan    | 100,00% | Badan Lingkungan Hidup |
| 0022 Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup                             | Jumlah kasus lingkungan hidup yang ditangani   | 75 kasus     | 81 kasus      | 108.00% | Prosentase jumlah permasalahan lingkungan yang direpson  | 100%        | 104009%     | 104,01% | Badan Lingkungan Hidup |
| 0023 Operasional Dan Pengadaan Stasiun Monitoring Udara Ambien            | waktu Operasional dan Pengadaan 1 paket peralatan Stasiun Monitoring Udara Ambien      | 12 bulan     | 12 bulan      | 100.00% | Terselenggaranya Operasional, Pemeliharaan dan pengadaan 1 paket peralatan Stasiun Monitoring Udara Ambien | 12 bulan    | 12 bulan    | 100,00% | Badan Lingkungan Hidup |

| Urusan-Program-Kegiatan  | 2014   |                    |                    |         | 2015  |            |            |         | SKPD  |
|--|--|--------------------|--------------------|---------|---|------------|------------|---------|---|
|  | Indikator  | Target             | Realisasi          | Capaian | Indikator   | Target     | Realisasi  | Capaian |   |
| 0024 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim   | Jumlah dokumen pengendalian dampak perubahan iklim yang dilaksanakan   | 3 dokumen          | 3 dokumen          | 100.00% | terlaksananya pendampingan Kampung Iklim 1 lokasi dan audit energi                            | 10 lokasi  | 10 lokasi  | 100,00% | Badan Lingkungan Hidup                              |
| 0026 Operasional Dan Pemeliharaan Laboratorium Lingkungan Hidup                                | Waktu operasional dan pemeliharaan 1 unit laboratorium lingkungan hidup                                      | 12 bulan           | 12 bulan           | 100.00% | terselenggaranya operasional dan pemeliharaan 1 unit laboratorium lingkungan hidup            | 12 bulan   | 12 bulan   | 100,00% | Badan Lingkungan Hidup                              |
| 0027 Pembinaan Dan Pengawasan Sumber Daya Air  | jumlah Kegiatan/Usaha yang dibina dan diawasi terkait penggunaan sumber daya air                             | 100 Kegiatan/Usaha | 100 Kegiatan/Usaha | 100.00% | jumlah Kegiatan/Usaha yang dibina dan diawasi terkait penggunaan sumber daya air              | 100 KU     | 100 KU     | 100,00% | Badan Lingkungan Hidup                              |
| 0028 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan Hidup (DAK Bidang Lingkungan Hidup) | waktu operasional pelaksanaan DAK bidang LH  | 12 bulan           | 12 bulan           | 100.00% | Jumlah sarana dan prasarana penunjang pengelolaan lingkungan hidup yang disediakan            | 2 paket    | 2 paket    | 100,00% | Badan Lingkungan Hidup                              |
| 0029 Pengawasan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan   | Jumlah sampel yang diambil dan diuji untuk pengendalian dampak lingkungan                                    | 738 sampel         | 738 sampel         | 100.00% | Terlaksananya pengambilan dan pengujian sampel untuk pengendalian dampak lingkungan           | 543 sampel | 547 sampel | 100,74% | Badan Lingkungan Hidup                              |
| 0032 Peningkatan Pelayanan Perijinan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3                    | Jumlah kegiatan/usaha yang mendapatkan pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun | 26 Kegiatan/Usaha  | 115 Kegiatan/Usaha | 442.31% | Prosentase Jumlah Permohonan Ijin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang Ditindaklanjuti | 100%       | 815200%    | 815,20% | Badan Lingkungan Hidup                              |
| 0034 Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Limbah Domestik Kota Surabaya                           |  |                    |                    |         | Waktu pelaksanaan peningkatan pelayanan pengelolaan limbah domestik Kota Surabaya             | 12 bulan   | 8 bulan    | 66,67%  | Dinas Kebersihan dan Pertamanan                     |
| 0033 Pengendalian Pencemaran Udara Dari Sumber Bergerak  | Jumlah pengujian emisi kendaraan bermotor  | 51 kali            | 51 kali            | 100.00% | Jumlah pengujian emisi kendaraan bermotor   | 51 Kali    | 51 Kali    | 100,00% | Dinas Perhubungan                                   |
| <b>1.08.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)</b>                                   | Prosentase Luas RTH yang berfungsi Optimal terhadap keseluruhan luas RTH yang ada                            | 47,37%             | 32,76%             | 69,16%  | Prosentase Luas RTH yang berfungsi Optimal terhadap keseluruhan luas RTH yang ada             | 51,88%     | 34,56%     | 66,62%  | Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan Dinas Pertanian |
| 0005 Penataan RTH  | Jumlah lokasi Ruang terbuka Hijau yang ditata di Kota Surabaya   | 45 lokasi          | 45 lokasi          | 100.00% | Jumlah lokasi Ruang Terbuka Hijau yang ditata di Kota Surabaya                                | 28 lokasi  | 53 lokasi  | 189,29% | Dinas Kebersihan dan Pertamanan                     |
| 0015 Pengembangan Dekorasi Kota  | Waktu pelaksanaan kegiatan dekorasi kota   | 12 bulan           | 12 bulan           | 100.00% | Waktu pelaksanaan kegiatan dekorasi kota  | 12 bulan   | 12 bulan   | 100,00% | Dinas Kebersihan dan Pertamanan                     |
| 0016 Pemeliharaan Dan Pengadaan Prasarana Taman Rekreasi                                       | Waktu pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan prasarana taman rekreasi  | 12 bulan           | 12 bulan           | 100.00% | Waktu pemeliharaan dan pengadaan prasarana taman rekreasi                                     | 12 bulan   | 12 bulan   | 100,00% | Dinas Kebersihan dan Pertamanan                     |
| 0017 Pemeliharaan Dan Pengadaan Sarana Taman Dan Jalur Hijau                                   | Waktu pelaksanaan pemeliharaan taman dan jalur hijau   | 12 bulan           | 12 bulan           | 100.00% | Waktu pelaksanaan pemeliharaan taman dan jalur hijau  | 12 bulan   | 12 bulan   | 100,00% | Dinas Kebersihan dan Pertamanan                     |
| 0012 Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk Ruang Terbuka Hijau                               | Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Ruang Terbuka Hijau  | 3 Lokasi           | 3 Lokasi           | 100.00% | Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Ruang Terbuka Hijau                                   | 2 lokasi   | 0 lokasi   | 0,00%   | Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah                |
| 0013 Pengelolaan Kawasan Lindung Pesisir Pantai Surabaya                                       | Luasan kawasan lindung yang dikelola dengan penanaman mangrove   | 60 Ha              | 142.510 Ha         | 237.52% | Luasan kawasan lindung yang dikelola dengan penanaman mangrove                                | 120 Ha     | 42,610 Ha  | 35,51%  | Dinas Pertanian                                     |
| 0014 Pembangunan Dan Pemeliharaan Hutan Kota   | Optimalisasi hutan kota  | 17.2 Ha            | 17.200 Ha          | 100.00% | Optimalisasi Hutan Kota   | 17,200 Ha  | 8,610 Ha   | 50,06%  | Dinas Pertanian                                     |
| <b>1.08.25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota</b>   | Cakupan layanan Kebersihan   | 173/175            | 184/175            | 106,06% | Cakupan layanan Kebersihan  | 175/175    | 175/185    | 105,71% |   |
|  | Jumlah sampah yang dikelola di TPA   | 1192,87            | 1455,9             | 77,95%  | Jumlah sampah yang dikelola di TPA  | 1180,94    | 1477,65    | 74,88%  |   |
|  | Rata-rata jumlah sampah yang diangkut dari TPS (m3)  | 3482,23            | 3883,8             | 88,47%  | Rata-rata jumlah sampah yang diangkut dari TPS (m3)   | 3447,41    | 3940,4     | 85,70%  |   |
| 0002 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan                                    | jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang tersedia  | 24 Jenis           | 24 Jenis           | 100.00% | Waktu pelaksanaan pengadaan 8 jenis sarana dan prasarana pengelolaan persampahan              | 12 bulan   | 12 bulan   | 100,00% | Dinas Kebersihan dan Pertamanan                     |
| 0003 Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan   | waktu pelaksanaan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di 29 lokasi     | 12 bulan           | 12 bulan           | 100.00% | Waktu pelaksanaan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan   | 12 bulan   | 12 bulan   | 100,00% | Dinas Kebersihan dan Pertamanan                     |
| 0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan                          | jumlah kegiatan pendampingan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam Pengelolaan sampah mandiri      | 6 Kegiatan         | 8 Kegiatan         | 133.33% | Jumlah lokasi pendampingan Pengelolaan sampah mandiri   | 6 lokasi   | 6 lokasi   | 100,00% | Dinas Kebersihan dan Pertamanan                     |
| 0005 Pengawasan Operasional Penyapuan Dan Pengangkutan Sampah                                  | Waktu pelaksanaan pengawasan operasional penyapuan jalan dan angkutan sampah                                 | 12 Bulan           | 12 Bulan           | 100.00% | Waktu pelaksanaan pengawasan operasional penyapuan jalan dan angkutan sampah                  | 12 bulan   | 12 bulan   | 100,00% | Dinas Kebersihan dan Pertamanan                     |
| 0006 Operasional Pengangkutan Sampah   | Waktu pelaksanaan operasional angkutan sampah  | 12 Bulan           | 12 Bulan           | 100.00% | Waktu pelaksanaan operasional angkutan sampah   | 12 bulan   | 12 bulan   | 100,00% | Dinas Kebersihan dan Pertamanan                     |

| Urusan-Program-Kegiatan  | Indikator  | 2014      |           |         | 2015   |           |           | SKPD    |                                      |
|--|--|-----------|-----------|---------|--|-----------|-----------|---------|--------------------------------------|
|  |  | Target    | Realisasi | Capaian | Indikator  | Target    | Realisasi |         | Capaian                              |
| 0007 Perencanaan Teknis Kebersihan Dan Pertamanan                                    | Jumlah dokumen perencanaan teknis kebersihan dan pertamanan yang disusun                     | 1 dokumen | 1 dokumen | 100.00% | Jumlah dokumen perencanaan teknis kebersihan dan pertamanan yang disusun                     | 1 dokumen | 2 dokumen | 200,00% | Dinas Kebersihan dan Pertamanan      |
| 0008 Operasional Dan Pemeliharaan IPLT Keputih                                       | Waktu pelaksanaan pemeliharaan IPLT  | 365 hari  | 365 hari  | 100.00% | Waktu pelaksanaan pemeliharaan IPLT  | 12 bulan  | 12 bulan  | 100,00% | Dinas Kebersihan dan Pertamanan      |
| 0009 Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Kebersihan                                  | Waktu pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan 229 kendaraan operasional dan 17 alat berat | 12 bulan  | 12 bulan  | 100.00% | Waktu pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan 190 kendaraan operasional dan 16 alat berat | 12 bulan  | 12 bulan  | 100,00% | Dinas Kebersihan dan Pertamanan      |
| 0010 Operasional Pengolahan Sampah   | Waktu pelaksanaan operasional pengolahan sampah  | 365 hari  | 365 hari  | 100.00% | Waktu pelaksanaan operasional pengolahan sampah  | 12 bulan  | 12 bulan  | 100,00% | Dinas Kebersihan dan Pertamanan      |
| 0011 Peningkatan Pelayanan Posko Kebersihan  | Waktu pelaksanaan operasional posko Pelayanan Kebersihan                                     | 104 Hari  | 108 Hari  | 103.85% | Waktu pelaksanaan operasional posko Pelayanan Kebersihan                                     | 104 hari  | 104 hari  | 100,00% | Dinas Kebersihan dan Pertamanan      |
| 0012 Operasional Penyapuan Jalan   | Waktu pelaksanaan operasional penyapuan jalan seluas 832.402 m2                              | 365 Hari  | 365 Hari  | 100.00% | Waktu pelaksanaan operasional penyapuan jalan  | 365 hari  | 365 hari  | 100,00% | Dinas Kebersihan dan Pertamanan      |
| 0013 Operasional Pembersihan Sampah Di Saluran                                       | Waktu pelaksanaan operasional pengangkutan sampah di saluran                                 | 12 Bulan  | 12 Bulan  | 100.00% | Waktu pelaksanaan operasional pengangkutan sampah di saluran                                 | 12 bulan  | 12 bulan  | 100,00% | Dinas Kebersihan dan Pertamanan      |
| 0014 Operasional Pengelolaan Rumah Kompos  |  |           |           |         | Waktu pelaksanaan operasional rumah kompos   | 12 bulan  | 12 bulan  | 100,00% | Dinas Kebersihan dan Pertamanan      |
| 0015 Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk Sarana Kebersihan                       |  |           |           |         | Lokasi pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk sarana kebersihan                             | 1 lokasi  | 1 lokasi  | 100,00% | Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah |
| 0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan           | 120 orang | 120 orang | 100.00% | Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan           | 120 orang | 120 orang | 100,00% | Kec. Asemrowo                        |
| 0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan           | 150 orang | 150 orang | 100.00% | Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan           | 150 orang | 150 orang | 100,00% | Kec. Benowo                          |
| 0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan           | 350 orang | 350 orang | 100.00% | Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan           | 350 Orang | 350 Orang | 100,00% | Kec. Bubutan                         |
| 0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan           | 210 Orang | 210 Orang | 100.00% | Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan           | 210 Orang | 209 Orang | 99,52%  | Kec. Bulak                           |
| 0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan           | 120 Orang | 120 Orang | 100.00% | Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan           | 120 orang | 120 orang | 100,00% | Kec. Dukuh Pakis                     |
| 0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan           | 102 Orang | 102 Orang | 100.00% | Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan           | 102 orang | 102 orang | 100,00% | Kec. Gayungan                        |
| 0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan           | 180 Orang | 180 Orang | 100.00% | Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan           | 180 Orang | 180 Orang | 100,00% | Kec. Genteng                         |
| 0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan           | 180 orang | 180 orang | 100.00% | Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan           | 180 orang | 180 orang | 100,00% | Kec. Gubeng                          |
| 0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan           | 200 orang | 200 orang | 100.00% | Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan           | 200 orang | 200 orang | 100,00% | Kec. Gunung Anyar                    |
| 0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan           | 180 Orang | 180 Orang | 100.00% | Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan           | 180 orang | 180 orang | 100,00% | Kec. Jambangan                       |
| 0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan           | 120 Orang | 120 Orang | 100.00% | Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan           | 180 orang | 180 orang | 100,00% | Kec. Karangpilang                    |
| 0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan           | 120 Orang | 120 Orang | 100.00% | Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan           | 120 Orang | 120 Orang | 100,00% | Kec. Kenjeran                        |



| Urusan-Program-Kegiatan  | Indikator  | 2014      |           |         | 2015   |           |           | SKPD    |                       |
|--|--|-----------|-----------|---------|--|-----------|-----------|---------|-----------------------|
|  |  | Target    | Realisasi | Capaian | Indikator  | Target    | Realisasi |         | Capaian               |
| 0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan | 270 Orang | 270 Orang | 100.00% | Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan | 270 Orang | 270 Orang | 100,00% | Kec. Krembangan       |
| 0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan | 300 orang | 300 orang | 100.00% | Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan | 300 Orang | 290 Orang | 96,67%  | Kec. Lakarsantri      |
| 0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan | 240 orang | 240 orang | 100.00% | Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan | 240 orang | 240 orang | 100,00% | Kec. Mulyorejo        |
| 0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan | 90 Orang  | 90 Orang  | 100.00% | Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan | 100 Orang | 100 Orang | 100,00% | Kec. Pabean Cantian   |
| 0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan | 180 orang | 180 orang | 100.00% | Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan | 180 orang | 180 orang | 100,00% | Kec. Pakal            |
| 0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan | 360 orang | 360 orang | 100.00% | Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan | 360 Orang | 360 Orang | 100,00% | Kec. Rungkut          |
| 0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan | 240 orang | 240 orang | 100.00% | Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan | 240 orang | 240 orang | 100,00% | Kec. Sambikerep       |
| 0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan | 280 Orang | 280 Orang | 100.00% | Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan | 280 orang | 280 orang | 100,00% | Kec. Sawahan          |
| 0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan | 140 Orang | 140 Orang | 100.00% | Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan | 140 orang | 140 orang | 100,00% | Kec. Semampir         |
| 0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan | 300 Orang | 300 Orang | 100.00% | Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan | 180 Orang | 180 Orang | 100,00% | Kec. Simokerto        |
| 0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan | 210 orang | 210 orang | 100.00% | Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan | 210 Orang | 210 Orang | 100,00% | Kec. Sukolilo         |
| 0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan | 120 orang | 120 orang | 100.00% | Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan | 120 orang | 120 orang | 100,00% | Kec. Sukomanunggal    |
| 0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan | 240 orang | 240 orang | 100.00% | Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan | 240 orang | 240 orang | 100,00% | Kec. Tambaksari       |
| 0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan | 150 orang | 150 orang | 100.00% | Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan | 150 orang | 150 orang | 100,00% | Kec. Tandes           |
| 0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan | 250 Orang | 250 Orang | 100.00% | Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan | 250 Orang | 250 Orang | 100,00% | Kec. Tegalsari        |
| 0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan | 175 Orang | 175 Orang | 100.00% | Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan | 175 Orang | 175 Orang | 100,00% | Kec. Tenggilis Mejoyo |
| 0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan | 200 Orang | 200 Orang | 100.00% | Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan | 200 orang | 200 orang | 100,00% | Kec. Wiyung           |

| Urusan-Program-Kegiatan   | Indikator   | 2014      |           |         | 2015   |            |            | SKPD    |                                      |
|---|---|-----------|-----------|---------|--|------------|------------|---------|--------------------------------------|
|   |   | Target    | Realisasi | Capaian | Indikator  | Target     | Realisasi  |         | Capaian                              |
| 0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan      | Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan    | 240 Orang | 240 Orang | 100,00% | Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan   | 240 orang  | 240 orang  | 100,00% | Kec. Wonocolo                        |
| 0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan      | Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan    | 210 Orang | 210 Orang | 100,00% | Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan   | 210 orang  | 210 orang  | 100,00% | Kec. Wonokromo                       |
| <b>Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi</b>                   |   |           |           |         | Proporsi entitas yang membangun dan menggunakan energi baru dan terbarukan   | 1 lokasi   | 1 lokasi   | 100,00% |                                      |
|   |   |           |           |         | Rasio jumlah gedung minimal 4 tingkat dengan luas bangunan minimal 2500 m2 yang mendapat grade A dalam hal penggunaan teknologi Hijau (ramah lingkungan) tahun T terhadap jumlah gedung minimal 4 tingkat dengan luas bangunan minimal 2500 m2 | 5,00%      | 6,85%      | 137,00% |                                      |
|   |   |           |           |         | Jumlah mobil yang menggunakan BBG yang terdaftar   | 150 mobil  | 257 mobil  | 171,33% |                                      |
| 0001 Pembinaan Dan Pengawasan Serta Pengusahaan Aneka Energi Terbarukan Dan Energi Bersih |   |           |           |         | Jumlah Pembinaan dan Pengawasan serta pengusahaan Aneka Energi Terbarukan dan energi bersih  | 1 paket    | 1 paket    | 100,00% | Badan Lingkungan Hidup               |
| 0002 Penyusunan Rencana Konservasi Energi Kota  |   |           |           |         | Jumlah dokumen penyusunan rencana konservasi energi kota   | 1 dokumen  | 0 dokumen  | 0,00%   | Badan Lingkungan Hidup               |
| 0005 Pengusahaan Konservasi Energi Pada Sektor Industri Dan Usaha                         |   |           |           |         | jumlah pengusahaan konservasi energi pada sektor industri dan usaha  | 1 paket    | 1 paket    | 100,00% | Badan Lingkungan Hidup               |
| 0004 Pengusahaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman             |   |           |           |         | jumlah pengusahaan konservasi energi pada sektor bangunan gedung dan permukiman  | 1 paket    | 1 paket    | 100,00% | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang     |
| 0003 Pengusahaan Konservasi Energi Pada Sektor Perhubungan                                |   |           |           |         | jumlah pengusahaan konservasi energi pada sektor perhubungan   | 1 paket    | 1 paket    | 100,00% | Dinas Perhubungan                    |
| <b>x.xx.01 Program Pelayanan Administrasi</b>   |   |           |           |         |  |            |            |         |                                      |
| 0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran   | Waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis barang dan jasa perkantoran                      | 12 bulan  | 12 bulan  | 100,00% | Waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis barang dan jasa perkantoran   | 12 bulan   | 12 bulan   | 100,00% | Badan Lingkungan Hidup               |
| 0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran   | Waktu pelaksanaan penyediaan kebutuhan 8 jenis barang dan jasa perkantoran            | 12 bulan  | 12 bulan  | 100,00% | Waktu pelaksanaan penyediaan kebutuhan 8 jenis barang dan jasa   | 12 bulan   | 12 bulan   | 100,00% | Dinas Kebersihan dan Pertamanan      |
| <b>x.xx.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>                          |   |           |           |         |  |            |            |         |                                      |
| 0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran                          | Waktu pelaksanaan pemeliharaan 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran               | 12 bulan  | 12 bulan  | 100,00% | Waktu pelaksanaan pemeliharaan 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran  | 12 bulan   | 12 bulan   | 100,00% | Badan Lingkungan Hidup               |
| 0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran                          | Waktu pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran         | 12 Bulan  | 12 Bulan  | 100,00% | Waktu pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran  | 12 bulan   | 12 bulan   | 100,00% | Dinas Kebersihan dan Pertamanan      |
| <b>1.09 Pertanian</b>   |   |           |           |         |  |            |            |         |                                      |
| <b>1.09.19 Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota</b>                            | Jumlah aset pemkot yang tersertifikat   | 647       | 580       | 89,64%  | Jumlah aset pemkot yang tersertifikat  | 687        | 611        | 88,94%  | Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah |
| 0001 Pengelolaan Arsip Tanah/Bangunan Aset Daerah   | Waktu Pelaksanaan pengelolaan arsip tanah/bangunan aset daerah                        | 12 bulan  | 12 bulan  | 100,00% | Waktu pelaksanaan pengelolaan arsip tanah/bangunan aset daerah   | 12 Bulan   | 12 Bulan   | 100,00% | Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah |
| 0002 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah   | Lokasi Tanah Aset/Barang Daerah yang diajukan proses sertifikasi                      | 35 Bidang | 14 Bidang | 40,00%  | Lokasi tanah aset/barang daerah yang diajukan proses sertifikasi   | 40 bidang  | 25 bidang  | 62,50%  | Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah |
| 0003 Pengamanan Aset Pemerintah Kota Surabaya   | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengamanan dan Monitoring Aset Pemerintah Kota Surabaya    | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100,00% | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengamanan dan Monitoring Aset Pemerintah Kota Surabaya   | 2 Dokumen  | 2 Dokumen  | 100,00% | Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah |
| <b>1.10 Kependudukan dan</b>  |   |           |           |         |  |            |            |         |                                      |
| <b>1.10.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>                                 | % penduduk yang berKTP  | 93,00%    | 93,79%    | 100,85% | % penduduk yang berKTP   | 95,00%     | 93,16%     | 98,06%  |                                      |
|   | Cakupan penerbitan akte kelahiran   | 90,00%    | 99,92%    | 111,02% | Cakupan penerbitan akte kelahiran  | 90,00%     | 99,55%     | 110,62% |                                      |
| 0008 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan                               | Waktu pelaksanaan 13 jenis Layanan Publik dalam Bidang Kependudukan yang dilaksanakan | 12 bulan  | 12 bulan  | 100,00% | Jumlah pelaksanaan kegiatan pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan   | 13 layanan | 13 layanan | 100,00% | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |



| Urusan-Program-Kegiatan   | 2014   |           |           |         | 2015   |           |           |         | SKPD                                 |
|---|--|-----------|-----------|---------|--|-----------|-----------|---------|--------------------------------------|
|   | Indikator  | Target    | Realisasi | Capaian | Indikator  | Target    | Realisasi | Capaian |                                      |
| 0015 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Pencatatan Sipil | Waktu pelaksanaan 5 Layanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil yang dilaksanakan             | 12 bulan  | 12 bulan  | 100,00% | jumlah Pelaksanaan Pelayanan Publik dalam Bidang catatan sipil                                 | 5 layanan | 5 layanan | 100,00% | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 0016 Pelayanan Informasi Publik Bidang Kependudukan             | Waktu Publikasi bidang kependudukan yang dilaksanakan melalui 10 media                         | 12 bulan  | 12 bulan  | 100,00% | Jumlah Pelaksanaan kegiatan Publikasi bidang kependudukan                                      | 10 media  | 10 media  | 100,00% | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 0017 Pengendalian Perkembangan Kependudukan Kota Surabaya       | Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi perkembangan dan pengendalian kependudukan yang dicetak | 1 dokumen | 1 dokumen | 100,00% | Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi perkembangan dan pengendalian kependudukan yang dicetak | 1 dokumen | 1 dokumen | 100,00% | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 0018 Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan                | Jumlah dokumen profil Perkembangan kependudukan yang disusun                                   | 1 dokumen | 2 dokumen | 200,00% | Jumlah dokumen profil Perkembangan kependudukan yang disusun                                   | 1 dokumen | 1 dokumen | 100,00% | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 0008 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan     | Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan                               | 12 bulan  | 12 bulan  | 100,00% | Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan                               | 12 bulan  | 12 bulan  | 100,00% | Kec. Asemrowo                        |
| 0008 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan     | Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan                               | 12 bulan  | 12 bulan  | 100,00% | Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan                               | 12 bulan  | 12 bulan  | 100,00% | Kec. Benowo                          |
| 0008 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan     | Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan                               | 12 bulan  | 12 bulan  | 100,00% | Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan                               | 12 bulan  | 12 bulan  | 100,00% | Kec. Bubutan                         |
| 0008 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan     | Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan                               | 12 bulan  | 12 bulan  | 100,00% | Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan                               | 12 bulan  | 12 bulan  | 100,00% | Kec. Bulak                           |
| 0008 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan     | Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan                               | 12 Bulan  | 12 Bulan  | 100,00% | Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan                               | 12 Bulan  | 12 Bulan  | 100,00% | Kec. Dukuh Pakis                     |
| 0008 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan     | Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan                               | 12 Bulan  | 12 Bulan  | 100,00% | Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan                               | 12 Bulan  | 12 Bulan  | 100,00% | Kec. Gayungan                        |
| 0008 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan     | Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan                               | 12 Bulan  | 12 Bulan  | 100,00% | Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan                               | 12 Bulan  | 12 Bulan  | 100,00% | Kec. Genteng                         |
| 0008 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan     | Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan                               | 12 bulan  | 12 bulan  | 100,00% | Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan                               | 12 bulan  | 12 bulan  | 100,00% | Kec. Gubeng                          |
| 0008 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan     | Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan                               | 12 bulan  | 12 bulan  | 100,00% | Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan                               | 12 bulan  | 12 bulan  | 100,00% | Kec. Gunung Anyar                    |
| 0008 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan     | Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan                               | 12 Bulan  | 12 Bulan  | 100,00% | Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan                               | 12 Bulan  | 12 Bulan  | 100,00% | Kec. Jambangan                       |
| 0008 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan     | Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan                               | 12 Bulan  | 12 Bulan  | 100,00% | Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan                               | 12 Bulan  | 12 Bulan  | 100,00% | Kec. Karangpilang                    |
| 0008 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan     | Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan                               | 12 bulan  | 12 bulan  | 100,00% | Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan                               | 12 bulan  | 12 bulan  | 100,00% | Kec. Kenjeran                        |
| 0008 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan     | waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan                               | 12 bulan  | 12 bulan  | 100,00% | waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan                               | 12 bulan  | 12 bulan  | 100,00% | Kec. Krembangan                      |
| 0008 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan     | Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan                               | 12 bulan  | 12 bulan  | 100,00% | Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan                               | 12 Bulan  | 12 Bulan  | 100,00% | Kec. Lakarsantri                     |
| 0008 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan     | Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan                               | 12 bulan  | 12 bulan  | 100,00% | Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan                               | 12 bulan  | 12 bulan  | 100,00% | Kec. Mulyorejo                       |
| 0008 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan     | Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan                               | 12 bulan  | 12 bulan  | 100,00% | Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan                               | 12 bulan  | 12 bulan  | 100,00% | Kec. Pabean Cantian                  |
| 0008 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan     | Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan                               | 12 bulan  | 12 bulan  | 100,00% | Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan                               | 12 bulan  | 12 bulan  | 100,00% | Kec. Pakal                           |
| 0008 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan     | Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan                               | 12 bulan  | 12 bulan  | 100,00% | Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan                               | 12 Bulan  | 12 Bulan  | 100,00% | Kec. Rungkut                         |
| 0008 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan     | Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan                               | 12 bulan  | 12 bulan  | 100,00% | Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan                               | 12 bulan  | 12 bulan  | 100,00% | Kec. Sambikerep                      |
| 0008 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan     | Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan                               | 12 Bulan  | 12 Bulan  | 100,00% | Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan                               | 12 Bulan  | 12 Bulan  | 100,00% | Kec. Sawahan                         |
| 0008 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan     | Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan                               | 12 bulan  | 12 bulan  | 100,00% | Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan                               | 12 bulan  | 12 bulan  | 100,00% | Kec. Semampir                        |

| Urusan-Program-Kegiatan   | 2014   |            |             |         | 2015   |             |             |         | SKPD   |
|---|--|------------|-------------|---------|--|-------------|-------------|---------|--|
|   | Indikator  | Target     | Realisasi   | Capaian | Indikator  | Target      | Realisasi   | Capaian |  |
| 0008 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan                         | Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan                                     | 12 Bulan   | 12 Bulan    | 100,00% | Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan                                     | 12 Bulan    | 12 Bulan    | 100,00% | Kec. Simokerto                                       |
| 0008 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan                         | Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan                                     | 12 bulan   | 12 bulan    | 100,00% | Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan                                     | 12 Bulan    | 12 Bulan    | 100,00% | Kec. Sukolilo  |
| 0008 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan                         | Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan                                     | 12 bulan   | 12 bulan    | 100,00% | Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan                                     | 12 bulan    | 12 bulan    | 100,00% | Kec. Sukomanunggal                                   |
| 0008 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan                         | Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan                                     | 12 bulan   | 12 bulan    | 100,00% | Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan                                     | 12 bulan    | 12 bulan    | 100,00% | Kec. Tambaksari                                      |
| 0008 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan                         | Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan                                     | 12 bulan   | 12 bulan    | 100,00% | Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan                                     | 12 bulan    | 12 bulan    | 100,00% | Kec. Tandes  |
| 0008 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan                         | Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan                                     | 12 bulan   | 12 bulan    | 100,00% | Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan                                     | 12 bulan    | 12 bulan    | 100,00% | Kec. Tegalsari                                       |
| 0008 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan                         | Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan                                     | 12 Bulan   | 12 Bulan    | 100,00% | Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan                                     | 12 Bulan    | 12 Bulan    | 100,00% | Kec. Tenggilis Mejoyo                                |
| 0008 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan                         | Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan                                     | 12 Bulan   | 12 Bulan    | 100,00% | Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan                                     | 12 Bulan    | 12 Bulan    | 100,00% | Kec. Wiyung  |
| 0008 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan                         | Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan                                     | 12 Bulan   | 12 Bulan    | 100,00% | Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan                                     | 12 Bulan    | 12 Bulan    | 100,00% | Kec. Wonocolo  |
| 0008 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan                         | Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan                                     | 12 Bulan   | 12 Bulan    | 100,00% | Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan                                     | 12 Bulan    | 12 Bulan    | 100,00% | Kec. Wonokromo                                       |
| <b>x.xx.01 Program Pelayanan Administrasi</b>                                       |  |            |             |         |  |             |             |         |  |
| 0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran   | waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran                           | 12 Bulan   | 12 Bulan    | 100,00% | waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran                           | 12 bulan    | 12 bulan    | 100,00% | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil                 |
| <b>x.xx.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>                    |  |            |             |         |  |             |             |         |  |
| 0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran                    | waktu pelaksanaan pemeliharaan 4 jenis sarana dan prasarana perkantoran                              | 12 Bulan   | 12 Bulan    | 100,00% | waktupelaksanaan pemeliharaan 4 jenis sarana dan prasarana perkantoran                               | 12 bulan    | 12 bulan    | 100,00% | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil                 |
| <b>1.11 Pemberdayaan</b>  |  |            |             |         |  |             |             |         |  |
| <b>1.11.16 Program Penguatan Kelembagaan</b>  |  |            |             |         |  |             |             |         |  |
| 0005 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak                          | Jumlah lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak   | 85 Lembaga | 85 Lembaga  | 100,00% | Jumlah lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak   | 85 Lembaga  | 83 Lembaga  | 97,65%  | Bapemas dan KB                                       |
| 0005 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak                          | Jumlah Lembaga berbasis gender yang dibina   | 85 Lembaga | 85 Lembaga  | 100,00% | Jumlah Lembaga berbasis gender dan anak yang dibina  | 85 Lembaga  | 83 Lembaga  | 97,65%  | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana |
| 0006 Peningkatan Kapasitas Dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak | Jumlah peserta yang dilatih dalam meningkatkan kapasitas dan jaringan kelembagaan perempuan dan anak | 1000 orang | 1.000 orang | 100,00% | Jumlah peserta yang dilatih dalam meningkatkan kapasitas dan jaringan kelembagaan perempuan dan anak | 1.000 Orang | 1.000 Orang | 100,00% | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana |
| 0005 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak                          | Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak                            | 2 lembaga  | 2 lembaga   | 100,00% | Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak                            | 2 lembaga   | 2 lembaga   | 100,00% | Kec. Asemrowo  |
| 0005 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak                          | Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak                            | 2 lembaga  | 2 lembaga   | 100,00% | Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak                            | 2 lembaga   | 2 lembaga   | 100,00% | Kec. Benowo  |
| 0005 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak                          | Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak                            | 2 lembaga  | 2 lembaga   | 100,00% | Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak                            | 2 Lembaga   | 2 Lembaga   | 100,00% | Kec. Bubutan   |
| 0005 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak                          | Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak                            | 2 Lembaga  | 2 Lembaga   | 100,00% | Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak                            | 2 Lembaga   | 2 Lembaga   | 100,00% | Kec. Bulak   |
| 0005 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak                          | Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak                            | 2 Lembaga  | 2 Lembaga   | 100,00% | Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak                            | 2 Lembaga   | 2 Lembaga   | 100,00% | Kec. Dukuh Pakis                                     |
| 0005 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak                          | Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak                            | 2 Lembaga  | 2 Lembaga   | 100,00% | Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak                            | 2 Lembaga   | 2 Lembaga   | 100,00% | Kec. Gayungan  |
| 0005 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak                          | Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak                            | 2 Lembaga  | 2 Lembaga   | 100,00% | Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak                            | 2 lembaga   | 2 lembaga   | 100,00% | Kec. Genteng   |
| 0005 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak                          | Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak                            | 2 lembaga  | 2 lembaga   | 100,00% | Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak                            | 2 lembaga   | 2 lembaga   | 100,00% | Kec. Gubeng  |

| Urusan-Program-Kegiatan  | 2014   |           |           |         | 2015   |           |           |         | SKPD   |
|--|--|-----------|-----------|---------|--|-----------|-----------|---------|--|
|  | Indikator  | Target    | Realisasi | Capaian | Indikator  | Target    | Realisasi | Capaian |  |
| 0005 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak             | Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak        | 2 lembaga | 2 lembaga | 100,00% | Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak        | 2 lembaga | 2 lembaga | 100,00% | Kec. Gunung Anyar                                    |
| 0005 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak             | Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak        | 2 Lembaga | 2 Lembaga | 100,00% | Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak        | 2 Lembaga | 2 Lembaga | 100,00% | Kec. Jambangan                                       |
| 0005 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak             | Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak        | 2 Lembaga | 2 Lembaga | 100,00% | Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak        | 2 Lembaga | 2 Lembaga | 100,00% | Kec. Karangpilang                                    |
| 0005 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak             | Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak        | 2 Lembaga | 2 Lembaga | 100,00% | Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak        | 2 Lembaga | 2 Lembaga | 100,00% | Kec. Kenjeran  |
| 0005 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak             | Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak        | 2 Lembaga | 2 Lembaga | 100,00% | Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak        | 2 Lembaga | 2 Lembaga | 100,00% | Kec. Krembangan                                      |
| 0005 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak             | Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak        | 2 lembaga | 2 lembaga | 100,00% | Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak        | 2 Lembaga | 2 Lembaga | 100,00% | Kec. Lakarsantri                                     |
| 0005 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak             | Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak        | 2 lembaga | 2 lembaga | 100,00% | Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak        | 2 lembaga | 2 lembaga | 100,00% | Kec. Mulyorejo                                       |
| 0005 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak             | Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak        | 2 Lembaga | 2 Lembaga | 100,00% | Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak        | 2 Lembaga | 2 Lembaga | 100,00% | Kec. Pabean Cantian                                  |
| 0005 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak             | Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak        | 2 lembaga | 2 lembaga | 100,00% | Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak        | 2 lembaga | 2 lembaga | 100,00% | Kec. Pakal   |
| 0005 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak             | Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak        | 2 lembaga | 2 lembaga | 100,00% | Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak        | 2 Lembaga | 2 Lembaga | 100,00% | Kec. Rungkut   |
| 0005 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak             | Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak        | 2 lembaga | 2 lembaga | 100,00% | Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak        | 2 lembaga | 2 lembaga | 100,00% | Kec. Sambikerep                                      |
| 0005 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak             | Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak        | 2 Lembaga | 2 Lembaga | 100,00% | Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak        | 2 Lembaga | 2 Lembaga | 100,00% | Kec. Sawahan   |
| 0005 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak             | Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak        | 2 Lembaga | 2 Lembaga | 100,00% | Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak        | 2 lembaga | 2 lembaga | 100,00% | Kec. Semampir  |
| 0005 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak             | Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak        | 2 Lembaga | 2 Lembaga | 100,00% | Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak        | 2 lembaga | 2 lembaga | 100,00% | Kec. Simokerto                                       |
| 0005 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak             | Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak        | 2 lembaga | 2 lembaga | 100,00% | Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak        | 2 Lembaga | 2 Lembaga | 100,00% | Kec. Sukolilo  |
| 0005 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak             | Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak        | 2 lembaga | 2 lembaga | 100,00% | Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak        | 2 lembaga | 2 lembaga | 100,00% | Kec. Sukomanunggal                                   |
| 0005 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak             | Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak        | 2 lembaga | 2 lembaga | 100,00% | Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak        | 2 lembaga | 2 lembaga | 100,00% | Kec. Tambaksari                                      |
| 0005 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak             | Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak        | 2 lembaga | 2 lembaga | 100,00% | Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak        | 2 lembaga | 2 lembaga | 100,00% | Kec. Tandes  |
| 0005 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak             | Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak        | 2 Lembaga | 2 Lembaga | 100,00% | Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak        | 2 Lembaga | 2 Lembaga | 100,00% | Kec. Tegalsari                                       |
| 0005 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak             | Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak        | 2 Lembaga | 2 Lembaga | 100,00% | Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak        | 2 Lembaga | 2 Lembaga | 100,00% | Kec. Tenggilis Mejoyo                                |
| 0005 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak             | Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak        | 2 Lembaga | 2 Lembaga | 100,00% | Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak        | 2 Lembaga | 2 Lembaga | 100,00% | Kec. Wiyung  |
| 0005 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak             | Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak        | 2 Lembaga | 2 Lembaga | 100,00% | Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak        | 2 Lembaga | 2 Lembaga | 100,00% | Kec. Wonocolo  |
| 0005 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak             | Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak        | 2 Lembaga | 2 Lembaga | 100,00% | Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak        | 2 Lembaga | 2 Lembaga | 100,00% | Kec. Wonokromo                                       |
| <b>1.11.17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan</b>     | Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan anak yang dilaporkan dan ditangani | 100,00%   | 100,00%   | 100,00% | Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan anak yang dilaporkan dan ditangani | 100%      | 100,00%   | 100,00% | Bapemas dan KB                                       |
| 0008 Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan | Jumlah kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang terfasilitasi     | 200 kasus | 217 kasus | 108,50% | Jumlah kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang terfasilitasi     | 200 Kasus | 287 Kasus | 143,50% | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana |

| Urusan-Program-Kegiatan  | 2014   |              |                  |         | 2015   |              |             |           | SKPD   |
|--|--|--------------|------------------|---------|--|--------------|-------------|-----------|--|
|  | Indikator  | Target       | Realisasi        | Capaian | Indikator  | Target       | Realisasi   | Capaian   |  |
| 0010 Fasilitasi Pengembangan Kota Peduli Perempuan Dan Kota Layak Anak   | Jumlah kegiatan fasilitasi pengembangan Kota Peduli Perempuan dan Kota Layak Anak  | 11 Kegiatan  | 11 Kegiatan      | 100.00% | Jumlah kegiatan fasilitasi pengembangan Kota Peduli Perempuan dan Kota Layak Anak  | 11 Kegiatan  | 11 Kegiatan | 100,00%   | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana |
| <b>1.12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</b>  |  |              |                  |         |  |              |             |           |  |
| <b>1.12.15 Program Keluarga Berencana</b>  | Persentase peserta KB aktif  | 80,26%       | 81,42%           | 101,45% | Persentase peserta KB aktif  | 81,00%       | 80,20%      | 99,01%    | Bapemas dan KB                                       |
| 0001 Penyediaan Pelayanan KB Dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin   | Jumlah akseptor KB yang mendapatkan pelayanan KB   | 424 orang    | 311 orang        | 73.35%  | Jumlah akseptor KB yang mendapatkan pelayanan KB   | 424 Orang    | 410 Orang   | 96,70%    | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana |
| 0005 Pembinaan Keluarga Berencana  | Jumlah pelaksana program keluarga berencana yang dibina  | 6725 orang   | 6,725 orang      | 100.00% | Jumlah pelaksana program keluarga berencana yang dibina  | 5.559 Orang  | 5.035 Orang | 90,57%    | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana |
| 0007 Fasilitasi Masyarakat Peduli Keluarga Berencana   | Waktu pelaksanaan kegiatan Fasilitasi 1577 Institusi Masyarakat Perkotaan Peduli Keluarga Berencana                      | 12 Bulan     | 12 Bulan         | 100.00% | Waktu pelaksanaan kegiatan Fasilitasi 1568 Institusi Masyarakat Perkotaan Peduli Keluarga Berencana                      | 12 Bulan     | 12 Bulan    | 100,00%   | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana |
| 0008 Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan KB Yang Disediakan Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana                              | Jumlah sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus bidang keluarga Berencana           | 5 Item       | 5 Item           | 100.00% | Jumlah sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus bidang keluarga Berencana           | 5 Item       | 4 Item      | 80,00%    | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana |
| <b>x.xx.01 Program Pelayanan Administrasi</b>  |  |              |                  |         |  |              |             |           |  |
| 0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran  | Waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis Barang dan Jasa Perkantoran   | 12 Bulan     | 12 Bulan         | 100.00% | Waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis Barang dan Jasa Perkantoran   | 12 Bulan     | 12 Bulan    | 100,00%   | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana |
| <b>x.xx.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>   |  |              |                  |         |  |              |             |           |  |
| 0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran   | Waktu pelaksanaan Pemeliharaan dan Pengadaan 3 jenis sarana Prasarana Perkantoran  | 12 Bulan     | 12 Bulan         | 100.00% | Waktu pelaksanaan Pemeliharaan dan Pengadaan 3 jenis sarana Prasarana Perkantoran  | 12 Bulan     | 12 Bulan    | 100,00%   | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana |
| <b>1.13 Sosial</b>   |  |              |                  |         |  |              |             |           |  |
| <b>1.13.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi</b>  | Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial  | 54% (34.402) | 149.98% (95.548) | 277,74% | Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial  | 70% (44.595) | 196,63%     | 280,89%   | Dinas Sosial   |
| 0019 Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Rehabilitasi Sosial/Pemberdayaan Ekonomi  |  |              |                  |         | Lokasi Pengadaan Tanah dan/atau untuk Rehabilitasi Sosial  | 1 Lokasi     | 10 Lokasi   | 1.000,00% | Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah                 |
| 0004 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal                                    | Jumlah PMKS yang mendapatkan bimbingan sosial dan pelatihan serta pemberian permakanaan                                  | 3977 Orang   | 4,383 Orang      | 110.21% |  |              |             |           | Dinas Sosial   |
| 0007 Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS  | Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan, pembinaan, pelatihan, pemulangan dan penyaluran ke panti sosial                  | 2804 Orang   | 2,902 Orang      | 103.50% | Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan, pembinaan, pelatihan, pemulangan dan penyaluran ke panti sosial                  | 1.446 Orang  | 1.370 Orang | 94,74%    | Dinas Sosial   |
| 0008 Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial   | Jumlah Dokumen Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Kesejahteraan Sosial                          | 1 Dokumen    | 1 Dokumen        | 100.00% | Jumlah Dokumen Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Kesejahteraan Sosial                          | 1 Dokumen    | 1 Dokumen   | 100,00%   | Dinas Sosial   |
| 0010 Penanganan Masalah-masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggapan Cepat Darurat Dan Kejadian Luar Biasa  | Waktu penyediaan barang dan jasa yang menyangkut tanggap, cepat, darurat dan kejadian luar biasa yang tersedia           | 12 Bulan     | 12 Bulan         | 100.00% | Waktu penyediaan barang dan jasa yang menyangkut tanggap, cepat, darurat dan kejadian luar biasa yang tersedia           | 12 Bulan     | 12 Bulan    | 100,00%   | Dinas Sosial   |
| 0013 Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin Melalui Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh  | Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan perbaikan rumah tidak layak huni di 20 kelurahan                                 | 622 Unit     | 602 Unit         | 96.78%  | Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan perbaikan rumah tidak layak huni   | 725 Unit     | 723 Unit    | 99,72%    | Dinas Sosial   |
| 0014 Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Kusta Babat Jerawat | Waktu pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Yang Diberikan Kepada 128 Orang Penghuni UPTD Lingkungan Sosial Kusta Babat Jerawat | 12 Bulan     | 12 Bulan         | 100.00% | Waktu pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Yang Diberikan Kepada 120 Orang Penghuni UPTD Lingkungan Sosial Kusta Babat Jerawat | 12 Bulan     | 12 Bulan    | 100,00%   | Dinas Sosial   |

| Urusan-Program-Kegiatan  | 2014   |             |              |         | 2015   |              |              |         | SKPD                |
|--|--|-------------|--------------|---------|--|--------------|--------------|---------|---------------------|
|  | Indikator  | Target      | Realisasi    | Capaian | Indikator  | Target       | Realisasi    | Capaian |                     |
| 0015 Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Di UPTD Kampung Anak Negeri              | Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan yang diberikan kepada 35 orang penghuni UPTD Kampung Anak Negeri      | 12 Bulan    | 12 Bulan     | 100.00% | Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan yang diberikan kepada 35 orang penghuni UPTD Kampung Anak Negeri  | 12 Bulan     | 12 Bulan     | 100,00% | Dinas Sosial        |
| 0016 Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih | Waktu pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Yang Diberikan Kepada 1300 Orang Penghuni UPTD Liponsos Keputih       | 12 Bulan    | 12 Bulan     | 100.00% | Waktu pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Yang Diberikan Kepada 1400 Orang Penghuni UPTD Liponsos Keputih   | 12 Bulan     | 12 Bulan     | 100,00% | Dinas Sosial        |
| 0017 Peningkatan Pembinaan, Pelatihan Keterampilan dan Pemberian Permakanan bagi Lanjut Usia   | Jumlah Lansia yang mendapat pembinaan, pelayanan, pelatihan ketrampilan dan pemberian permakanan           | 13648 Orang | 16,611 Orang | 121.71% | Jumlah Lansia yang mendapat pembinaan, pelayanan, pelatihan ketrampilan dan pemberian permakanan   | 19.136 Orang | 18.051 Orang | 94,33%  | Dinas Sosial        |
| 0018 Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Di UPTD Griya Werdha                     | Waktu pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Yang Diberikan Kepada 50 Orang Lanjut Usia Penghuni UPTD Griya Werdha | 12 Bulan    | 12 Bulan     | 100.00% | Waktu pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Yang Diberikan Kepada 75 Orang Lanjut Usia Penghuni UPTD Griya Werdha                                   | 12 Bulan     | 12 Bulan     | 100,00% | Dinas Sosial        |
| 0020 Pelatihan Keterampilan Dan Pemberian Permakanan Bagi Penyandang Cacat   |  |             |              |         | Jumlah PMKS yang mendapatkan bimbingan sosial dan pelatihan serta pemberian permakanan   | 4.686 Orang  | 4.636 Orang  | 98,93%  | Dinas Sosial        |
| 0021 Penyediaan Kebutuhan Dasar Bagi Panti Sosial Dan Pemberian Permakanan Bagi Anak Yatim, Piatu, Dan Yatim Piatu                             |  |             |              |         | Waktu penyediaan kebutuhan dasar bagi 180 pansos/ orsos dan permakanan bagi 6455 anak yatim, piatu dan yatim piatu                           | 12 Bulan     | 12 Bulan     | 100,00% | Dinas Sosial        |
| 0022 Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Anak Luar Biasa Di UPTD Pondok Sosial Kalijudan                                      |  |             |              |         | Waktu pelaksanaan Pelayanan yang diberikan kepada 85 orang penghuni UPTD Pondok Sosial Kalijudan dan pemberian beasiswa kepada 254 mahasiswa | 12 bulan     | 12 bulan     | 100,00% | Dinas Sosial        |
| 0012 Pendataan PMKS Dan PSKS   | Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun  | 6 laporan   | 6 laporan    | 100.00% | Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun  | 6 laporan    | 6 laporan    | 100,00% | Kec. Asemrowo       |
| 0012 Pendataan PMKS Dan PSKS   | Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun  | 6 laporan   | 6 laporan    | 100.00% | Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun  | 6 laporan    | 6 laporan    | 100,00% | Kec. Benowo         |
| 0012 Pendataan PMKS Dan PSKS   | Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun  | 6 laporan   | 6 laporan    | 100.00% | Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun  | 6 Laporan    | 6 Laporan    | 100,00% | Kec. Bubutan        |
| 0012 Pendataan PMKS Dan PSKS   | Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun  | 6 Laporan   | 6 Laporan    | 100.00% | Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun  | 6 Laporan    | 6 Laporan    | 100,00% | Kec. Bulak          |
| 0012 Pendataan PMKS Dan PSKS   | Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun  | 6 Laporan   | 6 Laporan    | 100.00% | Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun  | 6 Laporan    | 6 Laporan    | 100,00% | Kec. Dukuh Pakis    |
| 0012 Pendataan PMKS Dan PSKS   | Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun  | 6 Laporan   | 6 Laporan    | 100.00% | Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun  | 6 Laporan    | 6 Laporan    | 100,00% | Kec. Gayungan       |
| 0012 Pendataan PMKS Dan PSKS   | Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun  | 6 Laporan   | 6 Laporan    | 100.00% | Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun  | 6 Laporan    | 6 Laporan    | 100,00% | Kec. Genteng        |
| 0012 Pendataan PMKS Dan PSKS   | Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun  | 6 laporan   | 6 laporan    | 100.00% | Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun  | 6 laporan    | 6 laporan    | 100,00% | Kec. Gubeng         |
| 0012 Pendataan PMKS Dan PSKS   | Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun  | 6 laporan   | 6 laporan    | 100.00% | Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun  | 6 laporan    | 6 laporan    | 100,00% | Kec. Gunung Anyar   |
| 0012 Pendataan PMKS Dan PSKS   | Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun  | 6 Laporan   | 6 Laporan    | 100.00% | Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun  | 6 Laporan    | 6 Laporan    | 100,00% | Kec. Jambangan      |
| 0012 Pendataan PMKS Dan PSKS   | Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun  | 6 Laporan   | 6 Laporan    | 100.00% | Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun  | 6 Laporan    | 6 Laporan    | 100,00% | Kec. Karangpilang   |
| 0012 Pendataan PMKS Dan PSKS   | Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun  | 6 Laporan   | 6 Laporan    | 100.00% | Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun  | 6 Laporan    | 6 Laporan    | 100,00% | Kec. Kenjeran       |
| 0012 Pendataan PMKS Dan PSKS   | Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun  | 6 Laporan   | 6 Laporan    | 100.00% | Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun  | 6 Laporan    | 6 Laporan    | 100,00% | Kec. Krembangan     |
| 0012 Pendataan PMKS Dan PSKS   | Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun  | 6 laporan   | 6 laporan    | 100.00% | Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun  | 6 Laporan    | 6 Laporan    | 100,00% | Kec. Lakarsantri    |
| 0012 Pendataan PMKS Dan PSKS   | Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun  | 6 laporan   | 6 laporan    | 100.00% | Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun  | 6 laporan    | 6 laporan    | 100,00% | Kec. Mulyorejo      |
| 0012 Pendataan PMKS Dan PSKS   | Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun  | 6 Laporan   | 6 Laporan    | 100.00% | Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun  | 6 Laporan    | 5 Laporan    | 83,33%  | Kec. Pabean Cantian |
| 0012 Pendataan PMKS Dan PSKS   | Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun  | 6 laporan   | 6 laporan    | 100.00% | Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun  | 6 laporan    | 6 laporan    | 100,00% | Kec. Pakal          |

| Urusan-Program-Kegiatan   | 2014  |            |                |         | 2015  |             |             |         | SKPD                       |
|---|---|------------|----------------|---------|---|-------------|-------------|---------|----------------------------|
|   | Indikator   | Target     | Realisasi      | Capaian | Indikator   | Target      | Realisasi   | Capaian |                            |
| 0012 Pendataan PMKS Dan PSKS  | Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun   | 6 laporan  | 6 laporan      | 100.00% | Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun                                       | 6 Laporan   | 6 Laporan   | 100,00% | Kec. Rungkut               |
| 0012 Pendataan PMKS Dan PSKS  | Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun   | 6 laporan  | 6 laporan      | 100.00% | Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun                                       | 6 laporan   | 6 laporan   | 100,00% | Kec. Sambikerep            |
| 0012 Pendataan PMKS Dan PSKS  | Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun   | 6 Laporan  | 6 Laporan      | 100.00% | Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun                                       | 6 Laporan   | 6 Laporan   | 100,00% | Kec. Sawahan               |
| 0012 Pendataan PMKS Dan PSKS  | Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun   | 6 Laporan  | 6 Laporan      | 100.00% | Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun                                       | 6 laporan   | 6 laporan   | 100,00% | Kec. Semampir              |
| 0012 Pendataan PMKS Dan PSKS  | Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun   | 6 Laporan  | 6 Laporan      | 100.00% | Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun                                       | 6 Laporan   | 6 Laporan   | 100,00% | Kec. Simokerto             |
| 0012 Pendataan PMKS Dan PSKS  | Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun   | 6 laporan  | 6 laporan      | 100.00% | Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun                                       | 6 Laporan   | 6 Laporan   | 100,00% | Kec. Sukolilo              |
| 0012 Pendataan PMKS Dan PSKS  | Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun   | 6 laporan  | 6 laporan      | 100.00% | Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun                                       | 6 laporan   | 6 laporan   | 100,00% | Kec. Sukomanunggal         |
| 0012 Pendataan PMKS Dan PSKS  | Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun   | 6 laporan  | 6 laporan      | 100.00% | Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun                                       | 6 laporan   | 6 laporan   | 100,00% | Kec. Tambaksari            |
| 0012 Pendataan PMKS Dan PSKS  | Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun   | 6 laporan  | 6 laporan      | 100.00% | Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun                                       | 6 laporan   | 6 laporan   | 100,00% | Kec. Tandes                |
| 0012 Pendataan PMKS Dan PSKS  | Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun   | 6 Laporan  | 6 Laporan      | 100.00% | Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun                                       | 6 Laporan   | 6 Laporan   | 100,00% | Kec. Tegalsari             |
| 0012 Pendataan PMKS Dan PSKS  | Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun   | 6 Laporan  | 6 Laporan      | 100.00% | Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun                                       | 6 Laporan   | 6 Laporan   | 100,00% | Kec. Tenggilis Mejoyo      |
| 0012 Pendataan PMKS Dan PSKS  | Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun   | 6 Laporan  | 6 Laporan      | 100.00% | Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun                                       | 6 Laporan   | 6 Laporan   | 100,00% | Kec. Wiyung                |
| 0012 Pendataan PMKS Dan PSKS  | Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun   | 6 Laporan  | 6 Laporan      | 100.00% | Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun                                       | 6 Laporan   | 6 Laporan   | 100,00% | Kec. Wonocolo              |
| 0012 Pendataan PMKS Dan PSKS  | Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun   | 6 Laporan  | 6 Laporan      | 100.00% | Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun                                       | 6 Laporan   | 6 Laporan   | 100,00% | Kec. Wonokromo             |
| <b>1.13.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>                    | Persentase PSKS Yang Berpartisipasi Dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial                                   | 60% (791)  | 91.87% (1.209) | 153.12% | Persentase PSKS Yang Berpartisipasi Dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial         | 70% (923)   | 94,83%      | 135,47% | Dinas Sosial dan Kecamatan |
| 0002 Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat | Jumlah Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang dibina   | 550 Orang  | 560 Orang      | 101.82% | Jumlah Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang dibina                           | 200 Orang   | 240 Orang   | 120,00% | Dinas Sosial               |
| 0005 Pembinaan, Pemberdayaan Relawan Sosial Dan Organisasi Sosial                       | Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina   | 1582 Orang | 1,715 Orang    | 108.41% | Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina                             | 2.574 Orang | 2.195 Orang | 85,28%  | Dinas Sosial               |
| 0006 Fasilitasi Peningkatan Nilai-Nilai Kepahlawanan                                    | Waktu Pelaksanaan Pemeliharaan 6 MPN/TMP yang bernilai kepahlawanan   | 12 Bulan   | 12 Bulan       | 100.00% | Waktu Pelaksanaan Pemeliharaan 6 MPN/TMP yang bernilai kepahlawanan                       | 12 Bulan    | 12 Bulan    | 100,00% | Dinas Sosial               |
| 0007 Penyediaan Kebutuhan Dasar Bagi Panti Sosial / Organisasi Sosial                   | Waktu penyediaan kebutuhan dasar bagi 180 pansos/ orsos dan permakanaan bagi 5949 anak yatim, piatu dan yatim piatu | 12 Bulan   | 12 Bulan       | 100.00% |   |             |             |         | Dinas Sosial               |
| 0008 Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan   | Waktu penyelenggaraan kegiatan keagamaan bagi umat beragama 23330 orang   | 12 Bulan   | 12 Bulan       | 100.00% | Waktu penyelenggaraan kegiatan keagamaan bagi umat beragama 21746 orang                   | 12 Bulan    | 12 Bulan    | 100,00% | Dinas Sosial               |
| <b>x.xx.01 Program Pelayanan Administrasi</b>   |   |            |                |         |   |             |             |         |                            |
| 0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran   | Waktu Pelaksanaan Penyediaan 9 Jenis Kebutuhan Barang dan Jasa  | 12 Bulan   | 12 Bulan       | 100.00% | Waktu Pelaksanaan Penyediaan 9 Jenis Kebutuhan Barang dan Jasa                            | 12 bulan    | 12 bulan    | 100,00% | Dinas Sosial               |
| <b>x.xx.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>                        |   |            |                |         |   |             |             |         |                            |
| 0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran                        | Waktu Pelaksanaan Pemeliharaan/Pengadaan 4 Jenis Sarana dan Prasarana Perkantoran                                   | 12 Bulan   | 12 Bulan       | 100.00% | Waktu Pelaksanaan Pemeliharaan/Pengadaan 4 Jenis Sarana dan Prasarana Perkantoran         | 12 Bulan    | 12 Bulan    | 100,00% | Dinas Sosial               |
| <b>1.14 Ketenagakerjaan</b>   |   |            |                |         |   |             |             |         |                            |
| <b>1.14.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja</b>                                     | % Penempatan pencari kerja pada pasar kerja   | 5,00%      | 5,01%          | 100,20% | % Penempatan pencari kerja pada pasar kerja   | 6,00%       | 6,12%       | 102,00% | Dinas Tenaga Kerja         |
| 0002 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja  | Jumlah fasilitasi akses ke pasar kerja yang dapat dilaksanakan  | 14 kali    | 13 kali        | 92.86%  | Jumlah fasilitasi akses ke pasar kerja yang dapat dilaksanakan                            | 14 kali     | 12 kali     | 85,71%  | Dinas Tenaga Kerja         |
| 0004 Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai  | Jumlah pencari kerja yang dilatih keterampilan kerja formal   | 1400 orang | 1,338 orang    | 95.57%  | Jumlah pencari kerja yang dilatih keterampilan kerja formal                               | 935 orang   | 593 orang   | 63,42%  | Dinas Tenaga Kerja         |
| 0005 Pengembangan Kelembagaan Produktivitas Dan Pelatihan Kewirausahaan                 | Jumlah masyarakat yang difasilitasi mendapatkan ketrampilan alternatif untuk berwirausaha                           | 1420 orang | 1,233 orang    | 86.83%  | Jumlah masyarakat yang difasilitasi mendapatkan ketrampilan alternatif untuk berwirausaha | 580 orang   | 552 orang   | 95,17%  | Dinas Tenaga Kerja         |
| 0008 Pelatihan Usaha Mandiri Berbasis Masyarakat  | Jumlah masyarakat yang dilatih keterampilan usaha mandiri   | 1670 orang | 714 orang      | 42.75%  |   |             |             |         | Dinas Tenaga Kerja         |



| Urusan-Program-Kegiatan  | 2014  |                 |                  |         |   | 2015             |                  |         |   |  | SKPD |
|--|---|-----------------|------------------|---------|---|------------------|------------------|---------|---|--|------|
|  | Indikator   | Target          | Realisasi        | Capaian | Indikator   | Target           | Realisasi        | Capaian |   |  |      |
| 0009 Identifikasi Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan   | Jumlah dokumen hasil Identifikasi Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan di 31 Kecamatan                                    | 2 dokumen       | 0 dokumen        | 0.00%   | Jumlah dokumen hasil Identifikasi Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan di 31 Kecamatan                                    | 2 dokumen        | 2 dokumen        | 100,00% | Dinas Tenaga Kerja  |  |      |
| 0010 Pengembangan Produktivitas Kerja  | Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih produktivitas  | 100 orang       | 78 orang         | 78.00%  |   |                  |                  |         | Dinas Tenaga Kerja  |  |      |
| <b>1.14.17 Program Perlindungan dan Pengembangan</b>   | Persentase penyelesaian sengketa pekerja-pengusaha  | 75,00%          | 80,87%           | 107,83% | Persentase penyelesaian sengketa pekerja-pengusaha  | 76,00%           | 76%              | 100,25% | Dinas Tenaga Kerja  |  |      |
| 0002 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial                                  | Jumlah perusahaan yang difasilitasi dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial                                   | 516 perusahaan  | 484 perusahaan   | 93.80%  | Jumlah perusahaan yang difasilitasi dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial                                   | 220 perusahaan   | 229 perusahaan   | 104,09% | Dinas Tenaga Kerja  |  |      |
| 0003 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum Dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan                | Jumlah perusahaan yang difasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan | 1670 perusahaan | 655 perusahaan   | 39.22%  | Jumlah perusahaan yang difasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan | 1.316 perusahaan | 525 perusahaan   | 39,89%  | Dinas Tenaga Kerja  |  |      |
| 0004 Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan  | Jumlah perusahaan yang mendapatkan pembinaan konsep dan penerapan norma kerja serta aspek K3                              | 3550 perusahaan | 1,199 perusahaan | 33.77%  | Jumlah perusahaan yang mendapatkan pembinaan konsep dan penerapan norma kerja serta aspek K3                              | 3.040 perusahaan | 1.037 perusahaan | 34,11%  | Dinas Tenaga Kerja  |  |      |
| 0005 Peningkatan Pengawasan, Perlindungan Dan Penegakkan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja              | Jumlah perusahaan yang diidentifikasi terkait keselamatan dan kesehatan kerja   | 2600 perusahaan | 1,007 perusahaan | 38.73%  | Jumlah perusahaan yang diidentifikasi terkait keselamatan dan kesehatan kerja   | 2.000 perusahaan | 860 perusahaan   | 43,00%  | Dinas Tenaga Kerja  |  |      |
| 0009 Pembinaan Lembaga Penyulur Tenaga Kerja Swasta, Lembaga Latihan Kerja, Dan Perusahaan Pengguna Tenaga Kesehatan | Jumlah LPKS, BLK, dan perusahaan yang dimonitoring dan dibina   | 250 lembaga     | 143 lembaga      | 57.20%  | Jumlah lembaga pelatihan, lembaga penempatan dan perusahaan pengguna TKA yang dibina                                      | 150 lembaga      | 109 lembaga      | 72,67%  | Dinas Tenaga Kerja  |  |      |
| 0010 Identifikasi Kebutuhan Hidup Layak  | Jangka Waktu pelaksanaan identifikasi kebutuhan hidup layak di 3 lokasi   | 12 Bulan        | 12 Bulan         | 100.00% | Jangka Waktu pelaksanaan identifikasi kebutuhan hidup layak di 3 lokasi   | 12 bulan         | 12 bulan         | 100,00% | Dinas Tenaga Kerja  |  |      |
| <b>Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktifitas</b>   |   |                 |                  |         | Persentase Masyarakat yang mendapat sertifikat kompetensi dibanding angkatan kerja tahun (t-2)                            | 0,21%            | 0,17%            | 80,95%  | Dinas Tenaga Kerja  |  |      |
| 0001 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi Untuk Menyongsong Asean Economic Community (AEC)                     |   |                 |                  |         | Pelaksanaan Sertifikasi Kerja   | 3.052 Orang      | 2.613 Orang      | 85,62%  | Dinas Tenaga Kerja  |  |      |
| <b>x.xx.01 Program Pelayanan Administrasi</b>  |   |                 |                  |         |   |                  |                  |         |   |  |      |
| 0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran  | Waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis barang dan jasa perkantoran  | 12 Bulan        | 12 Bulan         | 100.00% | Waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis barang dan jasa perkantoran  | 12 bulan         | 12 bulan         | 100,00% | Dinas Tenaga Kerja  |  |      |
| <b>x.xx.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>   |   |                 |                  |         |   |                  |                  |         |   |  |      |
| 0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran   | Terpelihara dan tersedianya sarana dan prasarana perkantoran 4 jenis  | 12 Bulan        | 12 Bulan         | 100.00% | Terpeliharanya Dan Tersedianya Sarana Dan Prasarana Perkantoran 3 jenis   | 12 bulan         | 12 bulan         | 100,00% | Dinas Tenaga Kerja  |  |      |
| <b>1.15 Koperasi dan Usaha</b>   |   |                 |                  |         |   |                  |                  |         |   |  |      |
| <b>1.15.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</b>                           | jumlah kelompok skala mikro kecil yang memiliki daya saing  | 59 Kelompok     | 60 Kelompok      | 101,69% | jumlah kelompok skala mikro kecil yang memiliki daya saing  | 69 Kelompok      | 65 Kelompok      | 94,20%  | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian |  |      |
| 0006 Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah   | Jumlah sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah yang dibangun   | 5 unit          | 5 unit           | 100.00% | Jumlah sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah yang dibangun   | 10 unit          | 10 unit          | 100,00% | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang  |  |      |
| 0007 Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga  | Jumlah kelompok usaha mikro-kecil yang difasilitasi menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan usaha         | 5 kelompok      | 11 kelompok      | 220.00% |   |                  |                  |         | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah   |  |      |
| 0008 Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah                           | Jangka waktu pendampingan pembinaan usaha bagi 5 kelompok usaha mikro-kecil   | 12 bulan        | 11 bulan         | 91.67%  |   |                  |                  |         | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah   |  |      |
| 0009 Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah   | Jumlah kegiatan promosi yang dilakukan untuk memasarkan produk umkm   | 23 kegiatan     | 19 kegiatan      | 82.61%  | Jumlah kegiatan promosi yang dilakukan untuk memasarkan produk UMKM   | 17 kegiatan      | 19 kegiatan      | 111,76% | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah   |  |      |
| 0006 Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah   | Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Sarana Pendukung Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah  | 2 Lokasi        | 0 Lokasi         | 0.00%   | Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Sarana Pendukung Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah  | 1 lokasi         | 0 lokasi         | 0,00%   | Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah  |  |      |

| Urusan-Program-Kegiatan  | Indikator  | 2014           |                |         | 2015  |                  |                  | SKPD    |   |
|--|--|----------------|----------------|---------|---|------------------|------------------|---------|---|
|  |  | Target         | Realisasi      | Capaian | Indikator   | Target           | Realisasi        |         | Capaian   |
| 0008 Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil Dan Industri Menengah | Jumlah Industri Kecil yang dibina  | 429 UKM        | 429 UKM        | 100,00% | Jumlah industri kecil yang dibina   | 433 UKM          | 433 UKM          | 100,00% | Dinas Perdagangan dan Perindustrian                 |
| 0009 Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah                             | Jumlah event promosi yang diikuti oleh 55 UKM  | 12 event       | 12 event       | 100,00% | Jumlah UKM yang memperoleh fasilitasi promosi   | 72 UKM           | 109 UKM          | 151,39% | Dinas Perdagangan dan Perindustrian                 |
| 0012 Fasilitasi Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial                              | Jumlah sentra industri potensial yang memperoleh fasilitasi                                  | 15 sentra      | 15 sentra      | 100,00% | Jumlah sentra industri potensial yang memperoleh fasilitasi   | 18 Sentra        | 18 Sentra        | 100,00% | Dinas Perdagangan dan Perindustrian                 |
| 0013 Fasilitasi Pengembangan UKM   | Jumlah UKM yang Memperoleh Fasilitasi pengembangan usaha                                     | 380 UKM        | 380 UKM        | 100,00% | Jumlah UKM yang memperoleh fasilitasi pengembangan usaha  | 300 UKM          | 90 UKM           | 30,00%  | Dinas Perdagangan dan Perindustrian                 |
| 0015 Pemberian Dan Penerbitan Perijinan Perdagangan Dan Industri                           | Jumlah ijin industri dan perdagangan yang diterbitkan  | 25996 ijin     | 23,544 ijin    | 90,57%  | Jumlah ijin industri dan perdagangan yang diterbitkan   | 26.261 Ijin      | 24.783 Ijin      | 94,37%  | Dinas Perdagangan dan Perindustrian                 |
| 0016 Pembinaan Wajib Daftar Perusahaan   | Jumlah wajib daftar perusahaan yang dibina   | 820 perusahaan | 850 perusahaan | 103,66% | Jumlah wajib daftar perusahaan yang dibina  | 1.149 Perusahaan | 1.162 Perusahaan | 101,13% | Dinas Perdagangan dan Perindustrian                 |
| 0017 Penerbitan Surat Keterangan Dan Pemberian Rekomendasi Perdagangan                     | Jumlah Rekomendasi Perdagangan yang diterbitkan  | 140 rekom      | 184 rekom      | 131,43% | Jumlah rekomendasi perdagangan yang diterbitkan   | 140 Rekom        | 286 Rekom        | 204,29% | Dinas Perdagangan dan Perindustrian                 |
| <b>1.15.18 Program Peningkatan Kualitas</b>  | Peningkatan jumlah koperasi berkualitas  | 172 unit       | 306 unit       | 177,91% | Peningkatan jumlah koperasi berkualitas   | 170 unit         | 268 unit         | 157,65% |   |
|  | Peningkatan jumlah kelembagaan koperasi pasif yang berhasil direvitalisasi                   | 100 unit       | 20 unit        | 20,00%  | Peningkatan jumlah kelembagaan koperasi pasif yang berhasil direvitalisasi  | 66 unit          | 79 unit          | 119,70% |   |
|  | Peningkatan jumlah kelembagaan baru koperasi yang terbentuk                                  | 30 unit        | 54 unit        | 180,00% | Peningkatan jumlah kelembagaan baru koperasi yang terbentuk   | 30 unit          | 31 unit          | 103,33% |   |
| 0003 Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian                   |  |                |                |         | Jumlah koperasi yang dipetakan kinerja usahanya   | 500 koperasi     | 554 koperasi     | 110,80% | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah |
| 0004 Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian                                   | Jumlah peserta sosialisasi prinsip perkoperasian   | 1630 orang     | 1,489 orang    | 91,35%  | Jumlah peserta sosialisasi prinsip perkoperasian  | 1.730 orang      | 1.629 orang      | 94,16%  | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah |
| 0006 Peningkatan Dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi                        | Jumlah koperasi simpan pinjam yang difasilitasi untuk mengembangkan jaringan kerjasama usaha | 150 koperasi   | 150 koperasi   | 100,00% | Jumlah koperasi simpan pinjam yang difasilitasi untuk mengembangkan jaringan kerjasama usaha                      | 120 koperasi     | 102 koperasi     | 85,00%  | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah |
| 0010 Fasilitasi Kemudahan Pendirian Unit Koperasi Baru                                     | Jumlah lembaga baru koperasi yang dapat dibentuk   | 30 koperasi    | 30 koperasi    | 100,00% | Jumlah lembaga baru koperasi yang dapat dibentuk  | 30 koperasi      | 31 koperasi      | 103,33% | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah |
| 0011 Peningkatan Dan Pengembangan Usaha Koperasi Aktif                                     | Jumlah koperasi aktif yang ditingkatkan kapasitas dan kemampuan usahanya                     | 300 koperasi   | 300 koperasi   | 100,00% | Jumlah koperasi aktif yang mendapatkan bintek pengembangan usaha  | 60 koperasi      | 54 koperasi      | 90,00%  | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah |
| 0012 Peningkatan Konsistensi Pengelolaan Koperasi Ber RAT                                  | Jumlah koperasi ber RAT yang ditingkatkan konsistensi penanganannya                          | 200 koperasi   | 189 koperasi   | 94,50%  | Jumlah koperasi ber RAT yang mendapatkan bintek pengelolaan koperasi  | 200 koperasi     | 217 koperasi     | 108,50% | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah |
| 0013 Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi aktif belum RAT                             | Jumlah koperasi aktif belum RAT yang ditingkatkan kualitas kelembagaannya                    | 120 koperasi   | 108 koperasi   | 90,00%  |   |                  |                  |         | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah |
| 0015 Revitalisasi Koperasi Tidak Aktif Dan Tidak Ber RAT                                   | Jumlah koperasi tidak aktif dan tidak ber RAT yang direvitalisasi                            | 100 koperasi   | 20 koperasi    | 20,00%  | Jumlah koperasi tidak aktif dan tidak ber RAT yang mendapatkan bintek pengelolaan lembaga dan usaha perkoperasian | 66 koperasi      | 79 koperasi      | 119,70% | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah |
| 0016 Fasilitasi Persiapan Sertifikasi Kompetensi Usaha Koperasi Simpan Pinjam              |  |                |                |         | Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk persiapan Sertifikasi Kompetensi Usaha                                    | 150 koperasi     | 117 koperasi     | 78,00%  | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah |
| <b>x.xx.01 Program Pelayanan Administrasi</b>  |  |                |                |         |   |                  |                  |         |   |
| 0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran  | Tersedianya 8 jenis Kebutuhan Barang dan Jasa Perkantoran                                    | 12 bulan       | 12 bulan       | 100,00% | Tersedianya 9 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran   | 12 bulan         | 12 bulan         | 100,00% | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah |
| <b>x.xx.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>                           |  |                |                |         |   |                  |                  |         |   |
| 0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran                           | Terpeliharanya 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran                                      | 12 bulan       | 12 bulan       | 100,00% | Terpeliharanya 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran   | 12 bulan         | 12 bulan         | 100,00% | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah |
| <b>1.16 Penanaman Modal</b>  |  |                |                |         |   |                  |                  |         |   |
| <b>1.16.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>                 | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan perijinan penunjang investasi                      | 90,00%         | 75,32%         | 83,69%  | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan perijinan penunjang investasi   | 95,00%           | 74,75%           | 78,68%  | Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal      |



| Urusan-Program-Kegiatan   | 2014   |                |                |         | 2015  |                 |                 |         | SKPD   |
|---|--|----------------|----------------|---------|---|-----------------|-----------------|---------|--|
|   | Indikator  | Target         | Realisasi      | Capaian | Indikator   | Target          | Realisasi       | Capaian |  |
| 0002 Memfasilitasi Dan Koordinasi Kerjasama Di Bidang Investasi                             | Jumlah kegiatan Fasilitas kemitraan UMKM dengan Pengusaha Skala Nasional                       | 3 kali         | 3 kali         | 100.00% | Jumlah kegiatan Fasilitas kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah              | 3 kali          | 3 kali          | 100,00% | Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal |
| 0010 Fasilitas Pelayanan Perijinan Penanaman Modal  | Jumlah perusahaan yang difasilitasi pelayanan perijinan  | 120 perusahaan | 171 perusahaan | 142.50% | Jumlah perusahaan yang difasilitasi pelayanan perijinan   | 120 perusahaan  | 226 perusahaan  | 188,33% | Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal |
| 0011 Pelayanan UPTSA  | Waktu pelaksanaan Pelayanan UPTSA  | 12 bulan       | 12 bulan       | 100.00% | Waktu pelaksanaan Pelayanan UPTSA   | 12 bulan        | 12 bulan        | 100,00% | Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal |
| 0012 Penyelenggaraan Promosi Investasi  | Jumlah even promosi investasi yang dilaksanakan  | 2 even         | 2 even         | 100.00% | Jumlah even promosi investasi yang dilaksanakan   | 3 even          | 3 even          | 100,00% | Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal |
| 0013 Penyusunan Pemetaan Potensi Investasi  | jumlah dokumen pemetaan potensi investasi yang tersusun  | 5 Dokumen      | 5 Dokumen      | 100.00% |   |                 |                 |         | Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal |
| 0014 Pengawasan Pelaksanaan PMA/PMDN  | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pelaksanaan PMA/PMDN   | 6 Dokumen      | 6 Dokumen      | 100.00% | Pengawasan Penanaman Modal kepada 160 Perusahaan  | 1 setahun       | 1 setahun       | 100,00% | Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal |
| 0015 Monitoring Dan Evaluasi Pelayanan Perijinan Dan Non Perijinan Yang Mendukung Investasi | Waktu pelaksanaan monitoring Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan                             | 12 bulan       | 12 bulan       | 100.00% | Waktu Pelaksanaan monitoring Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan                                    | 12 bulan        | 12 bulan        | 100,00% | Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal |
| 0016 Pengelolaan Dan Pemutakhiran Data Investasi  | Waktu pengelolaan dan pemutakhiran data investasi  | 12 Bulan       | 12 Bulan       | 100.00% | Jumlah update informasi penanaman modal   | 12 kali setahun | 12 kali setahun | 100,00% | Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal |
| <b>x.xx.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                                   |  |                |                |         |   |                 |                 |         |  |
| 0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran   | Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa perkantoran   | 12 bulan       | 12 bulan       | 100.00% | Waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis barang dan jasa perkantoran                                      | 12 bulan        | 12 bulan        | 100,00% | Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal |
| <b>x.xx.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>                            |  |                |                |         |   |                 |                 |         |  |
| 0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran                            | Waktu pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran                  | 12 bulan       | 12 bulan       | 100.00% | Waktu pelaksanaan pemeliharaan 4 jenis sarana dan prasarana perkantoran                               | 12 bulan        | 12 bulan        | 100,00% | Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal |
| <b>1.17 Kebudayaan</b>  |  |                |                |         |   |                 |                 |         |  |
| <b>1.17.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>   |  |                |                |         |   |                 |                 |         |  |
| 0008 Pembangunan/Rehabilitasi serta Pengawasan Gedung Mitra                                 | Jumlah gedung Mitra yang dibangun dan diawasi  | 1 unit         | 0 unit         | 0.00%   |   |                 |                 |         | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang               |
| 0001 Pengembangan Kesenian Dan Kebudayaan Daerah  | waktu pelaksanaan fasilitas pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah bagi 481 kelompok seni | 12 bulan       | 12 bulan       | 100.00% | jangka waktu pelaksanaan fasilitas pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah bagi 441 kelompok seni | 12 Bulan        | 12 Bulan        | 100,00% | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                |
| 0005 Fasilitas Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah                                       | Jumlah festival budaya daerah yang diselenggarakan dan diikuti                                 | 10 Festival    | 10 Festival    | 100.00% | Jumlah festival budaya daerah yang diselenggarakan dan diikuti  | 9 Festival      | 9 Festival      | 100,00% | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                |
| <b>x.xx.01 Program Pelayanan Administrasi</b>   |  |                |                |         |   |                 |                 |         |  |
| 0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran   | Jangka waktu pelaksanaan penyediaan 10 jenis barang dan jasa perkantoran                       | 12 Bulan       | 12 Bulan       | 100.00% | Jangka waktu pelaksanaan penyediaan 10 jenis barang dan jasa perkantoran                              | 12 Bulan        | 12 Bulan        | 100,00% | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                |
| <b>x.xx.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>                            |  |                |                |         |   |                 |                 |         |  |
| 0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran                            | Jangka waktu pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran   | 12 Bulan       | 12 Bulan       | 100.00% | Jangka waktu pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran          | 12 Bulan        | 12 Bulan        | 100,00% | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                |
| <b>1.18 Kepemudaan dan Olah Raga</b>  |  |                |                |         |   |                 |                 |         |  |
| <b>1.18.16 Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan</b>                                   |  |                |                |         |   |                 |                 |         |  |
| 0010 Fasilitas Peningkatan Peran Kepemudaan   | Jumlah kegiatan peningkatan peran kepemudaan yang difasilitasi                                 | 24 kegiatan    | 25 kegiatan    | 104.17% | Jumlah kegiatan peningkatan peran kepemudaan yang difasilitasi  | 25 Kegiatan     | 25 Kegiatan     | 100,00% | Dinas Pemuda dan Olahraga                      |

| Urusan-Program-Kegiatan   | 2014  |             |             |         | 2015  |             |             |         | SKPD   |
|---|---|-------------|-------------|---------|---|-------------|-------------|---------|--|
|   | Indikator   | Target      | Realisasi   | Capaian | Indikator   | Target      | Realisasi   | Capaian |  |
| 0011 Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Mandiri  | Jenis Pengembangan Kewira Usahaan Pemuda Mandiri  | 2 kegiatan  | 7 kegiatan  | 350,00% | Jenis Kegiatan Pengembangan Kewira Usahaan Pemuda Mandiri                                       | 4 Kegiatan  | 4 Kegiatan  | 100,00% | Dinas Pemuda dan Olahraga  |
| 0012 Pengembangan Kreatifitas Dan Aktualisasi Kenemudaan                              | Jumlah Pengembangan Kreatifitas dan Aktualisasi Kepemudaan                              | 5 kegiatan  | 4 kegiatan  | 80,00%  | Jumlah Kegiatan Pengembangan Kreatifitas dan Aktualisasi Kenemudaan                             | 5 Kegiatan  | 5 Kegiatan  | 100,00% | Dinas Pemuda dan Olahraga  |
| 0013 Penumbuhan Jiwa Sosial Kepemudaan  | Jumlah kegiatan penumbuhan jiwa sosial kepemudaan yang dilaksanakan                     | 9 kegiatan  | 9 kegiatan  | 100,00% | Jumlah Kegiatan Penumbuhan Jiwa Sosial kepemudaan yang dilaksanakan                             | 10 Kegiatan | 10 Kegiatan | 100,00% | Dinas Pemuda dan Olahraga  |
| 0014 Peningkatan Pemahaman Pemuda Dan Pencegahan Kenakalan Remaja                     | Jumlah Peningkatan pemahaman pemuda dan pencegahan kenakalan remaja yang dilaksanakan   | 15 Kegiatan | 15 Kegiatan | 100,00% | Jumlah kegiatan peningkatan pemahaman pemuda dan pencegahan kenakalan remaja yang dilaksanakan  | 15 Kegiatan | 15 Kegiatan | 100,00% | Dinas Pemuda dan Olahraga  |
| 0015 Peningkatan Dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan                               | Jumlah kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Organisasi kepemudaan yang dilaksanakan    | 5 kegiatan  | 5 kegiatan  | 100,00% | Jumlah Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan yang dilaksanakan dan dibina | 8 Kegiatan  | 8 Kegiatan  | 100,00% | Dinas Pemuda dan Olahraga  |
| 0016 Peningkatan Kepemimpinan Dan Kepeloporan Pemuda                                  | Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda             | 4505 Orang  | 2,652 Orang | 58,87%  | Jumlah pemuda mandiri yang mengikuti pelatihan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda              | 4.505 orang | 2.050 orang | 45,50%  | Dinas Pemuda dan Olahraga  |
| <b>1.18.20 Program Pembinaan dan Pemasarakan</b>                                      | meningkatnya Atlit/organisasi olahraga yang berprestasi                                 | 1578        | 1761        | 111,60% | meningkatnya Atlit/organisasi olahraga yang berprestasi   | 1736        | 1312        | 76%     | Dinas Pemuda dan Olahraga  |
|   | meningkatnya Prasarana olahraga yang dikembangkan                                       | 242         | 272         | 112,40% | meningkatnya Prasarana olahraga yang dikembangkan   | 282         | 346         | 123%    | Dinas Pemuda dan Olahraga  |
|   | meningkatnya Jenis olahraga rekreasi yang digali, dibina dan dikembangkan               | 43          | 41          | 95,35%  | meningkatnya Jenis olahraga rekreasi yang digali, dibina dan dikembangkan                       | 48          | 41          | 85%     | Dinas Pemuda dan Olahraga  |
| 0018 Pembangunan Lapangan THOR Tahap VI   |   |             |             |         | Lapangan THOR yang dibangun pada tahap VI   | 1 lokasi    | 1 lokasi    | 100,00% | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang   |
| 0005 Peningkatan Kesegaran Jasmani Dan Rekreasi                                       | Jumlah Peningkatan kegiatan kesegaran jasmani dan rekreasi                              | 30 Kegiatan | 30 Kegiatan | 100,00% | Jumlah Peningkatan kegiatan kesegaran jasmani dan rekreasi                                      | 30 Kegiatan | 30 Kegiatan | 100,00% | Dinas Pemuda dan Olahraga  |
| 0008 Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga Yang Berdedikasi Dan Berprestasi       | Jumlah pelaku olahraga yang mendapatkan penghargaan                                     | 1852 orang  | 1,761 orang | 95,09%  | Jumlah Atlet dan Pelatih Olahraga Prestasi yang mendapatkan penghargaan                         | 1.852 orang | 1.312 orang | 70,84%  | Dinas Pemuda dan Olahraga  |
| 0010 Pengembangan Olahraga Lanjut Usia Termasuk Penyandang Cacat yang diselenggarakan | Jumlah Pengembangan Olahraga Lanjut Usia Termasuk Penyandang Cacat yang diselenggarakan | 18 Kegiatan | 17 Kegiatan | 94,44%  | Jumlah Pengembangan Olahraga Lanjut Usia Termasuk Penyandang Cacat yang diselenggarakan         | 29 Kegiatan | 16 Kegiatan | 55,17%  | Dinas Pemuda dan Olahraga  |
| 0011 Pengembangan Olahraga Rekreasi   | Kegiatan Pengembangan Olahraga Rekreasi yang dilaksanakan                               | 8 Kegiatan  | 7 Kegiatan  | 87,50%  | Kegiatan Pengembangan Olahraga Rekreasi yang dilaksanakan                                       | 8 Kegiatan  | 8 Kegiatan  | 100,00% | Dinas Pemuda dan Olahraga  |
| 0014 Pembinaan Olahraga Yang Berkembang Di Masyarakat                                 | Jenis kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat                         | 6 kegiatan  | 5 kegiatan  | 83,33%  | Jenis kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat                                 | 6 Kegiatan  | 6 Kegiatan  | 100,00% | Dinas Pemuda dan Olahraga  |
| 0019 Operasional Dan Pemeliharaan Gedung Dan Lapangan Olahraga                        | Waktu operasional dan pemeliharaan 4 Gedung dan Lapangan Olahraga                       | 12 bulan    | 12 bulan    | 100,00% | Waktu operasional dan pemeliharaan 4 Gedung dan Lapangan Olahraga                               | 12 Bulan    | 12 Bulan    | 100,00% | Dinas Pemuda dan Olahraga  |
| 0020 Peningkatan SDM Dan Manajemen Olahraga Prestasi                                  | Jumlah kegiatan peningkatan SDM dan manajemen olahraga prestasi yang dilaksanakan       | 3 kegiatan  | 5 kegiatan  | 166,67% | Jumlah kegiatan peningkatan SDM dan manajemen Olahraga prestasi yang dilaksanakan               | 3 Kegiatan  | 3 Kegiatan  | 100,00% | Dinas Pemuda dan Olahraga  |
| 0021 Peningkatan Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Olahraga           | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga yang dilaksanakan            | 45 lokasi   | 68 lokasi   | 151,11% | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga yang dilaksanakan                    | 45 lokasi   | 74 lokasi   | 164,44% | Dinas Pemuda dan Olahraga  |
| 0022 Penyelenggaraan Pertandingan Olahraga Prestasi                                   | Penyelenggaraan pertandingan olahraga prestasi  | 13 Kali     | 13 Kali     | 100,00% | Penyelenggaraan pertandingan olahraga prestasi  | 15 Kegiatan | 15 Kegiatan | 100,00% | Dinas Pemuda dan Olahraga  |
| 0023 Operasional Dan Pengadaan Fasilitas Gelora Bung Tomo                             | Waktu Pelaksanaan Operasional dan Pengadaan Fasilitas Gelora Bung Tomo                  | 12 bulan    | 16 bulan    | 133,33% | Waktu Pelaksanaan Operasional dan Pengadaan Fasilitas Gelora Bung Tomo                          | 12 Bulan    | 12 Bulan    | 100,00% | Dinas Pemuda dan Olahraga  |
| <b>x.xx.01 Program Pelayanan Administrasi</b>   |   |             |             |         |   |             |             |         |  |
| 0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran   | Waktu pelaksanaan penyediaan 8 jenis barang dan jasa perkantoran                        | 12 bulan    | 12 bulan    | 100,00% | Waktu pelaksanaan penyediaan 8 jenis barang dan jasa perkantoran                                | 12 Bulan    | 12 Bulan    | 100,00% | Dinas Pemuda dan Olahraga  |
| <b>x.xx.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>                      |   |             |             |         |   |             |             |         |  |
| 0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran                      | Waktu pelaksanaan pemeliharaan 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran                 | 12 bulan    | 12 bulan    | 100,00% | Waktu pelaksanaan pemeliharaan 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran                         | 12 Bulan    | 12 Bulan    | 100,00% | Dinas Pemuda dan Olahraga  |
| <b>1.19 Kesatuan Bangsa dan</b>   |   |             |             |         |   |             |             |         |  |
| <b>1.19.16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</b>      | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)             | 100,00%     | 100,00%     | 100,00% | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)                     | 100%        | 100%        | 100,00% | Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja |

| Urusan-Program-Kegiatan  | 2014   |            |            |         | 2015   |            |            |         | SKPD   |
|--|--|------------|------------|---------|--|------------|------------|---------|--|
|  | Indikator  | Target     | Realisasi  | Capaian | Indikator  | Target     | Realisasi  | Capaian |  |
| 0002 Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan            | Waktu Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka meningkatkan kerjasama dengan aparat keamanan                  | 12 bulan   | 12 bulan   | 100.00% | Waktu Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka meningkatkan kerjasama dengan aparat keamanan                  | 12 bulan   | 12 bulan   | 100,00% | Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat |
| 0006 Pengendalian Kebisingan Dan Gangguan Dari Kegiatan Masyarakat Bidang Penanganan Strategis | Waktu pelaksanaan pengendalian kebisingan gangguan dari kegiatan masyarakat yang dilaksanakan            | 12 bulan   | 12 bulan   | 100.00% | Waktu pelaksanaan pengendalian kebisingan gangguan dari kegiatan masyarakat yang dilaksanakan            | 12 bulan   | 12 bulan   | 100,00% | Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat |
| 0007 Pelatihan Pengendalian Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Bidang Penanganan Strategis     | Jumlah peserta pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan bidang penanganan strategis     | 840 orang  | 840 orang  | 100.00% | Jumlah peserta pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan bidang penanganan strategis     | 900 orang  | 849 orang  | 94,33%  | Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat |
| 0008 Pengendalian Keamanan Lingkungan Bidang Penanganan Strategis                              | Waktu pelaksanaan 3 kegiatan Pengendalian keamanan lingkungan  | 12 bulan   | 12 bulan   | 100.00% | Waktu pelaksanaan 3 kegiatan Pengendalian keamanan lingkungan  | 12 bulan   | 12 bulan   | 100,00% | Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat |
| 0009 Pelatihan Pengendalian Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Bidang Linmas                   | Jumlah peserta pelatihan pengendalian keamanan lingkungan bidang linmas                                  | 930 orang  | 915 orang  | 98.39%  | Jumlah peserta pelatihan pengendalian keamanan lingkungan bidang linmas                                  | 930 orang  | 905 orang  | 97,31%  | Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat |
| 0010 Pengendalian Keamanan Lingkungan Bidang Linmas  | Waktu pelaksanaan pengerahan dan pengendalian keamanan lingkungan bidang Linmas                          | 12 bulan   | 12 bulan   | 100.00% | Waktu pelaksanaan pengerahan dan pengendalian keamanan lingkungan bidang Linmas                          | 12 bulan   | 12 bulan   | 100,00% | Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat |
| 0011 Pemberdayaan Dan Fasilitasi Parpol Dan Orkemas  | Jumlah peserta yang mengikuti seminar pemberdayaan parpol, ormas dan LSM                                 | 700 orang  | 700 orang  | 100.00% | Jumlah peserta yang mengikuti seminar pemberdayaan parpol orkemas  | 700 orang  | 614 orang  | 87,71%  | Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat |
| 0012 Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan                                | Jumlah Peserta yang mengikuti Seminar, talk Show, diskusi wawasan kebangsaan                             | 400 orang  | 400 orang  | 100.00% | Jumlah Peserta yang mengikuti Seminar, talk Show, diskusi wawasan kebangsaan                             | 400 orang  | 450 orang  | 112,50% | Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat |
| 0013 Peningkatan Toleransi Dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama                              | Jumlah Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama                             | 3 Kegiatan | 3 Kegiatan | 100.00% | Jumlah Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama                             | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 100,00% | Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat |
| 0001 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja                         | Jumlah pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 5 Wilayah | 240 kali   | 240 kali   | 100.00% | Jumlah pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 3 Wilayah | 240 kali   | 240 kali   | 100,00% | Kec. Asemrowo  |
| 0001 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja                         | Jumlah pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 5 Wilayah | 288 kali   | 288 kali   | 100.00% | Jumlah pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 4 Wilayah | 288 kali   | 288 kali   | 100,00% | Kec. Benowo  |
| 0001 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja                         | Jumlah pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 5 Wilayah | 288 kali   | 288 kali   | 100.00% | Jumlah pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 5 Wilayah | 288 Kali   | 288 Kali   | 100,00% | Kec. Bubutan   |
| 0001 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja                         | Jumlah pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 5 Wilayah | 288 Kali   | 288 Kali   | 100.00% | Jumlah pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 4 Wilayah | 288 Kali   | 288 Kali   | 100,00% | Kec. Bulak   |
| 0001 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja                         | Jumlah pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 4 Wilayah | 288 Kali   | 288 Kali   | 100.00% | Jumlah pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 4 Wilayah | 288 Kali   | 288 Kali   | 100,00% | Kec. Dukuh Pakis   |
| 0001 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja                         | Jumlah pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 4 Wilayah | 288 Kali   | 288 Kali   | 100.00% | Jumlah pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 4 Wilayah | 288 Kali   | 288 Kali   | 100,00% | Kec. Gayungan  |
| 0001 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja                         | Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 5 wilayah | 312 Kali   | 312 Kali   | 100.00% | Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 5 wilayah | 312 Kali   | 300 Kali   | 96,15%  | Kec. Genteng   |
| 0001 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja                         | Jumlah pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 6 Wilayah | 288 kali   | 288 kali   | 100.00% | Jumlah pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 6 Wilayah | 288 kali   | 288 kali   | 100,00% | Kec. Gubeng  |
| 0001 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja                         | Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 4 wilayah | 432 kali   | 432 kali   | 100.00% | Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 4 wilayah | 432 kali   | 432 kali   | 100,00% | Kec. Gunung Anyar  |



| Urusan-Program-Kegiatan  | 2014  |              |               |         | 2015  |               |               |         | SKPD   |
|--|---|--------------|---------------|---------|---|---------------|---------------|---------|--|
|  | Indikator   | Target       | Realisasi     | Capaian | Indikator   | Target        | Realisasi     | Capaian |  |
| 0001 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja   | Jumlah pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 5 Wilayah            | 288 Kali     | 288 Kali      | 100.00% | Jumlah pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 5 Wilayah            | 288 Kali      | 288 Kali      | 100,00% | Kec. Wonocolo  |
| 0001 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja   | Jumlah pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 6 Wilayah            | 300 Kali     | 300 Kali      | 100.00% | Jumlah pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 6 Wilayah            | 300 Kali      | 300 Kali      | 100,00% | Kec. Wonokromo   |
| 0004 Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa Di Daerah                            | Jumlah Personil yang terlibat dalam Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah  | 1120 Orang   | 1,135 Orang   | 101.34% | Jumlah Personil yang terlibat dalam Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah  | 1.231 Orang   | 1.231 Orang   | 100,00% | Satuan Polisi Pamong Praja                                 |
| 0014 Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang I                                   | Jumlah Penertiban, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Bidang I   | 16925 Obyek  | 19,989 Obyek  | 118.10% | Jumlah Penertiban, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Bidang I   | 16.925 Obyek  | 21.763 Obyek  | 128,58% | Satuan Polisi Pamong Praja                                 |
| 0015 Penertiban Pengawasan Pengendalian Bidang II  | Jumlah Penertiban, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Bidang II  | 1600 Obyek   | 1,621 Obyek   | 101.31% | Jumlah Penertiban, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Bidang II  | 1.600 Obyek   | 1.732 Obyek   | 108,25% | Satuan Polisi Pamong Praja                                 |
| 0016 Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang III                                 | Jumlah Penertiban, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Bidang III   | 36550 Obyek  | 62,772 Obyek  | 171.74% | Jumlah Penertiban, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Bidang III   | 36.550 Obyek  | 48.723 Obyek  | 133,31% | Satuan Polisi Pamong Praja                                 |
| 0017 Penyiapan Tenaga Penanggulangan Keamanan Kota   | Jumlah Personil yang terlibat dalam Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan Keamanan Kota | 115800 Orang | 118,762 Orang | 102.56% | Jumlah Personil yang terlibat dalam Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan Keamanan Kota | 115.800 Orang | 116.053 Orang | 100,22% | Satuan Polisi Pamong Praja                                 |
| 0018 Penindakan Evaluasi Pelanggaran Perda   |   |              |               |         | Penindakan Pelanggaran Perda  | 60 Kali       | 193 Kali      | 321,67% | Satuan Polisi Pamong Praja                                 |
| <b>x.xx.01 Program Pelayanan Administrasi</b>  |   |              |               |         |   |               |               |         |  |
| 0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran  | waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis barang dan jasa perkantoran  | 12 bulan     | 12 bulan      | 100.00% | waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis barang dan jasa perkantoran  | 12 bulan      | 12 bulan      | 100,00% | Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat |
| 0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran  | Waktu Penyediaan 8 Jenis Barang dan Jasa Perkantoran  | 12 Bulan     | 12 Bulan      | 100.00% | Waktu Penyediaan 8 Jenis Barang dan Jasa Perkantoran  | 12 Bulan      | 12 Bulan      | 100,00% | Satuan Polisi Pamong Praja                                 |
| <b>x.xx.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>   |   |              |               |         |   |               |               |         |  |
| 0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran   | Waktu pelaksanaan pemeliharaan 4 jenis sarana dan prasarana perkantoran   | 12 bulan     | 12 bulan      | 100.00% | Waktu pelaksanaan pemeliharaan 4 jenis sarana dan prasarana perkantoran   | 12 bulan      | 12 bulan      | 100,00% | Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat |
| 0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran   | Waktu Pemeliharaan 2 Jenis Sarana dan Prasarana Perkantoran   | 12 Bulan     | 12 Bulan      | 100.00% | Waktu Pemeliharaan 2 Jenis Sarana dan Prasarana Perkantoran   | 12 Bulan      | 12 Bulan      | 100,00% | Satuan Polisi Pamong Praja                                 |
| <b>1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan</b> |   |              |               |         |   |               |               |         |  |
| <b>1.20.15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan</b>  | Jumlah Raperda usul prakarsa DPRD yang ditindak lanjuti   | 6            | 4             | 66,67%  | Jumlah Raperda usul prakarsa DPRD yang ditindak lanjuti   | 6             | 6             | 100%    |  |
|  | Prosentase Raperda yang ditindaklanjuti dalam rapat paripurna   | 91%          | 83%           | 91,57%  | Prosentase Raperda yang ditindaklanjuti dalam rapat paripurna   | 92,00%        | 94,44%        | 102,65% |  |
|  | % keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti DPRD  | 86%          | 0,6536        | 76,00%  | % keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti DPRD  | 87,00%        | 87,83%        | 100,95% |  |
|  | Jumlah publik hearing yang dilaksanakan   | 5            | 5             | 100,00% | Jumlah publik hearing yang dilaksanakan   | 5             | 5             | 100,00% |  |
| 0001 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah   | Jumlah Raperda Usul Prakarsa DPRD yang dibahas  | 7 Raperda    | 2 Raperda     | 28.57%  | jumlah raperda Usul Prakarsa DPRD yang dibahas  | 6 raperda     | 6 raperda     | 100,00% | Sekretariat DPRD   |
| 0002 Hearing/ Dialog Dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah Dan Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama         | Jumlah Hearing atau Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat atau Tokoh          | 76 kegiatan  | 73 kegiatan   | 96.05%  | jumlah hearing atau dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat atau tokoh agama    | 105 kali      | 106 kali      | 100,95% | Sekretariat DPRD   |
| 0003 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan  | Jumlah Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan   | 945 kali     | 847 kali      | 89.63%  | Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan Dewan   | 969 kali      | 1.072 kali    | 110,63% | Sekretariat DPRD   |
| 0004 Rapat-rapat Paripurna   | Jumlah Rapat Paripurna yang dilaksanakan  | 60 Kali      | 59 Kali       | 98.33%  | jumlah rapat paripurna  | 60 kali       | 40 kali       | 66,67%  | Sekretariat DPRD   |
| 0005 Kegiatan Reses  | Jumlah Kegiatan Reses untuk 50 Anggota DPRD   | 2 Kali       | 2 Kali        | 100.00% | jumlah kegiatan reses   | 3 kali        | 3 kali        | 100,00% | Sekretariat DPRD   |
| 0006 Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Dalam Daerah  | Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah   | 50 kali      | 13 kali       | 26.00%  | Jumlah kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah   | 50 Kali       | 19 Kali       | 38,00%  | Sekretariat DPRD   |

| Urusan-Program-Kegiatan   | Indikator  | 2014                            |                                 |         | 2015   |                                      |                                      | SKPD    |   |
|---|--|---------------------------------|---------------------------------|---------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---------|---|
|   |  | Target                          | Realisasi                       | Capaian | Indikator  | Target                               | Realisasi                            |         | Capaian                                   |
| 0007 Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD  | Jumlah Kunjungan Kerja dalam rangka Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD  | 229 kali                        | 229 kali                        | 100.00% | Jumlah peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD (SDM)   | 270 kali                             | 222 kali                             | 82,22%  | Sekretariat DPRD                          |
| 0008 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan   | Jumlah Peserta Sosialisasi   | 600 orang                       | 600 orang                       | 100.00% | Jumlah peserta sosialisasi   | 600 orang                            | 600 orang                            | 100,00% | Sekretariat DPRD                          |
| 0009 Pengkajian/Penelaahan Kebijakan Daerah   | Jumlah Dokumen Kebijakan Daerah yang Dikaji atau Ditelaah  | 4 Dokumen                       | 3 Dokumen                       | 75.00%  | Jumlah pengkajian/penelaahan kebijakan daerah  | 10 dokumen                           | 10 dokumen                           | 100,00% | Sekretariat DPRD                          |
| 0010 Fasilitas Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah                                     | Waktu Penyediaan Fasilitas Peningkatan Kapasitas DPRD  | 12 bulan                        | 12 bulan                        | 100.00% | Waktu penyediaan fasilitas peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah  | 12 Bulan                             | 12 Bulan                             | 100,00% | Sekretariat DPRD                          |
| <b>1.20.17 Program peningkatan dan Pengembangan</b>   | % Peningkatan PAD  | 22,22%                          | 18,42%                          | 82,90%  | % Peningkatan PAD  | (16,48%)<br>Rp.535.188<br>(dlm juta) | (22,01%)<br>Rp.727.879<br>(dlm juta) | 133,54% |   |
|   | % Peningkatan penerimaan daerah lainnya  | (11,72%)<br>304.600.131.<br>916 | (12,33%)<br>301.403.587.<br>856 | 105,20% | % Peningkatan penerimaan daerah lainnya  | (-1,48%)<br>Rp-43.124<br>(dlm juta)  | (-5,89%)<br>Rp-161.735<br>(dlm juta) |         |   |
|   | % Laporan yang selesai tepat waktu   | 80,00%                          | 100,00%                         | 125,00% | % Laporan yang selesai tepat waktu   | 80%                                  | 94%                                  | 117,65% |   |
| 0022 Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Dari Retribusi Ijin Gangguan        | Jumlah ijin gangguan yang diterbitkan  | 1000 ijin                       | 1.114 ijin                      | 111.40% | Prosentase Jumlah Permohonan Ijin Gangguan yang Ditindaklanjuti  | 100%                                 | 132300%                              | 132,30% | Badan Lingkungan Hidup                    |
| 0020 Peningkatan Fungsi Pembinaan Dalam Pengembangan BUMD   | monitoring 6 BUMD  | 12 bulan                        | 12 bulan                        | 100.00% | monitoring dan evaluasi  | 6 bumd                               | 6 bumd                               | 100,00% | Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah      |
| 0016 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah   | Waktu pelaksanaan manajemen aset/barang daerah   | 12 bulan                        | 12 bulan                        | 100.00% | Waktu pelaksanaan manajemen aset/barang daerah   | 12 Bulan                             | 12 Bulan                             | 100,00% | Bagian Perlengkapan                       |
| 0028 Evaluasi Dan Penghapusan Aset/barang Daerah  | Jumlah dokumen Evaluasi dan penghapusan aset/barang daerah   | 4 Dokumen                       | 5 Dokumen                       | 125.00% | Jumlah dokumen evaluasi dan penghapusan aset/barang daerah   | 8 Dokumen                            | 9 Dokumen                            | 112,50% | Bagian Perlengkapan                       |
| 0021 Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Tata Bangunan   | Jumlah pelayanan perizinan (IMB,izin Reklame dan Izin Layak Huni) yang diroses   | 6002 berkas                     | 13.131 berkas                   | 218.78% | Jumlah pelayanan perizinan (IMB,izin Reklame dan Izin Layak Huni) yang diroses   | 6.002 berkas                         | 12.858 berkas                        | 214,23% | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang          |
| 0034 Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Retribusi Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Pada Gedung Dan Perusahaan | Jumlah Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang dikenakan retribusi   | 76857 alat                      | 93.461 alat                     | 121.60% | Jumlah Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang dikenakan retribusi   | 84.543 Alat                          | 106.396 Alat                         | 125,85% | Dinas Kebakaran                           |
| 0032 Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Bidang Kebersihan Dan Pertamanan    | Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi pelayanan kebersihan di 31 kecamatan                                  | 12 bulan                        | 12 bulan                        | 100.00% | Jumlah pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi pelayanan kebersihan   | 31 kecamatan                         | 31 kecamatan                         | 100,00% | Dinas Kebersihan dan Pertamanan           |
| 0033 Pelayanan Pendaftaran Usaha Kepariwisata   | Jumlah ijin kepariwisataan yang diterbitkan  | 700 Ijin                        | 839 Ijin                        | 119.86% | Jumlah ijin kepariwisataan yang dikeluarkan  | 700 ijin                             | 708 ijin                             | 101,14% | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata           |
| 0027 Koordinasi Dan Konsultasi Pelaksanaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial Dan Bantuan Keuangan             | Waktu Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang dilaksanakan | 3 Kali                          | 3 Kali                          | 100.00% | Waktu Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang dilaksanakan | 12 Bulan                             | 12 Bulan                             | 100,00% | Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan |
| 0037 Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Keuangan  | Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan keuangan  | 1 Dokumen                       | 3 Dokumen                       | 300.00% | Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan keuangan  | 4 Dokumen                            | 7 Dokumen                            | 175,00% | Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan |
| 0038 Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah   | Jumlah Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah yang dilaksanakan   | 12 kali                         | 12 kali                         | 100.00% |  |                                      |                                      |         | Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan |
| 0039 Pengembangan Sistem Pajak Daerah   | Jumlah Sistem Pajak Daerah yang Dikembangkan   | 3 Sistem                        | 3 Sistem                        | 100.00% |  |                                      |                                      |         | Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan |
| 0040 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah  | Jumlah Dokumen Hasil Pendataan dan penetapan 749.595 wajib pajak daerah  | 108 Dokumen                     | 108 Dokumen                     | 100.00% |  |                                      |                                      |         | Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan |
| 0041 Penyusunan Dan Pelaporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD   | Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban APBD yang disusun  | 15 Dokumen                      | 15 Dokumen                      | 100.00% | Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban APBD yang disusun  | 15 Dokumen                           | 15 Dokumen                           | 100,00% | Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan |
| 0042 Pelayanan Penerimaan Dan Pengeluaran Kas   | Waktu Pelayanan Penerimaan dan Pengeluaran Kas yang disediakan   | 12 Bulan                        | 12 Bulan                        | 100.00% | Jumlah Berkas Pelayanan Penerimaan dan Pengeluaran Kas yang diterbitkan  | 45.000 berkas                        | 58.252 berkas                        | 129,45% | Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan |
| 0043 Monitoring Dan Evaluasi Pendapatan Dan Belanja Daerah  | Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pendapatan dan Belanja Daerah   | 12 Dokumen                      | 12 Dokumen                      | 100.00% | Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pendapatan dan Belanja Daerah   | 12 Dokumen                           | 12 Dokumen                           | 100,00% | Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan |



| Urusan-Program-Kegiatan   | 2014   |              |               |         | 2015   |               |               |         | SKPD                                      |
|---|--|--------------|---------------|---------|--|---------------|---------------|---------|---|
|   | Indikator  | Target       | Realisasi     | Capaian | Indikator  | Target        | Realisasi     | Capaian |   |
| 0044 Penelitian Dan Penilaian Surat Perintah Membayar (SPM) Serta Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) | Jumlah berkas SPM dan SKPP yang diteliti, dinilai, dan diterbitkan   | 18840 Berkas | 21,490 Berkas | 114,07% | Penelitian dan Penilaian Surat Perintah Membayar (SPM) serta Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) | 22.000 berkas | 30.585 berkas | 139,02% | Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan |
| 0045 Penyusunan APBD, Perubahan APBD Dan RAPBD  | Jumlah Dokumen APBD, Perubahan APBD Tahun 2014 dan RAPBD Tahun 2015  | 18 Dokumen   | 18 Dokumen    | 100,00% | Jumlah Dokumen Penyusunan APBD, Perubahan APBD dan RAPBD   | 18 Dokumen    | 15 Dokumen    | 83,33%  | Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan |
| 0046 Penyusunan Bahan Anggaran Kas  | Jumlah Dokumen Bahan Anggaran kas yang disusun   | 2 Dokumen    | 2 Dokumen     | 100,00% | Jumlah Dokumen Penyusunan Bahan Anggaran Kas   | 2 Dokumen     | 2 Dokumen     | 100,00% | Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan |
| 0050 Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pajak Reklame Dan Hiburan   |  |              |               |         | Jumlah dokumen Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Reklame, Hiburan   | 12 Dokumen    | 12 Dokumen    | 100,00% | Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan |
| 0051 Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pajak Hotel, Restoran Dan Air Tanah   |  |              |               |         | Jumlah dokumen Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hotel, Restoran dan Air Tanah                                      | 12 Dokumen    | 12 Dokumen    | 100,00% | Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan |
| 0052 Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pajak Parkir, PPJ PLN-PPJ Non PLN, PBB Dan BPHTB  |  |              |               |         | Jumlah dokumen Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Parkir, PPJ PLN - PPJ Non PLN, PBB dan BPHTB                       | 12 Dokumen    | 12 Dokumen    | 100,00% | Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan |
| 0053 Pelayanan Pengurangan, Angsuran, Restitusi Dan Kompensasi Pajak Daerah   |  |              |               |         | Waktu Pelaksanaan kegiatan Pelayanan Pengurangan, Angsuran, Restitusi dan Kompensasi Pajak Daerah                        | 12 bulan      | 12 bulan      | 100,00% | Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan |
| 0054 Penagihan Pajak Daerah   |  |              |               |         | Waktu Pelaksanaan kegiatan Penagihan Pajak Daerah  | 12 bulan      | 12 bulan      | 100,00% | Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan |
| 0055 Koordinasi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) Dan Pendapatan Lain-Lain                                       |  |              |               |         | Jumlah dokumen kegiatan Koordinasi Bagi Hasil Pajak yang dilaksanakan  | 12 Dokumen    | 12 Dokumen    | 100,00% | Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan |
| 0047 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Bagi Hasil Pajak  | Jumlah kegiatan Koordinasi Bagi Hasil Pajak yang dilaksanakan  | 4 Kali       | 4 Kali        | 100,00% |  |               |               |         | Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan |
| 0048 Koordinasi dan Evaluasi Pendapatan Lain-lain dan Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)  | Jumlah Koordinasi dan Evaluasi Pendapatan Lain-lain dan Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) yang dilaksanakan                 | 4 Kali       | 4 Kali        | 100,00% |  |               |               |         | Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan |
| 0049 Pelaksanaan Penagihan, Pengurangan, Angsuran, Restitusi dan Kompensasi Pajak Daerah                                      | Jumlah kegiatan penagihan dan pelayanan pengurangan, angsuran, restitusi dan kompensasi pajak daerah yang dilaksanakan | 12 Bulan     | 12 Bulan      | 100,00% |  |               |               |         | Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan |
| 0023 Pendataan Dan Penelitian Terhadap Ijin Pemakaian Tanah   | Jumlah dokumen hasil pendataan dan penelitian terhadap ijin pemakaian tanah yang dikelola                              | 12 Buku      | 12 Buku       | 100,00% | Jumlah dokumen hasil Pendataan dan Penelitian terhadap ijin pemakaian tanah yang dikelola                                | 12 buku       | 12 buku       | 100,00% | Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah      |
| 0024 Pendataan Dan Inventarisasi Rumah Ber-SIP Dan Rumah Sewa Aset Pemerintah Kota Surabaya                                   | Jumlah laporan pendataan dan inventarisasi rumah ber-SIP dan rumah sewa aset Pemkot Surabaya                           | 24 Buku      | 6 Buku        | 25,00%  | Jumlah laporan pendataan dan inventarisasi rumah ber-SIP dan rumah sewa aset Pemkot Surabaya                             | 24 buku       | 24 buku       | 100,00% | Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah      |
| 0025 Monitoring Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya  | Jumlah laporan monitoring pengelolaan bangunan dan tanah aset Pemkot   | 12 Dokumen   | 12 Dokumen    | 100,00% | Jumlah laporan monitoring pengelolaan bangunan dan tanah aset Pemkot   | 12 dokumen    | 12 dokumen    | 100,00% | Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah      |
| 0026 Pengawasan Dan Pengelolaan Gedung Sewa Dan Jembatan penyeberangan Orang (JPO)  | Jumlah laporan Pengawasan dan pengelolaan Gedung sewa, Jembatan penyeberangan Orang (JPO)                              | 12 Dokumen   | 12 Dokumen    | 100,00% | Jumlah laporan Pengawasan dan pengelolaan gedung sewa, jembatan penyeberangan orang (JPO)                                | 12 dokumen    | 12 dokumen    | 100,00% | Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah      |
| 0029 Pelayanan UPTD Metrologi Legal   | Waktu pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan 20 jenis pendukung pelayanan UPTD Metrologi Legal                         | 12 bulan     | 12 bulan      | 100,00% | Waktu pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan 20 jenis pendukung pelayanan UPTD Metrologi Legal                           | 12 Bulan      | 12 Bulan      | 100,00% | Dinas Perdagangan dan Perindustrian       |
| 0030 Pelayanan UPTD Pasar Turi  | Waktu pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan 6 jenis pendukung pelayanan UPTD Pasar Turi                               | 12 bulan     | 12 bulan      | 100,00% |  |               |               |         | Dinas Perdagangan dan Perindustrian       |
| 0031 Penanganan dan Penanggulangan Dampak Kebakaran Pasar Turi  | Jumlah TPS Pasar Turi yang terbangun   | 580 unit     | 0 unit        | 0,00%   |  |               |               |         | Dinas Perdagangan dan Perindustrian       |
| 0035 Pengelolaan Parkir   | Waktu pengelolaan parkir   | 12 bulan     | 12 bulan      | 100,00% | Waktu pengelolaan parkir   | 12 Bulan      | 12 Bulan      | 100,00% | Dinas Perhubungan                         |

| Urusan-Program-Kegiatan   | Indikator   | 2014           |                  |         | 2015  |                   |                   | SKPD    |   |
|---|---|----------------|------------------|---------|---|-------------------|-------------------|---------|---|
|   |   | Target         | Realisasi        | Capaian | Indikator   | Target            | Realisasi         |         | Capaian   |
| 0036 Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah Bidang Perhubungan   | Jumlah blanko dan karcis retribusi di bidang perhubungan yang dicetak                                   | 3000960 lembar | 2,033,460 lembar | 67,76%  | Jumlah blanko dan karcis retribusi di bidang perhubungan yang dicetak                                       | 21.799.564 Lembar | 21.779.000 Lembar | 99,91%  | Dinas Perhubungan   |
| <b>1.20.20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan</b>                              | Jumlah kasus pelanggaran disiplin aparatur  | 203            | 27               | 186,70% | Jumlah kasus pelanggaran disiplin aparatur  | 197               | 27                | 186,29% | Inspektorat, Badan Kepegawaian dan Diklat serta Bagian Bina Program |
| 0013 Penerapan Disiplin Pegawai   | Jumlah pelanggaran disiplin PNS yang ditindak lanjuti dengan SK Walikota                                | 100 SK         | 28 SK            | 28,00%  | Jumlah pelanggaran disiplin PNS yang ditindak lanjuti dengan SK Walikota                                    | 50 SK             | 20 SK             | 40,00%  | Badan Kepegawaian dan Diklat  |
| 0014 Pengendalian Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Pemerintahan   | Waktu pelaksanaan pengendalian Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Pemerintahan selama               | 12 Bulan       | 12 Bulan         | 100,00% | Waktu pelaksanaan pengendalian Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Pemerintahan selama                   | 12 Bulan          | 12 Bulan          | 100,00% | Bagian Bina Program   |
| 0015 Penyusunan Evaluasi Dan Laporan Kinerja Belanja Langsung   | Dokumen Evaluasi dan Laporan Kinerja Belanja Langsung yang disusun sebanyak                             | 100 Buku       | 100 Buku         | 100,00% | Dokumen Evaluasi dan Laporan Kinerja Belanja Langsung yang disusun sebanyak                                 | 100 Buku          | 147 Buku          | 147,00% | Bagian Bina Program   |
| 0005 Inventarisasi Temuan Pengawasan  | Jumlah dokumen Inventarisasi dan Evaluasi hasil temuan pengawasan                                       | 2 Dokumen      | 2 Dokumen        | 100,00% | Jumlah laporan kegiatan Inventarisasi dan Evaluasi hasil temuan pengawasan                                  | 2 Dokumen         | 2 Dokumen         | 100,00% | Inspektorat   |
| 0007 Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif  | Jumlah Laporan hasil Koordinasi Pengawasan  | 2 Dokumen      | 2 Dokumen        | 100,00% | Jumlah kegiatan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif   | 2 Dokumen         | 3 Dokumen         | 150,00% | Inspektorat   |
| 0009 Penilaian Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pengawasan  | Jumlah Aparatur yang mendapatkan Penilaian Angka Kredit   | 27 Orang       | 25 Orang         | 92,59%  | Jumlah kegiatan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pengawasan terhadap                                | 2 kali pertahun   | 2 kali pertahun   | 100,00% | Inspektorat   |
| 0010 Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah I Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya   | Jumlah Laporan kegiatan pelaksanaan dan penanganan kasus pada inspektur pembantu wilayah I              | 124 Laporan    | 68 Laporan       | 54,84%  | Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Pengawasan dan Penanganan Kasus pada Inspektorat Pembantu Wilayah I pada   | 107 Laporan       | 102 Laporan       | 95,33%  | Inspektorat   |
| 0011 Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah II Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya  | Jumlah pelaksanaan dan penanganan kasus pada inspektur pembantu wilayah II                              | 124 Laporan    | 93 Laporan       | 75,00%  | Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Pengawasan dan Penanganan Kasus pada Inspektorat Pembantu Wilayah I pada   | 107 Laporan       | 104 Laporan       | 97,20%  | Inspektorat   |
| 0012 Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah III Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya | Jumlah pelaksanaan dan penanganan kasus pada inspektur pembantu wilayah III di lingkungan Kota Surabaya | 123 Laporan    | 68 Laporan       | 55,28%  | Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Pengawasan dan Penanganan Kasus pada Inspektorat Pembantu Wilayah III pada | 106 Laporan       | 103 Laporan       | 97,17%  | Inspektorat   |
| 0016 Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah I Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya                            |   |                |                  |         | Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring pada inspektorat pembantu wilayah I pada                        | 16 Laporan        | 16 Laporan        | 100,00% | Inspektorat   |
| 0017 Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah II Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya                           |   |                |                  |         | Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring pada inspektorat pembantu wilayah II pada                       | 16 Laporan        | 17 Laporan        | 106,25% | Inspektorat   |
| 0018 Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah III Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya                          |   |                |                  |         | Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring pada inspektorat pembantu wilayah III pada                      | 16 Laporan        | 16 Laporan        | 100,00% | Inspektorat   |
| <b>1.20.24 Program Mengintensifkan Penanganan</b>   | Persentase jumlah keluhan yang selesai di tindak lanjuti  | 100%           | 100%             | 100%    | Persentase jumlah keluhan yang selesai di tindak lanjuti  | 100%              | 100,00%           | 100,00% | Dinas Komunikasi dan Informatika                                    |
| 0002 Pelayanan Keluhan/Pengaduan Masyarakat   | Waktu pelayanan keluhan/pengaduan masyarakat  | 12 Bulan       | 12 Bulan         | 100,00% | Waktu pelayanan keluhan/pengaduan masyarakat  | 12 Bulan          | 12 Bulan          | 100,00% | Dinas Komunikasi dan Informatika                                    |
| <b>1.20.25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah</b>  | Persentase MOU kerjasama antar Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti dengan program kerja              | 94,44%         | 97,30%           | 103,03% | Persentase MOU kerjasama antar Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti dengan program kerja                  | 100%              | 100,00%           | 100,00% | Bagian Kerjasama  |
| 0005 Fasilitasi/pembentukan Kerjasama Antar Lembaga   | Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Kerjasama Terhadap 8 Lembaga                                     | 8 Kegiatan     | 10 Kegiatan      | 125,00% | Jumlah Kegiatan Pembentukan dan Tindak Lanjut Kerjasama Dengan Lembaga atau Instansi di Dalam Negeri        | 8 Kegiatan        | 19 Kegiatan       | 237,50% | Bagian Kerjasama  |
| 0006 Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah  | Jumlah Kegiatan Fasilitasi / Pembentukan Kerjasama Antar Daerah   | 13 Kegiatan    | 13 Kegiatan      | 100,00% | Jumlah Kegiatan Pembentukan dan Tindak Lanjut Kerjasama Antar Daerah  | 13 Kegiatan       | 13 Kegiatan       | 100,00% | Bagian Kerjasama  |



| Urusan-Program-Kegiatan   | 2014  |                           |                           |         | 2015  |                  |                  |         | SKPD                         |
|---|---|---------------------------|---------------------------|---------|---|------------------|------------------|---------|------------------------------|
|   | Indikator   | Target                    | Realisasi                 | Capaian | Indikator   | Target           | Realisasi        | Capaian |                              |
| 0007 Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Luar Negeri   | Jumlah Kegiatan Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Luar Negeri  | 14 Kegiatan               | 14 Kegiatan               | 100.00% | Jumlah Kegiatan Pembentukan dan Tindak Lanjut Kerjasama Luar Negeri   | 14 Kegiatan      | 17 Kegiatan      | 121,43% | Bagian Kerjasama             |
| 0008 Fasilitasi Delegasi Internasional Di Dalam Negeri  | Jumlah Kegiatan fasilitasi delegasi internasional yang Dilaksanakan   | 10 Kegiatan               | 11 Kegiatan               | 110.00% | Jumlah Kegiatan Fasilitasi Delegasi Internasional di Dalam Negeri yang Dilaksanakan   | 10 Kegiatan      | 13 Kegiatan      | 130,00% | Bagian Kerjasama             |
| 0009 Penyusunan Kajian Dan Laporan Kerjasama  | Jumlah Dokumen Kajian dan Laporan Hasil Kerjasama Daerah Kota Surabaya yang tersusun  | 10 Dokumen                | 10 Dokumen                | 100.00% | Jumlah Dokumen Kajian dan Laporan Hasil Kerjasama Daerah Kota Surabaya yang tersusun  | 6 Dokumen        | 6 Dokumen        | 100,00% | Bagian Kerjasama             |
| <b>1.20.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>  | Persentase rancangan produk hukum yang dapat diselesaikan   | 100,00%                   | 100,00%                   | 100,00% | Persentase rancangan produk hukum yang dapat diselesaikan   | 100%             | 100%             | 100,00% | Bagian Hukum                 |
| 0001 Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan   | Jumlah Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan Yang Tertangani  | 65 Perkara/Kasus          | 65 Perkara/Kasus          | 100.00% | Jumlah Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan Yang Tertangani  | 65 perkara/kasus | 65 perkara/kasus | 100,00% | Bagian Hukum                 |
| 0002 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan  | Jumlah rancangan produk hukum daerah yang disusun   | 70 Rancangan Produk Hukum | 89 Rancangan Produk Hukum | 127.14% | Jumlah rancangan produk hukum daerah yang disusun   | 70 rancangan     | 80 rancangan     | 114,29% | Bagian Hukum                 |
| 0004 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan  | Jumlah Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum Daerah Yang Berlaku untuk 800 Orang  | 8 Kegiatan                | 8 Kegiatan                | 100.00% | Jumlah Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum Daerah Yang Berlaku untuk 800 Orang  | 8 kegiatan       | 8 kegiatan       | 100,00% | Bagian Hukum                 |
| 0005 Publikasi Peraturan Perundang-undangan   | Jumlah produk hukum daerah yang dipublikasikan melalui lembaran daerah dan berita daerah  | 70 Produk Hukum           | 100 Produk Hukum          | 142.86% | Jumlah produk hukum daerah yang dipublikasikan melalui lembaran daerah dan berita daerah  | 70 Produk Hukum  | 73 Produk Hukum  | 104,29% | Bagian Hukum                 |
| 0006 Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan Yang Baru, lebih Tinggi Dari Keserasian Antar Peraturan Perundang-undangan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Kajian 12 Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan Yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian Antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah | 12 Dokumen                | 12 Dokumen                | 100.00% | Jumlah Dokumen Hasil Kajian 12 Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian Antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah | 12 dokumen       | 12 dokumen       | 100,00% | Bagian Hukum                 |
| <b>1.20.29 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur</b>  | Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat struktural  | 96,71%                    | 79,81%                    | 82,53%  | Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat struktural  | 99,28%           | 84,32%           | 84,93%  |                              |
|   | Persentase penataan jabatan struktural  | 90,64%                    | 88,78%                    | 97,95%  | Persentase penataan jabatan struktural  | 92,95%           | 96,20%           | 103,50% |                              |
| 0001 Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah  | Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Prajabatan   | 342 orang                 | 342 orang                 | 100.00% | Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Prajabatan   | 1.221 orang      | 1.178 orang      | 96,48%  | Badan Kepegawaian dan Diklat |
| 0002 Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah  | Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Struktural bagi PNS Daerah   | 37 orang                  | 25 orang                  | 67.57%  | Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Struktural bagi PNS Daerah   | 60 Orang         | 60 Orang         | 100,00% | Badan Kepegawaian dan Diklat |
| 0003 Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Tugas Dan Fungsi bagi PNS Daerah   | Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah  | 1414 orang                | 1.283 orang               | 90.74%  | Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah  | 766 orang        | 869 orang        | 113,45% | Badan Kepegawaian dan Diklat |
| 0004 Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah  | Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Fungsional   | 1030 orang                | 1.150 orang               | 111.65% | Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Fungsional   | 201 orang        | 236 orang        | 117,41% | Badan Kepegawaian dan Diklat |
| 0006 Ujian Dinas Tingkat I  | Jumlah Peserta yang mengikuti Ujian Dinas Tingkat I   | 45 orang                  | 28 orang                  | 62.22%  | Jumlah Peserta yang mengikuti Ujian Dinas Tingkat I   | 31 Orang         | 31 Orang         | 100,00% | Badan Kepegawaian dan Diklat |
| 0007 Pembinaan Pola Karir Dan Bakat PNS   | Jumlah Pegawai yang dibina karir dan bakatnya   | 1007 orang                | 1.007 orang               | 100.00% | Jumlah Pegawai yang dibina karir dan bakatnya   | 525 orang        | 520 orang        | 99,05%  | Badan Kepegawaian dan Diklat |
| 0008 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kependidikan Daerah  | Sistem Informasi Kepegawaian Daerah yang dikembangkan   | 1 sistem                  | 1 sistem                  | 100.00% | Sistem Informasi Kepegawaian Daerah yang dikembangkan   | 1 Sistem         | 1 Sistem         | 100,00% | Badan Kepegawaian dan Diklat |
| 0009 Pemberian penghargaan bagi PNS   | Jumlah PNS yang diberi penghargaan  | 750 orang                 | 661 orang                 | 88.13%  |   |                  |                  |         | Badan Kepegawaian dan Diklat |
| 0011 Tes Kesehatan bagi Pegawai   | Jumlah Peserta yang mengikuti Tes Kesehatan   | 540 orang                 | 540 orang                 | 100.00% | Jumlah Peserta yang mengikuti Tes Kesehatan   | 550 orang        | 560 orang        | 101,82% | Badan Kepegawaian dan Diklat |
| 0012 Seleksi Penerimaan Calon PNS Dan Administrasi Calon Praja IPDN   | Jumlah Peserta yang mengikuti seleksi CPNS dan Administrasi Calon Peserta IPDN  | 19060 orang               | 16.117 orang              | 84.56%  | Jumlah Peserta yang mengikuti seleksi CPNS dan Administrasi Calon Peserta IPDN  | 10.080 orang     | 0 orang          | 0,00%   | Badan Kepegawaian dan Diklat |
| 0013 Peningkatan Wawasan Aparatur Dan Pemberian Bantuan Tugas Belajar   | Jumlah Pegawai ditingkatkan wawasannya  | 1268 orang                | 1.046 orang               | 82.49%  | Jumlah Pegawai ditingkatkan wawasannya  | 225 orang        | 225 orang        | 100,00% | Badan Kepegawaian dan Diklat |
| 0014 Penempatan Pegawai Dan Promosi Jabatan   | Jumlah PNS yang ditempatkan dan mengikuti fit and proper test   | 897 orang                 | 901 orang                 | 100.45% | Jumlah PNS yang ditempatkan dan mengikuti fit and proper test   | 512 orang        | 682 orang        | 133,20% | Badan Kepegawaian dan Diklat |
| 0015 Penataan Administrasi Kepegawaian  | Waktu Pelaksanaan Penataan Sistem Administrasi Kepegawaian  | 12 Bulan                  | 12 Bulan                  | 100.00% | Waktu Pelaksanaan Penataan Administrasi Kepegawaian   | 12 bulan         | 12 bulan         | 100,00% | Badan Kepegawaian dan Diklat |
| 0016 Pelayanan Administrasi Kepegawaian   | Waktu pelaksanaan 4 jenis kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian   | 12 bulan                  | 12 bulan                  | 100.00% | Waktu pelaksanaan 4 jenis kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian   | 12 bulan         | 12 bulan         | 100,00% | Badan Kepegawaian dan Diklat |

| Urusan-Program-Kegiatan  | 2014   |                |                |         | 2015   |                    |                    |         | SKPD                               |
|--|--|----------------|----------------|---------|--|--------------------|--------------------|---------|------------------------------------|
|  | Indikator  | Target         | Realisasi      | Capaian | Indikator  | Target             | Realisasi          | Capaian |                                    |
| 1.20.31 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan                   | Prosentase pemrosesan produk inti (core Business) yang memiliki prosedur tetap                 | 44,00%         | 55,00%         | 125,00% | Prosentase pemrosesan produk inti (core Business) yang memiliki prosedur tetap   | 49,00%             | 77,00%             | 157%    |                                    |
|  | Prosentase SKPD yang telah melaksanakan hasil analisa jabatan dan beban kerja                  | 28,00%         | 29,17%         | 104,18% | Prosentase SKPD yang telah melaksanakan hasil analisa jabatan dan beban kerja  | 35,00%             | 57,00%             | 163%    |                                    |
| 0001 Pelaksanaan Analisa Jabatan, Beban Kerja Dan Standart Kompetensi      | Jumlah Dokumen Analisa Jabatan, Beban Kerja dan Standart Kompetensi pada 5 SKPD                | 9 Dokumen      | 9 Dokumen      | 100,00% | Jumlah Dokumen Analisa Jabatan, Beban Kerja dan Standart Kompetensi yang disusun   | 9 Dokumen          | 9 Dokumen          | 100,00% | Bagian Organisasi dan Tata Laksana |
| 0002 Pelaksanaan Analisa Kelembagaan                                       | Jumlah Dokumen Analisa Kelembagaan yang disusun  | 2 Dokumen      | 3 Dokumen      | 150,00% | Jumlah dokumen pelaksanaan analisa kelembagaan yang disusun  | 1 Dokumen          | 1 Dokumen          | 100,00% | Bagian Organisasi dan Tata Laksana |
| 0003 Peningkatan Sistem Dan Prosedur Administrasi Pemerintahan             | Jumlah Kegiatan Peningkatan Sistem dan Prosedur Administrasi Pemerintahan                      | 2 Kegiatan     | 2 Kegiatan     | 100,00% | Jumlah Dokumen Hasil Pendampingan Penyusunan SOP SKPD dan Pengkajian Sistem dan Prosedur Administrasi Pemerintahan                       | 7 Dokumen          | 7 Dokumen          | 100,00% | Bagian Organisasi dan Tata Laksana |
| 0005 Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat                                 | Jumlah Unit Kerja yang Diukur IKM-nya  | 114 unit kerja | 115 unit kerja | 100,88% | Jumlah unit pelayanan yang dilakukan survey kepuasan masyarakat  | 114 Unit Pelayanan | 125 Unit Pelayanan | 109,65% | Bagian Organisasi dan Tata Laksana |
| 0008 Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan         | Jumlah Dokumen SAKIP yang disusun  | 1 Dokumen      | 1 Dokumen      | 100,00% | Jumlah dokumen LAKIP Kota yang disusun   | 1 Dokumen          | 1 Dokumen          | 100,00% | Bagian Organisasi dan Tata Laksana |
| 0009 Peningkatan Sistem Dan Mekanisme Pelayanan                            | Jumlah Kegiatan Peningkatan Sistem dan Mekanisme Pelayanan                                     | 3 Kegiatan     | 3 Kegiatan     | 100,00% | Jumlah Dokumen Hasil Pendampingan Pemrosesan Produk Inti   | 6 Dokumen          | 6 Dokumen          | 100,00% | Bagian Organisasi dan Tata Laksana |
| 0010 Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi                              | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi                                  | 2 Dokumen      | 2 Dokumen      | 100,00% | Jumlah dokumen evaluasi road map reformasi birokrasi Pemerintah Kota Surabaya dan laporan pengendalian manajemen organisasi pemerintahan | 2 Dokumen          | 2 Dokumen          | 100,00% | Bagian Organisasi dan Tata Laksana |
| 0011 Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Tata Naskah Dinas                 | Jumlah SKPD yang Dimonitor dan Dievaluasi Pelaksanaan Tata Naskah Dinas                        | 12 SKPD        | 19 SKPD        | 158,33% | Jumlah SKPD yang Dimonitor dan Dievaluasi Pelaksanaan Tata Naskah Dinas  | 12 SKPD            | 12 SKPD            | 100,00% | Bagian Organisasi dan Tata Laksana |
| 0014 Pelayanan Unit Layanan Pengadaan                                      | Jumlah paket pengadaan barang/jasa yang terlayani  | 1200 Paket     | 1,575 Paket    | 131,25% | Jumlah paket pengadaan barang/jasa yang terlayani  | 1.200 Paket        | 1.283 Paket        | 106,92% | Bagian Perlengkapan                |
| 0015 Penyusunan Analisa Kebutuhan Dan Harga Satuan Kebutuhan Barang Daerah | Jumlah dokumen analisa kebutuhan dan harga satuan barang daerah yang disusun                   | 1 Dokumen      | 1 Dokumen      | 100,00% | Jumlah dokumen analisa kebutuhan dan harga satuan barang daerah yang disusun   | 1 Dokumen          | 1 Dokumen          | 100,00% | Bagian Perlengkapan                |
| 0016 Pengadaan Pakaian Dinas Dan Kelengkapannya                            | Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang tersedia  | 8096 Stel      | 8,137 Stel     | 100,51% | Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang tersedia  | 8.510 Stel         | 8.520 Stel         | 100,12% | Bagian Perlengkapan                |
| 0012 Pemeliharaan Dan Pengadaan Sarana Sistem Persandian                   | Waktu pelaksanaan 2 jenis pemeliharaan dan pengadaan 50 item sarana sistem persandian          | 12 bulan       | 12 bulan       | 100,00% | Waktu pelaksanaan 2 jenis pemeliharaan dan pengadaan 50 item sarana sistem persandian  | 12 bulan           | 12 bulan           | 100,00% | Bagian Umum dan Protokol           |
| 0013 Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah  | Waktu pelaksanaan penyediaan 5 jenis pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 12 bulan       | 12 bulan       | 100,00% | Waktu pelaksanaan penyediaan 5 jenis pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah   | 12 bulan           | 12 bulan           | 100,00% | Bagian Umum dan Protokol           |
| 0141 Operasional Kelurahan Asemrowo  | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan  | 12 bulan       | 12 bulan       | 100,00% | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan  | 12 bulan           | 12 bulan           | 100,00% | Kec. Asemrowo                      |
| 0142 Operasional Kelurahan Genting   | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan  | 12 bulan       | 12 bulan       | 100,00% |  |                    |                    |         | Kec. Asemrowo                      |
| 0143 Operasional Kelurahan Gregeg  | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan  | 12 bulan       | 12 bulan       | 100,00% |  |                    |                    |         | Kec. Asemrowo                      |
| 0144 Operasional Kelurahan Kalianak  | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan  | 12 bulan       | 12 bulan       | 100,00% |  |                    |                    |         | Kec. Asemrowo                      |
| 0145 Operasional Kelurahan Tambaklangon                                    | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan  | 12 bulan       | 12 bulan       | 100,00% |  |                    |                    |         | Kec. Asemrowo                      |
| 0143 Operasional Kelurahan Tambak Sarioso                                  |  |                |                |         | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan  | 12 bulan           | 12 bulan           | 100,00% | Kec. Asemrowo                      |
| 0144 Operasional Kelurahan Genting Kalianak                                |  |                |                |         | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan  | 12 bulan           | 12 bulan           | 100,00% | Kec. Asemrowo                      |
| 0152 Operasional Kelurahan Kandungan                                       | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan  | 12 bulan       | 12 bulan       | 100,00% | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan  | 12 bulan           | 12 bulan           | 100,00% | Kec. Benowo                        |
| 0153 Operasional Kelurahan Klakahrejo                                      | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan  | 12 bulan       | 12 bulan       | 100,00% |  |                    |                    |         | Kec. Benowo                        |
| 0154 Operasional Kelurahan Romokalisari                                    | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan  | 12 bulan       | 12 bulan       | 100,00% | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan  | 12 bulan           | 12 bulan           | 100,00% | Kec. Benowo                        |
| 0155 Operasional Kelurahan Sememi  | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan  | 12 bulan       | 12 bulan       | 100,00% | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan  | 12 bulan           | 12 bulan           | 100,00% | Kec. Benowo                        |
| 0156 Operasional Kelurahan Tambak Osowilangon                              | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan  | 12 bulan       | 12 bulan       | 100,00% | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan  | 12 bulan           | 12 bulan           | 100,00% | Kec. Benowo                        |
| 0032 Operasional Kelurahan Alon-alon Contong                               | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan  | 12 bulan       | 12 bulan       | 100,00% | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan  | 12 bulan           | 12 bulan           | 100,00% | Kec. Bubutan                       |
| 0033 Operasional Kelurahan Bubutan   | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan  | 12 bulan       | 12 bulan       | 100,00% | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan  | 12 bulan           | 12 bulan           | 100,00% | Kec. Bubutan                       |
| 0034 Operasional Kelurahan Gundih  | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan  | 12 bulan       | 12 bulan       | 100,00% | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan  | 12 bulan           | 12 bulan           | 100,00% | Kec. Bubutan                       |
| 0035 Operasional Kelurahan Jepara  | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan  | 12 bulan       | 12 bulan       | 100,00% | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan  | 12 bulan           | 12 bulan           | 100,00% | Kec. Bubutan                       |



| Urusan-Program-Kegiatan                         | Indikator                                   | 2014     |           |         | 2015  |          |           | SKPD    |                     |
|---|---|----------|-----------|---------|---|----------|-----------|---------|---------------------|
|   |   | Target   | Realisasi | Capaian | Indikator                                   | Target   | Realisasi |         | Capaian             |
| 0039 Operasional Kelurahan Tambak Weredi        | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan | 12 bulan | 12 bulan  | 100,00% | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan | 12 bulan | 12 bulan  | 100,00% | Kec. Kenjeran       |
| 0040 Operasional Kelurahan Tanah Kalikedinding  | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan | 12 bulan | 12 bulan  | 100,00% | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan | 12 bulan | 12 bulan  | 100,00% | Kec. Kenjeran       |
| 0051 Operasional Kelurahan Dupak                | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan | 12 bulan | 12 bulan  | 100,00% | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan | 12 bulan | 12 bulan  | 100,00% | Kec. Krembangan     |
| 0052 Operasional Kelurahan Kemavoran            | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan | 12 bulan | 12 bulan  | 100,00% | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan | 12 bulan | 12 bulan  | 100,00% | Kec. Krembangan     |
| 0053 Operasional Kelurahan Krembangan Selatan   | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan | 12 bulan | 12 bulan  | 100,00% | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan | 12 bulan | 12 bulan  | 100,00% | Kec. Krembangan     |
| 0054 Operasional Kelurahan Morokrembangan       | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan | 12 Bulan | 12 Bulan  | 100,00% | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan | 12 bulan | 12 bulan  | 100,00% | Kec. Krembangan     |
| 0055 Operasional Kelurahan Perak Barat          | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan | 12 bulan | 12 bulan  | 100,00% | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan | 12 bulan | 12 bulan  | 100,00% | Kec. Krembangan     |
| 0157 Operasional Kelurahan Banokinan            | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan | 12 bulan | 12 bulan  | 100,00% | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan | 12 bulan | 12 bulan  | 100,00% | Kec. Lakarsantri    |
| 0158 Operasional Kelurahan Jeruk                | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan | 12 bulan | 12 bulan  | 100,00% | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan | 12 Bulan | 12 Bulan  | 100,00% | Kec. Lakarsantri    |
| 0159 Operasional Kelurahan Lakarsantri          | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan | 12 bulan | 12 bulan  | 100,00% | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan | 12 Bulan | 12 Bulan  | 100,00% | Kec. Lakarsantri    |
| 0160 Operasional Kelurahan Lidah Kulon          | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan | 12 bulan | 12 bulan  | 100,00% | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan | 12 Bulan | 12 Bulan  | 100,00% | Kec. Lakarsantri    |
| 0161 Operasional Kelurahan Lidah Watan          | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan | 12 bulan | 12 bulan  | 100,00% | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan | 12 Bulan | 12 Bulan  | 100,00% | Kec. Lakarsantri    |
| 0162 Operasional Kelurahan Sumur Welut          | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan | 12 bulan | 12 bulan  | 100,00% | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan | 12 Bulan | 12 Bulan  | 100,00% | Kec. Lakarsantri    |
| 0092 Operasional Kelurahan Dukuh Sutorejo       | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan | 12 Bulan | 12 Bulan  | 100,00% | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan | 12 Bulan | 12 Bulan  | 100,00% | Kec. Mulyorejo      |
| 0093 Operasional Kelurahan Kaliudan             | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan | 12 Bulan | 12 Bulan  | 100,00% | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan | 12 Bulan | 12 Bulan  | 100,00% | Kec. Mulyorejo      |
| 0094 Operasional Kelurahan Kalisari             | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan | 12 bulan | 12 bulan  | 100,00% | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan | 12 bulan | 12 bulan  | 100,00% | Kec. Mulyorejo      |
| 0095 Operasional Kelurahan Kejawan Putih Tambak | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan | 12 bulan | 12 bulan  | 100,00% | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan | 12 bulan | 12 bulan  | 100,00% | Kec. Mulyorejo      |
| 0096 Operasional Kelurahan Manyar Sabranan      | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan | 12 Bulan | 12 Bulan  | 100,00% | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan | 12 bulan | 12 bulan  | 100,00% | Kec. Mulyorejo      |
| 0097 Operasional Kelurahan Mulyorejo            | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan | 12 Bulan | 12 Bulan  | 100,00% | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan | 12 bulan | 12 bulan  | 100,00% | Kec. Mulyorejo      |
| 0041 Operasional Kelurahan Bonokaran            | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan | 12 bulan | 12 bulan  | 100,00% | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan | 12 bulan | 12 bulan  | 100,00% | Kec. Pabean Cantian |
| 0042 Operasional Kelurahan Krembangan Utara     | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan | 12 bulan | 12 bulan  | 100,00% | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan | 12 bulan | 12 bulan  | 100,00% | Kec. Pabean Cantian |
| 0043 Operasional Kelurahan Nyampungan           | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan | 12 bulan | 12 bulan  | 100,00% | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan | 12 bulan | 12 bulan  | 100,00% | Kec. Pabean Cantian |
| 0044 Operasional Kelurahan Perak Timur          | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan | 12 bulan | 12 bulan  | 100,00% | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan | 12 bulan | 12 bulan  | 100,00% | Kec. Pabean Cantian |
| 0045 Operasional Kelurahan Perak Utara          | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan | 12 bulan | 12 bulan  | 100,00% | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan | 12 bulan | 12 bulan  | 100,00% | Kec. Pabean Cantian |
| 0167 Operasional Kelurahan Babat Jerawat        | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan | 12 bulan | 12 bulan  | 100,00% | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan | 12 bulan | 12 bulan  | 100,00% | Kec. Pakal          |
| 0168 Operasional Kelurahan Benowo               | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan | 12 bulan | 12 bulan  | 100,00% | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan | 12 bulan | 12 bulan  | 100,00% | Kec. Pakal          |
| 0169 Operasional Kelurahan Pakal                | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan | 12 bulan | 12 bulan  | 100,00% | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan | 12 bulan | 12 bulan  | 100,00% | Kec. Pakal          |
| 0170 Operasional Kelurahan Sumberejo            | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan | 12 bulan | 12 bulan  | 100,00% |   |          |           |         | Kec. Pakal          |
| 0171 Operasional Kelurahan Tambakdono           | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan | 12 bulan | 12 bulan  | 100,00% |   |          |           |         | Kec. Pakal          |
| 0170 Operasional Kelurahan Sumber Rejo          |   |          |           |         | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan | 12 bulan | 12 bulan  | 100,00% | Kec. Pakal          |
| 0031 Operasional Kelurahan Wonorejo             | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan | 12 bulan | 12 bulan  | 100,00% | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan | 12 Bulan | 12 Bulan  | 100,00% | Kec. Rungkut        |
| 0070 Operasional Kelurahan Kalirungkut          | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan | 12 bulan | 12 bulan  | 100,00% | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan | 12 Bulan | 12 Bulan  | 100,00% | Kec. Rungkut        |
| 0071 Operasional Kelurahan Kedung Baruk         | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan | 12 bulan | 12 bulan  | 100,00% | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan | 12 Bulan | 12 Bulan  | 100,00% | Kec. Rungkut        |
| 0072 Operasional Kelurahan Medokan Ayu          | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan | 12 bulan | 12 bulan  | 100,00% | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan | 12 Bulan | 12 Bulan  | 100,00% | Kec. Rungkut        |
| 0073 Operasional Kelurahan Penjaringsari        | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan | 12 bulan | 12 bulan  | 100,00% | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan | 12 Bulan | 12 Bulan  | 100,00% | Kec. Rungkut        |
| 0074 Operasional Kelurahan Rungkut Kidul        | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan | 12 bulan | 12 bulan  | 100,00% | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan | 12 Bulan | 12 Bulan  | 100,00% | Kec. Rungkut        |
| 0163 Operasional Kelurahan Brinoin              | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan | 12 bulan | 12 bulan  | 100,00% | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan | 12 bulan | 12 bulan  | 100,00% | Kec. Sambikerep     |
| 0164 Operasional Kelurahan Lontar               | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan | 12 bulan | 12 bulan  | 100,00% | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan | 12 bulan | 12 bulan  | 100,00% | Kec. Sambikerep     |
| 0165 Operasional Kelurahan Made                 | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan | 12 bulan | 12 bulan  | 100,00% | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan | 12 bulan | 12 bulan  | 100,00% | Kec. Sambikerep     |





| Urusan-Program-Kegiatan  | 2014  |               |               |         | 2015  |              |             |         | SKPD                                   |
|--|---|---------------|---------------|---------|---|--------------|-------------|---------|--|
|  | Indikator   | Target        | Realisasi     | Capaian | Indikator   | Target       | Realisasi   | Capaian |  |
| 0137 Operasional Kelurahan Karangpoh   | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan   | 12 bulan      | 12 bulan      | 100.00% | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan   | 12 bulan     | 12 bulan    | 100,00% | Kec. Tandes                            |
| 0138 Operasional Kelurahan Manukan Kulon   | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan   | 12 bulan      | 12 bulan      | 100.00% | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan   | 12 bulan     | 12 bulan    | 100,00% | Kec. Tandes                            |
| 0139 Operasional Kelurahan Manukan Wetan   | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan   | 12 bulan      | 12 bulan      | 100.00% | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan   | 12 bulan     | 12 bulan    | 100,00% | Kec. Tandes                            |
| 0140 Operasional Kelurahan Tandes  | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan   | 12 bulan      | 12 bulan      | 100.00% | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan   | 12 bulan     | 12 bulan    | 100,00% | Kec. Tandes                            |
| 0027 Operasional Kelurahan Dr. Soetomo   | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan   | 12 bulan      | 12 bulan      | 100.00% | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan   | 12 bulan     | 12 bulan    | 100,00% | Kec. Tegalsari                         |
| 0028 Operasional Kelurahan Kedunodoro  | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan   | 12 bulan      | 12 bulan      | 100.00% | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan   | 12 bulan     | 12 bulan    | 100,00% | Kec. Tegalsari                         |
| 0029 Operasional Kelurahan Keputran  | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan   | 12 bulan      | 12 bulan      | 100.00% | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan   | 12 bulan     | 12 bulan    | 100,00% | Kec. Tegalsari                         |
| 0030 Operasional Kelurahan Tegalsari   | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan   | 12 bulan      | 12 bulan      | 100.00% | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan   | 12 bulan     | 12 bulan    | 100,00% | Kec. Tegalsari                         |
| 0031 Operasional Kelurahan Wonorejo  | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan   | 12 bulan      | 12 bulan      | 100.00% | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan   | 12 bulan     | 12 bulan    | 100,00% | Kec. Tegalsari                         |
| 0080 Operasional Kelurahan Kendangsari   | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan   | 12 Bulan      | 12 Bulan      | 100.00% | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan   | 12 Bulan     | 12 Bulan    | 100,00% | Kec. Tenggilis Mejoyo                  |
| 0081 Operasional Kelurahan Kutisari  | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan   | 12 Bulan      | 12 Bulan      | 100.00% | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan   | 12 Bulan     | 12 Bulan    | 100,00% | Kec. Tenggilis Mejoyo                  |
| 0082 Operasional Kelurahan Panjaniwo   | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan   | 12 Bulan      | 12 Bulan      | 100.00% | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan   | 12 Bulan     | 12 Bulan    | 100,00% | Kec. Tenggilis Mejoyo                  |
| 0083 Operasional Kelurahan Prapen  | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan   | 12 Bulan      | 12 Bulan      | 100.00% |   |              |             |         | Kec. Tenggilis Mejoyo                  |
| 0084 Operasional Kelurahan Tenggilis Mejoyo                                      | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan   | 12 Bulan      | 12 Bulan      | 100.00% | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan   | 12 Bulan     | 12 Bulan    | 100,00% | Kec. Tenggilis Mejoyo                  |
| 0131 Operasional Kelurahan Babatan   | Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan   | 12 Bulan      | 12 Bulan      | 100.00% | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan   | 12 Bulan     | 12 Bulan    | 100,00% | Kec. Wiyung                            |
| 0132 Operasional Kelurahan Balas Klumprik  | Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan   | 12 Bulan      | 12 Bulan      | 100.00% | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan   | 12 Bulan     | 12 Bulan    | 100,00% | Kec. Wiyung                            |
| 0133 Operasional Kelurahan Jajar Tungal  | Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan   | 12 Bulan      | 12 Bulan      | 100.00% | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan   | 12 Bulan     | 12 Bulan    | 100,00% | Kec. Wiyung                            |
| 0134 Operasional Kelurahan Wiyung  | Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan   | 12 Bulan      | 12 Bulan      | 100.00% | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan   | 12 Bulan     | 12 Bulan    | 100,00% | Kec. Wiyung                            |
| 0120 Operasional Kelurahan Bendul Merisi   | Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan   | 12 Bulan      | 12 Bulan      | 100.00% | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan   | 12 Bulan     | 12 Bulan    | 100,00% | Kec. Wonocolo                          |
| 0121 Operasional Kelurahan Jemur Wonosari  | Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan   | 12 Bulan      | 12 Bulan      | 100.00% | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan   | 12 Bulan     | 12 Bulan    | 100,00% | Kec. Wonocolo                          |
| 0122 Operasional Kelurahan Margorejo   | Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan   | 12 Bulan      | 12 Bulan      | 100.00% | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan   | 12 Bulan     | 12 Bulan    | 100,00% | Kec. Wonocolo                          |
| 0123 Operasional Kelurahan Sidosemeru  | Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan   | 12 Bulan      | 12 Bulan      | 100.00% | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan   | 12 Bulan     | 12 Bulan    | 100,00% | Kec. Wonocolo                          |
| 0124 Operasional Kelurahan Siwalankerto  | Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan   | 12 Bulan      | 12 Bulan      | 100.00% | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan   | 12 Bulan     | 12 Bulan    | 100,00% | Kec. Wonocolo                          |
| 0098 Operasional Kelurahan Darmo   | Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan   | 12 Bulan      | 12 Bulan      | 100.00% | Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan   | 12 Bulan     | 12 Bulan    | 100,00% | Kec. Wonokromo                         |
| 0099 Operasional Kelurahan Jagir   | Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan   | 12 Bulan      | 12 Bulan      | 100.00% | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan   | 12 Bulan     | 12 Bulan    | 100,00% | Kec. Wonokromo                         |
| 0100 Operasional Kelurahan Nqaqel  | Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan   | 12 Bulan      | 12 Bulan      | 100.00% | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan   | 12 Bulan     | 12 Bulan    | 100,00% | Kec. Wonokromo                         |
| 0101 Operasional Kelurahan Ngagel Rejo   | Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan   | 12 Bulan      | 12 Bulan      | 100.00% | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan   | 12 Bulan     | 12 Bulan    | 100,00% | Kec. Wonokromo                         |
| 0102 Operasional Kelurahan Sawungaling   | Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan   | 12 Bulan      | 12 Bulan      | 100.00% | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan   | 12 Bulan     | 12 Bulan    | 100,00% | Kec. Wonokromo                         |
| 0103 Operasional Kelurahan Wonokromo   | Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan   | 12 Bulan      | 12 Bulan      | 100.00% | Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan   | 12 Bulan     | 12 Bulan    | 100,00% | Kec. Wonokromo                         |
| <b>1.20.32 Program Penataan Daerah Otonom</b>                                    | Persentase Penegasan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan  | 44%           | 44%           | 100,00% | Persentase Penegasan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan  | 50%          | 50%         | 100,00% | Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah |
| 0001 Pembinaan Dan Penataan Batas Wilayah Kota, Kecamatan Dan Kelurahan          | Jumlah patok batas wilayah yang terpasang   | 260 Patok     | 260 Patok     | 100.00% | Jumlah patok batas wilayah yang terpasang   | 261 Patok    | 261 Patok   | 100,00% | Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah |
| 0002 Dialog Dengan Tokoh-tokoh Masyarakat Dan Penataan Manajemen Administrasi RT | Jumlah peserta yang mengikuti dialog dengan tokoh-tokoh masyarakat dan Penataan Manajemen Administrasi RT | 10646 orang   | 0 orang       | 0.00%   | Jumlah pelaksanaan kegiatan dialog dengan Tokoh-tokoh Masyarakat dan Penataan Manajemen Administrasi RT | 31 kecamatan | 6 kecamatan | 19,35%  | Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah |
| 0003 Pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan                                    | Jumlah kecamatan dan Kelurahan yang dibina administrasi umum dan pemerintaannya                           | 191 SKPD      | 191 SKPD      | 100.00% | Jumlah pelaksanaan pembinaan administrasi umum pemerintahan pada kecamatan dan kelurahan                | 3 kali       | 3 kali      | 100,00% | Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah |
| 0004 Pengendalian Pelaksanaan Otonomi Daerah                                     | Jumlah Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Otonomi Daerah yang disusun                                       | 3 Dokumen     | 3 Dokumen     | 100.00% | Jumlah kegiatan pengendalian pelaksanaan otonomi daerah   | 5 kegiatan   | 5 kegiatan  | 100,00% | Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah |
| 0005 Pengelolaan Toponimi Di Kota Surabaya                                       | Jumlah Dokumen Pengelolaan Toponimi   | 1 Dokumen     | 1 Dokumen     | 100.00% | Jumlah pelaksanaan kegiatan pengelolaan toponimi  | 2 kegiatan   | 2 kegiatan  | 100,00% | Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah |
| 0006 Lomba Kelurahan Berhasil  | Jumlah peserta lomba kelurahan berhasil   | 160 Kelurahan | 160 Kelurahan | 100.00% | Pelaksanaan kegiatan lomba kelurahan berhasil di 154 kelurahan  | 1 kali       | 1 kali      | 100,00% | Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah |

| Urusan-Program-Kegiatan                                  | 2014   |           |           |         | 2015   |           |           |         | SKPD                                   |
|--|--|-----------|-----------|---------|--|-----------|-----------|---------|--|
|  | Indikator  | Target    | Realisasi | Capaian | Indikator  | Target    | Realisasi | Capaian |  |
| 0009 Pelaksanaan Penggabungan Kelurahan Di Kota Surabaya | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penggabungan Kelurahan di Kota Surabaya | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100.00% | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penggabungan Kelurahan di Kota Surabaya | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,00% | Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah |
| 0008 Pembinaan, Penyuluhan Dan Optimalisasi Kecamatan    | Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan    | 120 orang | 120 orang | 100.00% | Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan    | 120 orang | 120 orang | 100,00% | Kec. Asemrowo                          |
| 0008 Pembinaan, Penyuluhan Dan Optimalisasi Kecamatan    | Jumlah peserta Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan    | 270 orang | 270 orang | 100.00% | Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan    | 270 orang | 270 orang | 100,00% | Kec. Benowo                            |
| 0008 Pembinaan, Penyuluhan Dan Optimalisasi Kecamatan    | Jumlah Peserta Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan    | 360 orang | 360 orang | 100.00% | Jumlah Peserta Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan    | 360 Orang | 360 Orang | 100,00% | Kec. Bubutan                           |
| 0008 Pembinaan, Penyuluhan Dan Optimalisasi Kecamatan    | Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan    | 420 Orang | 420 Orang | 100.00% | Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan    | 420 Orang | 420 Orang | 100,00% | Kec. Bulak                             |
| 0008 Pembinaan, Penyuluhan Dan Optimalisasi Kecamatan    | Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan    | 150 Orang | 150 Orang | 100.00% | Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan    | 150 orang | 150 orang | 100,00% | Kec. Dukuh Pakis                       |
| 0008 Pembinaan, Penyuluhan Dan Optimalisasi Kecamatan    | Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan    | 105 Orang | 105 Orang | 100.00% | Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan    | 105 orang | 105 orang | 100,00% | Kec. Gayungan                          |
| 0008 Pembinaan, Penyuluhan Dan Optimalisasi Kecamatan    | Jumlah Peserta Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan    | 300 Orang | 300 Orang | 100.00% | Jumlah Peserta Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan    | 300 Orang | 300 Orang | 100,00% | Kec. Genteng                           |
| 0008 Pembinaan, Penyuluhan Dan Optimalisasi Kecamatan    | Jumlah peserta Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan    | 90 orang  | 90 orang  | 100.00% | Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan    | 90 orang  | 90 orang  | 100,00% | Kec. Gubeng                            |
| 0008 Pembinaan, Penyuluhan Dan Optimalisasi Kecamatan    | Jumlah peserta Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan    | 165 orang | 165 orang | 100.00% | Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan    | 165 orang | 165 orang | 100,00% | Kec. Gunung Anyar                      |
| 0008 Pembinaan, Penyuluhan Dan Optimalisasi Kecamatan    | Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan    | 315 Orang | 315 Orang | 100.00% | Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan    | 315 orang | 315 orang | 100,00% | Kec. Jambangan                         |
| 0008 Pembinaan, Penyuluhan Dan Optimalisasi Kecamatan    | Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan    | 150 Orang | 150 Orang | 100.00% | Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan    | 150 orang | 150 orang | 100,00% | Kec. Karangpilang                      |
| 0008 Pembinaan, Penyuluhan Dan Optimalisasi Kecamatan    | Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan    | 150 Orang | 150 Orang | 100.00% | Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan    | 150 Orang | 150 Orang | 100,00% | Kec. Kenjeran                          |
| 0008 Pembinaan, Penyuluhan Dan Optimalisasi Kecamatan    | Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan    | 150 Orang | 150 Orang | 100.00% | Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan    | 150 Orang | 150 Orang | 100,00% | Kec. Krembangan                        |
| 0008 Pembinaan, Penyuluhan Dan Optimalisasi Kecamatan    | Jumlah peserta Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan    | 204 orang | 204 orang | 100.00% | Jumlah peserta Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan    | 204 Orang | 170 Orang | 83,33%  | Kec. Lakarsantri                       |
| 0008 Pembinaan, Penyuluhan Dan Optimalisasi Kecamatan    | Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan    | 420 orang | 360 orang | 85.71%  | Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan    | 420 orang | 420 orang | 100,00% | Kec. Mulyorejo                         |
| 0008 Pembinaan, Penyuluhan Dan Optimalisasi Kecamatan    | Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan    | 180 Orang | 180 Orang | 100.00% | Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan    | 180 Orang | 180 Orang | 100,00% | Kec. Pabean Cantian                    |
| 0008 Pembinaan, Penyuluhan Dan Optimalisasi Kecamatan    | Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan    | 150 orang | 150 orang | 100.00% | Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan    | 150 orang | 150 orang | 100,00% | Kec. Pakal                             |
| 0008 Pembinaan, Penyuluhan Dan Optimalisasi Kecamatan    | Jumlah Peserta Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan    | 300 orang | 300 orang | 100.00% | Jumlah Peserta Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan    | 300 Orang | 300 Orang | 100,00% | Kec. Rungkut                           |
| 0008 Pembinaan, Penyuluhan Dan Optimalisasi Kecamatan    | Jumlah peserta Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan    | 192 orang | 192 orang | 100.00% | Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan    | 240 orang | 240 orang | 100,00% | Kec. Sambikerep                        |
| 0008 Pembinaan, Penyuluhan Dan Optimalisasi Kecamatan    | Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan    | 300 Orang | 300 Orang | 100.00% | Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan    | 300 orang | 300 orang | 100,00% | Kec. Sawahan                           |
| 0008 Pembinaan, Penyuluhan Dan Optimalisasi Kecamatan    | Jumlah peserta Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan    | 105 Orang | 105 Orang | 100.00% | Jumlah peserta Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan    | 105 orang | 105 orang | 100,00% | Kec. Semampir                          |
| 0008 Pembinaan, Penyuluhan Dan Optimalisasi Kecamatan    | jumlah peserta Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan    | 300 Orang | 300 Orang | 100.00% | Jumlah Peserta Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan    | 300 Orang | 300 Orang | 100,00% | Kec. Simokerto                         |
| 0008 Pembinaan, Penyuluhan Dan Optimalisasi Kecamatan    | Jumlah Peserta Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan    | 300 orang | 300 orang | 100.00% | Jumlah Peserta Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan    | 300 Orang | 300 Orang | 100,00% | Kec. Sukolilo                          |
| 0008 Pembinaan, Penyuluhan Dan Optimalisasi Kecamatan    | Jumlah peserta Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan    | 75 orang  | 75 orang  | 100.00% | Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan    | 75 orang  | 75 orang  | 100,00% | Kec. Sukomanunggal                     |
| 0008 Pembinaan, Penyuluhan Dan Optimalisasi Kecamatan    | jumlah peserta Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan    | 240 orang | 240 orang | 100.00% | jumlah peserta Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan    | 240 orang | 240 orang | 100,00% | Kec. Tambaksari                        |

| Urusan-Program-Kegiatan                               | 2014   |           |           |         | 2015   |           |           |         | SKPD  |
|---|--|-----------|-----------|---------|--|-----------|-----------|---------|---|
|   | Indikator  | Target    | Realisasi | Capaian | Indikator  | Target    | Realisasi | Capaian |   |
| 0008 Pembinaan, Penyuluhan Dan Optimalisasi Kecamatan | Jumlah peserta Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan                          | 200 orang | 200 orang | 100.00% | Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan                          | 200 orang | 200 orang | 100,00% | Kec. Tandes   |
| 0008 Pembinaan, Penyuluhan Dan Optimalisasi Kecamatan | Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan                          | 150 Orang | 146 Orang | 97.33%  | Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan                          | 150 Orang | 150 Orang | 100,00% | Kec. Tegalsari  |
| 0008 Pembinaan, Penyuluhan Dan Optimalisasi Kecamatan | Jumlah Peserta Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan                          | 120 Orang | 120 Orang | 100.00% | Jumlah Peserta Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan                          | 120 Orang | 120 Orang | 100,00% | Kec. Tenggilis Mejoyo                                 |
| 0008 Pembinaan, Penyuluhan Dan Optimalisasi Kecamatan | Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan                          | 100 Orang | 100 Orang | 100.00% | Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan                          | 100 orang | 100 orang | 100,00% | Kec. Wiyung   |
| 0008 Pembinaan, Penyuluhan Dan Optimalisasi Kecamatan | Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan                          | 150 Orang | 150 Orang | 100.00% | Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan                          | 150 orang | 150 orang | 100,00% | Kec. Wonocolo   |
| 0008 Pembinaan, Penyuluhan Dan Optimalisasi Kecamatan | Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan                          | 245 Orang | 245 Orang | 100.00% | Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan                          | 245 orang | 245 orang | 100,00% | Kec. Wonokromo  |
| <b>x.xx.01 Program Pelayanan Administrasi</b>         |  |           |           |         |  |           |           |         |   |
| 0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran           | waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran               | 12 bulan  | 12 bulan  | 100.00% | waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran               | 12 bulan  | 12 bulan  | 100,00% | Badan Kepegawaian dan Diklat                          |
| 0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran           | Pelaksanaan Penyediaan Kebutuhan 7 Jenis Barang dan Jasa Perkantoran selama              | 12 Bulan  | 12 Bulan  | 100.00% | Pelaksanaan Penyediaan Kebutuhan Barang dan Jasa Perkantoran selama                      | 12 Bulan  | 12 Bulan  | 100,00% | Bagian Bina Program                                   |
| 0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran           | Waktu Pelaksanaan Penyediaan 8 Jenis Barang dan Jasa Perkantoran                         | 12 Bulan  | 12 Bulan  | 100.00% | Waktu pelaksanaan penyediaan 8 jenis barang dan jasa perkantoran                         | 12 bulan  | 12 bulan  | 100,00% | Bagian Hubungan Masyarakat                            |
| 0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran           | Waktu pelaksanaan penyediaan 9 Jenis barang dan jasa perkantoran                         | 12 Bulan  | 12 Bulan  | 100.00% | Waktu pelaksanaan penyediaan 9 Jenis barang dan jasa perkantoran                         | 12 bulan  | 12 bulan  | 100,00% | Bagian Hukum  |
| 0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran           | Waktu pelaksanaan penyediaan 8 jenis kebutuhan Barang dan jasa Perkantoran               | 12 Bulan  | 12 Bulan  | 100.00% | Waktu pelaksanaan penyediaan 8 jenis kebutuhan Barang dan jasa Perkantoran               | 12 Bulan  | 12 Bulan  | 100,00% | Bagian Kerjasama                                      |
| 0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran           | Waktu Pelaksanaan Penyediaan jenis Kebutuhan Barang dan Jasa Perkantoran                 | 12 Bulan  | 12 Bulan  | 100.00% | Waktu Pelaksanaan Penyediaan Kebutuhan Barang dan Jasa Perkantoran                       | 12 Bulan  | 12 Bulan  | 100,00% | Bagian Kesejahteraan Rakyat                           |
| 0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran           | Waktu Penyediaan 6 Jenis Barang dan Jasa Perkantoran                                     | 12 Bulan  | 12 Bulan  | 100.00% | Waktu Penyediaan 6 Jenis Barang dan Jasa Perkantoran                                     | 12 Bulan  | 12 Bulan  | 100,00% | Bagian Organisasi dan Tata Laksana                    |
| 0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran           | Waktu pelaksanaan penyediaan 8 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran               | 12 Bulan  | 12 Bulan  | 100.00% | Waktu pelaksanaan penyediaan 8 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran               | 12 bulan  | 12 bulan  | 100,00% | Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah                |
| 0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran           | penyediaan barang dan jasa perkantoran   | 12 bulan  | 12 bulan  | 100.00% | penyediaan barang dan jasa perkantoran   | 12 bulan  | 12 bulan  | 100,00% | Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah                  |
| 0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran           | Waktu pelaksanaan penyediaan 8 jenis barang dan jasa perkantoran                         | 12 bulan  | 12 bulan  | 100.00% | Waktu pelaksanaan penyediaan 8 jenis barang dan jasa perkantoran                         | 12 Bulan  | 12 Bulan  | 100,00% | Bagian Perlengkapan                                   |
| 0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran           | Waktu pelaksanaan 10 jenis penyediaan barang dan jasa perkantoran                        | 12 bulan  | 12 bulan  | 100.00% | Waktu pelaksanaan 10 jenis penyediaan barang dan jasa perkantoran                        | 12 bulan  | 12 bulan  | 100,00% | Bagian Umum dan Protokol                              |
| 0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran           | Waktu Pelaksanaan penyediaan 10 jenis barang dan jasa perkantoran                        | 12 Bulan  | 12 Bulan  | 100.00% | Waktu Pelaksanaan penyediaan 10 jenis barang dan jasa perkantoran                        | 12 bulan  | 12 bulan  | 100,00% | Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Inspektorat |
| 0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran           | Waktu pelaksanaan penyediaan kebutuhan 10 jenis barang dan jasa perkantoran              | 12 Bulan  | 12 Bulan  | 100.00% | Waktu pelaksanaan penyediaan kebutuhan 10 jenis barang dan jasa perkantoran              | 12 Bulan  | 12 Bulan  | 100,00% |   |
| 0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran           | Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 11 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran | 12 bulan  | 12 bulan  | 100.00% | Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 11 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran | 12 bulan  | 12 bulan  | 100,00% | Kec. Asemrowo   |
| 0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran           | Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 11 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran | 12 bulan  | 12 bulan  | 100.00% | Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 11 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran | 12 bulan  | 12 bulan  | 100,00% | Kec. Benowo   |
| 0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran           | Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 11 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran | 12 bulan  | 12 bulan  | 100.00% | Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 11 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran | 12 bulan  | 12 bulan  | 100,00% | Kec. Bubutan  |
| 0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran           | Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 11 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran | 12 bulan  | 12 bulan  | 100.00% | Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 11 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran | 12 bulan  | 12 bulan  | 100,00% | Kec. Bulak  |
| 0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran           | Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 11 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran | 12 Bulan  | 12 Bulan  | 100.00% | Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 11 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran | 12 Bulan  | 12 Bulan  | 100,00% | Kec. Dukuh Pakis                                      |
| 0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran           | Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 11 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran | 12 Bulan  | 12 Bulan  | 100.00% | Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 11 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran | 12 Bulan  | 12 Bulan  | 100,00% | Kec. Gayungan   |





| Urusan-Program-Kegiatan  | 2014   |          |           |         | 2015   |          |           |         | SKPD                                      |
|--|--|----------|-----------|---------|--|----------|-----------|---------|---|
|  | Indikator  | Target   | Realisasi | Capaian | Indikator  | Target   | Realisasi | Capaian |   |
| x.xx.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur        |  |          |           |         |  |          |           |         |   |
| 0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | Waktu pelaksanaan pemeliharaan 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran                            | 12 bulan | 12 bulan  | 100.00% | Waktu pelaksanaan pemeliharaan 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran  | 12 bulan | 12 bulan  | 100,00% | Badan Kepegawaian dan Diklat              |
| 0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | Pelaksanaan Pemeliharaan dan Penyediaan 46 Jenis Sarana dan Prasarana Perkantoran selama           | 12 Bulan | 12 Bulan  | 100.00% | Pelaksanaan Pemeliharaan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Perkantoran selama  | 12 Bulan | 12 Bulan  | 100,00% | Bagian Bina Program                       |
| 0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | Waktu pelaksanaan pemeliharaan 3 jenis sarana prasarana  | 12 Bulan | 12 Bulan  | 100.00% | Waktu pelaksanaan pemeliharaan 3 jenis sarana prasaranaWaktu Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran | 12 Bulan | 12 Bulan  | 100,00% | Bagian Hubungan Masyarakat                |
| 0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | Waktu pelaksanaan pemeliharaan 2 Jenis sarana dan prasarana perkantoran                            | 12 Bulan | 12 Bulan  | 100.00% | Waktu pelaksanaan pemeliharaan 2 Jenis sarana dan prasarana perkantoran  | 12 bulan | 12 bulan  | 100,00% | Bagian Hukum                              |
| 0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | Waktu pelaksanaan pemeliharaan 2 jenis sarana dan prasarana perkantoran                            | 12 Bulan | 12 Bulan  | 100.00% | Waktu pelaksanaan pemeliharaan 2 jenis sarana dan prasarana perkantoran  | 12 Bulan | 12 Bulan  | 100,00% | Bagian Kerjasama                          |
| 0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | Waktu Pelaksanaan Pemeliharaan/ Pengadaan jenis Sarana prasarana Perkantoran                       | 12 Bulan | 12 Bulan  | 100.00% | Waktu Pelaksanaan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran  | 12 Bulan | 12 Bulan  | 100,00% | Bagian Kesejahteraan Rakyat               |
| 0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | Waktu pelaksanaan pemeliharaan 2 jenis sarana dan prasarana perkantoran                            | 12 Bulan | 12 Bulan  | 100.00% | Waktu pelaksanaan pemeliharaan 2 jenis sarana dan prasarana perkantoran  | 12 Bulan | 12 Bulan  | 100,00% | Bagian Organisasi dan Tata Laksana        |
| 0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | Waktu pelaksanaan pemeliharaan 2 jenis sarana dan prasarana perkantoran                            | 12 Bulan | 12 Bulan  | 100.00% | Waktu pelaksanaan pemeliharaan 2 jenis sarana dan prasarana perkantoran  | 12 bulan | 12 bulan  | 100,00% | Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah    |
| 0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | Waktu pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan perkantoran   | 12 bulan | 12 bulan  | 100.00% | Penyediaan barang cetakan dan pengadaan  | 12 bulan | 12 bulan  | 100,00% | Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah      |
| 0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | Waktu pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan 4 jenis sarana dan prasarana perkantoran              | 12 bulan | 12 bulan  | 100.00% | Waktu pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan 4 jenis sarana dan prasarana perkantoran                                  | 12 Bulan | 12 Bulan  | 100,00% | Bagian Perlengkapan                       |
| 0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | Waktu pelaksanaan 3 jenis pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran              | 12 bulan | 12 bulan  | 100.00% | Waktu pelaksanaan 3 jenis pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran                                  | 12 bulan | 12 bulan  | 100,00% | Bagian Umum dan Protokol                  |
| 0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | Waktu Pelaksanaan pemeliharaan pada 3 jenis sarana prasarana perkantoran                           | 12 Bulan | 12 Bulan  | 100.00% | Waktu Pelaksanaan pemeliharaan pada 3 jenis sarana prasarana perkantoran   | 12 bulan | 12 bulan  | 100,00% | Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan |
| 0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | Waktu pelaksanaan pemeliharaan 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran                            | 12 Bulan | 12 Bulan  | 100.00% | Waktu pelaksanaan pemeliharaan 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran  | 12 Bulan | 12 Bulan  | 100,00% | Inspektorat                               |
| 0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran | 12 bulan | 12 bulan  | 100.00% | Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran                     | 12 bulan | 12 bulan  | 100,00% | Kec. Asemrowo                             |
| 0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran | 12 bulan | 12 bulan  | 100.00% | Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran                     | 12 bulan | 12 bulan  | 100,00% | Kec. Benowo                               |
| 0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran | 12 bulan | 12 bulan  | 100.00% | Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran                     | 12 bulan | 12 bulan  | 100,00% | Kec. Bubutan                              |
| 0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran | 12 bulan | 12 bulan  | 100.00% | Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran                     | 12 bulan | 12 bulan  | 100,00% | Kec. Bulak                                |
| 0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran | 12 Bulan | 12 Bulan  | 100.00% | Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran                     | 12 Bulan | 12 Bulan  | 100,00% | Kec. Dukuh Pakis                          |
| 0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran | 12 Bulan | 12 Bulan  | 100.00% | Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran                     | 12 Bulan | 12 Bulan  | 100,00% | Kec. Gayungan                             |
| 0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran | 12 Bulan | 12 Bulan  | 100.00% | Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran                     | 12 Bulan | 12 Bulan  | 100,00% | Kec. Genteng                              |
| 0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran | 12 bulan | 12 bulan  | 100.00% | Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran                     | 12 bulan | 12 bulan  | 100,00% | Kec. Gubeng                               |



| Urusan-Program-Kegiatan  | 2014   |            |             |         | 2015   |             |             |         | SKPD   |
|--|--|------------|-------------|---------|--|-------------|-------------|---------|--|
|  | Indikator  | Target     | Realisasi   | Capaian | Indikator  | Target      | Realisasi   | Capaian |  |
| 0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran | 12 Bulan   | 12 Bulan    | 100,00% | Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran | 12 Bulan    | 12 Bulan    | 100,00% | Kec. Wiyung  |
| 0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran | 12 Bulan   | 12 Bulan    | 100,00% | Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran | 12 Bulan    | 12 Bulan    | 100,00% | Kec. Wonocolo  |
| 0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran | 12 Bulan   | 12 Bulan    | 100,00% | Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran | 12 Bulan    | 12 Bulan    | 100,00% | Kec. Wonokromo                                       |
| 0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | Waktu pelaksanaan pemeliharaan 4 jenis sarana dan prasarana Perkantoran                            | 12 bulan   | 12 bulan    | 100,00% | Waktu pelaksanaan pemeliharaan 4 jenis sarana dan prasarana perkantoran                            | 12 bulan    | 12 bulan    | 100,00% | Sekretariat DPRD                                     |
| <b>1.21 Ketahanan Pangan</b>                                     |  |            |             |         |  |             |             |         |  |
| <b>1.21.16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan</b>              |  |            |             |         |  |             |             |         |  |
|  | Pola Pangan harapan  | 92,92      | 92,93       | 100,01% | Pola Pangan harapan  | 95          | 95          | 100,00% | Kantor Ketahanan Pangan                              |
| 0009 Pemanfaatan Perkarangan Untuk Pengembangan Pangan           | Jumlah KK miskin yang mendapatkan fasilitas Optimalisasi pemanfaatan pekarangan (Urban Farming)    | 3000 KK    | 3,000 KK    | 100,00% | Jumlah Sarana Produksi Pertanian yang disediakan   | 106 Paket   | 106 Paket   | 100,00% | Dinas Pertanian                                      |
| 0020 Pengembangan Perbenihan/perbibitan                          | Jenis benih dan bibit tanaman yang dikembangkan  | 24 Jenis   | 24 Jenis    | 100,00% | Jenis benih dan bibit tanaman yang dikembangkan  | 45 Jenis    | 45 Jenis    | 100,00% | Dinas Pertanian                                      |
| 0034 Pengembangan Perikanan                                      | Jumlah KK Miskin Yang Mendapatkan Urban Farming Perikanan  | 2000 KK    | 2,000 KK    | 100,00% | Jumlah Sarana Produksi Perikanan Budidaya yang disediakan  | 334 Paket   | 334 Paket   | 100,00% | Dinas Pertanian                                      |
| 0035 Pengawasan Dan Pemeriksaan Produk Pangan Asal Hewan         | Waktu pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan produk pangan asal hewan                              | 12 bulan   | 12 bulan    | 100,00% | Jumlah pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan produk pangan asal hewan                             | 193 kali    | 193 kali    | 100,00% | Dinas Pertanian                                      |
| 0036 Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan Ternak       | Jumlah pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan ternak                  | 64 kali    | 64 kali     | 100,00% | Jumlah pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan ternak                  | 64 kali     | 63 kali     | 98,44%  | Dinas Pertanian                                      |
| 0022 Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan                        | Jumlah orang yang dilatih dalam rangka peningkatan mutu dan keamanan pangan                        | 871 Orang  | 871 Orang   | 100,00% | Jumlah orang yang dilatih dalam rangka peningkatan mutu dan keamanan pangan                        | 300 Orang   | 300 Orang   | 100,00% | Kantor Ketahanan Pangan                              |
| 0030 Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif                         | Jumlah Penyelenggaraan Penyuluhan sumber pangan alternatif sebanyak                                | 500 Orang  | 500 Orang   | 100,00% | Jumlah Penyelenggaraan Penyuluhan sumber pangan alternatif sebanyak                                | 1.890 Orang | 1.890 Orang | 100,00% | Kantor Ketahanan Pangan                              |
| 0032 Promosi Hasil Pengelolaan Pangan Lokal                      | Jumlah Event Promosi yang diikuti dan diselenggarakan  | 2 Event    | 3 Event     | 150,00% | Jumlah Event Promosi yang diikuti dan diselenggarakan  | 2 Event     | 2 Event     | 100,00% | Kantor Ketahanan Pangan                              |
| 0033 Monitoring Ketersediaan Dan Keamanan Pangan                 | waktu pelaksanaan Monitoring Ketersediaan dan Keamanan Pangan                                      | 12 bulan   | 12 bulan    | 100,00% | Waktu pelaksanaan Monitoring Ketersediaan dan Keamanan Pangan                                      | 12 Bulan    | 12 Bulan    | 100,00% | Kantor Ketahanan Pangan                              |
| <b>x.xx.01 Program Pelayanan Administrasi</b>                    |  |            |             |         |  |             |             |         |  |
| 0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran                      | Waktu Pelaksanaan penyediaan 9 Jenis Barang dan Jasa Perkantoran                                   | 12 bulan   | 12 bulan    | 100,00% | Waktu Pelaksanaan penyediaan 9 Jenis Barang dan Jasa Perkantoran                                   | 12 Bulan    | 12 Bulan    | 100,00% | Kantor Ketahanan Pangan                              |
| <b>x.xx.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b> |  |            |             |         |  |             |             |         |  |
| 0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | Waktu pelaksanaan pemeliharaan 2 jenis sarana dan prasarana perkantoran                            | 12 bulan   | 12 bulan    | 100,00% | Waktu pelaksanaan pemeliharaan 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran                            | 12 Bulan    | 12 Bulan    | 100,00% | Kantor Ketahanan Pangan                              |
| <b>1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>                     |  |            |             |         |  |             |             |         |  |
| <b>1.22.20 Program Penganggulangan Kemiskinan</b>                |  |            |             |         |  |             |             |         |  |
| 0003 Bulan Bhakti Gotong Royong                                  | Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong                                  | 2500 Orang | 2,500 Orang | 100,00% | Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong                                  | 2.500 Orang | 2.500 Orang | 100,00% | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana |
| 0004 Pembinaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam                      | Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan pemanfaatan sumber daya alam                               | 1487 orang | 1,487 orang | 100,00% | Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan pemanfaatan sumber daya alam                               | 1.487 Orang | 1.359 Orang | 91,39%  | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana |
| 0006 Fasilitasi Pengembangan Hasil Usaha Ekonomi Mikro           | Waktu Pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengembangan Hasil Usaha Ekonomi Mikro                       | 12 Bulan   | 12 Bulan    | 100,00% | Waktu Pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengembangan Hasil Usaha Ekonomi Mikro                       | 12 Bulan    | 12 Bulan    | 100,00% | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana |
| 0007 Pemberdayaan Ekonomi  | Jumlah peserta Pelatihan Ketrampilan   | 9872 orang | 9,816 orang | 99,43%  | Jumlah peserta Pelatihan Ketrampilan   | 2.575 Orang | 2.542 Orang | 98,72%  | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana |
| 0008 Fasilitasi Pelaksanaan Program Beras Miskin                 | Waktu Pelaksanaan program beras miskin   | 12 Bulan   | 12 Bulan    | 100,00% | Waktu Pelaksanaan program beras miskin   | 12 Bulan    | 12 Bulan    | 100,00% | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana |

| Urusan-Program-Kegiatan                                      | 2014  |               |               |         | 2015  |               |               |         | SKPD   |
|--|---|---------------|---------------|---------|---|---------------|---------------|---------|--|
|  | Indikator   | Target        | Realisasi     | Capaian | Indikator   | Target        | Realisasi     | Capaian |  |
| 0009 Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Dan Lembaga Kelurahan | Jumlah Peserta pelatihan pemberdayaan masyarakat dan lembaga kelurahan                              | 1052 orang    | 1,052 orang   | 100.00% | Jumlah Peserta pelatihan pemberdayaan masyarakat dan lembaga kelurahan              | 1.052 Orang   | 1.052 Orang   | 100,00% | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana |
| 0010 Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan            | Waktu pelaksanaan fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan                                      | 12 Bulan      | 12 Bulan      | 100.00% | Waktu pelaksanaan fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan                      | 12 Bulan      | 12 Bulan      | 100,00% | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana |
| 0011 Dinamisasi Data Keluarga Miskin                         | Jumlah Kelurahan yang mendapat dinamisasi data gakin  | 160 Kelurahan | 160 Kelurahan | 100.00% | Jumlah Kelurahan yang mendapat dinamisasi data keluarga miskin                      | 154 Kelurahan | 154 Kelurahan | 100,00% | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana |
| 0002 Penunjang Kegiatan PNPMD Mandiri Perkotaan              | Biaya Operasional Kegiatan (BOP) Kegiatan Penataan Lingkungan Perumahan Berbasis Komunitas (PI PRK) | 3 bulan       | 5 bulan       | 166.67% | Waktu penyediaan operasional penunjang pelaksanaan kegiatan PNPMD mandiri perkotaan | 12 bulan      | 12 bulan      | 100,00% | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan        |
| 0001 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan                     | Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring dan pendataan Kemiskinan yang disusun                            | 24 laporan    | 24 laporan    | 100.00% | Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring dan pendataan Kemiskinan yang disusun            | 24 laporan    | 24 laporan    | 100,00% | Kec. Asemrowo  |
| 0001 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan                     | Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring dan pendataan Kemiskinan yang disusun                            | 24 laporan    | 24 laporan    | 100.00% | Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring dan pendataan Kemiskinan yang disusun            | 24 laporan    | 24 laporan    | 100,00% | Kec. Benowo  |
| 0001 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan                     | Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring dan pendataan Kemiskinan yang disusun                            | 24 laporan    | 24 laporan    | 100.00% | Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring dan pendataan Kemiskinan yang disusun            | 24 Laporan    | 24 Laporan    | 100,00% | Kec. Bubutan   |
| 0001 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan                     | Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun                            | 24 Laporan    | 24 Laporan    | 100.00% | Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun            | 24 Laporan    | 24 Laporan    | 100,00% | Kec. Bulak   |
| 0001 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan                     | Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun                            | 24 Laporan    | 24 Laporan    | 100.00% | Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun            | 24 Laporan    | 24 Laporan    | 100,00% | Kec. Dukuh Pakis                                     |
| 0001 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan                     | Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun                            | 24 Laporan    | 24 Laporan    | 100.00% | Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun            | 24 Laporan    | 24 Laporan    | 100,00% | Kec. Gayungan  |
| 0001 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan                     | Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring dan pendataan Kemiskinan yang disusun                            | 24 laporan    | 24 laporan    | 100.00% | Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring dan pendataan Kemiskinan yang disusun            | 24 Laporan    | 24 Laporan    | 100,00% | Kec. Genteng   |
| 0001 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan                     | Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun                            | 24 laporan    | 24 laporan    | 100.00% | Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun            | 24 laporan    | 24 laporan    | 100,00% | Kec. Gubeng  |
| 0001 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan                     | Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun                            | 24 Laporan    | 24 Laporan    | 100.00% | Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun            | 24 Laporan    | 24 Laporan    | 100,00% | Kec. Gunung Anyar                                    |
| 0001 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan                     | Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun                            | 24 Laporan    | 24 Laporan    | 100.00% | Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun            | 24 Laporan    | 24 Laporan    | 100,00% | Kec. Jambangan                                       |
| 0001 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan                     | Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun                            | 24 Laporan    | 24 Laporan    | 100.00% | Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun            | 24 Laporan    | 24 Laporan    | 100,00% | Kec. Karangpilang                                    |
| 0001 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan                     | Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun                            | 24 Laporan    | 24 Laporan    | 100.00% | Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun            | 24 Laporan    | 24 Laporan    | 100,00% | Kec. Kenjeran  |
| 0001 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan                     | Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun                            | 24 Laporan    | 24 Laporan    | 100.00% | Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun            | 24 Laporan    | 24 Laporan    | 100,00% | Kec. Krembangan                                      |
| 0001 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan                     | Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring dan pendataan Kemiskinan yang disusun                            | 24 laporan    | 24 laporan    | 100.00% | Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring dan pendataan Kemiskinan yang disusun            | 24 Laporan    | 24 Laporan    | 100,00% | Kec. Lakarsantri                                     |
| 0001 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan                     | Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun                            | 24 laporan    | 24 laporan    | 100.00% | Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun            | 24 laporan    | 24 laporan    | 100,00% | Kec. Mulyorejo                                       |
| 0001 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan                     | Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun                            | 24 Laporan    | 24 Laporan    | 100.00% | Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun            | 24 Laporan    | 24 Laporan    | 100,00% | Kec. Pabean Cantian                                  |
| 0001 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan                     | Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring dan pendataan Kemiskinan yang disusun                            | 24 laporan    | 24 laporan    | 100.00% | Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring dan pendataan Kemiskinan yang disusun            | 24 laporan    | 24 laporan    | 100,00% | Kec. Pakal   |
| 0001 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan                     | Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring dan pendataan Kemiskinan yang disusun                            | 24 laporan    | 24 laporan    | 100.00% | Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring dan pendataan Kemiskinan yang disusun            | 24 Laporan    | 24 Laporan    | 100,00% | Kec. Rungkut   |
| 0001 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan                     | Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring dan pendataan Kemiskinan yang disusun                            | 24 laporan    | 24 laporan    | 100.00% | Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring dan pendataan Kemiskinan yang disusun            | 24 laporan    | 24 laporan    | 100,00% | Kec. Sambikerep                                      |
| 0001 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan                     | Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun                            | 24 Laporan    | 24 Laporan    | 100.00% | Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun            | 24 Laporan    | 24 Laporan    | 100,00% | Kec. Sawahan   |
| 0001 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan                     | Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun                            | 24 Laporan    | 24 Laporan    | 100.00% | Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun            | 24 laporan    | 24 laporan    | 100,00% | Kec. Semampir  |
| 0001 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan                     | Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun                            | 24 Laporan    | 24 Laporan    | 100.00% | Jumlah Laporan Kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun            | 24 Laporan    | 24 Laporan    | 100,00% | Kec. Simokerto                                       |
| 0001 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan                     | Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun                            | 24 laporan    | 22 laporan    | 91.67%  | Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun            | 24 Laporan    | 24 Laporan    | 100,00% | Kec. Sukolilo  |
| 0001 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan                     | Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring dan pendataan Kemiskinan yang disusun                            | 24 laporan    | 24 laporan    | 100.00% | Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring dan pendataan Kemiskinan yang disusun            | 24 laporan    | 24 laporan    | 100,00% | Kec. Sukomanunggal                                   |
| 0001 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan                     | Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun                            | 24 laporan    | 23 laporan    | 95.83%  | Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun            | 24 laporan    | 24 laporan    | 100,00% | Kec. Tambaksari                                      |
| 0001 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan                     | Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring dan pendataan Kemiskinan yang disusun                            | 24 laporan    | 24 laporan    | 100.00% | Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring dan pendataan Kemiskinan yang disusun            | 24 laporan    | 24 laporan    | 100,00% | Kec. Tandes  |
| 0001 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan                     | Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun                            | 24 Laporan    | 24 Laporan    | 100.00% | Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun            | 24 Laporan    | 24 Laporan    | 100,00% | Kec. Tegalsari                                       |
| 0001 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan                     | Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring dan pendataan Kemiskinan yang disusun                            | 24 Laporan    | 24 Laporan    | 100.00% | Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring dan pendataan Kemiskinan yang disusun            | 24 Laporan    | 24 Laporan    | 100,00% | Kec. Tenggilis Mejoyo                                |



| Urusan-Program-Kegiatan   | 2014   |                    |                    |         | 2015   |                    |                    |         | SKPD   |
|---|--|--------------------|--------------------|---------|--|--------------------|--------------------|---------|--|
|   | Indikator  | Target             | Realisasi          | Capaian | Indikator  | Target             | Realisasi          | Capaian |  |
| 0001 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan  | Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun   | 24 Laporan         | 24 Laporan         | 100,00% | Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun   | 24 Laporan         | 24 Laporan         | 100,00% | Kec. Wiyung  |
| 0001 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan  | Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun   | 24 Laporan         | 24 Laporan         | 100,00% | Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun   | 24 Laporan         | 24 Laporan         | 100,00% | Kec. Wonocolo  |
| 0001 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan  | Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun   | 24 Laporan         | 24 Laporan         | 100,00% | Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun   | 24 Laporan         | 24 Laporan         | 100,00% | Kec. Wonokromo   |
| <b>1.24 Kearsipan</b>   |  |                    |                    |         |  |                    |                    |         |  |
| <b>1.24.15 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan</b>  | Persentase Unit Kerja yang melaksanakan sistem kearsipan pola baru (Sistem Baku)                                       | 83,00%             | 83,00%             | 100,00% | Persentase Unit Kerja yang melaksanakan sistem kearsipan pola baru (Sistem Baku)                                       | 100%               | 100,00%            | 100,00% | Badan Arsip dan Perpustakaan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang |
| 0008 Pembinaan Sistem Kearsipan   | Jumlah unit kerja yang mendapat pembinaan sistem kearsipan   | 193 Unit Kerja     | 193 Unit Kerja     | 100,00% | Jumlah kegiatan pembinaan sistem kearsipan di 226 unit kerja   | 3 kegiatan         | 3 kegiatan         | 100,00% | Badan Arsip dan Perpustakaan                                   |
| 0009 Penataan Dan Pendataan Sistem Kearsipan Daerah   | Jumlah unit kerja yang mendapatkan penataan dan pendataan sistem kearsipan daerah                                      | 51 Unit Kerja      | 51 Unit Kerja      | 100,00% | Jumlah kegiatan pendampingan penataan dan pendataan sistem kearsipan daerah pada 51 unit kerja                         | 3 kegiatan         | 3 kegiatan         | 100,00% | Badan Arsip dan Perpustakaan                                   |
| 0010 Pengadaan Sarana Penyimpanan, Pengolahan, Pemeliharaan Dan Penyelamatan Kearsipan                            | Waktu Pengadaan Sarana Penyimpanan, Pengolahan, Pemeliharaan dan Penyelamatan Kearsipan                                | 12 bulan           | 12 bulan           | 100,00% | Jumlah pengadaan sarana penyimpanan, pengolahan, pemeliharaan dan penyelamatan kearsipan                               | 12 kali            | 12 kali            | 100,00% | Badan Arsip dan Perpustakaan                                   |
| 0011 Layanan Informasi Kearsipan  | Jumlah pelaksanaan kegiatan pameran  | 3 kali             | 3 kali             | 100,00% | Jumlah pelaksanaan kegiatan pameran  | 3 kali             | 3 kali             | 100,00% | Badan Arsip dan Perpustakaan                                   |
| 0012 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan Kearsipan                                      | Waktu pelaksanaan pemeliharaan 2 jenis sarana penyimpanan kearsipan  | 12 bulan           | 12 bulan           | 100,00% | Waktu pelaksanaan pemeliharaan 2 jenis sarana penyimpanan kearsipan  | 12 bulan           | 12 bulan           | 100,00% | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang                               |
| <b>1.25 Komunikasi dan Informatika</b>  |  |                    |                    |         |  |                    |                    |         |  |
| <b>1.25.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>   | Jumlah kunjungan rata-rata perbulan pada website www.surabaya.go.id  | 52.689 kunjungan   | 244.652 kunjungan  | 464,33% | Jumlah kunjungan rata-rata perbulan pada website www.surabaya.go.id  | 56.453 kunjungan   | 155.262 kunjungan  | 275,03% | Dinas Komunikasi dan Informatika, Bagian Hubungan Masyarakat.  |
| 0008 Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Jurnalistik  | Waktu Pelaksanaan Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Jurnalistik   | 12 Bulan           | 12 Bulan           | 100,00% | Waktu Pelaksanaan Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Jurnalistik   | 12 bulan           | 12 bulan           | 100,00% | Bagian Hubungan Masyarakat                                     |
| 0009 Peliputan Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya  | Waktu pelaksanaan peliputan kegiatan Pemerintah Kota Surabaya  | 12 bulan           | 12 bulan           | 100,00% | Waktu pelaksanaan peliputan kegiatan Pemerintah Kota Surabaya  | 12 Bulan           | 12 Bulan           | 100,00% | Bagian Hubungan Masyarakat                                     |
| 0010 Pembuatan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya  | Jumlah Pembuatan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya   | 24 Dokumen         | 24 Dokumen         | 100,00% | Jumlah Pembuatan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya   | 22 dokumen         | 22 dokumen         | 100,00% | Bagian Hubungan Masyarakat                                     |
| 0003 Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi  | Jumlah pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi yang dilaksanakan                               | 20 Kali            | 19 Kali            | 95,00%  | Jumlah pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi yang dilaksanakan                               | 12 Kali            | 12 Kali            | 100,00% | Dinas Komunikasi dan Informatika                               |
| 0011 Pengelolaan Dan Pengumpulan Data Dan Informasi Pembangunan Daerah  | Jumlah data dan informasi yang diupload di website www.surabaya.go.id  | 1872 Materi        | 1,923 Materi       | 102,72% | Jumlah data dan informasi yang diupload di website www.surabaya.go.id  | 1.872 Materi       | 1.883 Materi       | 100,59% | Dinas Komunikasi dan Informatika                               |
| 0012 Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah   | Jumlah kegiatan publikasi penyelenggaraan pembangunan daerah yang dilakukan  | 107 kali           | 114 kali           | 106,54% | Jumlah kegiatan publikasi penyelenggaraan pembangunan daerah yang dilakukan  | 78 Kali            | 78 Kali            | 100,00% | Dinas Komunikasi dan Informatika                               |
| <b>1.25.19 Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi</b>                                 | Prosentase antara jumlah layanan publik berbasis TIK dengan jumlah total layanan publik (108 Pelayanan Publik)         | 18,52% = 20 sistem | 22,22% = 24 sistem | 119,98% | Prosentase antara jumlah layanan publik berbasis TIK dengan jumlah total layanan publik (108 Pelayanan Publik)         | 23,15% = 25 sistem | 26,85% = 29 sistem | 115,98% | Dinas Komunikasi dan Informatika                               |
|   | Prosentase antara jumlah pengguna layanan publik berbasis web dengan jumlah total pengguna layanan publik berbasis TIK | 7,00%              | 13,83%             | 197,57% | Prosentase antara jumlah pengguna layanan publik berbasis web dengan jumlah total pengguna layanan publik berbasis TIK | 8,00%              | 39,23%             | 490,38% |  |
| 0001 Pembangunan Sarana Jaringan Komunikasi Dan Informasi   | Pembangunan Jaringan Fiber Optik   | 5 SKPD             | 5 SKPD             | 100,00% | Pembangunan CCTV sebanyak  | 196 Titik          | 196 Titik          | 100,00% | Dinas Komunikasi dan Informatika                               |
| 0002 Pemeliharaan Sarana Jaringan Komunikasi Dan Informasi  | Waktu pemeliharaan sarana jaringan komunikasi dan informasi  | 12 Bulan           | 12 Bulan           | 100,00% | Waktu pemeliharaan sarana jaringan komunikasi dan informasi  | 12 Bulan           | 12 Bulan           | 100,00% | Dinas Komunikasi dan Informatika                               |
| 0003 Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Publik Dan Sistem Informasi Manajemen Yang Terintegrasi Ke Pusat Data | Jumlah sistem informasi pelayanan publik dan Sistem Informasi Manajemen yang terintegrasi ke pusat data                | 10 Sistem          | 10 Sistem          | 100,00% | Jumlah sistem informasi pelayanan publik dan Sistem Informasi Manajemen yang terintegrasi ke pusat data                | 5 Sistem           | 5 Sistem           | 100,00% | Dinas Komunikasi dan Informatika                               |

| Urusan-Program-Kegiatan  | 2014  |             |              |         | 2015  |             |             |         | SKPD                             |
|--|---|-------------|--------------|---------|---|-------------|-------------|---------|----------------------------------|
|  | Indikator   | Target      | Realisasi    | Capaian | Indikator   | Target      | Realisasi   | Capaian |                                  |
| 0004 Pemeliharaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik   | Waktu pelaksanaan pengembangan dan pemeliharaan 4 jenis sistem informasi pelayanan publik | 12 Bulan    | 12 Bulan     | 100,00% | Waktu pelaksanaan pengembangan dan pemeliharaan 4 jenis sistem informasi pelayanan publik | 12 Bulan    | 12 Bulan    | 100,00% | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 0005 Pembinaan, Pengawasan Dan Penertiban Penyelenggaraan Jasa Pos Dan Telekomunikasi                        | Pengawasan dan penertiban perijinan dan penyelenggaraan jasa pos dan telekomunikasi       | 36 Kali     | 36 Kali      | 100,00% | Pengawasan dan penertiban perijinan dan penyelenggaraan jasa pos dan telekomunikasi       | 12 Bulan    | 12 Bulan    | 100,00% | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 0006 Pembangunan Prasarana Jaringan Telekomunikasi   | Jumlah pmbangunan grounding gedung Pemerintah Kota Surabaya                               | 12 Gedung   | 12 Gedung    | 100,00% | Jumlah pembangunan grounding gedung Pemerintah Kota Surabaya                              | 12 Gedung   | 12 Gedung   | 100,00% | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 0007 Pemeliharaan Prasarana Jaringan Telekomunikasi  | Waktu pelaksanaan pemeliharaan 3 jenis prasarana jaringan telekomunikasi                  | 12 Bulan    | 12 Bulan     | 100,00% | Waktu pelaksanaan pemeliharaan 3 jenis prasarana jaringan telekomunikasi                  | 12 Bulan    | 12 Bulan    | 100,00% | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 0008 Pemanfaatan Menara Bersama Telekomunikasi   | Waktu plaksanaan pengawasan mengenai pemanfaatan menara bersama yang dilakukan            | 12 Bulan    | 12 Bulan     | 100,00% | Waktu pelaksanaan pengawasan pemanfaatan menara bersama                                   | 12 Bulan    | 12 Bulan    | 100,00% | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 0009 Peningkatan Dan Pendayagunaan Opensource Software   | Terlaksananya 4 kegiatan untuk peningkatan dan pendayagunaan opensource software          | 12 Bulan    | 12 Bulan     | 100,00% | Terlaksananya 4 kegiatan untuk peningkatan dan pendayagunaan opensource software          | 12 Bulan    | 12 Bulan    | 100,00% | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 0010 Sosialisasi Dan Pembinaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK)                                      | Pelaksanaan Sosialisasi dan Pembinaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)            | 20 Kali     | 20 Kali      | 100,00% | Pengelolaan Sarana Pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)         | 12 Bulan    | 12 Bulan    | 100,00% | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| <b>x.xx.01 Program Pelayanan Administrasi</b>  |   |             |              |         |   |             |             |         |                                  |
| 0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran  | Waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis barang dan jasa perkantoran                          | 12 Bulan    | 12 Bulan     | 100,00% | Waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis barang dan jasa perkantoran                          | 12 Bulan    | 12 Bulan    | 100,00% | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| <b>x.xx.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>   |   |             |              |         |   |             |             |         |                                  |
| 0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran   | Waktu pengadaan dan pemeliharaan 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran                 | 12 Bulan    | 12 Bulan     | 100,00% | Waktu pengadaan dan pemeliharaan 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran                 | 12 Bulan    | 12 Bulan    | 100,00% | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| <b>1.26 Perpustakaan</b>   |   |             |              |         |   |             |             |         |                                  |
| <b>1.26.21 Program Pengembangan Budaya Baca dan</b>  |   |             |              |         |   |             |             |         |                                  |
| 0008 Publikasi Dan Sosialisasi Minat Dan Budaya Baca   | Jumlah kegiatan Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca                           | 3 kegiatan  | 3 kegiatan   | 100,00% | Jumlah kegiatan Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca                           | 3 kegiatan  | 3 kegiatan  | 100,00% | Badan Arsip dan Perpustakaan     |
| 0011 Penyediaan, Pengolahan, Perawatan Sarana Prasarana Perpustakaan Umum Daerah Dan Taman Bacaan Masyarakat | Bahan pustaka yang disediakan   | 141716 buku | 141,716 buku | 100,00% | Bahan pustaka yang disediakan   | 74.488 buku | 74.488 buku | 100,00% | Badan Arsip dan Perpustakaan     |
| 0012 Pembinaan Pengelolaan Perpustakaan  | Jumlah Orang yang dibina tentang pengelolaan perpustakaan                                 | 250 orang   | 250 orang    | 100,00% | Jumlah petugas yang diberi pelatihan tentang pengelolaan perpustakaan                     | 225 orang   | 225 orang   | 100,00% | Badan Arsip dan Perpustakaan     |
| 0013 Pengelolaan Layanan Baca  | Waktu Pengelolaan layanan baca di 519 lokasi  | 12 bulan    | 12 bulan     | 100,00% | Jumlah supervisi layanan baca di 918 titik lokasi   | 12 kali     | 12 kali     | 100,00% | Badan Arsip dan Perpustakaan     |
| <b>x.xx.01 Program Pelayanan Administrasi</b>  |   |             |              |         |   |             |             |         |                                  |
| 0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran  | Waktu Pelaksanaan Penyediaan 9 Jenis Barang dan Jasa Perkantoran                          | 12 bulan    | 12 bulan     | 100,00% | Waktu Pelaksanaan Penyediaan 9 Jenis Barang dan Jasa Perkantoran                          | 12 bulan    | 12 bulan    | 100,00% | Badan Arsip dan Perpustakaan     |
| <b>x.xx.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>   |   |             |              |         |   |             |             |         |                                  |
| 0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran   | Waktu Pelaksanaan Pemeliharaan 3 Jenis Sarana dan Prasarana Perkantoran                   | 12 bulan    | 12 bulan     | 100,00% | Waktu Pelaksanaan Pemeliharaan 3 Jenis Sarana dan Prasarana Perkantoran                   | 12 bulan    | 12 bulan    | 100,00% | Badan Arsip dan Perpustakaan     |
| <b>2.01 Pertanian</b>  |   |             |              |         |   |             |             |         |                                  |
| <b>2.01.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>  |   |             |              |         |   |             |             |         |                                  |
| 0006 Pengembangan Agribisnis Peternakan  | Jumlah peserta pengembangan agribisnis peternakan   | 30 kelompok | 30 kelompok  | 100,00% | Jumlah Ternak yang disediakan   | 29 Paket    | 29 Paket    | 100,00% | Dinas Pertanian                  |
| 0007 Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Peternakan  | Jumlah sarana yang dibangun dan dipelihara  | 4 unit      | 4 unit       | 100,00% | Jumlah prasarana peternakan yang dibangun dan dipelihara                                  | 2 unit      | 2 unit      | 100,00% | Dinas Pertanian                  |
| 0008 Pengembangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura  | Jumlah lokasi pengembangan tanaman pangan dan hortikultura yang disediakan                | 27 lokasi   | 27 lokasi    | 100,00% | Jumlah tanaman pangan dan hortikultura yang disediakan                                    | 4.848 unit  | 4.863 unit  | 100,31% | Dinas Pertanian                  |
| 0009 Peningkatan Sumber Daya Pertanian   | Jumlah kegiatan penyuluhan dan pembinaan tenaga penyuluh yang dilaksanakan                | 15 kali     | 15 kali      | 100,00% | Jumlah kegiatan penyuluhan dan pembinaan tenaga penyuluh yang dilaksanakan                | 15 kali     | 8 kali      | 53,33%  | Dinas Pertanian                  |
| 0010 Pengembangan Agribisnis Pertanian   | Jumlah peserta pengembangan agribisnis pertanian  | 405 orang   | 405 orang    | 100,00% | Jumlah peserta pengembangan agribisnis pertanian  | 405 orang   | 418 orang   | 103,21% | Dinas Pertanian                  |

| Urusan-Program-Kegiatan  | 2014   |            |             |         | 2015   |             |             |         | SKPD                                 |
|--|--|------------|-------------|---------|--|-------------|-------------|---------|--------------------------------------|
|  | Indikator  | Target     | Realisasi   | Capaian | Indikator  | Target      | Realisasi   | Capaian |                                      |
| 0011 Pelayanan Kesehatan Dan Pengobatan Hewan  | Waktu pelaksanaan 1 jenis pelayanan kesehatan dan pengobatan hewan peliharaan                              | 12 bulan   | 12 bulan    | 100.00% | Jumlah pelayanan kesehatan dan pengobatan hewan peliharaan   | 240 kali    | 444 kali    | 185,00% | Dinas Pertanian                      |
| <b>x.xx.01 Program Pelayanan Administrasi</b>  |  |            |             |         |  |             |             |         |                                      |
| 0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran  | Waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis barang dan jasa perkantoran   | 12 bulan   | 12 bulan    | 100.00% | Waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis barang dan jasa perkantoran                                     | 12 bulan    | 12 bulan    | 100,00% | Dinas Pertanian                      |
| <b>x.xx.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>                     |  |            |             |         |  |             |             |         |                                      |
| 0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran                     | Waktu pelaksanaan pemeliharaan 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran                                    | 12 bulan   | 12 bulan    | 100.00% | Waktu pelaksanaan pemeliharaan 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran                              | 12 bulan    | 12 bulan    | 100,00% | Dinas Pertanian                      |
| <b>2.04 Pariwisata</b>   |  |            |             |         |  |             |             |         |                                      |
| <b>2.04.15 Program Pengembangan</b>  |  |            |             |         |  |             |             |         |                                      |
|  | Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara   | 190.872    | 742.084     | 388,79% | Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara   | 196.390     | 638.583     | 325,16% | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata      |
|  | Jumlah kunjungan wisatawan nusantara   | 8.296.157  | 15.929.745  | 192,01% | Jumlah kunjungan wisatawan nusantara   | 8.509.348   | 15.099.061  | 177,44% | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata      |
| 0004 Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata                                   | Jumlah forum koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata yang dilaksanakan                               | 6 Forum    | 6 Forum     | 100.00% | Jumlah forum komunikasi dengan sektor pendukung pariwisata yang dilaksanakan                         | 6 Forum     | 6 Forum     | 100,00% | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata      |
| 0005 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam Dan Di Luar Negeri            | Jumlah promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri yang dilaksanakan                          | 11 promosi | 11 promosi  | 100.00% | Jumlah promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri yang dilaksanakan                    | 11 Promosi  | 11 Promosi  | 100,00% | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata      |
| 0009 Penyelenggaraan Festival Kuliner  | Jumlah festival kuliner yang diselenggarakan dan diikuti   | 4 Festival | 4 Festival  | 100.00% | Jumlah festival kuliner yang diselenggarakan dan diikuti   | 3 Festival  | 3 Festival  | 100,00% | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata      |
| 0010 Pengembangan Obyek Dan Daya Tarik Wisata Ampel                                  | Waktu Pelaksanaan 6 kegiatan Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata Ampel                                | 12 bulan   | 12 bulan    | 100.00% | Pelaksanaan 5 kegiatan Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata Ampel                                | 12 Bulan    | 12 Bulan    | 100,00% | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata      |
| 0011 Pengembangan Obyek Dan Daya Tarik Wisata Balai Pemuda Dan GNI                   | Waktu Pelaksanaan 10 kegiatan Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata Balai Pemuda dan GNI                | 12 bulan   | 12 bulan    | 100.00% | Pelaksanaan 11 kegiatan Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata Balai Pemuda dan GNI                | 12 Bulan    | 12 Bulan    | 100,00% | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata      |
| 0012 Pengembangan Obyek Dan Daya Tarik Wisata Kenjeran Dan Kalimas                   | Waktu Pelaksanaan 15 kegiatan Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata Kenjeran dan Kalimas                | 12 Bulan   | 12 Bulan    | 100.00% | Pelaksanaan 4 kegiatan Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata Kenjeran dan Kalimas                 | 12 Bulan    | 12 Bulan    | 100,00% | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata      |
| 0013 Pengembangan Obyek Dan Daya Tarik Wisata THR                                    | Waktu Pelaksanaan 112 kegiatan Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata THR                                | 12 bulan   | 12 bulan    | 100.00% | Pelaksanaan 112 kegiatan Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata THR                                | 12 Bulan    | 12 Bulan    | 100,00% | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata      |
| 0014 Pengembangan Obyek Dan Daya Tarik Wisata Tugu Pahlawan Dan Museum 10 November   | Waktu Pelaksanaan 4 kegiatan Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata Tugu Pahlawan dan Museum 10 November | 12 bulan   | 12 bulan    | 100.00% | Pelaksanaan 3 kegiatan Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata Tugu Pahlawan dan Museum 10 November | 12 Bulan    | 12 Bulan    | 100,00% | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata      |
| 0015 Penyelenggaraan Event Di Obyek Wisata   | Jumlah event wisata yang diselenggarakan di obyek wisata   | 9 Event    | 9 Event     | 100.00% | Jumlah event wisata yang diselenggarakan di obyek wisata   | 6 Event     | 6 Event     | 100,00% | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata      |
| 0016 Peningkatan Sumberdaya Manusia Bidang Pariwisata                                | Jumlah Sumberdaya Manusia Bidang Pariwisata yang dibina  | 150 Orang  | 160 Orang   | 106.67% | Jumlah SDM Bidang Pariwisata yang dibina   | 220 Orang   | 220 Orang   | 100,00% | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata      |
| 0017 Penyusunan Direktori Pariwisata Kota Surabaya                                   | Jumlah dokumen direktori pariwisata Kota Surabaya yang disusun   | 1 Dokumen  | 1 Dokumen   | 100.00% | Jumlah dokumen direktori pariwisata Kota Surabaya yang disusun                                       | 1 Dokumen   | 1 Dokumen   | 100,00% | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata      |
| <b>2.04.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</b>                             |  |            |             |         |  |             |             |         |                                      |
| 0006 Pengembangan daerah tujuan wisata   | waktu pelaksanaan kegiatan pengembangan daerah tujuan wisata di 3 lokasi                                   | 12 bulan   | 12 bulan    | 100.00% |  |             |             |         | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata      |
| 0008 Pengelolaan Cagar Budaya  | waktu pengelolaan 165 bangunan dan 10 situs cagar budaya   | 12 Bulan   | 12 Bulan    | 100.00% | jangka waktu pengelolaan 245 bangunan dan 21 situs cagar budaya                                      | 12 Bulan    | 12 Bulan    | 100,00% | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata      |
| 0009 Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Pengembangan Daerah Tujuan Wisata       | Lokasi pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk pengembangan daerah tujuan wisata                           | 1 lokasi   | 0 lokasi    | 0.00%   |  |             |             |         | Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah |
| <b>2.05 Kelautan dan Perikanan</b>   |  |            |             |         |  |             |             |         |                                      |
| <b>2.05.15 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat</b>                               |  |            |             |         |  |             |             |         |                                      |
| 0002 Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Perikanan Dan Kelautan                   | Jumlah sumberdaya manusia bidang perikanan dan kelautan yang dilatih                                       | 1086 orang | 1.086 orang | 100.00% | Jumlah sumberdaya manusia bidang perikanan dan kelautan yang dilatih                                 | 1.163 orang | 1.163 orang | 100,00% | Dinas Pertanian                      |
| 0003 Pembangunan Sarana Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perikanan Dan Kelautan | Jumlah sarana dan prasarana perikanan dan kelautan yang dibangun dan dipelihara                            | 4 lokasi   | 4 lokasi    | 100.00% | Jumlah sarana dan prasarana perikanan dan kelautan yang dibangun dan dipelihara                      | 5 lokasi    | 5 lokasi    | 100,00% | Dinas Pertanian                      |
| 0004 Pengadaan Sarana Perikanan Dan Kelautan   | Jumlah sarana perikanan dan kelautan yang disediakan   | 1041 Paket | 1,041 Paket | 100.00% | Jumlah sarana perikanan dan kelautan yang disediakan   | 372 paket   | 373 paket   | 100,27% | Dinas Pertanian                      |
| <b>2.06 Perdagangan</b>  |  |            |             |         |  |             |             |         |                                      |



| Urusan-Program-Kegiatan   | 2014  |            |            |         | 2015  |            |            |         | SKPD   |
|---|---|------------|------------|---------|---|------------|------------|---------|--|
|   | Indikator   | Target     | Realisasi  | Capaian | Indikator   | Target     | Realisasi  | Capaian |  |
| <b>2.06.15 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan</b>               | Persentase Penyelesaian Sengketa Konsumen   | 87,00%     | 100,00%    | 114,94% | Persentase Penyelesaian Sengketa Konsumen                               | 90,00%     | 100,00%    | 111,11% | Dinas Perdagangan dan Perindustrian                  |
| 0002 Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-permasalahan Pengaduan Konsumen | Jumlah sengketa konsumen yang terselesaikan   | 36 kasus   | 16 kasus   | 44,44%  | Jumlah sengketa konsumen yang terselesaikan                             | 36 Kasus   | 8 Kasus    | 22,22%  | Dinas Perdagangan dan Perindustrian                  |
| 0003 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan Jasa                     | Jumlah lokasi peredaran barang yang diawasi   | 139 lokasi | 142 lokasi | 102,16% | Jumlah lokasi peredaran barang yang diawasi                             | 166 Lokasi | 180 Lokasi | 108,43% | Dinas Perdagangan dan Perindustrian                  |
| 0005 Sosialisasi Perdagangan Luar Negeri                                  | Jumlah UKM yang mengikuti sosialisasi kebijakan perdagangan luar negeri                         | 220 UKM    | 193 UKM    | 87,73%  |   |            |            |         | Dinas Perdagangan dan Perindustrian                  |
| <b>2.06.19 Program Pembinaan Pedagang</b>                                 | Peningkatan jumlah sentra baru PKL  | 5 sentra   | 9 sentra   | 180,00% | Peningkatan jumlah sentra baru PKL                                      | 5 sentra   | 6 sentra   | 120%    | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. |
|   | jumlah sentra PKL yang memiliki daya saing usaha  | 36 sentra  | 36 sentra  | 100,00% | jumlah sentra PKL yang memiliki daya saing usaha                        | 41 sentra  | 38 sentra  | 92,68%  |  |
| 0001 Kegiatan Pembinaan Organisasi Pedagang Kakilima Dan Asongan          | Jangka waktu pendampingan pembinaan di 21 sentra PKL yang telah terbangun                       | 12 bulan   | 8 bulan    | 66,67%  | Jumlah Pendampingan Manajemen Usaha di Sentra PKL                       | 41 sentra  | 45 sentra  | 109,76% | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah  |
| 0003 Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kakilima Dan Asongan          | Jumlah lokasi usaha PKL yang ditata   | 15 lokasi  | 12 lokasi  | 80,00%  | Jumlah lokasi tempat usaha PKL dan asongan yang ditata per tahun        | 8 lokasi   | 6 lokasi   | 75,00%  | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah  |
| 0005 Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan      | Jumlah sentra PKL terbangun yang mendapatkan pengawasan mutu dagangan                           | 36 sentra  | 9 sentra   | 25,00%  |   |            |            |         | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah  |
| 0003 Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan          | Pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk sarana penunjang penataan pedagang kakilima dan asongan | 2 Lokasi   | 2 Lokasi   | 100,00% |   |            |            |         | Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah                 |
| <b>x.xx.01 Program Pelayanan Administrasi</b>                             |   |            |            |         |   |            |            |         |  |
| 0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran                               | Waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis barang dan jasa perkantoran                                | 12 bulan   | 12 bulan   | 100,00% | Waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis barang dan jasa perkantoran        | 12 Bulan   | 12 Bulan   | 100,00% | Dinas Perdagangan dan Perindustrian                  |
| <b>x.xx.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>          |   |            |            |         |   |            |            |         |  |
| 0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran          | Waktu pelaksanaan pemeliharaan 4 jenis sarana dan prasarana perkantoran                         | 12 bulan   | 12 bulan   | 100,00% | Waktu pelaksanaan pemeliharaan 4 jenis sarana dan prasarana perkantoran | 12 Bulan   | 12 Bulan   | 100,00% | Dinas Perdagangan dan Perindustrian                  |

Tabel 2.115  
Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah Tahun Berjalan  
Kota Surabaya

| Urusan-Program-Kegiatan   | 2016 (Triwulan I)  |         |           |         | SKPD  |
|---|--|---------|-----------|---------|---|
|   | Indikator  | Target  | Realisasi | Capaian |   |
| <b>1.01 Pendidikan</b>  |  |         |           |         |   |
| <b>1.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>   | Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Pelayanan Administrasi Perkantoran   | 70%     |           |         |   |
| 1.01.01.0001 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran   | Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran   | 100%    | 17.20%    | 17.20%  | Dinas Pendidikan                                |
| <b>1.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>  | Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  | 70%     |           |         |   |
| 1.01.02.0001 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran  | Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran  | 100%    | 15.00%    | 15.00%  | Dinas Pendidikan                                |
| <b>1.01.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>  | Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD   | 99%     |           |         |   |
|   | Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD   | 99%     |           |         |   |
| 1.01.15.0001 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini   | Persentase Keberhasilan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini   | 100%    | 50.00%    | 50.00%  | Dinas Pendidikan                                |
| 1.01.15.0002 Peningkatan Mutu Pendidik PAUD   | Persentase Keberhasilan Peningkatan Mutu Pendidik PAUD   | 100%    | 0.00%     | 0.00%   | Dinas Pendidikan                                |
| 1.01.15.0003 Persiapan Hari Anak Nasional Tk. I Jatim   | Persentase Keberhasilan Persiapan Hari Anak Nasional Tk. I Jatim   | 100%    | 0.00%     | 0.00%   | Dinas Pendidikan                                |
| 1.01.15.0004 Pengadaan Alat Peraga Edukatif Siswa PAUD  | Persentase Keberhasilan Pengadaan Alat Peraga Edukatif Siswa PAUD  | 100%    | 0.00%     | 0.00%   | Dinas Pendidikan                                |
| 1.01.15.0005 Penyediaan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik | Persentase Keberhasilan Penyediaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | 100%    | 0.00%     | 0.00%   | Dinas Pendidikan                                |
| <b>1.01.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>  | Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs   | 100%    |           |         |   |
|   | Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke  | 100%    |           |         |   |
|   | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI  | 97%     |           |         |   |
|   | Angka Partisipasi Kasar (APK)  | 105%    |           |         |   |
|   | Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI  | 0%      |           |         |   |
|   | Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs  | 0%      |           |         |   |
|   | Angka Kelulusan (AL) SD/MI   | 100%    |           |         |   |
|   | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI  | 105.2 % |           |         |   |
|   | Angka Partisipasi Murni (APM)  | 95%     |           |         |   |
| 1.01.16.0001 Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Dasar Sembilan Tahun                                  | Persentase Keberhasilan Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Dasar Sembilan Tahun                                  | 100%    | 0.00%     | 0.00%   | Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang |
| 1.01.16.0002 Pelaksanaan Ujian Nasional DIKDAS  | Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Ujian Nasional DIKDAS  | 100%    | 43.45%    | 43.45%  | Dinas Pendidikan                                |
| 1.01.16.0003 Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar DIKDAS  | Persentase Keberhasilan Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar DIKDAS  | 100%    | 7.21%     | 7.21%   | Dinas Pendidikan                                |
| 1.01.16.0004 Fasilitasi Pemberian Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) Jenjang Pendidikan Dasar                  | Persentase Keberhasilan Fasilitasi Pemberian Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) Jenjang Pendidikan Dasar                  | 100%    | 0.00%     | 0.00%   | Dinas Pendidikan                                |
| 1.01.16.0005 Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Dasar   | Persentase Keberhasilan Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Dasar   | 100%    | 25.00%    | 25.00%  | Dinas Pendidikan                                |
| 1.01.16.0006 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus DIKDAS                          | Persentase Keberhasilan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus DIKDAS                          | 100%    | 8.33%     | 8.33%   | Dinas Pendidikan                                |
| 1.01.16.0007 Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKDAS  | Persentase Keberhasilan Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKDAS  | 100%    | 31.25%    | 31.25%  | Dinas Pendidikan                                |
| 1.01.16.0008 Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa DIKDAS  | Persentase Keberhasilan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa DIKDAS  | 100%    | 20.10%    | 20.10%  | Dinas Pendidikan                                |
| <b>1.01.17 Program Pendidikan Menengah</b>  | Angka Kelulusan (AL) SMA /MA   | 100%    |           |         |   |
|   | Angka Partisipasi Kasar (APK)  | 105%    |           |         |   |
|   | Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke  | 100%    |           |         |   |
|   | Angka Kelulusan (AL) SMK   | 100%    |           |         |   |
|   | Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA   | 0%      |           |         |   |
|   | Siswa kejuruan yang lulus ujian  | 100%    |           |         |   |
|   | Angka Partisipasi Murni (APM)  | 100%    |           |         |   |
|   | Angka Putus Sekolah (APS) SMK  | 0%      |           |         |   |
| 1.01.17.0004 Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Menengah  | Persentase Keberhasilan Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Menengah  | 100%    | 0.00%     | 0.00%   | Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang |

| Urusan-Program-Kegiatan  | 2016 (Triwulan I)   |         |           |         | SKPD                       |
|--|---|---------|-----------|---------|----------------------------|
|  | Indikator   | Target  | Realisasi | Capaian |                            |
| 1.01.17.0001 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK   | Persentase Keberhasilan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK   | 100%    | 6.85%     | 6.85%   | Dinas Pendidikan           |
| 1.01.17.0002 Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Menengah   | Persentase Keberhasilan Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Menengah   | 100%    | 25.00%    | 25.00%  | Dinas Pendidikan           |
| 1.01.17.0003 Fasilitasi Pemberian Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) Jenjang Pendidikan Menengah    | Persentase Keberhasilan Fasilitasi Pemberian Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) Jenjang Pendidikan Menengah    | 100%    | 25.00%    | 25.00%  | Dinas Pendidikan           |
| 1.01.17.0005 Fasilitasi Promosi Kompetensi Siswa Pendidikan Menengah   | Persentase Keberhasilan Fasilitasi Promosi Kompetensi Siswa Pendidikan Menengah   | 100%    | 0.00%     | 0.00%   | Dinas Pendidikan           |
| 1.01.17.0006 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan Sekolah Seni DIKMEN | Persentase Keberhasilan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan Sekolah Seni DIKMEN | 100%    | 25.00%    | 25.00%  | Dinas Pendidikan           |
| 1.01.17.0007 Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKMEN   | Persentase Keberhasilan Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKMEN   | 100%    | 0.00%     | 0.00%   | Dinas Pendidikan           |
| 1.01.17.0008 Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa DIKMEN   | Persentase Keberhasilan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa DIKMEN   | 100%    | 42.05%    | 42.05%  | Dinas Pendidikan           |
| 1.01.17.0009 Pelaksanaan Ujian Nasional DIKMEN   | Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Ujian Nasional DIKMEN   | 100%    | 0.00%     | 0.00%   | Dinas Pendidikan           |
| 1.01.17.0010 Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar DIKMEN   | Persentase Keberhasilan Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar DIKMEN   | 100%    | 38.27%    | 38.27%  | Dinas Pendidikan           |
| <b>1.01.18 Program Pendidikan Non Formal</b>   | Lembaga kursus dan pelatihan yang siap untuk diakreditasi   | 25%     |           |         |                            |
|  | Ketuntasan pendidikan kesetaraan  | 90%     |           |         |                            |
| 1.01.18.0001 Fasilitasi Pembinaan Pendidikan Kesetaraan  | Persentase Keberhasilan Fasilitasi Pembinaan Pendidikan Kesetaraan  | 100%    | 32.82%    | 32.82%  | Dinas Pendidikan           |
| 1.01.18.0002 Fasilitasi Penunjang Kursus dan Pelatihan Serta Pendidikan Masyarakat                           | Persentase Keberhasilan Fasilitasi Penunjang Kursus dan Pelatihan Serta Pendidikan Masyarakat                           | 100%    | 4.53%     | 4.53%   | Dinas Pendidikan           |
| <b>1.01.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>                                     | Pendidik yang kompeten  | 71.05 % |           |         |                            |
| 1.01.20.0001 Peningkatan Mutu Guru Swasta SD/MI/SDLB/SLB/Salafiyah Ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah Wustho        | Persentase Keberhasilan Peningkatan Mutu Guru Swasta SD/MI/SDLB/SLB/Salafiyah Ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah Wustho        | 100%    | 0.00%     | 0.00%   | Dinas Pendidikan           |
| 1.01.20.0002 Fasilitasi Pendidikan Akademik Bagi Pendidik  | Persentase Keberhasilan Fasilitasi Pendidikan Akademik Bagi Pendidik  | 100%    | 0.00%     | 0.00%   | Dinas Pendidikan           |
| 1.01.20.0003 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan                             | Persentase Keberhasilan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan                             | 100%    | 0.34%     | 0.34%   | Dinas Pendidikan           |
| <b>1.01.23 Program Peningkatan Prestasi Non Akademik</b>   | Peningkatan jumlah prestasi non akademik  | 78%     |           |         |                            |
| 1.01.23.0001 Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa PLS  | Persentase Keberhasilan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa PLS  | 100%    | 39.35%    | 39.35%  | Dinas Pendidikan           |
| <b>1.02 Kesehatan</b>  |   |         |           |         |                            |
| <b>1.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>  | Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  | 70%     |           |         |                            |
| 1.02.01.0001 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran  | Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran  | 100%    | 24.08%    | 24.08%  | Dinas Kesehatan            |
| 1.02.01.0003 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran  | Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran  | 100%    | 20.15%    | 20.15%  | RSUD Bhakti Dharma Husada  |
| 1.02.01.0002 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran  | Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran  | 100%    | 30.93%    | 30.93%  | RSUD Dr. Mohamad Soewandie |
| <b>1.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>   | Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                     | 70%     |           |         |                            |
| 1.02.02.0003 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran                                     | Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran                                     | 100%    | 23.77%    | 23.77%  | Dinas Kesehatan            |
| 1.02.02.0002 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran                                     | Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran                                     | 100%    | 25.00%    | 25.00%  | RSUD Bhakti Dharma Husada  |
| 1.02.02.0001 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran                                     | Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran                                     | 100%    | 20.00%    | 20.00%  | RSUD Dr. Mohamad Soewandie |
| <b>1.02.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan</b>   | Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan  | 82%     |           |         |                            |
|  | Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD dr. M. Soewandhie   | 100%    |           |         |                            |
|  | Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada  | 100%    |           |         |                            |

| Urusan-Program-Kegiatan  | 2016 (Triwulan I)   |        |           |         | SKPD                       |
|--|---|--------|-----------|---------|----------------------------|
|  | Indikator   | Target | Realisasi | Capaian |                            |
| 1.02.15.0003 Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan  | Persentase Keberhasilan Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan  | 100%   | 14.71%    | 14.71%  | Dinas Kesehatan            |
| 1.02.15.0002 Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan  | Persentase Keberhasilan Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan  | 100%   | 25.00%    | 25.00%  | RSUD Bhakti Dharma Husada  |
| 1.02.15.0001 Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan  | Persentase Keberhasilan Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan  | 100%   | 25.00%    | 25.00%  | RSUD Dr. Mohamad Soewandie |
| <b>1.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>  | Persentase Masyarakat Yang Terlayani Pelayanan Khusus   | 100%   |           |         |                            |
|  | Cakupan kelurahan mengalami KLB   | 100%   |           |         |                            |
|  | Jumlah sample yang memenuhi syarat  | 80%    |           |         |                            |
|  | Cakupan Kelurahan Yang Memiliki   | 10%    |           |         |                            |
| 1.02.16.0001 Peningkatan Surveylans Epidemiologi, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular | Persentase Keberhasilan Peningkatan Surveylans Epidemiologi, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular | 100%   | 17.33%    | 17.33%  | Dinas Kesehatan            |
| 1.02.16.0002 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus  | Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus  | 100%   | 37.76%    | 37.76%  | Dinas Kesehatan            |
| 1.02.16.0003 Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular  | Persentase Keberhasilan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular  | 100%   | 13.92%    | 13.92%  | Dinas Kesehatan            |
| 1.02.16.0004 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan   | Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan   | 100%   | 18.99%    | 18.99%  | Dinas Kesehatan            |
| 1.02.16.0005 Peningkatan Pengawasan Makanan Olahan   | Persentase Keberhasilan Peningkatan Pengawasan Makanan Olahan   | 100%   | 20.72%    | 20.72%  | Dinas Kesehatan            |
| 1.02.16.0006 Pengadaan Obat dan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)          | Persentase Keberhasilan Pengadaan Obat dan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)          | 100%   | 0.00%     | 0.00%   | Dinas Kesehatan            |
| 1.02.16.0007 DAK Bantuan Operasional Kesehatan   | Persentase Keberhasilan DAK Bantuan Operasional Kesehatan   | 100%   | 3.79%     | 3.79%   | Dinas Kesehatan            |
| 1.02.16.0008 DAK Jampersal   | Persentase Keberhasilan DAK Jampersal   | 100%   | 0.00%     | 0.00%   | Dinas Kesehatan            |
| <b>1.02.20 Program Perbaikan Gizi</b>  | Prevalensi Balita Kurang Gizi (< 20 %)  | 20%    |           |         |                            |
| 1.02.20.0001 Peningkatan Dan Perbaikan Gizi Masyarakat   | Persentase Keberhasilan Peningkatan Dan Perbaikan Gizi Masyarakat   | 100%   | 3.80%     | 3.80%   | Dinas Kesehatan            |
| <b>1.02.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>  | Tercapainya Standar Pelayanan Mutu Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada   | 71%    |           |         |                            |
|  | Jumlah sarana kesehatan berizin yang memenuhi standar sarana kesehatan  | 100%   |           |         |                            |
|  | Tercapainya Standar Pelayanan Mutu Rumah Sakit dr. Mohamad Soewandhie   | 75%    |           |         |                            |
|  | Persentase tenaga kesehatan yang teregistrasi   | 100%   |           |         |                            |
| 1.02.23.0001 Peningkatan Profesionalisme SDM Kesehatan   | Persentase Keberhasilan Peningkatan Profesionalisme SDM Kesehatan   | 100%   | 85.73%    | 85.73%  | Dinas Kesehatan            |
| 1.02.23.0003 Akreditasi Puskesmas  | Persentase Keberhasilan Akreditasi Puskesmas  | 100%   | 0.00%     | 0.00%   | Dinas Kesehatan            |
| 1.02.23.0005 Pelayanan Kesehatan Rujukan   | Persentase Keberhasilan Pelayanan Kesehatan Rujukan   | 100%   | 25.12%    | 25.12%  | Dinas Kesehatan            |
| 1.02.23.0006 Sertifikasi dan Akreditasi SDM Kesehatan  | Persentase Keberhasilan Sertifikasi dan Akreditasi SDM Kesehatan  | 100%   | 19.86%    | 19.86%  | Dinas Kesehatan            |
| 1.02.23.0009 Pembinaan Dan Pengembangan SDM Kesehatan  | Persentase Keberhasilan Pembinaan Dan Pengembangan SDM Kesehatan  | 100%   | 1.15%     | 1.15%   | Dinas Kesehatan            |
| 1.02.23.0002 Pelayanan Medik Rumah Sakit   | Persentase Keberhasilan Pelayanan Medik Rumah Sakit   | 100%   | 25.00%    | 25.00%  | RSUD Bhakti Dharma Husada  |
| 1.02.23.0004 Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit   | Persentase Keberhasilan Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit   | 100%   | 25.00%    | 25.00%  | RSUD Bhakti Dharma Husada  |
| 1.02.23.0012 Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit                             | Persentase Keberhasilan Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit                             | 100%   | 38.32%    | 38.32%  | RSUD Bhakti Dharma Husada  |
| 1.02.23.0013 Promosi Kesehatan Rumah Sakit   | Persentase Keberhasilan Promosi Kesehatan Rumah Sakit   | 100%   | 37.50%    | 37.50%  | RSUD Bhakti Dharma Husada  |
| 1.02.23.0007 Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit   | Persentase Keberhasilan Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit   | 100%   | 37.73%    | 37.73%  | RSUD Dr. Mohamad Soewandie |
| 1.02.23.0008 Pelayanan Medik Rumah Sakit   | Persentase Keberhasilan Pelayanan Medik Rumah Sakit   | 100%   | 33.33%    | 33.33%  | RSUD Dr. Mohamad Soewandie |

| Urusan-Program-Kegiatan   | 2016 (Triwulan I)  |        |           |         | SKPD  |
|---|--|--------|-----------|---------|---|
|   | Indikator  | Target | Realisasi | Capaian |   |
| 1.02.23.0010 Peningkatan Mutu SDM Rumah Sakit   | Persentase Keberhasilan Peningkatan Mutu SDM Rumah Sakit   | 100%   | 19.68%    | 19.68%  | RSUD Dr. Mohamad Soewandie                      |
| 1.02.23.0011 Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit  | Persentase Keberhasilan Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit  | 100%   | 0.00%     | 0.00%   | RSUD Dr. Mohamad Soewandie                      |
| <b>1.02.24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin</b>  | Persentase masyarakat miskin yang memiliki jaminan kesehatan terlayani   | 100%   |           |         |   |
| 1.02.24.0001 Jaminan Kesehatan Masyarakat   | Persentase Keberhasilan Jaminan Kesehatan Masyarakat   | 100%   | 26.19%    | 26.19%  | Dinas Kesehatan                                 |
| <b>1.02.25 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya</b>    | Ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas  | 72%    |           |         |   |
| 1.02.25.0002 Operasional Pelayanan Kesehatan  | Persentase Keberhasilan Operasional Pelayanan Kesehatan  | 100%   | 93.75%    | 93.75%  | Dinas Kesehatan                                 |
| 1.02.25.0003 Peningkatan Sarana dan Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas  | Persentase Keberhasilan Peningkatan Sarana dan Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas  | 100%   | 0.00%     | 0.00%   | Dinas Kesehatan                                 |
| 1.02.25.0004 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan  | Persentase Keberhasilan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan  | 100%   | 25.00%    | 25.00%  | Dinas Kesehatan                                 |
| 1.02.25.0001 Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Puskesmas/Puskemas Pembantu  | Persentase Keberhasilan Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Puskesmas/Puskemas Pembantu  | 100%   | 0.00%     | 0.00%   | Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang |
| <b>1.02.26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-</b>               | Ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar RSUD dr. Mohamad Soewandhie   | 75%    |           |         |   |
|   | Ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar RSUD Bhakti Dharma Husada   | 80%    |           |         |   |
| 1.02.26.0007 Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan Peralatan RSUD   | Persentase Keberhasilan Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan Peralatan RSUD   | 100%   | 0.00%     | 0.00%   | Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang |
| 1.02.26.0001 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Asap Rokok | Persentase Keberhasilan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Asap Rokok | 100%   | 200.00%   | 200.00% | RSUD Bhakti Dharma Husada                       |
| 1.02.26.0006 Pengadaan Sarana Kesehatan yang Bersumber dari Pajak Rokok   | Persentase Keberhasilan Pengadaan Sarana Kesehatan yang Bersumber dari Pajak Rokok   | 100%   | 25.00%    | 25.00%  | RSUD Bhakti Dharma Husada                       |
| 1.02.26.0009 Pengadaan Dan Pemeliharaan Alat Kesehatan Rumah Sakit  | Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Alat Kesehatan Rumah Sakit  | 100%   | 25.00%    | 25.00%  | RSUD Bhakti Dharma Husada                       |
| 1.02.26.0002 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Asap Rokok | Persentase Keberhasilan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Asap Rokok | 100%   | 0.00%     | 0.00%   | RSUD Dr. Mohamad Soewandie                      |
| 1.02.26.0003 Pengadaan Sarana Kesehatan yang Bersumber dari Pajak Rokok   | Persentase Keberhasilan Pengadaan Sarana Kesehatan yang Bersumber dari Pajak Rokok   | 100%   | 0.00%     | 0.00%   | RSUD Dr. Mohamad Soewandie                      |
| 1.02.26.0004 Pengadaan Sarana Kesehatan yang Bersumber dari DAK Kesehatan   | Persentase Keberhasilan Pengadaan Sarana Kesehatan yang Bersumber dari DAK Kesehatan   | 100%   | 25.00%    | 25.00%  | RSUD Dr. Mohamad Soewandie                      |
| 1.02.26.0008 Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit   | Persentase Keberhasilan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit   | 100%   | 50.00%    | 50.00%  | RSUD Dr. Mohamad Soewandie                      |
| <b>1.02.32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak</b>  | Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4   | 98%    |           |         |   |
|   | Cakupan kunjungan bayi   | 90%    |           |         |   |
|   | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Tolinakes) yang memiliki kompetensi kebidanan  | 96%    |           |         |   |
| 1.02.32.0001 Peningkatan Kesehatan Masyarakat   | Persentase Keberhasilan Peningkatan Kesehatan Masyarakat   | 100%   | 4.84%     | 4.84%   | Dinas Kesehatan                                 |
| 1.02.32.0002 Pelayanan Kesehatan Ibu melahirkan dan Anak  | Persentase Keberhasilan Pelayanan Kesehatan Ibu melahirkan dan Anak  | 100%   | 15.26%    | 15.26%  | Dinas Kesehatan                                 |
| <b>1.03 Pekerjaan Umum</b>  |  |        |           |         |   |
| <b>1.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>   | Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Pelayanan Administrasi Perkantoran   | 70%    |           |         |   |
| 1.03.01.0001 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran   | Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran   | 100%   | 25.08%    | 25.08%  | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan   |
| <b>1.03.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>  | Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  | 70%    |           |         |   |

| Urusan-Program-Kegiatan  | 2016 (Triwulan I)   |         |           |         | SKPD  |
|--|---|---------|-----------|---------|---|
|  | Indikator   | Target  | Realisasi | Capaian |   |
| 1.03.02.0001 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran                         | Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran                         | 100%    | 25.03%    | 25.03%  | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan |
| <b>1.03.28 Program Pengendalian Banjir</b>   | tingkat genangan  | 30.7 -  |           |         |   |
| 1.03.28.0001 Pengendalian Dan Normalisasi Saluran Drainase Dan Boezem                            | Persentase Keberhasilan Pengendalian Dan Normalisasi Saluran Drainase Dan Boezem                            | 100%    | 24.51%    | 24.51%  | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan |
| 1.03.28.0002 Perencanaan Pematusan Kota  | Persentase Keberhasilan Perencanaan Pematusan Kota  | 100%    | 13.00%    | 13.00%  | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan |
| 1.03.28.0003 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong | Persentase Keberhasilan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong | 100%    | 0.00%     | 0.00%   | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan |
| 1.03.28.0004 Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Pematusan                                       | Persentase Keberhasilan Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Pematusan                                       | 100%    | 25.00%    | 25.00%  | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan |
| 1.03.28.0005 Pembangunan, Penyediaan Dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Pematusan                 | Persentase Keberhasilan Pembangunan, Penyediaan Dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Pematusan                 | 100%    | 0.00%     | 0.00%   | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan |
| <b>1.03.31 Program Pengelolaan dan</b>   | Penambahan jalan baru   | 1000 m2 |           |         |   |
|  | Persentase jalan dalam kondisi baik   | 94.95 % |           |         |   |
|  | Peningkatan Penyediaan Prasarana Pejalan Kaki   | 3.8 %   |           |         |   |
| 1.03.31.0001 Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan                         | Persentase Keberhasilan Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan                         | 100%    | 19.05%    | 19.05%  | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan |
| 1.03.31.0002 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan             | Persentase Keberhasilan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan             | 100%    | 0.00%     | 0.00%   | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan |
| 1.03.31.0003 Koordinasi Jaringan Utilitas  | Persentase Keberhasilan Koordinasi Jaringan Utilitas  | 100%    | 20.00%    | 20.00%  | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan |
| 1.03.31.0004 Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan                                     | Persentase Keberhasilan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan                                     | 100%    | 0.00%     | 0.00%   | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan |
| 1.03.31.0005 Pembangunan Kelengkapan Jalan   | Persentase Keberhasilan Pembangunan Kelengkapan Jalan   | 100%    | 0.00%     | 0.00%   | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan |
| 1.03.31.0006 Operasional Dan Pemeliharaan Peralatan Dan Alat Angkut                              | Persentase Keberhasilan Operasional Dan Pemeliharaan Peralatan Dan Alat Angkut                              | 100%    | 25.00%    | 25.00%  | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan |
| 1.03.31.0007 Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jalan, Jembatan Dan Kelengkapannya                    | Persentase Keberhasilan Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jalan, Jembatan Dan Kelengkapannya                    | 100%    | 10.79%    | 10.79%  | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan |
| 1.03.31.0008 Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan (DAK IPD)                           | Persentase Keberhasilan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan (DAK IPD)                           | 100%    | 0.00%     | 0.00%   | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan |
| <b>1.03.32 Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan</b>                                 | Penambahan Jaringan Infrastruktur Air Bersih  | 2000 m  |           |         |   |
| 1.03.32.0001 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Jaringan Air Bersih                  | Persentase Keberhasilan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Jaringan Air Bersih                  | 100%    | 0.00%     | 0.00%   | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan |
| 1.03.32.0002 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK Air Minum)                           | Persentase Keberhasilan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK Air Minum)                           | 100%    | 0.00%     | 0.00%   | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan |
| <b>1.04 Perumahan</b>  |   |         |           |         |   |
| <b>1.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>  | Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                | 70%     |           |         |   |
| 1.04.01.0001 Penyediaan Barang Dan   | Persentase Keberhasilan Penyediaan  | 100%    | 25.00%    | 25.00%  | Dinas Kebakaran                               |
| <b>1.04.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                                 | Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                         | 70%     |           |         |   |
| 1.04.02.0001 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran                         | Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran                         | 100%    | 25.00%    | 25.00%  | Dinas Kebakaran                               |
| <b>1.04.21 Program Utilitas Perkotaan</b>  | Lama perbaikan PJU padam <6 jam   | 64%     |           |         |   |



| Urusan-Program-Kegiatan | 2016 (Triwulan I)  |   |            |         | SKPD    |   |
|-------------------------|--|---|------------|---------|---------|---|
|                         | Indikator  | Target  | Realisasi  | Capaian |         |   |
|                         | Panjang jalan yang sudah mendapatkan penerangan  | 2431470 meter   |            |         |         |   |
|                         | Persentase penggunaan LED untuk PJU  | 13%   |            |         |         |   |
|                         | 1.04.21.0001 Pengadaan Dan Pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum                                   | Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum                                   | 100%       | 11.50%  | 11.50%  | Dinas Kebersihan dan Pertamanan                 |
|                         | 1.04.21.0002 Pemasangan Penerangan Jalan Umum  | Persentase Keberhasilan Pemasangan Penerangan Jalan Umum  | 100%       | 0.00%   | 0.00%   | Dinas Kebersihan dan Pertamanan                 |
|                         | <b>1.04.22 Program Perumahan dan Permukiman</b>  | Luas kawasan perumahan permukiman yang mendapat peningkatan layanan sarana prasarana                              | 591.51 Ha  |         |         |   |
|                         |  | Jumlah MBR yang telah mendapatkan rumah layak huni  | 3691 KK    |         |         |   |
|                         | 1.04.22.0002 Pemeliharaan Dan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Makam                                   | Persentase Keberhasilan Pemeliharaan Dan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Makam                                   | 100%       | 6.00%   | 6.00%   | Dinas Kebersihan dan Pertamanan                 |
|                         | 1.04.22.0001 Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Permukiman                                  | Persentase Keberhasilan Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Permukiman                                  | 100%       | 0.00%   | 0.00%   | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan   |
|                         | 1.04.22.0003 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dasar Permukiman   | Persentase Keberhasilan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dasar Permukiman   | 100%       | 5.88%   | 5.88%   | Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang |
|                         | 1.04.22.0005 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi)                             | Persentase Keberhasilan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi)                             | 100%       | 0.00%   | 0.00%   | Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang |
|                         | 1.04.22.0004 Pengelolaan Dan Pemeliharaan Rumah Susun Sederhana Sewa                                   | Persentase Keberhasilan Pengelolaan Dan Pemeliharaan Rumah Susun Sederhana Sewa                                   | 100%       | 24.39%  | 24.39%  | Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah            |
|                         | <b>1.04.23 Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran</b>   | Pencapaian waktu tanggap kurang dari 15 menit   | 90%        |         |         |   |
|                         |  | Jumlah penduduk Surabaya yang memiliki pengetahuan mengenai pencegahan dan penanganan kebakaran                   | 7427 Orang |         |         |   |
|                         |  | Persentase pemenuhan kebutuhan jumlah sarana prasarana kebakaran eksisting dibanding kebutuhan ideal              | 66%        |         |         |   |
|                         | 1.04.23.0001 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran                         | Persentase Keberhasilan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran                         | 100%       | 25.00%  | 25.00%  | Dinas Kebakaran                                 |
|                         | 1.04.23.0002 Pembinaan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran                                       | Persentase Keberhasilan Pembinaan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran                                       | 100%       | 35.34%  | 35.34%  | Dinas Kebakaran                                 |
|                         | 1.04.23.0004 Simulasi Dan Latihan Bersama Penanggulangan Kebakaran                                     | Persentase Keberhasilan Simulasi Dan Latihan Bersama Penanggulangan Kebakaran                                     | 100%       | 90.67%  | 90.67%  | Dinas Kebakaran                                 |
|                         | 1.04.23.0005 Penanggulangan Bahaya Kebakaran   | Persentase Keberhasilan Penanggulangan Bahaya Kebakaran   | 100%       | 25.00%  | 25.00%  | Dinas Kebakaran                                 |
|                         | 1.04.23.0006 Koordinasi Dan Pemeriksaan Keandalan Sistem Proteksi Kebakaran Pada Gedung/Bangunan       | Persentase Keberhasilan Koordinasi Dan Pemeriksaan Keandalan Sistem Proteksi Kebakaran Pada Gedung/Bangunan       | 100%       | 23.85%  | 23.85%  | Dinas Kebakaran                                 |
|                         | 1.04.23.0007 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran                            | Persentase Keberhasilan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran                            | 100%       | 0.42%   | 0.42%   | Dinas Kebakaran                                 |
|                         | 1.04.23.0003 Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Pemadam Kebakaran                                      | Persentase Keberhasilan Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Pemadam Kebakaran                                      | 100%       | 0.00%   | 0.00%   | Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang |
|                         | <b>1.05 Penataan Ruang</b>   |   |            |         |         |   |
|                         | <b>1.05.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>  | Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                      | 70%        |         |         |   |
|                         | 1.05.01.0001 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran  | Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran  | 100%       | 134.40% | 134.40% | Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang |
|                         | <b>1.05.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                                       | Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                               | 70%        |         |         |   |
|                         | 1.05.02.0001 Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah | Persentase Keberhasilan Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah | 100%       | 0.00%   | 0.00%   | Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang |

| Urusan-Program-Kegiatan  | 2016 (Triwulan I)   |        |           |         | SKPD  |
|--|---|--------|-----------|---------|---|
|  | Indikator   | Target | Realisasi | Capaian |   |
| 1.05.02.0002 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran   | Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran   | 100%   | 35.42%    | 35.42%  | Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang |
| <b>1.05.18 Program Penataan Ruang</b>  | proporsi luas area yang telah terlayani sistem informasi rencana tata ruang kota  | 20%    |           |         |   |
| 1.05.18.0001 Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Surabaya   | Persentase Keberhasilan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Surabaya   | 100%   | 0.00%     | 0.00%   | Badan Perencanaan Pembangunan Kota              |
| 1.05.18.0015 Pendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Penataan Ruang  | Persentase Keberhasilan Pendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Penataan Ruang  | 100%   | 0.00%     | 0.00%   | Badan Perencanaan Pembangunan Kota              |
| 1.05.18.0002 Pendataan Dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang  | Persentase Keberhasilan Pendataan Dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang  | 100%   | 33.84%    | 33.84%  | Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang |
| 1.05.18.0006 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota   | Persentase Keberhasilan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota   | 100%   | 0.00%     | 0.00%   | Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang |
| 1.05.18.0007 Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota  | Persentase Keberhasilan Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota  | 100%   | 12.65%    | 12.65%  | Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang |
| 1.05.18.0008 Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUJK)  | Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUJK)  | 100%   | 46.67%    | 46.67%  | Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang |
| 1.05.18.0010 Pendataan Bidang Tata Kota Dan Bangunan Berbasis GIS  | Persentase Keberhasilan Pendataan Bidang Tata Kota Dan Bangunan Berbasis GIS  | 100%   | 3.88%     | 3.88%   | Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang |
| 1.05.18.0011 Penataan Dan Penyelenggaraan Bangunan   | Persentase Keberhasilan Penataan Dan Penyelenggaraan Bangunan   | 100%   | 32.20%    | 32.20%  | Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang |
| 1.05.18.0012 Pengawasan Pengendalian Dan Penertiban Tata Bangunan  | Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Penertiban Tata Bangunan  | 100%   | 19.05%    | 19.05%  | Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang |
| 1.05.18.0016 Penunjang Sekretariat Verifikasi Prasarana, Sarana Dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan Dan Permukiman | Persentase Keberhasilan Penunjang Sekretariat Verifikasi Prasarana, Sarana Dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan Dan Permukiman | 100%   | 0.00%     | 0.00%   | Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang |
| 1.05.18.0017 Survey Dan Pemetaan Peningkatan Infrastruktur Kota  | Persentase Keberhasilan Survey Dan Pemetaan Peningkatan Infrastruktur Kota  | 100%   | 23.33%    | 23.33%  | Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang |
| 1.05.18.0003 Penanganan Masalah Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya   | Persentase Keberhasilan Penanganan Masalah Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya   | 100%   | 25.00%    | 25.00%  | Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah            |
| 1.05.18.0004 Penanganan Masalah Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya  | Persentase Keberhasilan Penanganan Masalah Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya  | 100%   | 20.00%    | 20.00%  | Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah            |
| 1.05.18.0005 Survey Dan Pemetaan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya   | Persentase Keberhasilan Survey Dan Pemetaan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya   | 100%   | 54.20%    | 54.20%  | Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah            |
| 1.05.18.0009 Pendataan Dan Pemanfaatan Terhadap BTKD   | Persentase Keberhasilan Pendataan Dan Pemanfaatan Terhadap BTKD   | 100%   | 45.80%    | 45.80%  | Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah            |
| 1.05.18.0013 Pengendalian Dan Penertiban Pemanfaatan Tanah/Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya                                    | Persentase Keberhasilan Pengendalian Dan Penertiban Pemanfaatan Tanah/Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya                                    | 100%   | 222.73%   | 222.73% | Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah            |
| 1.05.18.0014 Penyusunan Peraturan Tentang Pengelolaan Dan Ijin Tanah/Bangunan Aset Pemkot  | Persentase Keberhasilan Penyusunan Peraturan Tentang Pengelolaan Dan Ijin Tanah/Bangunan Aset Pemkot  | 100%   | 0.00%     | 0.00%   | Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah            |
| <b>1,06 Perencanaan Pembangunan</b>  |   |        |           |         |   |
| <b>1.06.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>  | Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  | 70%    |           |         |   |



| Urusan-Program-Kegiatan  | 2016 (Triwulan I)   |        |           |         | SKPD                                 |
|--|---|--------|-----------|---------|--------------------------------------|
|  | Indikator   | Target | Realisasi | Capaian |                                      |
| 1.06.01.0003 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran  | Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran  | 100%   | 20.83%    | 20.83%  | Badan Perencanaan Pembangunan Kota   |
| 1.06.01.0001 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran  | Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran  | 100%   | 21.68%    | 21.68%  | Bagian Kesejahteraan Rakyat          |
| 1.06.01.0002 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran  | Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran  | 100%   | 18.95%    | 18.95%  | Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah |
| <b>1.06.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>   | Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                       | 70%    |           |         |                                      |
| 1.06.02.0003 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran                                       | Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran                                       | 100%   | 18.23%    | 18.23%  | Badan Perencanaan Pembangunan Kota   |
| 1.06.02.0001 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran                                       | Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran                                       | 100%   | 22.92%    | 22.92%  | Bagian Kesejahteraan Rakyat          |
| 1.06.02.0002 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran                                       | Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran                                       | 100%   | 37.50%    | 37.50%  | Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah |
| <b>1.06.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>  | Kualitas Penyusunan Perencanaan Strategis   | 60%    |           |         |                                      |
|  | Kualitas Monitoring dan Evaluasi  | 88%    |           |         |                                      |
| 1.06.21.0003 Monitoring Dan Evaluasi Sistem Transportasi Berkelanjutan   | Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Evaluasi Sistem Transportasi Berkelanjutan   | 100%   | 0.00%     | 0.00%   | Badan Perencanaan Pembangunan Kota   |
| 1.06.21.0010 Penyusunan Dan Analisa Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi                             | Persentase Keberhasilan Penyusunan Dan Analisa Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi                             | 100%   | 0.00%     | 0.00%   | Badan Perencanaan Pembangunan Kota   |
| 1.06.21.0011 Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan   | Persentase Keberhasilan Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan   | 100%   | 33.70%    | 33.70%  | Badan Perencanaan Pembangunan Kota   |
| 1.06.21.0014 Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Kota Surabaya   | Persentase Keberhasilan Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Kota Surabaya   | 100%   | 0.00%     | 0.00%   | Badan Perencanaan Pembangunan Kota   |
| 1.06.21.0016 Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah                                  | Persentase Keberhasilan Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah                                  | 100%   | 84.70%    | 84.70%  | Badan Perencanaan Pembangunan Kota   |
| 1.06.21.0029 Penyusunan Perencanaan Bidang Kesejahteraan Rakyat  | Persentase Keberhasilan Penyusunan Perencanaan Bidang Kesejahteraan Rakyat  | 100%   | 9.13%     | 9.13%   | Badan Perencanaan Pembangunan Kota   |
| 1.06.21.0032 Penyusunan Perencanaan Bidang Aparatur Pemerintahan   | Persentase Keberhasilan Penyusunan Perencanaan Bidang Aparatur Pemerintahan   | 100%   | 0.00%     | 0.00%   | Badan Perencanaan Pembangunan Kota   |
| 1.06.21.0037 Penyusunan Rencana Pengembangan Potensi Unggulan Di Kota Surabaya                                 | Persentase Keberhasilan Penyusunan Rencana Pengembangan Potensi Unggulan Di Kota Surabaya                                 | 100%   | 0.00%     | 0.00%   | Badan Perencanaan Pembangunan Kota   |
| 1.06.21.0039 Monitoring Dan Evaluasi Dana Dekonsentrasi , Tugas Pembantuan Dan Dana Alokasi Khusus             | Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Evaluasi Dana Dekonsentrasi , Tugas Pembantuan Dan Dana Alokasi Khusus             | 100%   | 0.00%     | 0.00%   | Badan Perencanaan Pembangunan Kota   |
| 1.06.21.0040 Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah   | Persentase Keberhasilan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah   | 100%   | 15.35%    | 15.35%  | Badan Perencanaan Pembangunan Kota   |
| 1.06.21.0041 Penyusunan Strategi Pengembangan Potensi PAD  | Persentase Keberhasilan Penyusunan Strategi Pengembangan Potensi PAD  | 100%   | 0.00%     | 0.00%   | Badan Perencanaan Pembangunan Kota   |
| 1.06.21.0052 Penunjang Perencanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Dan Teknologi Informasi Dan Komunikasi | Persentase Keberhasilan Penunjang Perencanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Dan Teknologi Informasi Dan Komunikasi | 100%   | 0.00%     | 0.00%   | Badan Perencanaan Pembangunan Kota   |
| 1.06.21.0053 Penunjang Perhubungan Dan Pematuan  | Persentase Keberhasilan Penunjang Perhubungan Dan Pematuan  | 100%   | 0.00%     | 0.00%   | Badan Perencanaan Pembangunan Kota   |
| 1.06.21.0023 Penyusunan Evaluasi Dan Laporan Kinerja APBD  | Persentase Keberhasilan Penyusunan Evaluasi Dan Laporan Kinerja APBD  | 100%   | 8.13%     | 8.13%   | Bagian Bina Program                  |

| Urusan-Program-Kegiatan   | 2016 (Triwulan I)  |        |           |         | SKPD                               |
|---|--|--------|-----------|---------|------------------------------------|
|   | Indikator  | Target | Realisasi | Capaian |                                    |
| 1.06.21.0044 Pelaksanaan Penyusunan Bahan RAPBD Dan Perubahan APBD                  | Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Penyusunan Bahan RAPBD Dan Perubahan APBD                  | 100%   | 14.53%    | 14.53%  | Bagian Bina Program                |
| 1.06.21.0049 Monitoring Dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan                       | Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan                       | 100%   | 50.73%    | 50.73%  | Bagian Bina Program                |
| 1.06.21.0050 Pengendalian Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Pemerintahan       | Persentase Keberhasilan Pengendalian Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Pemerintahan       | 100%   | 25.00%    | 25.00%  | Bagian Bina Program                |
| 1.06.21.0017 Evaluasi Program Bidang Kesejahteraan Sosial Dan Pemberdayaan Keluarga | Persentase Keberhasilan Evaluasi Program Bidang Kesejahteraan Sosial Dan Pemberdayaan Keluarga | 100%   | 26.45%    | 26.45%  | Bagian Kesejahteraan Rakyat        |
| 1.06.21.0048 Evaluasi Program Bidang Pendidikan                                     | Persentase Keberhasilan Evaluasi Program Bidang Pendidikan                                     | 100%   | 6.95%     | 6.95%   | Bagian Kesejahteraan Rakyat        |
| 1.06.21.0051 Evaluasi Program Bidang Kesehatan                                      | Persentase Keberhasilan Evaluasi Program Bidang Kesehatan                                      | 100%   | 9.73%     | 9.73%   | Bagian Kesejahteraan Rakyat        |
| 1.06.21.0005 Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan          | Persentase Keberhasilan Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan          | 100%   | 100.00%   | 100.00% | Bagian Organisasi dan Tata Laksana |
| 1.06.21.0008 Evaluasi LAKIP SKPD  | Persentase Keberhasilan Evaluasi LAKIP SKPD  | 100%   | 0.00%     | 0.00%   | Inspektorat                        |
| 1.06.21.0019 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan                      | Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan                      | 100%   | 100.00%   | 100.00% | Kec. Asemrowo                      |
| 1.06.21.0007 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan                      | Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan                      | 100%   | 100.00%   | 100.00% | Kec. Benowo                        |
| 1.06.21.0036 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan                      | Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan                      | 100%   | 100.00%   | 100.00% | Kec. Bubutan                       |
| 1.06.21.0024 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan                      | Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan                      | 100%   | 100.00%   | 100.00% | Kec. Bulak                         |
| 1.06.21.0009 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan                      | Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan                      | 100%   | 100.00%   | 100.00% | Kec. Dukuh Pakis                   |
| 1.06.21.0022 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan                      | Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan                      | 100%   | 100.00%   | 100.00% | Kec. Gayungan                      |
| 1.06.21.0035 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan                      | Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan                      | 100%   | 100.00%   | 100.00% | Kec. Genteng                       |
| 1.06.21.0027 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan                      | Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan                      | 100%   | 100.00%   | 100.00% | Kec. Gubeng                        |
| 1.06.21.0015 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan                      | Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan                      | 100%   | 100.00%   | 100.00% | Kec. Gunung Anyar                  |
| 1.06.21.0025 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan                      | Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan                      | 100%   | 100.00%   | 100.00% | Kec. Jambangan                     |
| 1.06.21.0030 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan                      | Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan                      | 100%   | 100.00%   | 100.00% | Kec. Karangpilang                  |
| 1.06.21.0043 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan                      | Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan                      | 100%   | 100.00%   | 100.00% | Kec. Kenjeran                      |
| 1.06.21.0038 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan                      | Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan                      | 100%   | 100.00%   | 100.00% | Kec. Krembangan                    |
| 1.06.21.0034 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan                      | Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan                      | 100%   | 100.00%   | 100.00% | Kec. Lakarsantri                   |
| 1.06.21.0045 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan                      | Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan                      | 100%   | 100.00%   | 100.00% | Kec. Mulyorejo                     |
| 1.06.21.0020 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan                      | Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan                      | 100%   | 100.00%   | 100.00% | Kec. Pabean Cantian                |
| 1.06.21.0018 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan                      | Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan                      | 100%   | 100.00%   | 100.00% | Kec. Pakal                         |
| 1.06.21.0004 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan                      | Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan                      | 100%   | 100.00%   | 100.00% | Kec. Rungkut                       |

| Urusan-Program-Kegiatan  | 2016 (Triwulan I)   |             |           |         | SKPD                                 |
|--|---|-------------|-----------|---------|--------------------------------------|
|  | Indikator   | Target      | Realisasi | Capaian |                                      |
| 1.06.21.0042 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan           | Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan           | 100%        | 100.00%   | 100.00% | Kec. Sambikerep                      |
| 1.06.21.0033 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan           | Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan           | 100%        | 100.00%   | 100.00% | Kec. Sawahan                         |
| 1.06.21.0028 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan           | Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan           | 100%        | 100.00%   | 100.00% | Kec. Semampir                        |
| 1.06.21.0001 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan           | Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan           | 100%        | 100.00%   | 100.00% | Kec. Simokerto                       |
| 1.06.21.0006 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan           | Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan           | 100%        | 100.00%   | 100.00% | Kec. Sukolilo                        |
| 1.06.21.0002 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan           | Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan           | 100%        | 100.00%   | 100.00% | Kec. Sukomanunggal                   |
| 1.06.21.0012 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan           | Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan           | 100%        | 100.00%   | 100.00% | Kec. Tambaksari                      |
| 1.06.21.0026 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan           | Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan           | 100%        | 100.00%   | 100.00% | Kec. Tandes                          |
| 1.06.21.0046 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan           | Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan           | 100%        | 100.00%   | 100.00% | Kec. Tegalsari                       |
| 1.06.21.0047 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan           | Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan           | 100%        | 100.00%   | 100.00% | Kec. Tenggilis Mejoyo                |
| 1.06.21.0031 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan           | Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan           | 100%        | 100.00%   | 100.00% | Kec. Wiyung                          |
| 1.06.21.0021 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan           | Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan           | 100%        | 100.00%   | 100.00% | Kec. Wonocolo                        |
| 1.06.21.0013 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan           | Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan           | 100%        | 100.00%   | 100.00% | Kec. Wonokromo                       |
| <b>1.06.26 Program Pengendalian</b>                                      | Peningkatan Kinerja BUMD  | 4 Laporan   |           |         |                                      |
|  | Termanfaatkannya Hasil Monev atau Kajian Sebagai Dasar Kebijakan/Keputusan          | 1 Laporan   |           |         |                                      |
| 1.06.26.0001 Peningkatan Fungsi Pembinaan Dalam Pengembangan BUMD        | Persentase Keberhasilan Peningkatan Fungsi Pembinaan Dalam Pengembangan BUMD        | 100%        | 15.78%    | 15.78%  | Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah |
| 1.06.26.0002 Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Perekonomian Kota Surabaya | Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Perekonomian Kota Surabaya | 100%        | 22.49%    | 22.49%  | Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah |
| <b>1.07 Perhubungan</b>  |   |             |           |         |                                      |
| <b>1.07.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                | Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Pelayanan Administrasi Perkantoran        | 70%         |           |         |                                      |
| 1.07.01.0001 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran                      | Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran                      | 100%        | 24.93%    | 24.93%  | Dinas Perhubungan                    |
| <b>1.07.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>         | Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 70%         |           |         |                                      |
| 1.07.02.0001 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | 100%        | 20.15%    | 20.15%  | Dinas Perhubungan                    |
| <b>1.07.21 Program Pengembangan Sistem</b>                               | Rata-rata Headway Angkutan Umum   | 25.91 menit |           |         |                                      |
|  | Kecepatan perjalanan rata-rata kendaraan di Jalan Arteri Sekunder                   | 30 km/jam   |           |         |                                      |
|  | Penggunaan kendaraan umum (Load Factor)   | 35.54 %     |           |         |                                      |
|  | Kecepatan perjalanan rata-rata kendaraan di Jalan Arteri Primer                     | 30 km/jam   |           |         |                                      |
| 1.07.21.0001 Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Umum                     | Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Umum                     | 100%        | 11.15%    | 11.15%  | Dinas Perhubungan                    |
| 1.07.21.0002 Pemeliharaan Perlengkapan Jalan                             | Persentase Keberhasilan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan                             | 100%        | 22.34%    | 22.34%  | Dinas Perhubungan                    |
| 1.07.21.0003 Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi                   | Persentase Keberhasilan Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi                   | 100%        | 0.00%     | 0.00%   | Dinas Perhubungan                    |
| 1.07.21.0004 Peningkatan Pelayanan Dan Keselamatan Angkutan              | Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Dan Keselamatan Angkutan              | 100%        | 21.96%    | 21.96%  | Dinas Perhubungan                    |

| Urusan-Program-Kegiatan  | 2016 (Triwulan I)   |  |           |         | SKPD              |                                 |
|--|---|--|-----------|---------|-------------------|---------------------------------|
|  | Indikator   | Target   | Realisasi | Capaian |                   |                                 |
| 1.07.21.0005 Pengembangan Sarana Prasarana Transportasi                        | Persentase Keberhasilan Pengembangan Sarana Prasarana Transportasi                        | 100%   | 0.00%     | 0.00%   | Dinas Perhubungan |                                 |
| 1.07.21.0006 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi                    | Persentase Keberhasilan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi                    | 100%   | 2.76%     | 2.76%   | Dinas Perhubungan |                                 |
| 1.07.21.0007 Pengadaan Perlengkapan Jalan                                      | Persentase Keberhasilan Pengadaan Perlengkapan Jalan                                      | 100%   | 25.80%    | 25.80%  | Dinas Perhubungan |                                 |
| 1.07.21.0008 Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas                                 | Persentase Keberhasilan Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas                                 | 100%   | 22.77%    | 22.77%  | Dinas Perhubungan |                                 |
| 1.07.21.0009 Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor                          | Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor                          | 100%   | 38.02%    | 38.02%  | Dinas Perhubungan |                                 |
| 1.07.21.0010 Penertiban, Pengawasan Dan Pengendalian Parkir, Terminal Dan LLAJ | Persentase Keberhasilan Penertiban, Pengawasan Dan Pengendalian Parkir, Terminal Dan LLAJ | 100%   | 25.00%    | 25.00%  | Dinas Perhubungan |                                 |
| 1.07.21.0011 Pengelolaan Terminal Angkutan Umum                                | Persentase Keberhasilan Pengelolaan Terminal Angkutan Umum                                | 100%   | 25.00%    | 25.00%  | Dinas Perhubungan |                                 |
| 1.07.21.0012 Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan                       | Persentase Keberhasilan Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan                       | 100%   | 12.90%    | 12.90%  | Dinas Perhubungan |                                 |
| 1.07.21.0013 Penyelenggaraan Manajemen Lalu Lintas                             | Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Manajemen Lalu Lintas                             | 100%   | 0.00%     | 0.00%   | Dinas Perhubungan |                                 |
| 1.07.21.0014 Operasional Bis Sekolah   | Persentase Keberhasilan Operasional Bis Sekolah   | 100%   | 22.92%    | 22.92%  | Dinas Perhubungan |                                 |
| 1.07.21.0015 Pengadaan Perlengkapan Jalan (DAK Transportasi)                   | Persentase Keberhasilan Pengadaan Perlengkapan Jalan (DAK Transportasi)                   | 100%   | 0.00%     | 0.00%   | Dinas Perhubungan |                                 |
| <b>1.08 Lingkungan Hidup</b>   |   |  |           |         |                   |                                 |
| <b>1.08.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                      |   | Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Pelayanan Administrasi Perkantoran               | 70%       |         |                   |                                 |
| 1.08.01.0001   | Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran  | Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran                             | 100%      | 43.74%  | 43.74%            | Badan Lingkungan Hidup          |
| 1.08.01.0002   | Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran  | Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran                             | 100%      | 37.00%  | 37.00%            | Dinas Kebersihan dan Pertamanan |
| <b>1.08.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>               |   | Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur        | 70%       |         |                   |                                 |
| 1.08.02.0001   | Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran                               | Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran        | 100%      | 25.88%  | 25.88%            | Badan Lingkungan Hidup          |
| 1.08.02.0002   | Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran                               | Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran        | 100%      | 67.53%  | 67.53%            | Dinas Kebersihan dan Pertamanan |
| <b>1.08.16 Program Pengendalian</b>  |   | - Kualitas air limbah industri COD   | 71%       |         |                   |                                 |
|  |   | - Kualitas air limbah rumah sakit BOD  | 71%       |         |                   |                                 |
|  |   | - Kualitas air limbah hotel COD  | 47%       |         |                   |                                 |
|  |   | - Kualitas air limbah industri TSS   | 73%       |         |                   |                                 |
|  |   | - Kualitas air limbah rumah sakit COD  | 71%       |         |                   |                                 |
|  |   | - Kualitas air limbah hotel TSS  | 51%       |         |                   |                                 |
|  |   | - Kualitas air limbah domestik BOD   | 53%       |         |                   |                                 |
|  |   | - Kualitas air limbah rumah sakit TSS  | 73%       |         |                   |                                 |
|  |   | - Kualitas udara emisi di kawasan industri SO2   | 86%       |         |                   |                                 |
|  |   | - Kualitas air limbah industri BOD   | 77%       |         |                   |                                 |
|  |   | - Kualitas air limbah domestik TSS   | 55%       |         |                   |                                 |
|  |   | - Kualitas air limbah hotel BOD  | 57%       |         |                   |                                 |
|  |   | - Kualitas udara emisi di kawasan industri NO2   | 86%       |         |                   |                                 |
| 1.08.16.0001   | Pembinaan Dan Pengawasan Sumber Daya Air  | Persentase Keberhasilan Pembinaan Dan Pengawasan Sumber Daya Air                           | 100%      | 0.00%   | 0.00%             | Badan Lingkungan Hidup          |
| 1.08.16.0002   | Pengawasan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan   | Persentase Keberhasilan Pengawasan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan                      | 100%      | 24.17%  | 24.17%            | Badan Lingkungan Hidup          |
| 1.08.16.0003   | Peningkatan Edukasi Dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan                        | Persentase Keberhasilan Peningkatan Edukasi Dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan | 100%      | 33.50%  | 33.50%            | Badan Lingkungan Hidup          |
| 1.08.16.0004   | Pelaksanaan Car Free Day  | Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Car Free Day   | 100%      | 23.57%  | 23.57%            | Badan Lingkungan Hidup          |
| 1.08.16.0005   | Pemantauan Kualitas Air Laut Di Kawasan Pesisir Dan Laut                                  | Persentase Keberhasilan Pemantauan Kualitas Air Laut Di Kawasan Pesisir Dan Laut           | 100%      | 50.00%  | 50.00%            | Badan Lingkungan Hidup          |

| Urusan-Program-Kegiatan   | 2016 (Triwulan I)  |               |           |         | SKPD                            |
|---|--|---------------|-----------|---------|---------------------------------|
|   | Indikator  | Target        | Realisasi | Capaian |                                 |
| 1.08.16.0006 Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Pengawasan Ijin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 | Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Pengawasan Ijin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 | 100%          | 40.50%    | 40.50%  | Badan Lingkungan Hidup          |
| 1.08.16.0008 Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan  | Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan  | 100%          | 38.22%    | 38.22%  | Badan Lingkungan Hidup          |
| 1.08.16.0009 Operasional Dan Pengadaan Stasiun Monitoring Udara Ambien                                  | Persentase Keberhasilan Operasional Dan Pengadaan Stasiun Monitoring Udara Ambien                                  | 100%          | 10.48%    | 10.48%  | Badan Lingkungan Hidup          |
| 1.08.16.0010 Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup   | Persentase Keberhasilan Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup   | 100%          | 24.00%    | 24.00%  | Badan Lingkungan Hidup          |
| 1.08.16.0011 Operasional Dan Pemeliharaan Laboratorium Lingkungan Hidup                                 | Persentase Keberhasilan Operasional Dan Pemeliharaan Laboratorium Lingkungan Hidup                                 | 100%          | 0.00%     | 0.00%   | Badan Lingkungan Hidup          |
| 1.08.16.0012 Pemantauan Kualitas Air Limbah   | Persentase Keberhasilan Pemantauan Kualitas Air Limbah   | 100%          | 29.82%    | 29.82%  | Badan Lingkungan Hidup          |
| 1.08.16.0013 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura  | Persentase Keberhasilan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura  | 100%          | 3.34%     | 3.34%   | Badan Lingkungan Hidup          |
| 1.08.16.0014 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim  | Persentase Keberhasilan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim  | 100%          | 0.00%     | 0.00%   | Badan Lingkungan Hidup          |
| 1.08.16.0015 Pemeliharaan Sistem Informasi Kualitas Lingkungan (SIKUALI)                                | Persentase Keberhasilan Pemeliharaan Sistem Informasi Kualitas Lingkungan (SIKUALI)                                | 100%          | 7.33%     | 7.33%   | Badan Lingkungan Hidup          |
| 1.08.16.0007 Pengendalian Pencemaran Udara Dari Sumber Bergerak   | Persentase Keberhasilan Pengendalian Pencemaran Udara Dari Sumber Bergerak   | 100%          | 19.88%    | 19.88%  | Dinas Perhubungan               |
| <b>1.08.24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>  | Persentase Luas RTH yang berfungsi optimal terhadap keseluruhan luas RTH yang ada                                  | 41.15 %       |           |         |                                 |
| 1.08.24.0003 Pemeliharaan Dan Pengadaan Sarana Taman Dan Jalur Hijau                                    | Persentase Keberhasilan Pemeliharaan Dan Pengadaan Sarana Taman Dan Jalur Hijau                                    | 100%          | 21.57%    | 21.57%  | Dinas Kebersihan dan Pertamanan |
| 1.08.24.0004 Pemeliharaan Dan Pengadaan Prasarana Taman Rekreasi  | Persentase Keberhasilan Pemeliharaan Dan Pengadaan Prasarana Taman Rekreasi  | 100%          | 23.27%    | 23.27%  | Dinas Kebersihan dan Pertamanan |
| 1.08.24.0005 Pengembangan Dekorasi Kota   | Persentase Keberhasilan Pengembangan Dekorasi Kota   | 100%          | 10.00%    | 10.00%  | Dinas Kebersihan dan Pertamanan |
| 1.08.24.0006 Penataan RTH   | Persentase Keberhasilan Penataan RTH   | 100%          | 0.00%     | 0.00%   | Dinas Kebersihan dan Pertamanan |
| 1.08.24.0001 Pembangunan Dan Pemeliharaan Hutan Kota  | Persentase Keberhasilan Pembangunan Dan Pemeliharaan Hutan Kota  | 100%          | 12.83%    | 12.83%  | Dinas Pertanian                 |
| 1.08.24.0002 Pengelolaan Kawasan Lindung Pesisir Pantai Surabaya  | Persentase Keberhasilan Pengelolaan Kawasan Lindung Pesisir Pantai Surabaya  | 100%          | 17.65%    | 17.65%  | Dinas Pertanian                 |
| <b>1.08.25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota</b>  | Jumlah Sampah Yang Dikelola di TPA   | 1400 ton/hari |           |         |                                 |
|   | Rata - rata Jumlah Sampah Yang Diangkut dari TPS   | 3500 m3       |           |         |                                 |
|   | Cakupan Layanan Kebersihan   | 187 TPS       |           |         |                                 |
| 1.08.25.0007 Operasional Pengelolaan Rumah Kompos   | Persentase Keberhasilan Operasional Pengelolaan Rumah Kompos   | 100%          | 24.21%    | 24.21%  | Dinas Kebersihan dan Pertamanan |
| 1.08.25.0012 Pengawasan Operasional Penyapuan Dan Pengangkutan Sampah                                   | Persentase Keberhasilan Pengawasan Operasional Penyapuan Dan Pengangkutan Sampah                                   | 100%          | 25.00%    | 25.00%  | Dinas Kebersihan dan Pertamanan |
| 1.08.25.0014 Peningkatan Pelayanan Posko Kebersihan   | Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Posko Kebersihan   | 100%          | 20.24%    | 20.24%  | Dinas Kebersihan dan Pertamanan |
| 1.08.25.0019 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan                                     | Persentase Keberhasilan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan                                     | 100%          | 0.00%     | 0.00%   | Dinas Kebersihan dan Pertamanan |
| 1.08.25.0020 Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan  | Persentase Keberhasilan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan  | 100%          | 7.14%     | 7.14%   | Dinas Kebersihan dan Pertamanan |
| 1.08.25.0021 Operasional Pembersihan Sampah Di Saluran  | Persentase Keberhasilan Operasional Pembersihan Sampah Di Saluran  | 100%          | 25.00%    | 25.00%  | Dinas Kebersihan dan Pertamanan |
| 1.08.25.0028 Operasional Pengolahan Sampah  | Persentase Keberhasilan Operasional Pengolahan Sampah  | 100%          | 24.86%    | 24.86%  | Dinas Kebersihan dan Pertamanan |
| 1.08.25.0031 Operasional Dan Pemeliharaan IPLT Keputih  | Persentase Keberhasilan Operasional Dan Pemeliharaan IPLT Keputih  | 100%          | 25.00%    | 25.00%  | Dinas Kebersihan dan Pertamanan |
| 1.08.25.0032 Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Kebersihan   | Persentase Keberhasilan Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Kebersihan   | 100%          | 67.32%    | 67.32%  | Dinas Kebersihan dan Pertamanan |

| Urusan-Program-Kegiatan  | 2016 (Triwulan I)   |        |           |         | SKPD                            |
|--|---|--------|-----------|---------|---------------------------------|
|  | Indikator   | Target | Realisasi | Capaian |                                 |
| 1.08.25.0033 Operasional Pengangkutan Sampah   | Persentase Keberhasilan Operasional Pengangkutan Sampah   | 100%   | 25.05%    | 25.05%  | Dinas Kebersihan dan Pertamanan |
| 1.08.25.0036 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan                | Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan                | 100%   | 0.00%     | 0.00%   | Dinas Kebersihan dan Pertamanan |
| 1.08.25.0037 Operasional Penyapuan Jalan   | Persentase Keberhasilan Operasional Penyapuan Jalan   | 100%   | 29.13%    | 29.13%  | Dinas Kebersihan dan Pertamanan |
| 1.08.25.0040 Perencanaan Teknis Kebersihan Dan Pertamanan                                    | Persentase Keberhasilan Perencanaan Teknis Kebersihan Dan Pertamanan                                    | 100%   | 0.00%     | 0.00%   | Dinas Kebersihan dan Pertamanan |
| 1.08.25.0002 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | 100%   | 0.83%     | 0.83%   | Kec. Asemrowo                   |
| 1.08.25.0008 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | 100%   | 20.00%    | 20.00%  | Kec. Benowo                     |
| 1.08.25.0018 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | 100%   | 30.00%    | 30.00%  | Kec. Bubutan                    |
| 1.08.25.0011 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | 100%   | 18.18%    | 18.18%  | Kec. Bulak                      |
| 1.08.25.0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | 100%   | 16.67%    | 16.67%  | Kec. Dukuh Pakis                |
| 1.08.25.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | 100%   | 0.00%     | 0.00%   | Kec. Gayungan                   |
| 1.08.25.0017 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | 100%   | 25.00%    | 25.00%  | Kec. Genteng                    |
| 1.08.25.0035 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | 100%   | 16.67%    | 16.67%  | Kec. Gubeng                     |
| 1.08.25.0024 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | 100%   | 266.67%   | 266.67% | Kec. Gunung Anyar               |
| 1.08.25.0044 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | 100%   | 16.67%    | 16.67%  | Kec. Jambangan                  |
| 1.08.25.0023 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | 100%   | 22.22%    | 22.22%  | Kec. Karangpilang               |
| 1.08.25.0042 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | 100%   | 16.67%    | 16.67%  | Kec. Kenjeran                   |
| 1.08.25.0006 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | 100%   | 27.27%    | 27.27%  | Kec. Krembangan                 |
| 1.08.25.0038 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | 100%   | 16.67%    | 16.67%  | Kec. Lakarsantri                |
| 1.08.25.0009 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | 100%   | 0.00%     | 0.00%   | Kec. Mulyorejo                  |
| 1.08.25.0013 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | 100%   | 30.00%    | 30.00%  | Kec. Pabean Cantian             |
| 1.08.25.0005 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | 100%   | 11.11%    | 11.11%  | Kec. Pakal                      |



| Urusan-Program-Kegiatan  | 2016 (Triwulan I)   |         |           |         | SKPD                                 |
|--|---|---------|-----------|---------|--------------------------------------|
|  | Indikator   | Target  | Realisasi | Capaian |                                      |
| 1.08.25.0029 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | 100%    | 0.00%     | 0.00%   | Kec. Rungkut                         |
| 1.08.25.0041 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | 100%    | 16.67%    | 16.67%  | Kec. Sambikerep                      |
| 1.08.25.0016 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | 100%    | 20.00%    | 20.00%  | Kec. Sawahan                         |
| 1.08.25.0022 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | 100%    | 0.00%     | 0.00%   | Kec. Semampir                        |
| 1.08.25.0003 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | 100%    | 0.00%     | 0.00%   | Kec. Simokerto                       |
| 1.08.25.0039 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | 100%    | 16.67%    | 16.67%  | Kec. Sukolilo                        |
| 1.08.25.0010 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | 100%    | 16.67%    | 16.67%  | Kec. Sukomanunggal                   |
| 1.08.25.0043 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | 100%    | 12.50%    | 12.50%  | Kec. Tambaksari                      |
| 1.08.25.0034 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | 100%    | 12.00%    | 12.00%  | Kec. Tandes                          |
| 1.08.25.0027 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | 100%    | 10.00%    | 10.00%  | Kec. Tegalsari                       |
| 1.08.25.0026 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | 100%    | 25.00%    | 25.00%  | Kec. Tenggilis Mejoyo                |
| 1.08.25.0025 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | 100%    | 20.00%    | 20.00%  | Kec. Wiyung                          |
| 1.08.25.0030 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | 100%    | 16.67%    | 16.67%  | Kec. Wonocolo                        |
| 1.08.25.0015 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan | 100%    | 0.00%     | 0.00%   | Kec. Wonokromo                       |
| <b>1.09 Pertanian</b>  |   |         |           |         |                                      |
| <b>1.09.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                                    | Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                            | 70%     |           |         |                                      |
| 1.09.01.0001 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran  | Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran  | 100%    | 25.00%    | 25.00%  | Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah |
| <b>1.09.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                             | Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                     | 70%     |           |         |                                      |
| 1.09.02.0001 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran                     | Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran                     | 100%    | 20.00%    | 20.00%  | Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah |
| <b>1.09.19 Program Sertifikasi Tanah Milik</b>   | Rasio aset pemkot yang tersertifikat  | 55.72 % |           |         |                                      |
| 1.09.19.0001 Pengamanan Aset Pemerintah Kota Surabaya  | Persentase Keberhasilan Pengamanan Aset Pemerintah Kota Surabaya  | 100%    | 7.60%     | 7.60%   | Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah |
| 1.09.19.0002 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah  | Persentase Keberhasilan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah  | 100%    | 2.50%     | 2.50%   | Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah |

| Urusan-Program-Kegiatan  | 2016 (Triwulan I)  |          |           |         | SKPD  |
|--|--|----------|-----------|---------|---|
|  | Indikator  | Target   | Realisasi | Capaian |   |
| 1.09.19.0003 Pengelolaan Arsip Tanah/Bangunan Aset Daerah  | Persentase Keberhasilan Pengelolaan Arsip Tanah/Bangunan Aset Daerah                                     | 100%     | 150.00%   | 150.00% | Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah          |
| <b>1.09.20 Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum</b> | Luas tanah dan / atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum                   | 43367 m2 |           |         |   |
| 1.09.20.0003 Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk infrastruktur                               | Persentase Keberhasilan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk infrastruktur                            | 100%     | 35.16%    | 35.16%  | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan |
| 1.09.20.0001 Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk Ruang Terbuka Hijau                         | Persentase Keberhasilan Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk Ruang Terbuka Hijau                      | 100%     | 0.00%     | 0.00%   | Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah          |
| 1.09.20.0002 Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Rehabilitasi Sosial/Pemberdayaan Ekonomi    | Persentase Keberhasilan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Rehabilitasi Sosial/Pemberdayaan Ekonomi | 100%     | 0.00%     | 0.00%   | Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah          |
| 1.09.20.0004 Pengadaan Tanah dan/atau bangunan untuk Sarana Pelayanan Publik                     | Persentase Keberhasilan Pengadaan Tanah dan/atau bangunan untuk Sarana Pelayanan Publik                  | 100%     | 0.00%     | 0.00%   | Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah          |
| <b>1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil</b>   |  |          |           |         |   |
| <b>1.10.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>  | Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                             | 70%      |           |         |   |
| 1.10.01.0001 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran  | Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran   | 100%     | 36.11%    | 36.11%  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil       |
| <b>1.10.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                                 | Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                      | 70%      |           |         |   |
| 1.10.02.0001 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran                         | Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran                      | 100%     | 108.40%   | 108.40% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil       |
| <b>1.10.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>  |  |          |           |         |   |
|  | Ketepatan waktu pengurusan dokumen pencatatan sipil  | 60.03 %  |           |         |   |
|  | cakupan penerbitan akte kelahiran  | 99.92 %  |           |         |   |
|  | Ketepatan waktu pelayanan dokumen pendaftaran penduduk   | 85%      |           |         |   |
|  | cakupan penerbitan akte kematian   | 73.01 %  |           |         |   |
|  | Ketepatan waktu pelayanan dokumen pencatatan sipil   | 100%     |           |         |   |
| 1.10.15.0015 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan                              | Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan                           | 100%     | 25.00%    | 25.00%  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil       |
| 1.10.15.0018 Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan   | Persentase Keberhasilan Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan                                      | 100%     | 0.00%     | 0.00%   | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil       |
| 1.10.15.0021 Pelayanan Informasi Publik Bidang Kependudukan                                      | Persentase Keberhasilan Pelayanan Informasi Publik Bidang Kependudukan                                   | 100%     | 100.00%   | 100.00% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil       |
| 1.10.15.0026 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Pencatatan Sipil                          | Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Pencatatan Sipil                       | 100%     | 25.00%    | 25.00%  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil       |
| 1.10.15.0027 Pengendalian Perkembangan Kependudukan Kota Surabaya                                | Persentase Keberhasilan Pengendalian Perkembangan Kependudukan Kota Surabaya                             | 100%     | 39.63%    | 39.63%  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil       |
| 1.10.15.0003 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan                              | Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan                           | 100%     | 18.10%    | 18.10%  | Kec. Asemrowo                                 |
| 1.10.15.0012 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan                              | Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan                           | 100%     | 25.00%    | 25.00%  | Kec. Benowo                                   |
| 1.10.15.0036 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan                              | Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan                           | 100%     | 25.00%    | 25.00%  | Kec. Bubutan                                  |
| 1.10.15.0022 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan                              | Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan                           | 100%     | 25.00%    | 25.00%  | Kec. Bulak                                    |
| 1.10.15.0010 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan                              | Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan                           | 100%     | 25.00%    | 25.00%  | Kec. Dukuh Pakis                              |



| Urusan-Program-Kegiatan   | 2016 (Triwulan I)  |        |           |         | SKPD                  |
|---|--|--------|-----------|---------|-----------------------|
|   | Indikator  | Target | Realisasi | Capaian |                       |
| 1.10.15.0001 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan | Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan | 100%   | 25.00%    | 25.00%  | Kec. Gayungan         |
| 1.10.15.0017 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan | Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan | 100%   | 23.62%    | 23.62%  | Kec. Genteng          |
| 1.10.15.0005 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan | Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan | 100%   | 18.10%    | 18.10%  | Kec. Gubeng           |
| 1.10.15.0007 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan | Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan | 100%   | 18.10%    | 18.10%  | Kec. Gunung Anyar     |
| 1.10.15.0016 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan | Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan | 100%   | 22.70%    | 22.70%  | Kec. Jambangan        |
| 1.10.15.0006 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan | Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan | 100%   | 18.38%    | 18.38%  | Kec. Karangpilang     |
| 1.10.15.0035 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan | Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan | 100%   | 18.10%    | 18.10%  | Kec. Kenjeran         |
| 1.10.15.0013 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan | Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan | 100%   | 27.30%    | 27.30%  | Kec. Krembangan       |
| 1.10.15.0008 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan | Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan | 100%   | 31.90%    | 31.90%  | Kec. Lakarsantri      |
| 1.10.15.0028 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan | Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan | 100%   | 18.10%    | 18.10%  | Kec. Mulyorejo        |
| 1.10.15.0004 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan | Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan | 100%   | 18.10%    | 18.10%  | Kec. Pabean Cantian   |
| 1.10.15.0029 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan | Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan | 100%   | 27.30%    | 27.30%  | Kec. Pakal            |
| 1.10.15.0033 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan | Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan | 100%   | 18.10%    | 18.10%  | Kec. Rungkut          |
| 1.10.15.0009 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan | Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan | 100%   | 25.00%    | 25.00%  | Kec. Sambikerep       |
| 1.10.15.0002 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan | Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan | 100%   | 22.70%    | 22.70%  | Kec. Sawahan          |
| 1.10.15.0019 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan | Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan | 100%   | 18.10%    | 18.10%  | Kec. Semampir         |
| 1.10.15.0030 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan | Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan | 100%   | 18.10%    | 18.10%  | Kec. Simokerto        |
| 1.10.15.0034 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan | Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan | 100%   | 27.30%    | 27.30%  | Kec. Sukolilo         |
| 1.10.15.0032 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan | Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan | 100%   | 18.10%    | 18.10%  | Kec. Sukomanunggal    |
| 1.10.15.0014 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan | Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan | 100%   | 18.10%    | 18.10%  | Kec. Tambaksari       |
| 1.10.15.0024 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan | Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan | 100%   | 18.10%    | 18.10%  | Kec. Tandes           |
| 1.10.15.0020 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan | Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan | 100%   | 18.10%    | 18.10%  | Kec. Tegalsari        |
| 1.10.15.0031 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan | Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan | 100%   | 31.90%    | 31.90%  | Kec. Tenggilis Mejoyo |
| 1.10.15.0023 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan | Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan | 100%   | 18.10%    | 18.10%  | Kec. Wiyung           |
| 1.10.15.0025 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan | Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan | 100%   | 31.90%    | 31.90%  | Kec. Wonocolo         |
| 1.10.15.0011 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan | Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan | 100%   | 18.10%    | 18.10%  | Kec. Wonokromo        |

**1,11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

| Urusan-Program-Kegiatan   | 2016 (Triwulan I)  |        |           |         | SKPD   |
|---|--|--------|-----------|---------|--|
|   | Indikator  | Target | Realisasi | Capaian |  |
| 1.11.20 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan | Persentase Permasalahan Perempuan dan Anak yang ditangani                          | 100%   |           |         |  |
|   | Persentase indikator Pengarusutamaan Gender (PUG) yang terpenuhi                   | 86%    |           |         |  |
|   | Persentase indikator Kota Layak Anak (KLA) yang terpenuhi                          | 93%    |           |         |  |
| 1.11.20.0007 Pengembangan Sistem Pendataan Dinamika Gender                | Persentase Keberhasilan Pengembangan Sistem Pendataan Dinamika Gender              | 100%   | 0.00%     | 0.00%   | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana |
| 1.11.20.0014 Fasilitasi Pencapaian Indikator Kota Layak Anak              | Persentase Keberhasilan Fasilitasi Pencapaian Indikator Kota Layak Anak            | 100%   | 35.68%    | 35.68%  | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana |
| 1.11.20.0022 Fasilitasi Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak        | Persentase Keberhasilan Fasilitasi Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak      | 100%   | 38.57%    | 38.57%  | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana |
| 1.11.20.0023 Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender   | Persentase Keberhasilan Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender | 100%   | 19.68%    | 19.68%  | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana |
| 1.11.20.0024 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak        | Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak      | 100%   | 17.29%    | 17.29%  | Kec. Asemrowo  |
| 1.11.20.0016 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak        | Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak      | 100%   | 40.73%    | 40.73%  | Kec. Benowo  |
| 1.11.20.0004 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak        | Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak      | 100%   | 29.63%    | 29.63%  | Kec. Bubutan   |
| 1.11.20.0031 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak        | Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak      | 100%   | 36.42%    | 36.42%  | Kec. Bulak   |
| 1.11.20.0019 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak        | Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak      | 100%   | 43.18%    | 43.18%  | Kec. Dukuh Pakis                                     |
| 1.11.20.0026 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak        | Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak      | 100%   | 16.07%    | 16.07%  | Kec. Gayungan  |
| 1.11.20.0028 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak        | Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak      | 100%   | 19.27%    | 19.27%  | Kec. Genteng   |
| 1.11.20.0029 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak        | Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak      | 100%   | 15.36%    | 15.36%  | Kec. Gubeng  |
| 1.11.20.0020 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak        | Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak      | 100%   | 37.41%    | 37.41%  | Kec. Gunung Anyar                                    |
| 1.11.20.0021 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak        | Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak      | 100%   | 14.08%    | 14.08%  | Kec. Jambangan                                       |
| 1.11.20.0018 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak        | Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak      | 100%   | 4.97%     | 4.97%   | Kec. Karangpilang                                    |
| 1.11.20.0035 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak        | Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak      | 100%   | 43.18%    | 43.18%  | Kec. Kenjeran  |
| 1.11.20.0013 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak        | Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak      | 100%   | 27.17%    | 27.17%  | Kec. Krembangan                                      |
| 1.11.20.0033 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak        | Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak      | 100%   | 16.07%    | 16.07%  | Kec. Lakarsantri                                     |
| 1.11.20.0005 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak        | Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak      | 100%   | 2.48%     | 2.48%   | Kec. Mulyorejo                                       |
| 1.11.20.0003 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak        | Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak      | 100%   | 13.58%    | 13.58%  | Kec. Pabean Cantian                                  |
| 1.11.20.0034 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak        | Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak      | 100%   | 13.58%    | 13.58%  | Kec. Pakal   |
| 1.11.20.0032 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak        | Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak      | 100%   | 27.46%    | 27.46%  | Kec. Rungkut   |

| Urusan-Program-Kegiatan   | 2016 (Triwulan I)  |         |           |         | SKPD   |
|---|--|---------|-----------|---------|--|
|   | Indikator  | Target  | Realisasi | Capaian |  |
| 1.11.20.0001 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak  | Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak  | 100%    | 18.55%    | 18.55%  | Kec. Sambikerep                                      |
| 1.11.20.0030 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak  | Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak  | 100%    | 24.08%    | 24.08%  | Kec. Sawahan   |
| 1.11.20.0006 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak  | Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak  | 100%    | 2.48%     | 2.48%   | Kec. Semampir  |
| 1.11.20.0025 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak  | Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak  | 100%    | 9.88%     | 9.88%   | Kec. Simokerto                                       |
| 1.11.20.0012 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak  | Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak  | 100%    | 4.97%     | 4.97%   | Kec. Sukolilo  |
| 1.11.20.0002 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak  | Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak  | 100%    | 28.39%    | 28.39%  | Kec. Sukomanunggal                                   |
| 1.11.20.0017 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak  | Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak  | 100%    | 29.94%    | 29.94%  | Kec. Tambaksari                                      |
| 1.11.20.0011 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak  | Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak  | 100%    | 3.73%     | 3.73%   | Kec. Tandes  |
| 1.11.20.0015 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak  | Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak  | 100%    | 16.07%    | 16.07%  | Kec. Tegalsari                                       |
| 1.11.20.0010 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak  | Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak  | 100%    | 13.58%    | 13.58%  | Kec. Tenggilis Mejoyo                                |
| 1.11.20.0027 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak  | Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak  | 100%    | 45.03%    | 45.03%  | Kec. Wiyung  |
| 1.11.20.0009 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak  | Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak  | 100%    | 34.52%    | 34.52%  | Kec. Wonocolo  |
| 1.11.20.0008 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak  | Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak  | 100%    | 13.58%    | 13.58%  | Kec. Wonokromo                                       |
| <b>1,12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</b>   |  |         |           |         |  |
| <b>1.12.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>   | Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Pelayanan Administrasi Perkantoran   | 70%     |           |         |  |
| 1.12.01.0001 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran   | Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran   | 100%    | 22.23%    | 22.23%  | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana |
| <b>1.12.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>  | Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  | 70%     |           |         |  |
| 1.12.02.0001 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran  | Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran  | 100%    | 14.49%    | 14.49%  | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana |
| <b>1.12.15 Program Keluarga Berencana</b>   | Persentase Pasangan Usia Subur yang ber-KB Aktif   | 76.32 % |           |         |  |
| 1.12.15.0001 Fasilitasi Masyarakat Peduli Keluarga Berencana  | Persentase Keberhasilan Fasilitasi Masyarakat Peduli Keluarga Berencana  | 100%    | 16.58%    | 16.58%  | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana |
| 1.12.15.0002 Pembinaan Keluarga Berencana   | Persentase Keberhasilan Pembinaan Keluarga Berencana   | 100%    | 0.00%     | 0.00%   | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana |
| 1.12.15.0003 Penyediaan Pelayanan KB Bagi Keluarga Miskin   | Persentase Keberhasilan Penyediaan Pelayanan KB Bagi Keluarga Miskin   | 100%    | 26.42%    | 26.42%  | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana |
| 1.12.15.0004 Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana | Persentase Keberhasilan Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana | 100%    | 0.00%     | 0.00%   | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana |
| <b>1.12.25 Program Bina Keluarga</b>  | Persentase Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)/Bina Keluarga Remaja (BKR)/Bina Keluarga Lansia (BKL) yang aktif                                  | 23.9 %  |           |         |  |

| Urusan-Program-Kegiatan |  | 2016 (Triwulan I)   |        |           |         | SKPD   |
|-------------------------|--|---|--------|-----------|---------|--|
|                         |  | Indikator   | Target | Realisasi | Capaian |  |
|                         | 1.12.25.0001 Pembinaan Ketahanan keluarga  | Persentase Keberhasilan Pembinaan Ketahanan keluarga  | 100%   | 0.00%     | 0.00%   | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana |
| <b>1,13 Sosial</b>      |  |   |        |           |         |  |
|                         | <b>1.13.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>  | Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  | 70%    |           |         |  |
|                         | 1.13.01.0001 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran  | Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran  | 100%   | 28.72%    | 28.72%  | Dinas Sosial   |
|                         | <b>1.13.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>   | Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur   | 70%    |           |         |  |
|                         | 1.13.02.0001 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran   | Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran   | 100%   | 34.37%    | 34.37%  | Dinas Sosial   |
|                         | <b>1.13.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>   | Persentase PMKS yang ditangani  | 60%    |           |         |  |
|                         | 1.13.16.0002 Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin Melalui Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh  | Persentase Keberhasilan Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin Melalui Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh  | 100%   | 7.70%     | 7.70%   | Dinas Sosial   |
|                         | 1.13.16.0003 Pelatihan Keterampilan Dan Pemberian Permakanan Bagi Penyandang Cacat   | Persentase Keberhasilan Pelatihan Keterampilan Dan Pemberian Permakanan Bagi Penyandang Cacat   | 100%   | 23.05%    | 23.05%  | Dinas Sosial   |
|                         | 1.13.16.0005 Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Di UPTD Griya Werdha                                 | Persentase Keberhasilan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Di UPTD Griya Werdha                                 | 100%   | 25.15%    | 25.15%  | Dinas Sosial   |
|                         | 1.13.16.0006 Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Kusta Babat Jerawat | Persentase Keberhasilan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Kusta Babat Jerawat | 100%   | 24.31%    | 24.31%  | Dinas Sosial   |
|                         | 1.13.16.0009 Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih             | Persentase Keberhasilan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih             | 100%   | 25.43%    | 25.43%  | Dinas Sosial   |
|                         | 1.13.16.0012 Peningkatan Pembinaan, Pelatihan Keterampilan dan Pemberian Permakanan bagi Lanjut Usia   | Persentase Keberhasilan Peningkatan Pembinaan, Pelatihan Keterampilan dan Pemberian Permakanan bagi Lanjut Usia   | 100%   | 18.44%    | 18.44%  | Dinas Sosial   |
|                         | 1.13.16.0017 Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Di UPTD Kampung Anak Negeri                          | Persentase Keberhasilan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Di UPTD Kampung Anak Negeri                          | 100%   | 18.97%    | 18.97%  | Dinas Sosial   |
|                         | 1.13.16.0028 Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS  | Persentase Keberhasilan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS  | 100%   | 27.54%    | 27.54%  | Dinas Sosial   |
|                         | 1.13.16.0033 Penyediaan Kebutuhan Dasar Bagi Panti Sosial Dan Pemberian Permakanan Bagi Anak Yatim, Piatu, Dan Yatim Piatu   | Persentase Keberhasilan Penyediaan Kebutuhan Dasar Bagi Panti Sosial Dan Pemberian Permakanan Bagi Anak Yatim, Piatu, Dan Yatim Piatu   | 100%   | 18.88%    | 18.88%  | Dinas Sosial   |
|                         | 1.13.16.0038 Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Anak Luar Biasa Di UPTD Pondok Sosial Kalijudan  | Persentase Keberhasilan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Anak Luar Biasa Di UPTD Pondok Sosial Kalijudan  | 100%   | 19.84%    | 19.84%  | Dinas Sosial   |
|                         | 1.13.16.0040 Penanganan Masalah-masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat Dan Kejadian Luar Biasa  | Persentase Keberhasilan Penanganan Masalah-masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat Dan Kejadian Luar Biasa  | 100%   | 22.39%    | 22.39%  | Dinas Sosial   |
|                         | 1.13.16.0020 Pendataan PMKS Dan PSKS   | Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS   | 100%   | 5.90%     | 5.90%   | Kec. Asemrowo  |
|                         | 1.13.16.0030 Pendataan PMKS Dan PSKS   | Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS   | 100%   | 13.52%    | 13.52%  | Kec. Benowo  |
|                         | 1.13.16.0015 Pendataan PMKS Dan PSKS   | Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS   | 100%   | 5.68%     | 5.68%   | Kec. Bubutan   |
|                         | 1.13.16.0034 Pendataan PMKS Dan PSKS   | Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS   | 100%   | 16.67%    | 16.67%  | Kec. Bulak   |

| Urusan-Program-Kegiatan   | 2016 (Triwulan I)  |        |           |         | SKPD   |
|---|--|--------|-----------|---------|--|
|   | Indikator  | Target | Realisasi | Capaian |  |
| 1.13.16.0013 Pendataan PMKS Dan PSKS  | Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS  | 100%   | 27.17%    | 27.17%  | Kec. Dukuh Pakis                                     |
| 1.13.16.0018 Pendataan PMKS Dan PSKS  | Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS  | 100%   | 22.38%    | 22.38%  | Kec. Gayungan  |
| 1.13.16.0011 Pendataan PMKS Dan PSKS  | Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS  | 100%   | 16.67%    | 16.67%  | Kec. Genteng   |
| 1.13.16.0021 Pendataan PMKS Dan PSKS  | Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS  | 100%   | 23.33%    | 23.33%  | Kec. Gubeng  |
| 1.13.16.0035 Pendataan PMKS Dan PSKS  | Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS  | 100%   | 10.50%    | 10.50%  | Kec. Gunung Anyar                                    |
| 1.13.16.0022 Pendataan PMKS Dan PSKS  | Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS  | 100%   | 17.13%    | 17.13%  | Kec. Jambangan                                       |
| 1.13.16.0023 Pendataan PMKS Dan PSKS  | Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS  | 100%   | 16.67%    | 16.67%  | Kec. Karangpilang                                    |
| 1.13.16.0039 Pendataan PMKS Dan PSKS  | Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS  | 100%   | 16.67%    | 16.67%  | Kec. Kenjeran  |
| 1.13.16.0016 Pendataan PMKS Dan PSKS  | Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS  | 100%   | 15.00%    | 15.00%  | Kec. Krembangan                                      |
| 1.13.16.0027 Pendataan PMKS Dan PSKS  | Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS  | 100%   | 28.08%    | 28.08%  | Kec. Lakarsantri                                     |
| 1.13.16.0007 Pendataan PMKS Dan PSKS  | Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS  | 100%   | 22.38%    | 22.38%  | Kec. Mulyorejo                                       |
| 1.13.16.0008 Pendataan PMKS Dan PSKS  | Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS  | 100%   | 3.33%     | 3.33%   | Kec. Pabean Cantian                                  |
| 1.13.16.0031 Pendataan PMKS Dan PSKS  | Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS  | 100%   | 22.38%    | 22.38%  | Kec. Pakal   |
| 1.13.16.0024 Pendataan PMKS Dan PSKS  | Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS  | 100%   | 3.52%     | 3.52%   | Kec. Rungkut   |
| 1.13.16.0036 Pendataan PMKS Dan PSKS  | Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS  | 100%   | 28.08%    | 28.08%  | Kec. Sambikerep                                      |
| 1.13.16.0001 Pendataan PMKS Dan PSKS  | Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS  | 100%   | 11.71%    | 11.71%  | Kec. Sawahan   |
| 1.13.16.0042 Pendataan PMKS Dan PSKS  | Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS  | 100%   | 28.08%    | 28.08%  | Kec. Semampir  |
| 1.13.16.0019 Pendataan PMKS Dan PSKS  | Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS  | 100%   | 16.67%    | 16.67%  | Kec. Simokerto                                       |
| 1.13.16.0032 Pendataan PMKS Dan PSKS  | Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS  | 100%   | 59.58%    | 59.58%  | Kec. Sukolilo  |
| 1.13.16.0037 Pendataan PMKS Dan PSKS  | Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS  | 100%   | 27.63%    | 27.63%  | Kec. Sukomanunggal                                   |
| 1.13.16.0004 Pendataan PMKS Dan PSKS  | Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS  | 100%   | 20.33%    | 20.33%  | Kec. Tambaksari                                      |
| 1.13.16.0025 Pendataan PMKS Dan PSKS  | Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS  | 100%   | 27.63%    | 27.63%  | Kec. Tandes  |
| 1.13.16.0041 Pendataan PMKS Dan PSKS  | Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS  | 100%   | 23.33%    | 23.33%  | Kec. Tegalsari                                       |
| 1.13.16.0010 Pendataan PMKS Dan PSKS  | Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS  | 100%   | 16.85%    | 16.85%  | Kec. Tenggilis Mejoyo                                |
| 1.13.16.0026 Pendataan PMKS Dan PSKS  | Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS  | 100%   | 21.92%    | 21.92%  | Kec. Wiyung  |
| 1.13.16.0014 Pendataan PMKS Dan PSKS  | Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS  | 100%   | 17.13%    | 17.13%  | Kec. Wonocolo  |
| 1.13.16.0029 Pendataan PMKS Dan PSKS  | Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS  | 100%   | 5.48%     | 5.48%   | Kec. Wonokromo                                       |
| <b>1.13.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>                            | Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial                          | 40%    |           |         |  |
|   | Persentase terfasilitasinya kegiatan keagamaan dan nilai-nilai kepahlawanan                                | 100%   |           |         |  |
| 1.13.21.0002 Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Dan Lembaga Kelurahan                            | Persentase Keberhasilan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Dan Lembaga Kelurahan                            | 100%   | 15.68%    | 15.68%  | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana |
| 1.13.21.0001 Fasilitasi Peningkatan Nilai-Nilai Kepahlawanan                                    | Persentase Keberhasilan Fasilitasi Peningkatan Nilai-Nilai Kepahlawanan                                    | 100%   | 21.65%    | 21.65%  | Dinas Sosial   |
| 1.13.21.0003 Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat | Persentase Keberhasilan Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat | 100%   | 27.00%    | 27.00%  | Dinas Sosial   |
| 1.13.21.0004 Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan   | Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan   | 100%   | 14.63%    | 14.63%  | Dinas Sosial   |
| 1.13.21.0005 Pembinaan, Pemberdayaan Relawan Sosial Dan Organisasi Sosial                       | Persentase Keberhasilan Pembinaan, Pemberdayaan Relawan Sosial Dan Organisasi Sosial                       | 100%   | 18.05%    | 18.05%  | Dinas Sosial   |
| <b>1,14 Ketenagakerjaan</b>   |  |        |           |         |  |

| Urusan-Program-Kegiatan   |  | 2016 (Triwulan I)   |                |           |         | SKPD  |
|---|--|---|----------------|-----------|---------|---|
|   |  | Indikator   | Target         | Realisasi | Capaian |   |
| <b>1.14.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                         |  | Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                    | 70%            |           |         |   |
|   | 1.14.01.0001 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran  | Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran  | 100%           | 22.58%    | 22.58%  | Dinas Tenaga Kerja                                  |
| <b>1.14.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                  |  | Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                             | 70%            |           |         |   |
|   | 1.14.02.0001 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran                             | Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran                             | 100%           | 13.97%    | 13.97%  | Dinas Tenaga Kerja                                  |
| <b>1.14.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja</b>                               |  | Persentase pencari kerja terserap pada pasar kerja  | 40%            |           |         |   |
|   | 1.14.16.0001 Pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja dan Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing    | Persentase Keberhasilan Pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja dan Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing    | 100%           | 91.81%    | 91.81%  | Dinas Tenaga Kerja                                  |
|   | 1.14.16.0002 Identifikasi Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan                                       | Persentase Keberhasilan Identifikasi Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan                                       | 100%           | 0.00%     | 0.00%   | Dinas Tenaga Kerja                                  |
|   | 1.14.16.0003 Pendampingan Calon Wirusaha Baru dan Perluasan Kerja                                    | Persentase Keberhasilan Pendampingan Calon Wirusaha Baru dan Perluasan Kerja                                    | 100%           | 0.00%     | 0.00%   | Dinas Tenaga Kerja                                  |
|   | 1.14.16.0004 Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai   | Persentase Keberhasilan Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai   | 100%           | 0.00%     | 0.00%   | Dinas Tenaga Kerja                                  |
|   | 1.14.16.0005 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja   | Persentase Keberhasilan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja   | 100%           | 38.58%    | 38.58%  | Dinas Tenaga Kerja                                  |
| <b>1.14.18 Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan</b>                |  | Persentase peningkatan jumlah perusahaan yang mematuhi norma ketenagakerjaan dan/atau K3                        | 3.5 %          |           |         |   |
|   | 1.14.18.0001 Peningkatan Pengawasan, Perlindungan Dan Penegakkan Hukum                               | Persentase Keberhasilan Peningkatan Pengawasan, Perlindungan Dan Penegakkan Hukum                               | 100%           | 6.94%     | 6.94%   | Dinas Tenaga Kerja                                  |
|   | 1.14.18.0002 Fasilitasi Penyelesaian Pemberian Perlindungan Hukum Dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan | Persentase Keberhasilan Fasilitasi Penyelesaian Pemberian Perlindungan Hukum Dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan | 100%           | 5.67%     | 5.67%   | Dinas Tenaga Kerja                                  |
| <b>1.14.19 Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas</b>      |  | Persentase Angkatan Kerja yang Lulus sertifikasi  | 50%            |           |         |   |
|   | 1.14.19.0001 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja   | Persentase Keberhasilan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja   | 100%           | 4.36%     | 4.36%   | Dinas Tenaga Kerja                                  |
| <b>1.14.20 Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja</b>          |  | Persentase Peningkatan jumlah perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama            | 4%             |           |         |   |
|   | 1.14.20.0001 Fasilitasi Syarat Kerja Perusahaan  | Persentase Keberhasilan Fasilitasi Syarat Kerja Perusahaan  | 100%           | 0.00%     | 0.00%   | Dinas Tenaga Kerja                                  |
|   | 1.14.20.0002 Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial                                | Persentase Keberhasilan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial                                | 100%           | 24.12%    | 24.12%  | Dinas Tenaga Kerja                                  |
| <b>1,15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah</b>                                     |  |   |                |           |         |   |
| <b>1.15.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                         |  | Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                    | 70%            |           |         |   |
|   | 1.15.01.0001 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran  | Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran  | 100%           | 15.56%    | 15.56%  | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah |
|   | 1.15.01.0002 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran  | Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran  | 100%           | 37.12%    | 37.12%  | Dinas Perdagangan dan Perindustrian                 |
| <b>1.15.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                  |  | Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                             | 70%            |           |         |   |
|   | 1.15.02.0001 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran                             | Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran                             | 100%           | 20.65%    | 20.65%  | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah |
|   | 1.15.02.0002 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran                             | Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran                             | 100%           | 28.23%    | 28.23%  | Dinas Perdagangan dan Perindustrian                 |
| <b>1.15.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil</b> |  | Persentase peningkatan volume usaha Kecil menengah binaan   | 10%            |           |         |   |
|   |  | Akumulasi jumlah Usaha Mikro yang mengisi sentra binaan   | 810 Pedagang   |           |         |   |
|   |  | Persentase peningkatan volume usaha mikro binaan  | 10%            |           |         |   |
|   |  | Akumulasi volume usaha kecil menengah binaan  | 68555718000 Rp |           |         |   |
|   |  | Akumulasi volume usaha mikro binaan   | 2928852360 Rp  |           |         |   |



| Urusan-Program-Kegiatan |  | 2016 (Triwulan I)   |            |           |         | SKPD  |
|-------------------------|--|---|------------|-----------|---------|---|
|                         |  | Indikator   | Target     | Realisasi | Capaian |   |
|                         |  | Presentase peningkatan jumlah usaha mikro binaan yang kualitasnya meningkat   | 20%        |           |         |   |
|                         | 1.15.17.0003 Memfasilitasi Dan Koordinasi Kerjasama Di Bidang Investasi  | Persentase Keberhasilan Memfasilitasi Dan Koordinasi Kerjasama Di Bidang Investasi  | 100%       | 0.00%     | 0.00%   | Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal      |
|                         | 1.15.17.0002 Pembinaan dan Pemberdayaan Bagi Usaha Mikro di Sentra   | Persentase Keberhasilan Pembinaan dan Pemberdayaan Bagi Usaha Mikro di Sentra   | 100%       | 14.56%    | 14.56%  | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah |
|                         | 1.15.17.0006 Fasilitas Pengembangan Usaha Mikro Kecil  | Persentase Keberhasilan Fasilitas Pengembangan Usaha Mikro Kecil  | 100%       | 1.90%     | 1.90%   | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah |
|                         | 1.15.17.0007 Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil  | Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil  | 100%       | 24.23%    | 24.23%  | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah |
|                         | 1.15.17.0011 Penataan Tempat Berusaha (Sentra)   | Persentase Keberhasilan Penataan Tempat Berusaha (Sentra)   | 100%       | 0.00%     | 0.00%   | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah |
|                         | 1.15.17.0012 Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil  | Persentase Keberhasilan Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil  | 100%       | 0.00%     | 0.00%   | Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang     |
|                         | 1.15.17.0001 Fasilitas Pengembangan UKM  | Persentase Keberhasilan Fasilitas Pengembangan UKM  | 100%       | 8.25%     | 8.25%   | Dinas Perdagangan dan Perindustrian                 |
|                         | 1.15.17.0004 Penyelenggaraan Promosi Dalam dan Luar Negeri   | Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Promosi Dalam dan Luar Negeri   | 100%       | 23.67%    | 23.67%  | Dinas Perdagangan dan Perindustrian                 |
|                         | 1.15.17.0005 Pelayanan Perijinan di Bidang Perdagangan dan Perindustrian   | Persentase Keberhasilan Pelayanan Perijinan di Bidang Perdagangan dan Perindustrian   | 100%       | 24.52%    | 24.52%  | Dinas Perdagangan dan Perindustrian                 |
|                         | 1.15.17.0008 Pembinaan Wajib Daftar Perusahaan   | Persentase Keberhasilan Pembinaan Wajib Daftar Perusahaan   | 100%       | 20.42%    | 20.42%  | Dinas Perdagangan dan Perindustrian                 |
|                         | 1.15.17.0009 Fasilitas Pengembangan Usaha Industri di Kampung dan Sentra   | Persentase Keberhasilan Fasilitas Pengembangan Usaha Industri di Kampung dan Sentra   | 100%       | 45.26%    | 45.26%  | Dinas Perdagangan dan Perindustrian                 |
|                         | 1.15.17.0010 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Industri Kecil dan Menengah  | Persentase Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Industri Kecil dan Menengah  | 100%       | 0.00%     | 0.00%   | Dinas Perdagangan dan Perindustrian                 |
|                         | <b>1.15.19 Program Peningkatan Kualitas Koperasi</b>   | Persentase peningkatan jumlah koperasi tidak aktif yang berhasil direvitalisasi   | 6%         |           |         |   |
|                         |  | Persentase peningkatan jumlah koperasi berkualitas  | 15%        |           |         |   |
|                         |  | Persentase peningkatan volume usaha koperasi aktif  | 1%         |           |         |   |
|                         |  | Meningkatnya jumlah anggota koperasi  | 1000 Orang |           |         |   |
|                         | 1.15.19.0001 Pembinaan SDM Koperasi  | Persentase Keberhasilan Pembinaan SDM Koperasi  | 100%       | 64.38%    | 64.38%  | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah |
|                         | 1.15.19.0002 Fasilitas Sertifikasi SKKNI-KJK Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi  | Persentase Keberhasilan Fasilitas Sertifikasi SKKNI-KJK Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi  | 100%       | 40.50%    | 40.50%  | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah |
|                         | 1.15.19.0003 Fasilitas Pembentukan Jaringan Kerjasama Bisnis dan Permodalan Antar Koperasi Aktif, Distributor/Principle, dan atau Lembaga Keuangan/Perbankan | Persentase Keberhasilan Fasilitas Pembentukan Jaringan Kerjasama Bisnis dan Permodalan Antar Koperasi Aktif, Distributor/Principle, dan atau Lembaga Keuangan/Perbankan | 100%       | 23.13%    | 23.13%  | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah |
|                         | 1.15.19.0004 Fasilitas Kemudahan Pendirian Unit Koperasi Baru  | Persentase Keberhasilan Fasilitas Kemudahan Pendirian Unit Koperasi Baru  | 100%       | 6.92%     | 6.92%   | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah |
|                         | 1.15.19.0005 Fasilitas dan Pendampingan Lembaga Koperasi   | Persentase Keberhasilan Fasilitas dan Pendampingan Lembaga Koperasi   | 100%       | 0.00%     | 0.00%   | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah |
|                         | 1.15.19.0006 Revitalisasi Koperasi Tidak Aktif Dan Tidak Ber RAT   | Persentase Keberhasilan Revitalisasi Koperasi Tidak Aktif Dan Tidak Ber RAT   | 100%       | 21.75%    | 21.75%  | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah |

| Urusan-Program-Kegiatan              |  | 2016 (Triwulan I)   |        |           |         | SKPD  |
|--------------------------------------|--|---|--------|-----------|---------|---|
|                                      |  | Indikator   | Target | Realisasi | Capaian |   |
|                                      | 1.15.19.0007 Peningkatan dan Pengembangan Usaha KSP/USP-Koperasi                                   | Persentase Keberhasilan Peningkatan dan Pengembangan Usaha KSP/USP-Koperasi                                   | 100%   | 14.63%    | 14.63%  | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah |
|                                      | 1.15.19.0008 Sosialisasi Pemahaman Koperasi  | Persentase Keberhasilan Sosialisasi Pemahaman Koperasi  | 100%   | 2.80%     | 2.80%   | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah |
|                                      | 1.15.19.0009 Peningkatan dan Pengembangan Usaha Koperasi Aktif                                     | Persentase Keberhasilan Peningkatan dan Pengembangan Usaha Koperasi Aktif                                     | 100%   | 16.49%    | 16.49%  | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah |
| <b>1,16 Penanaman Modal</b>          |  |   |        |           |         |   |
|                                      | <b>1.16.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>  | Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                  | 70%    |           |         |   |
|                                      | 1.16.01.0001 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran  | Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran  | 100%   | 22.79%    | 22.79%  | Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal      |
|                                      | <b>1.16.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                                   | Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                           | 70%    |           |         |   |
|                                      | 1.16.02.0001 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran                           | Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran                           | 100%   | 45.72%    | 45.72%  | Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal      |
|                                      | <b>1.16.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>                         | Persentase Meningkatnya jumlah realisasi ijin penunjang investasi   | 6%     |           |         |   |
|                                      | 1.16.16.0001 Fasilitasi Pelayanan Perijinan Penanaman Modal  | Persentase Keberhasilan Fasilitasi Pelayanan Perijinan Penanaman Modal  | 100%   | 68.63%    | 68.63%  | Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal      |
|                                      | 1.16.16.0002 Pengelolaan Dan Pemutakhiran Data Investasi   | Persentase Keberhasilan Pengelolaan Dan Pemutakhiran Data Investasi   | 100%   | 58.15%    | 58.15%  | Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal      |
|                                      | 1.16.16.0003 Pengembangan Potensi Investasi  | Persentase Keberhasilan Pengembangan Potensi Investasi  | 100%   | 0.00%     | 0.00%   | Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal      |
|                                      | 1.16.16.0004 Penyelenggaraan Promosi Investasi   | Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Promosi Investasi   | 100%   | 0.00%     | 0.00%   | Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal      |
|                                      | 1.16.16.0005 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Persentase Keberhasilan Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | 100%   | 9.88%     | 9.88%   | Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal      |
|                                      | 1.16.16.0006 Pelayanan UPTSA   | Persentase Keberhasilan Pelayanan UPTSA   | 100%   | 25.00%    | 25.00%  | Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal      |
| <b>1,17 Kebudayaan</b>               |  |   |        |           |         |   |
|                                      | <b>1.17.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>  | Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                  | 70%    |           |         |   |
|                                      | 1.17.01.0001 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran  | Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran  | 100%   | 30.54%    | 30.54%  | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                     |
|                                      | <b>1.17.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                                   | Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                           | 70%    |           |         |   |
|                                      | 1.17.02.0001 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran                           | Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran                           | 100%   | 25.11%    | 25.11%  | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                     |
|                                      | <b>1.17.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>   | persentase bangunan dan situs cagar budaya yang terawat dengan baik   | 91.5 % |           |         |   |
|                                      | 1.17.16.0001 Pengelolaan Cagar Budaya  | Persentase Keberhasilan Pengelolaan Cagar Budaya  | 100%   | 0.00%     | 0.00%   | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                     |
|                                      | <b>1.17.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>  | % kelompok seni dan budaya yang difasilitasi  | 40%    |           |         |   |
|                                      | 1.17.17.0001 Pengembangan Kesenian Dan Kebudayaan Daerah   | Persentase Keberhasilan Pengembangan Kesenian Dan Kebudayaan Daerah   | 100%   | 0.00%     | 0.00%   | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                     |
|                                      | 1.17.17.0002 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah                                     | Persentase Keberhasilan Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah                                     | 100%   | 3.60%     | 3.60%   | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                     |
| <b>1,18 Kepemudaan dan Olah Raga</b> |  |   |        |           |         |   |
|                                      | <b>1.18.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>  | Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                  | 70%    |           |         |   |



| Urusan-Program-Kegiatan  | 2016 (Triwulan I)   |             |           |         | SKPD  |
|--|---|-------------|-----------|---------|---|
|  | Indikator   | Target      | Realisasi | Capaian |   |
| 1.18.01.0001 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran  | Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran  | 100%        | 10.77%    | 10.77%  | Dinas Pemuda dan Olahraga                       |
| <b>1.18.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                                   | Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                           | 70%         |           |         |   |
| 1.18.02.0001 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran                           | Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran                           | 100%        | 21.57%    | 21.57%  | Dinas Pemuda dan Olahraga                       |
| <b>1.18.16 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan</b>  | Jumlah pemuda yang dapat mengembangkan usaha mandiri  | 5 Orang     |           |         |   |
|  | Cakupan pemuda yang mendapat pembinaan  | 11615 Orang |           |         |   |
|  | Jumlah pemuda sebagai pelopor pembangunan   | 5 Orang     |           |         |   |
| 1.18.16.0001 Pengembangan Ketrampilan dan Wirausaha Organisasi Kepemudaan Mandiri                  | Persentase Keberhasilan Pengembangan Ketrampilan dan Wirausaha Organisasi Kepemudaan Mandiri                  | 100%        | 50.00%    | 50.00%  | Dinas Pemuda dan Olahraga                       |
| 1.18.16.0002 Pengembangan Kreativitas Dan Aktualisasi Kepemudaan                                   | Persentase Keberhasilan Pengembangan Kreativitas Dan Aktualisasi Kepemudaan                                   | 100%        | 0.00%     | 0.00%   | Dinas Pemuda dan Olahraga                       |
| 1.18.16.0003 Fasilitasi Peningkatan Peran Kepemudaan dengan Jiwa Kebangsaan                        | Persentase Keberhasilan Fasilitasi Peningkatan Peran Kepemudaan dengan Jiwa Kebangsaan                        | 100%        | 23.38%    | 23.38%  | Dinas Pemuda dan Olahraga                       |
| 1.18.16.0004 Penumbuhan Jiwa Sosial Kepemudaan   | Persentase Keberhasilan Penumbuhan Jiwa Sosial Kepemudaan   | 100%        | 7.36%     | 7.36%   | Dinas Pemuda dan Olahraga                       |
| 1.18.16.0005 Peningkatan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan                                    | Persentase Keberhasilan Peningkatan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan                                    | 100%        | 40.38%    | 40.38%  | Dinas Pemuda dan Olahraga                       |
| 1.18.16.0006 Peningkatan Pemahaman Pemuda dan Pencegahan Kenakalan Remaja                          | Persentase Keberhasilan Peningkatan Pemahaman Pemuda dan Pencegahan Kenakalan Remaja                          | 100%        | 28.12%    | 28.12%  | Dinas Pemuda dan Olahraga                       |
| 1.18.16.0007 Peningkatan Jiwa Kepemimpinan Dan Kepeloporan Pemuda                                  | Persentase Keberhasilan Peningkatan Jiwa Kepemimpinan Dan Kepeloporan Pemuda                                  | 100%        | 4.08%     | 4.08%   | Dinas Pemuda dan Olahraga                       |
| <b>1.18.20 Program Pembinaan dan</b>   | Cakupan Pembinaan Atlet Olahraga  | 1937 Orang  |           |         |   |
|  | Jumlah Prasarana Olahraga yang dikembangkan   | 322 Lokasi  |           |         |   |
|  | Olahraga Rekreasi yang digali, dibina dan dikembangkan di Kota Surabaya                                       | 53 Jenis    |           |         |   |
| 1.18.20.0001 Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Olahraga  | Persentase Keberhasilan Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Olahraga  | 100%        | 0.00%     | 0.00%   | Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang |
| 1.18.20.0002 Operasional Dan Pemeliharaan Gedung Dan Lapangan Olahraga                             | Persentase Keberhasilan Operasional Dan Pemeliharaan Gedung Dan Lapangan Olahraga                             | 100%        | 25.03%    | 25.03%  | Dinas Pemuda dan Olahraga                       |
| 1.18.20.0003 Pengembangan dan Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Rekreasi Masyarakat                | Persentase Keberhasilan Pengembangan dan Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Rekreasi Masyarakat                | 100%        | 11.54%    | 11.54%  | Dinas Pemuda dan Olahraga                       |
| 1.18.20.0004 Pengembangan Olahraga Bagi Lanjut Usia, Penyandang Cacat dan Anak Berkebutuhan Khusus | Persentase Keberhasilan Pengembangan Olahraga Bagi Lanjut Usia, Penyandang Cacat dan Anak Berkebutuhan Khusus | 100%        | 17.23%    | 17.23%  | Dinas Pemuda dan Olahraga                       |
| 1.18.20.0005 Pemberian Penghargaan Kepada Insan Olahraga Yang Berprestasi                          | Persentase Keberhasilan Pemberian Penghargaan Kepada Insan Olahraga Yang Berprestasi                          | 100%        | 29.10%    | 29.10%  | Dinas Pemuda dan Olahraga                       |
| 1.18.20.0006 Peningkatan Kesegaran Jasmani Dan Rekreasi  | Persentase Keberhasilan Peningkatan Kesegaran Jasmani Dan Rekreasi  | 100%        | 19.05%    | 19.05%  | Dinas Pemuda dan Olahraga                       |
| 1.18.20.0007 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Yang Berkembang Di Masyarakat                     | Persentase Keberhasilan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Yang Berkembang Di Masyarakat                     | 100%        | 14.17%    | 14.17%  | Dinas Pemuda dan Olahraga                       |
| 1.18.20.0008 Pembangunan, Perbaikan, dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Fasilitas Olahraga      | Persentase Keberhasilan Pembangunan, Perbaikan, dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Fasilitas Olahraga      | 100%        | 1.58%     | 1.58%   | Dinas Pemuda dan Olahraga                       |
| 1.18.20.0009 Operasional dan Pemeliharaan Olahraga Gelora Bung Tomo                                | Persentase Keberhasilan Operasional dan Pemeliharaan Olahraga Gelora Bung Tomo                                | 100%        | 25.00%    | 25.00%  | Dinas Pemuda dan Olahraga                       |
| 1.18.20.0010 Peningkatan SDM Dan Manajemen Olahraga Prestasi                                       | Persentase Keberhasilan Peningkatan SDM Dan Manajemen Olahraga Prestasi                                       | 100%        | 23.10%    | 23.10%  | Dinas Pemuda dan Olahraga                       |
| 1.18.20.0011 Penyelenggaraan Pertandingan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi                          | Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Pertandingan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi                          | 100%        | 0.00%     | 0.00%   | Dinas Pemuda dan Olahraga                       |
| <b>1,19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</b>   |   |             |           |         |   |

| Urusan-Program-Kegiatan  | 2016 (Triwulan I)   |        |           |         | SKPD   |
|--|---|--------|-----------|---------|--|
|  | Indikator   | Target | Realisasi | Capaian |  |
| <b>1.19.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>  | Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                      | 70%    |           |         |  |
| 1.19.01.0002 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran  | Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran  | 100%   | 25.12%    | 25.12%  | Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat |
| 1.19.01.0001 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran  | Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran  | 100%   | 130.66%   | 130.66% | Satuan Polisi Pamong Praja                                 |
| <b>1.19.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                                       | Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                               | 70%    |           |         |  |
| 1.19.02.0002 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran                               | Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran                               | 100%   | 13.05%    | 13.05%  | Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat |
| 1.19.02.0001 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran                               | Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran                               | 100%   | 66.63%    | 66.63%  | Satuan Polisi Pamong Praja                                 |
| <b>1.19.15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>                                  | Persentase tertanganinya konflik di masyarakat  | 100%   |           |         |  |
| 1.19.15.0001 Peningkatan Kerjasama dan Pengendalian Bidang Keamanan                                    | Persentase Keberhasilan Peningkatan Kerjasama dan Pengendalian Bidang Keamanan                                    | 100%   | 15.15%    | 15.15%  | Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat |
| 1.19.15.0002 Pengendalian Kebisingan Dan Gangguan Dari Kegiatan Masyarakat Bidang Penanganan Strategis | Persentase Keberhasilan Pengendalian Kebisingan Dan Gangguan Dari Kegiatan Masyarakat Bidang Penanganan Strategis | 100%   | 21.60%    | 21.60%  | Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat |
| 1.19.15.0003 Pelatihan Pengendalian Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Bidang Linmas                   | Persentase Keberhasilan Pelatihan Pengendalian Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Bidang Linmas                   | 100%   | 40.66%    | 40.66%  | Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat |
| 1.19.15.0004 Pelatihan Pengendalian Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Bidang Penanganan Strategis     | Persentase Keberhasilan Pelatihan Pengendalian Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Bidang Penanganan Strategis     | 100%   | 7.91%     | 7.91%   | Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat |
| 1.19.15.0005 Pengendalian Keamanan Lingkungan Bidang Linmas  | Persentase Keberhasilan Pengendalian Keamanan Lingkungan Bidang Linmas  | 100%   | 24.58%    | 24.58%  | Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat |
| 1.19.15.0006 Peningkatan Toleransi Dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama                              | Persentase Keberhasilan Peningkatan Toleransi Dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama                              | 100%   | 11.28%    | 11.28%  | Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat |
| 1.19.15.0007 Peningkatan Wawasan Kebangsaan  | Persentase Keberhasilan Peningkatan Wawasan Kebangsaan  | 100%   | 0.00%     | 0.00%   | Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat |
| 1.19.15.0008 Pemberdayaan Dan Fasilitasi Parpol Dan Orkemas  | Persentase Keberhasilan Pemberdayaan Dan Fasilitasi Parpol Dan Orkemas  | 100%   | 9.43%     | 9.43%   | Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat |
| <b>1.19.16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak</b>                                | Persentase tertanganinya kasus pelanggaran peraturan  | 100%   |           |         |  |
| 1.19.16.0038 Pembangunan Sarana Utilitas Pendukung Keamanan  | Persentase Keberhasilan Pembangunan Sarana Utilitas Pendukung Keamanan  | 100%   | 10.58%    | 10.58%  | Dinas Komunikasi dan Informatika                           |
| 1.19.16.0014 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja                         | Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja                         | 100%   | 19.28%    | 19.28%  | Kec. Asemrowo  |
| 1.19.16.0006 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja                         | Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja                         | 100%   | 22.84%    | 22.84%  | Kec. Benowo  |
| 1.19.16.0037 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja                         | Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja                         | 100%   | 26.91%    | 26.91%  | Kec. Bubutan   |

| Urusan-Program-Kegiatan  | 2016 (Triwulan I)   |        |           |         | SKPD                |
|--|---|--------|-----------|---------|---------------------|
|  | Indikator   | Target | Realisasi | Capaian |                     |
| 1.19.16.0004 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja | Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja | 100%   | 25.00%    | 25.00%  | Kec. Bulak          |
| 1.19.16.0017 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja | Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja | 100%   | 42.18%    | 42.18%  | Kec. Dukuh Pakis    |
| 1.19.16.0030 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja | Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja | 100%   | 29.98%    | 29.98%  | Kec. Gayungan       |
| 1.19.16.0015 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja | Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja | 100%   | 24.63%    | 24.63%  | Kec. Genteng        |
| 1.19.16.0021 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja | Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja | 100%   | 19.28%    | 19.28%  | Kec. Gubeng         |
| 1.19.16.0007 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja | Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja | 100%   | 24.81%    | 24.81%  | Kec. Gunung Anyar   |
| 1.19.16.0019 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja | Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja | 100%   | 27.41%    | 27.41%  | Kec. Jambangan      |
| 1.19.16.0016 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja | Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja | 100%   | 19.28%    | 19.28%  | Kec. Karangpilang   |
| 1.19.16.0032 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja | Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja | 100%   | 19.28%    | 19.28%  | Kec. Kenjeran       |
| 1.19.16.0005 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja | Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja | 100%   | 19.28%    | 19.28%  | Kec. Krembangan     |
| 1.19.16.0029 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja | Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja | 100%   | 24.63%    | 24.63%  | Kec. Lakarsantri    |
| 1.19.16.0036 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja | Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja | 100%   | 25.00%    | 25.00%  | Kec. Mulyorejo      |
| 1.19.16.0011 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja | Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja | 100%   | 19.28%    | 19.28%  | Kec. Pabean Cantian |
| 1.19.16.0012 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja | Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja | 100%   | 24.63%    | 24.63%  | Kec. Pakal          |
| 1.19.16.0026 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja | Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja | 100%   | 26.33%    | 26.33%  | Kec. Rungkut        |
| 1.19.16.0003 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja | Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja | 100%   | 30.73%    | 30.73%  | Kec. Sambikerep     |
| 1.19.16.0008 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja | Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja | 100%   | 24.63%    | 24.63%  | Kec. Sawahan        |
| 1.19.16.0010 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja | Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja | 100%   | 19.28%    | 19.28%  | Kec. Semampir       |
| 1.19.16.0001 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja | Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja | 100%   | 19.28%    | 19.28%  | Kec. Simokerto      |
| 1.19.16.0031 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja | Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja | 100%   | 13.45%    | 13.45%  | Kec. Sukolilo       |

| Urusan-Program-Kegiatan   | 2016 (Triwulan I)  |        |           |         | SKPD                                      |
|---|--|--------|-----------|---------|---|
|   | Indikator  | Target | Realisasi | Capaian |   |
| 1.19.16.0028 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja              | Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja              | 100%   | 19.28%    | 19.28%  | Kec. Sukomanunggal                        |
| 1.19.16.0033 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja              | Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja              | 100%   | 24.63%    | 24.63%  | Kec. Tambaksari                           |
| 1.19.16.0020 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja              | Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja              | 100%   | 19.28%    | 19.28%  | Kec. Tandes                               |
| 1.19.16.0034 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja              | Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja              | 100%   | 29.98%    | 29.98%  | Kec. Tegalsari                            |
| 1.19.16.0035 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja              | Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja              | 100%   | 19.28%    | 19.28%  | Kec. Tenggilis Mejoyo                     |
| 1.19.16.0022 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja              | Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja              | 100%   | 31.48%    | 31.48%  | Kec. Wiyung                               |
| 1.19.16.0009 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja              | Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja              | 100%   | 340.63%   | 340.63% | Kec. Wonocolo                             |
| 1.19.16.0027 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja              | Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja              | 100%   | 19.28%    | 19.28%  | Kec. Wonokromo                            |
| 1.19.16.0002 Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang III      | Persentase Keberhasilan Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang III      | 100%   | 87.64%    | 87.64%  | Satuan Polisi Pamong Praja                |
| 1.19.16.0013 Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa Di Daerah | Persentase Keberhasilan Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa Di Daerah | 100%   | 40.79%    | 40.79%  | Satuan Polisi Pamong Praja                |
| 1.19.16.0018 Penindakan Evaluasi Pelanggaran Perda  | Persentase Keberhasilan Penindakan Evaluasi Pelanggaran Perda  | 100%   | 30.25%    | 30.25%  | Satuan Polisi Pamong Praja                |
| 1.19.16.0023 Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang I        | Persentase Keberhasilan Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang I        | 100%   | 20.45%    | 20.45%  | Satuan Polisi Pamong Praja                |
| 1.19.16.0024 Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang II       | Persentase Keberhasilan Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang II       | 100%   | 28.40%    | 28.40%  | Satuan Polisi Pamong Praja                |
| 1.19.16.0025 Penyiapan Tenaga Penanggulangan Keamanan Kota                                  | Persentase Keberhasilan Penyiapan Tenaga Penanggulangan Keamanan Kota                                  | 100%   | 24.69%    | 24.69%  | Satuan Polisi Pamong Praja                |
| <b>1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian</b>     |  |        |           |         |   |
| <b>1.20.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                                   | Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                           | 70%    |           |         |   |
| 1.20.01.0024 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran   | Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran   | 100%   | 35.13%    | 35.13%  | Badan Kepegawaian dan Diklat              |
| 1.20.01.0039 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran   | Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran   | 100%   | 29.20%    | 29.20%  | Bagian Bina Program                       |
| 1.20.01.0035 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran   | Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran   | 100%   | 25.00%    | 25.00%  | Bagian Hukum                              |
| 1.20.01.0042 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran   | Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran   | 100%   | 25.11%    | 25.11%  | Bagian Kerjasama                          |
| 1.20.01.0005 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran   | Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran   | 100%   | 24.41%    | 24.41%  | Bagian Organisasi dan Tata Laksana        |
| 1.20.01.0002 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran   | Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran   | 100%   | 31.00%    | 31.00%  | Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah    |
| 1.20.01.0022 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran   | Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran   | 100%   | 15.01%    | 15.01%  | Bagian Perlengkapan                       |
| 1.20.01.0040 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran   | Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran   | 100%   | 23.46%    | 23.46%  | Bagian Umum dan Protokol                  |
| 1.20.01.0014 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran   | Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran   | 100%   | 21.26%    | 21.26%  | Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan |
| 1.20.01.0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran   | Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran   | 100%   | 23.36%    | 23.36%  | Inspektorat                               |

| Urusan-Program-Kegiatan  | 2016 (Triwulan I)   |        |           |         | SKPD                         |
|--|---|--------|-----------|---------|------------------------------|
|  | Indikator   | Target | Realisasi | Capaian |                              |
| 1.20.01.0007 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran                      | Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran                      | 100%   | 20.55%    | 20.55%  | Kec. Asemrowo                |
| 1.20.01.0017 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran                      | Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran                      | 100%   | 28.84%    | 28.84%  | Kec. Benowo                  |
| 1.20.01.0028 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran                      | Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran                      | 100%   | 72.75%    | 72.75%  | Kec. Bubutan                 |
| 1.20.01.0010 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran                      | Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran                      | 100%   | 20.50%    | 20.50%  | Kec. Bulak                   |
| 1.20.01.0001 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran                      | Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran                      | 100%   | 25.43%    | 25.43%  | Kec. Dukuh Pakis             |
| 1.20.01.0013 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran                      | Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran                      | 100%   | 25.35%    | 25.35%  | Kec. Gayungan                |
| 1.20.01.0015 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran                      | Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran                      | 100%   | 22.27%    | 22.27%  | Kec. Genteng                 |
| 1.20.01.0018 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran                      | Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran                      | 100%   | 25.19%    | 25.19%  | Kec. Gubeng                  |
| 1.20.01.0033 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran                      | Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran                      | 100%   | 32.37%    | 32.37%  | Kec. Gunung Anyar            |
| 1.20.01.0041 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran                      | Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran                      | 100%   | 24.98%    | 24.98%  | Kec. Jambangan               |
| 1.20.01.0020 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran                      | Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran                      | 100%   | 21.40%    | 21.40%  | Kec. Karangpilang            |
| 1.20.01.0036 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran                      | Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran                      | 100%   | 26.48%    | 26.48%  | Kec. Kenjeran                |
| 1.20.01.0037 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran                      | Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran                      | 100%   | 24.31%    | 24.31%  | Kec. Krembangan              |
| 1.20.01.0026 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran                      | Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran                      | 100%   | 28.70%    | 28.70%  | Kec. Lakarsantri             |
| 1.20.01.0034 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran                      | Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran                      | 100%   | 13.12%    | 13.12%  | Kec. Mulyorejo               |
| 1.20.01.0003 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran                      | Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran                      | 100%   | 21.10%    | 21.10%  | Kec. Pabean Cantian          |
| 1.20.01.0025 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran                      | Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran                      | 100%   | 24.44%    | 24.44%  | Kec. Pakal                   |
| 1.20.01.0021 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran                      | Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran                      | 100%   | 13.23%    | 13.23%  | Kec. Rungkut                 |
| 1.20.01.0004 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran                      | Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran                      | 100%   | 24.56%    | 24.56%  | Kec. Sambikerep              |
| 1.20.01.0012 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran                      | Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran                      | 100%   | 19.47%    | 19.47%  | Kec. Sawahan                 |
| 1.20.01.0009 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran                      | Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran                      | 100%   | 22.25%    | 22.25%  | Kec. Semampir                |
| 1.20.01.0011 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran                      | Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran                      | 100%   | 28.72%    | 28.72%  | Kec. Simokerto               |
| 1.20.01.0030 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran                      | Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran                      | 100%   | 145.62%   | 145.62% | Kec. Sukolilo                |
| 1.20.01.0032 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran                      | Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran                      | 100%   | 30.64%    | 30.64%  | Kec. Sukomanunggal           |
| 1.20.01.0038 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran                      | Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran                      | 100%   | 18.15%    | 18.15%  | Kec. Tambaksari              |
| 1.20.01.0016 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran                      | Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran                      | 100%   | 22.45%    | 22.45%  | Kec. Tandes                  |
| 1.20.01.0029 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran                      | Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran                      | 100%   | 24.74%    | 24.74%  | Kec. Tegalsari               |
| 1.20.01.0031 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran                      | Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran                      | 100%   | 26.86%    | 26.86%  | Kec. Tenggilis Mejoyo        |
| 1.20.01.0006 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran                      | Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran                      | 100%   | 23.71%    | 23.71%  | Kec. Wiyung                  |
| 1.20.01.0008 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran                      | Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran                      | 100%   | 22.66%    | 22.66%  | Kec. Wonocolo                |
| 1.20.01.0023 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran                      | Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran                      | 100%   | 25.45%    | 25.45%  | Kec. Wonokromo               |
| 1.20.01.0027 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran                      | Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran                      | 100%   | 18.47%    | 18.47%  | Sekretariat DPRD             |
| <b>1.20.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>         | Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 70%    |           |         |                              |
| 1.20.02.0033 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | 100%   | 31.26%    | 31.26%  | Badan Kepegawaian dan Diklat |
| 1.20.02.0030 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | 100%   | 33.75%    | 33.75%  | Bagian Bina Program          |
| 1.20.02.0002 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | 100%   | 25.00%    | 25.00%  | Bagian Hukum                 |
| 1.20.02.0011 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | 100%   | 37.61%    | 37.61%  | Bagian Kerjasama             |

| Urusan-Program-Kegiatan  | 2016 (Triwulan I)   |        |           |         | SKPD                                      |
|--|---|--------|-----------|---------|---|
|  | Indikator   | Target | Realisasi | Capaian |   |
| 1.20.02.0021 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | 100%   | 18.75%    | 18.75%  | Bagian Organisasi dan Tata Laksana        |
| 1.20.02.0037 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | 100%   | 41.94%    | 41.94%  | Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah    |
| 1.20.02.0042 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | 100%   | 8.33%     | 8.33%   | Bagian Perlengkapan                       |
| 1.20.02.0010 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | 100%   | 29.36%    | 29.36%  | Bagian Umum dan Protokol                  |
| 1.20.02.0034 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | 100%   | 61.53%    | 61.53%  | Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan |
| 1.20.02.0016 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | 100%   | 25.01%    | 25.01%  | Inspektorat                               |
| 1.20.02.0032 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | 100%   | 22.18%    | 22.18%  | Kec. Asemrowo                             |
| 1.20.02.0001 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | 100%   | 18.94%    | 18.94%  | Kec. Benowo                               |
| 1.20.02.0006 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | 100%   | 34.35%    | 34.35%  | Kec. Bubutan                              |
| 1.20.02.0031 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | 100%   | 22.07%    | 22.07%  | Kec. Bulak                                |
| 1.20.02.0007 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | 100%   | 22.38%    | 22.38%  | Kec. Dukuh Pakis                          |
| 1.20.02.0018 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | 100%   | 21.09%    | 21.09%  | Kec. Gayungan                             |
| 1.20.02.0036 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | 100%   | 23.04%    | 23.04%  | Kec. Genteng                              |
| 1.20.02.0014 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | 100%   | 19.89%    | 19.89%  | Kec. Gubeng                               |
| 1.20.02.0027 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | 100%   | 58.93%    | 58.93%  | Kec. Gunung Anyar                         |
| 1.20.02.0017 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | 100%   | 22.38%    | 22.38%  | Kec. Jambangan                            |
| 1.20.02.0008 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | 100%   | 20.19%    | 20.19%  | Kec. Karangpilang                         |
| 1.20.02.0028 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | 100%   | 21.09%    | 21.09%  | Kec. Kenjeran                             |
| 1.20.02.0038 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | 100%   | 20.79%    | 20.79%  | Kec. Krembangan                           |
| 1.20.02.0019 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | 100%   | 14.16%    | 14.16%  | Kec. Lakarsantri                          |
| 1.20.02.0025 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | 100%   | 2.50%     | 2.50%   | Kec. Mulyorejo                            |
| 1.20.02.0039 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | 100%   | 25.64%    | 25.64%  | Kec. Pabean Cantian                       |
| 1.20.02.0005 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | 100%   | 25.00%    | 25.00%  | Kec. Pakal                                |
| 1.20.02.0020 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | 100%   | 21.88%    | 21.88%  | Kec. Rungkut                              |
| 1.20.02.0024 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | 100%   | 20.61%    | 20.61%  | Kec. Sambikerep                           |
| 1.20.02.0029 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | 100%   | 23.75%    | 23.75%  | Kec. Sawahan                              |



| Urusan-Program-Kegiatan   | 2016 (Triwulan I)  |        |           |         | SKPD                         |
|---|--|--------|-----------|---------|------------------------------|
|   | Indikator  | Target | Realisasi | Capaian |                              |
| 1.20.02.0041 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran      | Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran      | 100%   | 22.96%    | 22.96%  | Kec. Semampir                |
| 1.20.02.0015 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran      | Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran      | 100%   | 16.49%    | 16.49%  | Kec. Simokerto               |
| 1.20.02.0023 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran      | Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran      | 100%   | 220.00%   | 220.00% | Kec. Sukolilo                |
| 1.20.02.0012 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran      | Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran      | 100%   | 25.00%    | 25.00%  | Kec. Sukomanunggal           |
| 1.20.02.0026 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran      | Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran      | 100%   | 22.32%    | 22.32%  | Kec. Tambaksari              |
| 1.20.02.0035 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran      | Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran      | 100%   | 21.88%    | 21.88%  | Kec. Tandes                  |
| 1.20.02.0040 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran      | Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran      | 100%   | 22.61%    | 22.61%  | Kec. Tegalsari               |
| 1.20.02.0003 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran      | Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran      | 100%   | 22.38%    | 22.38%  | Kec. Tenggilis Mejoyo        |
| 1.20.02.0009 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran      | Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran      | 100%   | 15.93%    | 15.93%  | Kec. Wiyung                  |
| 1.20.02.0013 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran      | Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran      | 100%   | 20.23%    | 20.23%  | Kec. Wonocolo                |
| 1.20.02.0004 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran      | Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran      | 100%   | 16.39%    | 16.39%  | Kec. Wonokromo               |
| 1.20.02.0022 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran      | Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran      | 100%   | 16.72%    | 16.72%  | Sekretariat DPRD             |
| <b>1.20.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>             | Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural                           | 80%    |           |         |                              |
|   | Sistem Kepegawaian yang up date  | 100%   |           |         |                              |
|   | Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis dan fungsional                           | 90%    |           |         |                              |
| 1.20.05.0001 Peningkatan Wawasan Aparatur Dan Pemberian Bantuan Tugas Belajar | Persentase Keberhasilan Peningkatan Wawasan Aparatur Dan Pemberian Bantuan Tugas Belajar | 100%   | 1.55%     | 1.55%   | Badan Kepegawaian dan Diklat |
| 1.20.05.0002 Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah        | Persentase Keberhasilan Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah        | 100%   | 0.00%     | 0.00%   | Badan Kepegawaian dan Diklat |
| 1.20.05.0003 Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah              | Persentase Keberhasilan Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah              | 100%   | 0.00%     | 0.00%   | Badan Kepegawaian dan Diklat |
| 1.20.05.0004 Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah              | Persentase Keberhasilan Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah              | 100%   | 112.50%   | 112.50% | Badan Kepegawaian dan Diklat |
| 1.20.05.0005 Ujian Dinas Tingkat I  | Persentase Keberhasilan Ujian Dinas Tingkat I  | 100%   | 80.95%    | 80.95%  | Badan Kepegawaian dan Diklat |
| 1.20.05.0006 Pengelolaan Sistem Data Pegawai                                  | Persentase Keberhasilan Pengelolaan Sistem Data Pegawai                                  | 100%   | 25.00%    | 25.00%  | Badan Kepegawaian dan Diklat |
| 1.20.05.0007 Penataan Administrasi Kepegawaian                                | Persentase Keberhasilan Penataan Administrasi Kepegawaian                                | 100%   | 16.57%    | 16.57%  | Badan Kepegawaian dan Diklat |
| 1.20.05.0008 Tes Kesehatan bagi Pegawai                                       | Persentase Keberhasilan Tes Kesehatan bagi Pegawai                                       | 100%   | 20.00%    | 20.00%  | Badan Kepegawaian dan Diklat |
| 1.20.05.0009 Pembinaan Kinerja Pegawai  | Persentase Keberhasilan Pembinaan Kinerja Pegawai  | 100%   | 51.21%    | 51.21%  | Badan Kepegawaian dan Diklat |
| 1.20.05.0010 Seleksi Penerimaan Calon PNS Dan Administrasi Calon Praja IPDN   | Persentase Keberhasilan Seleksi Penerimaan Calon PNS Dan Administrasi Calon Praja IPDN   | 100%   | 0.00%     | 0.00%   | Badan Kepegawaian dan Diklat |
| 1.20.05.0011 Pelayanan Administrasi Kepegawaian                               | Persentase Keberhasilan Pelayanan Administrasi Kepegawaian                               | 100%   | 25.70%    | 25.70%  | Badan Kepegawaian dan Diklat |
| 1.20.05.0012 Penempatan Pegawai Dan Promosi Jabatan                           | Persentase Keberhasilan Penempatan Pegawai Dan Promosi Jabatan                           | 100%   | 7.45%     | 7.45%   | Badan Kepegawaian dan Diklat |
| 1.20.05.0013 Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Tugas Dan Fungsi Bagi PNS Daerah | Persentase Keberhasilan Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Tugas Dan Fungsi Bagi PNS Daerah | 100%   | 45.06%    | 45.06%  | Badan Kepegawaian dan Diklat |



| Urusan-Program-Kegiatan  | 2016 (Triwulan I)   |        |           |         | SKPD  |
|--|---|--------|-----------|---------|---|
|  | Indikator   | Target | Realisasi | Capaian |   |
| <b>1.20.15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</b>                                  | Persentase jumlah kegiatan DPRD yang terfasilitasi dengan baik  | 100%   |           |         |   |
| 1.20.15.0001 Protokol dan Pengendalian Sistim Keamanan   | Persentase Keberhasilan Protokol dan Pengendalian Sistim Keamanan   | 100%   | 46.95%    | 46.95%  | Sekretariat DPRD                                |
| 1.20.15.0002 Informasi dan Pengolahan Data   | Persentase Keberhasilan Informasi dan Pengolahan Data   | 100%   | 24.00%    | 24.00%  | Sekretariat DPRD                                |
| 1.20.15.0003 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah                                 | Persentase Keberhasilan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah                                 | 100%   | 37.25%    | 37.25%  | Sekretariat DPRD                                |
| 1.20.15.0004 Kunjungan Kerja dan Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD                               | Persentase Keberhasilan Kunjungan Kerja dan Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD                               | 100%   | 96.62%    | 96.62%  | Sekretariat DPRD                                |
| 1.20.15.0005 Rapat-rapat Paripurna   | Persentase Keberhasilan Rapat-rapat Paripurna   | 100%   | 10.00%    | 10.00%  | Sekretariat DPRD                                |
| 1.20.15.0006 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan  | Persentase Keberhasilan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan  | 100%   | 19.34%    | 19.34%  | Sekretariat DPRD                                |
| 1.20.15.0007 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah   | Persentase Keberhasilan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah   | 100%   | 17.26%    | 17.26%  | Sekretariat DPRD                                |
| 1.20.15.0008 Pengkajian/Penelaahan Kebijakan Daerah  | Persentase Keberhasilan Pengkajian/Penelaahan Kebijakan Daerah  | 100%   | 0.00%     | 0.00%   | Sekretariat DPRD                                |
| 1.20.15.0009 Kegiatan Reses  | Persentase Keberhasilan Kegiatan Reses  | 100%   | 33.33%    | 33.33%  | Sekretariat DPRD                                |
| <b>1.20.16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</b>                       | Persentase terlayannya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar                           | 100%   |           |         |   |
| 1.20.16.0001 Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah                              | Persentase Keberhasilan Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah                              | 100%   | 14.77%    | 14.77%  | Bagian Umum dan Protokol                        |
| 1.20.16.0002 Pemeliharaan Dan Pengadaan Sarana Sistem Persandian   | Persentase Keberhasilan Pemeliharaan Dan Pengadaan Sarana Sistem Persandian   | 100%   | 45.52%    | 45.52%  | Bagian Umum dan Protokol                        |
| <b>1.20.17 Program Peningkatan dan</b>   | Rata-rata Peningkatan PAD   | 10%    |           |         |   |
|  | Terkendalnya anggaran pendapatan  | 80%    |           |         |   |
|  | % Dokumen keuangan yang selesai   | 100%   |           |         |   |
|  | Laporan aset/barang daerah diterbitkan  | 100%   |           |         |   |
|  | Rata-rata pertumbuhan dana  | 3.44 % |           |         |   |
| 1.20.17.0001 Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Dari Retribusi Ijin Gangguan     | Persentase Keberhasilan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Dari Retribusi Ijin Gangguan     | 100%   | 27.56%    | 27.56%  | Badan Lingkungan Hidup                          |
| 1.20.17.0011 Evaluasi Dan Penghapusan Aset/barang Daerah   | Persentase Keberhasilan Evaluasi Dan Penghapusan Aset/barang Daerah   | 100%   | 0.00%     | 0.00%   | Bagian Perlengkapan                             |
| 1.20.17.0021 Inventarisasi Aset / Barang Daerah  | Persentase Keberhasilan Inventarisasi Aset / Barang Daerah  | 100%   | 0.00%     | 0.00%   | Bagian Perlengkapan                             |
| 1.20.17.0007 Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Retribusi Alat Pemadam Kebakaran Pada Gedung Dan Perusahaan      | Persentase Keberhasilan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Retribusi Alat Pemadam Kebakaran Pada Gedung Dan Perusahaan      | 100%   | 12.79%    | 12.79%  | Dinas Kebakaran                                 |
| 1.20.17.0009 Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Bidang Kebersihan Dan Pertamanan | Persentase Keberhasilan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Bidang Kebersihan Dan Pertamanan | 100%   | 775.00%   | 775.00% | Dinas Kebersihan dan Pertamanan                 |
| 1.20.17.0013 Pemanfaatan Menara Bersama Telekomunikasi   | Persentase Keberhasilan Pemanfaatan Menara Bersama Telekomunikasi   | 100%   | 0.00%     | 0.00%   | Dinas Komunikasi dan Informatika                |
| 1.20.17.0022 Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Tata Bangunan  | Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Tata Bangunan  | 100%   | 14.50%    | 14.50%  | Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang |
| 1.20.17.0002 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Parkir, PPJ PLN-PPJ Non PLN, PBB dan BPHTB                 | Persentase Keberhasilan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Parkir, PPJ PLN-PPJ Non PLN, PBB dan BPHTB                 | 100%   | 25.00%    | 25.00%  | Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan       |
| 1.20.17.0003 Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Keuangan   | Persentase Keberhasilan Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Keuangan   | 100%   | 0.00%     | 0.00%   | Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan       |
| 1.20.17.0004 Koordinasi DAU, DAK, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak dan Lain-lain Pendapatan            | Persentase Keberhasilan Koordinasi DAU, DAK, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak dan Lain-lain Pendapatan            | 100%   | 75.00%    | 75.00%  | Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan       |
| 1.20.17.0006 Penyusunan APBD, Perubahan APBD Dan RAPBD   | Persentase Keberhasilan Penyusunan APBD, Perubahan APBD Dan RAPBD   | 100%   | 4.55%     | 4.55%   | Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan       |

| Urusan-Program-Kegiatan   | 2016 (Triwulan I)  |        |           |         | SKPD                                      |
|---|--|--------|-----------|---------|---|
|   | Indikator  | Target | Realisasi | Capaian |   |
| 1.20.17.0010 Penyusunan Dan Pelaporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD   | Persentase Keberhasilan Penyusunan Dan Pelaporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD   | 100%   | 18.64%    | 18.64%  | Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan |
| 1.20.17.0012 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan dan Reklame   | Persentase Keberhasilan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan dan Reklame   | 100%   | 25.00%    | 25.00%  | Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan |
| 1.20.17.0014 Penagihan, pelayanan pengurangan, angsuran, restitusi dan kompensasi Pajak Reklame, Pajak Parkir dan Pajak Hiburan | Persentase Keberhasilan Penagihan, pelayanan pengurangan, angsuran, restitusi dan kompensasi Pajak Reklame, Pajak Parkir dan Pajak Hiburan | 100%   | 25.00%    | 25.00%  | Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan |
| 1.20.17.0016 Pelayanan Penerimaan Dan Pengeluaran Kas   | Persentase Keberhasilan Pelayanan Penerimaan Dan Pengeluaran Kas   | 100%   | 25.00%    | 25.00%  | Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan |
| 1.20.17.0017 Penelitian dan Penilaian Surat Perintah Membayar (SPM) serta Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)      | Persentase Keberhasilan Penelitian dan Penilaian Surat Perintah Membayar (SPM) serta Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)      | 100%   | 16.90%    | 16.90%  | Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan |
| 1.20.17.0018 Evaluasi dan Koordinasi Pendapatan dan Belanja Daerah  | Persentase Keberhasilan Evaluasi dan Koordinasi Pendapatan dan Belanja Daerah  | 100%   | 25.00%    | 25.00%  | Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan |
| 1.20.17.0019 Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pajak Hotel, Restoran Dan Air Tanah   | Persentase Keberhasilan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pajak Hotel, Restoran Dan Air Tanah   | 100%   | 25.00%    | 25.00%  | Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan |
| 1.20.17.0020 Penyusunan Bahan Anggaran Kas  | Persentase Keberhasilan Penyusunan Bahan Anggaran Kas  | 100%   | 50.00%    | 50.00%  | Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan |
| 1.20.17.0025 Penagihan, pelayanan pengurangan, angsuran, restitusi dan kompensasi Pajak Hotel, Restoran dan Air Tanah           | Persentase Keberhasilan Penagihan, pelayanan pengurangan, angsuran, restitusi dan kompensasi Pajak Hotel, Restoran dan Air Tanah           | 100%   | 25.00%    | 25.00%  | Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan |
| 1.20.17.0027 Penagihan, pelayanan pengurangan, angsuran, restitusi dan kompensasi PBB, BPHTB dan PPJ PLN-PPJ Non PLN            | Persentase Keberhasilan Penagihan, pelayanan pengurangan, angsuran, restitusi dan kompensasi PBB, BPHTB dan PPJ PLN-PPJ Non PLN            | 100%   | 25.00%    | 25.00%  | Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan |
| 1.20.17.0005 Pendataan Dan Inventarisasi Rumah Ber-SIP Dan Rumah Sewa Aset Pemerintah Kota Surabaya                             | Persentase Keberhasilan Pendataan Dan Inventarisasi Rumah Ber-SIP Dan Rumah Sewa Aset Pemerintah Kota Surabaya                             | 100%   | 25.00%    | 25.00%  | Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah      |
| 1.20.17.0008 Pengawasan Dan Pengelolaan Bangunan Sewa   | Persentase Keberhasilan Pengawasan Dan Pengelolaan Bangunan Sewa   | 100%   | 25.00%    | 25.00%  | Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah      |
| 1.20.17.0015 Monitoring Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya  | Persentase Keberhasilan Monitoring Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya  | 100%   | 25.00%    | 25.00%  | Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah      |
| 1.20.17.0023 Pendataan Dan Penelitian Terhadap Ijin Pemakaian Tanah   | Persentase Keberhasilan Pendataan Dan Penelitian Terhadap Ijin Pemakaian Tanah   | 100%   | 25.00%    | 25.00%  | Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah      |
| 1.20.17.0024 Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber Sumber Pendapatan Daerah Bidang Perhubungan                                | Persentase Keberhasilan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber Sumber Pendapatan Daerah Bidang Perhubungan                                | 100%   | 27.85%    | 27.85%  | Dinas Perhubungan                         |
| 1.20.17.0026 Pengelolaan Parkir   | Persentase Keberhasilan Pengelolaan Parkir   | 100%   | 28.83%    | 28.83%  | Dinas Perhubungan                         |
| <b>1.20.20 Program Peningkatan Sistem</b>   | Persentase Penanganan Pengaduan  | 100%   |           |         |   |
|   | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan   | 89.8 % |           |         |   |
| 1.20.20.0008 Penerapan Disiplin Pegawai   | Persentase Keberhasilan Penerapan Disiplin Pegawai   | 100%   | 44.00%    | 44.00%  | Badan Kepegawaian dan Diklat              |
| 1.20.20.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Inspektorat   | Persentase Keberhasilan Penyusunan Dokumen Perencanaan Inspektorat   | 100%   | 21.43%    | 21.43%  | Inspektorat                               |
| 1.20.20.0002 Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah I Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya                  | Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah I Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya                  | 100%   | 25.00%    | 25.00%  | Inspektorat                               |
| 1.20.20.0003 Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah II Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya                 | Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah II Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya                 | 100%   | 29.68%    | 29.68%  | Inspektorat                               |

| Urusan-Program-Kegiatan   | 2016 (Triwulan I)  |         |           |         | SKPD                               |
|---|--|---------|-----------|---------|------------------------------------|
|   | Indikator  | Target  | Realisasi | Capaian |                                    |
| 1.20.20.0004 Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah II Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya  | Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah II Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya  | 100%    | 55.99%    | 55.99%  | Inspektorat                        |
| 1.20.20.0005 Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah III Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya  | Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah III Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya  | 100%    | 25.00%    | 25.00%  | Inspektorat                        |
| 1.20.20.0006 Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah I Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya   | Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah I Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya   | 100%    | 8.22%     | 8.22%   | Inspektorat                        |
| 1.20.20.0007 Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah III Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya                                       | Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah III Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya                                       | 100%    | 31.27%    | 31.27%  | Inspektorat                        |
| 1.20.20.0009 Inventarisasi Temuan Pengawasan  | Persentase Keberhasilan Inventarisasi Temuan Pengawasan  | 100%    | 9.23%     | 9.23%   | Inspektorat                        |
| 1.20.20.0010 Penilaian Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pengawasan  | Persentase Keberhasilan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pengawasan  | 100%    | 50.00%    | 50.00%  | Inspektorat                        |
| <b>1.20.25 Program Peningkatan Kerjasama</b>  | Persentase MoU kerjasama antar   | 80%     |           |         |                                    |
|   | Persentase MOU kerjasama luar negeri   | 50%     |           |         |                                    |
|   | Jumlah MoU yang Dievaluasi   | 22.22 % |           |         |                                    |
| 1.20.25.0001 Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah  | Persentase Keberhasilan Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah  | 100%    | 19.70%    | 19.70%  | Bagian Kerjasama                   |
| 1.20.25.0002 Fasilitasi Pengiriman Delegasi Pendidikan Ke Luar Negeri   | Persentase Keberhasilan Fasilitasi Pengiriman Delegasi Pendidikan Ke Luar Negeri   | 100%    | 43.20%    | 43.20%  | Bagian Kerjasama                   |
| 1.20.25.0003 Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Luar Negeri   | Persentase Keberhasilan Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Luar Negeri   | 100%    | 0.00%     | 0.00%   | Bagian Kerjasama                   |
| 1.20.25.0004 Fasilitasi/pembentukan Kerjasama Antar Lembaga   | Persentase Keberhasilan Fasilitasi/pembentukan Kerjasama Antar Lembaga   | 100%    | 60.00%    | 60.00%  | Bagian Kerjasama                   |
| 1.20.25.0005 Penyusunan Kajian Dan Laporan Kerjasama  | Persentase Keberhasilan Penyusunan Kajian Dan Laporan Kerjasama  | 100%    | 15.50%    | 15.50%  | Bagian Kerjasama                   |
| 1.20.25.0006 Fasilitasi Delegasi Internasional Di Dalam Negeri  | Persentase Keberhasilan Fasilitasi Delegasi Internasional Di Dalam Negeri  | 100%    | 10.00%    | 10.00%  | Bagian Kerjasama                   |
| <b>1.20.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>  | Persentase rancangan produk hukum yang dapat diselesaikan  | 100%    |           |         |                                    |
|   | Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti   | 100%    |           |         |                                    |
|   | Persentase Produk hukum yang disebarluaskan  | 100%    |           |         |                                    |
| 1.20.26.0001 Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan Yang Baru, lebih Tinggi Dari Keserasian Antar Peraturan Perundang-undangan Daerah | Persentase Keberhasilan Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan Yang Baru, lebih Tinggi Dari Keserasian Antar Peraturan Perundang-undangan Daerah | 100%    | 25.00%    | 25.00%  | Bagian Hukum                       |
| 1.20.26.0002 Publikasi Peraturan Perundang-undangan   | Persentase Keberhasilan Publikasi Peraturan Perundang-undangan   | 100%    | 19.70%    | 19.70%  | Bagian Hukum                       |
| 1.20.26.0003 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan  | Persentase Keberhasilan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan  | 100%    | 6.19%     | 6.19%   | Bagian Hukum                       |
| 1.20.26.0004 Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan   | Persentase Keberhasilan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan   | 100%    | 19.50%    | 19.50%  | Bagian Hukum                       |
| 1.20.26.0005 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan  | Persentase Keberhasilan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan  | 100%    | 20.00%    | 20.00%  | Bagian Hukum                       |
| <b>1.20.28 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan</b>   | Persentase Jenis Pelayanan yang Memiliki SOP   | 44%     |           |         |                                    |
|   | Tidak Terjadi Tumpang Tindih Tugas Pokok dan Fungsi pada SKPD  | 100%    |           |         |                                    |
| 1.20.28.0001 Survey Kepuasan Masyarakat   | Persentase Keberhasilan Survey Kepuasan Masyarakat   | 100%    | 0.00%     | 0.00%   | Bagian Organisasi dan Tata Laksana |

| Urusan-Program-Kegiatan  | 2016 (Triwulan I)   |        |           |         | SKPD                                   |
|--|---|--------|-----------|---------|--|
|  | Indikator   | Target | Realisasi | Capaian |  |
| 1.20.28.0002 Pelaksanaan Analisa Jabatan, Beban Kerja Dan Standart Kompetensi            | Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Analisa Jabatan, Beban Kerja Dan Standart Kompetensi            | 100%   | 0.00%     | 0.00%   | Bagian Organisasi dan Tata Laksana     |
| 1.20.28.0003 Peningkatan Sistem Dan Prosedur Administrasi Pemerintahan                   | Persentase Keberhasilan Peningkatan Sistem Dan Prosedur Administrasi Pemerintahan                   | 100%   | 63.64%    | 63.64%  | Bagian Organisasi dan Tata Laksana     |
| 1.20.28.0004 Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Tata Naskah Dinas                       | Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Tata Naskah Dinas                       | 100%   | 18.68%    | 18.68%  | Bagian Organisasi dan Tata Laksana     |
| 1.20.28.0005 Pelaksanaan Analisa Kelembagaan   | Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Analisa Kelembagaan   | 100%   | 0.00%     | 0.00%   | Bagian Organisasi dan Tata Laksana     |
| 1.20.28.0006 Pengendalian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi                                | Persentase Keberhasilan Pengendalian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi                                | 100%   | 42.30%    | 42.30%  | Bagian Organisasi dan Tata Laksana     |
| 1.20.28.0007 Peningkatan Sistem Dan Mekanisme Pelayanan                                  | Persentase Keberhasilan Peningkatan Sistem Dan Mekanisme Pelayanan                                  | 100%   | 20.05%    | 20.05%  | Bagian Organisasi dan Tata Laksana     |
| <b>1.20.29 Program Penataan Daerah Otonom</b>  | Persentase kecamatan dan kelurahan yang tertib administrasi   | 100%   |           |         |  |
| 1.20.29.0005 Penataan Wilayah Kecamatan di Kota Surabaya                                 | Persentase Keberhasilan Penataan Wilayah Kecamatan di Kota Surabaya                                 | 100%   | 0.00%     | 0.00%   | Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah |
| 1.20.29.0019 Dialog Dengan Tokoh-tokoh Masyarakat Dan Penataan Manajemen Administrasi RT | Persentase Keberhasilan Dialog Dengan Tokoh-tokoh Masyarakat Dan Penataan Manajemen Administrasi RT | 100%   | 3.50%     | 3.50%   | Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah |
| 1.20.29.0026 Lomba Kelurahan Berhasil  | Persentase Keberhasilan Lomba Kelurahan Berhasil  | 100%   | 0.00%     | 0.00%   | Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah |
| 1.20.29.0029 Pembinaan Dan Penataan Batas Wilayah Kota, Kecamatan Dan Kelurahan          | Persentase Keberhasilan Pembinaan Dan Penataan Batas Wilayah Kota, Kecamatan Dan Kelurahan          | 100%   | 0.00%     | 0.00%   | Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah |
| 1.20.29.0031 Pengelolaan Toponimi Di Kota Surabaya                                       | Persentase Keberhasilan Pengelolaan Toponimi Di Kota Surabaya                                       | 100%   | 0.00%     | 0.00%   | Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah |
| 1.20.29.0032 Pengendalian Pelaksanaan Otonomi Daerah                                     | Persentase Keberhasilan Pengendalian Pelaksanaan Otonomi Daerah                                     | 100%   | 39.80%    | 39.80%  | Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah |
| 1.20.29.0059 Pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan                                    | Persentase Keberhasilan Pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan                                    | 100%   | 15.57%    | 15.57%  | Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah |
| 1.20.29.0035 Operasional Kelurahan Genting Kalianak                                      | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Genting Kalianak                                      | 100%   | 45.32%    | 45.32%  | Kec. Asemrowo                          |
| 1.20.29.0075 Operasional Kelurahan Asemrowo  | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Asemrowo  | 100%   | 45.32%    | 45.32%  | Kec. Asemrowo                          |
| 1.20.29.0076 Operasional Kelurahan Tambak Sarioso  | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Tambak Sarioso  | 100%   | 45.32%    | 45.32%  | Kec. Asemrowo                          |
| 1.20.29.0036 Operasional Kelurahan Tambak Osowilangon                                    | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Tambak Osowilangon                                    | 100%   | 44.77%    | 44.77%  | Kec. Benowo                            |
| 1.20.29.0054 Operasional Kelurahan Romokalisari  | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Romokalisari  | 100%   | 44.89%    | 44.89%  | Kec. Benowo                            |
| 1.20.29.0077 Operasional Kelurahan Kandangan   | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Kandangan   | 100%   | 44.77%    | 44.77%  | Kec. Benowo                            |
| 1.20.29.0090 Operasional Kelurahan Sememi  | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Sememi  | 100%   | 44.77%    | 44.77%  | Kec. Benowo                            |
| 1.20.29.0010 Operasional Kelurahan Bubutan   | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Bubutan   | 100%   | 45.32%    | 45.32%  | Kec. Bubutan                           |
| 1.20.29.0055 Operasional Kelurahan Jepara  | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Jepara  | 100%   | 45.32%    | 45.32%  | Kec. Bubutan                           |
| 1.20.29.0120 Operasional Kelurahan Gundih  | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Gundih  | 100%   | 45.32%    | 45.32%  | Kec. Bubutan                           |
| 1.20.29.0141 Operasional Kelurahan Alon-alon Contong                                     | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Alon-alon Contong                                     | 100%   | 45.32%    | 45.32%  | Kec. Bubutan                           |
| 1.20.29.0160 Operasional Kelurahan Tembok Dukuh  | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Tembok Dukuh  | 100%   | 45.32%    | 45.32%  | Kec. Bubutan                           |
| 1.20.29.0041 Operasional Kelurahan Bulak   | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Bulak   | 100%   | 44.77%    | 44.77%  | Kec. Bulak                             |

| Urusan-Program-Kegiatan                                | 2016 (Triwulan I)   |        |           |         | SKPD              |
|--|---|--------|-----------|---------|-------------------|
|  | Indikator   | Target | Realisasi | Capaian |                   |
| 1.20.29.0082 Operasional Kelurahan Kedung Cowek        | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Kedung Cowek        | 100%   | 43.89%    | 43.89%  | Kec. Bulak        |
| 1.20.29.0083 Operasional Kelurahan Sukolilo Baru       | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Sukolilo Baru       | 100%   | 44.77%    | 44.77%  | Kec. Bulak        |
| 1.20.29.0134 Operasional Kelurahan Kenjeran            | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Kenjeran            | 100%   | 44.77%    | 44.77%  | Kec. Bulak        |
| 1.20.29.0044 Operasional Kelurahan Gunung Sari         | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Gunung Sari         | 100%   | 42.00%    | 42.00%  | Kec. Dukuh Pakis  |
| 1.20.29.0052 Operasional Kelurahan Dukuh Kupang        | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Dukuh Kupang        | 100%   | 42.00%    | 42.00%  | Kec. Dukuh Pakis  |
| 1.20.29.0065 Operasional Kelurahan Prada Kali Kendal   | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Prada Kali Kendal   | 100%   | 42.00%    | 42.00%  | Kec. Dukuh Pakis  |
| 1.20.29.0088 Operasional Kelurahan Dukuh Pakis         | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Dukuh Pakis         | 100%   | 42.00%    | 42.00%  | Kec. Dukuh Pakis  |
| 1.20.29.0051 Operasional Kelurahan Ketintang           | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Ketintang           | 100%   | 40.87%    | 40.87%  | Kec. Gayungan     |
| 1.20.29.0058 Operasional Kelurahan Menanggal           | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Menanggal           | 100%   | 43.51%    | 43.51%  | Kec. Gayungan     |
| 1.20.29.0070 Operasional Kelurahan Dukuh Menanggal     | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Dukuh Menanggal     | 100%   | 43.51%    | 43.51%  | Kec. Gayungan     |
| 1.20.29.0071 Operasional Kelurahan Gayungan            | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Gayungan            | 100%   | 36.72%    | 36.72%  | Kec. Gayungan     |
| 1.20.29.0061 Operasional Kelurahan Embong Kaliasin     | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Embong Kaliasin     | 100%   | 43.51%    | 43.51%  | Kec. Genteng      |
| 1.20.29.0084 Operasional Kelurahan Genteng             | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Genteng             | 100%   | 42.68%    | 42.68%  | Kec. Genteng      |
| 1.20.29.0085 Operasional Kelurahan Kapasari            | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Kapasari            | 100%   | 43.51%    | 43.51%  | Kec. Genteng      |
| 1.20.29.0086 Operasional Kelurahan Ketabang            | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Ketabang            | 100%   | 45.32%    | 45.32%  | Kec. Genteng      |
| 1.20.29.0087 Operasional Kelurahan Peneleh             | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Peneleh             | 100%   | 46.15%    | 46.15%  | Kec. Genteng      |
| 1.20.29.0091 Operasional Kelurahan Airlangga           | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Airlangga           | 100%   | 42.13%    | 42.13%  | Kec. Gubeng       |
| 1.20.29.0092 Operasional Kelurahan Barata Jaya         | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Barata Jaya         | 100%   | 38.82%    | 38.82%  | Kec. Gubeng       |
| 1.20.29.0093 Operasional Kelurahan Kertajaya           | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Kertajaya           | 100%   | 45.56%    | 45.56%  | Kec. Gubeng       |
| 1.20.29.0094 Operasional Kelurahan Mojo                | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Mojo                | 100%   | 35.72%    | 35.72%  | Kec. Gubeng       |
| 1.20.29.0095 Operasional Kelurahan Pucang Sewu         | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Pucang Sewu         | 100%   | 42.13%    | 42.13%  | Kec. Gubeng       |
| 1.20.29.0107 Operasional Kelurahan Gubeng              | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Gubeng              | 100%   | 41.46%    | 41.46%  | Kec. Gubeng       |
| 1.20.29.0009 Operasional Kelurahan Gunung Anyar Tambak | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Gunung Anyar Tambak | 100%   | 42.00%    | 42.00%  | Kec. Gunung Anyar |
| 1.20.29.0045 Operasional Kelurahan Gunung Anyar        | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Gunung Anyar        | 100%   | 43.38%    | 43.38%  | Kec. Gunung Anyar |
| 1.20.29.0048 Operasional Kelurahan Rungkut Tengah      | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Rungkut Tengah      | 100%   | 44.77%    | 44.77%  | Kec. Gunung Anyar |
| 1.20.29.0144 Operasional Kelurahan Rungkut Menanggal   | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Rungkut Menanggal   | 100%   | 44.77%    | 44.77%  | Kec. Gunung Anyar |
| 1.20.29.0047 Operasional Kelurahan Karah               | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Karah               | 100%   | 47.53%    | 47.53%  | Kec. Jambangan    |
| 1.20.29.0068 Operasional Kelurahan Kebonsari           | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Kebonsari           | 100%   | 47.53%    | 47.53%  | Kec. Jambangan    |
| 1.20.29.0105 Operasional Kelurahan Pagesangan          | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Pagesangan          | 100%   | 47.53%    | 47.53%  | Kec. Jambangan    |
| 1.20.29.0109 Operasional Kelurahan Jambangan           | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Jambangan           | 100%   | 47.53%    | 47.53%  | Kec. Jambangan    |
| 1.20.29.0004 Operasional Kelurahan Kedurus             | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Kedurus             | 100%   | 39.36%    | 39.36%  | Kec. Karangpilang |
| 1.20.29.0020 Operasional Kelurahan Warugunung          | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Warugunung          | 100%   | 39.36%    | 39.36%  | Kec. Karangpilang |
| 1.20.29.0040 Operasional Kelurahan Kebraon             | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Kebraon             | 100%   | 42.00%    | 42.00%  | Kec. Karangpilang |
| 1.20.29.0115 Operasional Kelurahan Karangpilang        | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Karangpilang        | 100%   | 39.36%    | 39.36%  | Kec. Karangpilang |
| 1.20.29.0013 Operasional Kelurahan Tambak Wedi         | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Tambak Wedi         | 100%   | 46.15%    | 46.15%  | Kec. Kenjeran     |

| Urusan-Program-Kegiatan                                 | 2016 (Triwulan I)  |        |           |           | SKPD                |
|---|--|--------|-----------|-----------|---------------------|
|   | Indikator  | Target | Realisasi | Capaian   |                     |
| 1.20.29.0043 Operasional Kelurahan Sidotopo Wetan       | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Sidotopo Wetan       | 100%   | 46.15%    | 46.15%    | Kec. Kenjeran       |
| 1.20.29.0150 Operasional Kelurahan Bulak Banteng        | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Bulak Banteng        | 100%   | 46.15%    | 46.15%    | Kec. Kenjeran       |
| 1.20.29.0151 Operasional Kelurahan Tanah Kalikedinding  | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Tanah Kalikedinding  | 100%   | 44.22%    | 44.22%    | Kec. Kenjeran       |
| 1.20.29.0027 Operasional Kelurahan Krembangan Selatan   | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Krembangan Selatan   | 100%   | 46.15%    | 46.15%    | Kec. Krembangan     |
| 1.20.29.0028 Operasional Kelurahan Morokrembangan       | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Morokrembangan       | 100%   | 46.15%    | 46.15%    | Kec. Krembangan     |
| 1.20.29.0135 Operasional Kelurahan Dupak                | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Dupak                | 100%   | 46.15%    | 46.15%    | Kec. Krembangan     |
| 1.20.29.0136 Operasional Kelurahan Perak Barat          | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Perak Barat          | 100%   | 46.15%    | 46.15%    | Kec. Krembangan     |
| 1.20.29.0152 Operasional Kelurahan Kemayoran            | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Kemayoran            | 100%   | 46.33%    | 46.33%    | Kec. Krembangan     |
| 1.20.29.0008 Operasional Kelurahan Sumur Welut          | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Sumur Welut          | 100%   | 44.77%    | 44.77%    | Kec. Lakarsantri    |
| 1.20.29.0066 Operasional Kelurahan Lakarsantri          | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Lakarsantri          | 100%   | 46.15%    | 46.15%    | Kec. Lakarsantri    |
| 1.20.29.0112 Operasional Kelurahan Bangkingan           | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Bangkingan           | 100%   | 47.53%    | 47.53%    | Kec. Lakarsantri    |
| 1.20.29.0114 Operasional Kelurahan Jeruk                | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Jeruk                | 100%   | 44.77%    | 44.77%    | Kec. Lakarsantri    |
| 1.20.29.0121 Operasional Kelurahan Lidah Kulon          | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Lidah Kulon          | 100%   | 44.77%    | 44.77%    | Kec. Lakarsantri    |
| 1.20.29.0129 Operasional Kelurahan Lidah Wetan          | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Lidah Wetan          | 100%   | 44.77%    | 44.77%    | Kec. Lakarsantri    |
| 1.20.29.0025 Operasional Kelurahan Manyar Sabrangan     | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Manyar Sabrangan     | 100%   | 41.11%    | 41.11%    | Kec. Mulyorejo      |
| 1.20.29.0122 Operasional Kelurahan Dukuh Sutorejo       | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Dukuh Sutorejo       | 100%   | 38.69%    | 38.69%    | Kec. Mulyorejo      |
| 1.20.29.0142 Operasional Kelurahan Kalijudan            | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Kalijudan            | 100%   | 1,142.91% | 1,142.91% | Kec. Mulyorejo      |
| 1.20.29.0145 Operasional Kelurahan Kalisari             | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Kalisari             | 100%   | 41.33%    | 41.33%    | Kec. Mulyorejo      |
| 1.20.29.0146 Operasional Kelurahan Kejawan Putih Tambak | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Kejawan Putih Tambak | 100%   | 41.33%    | 41.33%    | Kec. Mulyorejo      |
| 1.20.29.0153 Operasional Kelurahan Mulyorejo            | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Mulyorejo            | 100%   | 39.36%    | 39.36%    | Kec. Mulyorejo      |
| 1.20.29.0037 Operasional Kelurahan Krembangan Utara     | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Krembangan Utara     | 100%   | 46.15%    | 46.15%    | Kec. Pabean Cantian |
| 1.20.29.0038 Operasional Kelurahan Nyamplungan          | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Nyamplungan          | 100%   | 46.15%    | 46.15%    | Kec. Pabean Cantian |
| 1.20.29.0039 Operasional Kelurahan Perak Utara          | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Perak Utara          | 100%   | 46.15%    | 46.15%    | Kec. Pabean Cantian |
| 1.20.29.0042 Operasional Kelurahan Bongkaran            | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Bongkaran            | 100%   | 46.33%    | 46.33%    | Kec. Pabean Cantian |
| 1.20.29.0062 Operasional Kelurahan Perak Timur          | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Perak Timur          | 100%   | 46.15%    | 46.15%    | Kec. Pabean Cantian |
| 1.20.29.0011 Operasional Kelurahan Babat Jerawat        | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Babat Jerawat        | 100%   | 43.51%    | 43.51%    | Kec. Pakal          |
| 1.20.29.0063 Operasional Kelurahan Benowo               | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Benowo               | 100%   | 43.51%    | 43.51%    | Kec. Pakal          |
| 1.20.29.0130 Operasional Kelurahan Pakal                | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Pakal                | 100%   | 43.51%    | 43.51%    | Kec. Pakal          |
| 1.20.29.0131 Operasional Kelurahan Sumber Rejo          | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Sumber Rejo          | 100%   | 43.51%    | 43.51%    | Kec. Pakal          |
| 1.20.29.0034 Operasional Kelurahan Medokan Ayu          | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Medokan Ayu          | 100%   | 43.41%    | 43.41%    | Kec. Rungkut        |
| 1.20.29.0116 Operasional Kelurahan Wonorejo             | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Wonorejo             | 100%   | 41.43%    | 41.43%    | Kec. Rungkut        |
| 1.20.29.0117 Operasional Kelurahan Penjaringansari      | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Penjaringansari      | 100%   | 41.43%    | 41.43%    | Kec. Rungkut        |
| 1.20.29.0118 Operasional Kelurahan Kedung Baruk         | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Kedung Baruk         | 100%   | 42.13%    | 42.13%    | Kec. Rungkut        |
| 1.20.29.0119 Operasional Kelurahan Kalirungkut          | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Kalirungkut          | 100%   | 40.77%    | 40.77%    | Kec. Rungkut        |



| Urusan-Program-Kegiatan                               | 2016 (Triwulan I)  |        |           |         | SKPD               |
|---|--|--------|-----------|---------|--------------------|
|   | Indikator  | Target | Realisasi | Capaian |                    |
| 1.20.29.0133 Operasional Kelurahan Rungkut Kidul      | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Rungkut Kidul      | 100%   | 45.48%    | 45.48%  | Kec. Rungkut       |
| 1.20.29.0132 Operasional Kelurahan Bringin            | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Bringin            | 100%   | 44.77%    | 44.77%  | Kec. Sambikerep    |
| 1.20.29.0137 Operasional Kelurahan Lontar             | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Lontar             | 100%   | 47.53%    | 47.53%  | Kec. Sambikerep    |
| 1.20.29.0138 Operasional Kelurahan Made               | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Made               | 100%   | 44.77%    | 44.77%  | Kec. Sambikerep    |
| 1.20.29.0139 Operasional Kelurahan Sambikerep         | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Sambikerep         | 100%   | 44.77%    | 44.77%  | Kec. Sambikerep    |
| 1.20.29.0030 Operasional Kelurahan Putat Jaya         | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Putat Jaya         | 100%   | 46.00%    | 46.00%  | Kec. Sawahan       |
| 1.20.29.0053 Operasional Kelurahan Sawahan            | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Sawahan            | 100%   | 46.00%    | 46.00%  | Kec. Sawahan       |
| 1.20.29.0098 Operasional Kelurahan Banyu Urip         | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Banyu Urip         | 100%   | 42.68%    | 42.68%  | Kec. Sawahan       |
| 1.20.29.0103 Operasional Kelurahan Petemon            | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Petemon            | 100%   | 46.00%    | 46.00%  | Kec. Sawahan       |
| 1.20.29.0106 Operasional Kelurahan Kupang Krajan      | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Kupang Krajan      | 100%   | 42.68%    | 42.68%  | Kec. Sawahan       |
| 1.20.29.0110 Operasional Kelurahan Pakis              | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Pakis              | 100%   | 46.00%    | 46.00%  | Kec. Sawahan       |
| 1.20.29.0015 Operasional Kelurahan Ampel              | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Ampel              | 100%   | 44.77%    | 44.77%  | Kec. Semampir      |
| 1.20.29.0016 Operasional Kelurahan Sidotopo           | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Sidotopo           | 100%   | 44.77%    | 44.77%  | Kec. Semampir      |
| 1.20.29.0017 Operasional Kelurahan Wonokusumo         | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Wonokusumo         | 100%   | 44.77%    | 44.77%  | Kec. Semampir      |
| 1.20.29.0060 Operasional Kelurahan Pegirian           | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Pegirian           | 100%   | 44.77%    | 44.77%  | Kec. Semampir      |
| 1.20.29.0161 Operasional Kelurahan Ujung              | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Ujung              | 100%   | 72.97%    | 72.97%  | Kec. Semampir      |
| 1.20.29.0056 Operasional Kelurahan Kapasan            | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Kapasan            | 100%   | 44.77%    | 44.77%  | Kec. Simokerto     |
| 1.20.29.0072 Operasional Kelurahan Simokerto          | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Simokerto          | 100%   | 166.28%   | 166.28% | Kec. Simokerto     |
| 1.20.29.0073 Operasional Kelurahan Simolawang         | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Simolawang         | 100%   | 44.77%    | 44.77%  | Kec. Simokerto     |
| 1.20.29.0074 Operasional Kelurahan Tambakrejo         | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Tambakrejo         | 100%   | 44.77%    | 44.77%  | Kec. Simokerto     |
| 1.20.29.0089 Operasional Kelurahan Sidodadi           | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Sidodadi           | 100%   | 44.77%    | 44.77%  | Kec. Simokerto     |
| 1.20.29.0096 Operasional Kelurahan Klampisngasem      | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Klampisngasem      | 100%   | 46.15%    | 46.15%  | Kec. Sukolilo      |
| 1.20.29.0123 Operasional Kelurahan Medokan Semampir   | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Medokan Semampir   | 100%   | 43.51%    | 43.51%  | Kec. Sukolilo      |
| 1.20.29.0124 Operasional Kelurahan Semolowaru         | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Semolowaru         | 100%   | 46.15%    | 46.15%  | Kec. Sukolilo      |
| 1.20.29.0125 Operasional Kelurahan Nginden Jangkungan | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Nginden Jangkungan | 100%   | 45.02%    | 45.02%  | Kec. Sukolilo      |
| 1.20.29.0126 Operasional Kelurahan Menur Pumpungan    | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Menur Pumpungan    | 100%   | 46.15%    | 46.15%  | Kec. Sukolilo      |
| 1.20.29.0127 Operasional Kelurahan Keputih            | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Keputih            | 100%   | 46.15%    | 46.15%  | Kec. Sukolilo      |
| 1.20.29.0128 Operasional Kelurahan Gebang Putih       | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Gebang Putih       | 100%   | 43.51%    | 43.51%  | Kec. Sukolilo      |
| 1.20.29.0006 Operasional Kelurahan Sukomanunggal      | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Sukomanunggal      | 100%   | 46.15%    | 46.15%  | Kec. Sukomanunggal |
| 1.20.29.0067 Operasional Kelurahan Putat Gede         | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Putat Gede         | 100%   | 46.15%    | 46.15%  | Kec. Sukomanunggal |
| 1.20.29.0069 Operasional Kelurahan Simomulyo Baru     | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Simomulyo Baru     | 100%   | 46.15%    | 46.15%  | Kec. Sukomanunggal |
| 1.20.29.0078 Operasional Kelurahan Simomulyo          | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Simomulyo          | 100%   | 46.15%    | 46.15%  | Kec. Sukomanunggal |
| 1.20.29.0108 Operasional Kelurahan Tanjungsari        | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Tanjungsari        | 100%   | 46.15%    | 46.15%  | Kec. Sukomanunggal |
| 1.20.29.0140 Operasional Kelurahan Sonokwijenan       | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Sonokwijenan       | 100%   | 46.15%    | 46.15%  | Kec. Sukomanunggal |
| 1.20.29.0001 Operasional Kelurahan Rangkah            | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Rangkah            | 100%   | 46.15%    | 46.15%  | Kec. Tambaksari    |
| 1.20.29.0113 Operasional Kelurahan Gading             | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Gading             | 100%   | 46.15%    | 46.15%  | Kec. Tambaksari    |



| Urusan-Program-Kegiatan                             | 2016 (Triwulan I)  |        |           |         | SKPD                  |
|---|--|--------|-----------|---------|-----------------------|
|   | Indikator  | Target | Realisasi | Capaian |                       |
| 1.20.29.0154 Operasional Kelurahan Dukuh Setro      | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Dukuh Setro      | 100%   | 46.15%    | 46.15%  | Kec. Tambaksari       |
| 1.20.29.0155 Operasional Kelurahan Kapas Madya Baru | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Kapas Madya Baru | 100%   | 46.15%    | 46.15%  | Kec. Tambaksari       |
| 1.20.29.0156 Operasional Kelurahan Pacar Keling     | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Pacar Keling     | 100%   | 46.15%    | 46.15%  | Kec. Tambaksari       |
| 1.20.29.0157 Operasional Kelurahan Pacar Kembang    | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Pacar Kembang    | 100%   | 46.15%    | 46.15%  | Kec. Tambaksari       |
| 1.20.29.0158 Operasional Kelurahan Ploso            | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Ploso            | 100%   | 46.15%    | 46.15%  | Kec. Tambaksari       |
| 1.20.29.0159 Operasional Kelurahan Tambaksari       | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Tambaksari       | 100%   | 46.15%    | 46.15%  | Kec. Tambaksari       |
| 1.20.29.0003 Operasional Kelurahan Banjarsugihan    | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Banjarsugihan    | 100%   | 46.15%    | 46.15%  | Kec. Tandes           |
| 1.20.29.0012 Operasional Kelurahan Tandes           | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Tandes           | 100%   | 46.15%    | 46.15%  | Kec. Tandes           |
| 1.20.29.0046 Operasional Kelurahan Manukan Kulon    | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Manukan Kulon    | 100%   | 42.00%    | 42.00%  | Kec. Tandes           |
| 1.20.29.0079 Operasional Kelurahan Balongsari       | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Balongsari       | 100%   | 42.84%    | 42.84%  | Kec. Tandes           |
| 1.20.29.0080 Operasional Kelurahan Karangpoh        | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Karangpoh        | 100%   | 46.15%    | 46.15%  | Kec. Tandes           |
| 1.20.29.0081 Operasional Kelurahan Manukan Wetan    | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Manukan Wetan    | 100%   | 43.51%    | 43.51%  | Kec. Tandes           |
| 1.20.29.0018 Operasional Kelurahan Wonorejo         | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Wonorejo         | 100%   | 45.32%    | 45.32%  | Kec. Tegalsari        |
| 1.20.29.0064 Operasional Kelurahan Keputran         | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Keputran         | 100%   | 45.32%    | 45.32%  | Kec. Tegalsari        |
| 1.20.29.0147 Operasional Kelurahan Dr. Soetomo      | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Dr. Soetomo      | 100%   | 41.33%    | 41.33%  | Kec. Tegalsari        |
| 1.20.29.0148 Operasional Kelurahan Kedungdoro       | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Kedungdoro       | 100%   | 45.32%    | 45.32%  | Kec. Tegalsari        |
| 1.20.29.0149 Operasional Kelurahan Tegalsari        | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Tegalsari        | 100%   | 45.32%    | 45.32%  | Kec. Tegalsari        |
| 1.20.29.0033 Operasional Kelurahan Kendangsari      | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Kendangsari      | 100%   | 44.15%    | 44.15%  | Kec. Tenggilis Mejoyo |
| 1.20.29.0049 Operasional Kelurahan Kutisari         | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Kutisari         | 100%   | 50.30%    | 50.30%  | Kec. Tenggilis Mejoyo |
| 1.20.29.0050 Operasional Kelurahan Tenggilis Mejoyo | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Tenggilis Mejoyo | 100%   | 68.55%    | 68.55%  | Kec. Tenggilis Mejoyo |
| 1.20.29.0057 Operasional Kelurahan Panjangjiwo      | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Panjangjiwo      | 100%   | 42.75%    | 42.75%  | Kec. Tenggilis Mejoyo |
| 1.20.29.0007 Operasional Kelurahan Jajar Tunggal    | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Jajar Tunggal    | 100%   | 46.15%    | 46.15%  | Kec. Wiyung           |
| 1.20.29.0022 Operasional Kelurahan Babatan          | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Babatan          | 100%   | 46.15%    | 46.15%  | Kec. Wiyung           |
| 1.20.29.0101 Operasional Kelurahan Balas Klumprik   | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Balas Klumprik   | 100%   | 46.15%    | 46.15%  | Kec. Wiyung           |
| 1.20.29.0111 Operasional Kelurahan Wiyung           | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Wiyung           | 100%   | 46.15%    | 46.15%  | Kec. Wiyung           |
| 1.20.29.0002 Operasional Kelurahan Siwalankerto     | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Siwalankerto     | 100%   | 42.13%    | 42.13%  | Kec. Wonocolo         |
| 1.20.29.0024 Operasional Kelurahan Margorejo        | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Margorejo        | 100%   | 42.13%    | 42.13%  | Kec. Wonocolo         |
| 1.20.29.0100 Operasional Kelurahan Jemur Wonosari   | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Jemur Wonosari   | 100%   | 44.77%    | 44.77%  | Kec. Wonocolo         |
| 1.20.29.0104 Operasional Kelurahan Sidosermo        | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Sidosermo        | 100%   | 44.77%    | 44.77%  | Kec. Wonocolo         |
| 1.20.29.0143 Operasional Kelurahan Bendul Merisi    | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Bendul Merisi    | 100%   | 44.77%    | 44.77%  | Kec. Wonocolo         |
| 1.20.29.0014 Operasional Kelurahan Ngagel           | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Ngagel           | 100%   | 44.77%    | 44.77%  | Kec. Wonokromo        |
| 1.20.29.0021 Operasional Kelurahan Sawunggaling     | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Sawunggaling     | 100%   | 44.77%    | 44.77%  | Kec. Wonokromo        |
| 1.20.29.0023 Operasional Kelurahan Jagir            | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Jagir            | 100%   | 47.53%    | 47.53%  | Kec. Wonokromo        |
| 1.20.29.0097 Operasional Kelurahan Ngagel Rejo      | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Ngagel Rejo      | 100%   | 43.43%    | 43.43%  | Kec. Wonokromo        |
| 1.20.29.0099 Operasional Kelurahan Darmo            | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Darmo            | 100%   | 44.77%    | 44.77%  | Kec. Wonokromo        |
| 1.20.29.0102 Operasional Kelurahan Wonokromo        | Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Wonokromo        | 100%   | 103.93%   | 103.93% | Kec. Wonokromo        |

| Urusan-Program-Kegiatan  | 2016 (Triwulan I)   |        |           |         | SKPD   |
|--|---|--------|-----------|---------|--|
|  | Indikator   | Target | Realisasi | Capaian |  |
| <b>1.20.30 Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>           | Persentase kendaraan yang berfungsi dengan baik                                     | 75%    |           |         |  |
|  | Persentase pemanfaatan barang sesuai dengan rencana                                 | 90%    |           |         |  |
| 1.20.30.0001 Pengadaan Pakaian Dinas Dan Kelengkapannya                    | Persentase Keberhasilan Pengadaan Pakaian Dinas Dan Kelengkapannya                  | 100%   | 1.21%     | 1.21%   | Bagian Perengkapan                                   |
| 1.20.30.0002 Penyusunan Analisa Kebutuhan Sarana Prasarana                 | Persentase Keberhasilan Penyusunan Analisa Kebutuhan Sarana Prasarana               | 100%   | 0.00%     | 0.00%   | Bagian Perengkapan                                   |
| 1.20.30.0003 Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional                    | Persentase Keberhasilan Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional                  | 100%   | 77.36%    | 77.36%  | Bagian Perengkapan                                   |
| 1.20.30.0004 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur                       | Persentase Keberhasilan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur                     | 100%   | 11.37%    | 11.37%  | Bagian Perengkapan                                   |
| 1.20.30.0005 Pelayanan Unit Layanan Pengadaan                              | Persentase Keberhasilan Pelayanan Unit Layanan Pengadaan                            | 100%   | 46.40%    | 46.40%  | Bagian Perengkapan                                   |
| <b>1,21 Ketahanan Pangan</b>   |   |        |           |         |  |
| <b>1.21.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                  | Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Pelayanan Administrasi Perkantoran        | 70%    |           |         |  |
| 1.21.01.0001 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran                        | Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran                      | 100%   | 21.33%    | 21.33%  | Kantor Ketahanan Pangan                              |
| <b>1.21.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>           | Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 70%    |           |         |  |
| 1.21.02.0001 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran   | Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran | 100%   | 46.41%    | 46.41%  | Kantor Ketahanan Pangan                              |
| <b>1.21.30 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)</b> | Tersedianya Informasi Ketersediaan dan Distribusi Pangan                            | 100%   |           |         |  |
|  | Tingkat Keamanan Produk Pangan  | 80%    |           |         |  |
| 1.21.30.0005 Pengawasan Dan Pemeriksaan Produk Pangan Asal Hewan           | Persentase Keberhasilan Pengawasan Dan Pemeriksaan Produk Pangan Asal Hewan         | 100%   | 27.68%    | 27.68%  | Dinas Pertanian                                      |
| 1.21.30.0006 Pengawasan dan Pemeriksaan sayur dan buah-buahan              | Persentase Keberhasilan Pengawasan dan Pemeriksaan sayur dan buah-buahan            | 100%   | 14.58%    | 14.58%  | Dinas Pertanian                                      |
| 1.21.30.0007 Pengawasan dan Pemeriksaan Ikan Segar                         | Persentase Keberhasilan Pengawasan dan Pemeriksaan Ikan Segar                       | 100%   | 0.00%     | 0.00%   | Dinas Pertanian                                      |
| 1.21.30.0001 Pengembangan pemanfaatan sumber pangan alternatif             | Persentase Keberhasilan Pengembangan pemanfaatan sumber pangan alternatif           | 100%   | 47.05%    | 47.05%  | Kantor Ketahanan Pangan                              |
| 1.21.30.0002 Pengawasan dan Pemeriksaan produk pangan segar                | Persentase Keberhasilan Pengawasan dan Pemeriksaan produk pangan segar              | 100%   | 20.00%    | 20.00%  | Kantor Ketahanan Pangan                              |
| 1.21.30.0003 Koordinasi Hasil Monitoring Bidang Ketahanan Pangan           | Persentase Keberhasilan Koordinasi Hasil Monitoring Bidang Ketahanan Pangan         | 100%   | 16.67%    | 16.67%  | Kantor Ketahanan Pangan                              |
| 1.21.30.0004 Monitoring Ketersediaan dan Distribusi Pangan                 | Persentase Keberhasilan Monitoring Ketersediaan dan Distribusi Pangan               | 100%   | 25.00%    | 25.00%  | Kantor Ketahanan Pangan                              |
| <b>1,22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>                               |   |        |           |         |  |
| <b>1.22.20 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat</b>                  | Tahapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Keluarga Miskin                               | 100%   |           |         |  |
|  | Persentase Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM) yang berdaya                     | 1%     |           |         |  |
| 1.22.20.0008 Pembinaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam                        | Persentase Keberhasilan Pembinaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam                      | 100%   | 0.00%     | 0.00%   | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana |
| 1.22.20.0009 Bulan Bhakti Gotong Royong                                    | Persentase Keberhasilan Bulan Bhakti Gotong Royong                                  | 100%   | 0.00%     | 0.00%   | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana |
| 1.22.20.0010 Pemberdayaan Ekonomi  | Persentase Keberhasilan Pemberdayaan Ekonomi  | 100%   | 42.54%    | 42.54%  | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana |
| 1.22.20.0012 Dinamisasi Data Keluarga Miskin                               | Persentase Keberhasilan Dinamisasi Data Keluarga Miskin                             | 100%   | 0.00%     | 0.00%   | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana |
| 1.22.20.0013 Fasilitasi Pelaksanaan Program Beras Miskin                   | Persentase Keberhasilan Fasilitasi Pelaksanaan Program Beras Miskin                 | 100%   | 58.35%    | 58.35%  | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana |

| Urusan-Program-Kegiatan                                       | 2016 (Triwulan I)  |        |           |         | SKPD   |
|---|--|--------|-----------|---------|--|
|   | Indikator  | Target | Realisasi | Capaian |  |
| 1.22.20.0014 Fasilitas Pengembangan Hasil Usaha Ekonomi Mikro | Persentase Keberhasilan Fasilitas Pengembangan Hasil Usaha Ekonomi Mikro | 100%   | 25.00%    | 25.00%  | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana |
| 1.22.20.0037 Fasilitas Program Penanggulangan Kemiskinan      | Persentase Keberhasilan Fasilitas Program Penanggulangan Kemiskinan      | 100%   | 25.00%    | 25.00%  | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana |
| 1.22.20.0019 Penunjang Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP) | Persentase Keberhasilan Penunjang Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP) | 100%   | 25.00%    | 25.00%  | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan        |
| 1.22.20.0006 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan              | Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan              | 100%   | 25.00%    | 25.00%  | Kec. Asemrowo  |
| 1.22.20.0028 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan              | Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan              | 100%   | 25.00%    | 25.00%  | Kec. Benowo  |
| 1.22.20.0039 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan              | Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan              | 100%   | 25.00%    | 25.00%  | Kec. Bubutan   |
| 1.22.20.0023 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan              | Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan              | 100%   | 25.00%    | 25.00%  | Kec. Bulak   |
| 1.22.20.0026 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan              | Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan              | 100%   | 25.00%    | 25.00%  | Kec. Dukuh Pakis                                     |
| 1.22.20.0036 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan              | Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan              | 100%   | 25.00%    | 25.00%  | Kec. Gayungan  |
| 1.22.20.0027 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan              | Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan              | 100%   | 25.00%    | 25.00%  | Kec. Genteng   |
| 1.22.20.0030 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan              | Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan              | 100%   | 25.00%    | 25.00%  | Kec. Gubeng  |
| 1.22.20.0022 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan              | Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan              | 100%   | 25.00%    | 25.00%  | Kec. Gunung Anyar                                    |
| 1.22.20.0020 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan              | Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan              | 100%   | 25.00%    | 25.00%  | Kec. Jambangan                                       |
| 1.22.20.0016 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan              | Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan              | 100%   | 25.00%    | 25.00%  | Kec. Karangpilang                                    |
| 1.22.20.0034 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan              | Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan              | 100%   | 25.00%    | 25.00%  | Kec. Kenjeran  |
| 1.22.20.0004 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan              | Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan              | 100%   | 25.00%    | 25.00%  | Kec. Krembangan                                      |
| 1.22.20.0029 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan              | Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan              | 100%   | 25.00%    | 25.00%  | Kec. Lakarsantri                                     |
| 1.22.20.0038 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan              | Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan              | 100%   | 25.00%    | 25.00%  | Kec. Mulyorejo                                       |
| 1.22.20.0003 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan              | Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan              | 100%   | 25.00%    | 25.00%  | Kec. Pabean Cantian                                  |
| 1.22.20.0025 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan              | Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan              | 100%   | 25.00%    | 25.00%  | Kec. Pakal   |
| 1.22.20.0032 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan              | Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan              | 100%   | 25.00%    | 25.00%  | Kec. Rungkut   |
| 1.22.20.0035 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan              | Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan              | 100%   | 25.00%    | 25.00%  | Kec. Sambikerep                                      |
| 1.22.20.0015 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan              | Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan              | 100%   | 25.00%    | 25.00%  | Kec. Sawahan   |
| 1.22.20.0011 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan              | Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan              | 100%   | 25.00%    | 25.00%  | Kec. Semampir  |
| 1.22.20.0021 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan              | Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan              | 100%   | 25.00%    | 25.00%  | Kec. Simokerto                                       |
| 1.22.20.0033 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan              | Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan              | 100%   | 25.00%    | 25.00%  | Kec. Sukolilo  |
| 1.22.20.0001 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan              | Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan              | 100%   | 18.51%    | 18.51%  | Kec. Sukomanunggal                                   |
| 1.22.20.0007 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan              | Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan              | 100%   | 25.00%    | 25.00%  | Kec. Tambaksari                                      |
| 1.22.20.0002 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan              | Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan              | 100%   | 25.00%    | 25.00%  | Kec. Tandes  |
| 1.22.20.0018 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan              | Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan              | 100%   | 25.00%    | 25.00%  | Kec. Tegalsari                                       |
| 1.22.20.0017 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan              | Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan              | 100%   | 25.00%    | 25.00%  | Kec. Tenggilis Mejoyo                                |
| 1.22.20.0024 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan              | Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan              | 100%   | 25.00%    | 25.00%  | Kec. Wiyung  |
| 1.22.20.0031 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan              | Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan              | 100%   | 25.00%    | 25.00%  | Kec. Wonocolo  |
| 1.22.20.0005 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan              | Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan              | 100%   | 25.00%    | 25.00%  | Kec. Wonokromo                                       |
| <b>1,24 Kearsipan</b>   |  |        |           |         |  |
| 1.24.15 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan       | Persentase SKPD dan unit kerja yang tertib sistem tata kearsipan         | 10.7 % |           |         |  |

| Urusan-Program-Kegiatan   | 2016 (Triwulan I)  |                         |           |         | SKPD  |
|---|--|-------------------------|-----------|---------|---|
|   | Indikator  | Target                  | Realisasi | Capaian |   |
| 1.24.15.0001 Pembinaan Sistem Kearsipan   | Persentase Keberhasilan Pembinaan Sistem Kearsipan   | 100%                    | 37.05%    | 37.05%  | Badan Arsip dan Perpustakaan                    |
| 1.24.15.0002 Layanan Informasi Kearsipan  | Persentase Keberhasilan Layanan Informasi Kearsipan  | 100%                    | 0.00%     | 0.00%   | Badan Arsip dan Perpustakaan                    |
| 1.24.15.0003 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan Kearsipan                                      | Persentase Keberhasilan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan Kearsipan                                      | 100%                    | 51.73%    | 51.73%  | Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang |
| <b>1.24.16 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah</b>  | Jumlah SKPD dan unit kerja yang diakuisisi dokumen arsip   | 6 SKPD                  |           |         |   |
| 1.24.16.0001 Pengadaan Sarana Penyimpanan, Pengolahan, Pemeliharaan Dan Penyelamatan Kearsipan                            | Persentase Keberhasilan Pengadaan Sarana Penyimpanan, Pengolahan, Pemeliharaan Dan Penyelamatan Kearsipan                            | 100%                    | 16.13%    | 16.13%  | Badan Arsip dan Perpustakaan                    |
| 1.24.16.0002 Penataan Dan Pendataan Sistem Kearsipan Daerah   | Persentase Keberhasilan Penataan Dan Pendataan Sistem Kearsipan Daerah   | 100%                    | 38.07%    | 38.07%  | Badan Arsip dan Perpustakaan                    |
| <b>1.25 Komunikasi dan Informatika</b>  |  |                         |           |         |   |
| <b>1.25.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>   | Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Pelayanan Administrasi Perkantoran   | 70%                     |           |         |   |
| 1.25.01.0002 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran   | Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran   | 100%                    | 25.11%    | 25.11%  | Bagian Hubungan Masyarakat                      |
| 1.25.01.0001 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran   | Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran   | 100%                    | 16.67%    | 16.67%  | Dinas Komunikasi dan Informatika                |
| <b>1.25.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>  | Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  | 70%                     |           |         |   |
| 1.25.02.0002 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran  | Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran  | 100%                    | 28.71%    | 28.71%  | Bagian Hubungan Masyarakat                      |
| 1.25.02.0001 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran  | Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran  | 100%                    | 26.67%    | 26.67%  | Dinas Komunikasi dan Informatika                |
| <b>1.25.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>   | Jumlah rata-rata kunjungan per bulan pada website <a href="http://www.surabaya.go.id">www.surabaya.go.id</a>                         | 199768 kunjungan        |           |         |   |
|   | Jumlah partisipasi masyarakat pada kegiatan-kegiatan diseminasi informasi  | 57154 kunjungan/peserta |           |         |   |
| 1.25.15.0002 Pelayanan Keluhan/Pengaduan Masyarakat   | Persentase Keberhasilan Pelayanan Keluhan/Pengaduan Masyarakat   | 100%                    | 25.00%    | 25.00%  | Dinas Komunikasi dan Informatika                |
| 1.25.15.0003 Sosialisasi Informasi dan Pembinaan TIK  | Persentase Keberhasilan Sosialisasi Informasi dan Pembinaan TIK  | 100%                    | 20.92%    | 20.92%  | Dinas Komunikasi dan Informatika                |
| 1.25.15.0004 Pengelolaan Dan Pengumpulan Data Dan Informasi Pembangunan Daerah  | Persentase Keberhasilan Pengelolaan Dan Pengumpulan Data Dan Informasi Pembangunan Daerah  | 100%                    | 15.75%    | 15.75%  | Dinas Komunikasi dan Informatika                |
| 1.25.15.0005 Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah   | Persentase Keberhasilan Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah   | 100%                    | 15.01%    | 15.01%  | Dinas Komunikasi dan Informatika                |
| 1.25.15.0006 Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi  | Persentase Keberhasilan Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi  | 100%                    | 9.00%     | 9.00%   | Dinas Komunikasi dan Informatika                |
| 1.25.15.0001 Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar, Dan Lokakarya Serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu Pendidikan       | Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar, Dan Lokakarya Serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu Pendidikan       | 100%                    | 37.50%    | 37.50%  | Dinas Pendidikan                                |
| <b>1.25.19 Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi</b>   | Persentase layanan publik yang berbasis TIK  | 46.1 %                  |           |         |   |
| 1.25.19.0001 Pemeliharaan Sarana Jaringan Komunikasi Dan Informasi  | Persentase Keberhasilan Pemeliharaan Sarana Jaringan Komunikasi Dan Informasi  | 100%                    | 22.75%    | 22.75%  | Dinas Komunikasi dan Informatika                |
| 1.25.19.0003 Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Publik Dan Sistem Informasi Manajemen Yang Terintegrasi Ke Pusat Data | Persentase Keberhasilan Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Publik Dan Sistem Informasi Manajemen Yang Terintegrasi Ke Pusat Data | 100%                    | 0.00%     | 0.00%   | Dinas Komunikasi dan Informatika                |
| 1.25.19.0004 Pembangunan Sarana Jaringan Komunikasi Dan Informasi   | Persentase Keberhasilan Pembangunan Sarana Jaringan Komunikasi Dan Informasi   | 100%                    | 0.00%     | 0.00%   | Dinas Komunikasi dan Informatika                |
| 1.25.19.0005 Pemeliharaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik  | Persentase Keberhasilan Pemeliharaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik  | 100%                    | 21.04%    | 21.04%  | Dinas Komunikasi dan Informatika                |
| 1.25.19.0006 Peningkatan Dan Pendayagunaan Opensource Software  | Persentase Keberhasilan Peningkatan Dan Pendayagunaan Opensource Software  | 100%                    | 0.00%     | 0.00%   | Dinas Komunikasi dan Informatika                |

| Urusan-Program-Kegiatan  | 2016 (Triwulan I)   |               |           |         | SKPD                             |
|--|---|---------------|-----------|---------|----------------------------------|
|  | Indikator   | Target        | Realisasi | Capaian |                                  |
| 1.25.19.0007 Pemeliharaan Prasarana Jaringan Telekomunikasi  | Persentase Keberhasilan Pemeliharaan Prasarana Jaringan Telekomunikasi  | 100%          | 22.28%    | 22.28%  | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 1.25.19.0008 Pembangunan Prasarana Jaringan Telekomunikasi   | Persentase Keberhasilan Pembangunan Prasarana Jaringan Telekomunikasi   | 100%          | 0.00%     | 0.00%   | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 1.25.19.0009 Pembinaan, Pengawasan Dan Penertiban Penyelenggaraan Jasa Pos Dan Telekomunikasi                        | Persentase Keberhasilan Pembinaan, Pengawasan Dan Penertiban Penyelenggaraan Jasa Pos Dan Telekomunikasi                        | 100%          | 39.43%    | 39.43%  | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 1.25.19.0002 Pemeliharaan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru   | Persentase Keberhasilan Pemeliharaan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru   | 100%          | 0.00%     | 0.00%   | Dinas Pendidikan                 |
| <b>1.25.20 Program Komunikasi dan Publikasi Masyarakat</b>   | Persentase berita positif Pemerintah Kota Surabaya yang diinformasikan kepada masyarakat  | 83%           |           |         |                                  |
| 1.25.20.0001 Peliputan Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya   | Persentase Keberhasilan Peliputan Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya   | 100%          | 25.00%    | 25.00%  | Bagian Hubungan Masyarakat       |
| 1.25.20.0002 Pembuatan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya   | Persentase Keberhasilan Pembuatan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya   | 100%          | 3.58%     | 3.58%   | Bagian Hubungan Masyarakat       |
| 1.25.20.0003 Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Jurnalistik   | Persentase Keberhasilan Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Jurnalistik   | 100%          | 22.43%    | 22.43%  | Bagian Hubungan Masyarakat       |
| <b>1.26 Perpustakaan</b>   |   |               |           |         |                                  |
| <b>1.26.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>  | Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  | 70%           |           |         |                                  |
| 1.26.01.0001 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran  | Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran  | 100%          | 31.50%    | 31.50%  | Badan Arsip dan Perpustakaan     |
| <b>1.26.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>   | Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur   | 70%           |           |         |                                  |
| 1.26.02.0001 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran   | Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran   | 100%          | 24.11%    | 24.11%  | Badan Arsip dan Perpustakaan     |
| <b>1.26.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</b>   | Jumlah kunjungan layanan baca   | 2470670 orang |           |         |                                  |
| 1.26.15.0001 Pembinaan Pengelolaan Perpustakaan  | Persentase Keberhasilan Pembinaan Pengelolaan Perpustakaan  | 100%          | 18.06%    | 18.06%  | Badan Arsip dan Perpustakaan     |
| 1.26.15.0002 Publikasi Dan Sosialisasi Minat Dan Budaya Baca   | Persentase Keberhasilan Publikasi Dan Sosialisasi Minat Dan Budaya Baca   | 100%          | 0.00%     | 0.00%   | Badan Arsip dan Perpustakaan     |
| 1.26.15.0003 Pengelolaan Layanan Baca  | Persentase Keberhasilan Pengelolaan Layanan Baca  | 100%          | 24.36%    | 24.36%  | Badan Arsip dan Perpustakaan     |
| 1.26.15.0004 Penyediaan, Pengolahan, Perawatan Sarana Prasarana Perpustakaan Umum Daerah Dan Taman Bacaan Masyarakat | Persentase Keberhasilan Penyediaan, Pengolahan, Perawatan Sarana Prasarana Perpustakaan Umum Daerah Dan Taman Bacaan Masyarakat | 100%          | 21.46%    | 21.46%  | Badan Arsip dan Perpustakaan     |
| <b>2.01 Pertanian</b>  |   |               |           |         |                                  |
| <b>2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>  | Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  | 70%           |           |         |                                  |
| 2.01.01.0001 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran  | Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran  | 100%          | 32.30%    | 32.30%  | Dinas Pertanian                  |
| <b>2.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>   | Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur   | 70%           |           |         |                                  |
| 2.01.02.0001 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran   | Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran   | 100%          | 27.23%    | 27.23%  | Dinas Pertanian                  |
| <b>2.01.19 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan</b>   | Produktivitas pada bidang pertanian/perkebunan  | 3.73 Ton/Ha   |           |         |                                  |
| 2.01.19.0001 Penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian/ perkebunan  | Persentase Keberhasilan Penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian/ perkebunan  | 100%          | 15.88%    | 15.88%  | Dinas Pertanian                  |
| 2.01.19.0002 Pelatihan pemanfaatan teknologi pertanian/ perkebunan perkotaan   | Persentase Keberhasilan Pelatihan pemanfaatan teknologi pertanian/ perkebunan perkotaan   | 100%          | 7.25%     | 7.25%   | Dinas Pertanian                  |
| 2.01.19.0003 Fasilitasi pemasaran hasil produksi hortikultura petani binaan  | Persentase Keberhasilan Fasilitasi pemasaran hasil produksi hortikultura petani binaan  | 100%          | 0.00%     | 0.00%   | Dinas Pertanian                  |
| <b>2.01.21 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Ternak</b>   | Persentase populasi hewan ternak yang mendapatkan pengobatan  | 28.62 %       |           |         |                                  |
|  | Persentase populasi hewan ternak yang mendapatkan vaksinasi   | 89.69 %       |           |         |                                  |
| 2.01.21.0001 Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan Ternak   | Persentase Keberhasilan Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan Ternak   | 100%          | 14.34%    | 14.34%  | Dinas Pertanian                  |
| 2.01.21.0002 Pelayanan Kesehatan Dan Pengobatan Hewan  | Persentase Keberhasilan Pelayanan Kesehatan Dan Pengobatan Hewan  | 100%          | 136.54%   | 136.54% | Dinas Pertanian                  |

| Urusan-Program-Kegiatan  | 2016 (Triwulan I)   |                              |           |         | SKPD  |
|--|---|------------------------------|-----------|---------|---|
|  | Indikator   | Target                       | Realisasi | Capaian |   |
| <b>2.01.22 Program Peningkatan Produksi</b>  | Produktivitas di bidang peternakan  | 2 Ekor/Kelompok              |           |         |   |
| 2.01.22.0001 Penyebaran dan Pengembangan Ternak  | Persentase Keberhasilan Penyebaran dan Pengembangan Ternak  | 100%                         | 0.00%     | 0.00%   | Dinas Pertanian                                 |
| 2.01.22.0002 Penyediaan Sarana Prasarana Pengembangan Ternak                                     | Persentase Keberhasilan Penyediaan Sarana Prasarana Pengembangan Ternak                                     | 100%                         | 0.00%     | 0.00%   | Dinas Pertanian                                 |
| <b>2.01.25 Program Pelayanan Pembibitan dan Penyuluhan pertanian/Perkebunan,</b>                 | Cakupan sebaran penyediaan bibit pada pembudidaya   | 75%                          |           |         |   |
|  | Persentase kemampuan penyuluh dalam melakukan pendampingan terhadap kelompok tani                           | 80%                          |           |         |   |
| 2.01.25.0001 Penyediaan bibit  | Persentase Keberhasilan Penyediaan bibit  | 100%                         | 30.00%    | 30.00%  | Dinas Pertanian                                 |
| 2.01.25.0002 Peningkatan Sumber Daya Pertanian   | Persentase Keberhasilan Peningkatan Sumber Daya Pertanian   | 100%                         | 38.54%    | 38.54%  | Dinas Pertanian                                 |
| <b>2.03 Energi dan Sumberdaya Mineral</b>  |   |                              |           |         |   |
| <b>2.03.18 Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi</b>                  | Jumlah perusahaan Energi baru dan terbarukan yang dikembangkan  | 4 kegiatan                   |           |         |   |
| 2.03.18.0001 Pembinaan Dan Pengawasan Serta Perusahaan Aneka Energi Terbarukan Dan Energi Bersih | Persentase Keberhasilan Pembinaan Dan Pengawasan Serta Perusahaan Aneka Energi Terbarukan Dan Energi Bersih | 100%                         | 0.00%     | 0.00%   | Badan Lingkungan Hidup                          |
| 2.03.18.0003 Perusahaan Konservasi Energi Pada Sektor Industri Dan Usaha                         | Persentase Keberhasilan Perusahaan Konservasi Energi Pada Sektor Industri Dan Usaha                         | 100%                         | 0.00%     | 0.00%   | Badan Lingkungan Hidup                          |
| 2.03.18.0002 Perusahaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman             | Persentase Keberhasilan Perusahaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman             | 100%                         | 0.00%     | 0.00%   | Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang |
| <b>2.04 Pariwisata</b>   |   |                              |           |         |   |
| <b>2.04.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</b>   | Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara  | 772000 wisatawan mancanegara |           |         |   |
|  | Jumlah kunjungan wisatawan nusantara  | 16478019 wisatawan nusantara |           |         |   |
| 2.04.15.0001 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam Dan Di Luar Negeri                | Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam Dan Di Luar Negeri                | 100%                         | 13.49%    | 13.49%  | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                 |
| 2.04.15.0002 Penyelenggaraan Festival Kuliner  | Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Festival Kuliner  | 100%                         | 0.00%     | 0.00%   | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                 |
| 2.04.15.0003 Pelayanan Pendaftaran dan pengawasan Usaha Kepariwisataaan                          | Persentase Keberhasilan Pelayanan Pendaftaran dan pengawasan Usaha Kepariwisataaan                          | 100%                         | 25.00%    | 25.00%  | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                 |
| 2.04.15.0004 Pembinaan Pendukung Usaha Pariwisata  | Persentase Keberhasilan Pembinaan Pendukung Usaha Pariwisata  | 100%                         | 33.33%    | 33.33%  | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                 |
| 2.04.15.0005 Penyelenggaraan Event Wisata  | Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Event Wisata  | 100%                         | 23.10%    | 23.10%  | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                 |
| 2.04.15.0006 Pengembangan Sumberdaya Manusia dan profesionalisme bidang pariwisata               | Persentase Keberhasilan Pengembangan Sumberdaya Manusia dan profesionalisme bidang pariwisata               | 100%                         | 19.44%    | 19.44%  | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                 |
| <b>2.04.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</b>   | Jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke ODTW  | 3100000 wisatawan nusantara  |           |         |   |
|  | Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke ODTW  | 6000 wisatawan mancanegara   |           |         |   |
| 2.04.16.0001 Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata Ampel dan Kenjeran                         | Persentase Keberhasilan Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata Ampel dan Kenjeran                         | 100%                         | 14.02%    | 14.02%  | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                 |
| 2.04.16.0002 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata   | Persentase Keberhasilan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata   | 100%                         | 50.00%    | 50.00%  | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                 |
| 2.04.16.0003 Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata THR, Balai Pemuda dan Tugu Pahlawan        | Persentase Keberhasilan Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata THR, Balai Pemuda dan Tugu Pahlawan        | 100%                         | 25.35%    | 25.35%  | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                 |
| <b>2.05 Kelautan dan Perikanan</b>   |   |                              |           |         |   |
| <b>2.05.15 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir</b>                                   | Produktivitas Hasil Olahan Perikanan  | 14.16 Ton/Orang              |           |         |   |
|  | Produktivitas Usaha Garam   | 81.47 Ton/Ha                 |           |         |   |
| 2.05.15.0001 Pembinaan dan Pengembangan Pengolah Hasil Perikanan                                 | Persentase Keberhasilan Pembinaan dan Pengembangan Pengolah Hasil Perikanan                                 | 100%                         | 31.22%    | 31.22%  | Dinas Pertanian                                 |
| 2.05.15.0002 Pembinaan dan Pengembangan Petambak Garam   | Persentase Keberhasilan Pembinaan dan Pengembangan Petambak Garam   | 100%                         | 34.55%    | 34.55%  | Dinas Pertanian                                 |



| Urusan-Program-Kegiatan   | 2016 (Triwulan I)  |               |           |         | SKPD                                |
|---|--|---------------|-----------|---------|-------------------------------------|
|   | Indikator  | Target        | Realisasi | Capaian |                                     |
| <b>2.05.21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap</b>                             | Produktivitas tangkapan ikan (termasuk budidaya ikan di laut)                                | 3.2 Ton/Orang |           |         |                                     |
| 2.05.21.0001 Pembinaan dan Pengembangan Nelayan                                   | Persentase Keberhasilan Pembinaan dan Pengembangan Nelayan                                   | 100%          | 11.80%    | 11.80%  | Dinas Pertanian                     |
| <b>2.05.25 Program Pengembangan Perikanan Budidaya</b>                            | Produktivitas budidaya perikanan   | 2.13 Ton/Ha   |           |         |                                     |
| 2.05.25.0001 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya Darat                  | Persentase Keberhasilan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya Darat                  | 100%          | 11.40%    | 11.40%  | Dinas Pertanian                     |
| <b>2.06 Perdagangan</b>   |  |               |           |         |                                     |
| <b>2.06.15 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan</b>           | Persentase peningkatan Jumlah tempat usaha perdagangan yang tertib ukur                      | 15%           |           |         |                                     |
|   | Persentase Peningkatan jumlah Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Tertib ukur | 3%            |           |         |                                     |
| 2.06.15.0001 Pelayanan UPTD Metrologi Legal                                       | Persentase Keberhasilan Pelayanan UPTD Metrologi Legal                                       | 100%          | 56.49%    | 56.49%  | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| 2.06.15.0002 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan Jasa                     | Persentase Keberhasilan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan Jasa                     | 100%          | 35.39%    | 35.39%  | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| 2.06.15.0003 Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-permasalahan Pengaduan Konsumen | Persentase Keberhasilan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-permasalahan Pengaduan Konsumen | 100%          | 1.58%     | 1.58%   | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |



### 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan, masih ditemukan berbagai permasalahan yang menjadi hambatan dalam mewujudkan target yang direncanakan.

Permasalahan Daerah Yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, dijelaskan pada berikut :

Tabel 2.116  
Tabel Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas  
Dan Sasaran Pembangunan Daerah

| Program Pembangunan  | Permasalahan Pembangunan   | Faktor Penentu Keberhasilan  |
|--|--|--|
| Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun<br><br>Program Pendidikan Menengah | Kapasitas daya tampung sekolah untuk tingkat pendidikan dasar masih kurang memadai (jumlah siswa per rombel melebihi kapasitas standar)<br><br>Sarana dan prasarana sekolah belum sepenuhnya sesuai standar<br><br>Masih ada anak putus sekolah      | Seluruh warga kota Surabaya sudah melek huruf<br><br>Tersedianya dana BOS dan BOPDA yang dapat membantu operasional sekolah<br><br>Rata-rata lama sekolah warga kota Surabaya sudah baik |
| Program Pendidikan Anak Usia Dini  | Belum optimalnya implementasi Pendidikan Anak Usia Dini  | Angka Partisipasi Kasar warga kota Surabaya yang bersekolah tinggi dibandingkan dengan kota-kota lain  |
| Program Pendidikan Non Formal  | Akses anak terhadap informasi sedemikian pesat dan minat anak terhadap hal-hal baru sangat besar. Pendidikan formal yang mengedepankan sisi akademis belum sepenuhnya mengantisipasi hal-hal di luar/non akademis yang akan membentuk karakter siswa | Pendidikan non formal berkembang pesat di kota Surabaya  |

| Program Pembangunan   | Permasalahan Pembangunan   | Faktor Penentu Keberhasilan  |
|---|--|--|
| Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualitas, kompetensi, profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan belum merata</li> <li>- Tingkat kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan belum merata</li> <li>-Penataan dan pemerataan jumlah dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan belum merata</li> </ul>                       | Tenaga pendidik sudah memenuhi kualifikasi akademik dan memiliki kompetensi yang sesuai standar (sertifikasi)  |
| Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengendalian penyebaran penyakit tropis dan penyakit serius lainnya, serta penyebaran HIV/AIDS dan NAPZA</li> <li>- Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan belum merata</li> <li>-Pengembangan kawasan terbatas merokok/penyediaan area khusus merokok dalam gedung belum maksimal</li> </ul> | <p>Angka Kematian Ibu dan Bayi yang semakin menurun</p> <p>Balita di kota Surabaya sudah memiliki status gizi yang baik. Tidak ada balita gizi buruk</p> |
| <p>Program Pengadaan. Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya</p> <p>Program Pengadaan. Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata</p> | <p>Jumlah tenaga kesehatan yang kurang dibanding dengan jumlah warga kota (pasien) yang dilayani</p> <p>Penanganan penyakit menular seperti diare, pneumonia, dan TB yang belum optimal</p>  | - Penanganan kesehatan bagi warga miskin semakin baik  |
| Program Upaya Kesehatan Masyarakat  | Tingkat pengetahuan serta kesadaran masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat untuk mencegah penyakit masih rendah (Semakin tingginya warga usia produktif yang menderita penyakit degeneratif)   | - Penanganan kesehatan bagi warga miskin semakin baik  |
| Program Pengendalian Banjir   | Masih ada wilayah yang mengalami genangan air saat musim penghujan (drainase kurang memadai dan belum semua tersambung)  | - Upaya mitigasi dan penanggulangan bencana (termasuk banjir dan kebakaran) sudah berjalan baik  |

| Program Pembangunan                                    | Permasalahan Pembangunan   | Faktor Penentu Keberhasilan  |
|--|--|--|
| Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan | Kapasitas jalan di kota Surabaya belum dapat mengimbangi peningkatan jumlah kendaraan bermotor   | Kondisi jalan di kota Surabaya hampir seluruhnya sudah dalam kondisi baik dan dapat diakses kendaraan roda 4   |
| Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemenuhan kapasitas produksi dengan pemanfaatan idle capacity dan penurunan kebocoran belum maksimal</li> <li>- Penambahan tekanan air pada Sambungan Pelanggan melalui pembangunan resevoir distribusi/pelayanan belum maksimal</li> <li>- Pengembangan sistem jaringan air bersih, terutama pada kawasan-kawasan pemanfaatan terbatas, antara lain KAI, Sempadan Sungai, Pelindo, dsb belum maksimal</li> </ul> | Seluruh warga kota Surabaya dapat mengakses air minum yang aman  |
| Program Utilitas Perkotaan                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerataan pemasangan PJU belum maksimal</li> <li>- Biaya pemeliharaan dan operasional PJU tinggi</li> <li>- Pengembangan PJU dengan memanfaatkan belum teknologi yang hemat energi dan ramah lingkungan</li> <li>- Kualitas sistem manajemen pemeliharaan dan operasional PJU masih rendah</li> </ul>  | Sebagian besar perumahan dan kawasan permukiman di kota sudah terlayani listrik (termasuk PJU). dan air bersih |
| Program Perumahan dan Permukiman                       | <p>Ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau yang masih kurang</p> <p>Kawasan permukiman yang dikelola pengembang belum sepenuhnya menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang memadai</p>   | Luasan permukiman kumuh di kota Surabaya semakin berkurang   |

| Program Pembangunan                             | Permasalahan Pembangunan   | Faktor Penentu Keberhasilan   |
|---|--|---|
| Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aksesibilitas evakuasi pada sekitar area kejadian kebakaran belum memadai</li> <li>- Penerapan standar keamanan bangunan khususnya proteksi kebakaran belum maksimal</li> <li>- Sarana prasarana dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran belum memadai</li> <li>- Pemahaman masyarakat terhadap wawasan pencegahan dan penanggulangan/penanganan awal bencana kebakaran belum merata</li> </ul> | Upaya mitigasi dan penanggulangan bencana (termasuk banjir dan kebakaran) sudah berjalan baik |
| Program Penataan Ruang                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Masih ada bangunan di kota Surabaya yang belum berizin</li> <li>Pembangunan fisik di kota Surabaya belum sepenuhnya mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah</li> <li>Konektivitas pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di kota Surabaya (aktivitas dari hulu ke hilir) belum optimal</li> <li>Sistem penataan ruang di kota Surabaya belum terintegrasi dengan baik</li> </ul>                             | - Komitmen Pemerintah Kota untuk melakukan integrasi dalam penataa ruang Kota                 |

| Program Pembangunan                             | Permasalahan Pembangunan   | Faktor Penentu Keberhasilan   |
|---|--|---|
| <p>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data-data yang dapat mendukung perencanaan secara teknokratik belum tersedia secara komprehensif. Belum ada mekanisme data tunggal yang dikelola untuk kepentingan perencanaan</li> <li>- Tidak semua organisasi perangkat daerah paham tentang perencanaan dan menyadari kepentingan perencanaan dalam organisasi</li> <li>- Perencanaan masih ada yang bersifat sektoral. Hal-hal yang seharusnya dikerjakan lintas sektor dan berkelanjutan belum direncanakan secara terintegrasi sehingga permasalahan yang sesungguhnya dan target yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai dengan baik</li> </ul> | <p>Tingkat partisipasi masyarakat dalam merencanakan pembangunan kota Surabaya sudah cukup tinggi</p> |
| <p>Program Pengembangan Sistem Transportasi</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Angka kecelakaan lalu lintas yang masih cukup tinggi</li> <li>Kurangnya moda transportasi massa yang aman, nyaman serta mudah diakses masyarakat</li> <li>Belum tersedia infrastruktur dan jalur transportasi yang dapat cepat menghubungkan pusat perdagangan (hub) di dalam kota maupun antar kota/negara</li> <li>Belum ada kebijakan yang terintegrasi tentang pembatasan kendaraan pribadi</li> <li>Pengaturan pengujian kendaraan untuk Uji Tipe yang kewenangannya ditarik ke Pusat menyulitkan bagi dunia usaha</li> </ul>  | <p>Jumlah dan kondisi pelabuhan laut/udara/terminal bis/stasiun K.A memadai</p>                       |

| Program Pembangunan  | Permasalahan Pembangunan   | Faktor Penentu Keberhasilan  |
|--|--|--|
| Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | <p>Pelayanan pengurusan izin yang berkaitan dengan lingkungan masih membutuhkan waktu lama</p> <p>Pencemaran air karena limbah industri belum terpantau dengan baik</p> <p>Sarana dan prasarana pengelolaan limbah domestik dan industri rumah tangga secara terpadu belum tersedia</p>  | Kebijakan Pemerintah Kota untuk mendorong peran serta masyarakat dalam mengelola limbah domestik dan industri  |
| Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                  | RTH belum sepenuhnya berfungsi optimal secara ekologi, sosial budaya, dan ekonomi  | - Perbandingan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sudah sesuai ketentuan  |
| Program Pengelolaan Kebersihan Kota                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan dan pengolahan sampah belum maksimal</li> <li>- Sarana prasarana dalam upaya pengelolaan dan pengolahan sampah belum merata</li> <li>- Partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengelolaan kebersihan belum merata</li> <li>- Peraturan atau regulasi terkait kebersihan kota kurang ditegakkan</li> </ul>  | <p>Sampah di kota Surabaya sudah ditangani dengan baik (perbandingan TPS dengan jumlah penduduk memadai)</p> <p>Kebijakan Pemerintah Kota untuk mendorong peran serta masyarakat dalam mengelola lingkungan bersih dan nyaman (program green and clean)</p>  |
| Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota                | <p>Belum semua asset tanah milik pemerintah Kota Surabaya terinventarisasi dalam sistem informasi barang daerah, memiliki sertifikat, memiliki bukti kepemilikan yang lengkap (dikuasai pihak lain)</p> <p>Proses pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk kepentingan umum memerlukan waktu yang panjang</p> <p>Pengelolaan dan pemanfaatan tanah belum sepenuhnya sesuai dengan peruntukan dan nilai ekonomis asset</p> <p>Ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum non</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Warga kota Surabaya sudah memiliki kesadaran tinggi akan tertib administrasi atas kepemilikan tanah. Sebagian besar tanah di kota Surabaya sudah mempunyai dokumen kepemilikan (sertifikat)</li> <li>- Kasus tanah negara dapat diselesaikan dengan baik</li> </ul> |

| Program Pembangunan  | Permasalahan Pembangunan  | Faktor Penentu Keberhasilan   |
|--|---|---|
|  | infrastruktur   |   |
| Program Penataan Administrasi Kependudukan                             | Belum semua warga kota Surabaya yang wajib ber-KTP memiliki KTP   | Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sudah berjalan dengan baik (online). dan tanpa retribusi |
|  | Database penduduk perlu dilakukan sinkronisasi terlebih dahulu agar dapat digunakan secara optimal untuk menetapkan kebijakan atau program yang berbasis penduduk   |   |
| Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak | Data tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat minim karena faktor kesadaran masyarakat yang rendah dan ada perasaan enggan untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialami atau diketahuinya karena anggapan masalah kekerasan terutama dalam rumah tangga adalah masalah domestik keluarga (tabu) | Adanya kesadaran warga kota Surabaya untuk tidak mempekerjakan anak (tenaga kerja di bawah umur)                  |
|  |   | Tingkat kesetaraan gender di kota Surabaya sudah cukup tinggi   |
| Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak          | Pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi belum sepenuhnya optimal   | Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta sudah cukup tinggi                                      |
| Program Keluarga Berencana   | Sebagai kota metropolitan, Surabaya sulit mengendalikan penduduk musiman yang berasal dari luar daerah atau masyarakat yang bekerja/beraktivitas di kota Surabaya   | Ketersediaan dan keterjangkauan alat kontrasepsi memadai bagi warga kota Surabaya                                 |
|  | Jumlah Pasangan Usia Subur yang ingin menunda memiliki anak atau tidak ingin memiliki anak lagi tetapi tidak ber-KB (PUS Unmet Need) masih tinggi   | Tingkat kesadaran warga kota (laki-laki) untuk menjadi peserta KB tinggi  |
| Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial                | Kurangnya fungsi koordinasi (termasuk dengan pihak Provinsi dan Pusat) dengan berbagai pihak dalam penanganan PMKS di kota Surabaya   | Sarana dan prasarana Liponsos kota Surabaya memadai dan mampu menampung PMKS                                      |



| Program Pembangunan   | Permasalahan Pembangunan   | Faktor Penentu Keberhasilan   |
|---|--|---|
| Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial belum maksimal</li> <li>- Pemenuhan kebutuhan dasar dan sarana prasarana panti sosial bagi PMKS belum merata</li> <li>- Adanya kelompok PMKS yang tidak dapat diberdayakan</li> <li>- Ketidakakuratan database PMKS dalam menunjang perencanaan kebijakan yang tepat sasaran</li> <li>- Belum ada sinkronisasi pada program penanganan PMKS</li> </ul>   | Keterlibatan pihak swasta untuk penanganan PMKS cukup tinggi  |
| Program Peningkatan Kesempatan Kerja                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Supply-demand tenaga kerja belum terpetakan dengan baik</li> <li>Data pencari kerja baru berasal dari Kartu Kuning. Belum ada data riil pencari kerja untuk penduduk kota Surabaya</li> <li>Perluasan lapangan kerja sektor formal belum sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja</li> </ul>   | Upaya pemerintah kota Surabaya untuk memfasilitasi penempatan pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja sudah cukup baik   |
| Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengawasan ketenagakerjaan, perlindungan serta hubungan industrial belum optimal dijalankan (belum semua kasus ketenagakerjaan dapat ditindaklanjuti dengan perjanjian bersama)</li> <li>Kurangnya kompetensi tenaga kerja lokal untuk mengantisipasi terbukanya Masyarakat Ekonomi Asean yang masuk ke negara Indonesia. termasuk kota Surabaya</li> <li>Kondisi lingkungan kerja yang belum memadai dan diskriminasi di tempat kerja</li> </ul> | Minat kerja masyarakat sudah mengarah kepada menciptakan lapangan kerja melalui kegiatan wirausaha dan tidak mengandalkan sepenuhnya pada kesempatan kerja di sektor formal |

| Program Pembangunan  | Permasalahan Pembangunan  | Faktor Penentu Keberhasilan  |
|--|---|--|
| <p>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</p> | Minat calon tenaga kerja untuk berwirausaha   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah angkatan kerja yang terserap di UMKM sangat tinggi</li> <li>- Kontribusi UMKM terhadap PDRB Kota Surabaya tinggi</li> <li>- Potensi industri kreatif yang terbuka luas di kota Surabaya</li> </ul> |
|  | Jaringan usaha kerjasama antar pengusaha kecil  |  |
|  | Kompetensi dan daya saing koperasi serta pelaku usaha mikro   |  |
|  | Dukungan terhadap pengembangan usaha kreatif  |  |
|  | Intervensi pelayanan pemerintah kota Surabaya dalam pemerdayaan ekonomi masyarakat berbasis kelompok terutama bagi masyarakat miskin dan pelaku UMKM belum sinkron serta belum ada pembagian kewenangan dan tanggung jawab yang jelas antara organisasi perangkat daerah yang satu dengan lainnya |  |
|  | Penyediaan infrastruktur yang mendukung perdagangan secara berkelanjutan  |  |
|  | Perluasan jaringan pemasaran  |  |
|  | Upaya peningkatan daya saing produk-produk lokal di pasar domestik dan internasional  |  |
|  | Keterbatasan UMKM untuk mengakses sumber permodalan   |  |
|  | Pembangunan sentra bagi PKL kurang berdaya guna. Lokasi sentra yang jauh dari calon pembeli menjadi faktor yang menyebabkan PKL tidak menempati sentra yang telah disediakan Pemerintah Kota  |  |
|  | Kurang jiwa enterpreneurship maupun pengetahuan manajemen usaha yang dimiliki pelaku UMKM, sehingga jenis usaha yang ditekuni seringkali tidak  |  |

| Program Pembangunan   | Permasalahan Pembangunan   | Faktor Penentu Keberhasilan   |
|---|--|---|
|   | bertahan lama  |   |
| Program Peningkatan Kualitas Koperasi                       | Partisipasi masyarakat dalam berkoperasi   | Meningkatnya jumlah Koperasi yang berkualitas di kota Surabaya  |
| Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | <p>Belum tersedianya data potensi investasi kota Surabaya yang dapat dipromosikan untuk menunjang peningkatan jumlah investasi di kota Surabaya</p> <p>Mempertahankan iklim investasi yang kondusif</p> <p>Pengembangan sistem pelayanan investasi yang berbasis TIK</p> <p>Ketersediaan dan dukungan infrastruktur dan energi</p> <p>Kepastian persyaratan pengurusan Izin dan ketepatan waktu penerbitan Izin usaha pada pelayanan perijinan penunjang investasi masih kurang memuaskan</p> <p>Upah minimum kota yang cenderung tinggi serta tingkat keamanan kota menjadi faktor yang menghambat masuknya investor ke Surabaya</p> <p>Bentuk kelembagaan yang menangani pelayanan perizinan penunjang investasi belum mengikuti ketentuan yang ditetapkan Pemerintah Pusat, yang berdampak pada terbatasnya hak dan kewenangan mengakses dan memproses izin pada nominal tertentu</p> | <p>- Pelayanan penerbitan izin penunjang investasi sudah terfasilitasi menggunakan teknologi informasi (Surabaya Single Window)</p> <p>-Beberapa pelayanan publik tidak lagi dipungut retribusi</p> |
| Program Pengelolaan Keragaman Budaya                        | <p>Pelestarian Warisan Budaya</p> <p>Pengembangan kearifan budaya lokal yang berkarakter dan berkepribadian</p>  | <p>- Jumlah kelompok seni yang berprestasi meningkat</p> <p>-Kota Surabaya memiliki ragam budaya yang sangat</p>  |

| Program Pembangunan   | Permasalahan Pembangunan   | Faktor Penentu Keberhasilan   |
|---|--|---|
|   | <p>Pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan pada generasi muda</p> <p>Selama ini pelestarian budaya masih difokuskan pada budaya berbentuk fisik (bangunan dan lingkungan cagar budaya). Belum ada bentuk/wadah yang disediakan kota sebagai bentuk pelestarian budaya yang berwujud non fisik</p> <p>Apresiasi Seni dan Kreativitas Karya Budaya</p> <p>Pengembangan pusat-pusat kebudayaan</p> <p>Warga kota Surabaya sebagian adalah pendatang yang memiliki budaya lokal masing-masing yang beragam.</p> | kaya  |
| Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan                        | <p>Pengaruh negatif globalisasi, krisis budaya dan moral</p> <p>Kurangnya minat pemuda dalam kegiatan kepemudaan di kota Surabaya</p> <p>Masalah sosial di kalangan pemuda seperti kriminalitas, narkoba, psikotropika, zat adiktif (NAPZA) dan HIV masih cukup tinggi</p>   | - Jumlah pemuda di kota Surabaya yang semakin meningkat   |
| Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga                    | <p>Daya saing pemuda dalam menghadapi MEA</p> <p>Sebaran dan kualitas sarana dan prasarana olahraga</p> <p>Pembinaan dan pengembangan tenaga atlit dan pelatih profesional.</p>  | <p>Prestasi olahraga yang diraih kota Surabaya di tingkat regional dan nasional meningkat</p> <p>Tersedianya sarana olahraga baik untuk olahraga prestasi maupun olahraga rekreasi, berupa gedung olahraga, taman, maupun jalur khusus sepeda</p> <p>Penyelenggaraan car free day setiap minggu yang merupakan ajang olahraga rekreasi bagi warga kota Surabaya</p> |
| Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal | Kerjasama dengan berbagai pihak hingga di tingkat RT/RW untuk menjamin   | Upaya pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan pengendalian ketenteraman  |

| Program Pembangunan   | Permasalahan Pembangunan   | Faktor Penentu Keberhasilan   |
|---|--|---|
|   | ketenteraman dan ketertiban  | dan ketertiban sudah cukup baik   |
|   | Membangkitkan kembali karakter peduli, toleransi, menghargai, dan perilaku gotong-royong   | Seluruh kegiatan Ormas, LSM dan Parpol di kota Surabaya terpantau dengan baik dan cenderung kondusif  |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  | Assessment Center belum dioptimalkan pemanfaatannya, termasuk dalam hal penempatan personil Aparatur Sipil Negara berdasarkan kompetensi dan minat kerja<br>Pengadaan dan penempatan pegawai belum sepenuhnya sesuai antara kebutuhan riil dengan formasi pegawai yang ditempatkan   | Kinerja Aparatur Sipil Negara sudah diukur dan dievaluasi secara berkala sesuai dengan capaian dan kontribusi atas target kinerja yang ditetapkan   |
| Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah                            | Integrasi antar pihak belum maksimal   | Upaya Pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah  |
| Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah                          | Keterbatasan pemahaman SKPD mengenai pengelolaan keuangan daerah dan standar akuntansi keuangan pemerintah daerah<br>Sistem manajemen aset, khususnya yang terkait dengan sistem akuntansi berbasis akrual dan pemutakhiran data aset, belum optimal<br>Fungsi pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan keuangan secara internal perlu ditingkatkan | Kota Surabaya memiliki APBD yang cukup memadai untuk melaksanakan pembangunan<br>Hasil pemeriksaan keuangan menunjukkan bahwa semua transaksi keuangan dapat dipertanggungjawabkan (WTP)<br>Adanya pengelolaan keuangan berbasis elektronik |
| Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Kurangnya SDM untuk melakukan pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH   | Kompetensi dan budaya kerja Aparatur Sipil Negara di kota Surabaya sudah sangat baik  |
| Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah                                     | Tindak lanjut atas roadmap reformasi birokrasi belum dijalankan secara optimal   | Adanya koordinasi yang baik dengan instansi vertikal  |

| Program Pembangunan   | Permasalahan Pembangunan   | Faktor Penentu Keberhasilan   |
|---|--|---|
|   |  | Kerjasama antar lembaga dan antar daerah yang dibangun oleh pemerintah kota Surabaya sangat banyak                  |
| Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan               | Belum semua peraturan dan perundang-undangan sinkron. Ada aturan di tingkat UU yang tidak dapat dijalankan di daerah karena tidak ada aturan teknis di bawahnya                                    | Upaya Pemerintah Kota untuk mengoptimalkan regulasi/kebijakan dalam rangka mendukung pelayanan publik               |
| Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan            | Struktur organisasi perangkat daerah beserta tugas pokok dan fungsi organisasi sudah tidak sesuai dengan berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah                                 | Upaya Kota Surabaya dalam melakukan sinkronisasi terkait perundang-undangan terkait kelembagaan dan ketatalaksanaan |
|   | Penempatan personil belum sepenuhnya berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja   |   |
|   | Kinerja organisasi perangkat daerah termasuk aparatur sipil negara masih diukur dari capaian output kegiatan dan belum mengarah kepada outcome dan dampak (tingkatan Program, Sasaran, dan Tujuan) |   |
| Program Penataan Daerah Otonom                              | Pelimpahan kewenangan ke tingkat Kecamatan belum berjalan optimal  | Upaya Pemerintah Kota untuk melakukan pemerataan informasi ke kecamatan   |
| Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat     | Layanan kepada masyarakat dalam rangka menjamin akses informasi belum cepat dan aman   | Komunikasi masyarakat termasuk penanganan pengaduan masyarakat sudah dikelola dengan baik                           |
| Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) | Jaminan ketersediaan kebutuhan pangan dan bahan pokok  | Tingkat ketersediaan pangan di kota Surabaya sudah mencukupi dan tidak ada daerah rawan pangan                      |
|   | Kualitas pangan dan bahan pokok yang aman dan layak dikonsumsi masyarakat  | Pemerintah kota Surabaya dapat menjamin stabilitas harga dan pasokan pangan   |
|   | Belum semua warga dapat mengakses pangan yang aman. Pengawasan keamanan pangan belum berjalan dengan efektif   | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di kota Surabaya sudah memenuhi standar yang ditetapkan                              |

| Program Pembangunan  | Permasalahan Pembangunan  | Faktor Penentu Keberhasilan  |
|--|---|--|
|  | Ketersediaan beras dikelola oleh Bulog dan tidak ada data tersendiri untuk stok beras kota Surabaya (lumbung pangan lokal). Gudang Bulog terbagi ke dalam wilayah (divre). Kota Surabaya menjadi satu dengan Gresik dan Mojokerto | Informasi pasokan. harga dan akses pangan sudah tersedia secara memadai  |
|  | Kelembagaan organisasi perangkat daerah di Kota Surabaya yang berkaitan dengan pangan berbentuk Kantor. Bentuk kelembagaan tersebut tidak sepadan dengan urusan yang diemban  |  |
| Program Penanggulangan Kemiskinan                          | Pemantauan dan pembinaan atas kelompok ekonomi masyarakat yang sudah terbentuk sangat kurang sehingga perkembangan kesejahteraann masyarakat melalui kelompok tersebut (pendapatan dan daya saing) sulit diketahui                | Kebijakan Pemerintah Kota memberdayakan masyarakat cukup berhasil melalui pembentukan kekompok-kelompok ekonomi berbasis masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama masyarakat miskin |
|  | Konsep tentang penggunaan Teknologi Tepat Guna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat belum diwujudkan secara nyata  |  |
|  | Peran serta masyarakat dalam pembangunan di kawasan perkotaan cenderung menurun   |  |
| Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan            | Implementasi pengelolaan arsip secara digital belum optimal   | Seluruh arsip penting milik Pemerintah Kota Surabaya terlindungi dengan baik   |
|  | Pelaksanaan pemusnahan arsip daerah belum berjalan optimal  |  |
| Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa | Pemerataan akses internet untuk masyarakat  | - Kota Surabaya memiliki berbagai aplikasi yang memudahkan dalam mengolah data menjadi informasi yang berharga untuk pengambilan keputusan   |



| Program Pembangunan  | Permasalahan Pembangunan   | Faktor Penentu Keberhasilan  |
|--|--|--|
|  | Penyediaan infrastruktur jaringan dan aplikasi pelayanan publik  | - Kota Surabaya sudah menerapkan tata laksana berbasis teknologi (e-government) yang mengedepankan kecepatan dan transparansi, seperti e-budgeting, e-procurement, e-controlling, e-surat, dsb |
|  | Pengelolaan infrastruktur jaringan dan aplikasi pelayanan publik   |  |
| Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi | Pengembangan Sistem Pelayanan publik administratif yang berbasis Teknologi Informasi dan komunikasi  | Pengelolaan pemerintahan berbasis teknologi (e-government) di kota Surabaya sudah berjalan baik  |
|  | Belum ada aplikasi tunggal untuk menampung data skala kota yang hasil pengolahannya bisa digunakan untuk berbagai kepentingan (aplikasi masih tumpang tindih)                                    | Sistem keamanan informasi yang diterapkan pemerintah kota Surabaya dijamin keandalannya melalui sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (ISMS ISO 27001)                               |
|  | Pengendalian dan integrasi seluruh aplikasi yang dijalankan oleh pemerintah kota Surabaya  |  |
|  | Ada kecenderungan media massa memberitakan hal-hal yang kurang sesuai tentang program/kegiatan serta kinerja pemerintah  |  |
| Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan        | Sarana dan prasarana di TBM kurang memadai untuk menarik minat baca masyarakat   |  |
|  | Penyediaan media bacaan melalui Taman Bacaan Masyarakat (TBM) tidak sepenuhnya mencerminkan peningkatan minat baca karena akses membaca saat ini sudah mudah didapat melalui teknologi informasi |  |
|  | Informasi yang tersedia saat ini sangat beragam dan sangat mudah diakses, namun tidak seluruhnya berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan serta tidak disertai ulasan mendalam                |  |

| <b>Program Pembangunan</b>                               | <b>Permasalahan Pembangunan</b>  | <b>Faktor Penentu Keberhasilan</b>  |
|--|--|---|
| Program Peningkatan Kesejahteraan Petani                 | Surabaya sebagai kota perdagangan tidak memiliki lahan pertanian luas. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian masih cukup tinggi | Potensi Surabaya sebagai kota perdagangan   |
|  | Hasil pertanian dan peternakan tidak signifikan terhadap kontribusi PDRB   |   |
| Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata                | Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) milik Pemerintah Kota Surabaya kurang memiliki daya tarik bagi wisatawan                                | Jumlah wisatawan di kota Surabaya terus meningkat   |
| Program Pengembangan Destinasi Pariwisata                | Daya dukung infrastruktur obyek wisata yang menjadi ikon Surabaya  | Potensi Surabaya sebagai kota besar dan terdiri dari berbagai macam suku  |
|  | Sarana dan prasarana pendukung akses ke tujuan wisata belum terintegrasi dengan baik, khususnya yang dikelola Pemerintah Kota          |   |
| Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir          | 80% area budidaya garam adalah milik pengembang  | Meningkatnya hasil perikanan budidaya   |
|  | Menurunnya hasil perikanan tangkap   |   |
| Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan | Kelangkaan stok dan disparitas harga bahan pokok   | Sebagai kota perdagangan dan jasa, perdagangan di kota Surabaya memiliki kontribusi yang besar pada PDRB kota<br><br>Sebagai pusat perdagangan wilayah Indonesia timur, kota Surabaya memiliki potensi besar sebagai penghubung perdagangan antar kota dan antar negara |
|  | Upaya perlindungan konsumen  |   |
|  | Sinergitas peraturan pusat dan daerah  |   |
|  | Proses perijinan masih belum efisien   |   |
|  | Implementasi insentif fiskal bagi pengusaha belum optimal  |   |
|  | Proses pengadaan dan perijinan lahan yang masih menjadi hambatan   |   |
|  | Aktivitas perdagangan antar pulau dan nasional   |   |
|  | Minat masyarakat terhadap produk domestik  |   |
|  | Kondisi perdagangan dunia yang lesu berdampak pada menurunnya perdagangan luar negeri di kota Surabaya                                 |   |

| Program Pembangunan                              | Permasalahan Pembangunan  | Faktor Penentu Keberhasilan                                     |
|--|---|---|
| Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan | Masih banyak UMKM di kota Surabaya yang belum memiliki omzet yang memadai dan memiliki daya saing                           | Upaya Pemerintah Kota dalam membangun sentra pedagang kaki lima |
|  | Pembangunan sentra perdagangan kurang mendapat respon positif dari pedagang UMKM karena lokasinya sulit dijangkau pelanggan |   |
|  | Jaringan pasar industri kecil dan kemitraan dalam usaha pemasaran masih terbatas  |   |

Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.117  
Tabel Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

| Aspek                          | Fokus                          | Urusan     | Permasalahan  |
|--------------------------------|--------------------------------|------------|---|
| Aspek Kesejahteraan Masyarakat | Fokus Kesejahteraan Masyarakat | Pendidikan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kapasitas daya tampung sekolah untuk tingkat pendidikan dasar masih kurang memadai (jumlah siswa per rombel melebihi kapasitas standar)</li> <li>2. Sarana dan prasarana sekolah belum sepenuhnya sesuai standar</li> <li>3. Masih ada anak putus sekolah</li> <li>4. Belum optimalnya implementasi Pendidikan Anak Usia Dini</li> <li>5. Akses anak terhadap informasi sedemikian pesat dan minat anak terhadap hal-hal baru sangat besar. Pendidikan formal yang mengedepankan sisi akademis belum sepenuhnya mengantisipasi hal-hal di luar/non akademis yang akan membentuk karakter siswa</li> </ol> |
|                                |                                | Kesehatan  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat pengetahuan serta kesadaran masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat untuk mencegah penyakit masih rendah (Semakin tingginya warga usia produktif yang menderita penyakit degeneratif)</li> </ol>   |

| Aspek   | Fokus   | Urusan           | Permasalahan   |
|---|---|------------------|--|
|   |   | Ketenagakerjaan  | 1. Kurangnya kompetensi tenaga kerja lokal untuk mengantisipasi terbukanya Masyarakat Ekonomi Asean yang masuk ke negara Indonesia. termasuk kota Surabaya |
|   | Fokus Seni Budaya dan Olahraga                          | Kebudayaan       | 1. Apresiasi Seni dan Kreativitas Karya Budaya masih kurang  |
| Aspek Pelayanan Umum  | Fokus Layanan Urusan Wajib                              | Pendidikan       | 1. Masih adanya siswa putus sekolah jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) serta tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi                      |
|   |   |                  | 2. Masih adanya siswa putus sekolah jenjang pendidikan menengah (SMA/MA dan SMK) serta tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi                      |
|   |   | Kesehatan        | 1. Jumlah tenaga kesehatan yang kurang dibanding dengan jumlah warga kota (pasien) yang dilayani   |
|   |   |                  | 2. Penanganan penyakit menular seperti diare, pneumonia, dan TB yang belum optimal   |
|   |   | Pekerjaan Umum   | 1. Masih ada wilayah yang mengalami genangan air saat musim penghujan (drainase kurang memadai dan belum semua tersambung)                                 |
|   |   |                  | 2. Kapasitas jalan di kota Surabaya belum dapat mengimbangi peningkatan jumlah kendaraan bermotor  |
|   |   | Perumahan Rakyat | 1. Ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau yang masih kurang  |
|   |   |                  | 2. Kawasan permukiman yang dikelola pengembang belum sepenuhnya menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang memadai                               |
|   |   | Penataan Ruang   | 1. Masih ada bangunan di kota Surabaya yang belum berizin  |
|   |   |                  | 2. Pembangunan fisik di kota Surabaya belum sepenuhnya mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah   |
| 3. Konektivitas pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di kota Surabaya (aktivitas dari hulu ke hilir) belum optimal |   |                  |  |
| 4. Sistem penataan ruang di kota Surabaya belum terintegrasi dengan baik  |   |                  |  |
| Perhubungan   | 1. Angka kecelakaan lalu lintas yang masih cukup tinggi |                  |  |

| Aspek   | Fokus | Urusan           | Permasalahan  |
|---|-------|------------------|---|
|   |       |                  | 2. Kurangnya moda transportasi massa yang aman, nyaman serta mudah diakses masyarakat   |
|   |       |                  | 3. Belum tersedia infrastruktur dan jalur transportasi yang dapat cepat menghubungkan pusat perdagangan (hub) di dalam kota maupun antar kota/negara  |
|   |       |                  | 4. Belum ada kebijakan yang terintegrasi tentang pembatasan kendaraan pribadi   |
|   |       |                  | 5. Pengaturan pengujian kendaraan untuk Uji Tipe yang kewenangannya ditarik ke Pusat menyulitkan bagi dunia usaha   |
|   |       |                  |   |
|   |       | Lingkungan Hidup | 1. Pelayanan pengurusan izin yang berkaitan dengan lingkungan masih membutuhkan waktu lama  |
|   |       |                  | 2. Pencemaran air karena limbah industri belum terpantau dengan baik  |
|   |       |                  | 3. Sarana dan prasarana pengelolaan limbah domestik dan industri rumah tangga secara terpadu belum tersedia   |
|   |       |                  | 4. RTH belum sepenuhnya berfungsi optimal secara ekologi, sosial budaya, dan ekonomi  |
|   |       | Energi           | 1. Konservasi energi dan pengembangan energi alternatif   |
|   |       |                  | 2. Penyediaan infrastruktur yang berbasis ekologi   |
|   |       |                  | 3. Pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan   |
|   |       |                  | 4. Biaya konversi energi baru terbarukan mahal  |
|   |       | Pertanahan       | 1. Belum semua asset tanah milik pemerintah Kota Surabaya terinventarisasi dalam sistem informasi barang daerah, memiliki sertifikat, memiliki bukti kepemilikan yang lengkap (dikuasai pihak lain) |
|   |       |                  | 2. Proses pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk kepentingan umum memerlukan waktu yang panjang  |
|   |       |                  | 3. Pengelolaan dan pemanfaatan tanah belum sepenuhnya sesuai dengan peruntukan dan nilai ekonomis asset   |
| 4. Ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum non infrastruktur |       |                  |   |

| Aspek | Fokus | Urusan                                       | Permasalahan   |
|-------|-------|--|--|
|       |       | Kependudukan dan catatan sipil               | 1. Belum semua warga kota Surabaya yang wajib ber-KTP memiliki KTP   |
|       |       |  | 2. Database penduduk perlu dilakukan sinkronisasi terlebih dahulu agar dapat digunakan secara optimal untuk menetapkan kebijakan atau program yang berbasis penduduk   |
|       |       | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1. Data tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat minim karena faktor kesadaran masyarakat yang rendah dan ada perasaan enggan untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialami atau diketahuinya karena anggapan masalah kekerasan terutama dalam rumah tangga adalah masalah domestik keluarga (tabu) |
|       |       |  | 2. Pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi belum sepenuhnya optimal   |
|       |       | Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera    | 1. Sebagai kota metropolitan, Surabaya sulit mengendalikan penduduk musiman yang berasal dari luar daerah atau masyarakat yang bekerja/beraktivitas di kota Surabaya   |
|       |       |  | 2. Jumlah Pasangan Usia Subur yang ingin menunda memiliki anak atau tidak ingin memiliki anak lagi tetapi tidak ber-KB (PUS Unmet Need) masih tinggi   |
|       |       | Sosial                                       | 1. Kurangnya fungsi koordinasi (termasuk dengan pihak Provinsi dan Pusat) dengan berbagai pihak dalam penanganan PMKS di kota Surabaya   |
|       |       | Ketenagakerjaan                              | 1. Supply-demand tenaga kerja belum terpetakan dengan baik   |
|       |       |  | 2. Data pencari kerja baru berasal dari Kartu Kuning. Belum ada data riil pencari kerja untuk penduduk kota Surabaya   |
|       |       |  | 3. Perluasan lapangan kerja sektor formal belum sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja  |
|       |       | Koperasi Usaha Kecil dan Menengah            | 1. Minat calon tenaga kerja untuk berwirausaha   |
|       |       |  | 2. Jaringan usaha kerjasama antar pengusaha kecil  |
|       |       |  | 3. Kompetensi dan daya saing koperasi serta pelaku usaha mikro   |

| Aspek | Fokus | Urusan          | Permasalahan   |
|-------|-------|-----------------|--|
|       |       |                 | 4. Dukungan terhadap pengembangan usaha kreatif  |
|       |       |                 | 5. Intervensi pelayanan pemerintah kota Surabaya dalam pemerdayaan ekonomi masyarakat berbasis kelompok terutama bagi masyarakat miskin dan pelaku UMKM belum sinkron serta belum ada pembagian kewenangan dan tanggung jawab yang jelas antara organisasi perangkat daerah yang satu dengan lainnya |
|       |       |                 | 6. Penyediaan infrastruktur yang mendukung perdagangan secara berkelanjutan  |
|       |       |                 | 7. Perluasan jaringan pemasaran  |
|       |       |                 | 8. Upaya peningkatan daya saing produk-produk lokal di pasar domestik dan internasional  |
|       |       |                 | 9. Keterbatasan UMKM untuk mengakses sumber permodalan   |
|       |       |                 | 10. Pembangunan sentra bagi PKL kurang berdaya guna. Lokasi sentra yang jauh dari calon pembeli menjadi faktor yang menyebabkan PKL tidak menempati sentra yang telah disediakan Pemerintah Kota   |
|       |       |                 | 11. Kurangnya jiwa entrepreneurship maupun pengetahuan manajemen usaha yang dimiliki pelaku UMKM, sehingga jenis usaha yang ditekuni seringkali tidak bertahan lama  |
|       |       |                 | 12. Partisipasi masyarakat dalam berkoperasi   |
|       |       | Penanaman Modal | 1. Belum tersedianya data potensi investasi kota Surabaya yang dapat dipromosikan untuk menunjang peningkatan jumlah investasi di kota Surabaya  |
|       |       |                 | 2. Mempertahankan iklim investasi yang kondusif  |
|       |       |                 | 3. Pengembangan sistem pelayanan investasi yang berbasis TIK   |
|       |       |                 | 4. Ketersediaan dan dukungan infrastruktur dan energi  |
|       |       |                 | 5. Kepastian persyaratan pengurusan Izin dan ketepatan waktu penerbitan Izin usaha pada pelayanan perijinan penunjang investasi masih kurang memuaskan   |



| Aspek | Fokus | Urusan                                   | Permasalahan   |
|-------|-------|--|--|
|       |       |  | 6. Upah minimum kota yang cenderung tinggi serta tingkat keamanan kota menjadi faktor yang menghambat masuknya investor ke Surabaya  |
|       |       |  | 7. Bentuk kelembagaan yang menangani pelayanan perizinan penunjang investasi belum mengikuti ketentuan yang ditetapkan Pemerintah Pusat, yang berdampak pada terbatasnya hak dan kewenangan mengakses dan memproses izin pada nominal tertentu |
|       |       | Kebudayaan                               | 1. Pelestarian Warisan Budaya  |
|       |       |  | 2. Pengembangan kearifan budaya lokal yang berkarakter dan berkepribadian  |
|       |       |  | 3. Pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan pada generasi muda   |
|       |       |  | 4. Selama ini pelestarian budaya masih difokuskan pada budaya berbentuk fisik (bangunan dan lingkungan cagar budaya). Belum ada bentuk/wadah yang disediakan kota sebagai bentuk pelestarian budaya yang berwujud non fisik                    |
|       |       |  | 5. Pengembangan pusat-pusat kebudayaan   |
|       |       | Kepemudaan dan Olahraga                  | 1. Pengaruh negatif globalisasi, krisis budaya dan moral   |
|       |       |  | 2. Kurangnya minat pemuda dalam kegiatan kepemudaan di kota Surabaya   |
|       |       |  | 3. Masalah sosial di kalangan pemuda seperti kriminalitas, narkoba, psikotropika, zat adiktif (NAPZA) dan HIV masih cukup tinggi   |
|       |       |  | 4. Daya saing pemuda dalam menghadapi MEA  |
|       |       |  | 5. Sebaran dan kualitas sarana dan prasarana olahraga  |
|       |       |  | 6. Pembinaan dan pengembangan tenaga atlet dan pelatih profesional.  |
|       |       | Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri | 1. Kerjasama dengan berbagai pihak hingga di tingkat RT/RW untuk menjamin ketenteraman dan ketertiban  |
|       |       |  | 2. Membangkitkan kembali karakter peduli, toleransi, menghargai, dan perilaku gotong-royong  |
|       |       | Ketahanan Pangan                         | 1. Jaminan ketersediaan kebutuhan pangan dan bahan pokok   |

| Aspek | Fokus | Urusan                           | Permasalahan  |
|-------|-------|----------------------------------|---|
|       |       |                                  | 2. Kualitas pangan dan bahan pokok yang aman dan layak dikonsumsi masyarakat  |
|       |       |                                  | Belum semua warga dapat mengakses pangan yang aman. Pengawasan keamanan pangan belum berjalan dengan efektif  |
|       |       |                                  | Ketersediaan beras dikelola oleh Bulog dan tidak ada data tersendiri untuk stok beras kota Surabaya (lumbung pangan lokal). Gudang Bulog terbagi ke dalam wilayah (divre). Kota Surabaya menjadi satu dengan Gresik dan Mojokerto |
|       |       |                                  | Kelembagaan organisasi perangkat daerah di Kota Surabaya yang berkaitan dengan pangan berbentuk Kantor. Bentuk kelembagaan tersebut tidak sepadan dengan urusan yang diemban  |
|       |       | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 1. Pemantauan dan pembinaan atas kelompok ekonomi masyarakat yang sudah terbentuk sangat kurang sehingga perkembangan kesejahteraannya masyarakat melalui kelompok tersebut (pendapatan dan daya saing) sulit diketahui           |
|       |       |                                  | 2. Konsep tentang penggunaan Teknologi Tepat Guna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat belum diwujudkan secara nyata   |
|       |       |                                  | 3. Peran serta masyarakat dalam pembangunan di kawasan perkotaan cenderung menurun  |
|       |       | Kearsipan                        | 1. Implementasi pengelolaan arsip secara digital belum optimal  |
|       |       |                                  | 2. Pelaksanaan pemusnahan arsip daerah belum berjalan optimal   |
|       |       | Perpustakaan                     | 1. Sarana dan prasarana di TBM kurang memadai untuk menarik minat baca masyarakat   |
|       |       |                                  | 2. Penyediaan media bacaan melalui Taman Bacaan Masyarakat (TBM) tidak sepenuhnya mencerminkan peningkatan minat baca karena akses membaca saat ini sudah mudah didapat melalui teknologi informasi                               |
|       |       |                                  | 3. Informasi yang tersedia saat ini sangat beragam dan sangat mudah diakses, namun tidak seluruhnya berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan serta tidak disertai ulasan mendalam  |

| Aspek                                 | Fokus                            | Urusan                     | Permasalahan   |
|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--|
|                                       | Fokus Urusan Layanan Pilihan     | Pariwisata                 | 1. Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) milik Pemerintah Kota Surabaya kurang memiliki daya tarik bagi wisatawan   |
|                                       |                                  |                            | 2. Daya dukung infrastruktur obyek wisata yang menjadi ikon Surabaya   |
|                                       |                                  |                            | 3. Sarana dan prasarana pendukung akses ke tujuan wisata belum terintegrasi dengan baik, khususnya yang dikelola Pemerintah Kota                                 |
|                                       |                                  | Pertanian                  | 1. Surabaya sebagai kota perdagangan tidak memiliki lahan pertanian luas. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian masih cukup tinggi                        |
|                                       |                                  |                            | 2. Hasil pertanian dan peternakan tidak signifikan terhadap kontribusi PDRB  |
|                                       |                                  | Kelautan dan Perikanan     | 1. 80% area budidaya garam adalah milik pengembang   |
| 2. Menurunnya hasil perikanan tangkap |                                  |                            |  |
| Aspek Daya Saing                      | Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur | Perhubungan                | 1. Belum tersedia infrastruktur dan jalur transportasi yang dapat cepat menghubungkan pusat perdagangan (hub) di dalam kota maupun antar kota/negara             |
|                                       |                                  | Komunikasi dan Informatika | 1. Pemerataan akses internet untuk masyarakat  |
|                                       |                                  |                            | 2. Penyediaan infrastruktur jaringan dan aplikasi pelayanan publik   |
|                                       |                                  |                            | 3. Pengelolaan infrastruktur jaringan dan aplikasi pelayanan publik  |
|                                       |                                  |                            | 4. Pengembangan Sistem Pelayanan publik administratif yang berbasis Teknologi Informasi dan komunikasi   |
|                                       |                                  |                            | 5. Belum ada aplikasi tunggal untuk menampung data skala kota yang hasil pengolahannya bisa digunakan untuk berbagai kepentingan (aplikasi masih tumpang tindih) |
|                                       |                                  |                            | 6. Pengendalian dan integrasi seluruh aplikasi yang dijalankan oleh pemerintah kota Surabaya   |
|                                       |                                  |                            | 7. Peningkatan layanan kepada masyarakat dalam rangka menjamin akses informasi yang cepat dan aman   |

| Aspek | Fokus              | Urusan          | Permasalahan   |
|-------|--------------------|-----------------|--|
|       |                    |                 | 8. Ada kecenderungan media massa memberitakan hal-hal yang kurang sesuai tentang program/kegiatan serta kinerja pemerintah   |
|       | Iklim Berinvestasi | Perdagangan     | 1. Kelangkaan stok dan disparitas harga bahan pokok  |
|       |                    |                 | 2. Upaya perlindungan konsumen   |
|       |                    |                 | 3. Sinergitas peraturan pusat dan daerah   |
|       |                    |                 | 4. Proses perijinan masih belum efisien  |
|       |                    |                 | 5. Implementasi insentif fiskal bagi pengusaha belum optimal   |
|       |                    |                 | 6. Proses pengadaan dan perijinan lahan yang masih menjadi hambatan  |
|       |                    |                 | 7. Aktivitas perdagangan antar pulau dan nasional  |
|       |                    |                 | 8. Minat masyarakat terhadap produk domestik   |
|       |                    |                 | 9. Kondisi perdagangan dunia yang lesu berdampak pada menurunnya perdagangan luar negeri di kota Surabaya  |
|       |                    |                 | 10. Masih banyak UMKM di kota Surabaya yang belum memiliki omzet yang memadai dan memiliki daya saing  |
|       |                    |                 | 11. Pembangunan sentra perdagangan kurang mendapat respon positif dari pedagang UMKM karena lokasinya sulit dijangkau pelanggan  |
|       |                    |                 | 12. Jaringan pasar industri kecil dan kemitraan dalam usaha pemasaran masih terbatas   |
|       | Sumberdaya manusia | Ketenagakerjaan | 1. Pengawasan ketenagakerjaan, perlindungan serta hubungan industrial belum optimal dijalankan (belum semua kasus ketenagakerjaan dapat ditindaklanjuti dengan perjanjian bersama) |
|       |                    |                 | 2. Kurangnya kompetensi tenaga kerja lokal untuk mengantisipasi terbukanya Masyarakat Ekonomi Asean yang masuk ke negara Indonesia, termasuk kota Surabaya                         |
|       |                    |                 | 3. Kondisi lingkungan kerja yang belum memadai dan diskriminasi di tempat kerja  |

## **BAB III**

# **RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

### **3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

#### **3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 Dan Perkiraan Tahun 2016**

##### **a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Perbaikan ekonomi dunia nampaknya masih berjalan sangat lambat, Tiap negara terus berupaya untuk membuat berbagai kebijakan strategis untuk menstimulus kinerja perekonomiannya agar tumbuh positif. Namun, berbagai kebijakan strategis yang dilakukan tersebut nyatanya belum menunjukkan hasil, seperti China yang terus menunjukkan perlambatan perekonomian. Kondisi yang sama juga terjadi di Amerika, dimanaperekonomian Amerika menunjukkan kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang moderat. Capaian ekonomi Amerika pada tahun 2015 didorong oleh rendah investasi dan pelemahan belanja pemerintah.

Moderatnya pertumbuhan ekonomi negara-negara maju serta ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi pasar keuangan terjadi seiring menurunnya harga komoditas dan nilai tukar dolar terhadap mata uang asing turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Mengingat perekonomian Kota Surabaya bagian dari perekonomian Jawa Timur dan Nasional serta perekonomian dunia, pergerakan perekonomian dunia yang juga turut berpengaruh terhadap perekonomian Kota Surabaya.

Kinerja perekonomian Kota Surabaya pada tahun 2015 mengalami pertumbuhan namun sedikit melambat. Dari sisi permintaan, kinerja konsumsi rumah tangga melambat seiring menurunnya daya beli masyarakat serta perlambatan kinerja ekspor sebagai dampak perlambatan ekonomi mitra dagang Kota Surabaya seperti China, Amerika dan Jepang. Sementara dari sisi lapangan usaha, perlambatan ekonomi Kota Surabaya dipicu oleh melambatnya pertumbuhan industri pengolahan akibat tertekannya nilai tukar rupiah yang berdampak pada meningkatnyabiaya bahan baku industriterutama yang diimpor dari luar negeri. Pada tahun 2015

nilai PDRB Kota Surabaya Atas Dasar Harga Konstan sebesar Rp323.682.584,92 juta. Sementara pada tahun 2016 perekonomian Kota Surabaya diperkirakan optimis masih tumbuh lebih baik dibanding tahun 2015 meskipun pergerakannya masih moderat seiring moderasinya ekonomi negara-maju maju. Berdasarkan kondisi tersebut, nilai PDRB Kota Surabaya pada tahun 2015 diperkirakan mencapai sebesar Rp343.589.063,88 juta.

Tabel 3.1  
 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Surabaya  
 Tahun 2015 dan Perkiraan Tahun 2016 (dalam juta)

| Kategori                              | Uraian   | 2015*                 | 2016**                |
|---------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
|                                       |  | Juta (Rp)             | Juta (Rp)             |
| A                                     | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                            | 544.254,16            | 584.101,41            |
| B                                     | Pertambangan dan Penggalian                                    | 19.287,42             | 20.358,91             |
| C                                     | Industri Pengolahan  | 63.544.418,51         | 67.515.251,05         |
| D                                     | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 1.519.805,94          | 1.546.150,78          |
| E                                     | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 479.309,46            | 515.383,59            |
| F                                     | Konstruksi   | 32.287.990,94         | 33.760.263,88         |
| G                                     | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 91.681.928,75         | 97.504.758,52         |
| H                                     | Transportasi dan Pergudangan                                   | 15.878.997,20         | 16.767.146,31         |
| I                                     | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 45.780.530,20         | 48.789.647,07         |
| J                                     | Informasi dan Komunikasi                                       | 20.938.611,64         | 22.161.494,62         |
| K                                     | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 15.852.550,77         | 16.732.787,41         |
| L                                     | Real Estate  | 8.774.297,06          | 9.311.263,63          |
| M,N                                   | Jasa Perusahaan  | 7.437.646,67          | 8.074.343,00          |
| O                                     | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 4.032.041,91          | 4.397.940,01          |
| P                                     | Jasa Pendidikan  | 7.593.381,70          | 8.108.701,91          |
| Q                                     | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 2.527.338,14          | 2.645.635,79          |
| R,S,T,U                               | Jasa lainnya   | 4.790.194,45          | 5.153.835,96          |
| <b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b> |  | <b>323.682.584,92</b> | <b>343.589.063,88</b> |

Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2016 \*) Data Sementara \*\*) Data Proyeksi Bappeko Surabaya

Selaras dengan peningkatan PDRB Atas Dasar Harga Konstan, berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2016 diperkirakan meningkat sebesar Rp453.162.164,37 juta, lebih tinggi dibanding tahun 2015 yang hanya sebesar Rp407.703.251,80 juta. Peningkatan tersebut masih didorong oleh tingkat konsumsi masyarakat dan kinerja ekspor sebagai pendorong utama seiring dengan tingginya share kedua komponen tersebut terhadap perekonomian Kota Surabaya dari sisi permintaan. Sementara dari

kinerja lapangan usahanya, kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor serta kategori industri pengolahan dan penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi pendorong tumbuhnya perekonomian Kota Surabaya ditahun 2016.

Tabel 3.2  
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surabaya  
Tahun 2015 dan Perkiraan Tahun 2016 (dalam juta)

| Kategori                              | Uraian   | 2015*                 | 2016**                |
|---------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
|                                       |  | Juta (Rp)             | Juta (Rp)             |
| A                                     | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                            | 750.070,84            | 829.286,76            |
| B                                     | Pertambangan dan Penggalan                                     | 27.587,48             | 29.908,70             |
| C                                     | Industri Pengolahan  | 79.334.006,95         | 88.521.304,84         |
| D                                     | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 1.997.909,41          | 2.065.810,82          |
| E                                     | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 613.427,06            | 725.059,46            |
| F                                     | Konstruksi   | 41.833.616,63         | 46.721.019,15         |
| G                                     | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 109.971.647,28        | 123.214.792,49        |
| H                                     | Transportasi dan Pergudangan                                   | 21.544.921,57         | 23.337.851,47         |
| I                                     | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 62.389.404,16         | 68.925.965,20         |
| J                                     | Informasi dan Komunikasi                                       | 22.080.942,63         | 25.150.500,12         |
| K                                     | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 21.872.423,78         | 24.017.594,71         |
| L                                     | Real Estate  | 10.420.100,50         | 10.982.024,38         |
| M,N                                   | Jasa Perusahaan  | 9.814.203,90          | 10.889.486,81         |
| O                                     | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 5.420.318,82          | 6.344.270,30          |
| P                                     | Jasa Pendidikan  | 10.444.758,10         | 11.555.544,19         |
| Q                                     | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 3.210.798,99          | 3.489.348,67          |
| R,S,T,U                               | Jasa lainnya   | 5.977.113,72          | 6.362.396,29          |
| <b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b> |  | <b>407.703.251,80</b> | <b>453.162.164,37</b> |

Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2016 \*) Data Sementara \*\*) Data Proyeksi Bappeko Surabaya

## b. Sumbangan Sektoral

Berdasarkan kinerja perkategori lapangan usaha, kinerja sektor ekonomi utama masih memberikan kontribusi tertinggi terhadap perekonomian Kota Surabaya, yaitu lapangan usaha kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor serta kategori industri pengolahan dan penyediaan akomodasi dan makan minum. Pada tahun 2015 kontribusi kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan



sepeda motor sebesar 23,82 persen terhadap PDRB ADHK Kota Surabaya. Selanjutnya kategori industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 19,63 persenan kategori penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 14,14 persen.

Sementara itu, kinerja kategori lapangan usaha pendukung lainnya memberikan kontribusi yang bervariasi. Kategori konstruksi, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi memberikan kontribusi cukup tinggi setelah kontribusi kategori penopang perekonomian Kota Surabaya. Di sisi lain, kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan; pertambangan dan penggalan serta pengadaan listrik dan gas memberikan kontribusi terendah terhadap perekonomian Kota Surabaya. Perananper kategori lapangan usaha terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya tahun 2015 terangkum dalam tabel berikut.

Tabel 3.3  
Peranan Ekonomi PerKategori Terhadap PDRB Kota Surabaya  
Atas Dasar Harga Konstan  
Tahun 2015 dan Perkiraan Tahun 2016 (dalam persen)

| Kategori                              | Uraian   | 2015*         | 2016**        |
|---------------------------------------|--|---------------|---------------|
|                                       |  | (%)           | (%)           |
| A                                     | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                            | 0,17          | 0,17          |
| B                                     | Pertambangan dan Penggalan                                     | 0,01          | 0,01          |
| C                                     | Industri Pengolahan  | 19,63         | 19,65         |
| D                                     | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 0,47          | 0,45          |
| E                                     | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 0,15          | 0,15          |
| F                                     | Konstruksi   | 9,98          | 9,83          |
| G                                     | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 28,32         | 28,38         |
| H                                     | Transportasi dan Pergudangan                                   | 4,91          | 4,88          |
| I                                     | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 14,14         | 14,20         |
| J                                     | Informasi dan Komunikasi                                       | 6,47          | 6,45          |
| K                                     | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 4,90          | 4,87          |
| L                                     | Real Estate  | 2,71          | 2,71          |
| M,N                                   | Jasa Perusahaan  | 2,30          | 2,35          |
| O                                     | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 1,25          | 1,28          |
| P                                     | Jasa Pendidikan  | 2,35          | 2,36          |
| Q                                     | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 0,78          | 0,77          |
| R,S,T,U                               | Jasa lainnya   | 1,48          | 1,50          |
| <b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b> |  | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |

Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2016 \*) Data Sementara \*\*) Data Proyeksi Bappeko Surabaya

Pada tahun 2016 hampir seluruh kinerja kategori lapangan usaha pembentuk PDRB Kota Surabaya diperkirakan meningkat. Meskipun demikian, melihat perkembangan ekonomi terkini, kinerja kategori lapangan tersebut diperkirakan meningkat secara moderat. Kontribusi kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor diperkirakan meningkat pada tahun 2015 sebesar 28,32 persen menjadisebesar 28,38 persen di tahun 2016. Begitu pula dengan kategori industri pengolahan yang diperkirakan mengalami peningkatan dari 19,63 persen ditahun 2015 menjadi 19,65 persen di tahun 2016. Peningkatan tersebut diperkirakan karena tekanan biaya operasional industri berkurang seiring dengan penurunan harga bahan bakar minyak dan meredanya tekanan rupiah untuk permintaan bahan baku impor. Sementara peningkatan pada kategori penyediaan akomodasi dan makan minum terutama didorong oleh tingginya konsumsi masyarakat Kota Surabaya terhadap permintaan makanan jadi selaras masyarakat kota memilikikarakteristik pola hidup modern. Disamping itu, semakin merebaknya berbagai macam usaha makanan dan hunian mulai dari yang kecil hingga yang besar turut mengkonfirmasi bahwa kategori penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh pesat di Kota Surabaya.

### c. Pertumbuhan Ekonomi

Secara kumulatif pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya pada tahun 2016 diperkirakan berada pada kisaran 5,8%-6,2% yang moderat dengan capaian pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya pada tahun 2015 yang mencapai 6,02 persen. Namun pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya diperkirakan masih lebih tinggi dibanding dengan pertumbuhan Jawa Timur dan Nasional.

Tabel 3.4  
Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya  
Tahun 2015 dan Perkiraan Tahun 2016 (dalam persen)

| Tahun  | Pertumbuhan Ekonomi (%) |
|--------|-------------------------|
| 2015*  | 6,02                    |
| 2016** | 5,8-6,2                 |

Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2016

\*) Angka Sementara \*\*) Data Proyeksi Bappeko Surabaya

Dari sisi permintaan, perkiraan perbaikan ekonomi Kota Surabaya pada tahun 2016 didorong oleh kembali meningkatnya konsumsi masyarakat Kota Surabaya seiring dengan membaiknya perekonomian nasional. Disamping itu, perkiraan perbaikan ekonomi pada beberapa mitra dagang Kota Surabaya akan berdampak terhadap kinerja perdagangan luar negeri.

Dari sisi penawaran, tumbuhnya kinerja kategori-kategori lapangan usaha yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi diperkirakan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya tumbuh tinggi dibanding tahun sebelumnya.

#### d. Tingkat Inflasi

Inflasi Kota Surabaya pada tahun 2015 sebesar 3,43 persen turun signifikan dibanding inflasi Kota Surabaya di tahun 2014, yaitu 7,90 persen, namun lebih tinggi dibanding inflasi Jawa Timur sebesar 3,08 persen dan Nasional sebesar 3,35 persen. Meskipun capaian inflasi Kota Surabaya lebih tinggi dibanding Jawa Timur dan nasional, namun Inflasi Kota Surabaya masih tergolong dalam kategori inflasi rendah. Penyumbang utama Inflasi Kota Surabaya pada tahun 2015 ini mayoritas berasal dari kelompok *volatile food* sementara kelompok *administered price* pada tahun ini menjadi penahan inflasi Kota Surabaya. Mencermati perkembangan harga terkini, inflasi Kota Surabaya pada tahun 2016 diperkirakan searah dengan sasaran inflasi nasional yaitu pada kisaran 4,0-5,0 persen.

Tabel 3.5  
Tingkat Inflasi Kota Surabaya  
Tahun 2015 dan Perkiraan Tahun 2016 (dalam persen)

| Tahun  | Pertumbuhan Ekonomi(%) |
|--------|------------------------|
| 2015   | 3,43                   |
| 2016** | 4,0-5,0                |

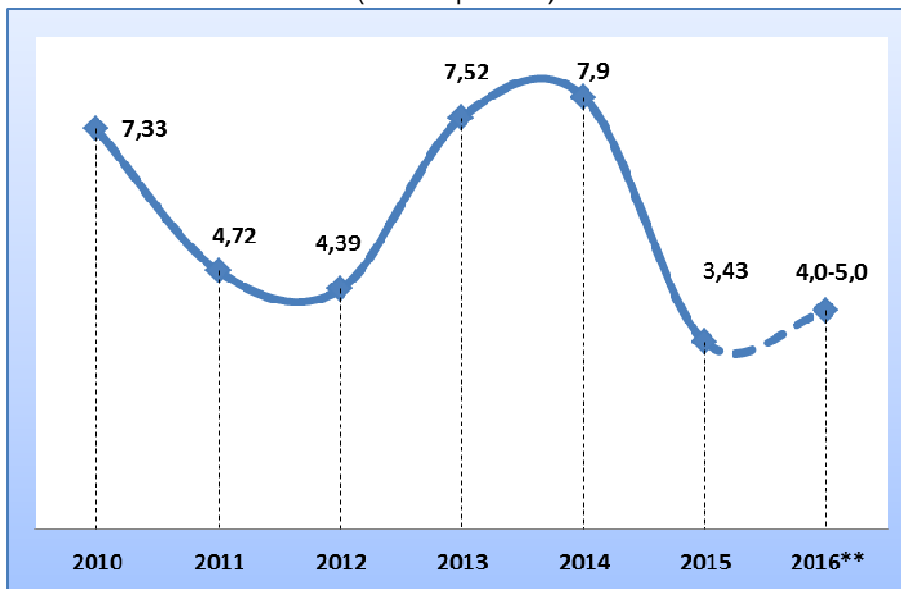
Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2016

\*) Data Sementara \*\*) Data Proyeksi Bappeko Surabaya

Secara series kondisi inflasi Kota Surabaya pada 5 tahun terakhir terangkum dalam Grafik. Seperti nampak pada grafik tersebut, inflasi Kota Surabaya pada tahun 2016 diperkirakan sedikit lebih tinggi dibanding tahun 2015. Berdasarkan kelompoknya, kelompok *volatile food* diperkirakan

memberikan potensi lebih besar terhadap inflasi Kota Surabaya kedepan. Kemungkinan dampak lanjutan El Nino terhadap mundurnya panen raya dan kemungkinan musim hujan yang berakhir lebih cepat dan musim kemarau di tahun 2016 lebih panjang dari pola normalnya, berpotensi mendorong inflasi dari kelompok volatile food. Sementara inflasi dari kelompok administered price diperkirakan dirorong oleh penyesuaian berbagai penyesuaian kebijakan tarif energi seperti penyesuaian tarif LPG dan penyesuaian tarif listrik.

Gambar 3.1  
Inflasi Kota Surabaya Tahun 2010-2015 dan Perkiraan 2016  
(dalam persen)



Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2016

\*\*\*) Data Proyeksi Bappeko Surabaya

#### e. Tingkat Investasi (PMA & PMDN)

Salah satu unsur penunjang keberhasilan pembangunan ekonomi di Kota Surabaya adalah investasi yang ditanamkan. Perkembangan Kota Surabaya yang tumbuh pesat sebagai basis bisnis yang didukung oleh infrastruktur yang memadai menjadi daya tarik untuk mendorong dan memperkuat dalam penanaman modal asing maupun penanaman dalam negeri. Selain itu, kemudahan akses dalam hal perizinan juga menjadi salah satu daya dukung utama. Maka tidak heran bila Kota Surabaya semakin menarik bagi para investor.

Kinerja investasi Kota Surabaya pada tahun 2015 menunjukkan kinerja yang cukup menggembirakan. Hal tersebut ditunjukkan oleh realisasi nilai investasi yang dicapai, meskipun realisasi yang berasal dari penanaman modal asing (PMA) mengalami penurunan dibanding sebelumnya, namun realisasi investasi dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) pada tahun 2015 ini mencapai realisasi tertinggi kedua selama 5 tahun terakhir setelah tahun 2012, yaitu sebesar Rp828.416.500.000. Berdasarkan data BKPPM Kota Surabaya, faktor pendorong akselerasi investasi PMDN pada tahun ini berasal dari realisasi investasi pembangunan pergudangan dan jasa penunjang angkutan; industri logam dasar, mesin dan elektronik; serta industri karet dan barang dari plastik.

Sementara itu, dari sisi investasi PMA, realisasi pada tahun 2015 mencapai USD14.675.100, yang lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yaitu USD45.294.933. Perdagangan besar kecuali mobil dan sepeda motor serta perdagangan, reparasi dan perawatan mobil masih menjadi komponen terbesar dalam meningkatkan capaian realisasi investasi PMA di Kota Surabaya tahun 2015. Berdasarkan capaian realisasi investasi pertahun dan perkembangan ekonomi terkini maka nilai investasi Kota Surabaya pada tahun 2016 diperkirakan sebesar Rp Rp635.643.951.322 yang berasal dari PMDN dan sebesar Rp USD25.831.000 dari PMA. Untuk selengkapnya terkait realisasi investasi dan perkiraannya terangkum dalam tabel berikut.

Tabel 3.6  
Realisasi Nilai Investasi Kota Surabaya  
Tahun 2010-2015 dan Perkiraan Tahun 2016

| Tahun  | Jumlah Penanaman Modal |                   |
|--------|------------------------|-------------------|
|        | PMDN                   | PMA               |
| 2010   | Rp301.508.197.222      | USD42.571.713     |
|        |                        | Rp905.812.608.745 |
| 2011   | Rp725.625.178.209      | USD25.431.570     |
|        |                        | Rp301.508.197.222 |
| 2012   | Rp4.396.363.620.332    | USD12.176.402     |
|        |                        | Rp298.717.956.292 |
| 2013   | Rp490.271.432.498      | USD23.815.769     |
|        |                        | Rp91.883.698.021  |
| 2014   | Rp639.625.900.000      | USD45.294.933     |
|        |                        | Rp-               |
| 2015   | Rp828.416.500.000      | USD14.675.100     |
|        |                        | Rp-               |
| 2016** | Rp635.643.951.322      | USD25.831.000     |
|        |                        |                   |

Sumber data: BKPPM dan Bappeko Surabaya, 2016\*\*) Data Proyeksi Bappeko Surabaya

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi dan perencanaan pembangunan terkait investasi adalah *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR). Selain itu, analisis besaran *ICOR* juga dapat digunakan untuk melihat produktivitas dan efisiensi dari investasi yang dilakukan. Besaran *ICOR* menggambarkan seberapa banyak tambahan investasi yang diperlukan untuk menghasilkan tambahan 1 (satu) unit usaha. Oleh karena itu besaran *ICOR* digunakan untuk memperkirakan besarnya kebutuhan investasi untuk mencapai target pertumbuhan yang ditetapkan pada masa yang akan datang. Semakin kecil nilai *ICOR* semakin besar pula efisiensi dan produktivitas dari investasi yang ditanamkan. Sebaliknya, semakin besar nilai *ICOR* maka semakin rendah tingkat efisiensi dan produktivitas dari Investasi yang ditanamkan,

Tabel 3.7  
*Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kota Surabaya*  
 Tahun 2010-2013 dan Perkiraan Tahun 2015

| Uraian | 2011 | 2012 | 2013 | 2014**   | 2015**   |
|--------|------|------|------|----------|----------|
| ICOR   | 3,21 | 2,94 | 2,92 | 2,90-3,2 | 2,90-3,2 |

Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2016\*\*) Data Proyeksi Bappeko Surabaya

Rata-rata nilai ICOR Kota Surabaya sejak tahun 2011 hingga 2013 sebesar Angka tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata investasi yang ditanamkan di Kota Surabaya sudah cukup efisien. Berdasarkan teori, investasi dikatakan efisien jika memiliki nilai ICOR antara 3 – 4. Bahkan nilai ICOR Kota Surabaya tahun 2013 mencapai angka 2,92 atau dibawah angka 3 sehingga dapat disimpulkan bila investasi tersebut semakin lebih efisien. Pada tahun 2015 angka ICOR Kota Surabaya diperkirakan pada kisaran 2,90-3,2. Investasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktifitas ekonomi di Kota Surabaya, sehingga dapat mendorong peningkatan PDRB dan dapat memberikan *multiplier effect* yaitu membantu dalam perluasan lapangan pekerjaan.

#### f. Ekspor dan Impor

Kota Surabaya berdasarkan karakteristik dan lokasinya yang strategis memiliki peran sebagai kota bisnis, aktivitas perdagangan mulai dari perdagangan eceran maupun ritel berkembang pesat. Disamping itu, sebagai kota pelabuhan menjadi nilai tambah sebagai penghubung antar daerah khususnya wilayah Indonesia bagian timur dalam menunjang aktivitas perdagangan sehingga mendorong terjadinya ekspor impor barang dan jasa.

Tabel 3.8  
 Ekspor Kota Surabaya Tahun 2015 dan  
 Perkiraan Tahun 2015

| Tahun  |                       | 2015           | 2016**         |
|--------|-----------------------|----------------|----------------|
| Ekspor | Nilai (US \$)         | 16.452.486.419 | 17.885.497.986 |
|        | Tingkat Perubahan (%) | -8,71          | 8,71           |
| Impor  | Nilai (US \$)         | 14.888.180.928 | 16.030.104.405 |
|        | Tingkat Perubahan (%) | -12,71         | 7,67           |

Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2015 \*\*) Data Proyeksi Bappeko Surabaya



Pada tahun 2015 adanya tekanan yang cukup besar akibat melemahnya permintaan negara-negara mitra dagang utama Kota Surabaya, terutama seperti China, Amerika cukup menyerap kinerja ekspor Kota Surabaya. Mengingat tingginya besaran *share* ekspor Kota Surabaya ketiga negara tersebut terhadap total ekspor Kota Surabaya, maka perlambatan ekonomi di kawasan tersebut berpengaruh terhadap menurunnya kinerja ekspor Kota Surabaya. Disamping itu, penurunan harga komoditas internasional turut mendorong penyusutan kinerja ekspor Kota Surabaya pada tahun 2015 sebesar US\$16.452.486.419 yang menurun dibandingkan tahun 2014 yang sebesar US\$18.022.413.011.

Meskipun kinerja ekspor Kota Surabaya pada tahun 2015 mengalami penurunan, namun kinerja impor mengalami penurunan yang lebih dalam di mana kinerja impor Kota Surabaya pada tahun 2015 sebesar USD14.888.180.928 yang turun sebesar -12,71 persen dibanding tahun 2014 sebesar USD17.056.615.375. Pelemahan impor Kota Surabaya tersebut disebabkan karena melambatnya kinerja industri pengolahan serta nilai tukar rupiah yang mengalami depresiasi di beberapa waktu di tahun 2015. Penyusutan yang lebih dalam dari sisi impor membuat neraca perdagangan Kota Surabaya pada tahun 2015 mengalami surplus sebesar USD1.564.305.491.

Memperhatikan kinerja sebelumnya dan mempertimbangkan perkiraan ekonomi ke depan maka kinerja ekspor Kota Surabaya pada tahun 2016 diperkirakan sebesar USD17.885.497.986 sementara kinerja impor sebesar USD16.030.104.405.

#### **g. Tingkat pengangguran Terbuka**

Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di kota Surabaya pada tahun 2015 lebih tinggi dibandingkan dengan TPT Provinsi Jawa Timur dan TPT Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa, Kota Surabaya masih menjadi tujuan favorit bagi pencari kerja di daerah Jawa Timur, sehingga nilai TPT di kota Surabaya cenderung lebih tinggi dibandingkan daerah lain di Jawa Timur, maupun Provinsi Jawa Timur secara keseluruhan. Adapun perbandingan TPT di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan Nasional pada tabel berikut.

Tabel 3.9  
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur  
Tahun 2015 dan Perkiraan Tahun 2016

| Tahun  | Tingkat Pengangguran Terbuka |            |          |
|--------|------------------------------|------------|----------|
|        | Kota Surabaya                | Jawa Timur | Nasional |
| 2015   | 7,01                         | 4,47       | 6,18     |
| 2016** | 5,5 – 6,5                    | 4,11-5,00  | 5,2-5,5  |

Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2015 \*\*) Data Proyeksi Bappeko Surabaya

#### h. Incremental *Labour Output Ratio* (ILOR)

Indikator lain yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja perekonomian terhadap kesejahteraan masyarakat dalam hal ketenagakerjaan dapat diukur dari pengukuran ILOR. ILOR yang merupakan kepanjangan *Incremental Labour Output Ratio* menggambarkan sejauh mana pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat meningkatkan perluasan kesempatan kerja di suatu wilayah. ILOR dapat dilihat sebagai perbandingan antara perubahan jumlah penduduk usia kerja yang terserap dalam aktivitas ekonomi dengan penambahan output perekonomian suatu wilayah.

Berdasarkan Data BPS, nilai perhitungan ILOR Kota Surabaya selama kurun waktu 5 tahun angkanya cukup bervariasi. Nilai ILOR tertinggi terjadi pada tahun 2011 dan 2012 yaitu sebesar 0,03. Sementara ILOR terendah terjadi pada tahun 2013 yang mencapai 0,01. Kondisi ini memberikan arti bila kenaikan output pada tahun 2013 tidak dibarengi dengan penambahan penyerapan jumlah tenaga kerja. Melihat kondisi perekonomian terkini nilai ILOR Kota Surabaya pada tahun 2015 diperkirakan besarnya sama yaitu kisaran 0,01-0,02.

Tabel 3.10  
*Incremental Labour Output Ratio* (ILOR) Kota Surabaya  
 Tahun 2010-2013 dan Perkiraan Tahun 2015

| Uraian | 2011 | 2012 | 2013 | 2014**    | 2015**    |
|--------|------|------|------|-----------|-----------|
| ILOR   | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01-0,02 | 0,01-0,02 |

Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2016 \*\*) Data Proyeksi Bappeko Surabaya

### 3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 Dan Tahun 2016

#### a. Analisis Kondisi Internal Kota Surabaya

##### a.1. Kekuatan

**Pertama** : Perekonomian Kota Surabaya yang relatif stabil dan terjaga dari sisi variabel ekonomi makronya, menjadi kekuatan bagi fundamental perekonomian Surabaya untuk beberapa tahun mendatang. Mengingat Kota Surabaya menganut sistem *small open economy* maka tidak stabilnya ekonomi dunia tentunya berdampak terhadap kinerja perekonomian Kota Surabaya. Namun besarnya konsumsi masyarakat disertai meningkatnya daya beli masih menjadi potensi yang tinggi dalam mendorong perekonomian Kota Surabaya setiap tahunnya.

**Kedua** : Pesatnya pertumbuhan ekonomi dari kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, industri pengolahan dan penyediaan akomodasi dan makan minum masih menjadi salah satu kekuatan untuk menopang pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya tetap tinggi. Pesatnya pertumbuhan ekonomi kategori utama Kota Surabaya tersebut ditandai oleh maraknya bangunan mall-mall dan pusat perbelanjaan dan restoran yang tersebar di Kota Surabaya. Kondisi tersebut terjadi karena besarnya potensi dan daya dukung yang dimiliki Kota Surabaya seperti jumlah penduduk Kota Surabaya banyak, kondisi ekonomi yang aman dan kondusif, tingkat konsumsi yang tinggi, infrastruktur yang memadai menjadi daya tarik bagi pelaku-pelaku usaha baik ritel maupun eceran untuk berbisnis di Kota Surabaya.

**Ketiga** : Berdasarkan lokasinya yang strategis, Kota Surabaya merupakan kota pelabuhan dan kota penghubung sehingga Kota Surabaya berperan penting terhadap perekonomian nasional dan wilayah-wilayah lainnyakhususnya Indonesia bagian timur. Oleh karena itu, Kota Surabaya

memiliki keuntungan sebagai kota pelabuhan karena dapat meningkatkan aktivitas perdagangan di Kota Surabaya berkembang pesat sehingga mendorong terjadinya ekspor impor barang dan jasa.

**Keempat** : Kota Surabaya memiliki potensi yang besar khususnya berupasumber daya manusia. Adanya pembangunan smelter di Gresik dan pembangunan Pelabuhan Teluk Lamong di wilayah Surabaya barat diperkirakan akan berdampak besar terhadap meningkatnya perekonomian kota Surabaya di masa yang akan datang dilihat dari tumbuhnya lapangan usaha kategori transportasi dan pergudagangan; perdagangan; industri pengolahan dan kategori jasa.

**Kelima** : Sesuai kebijakan pemerintah pusat terkait program ketahanan pangan untuk intensifikasi produk pertanian di Jawa Timur yang berdampak terhadap pasokan dan ketersediaan komoditas pertanian bagi Kota Surabaya.

**Keenam** : Dukungan infrastruktur semakin ditingkatkan untuk menunjang kegiatan ekonomi di Kota Surabaya agar terus berkembang baik melalui perbaikan maupun peningkatan kapasitasnya, antara lain pembangunan jalan raya dan gorong-gorong. Pembangunan jalan raya bertujuan untuk memperlancar arus lalu lintas kendaraan sehingga dapat mengurangi biaya transportasi bagi pelaku usaha di Kota Surabaya. Tersedianya infrastruktur yang memadai diharapkan dapat meningkatkan investasi. Pembukaan jalan baru semacam jalan lingkaran barat, jalan lingkaran timur dan frontage Ahmad Yani, diharapkan dapat menghubungkan seluruh kawasan di Kota Surabaya. Sementara pembangunan gorong-gorong ditujukan untuk mengurangi terjadinya banjir di Kota Surabaya. Selain itu, rencana pembangunan Angkutan Massal Cepat (AMC) sebagai modal transportasi modern yang akan direalisasikan pada tahun 2018, diharapkan menjadi salah satu solusi menghadapi kemacetan.

**Keenam**: Sebagai pusat dari pemerintahan Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya memiliki fasilitas pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, perbankan dan jasa-jasa yang dapat menunjang perkembangan perekonomian kota. Selain itu, situasi keamanan yang sangat kondusif (jarang terjadi kerusuhan maupun gejolak politik) menjadi insentif bagi para

investor untuk berinvestasi di Kota Surabaya sehingga perkembangan dan situasi sosial ekonomi juga relatif terkendali.

**Ketujuh** : Kinerja pengelolaan keuangan Kota Surabaya lebih baik. Hal ini terlihat dari APBD Kota Surabaya yang meningkat di tahun 2014 dan 2015 masing-masing sebesar Rp6,05 triliun dan Rp6,6 triliun. Ditargetkan, di tahun 2017 APBD Kota Surabaya dapat mencapai Rp7,4 triliun dan semakin meningkat jumlahnya di tahun-tahun yang akan datang, seiring dengan perekonomian Kota yang semakin stabil. APBD ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat, pembiayaan dan pembangunan infrastruktur di Kota Surabaya.

**Kedelapan** : Struktur belanja pemerintah yang produktif, di mana Kondisi belanja daerah mengalami pertumbuhan sebagaimana pendapatan daerah. Ditinjau dari komposisi penggunaannya, komponen belanja pelayanan publik merupakan komponen yang cukup besar dalam menyerap belanja daerah. Hal itu menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya memberikan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan pembangunan Kota Surabaya dari berbagai aspek seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan lainnya.

## **a.2. Kelemahan**

**Pertama** : Jumlah penduduk Kota Surabaya yaitu sebanyak 2,9 juta jiwa, menjadikan Surabaya sebagai kota dengan jumlah penduduk terbesar di antara Kabupaten/Kota lainnya di Jawa Timur. Mekanisme pengendalian dan penataan jumlah penduduk ini perlu dilakukan agar sumberdaya manusianya semakin berkualitas. Jumlah penduduk yang tidak terkendali pada akhirnya dapat menjadi beban bagi pemerintah daerah dan memunculkan masalah-masalah perekonomian lainnya seperti kemiskinan, wilayah kumuh, kriminalitas dan sebagainya.

**Kedua** : Kota Surabaya memiliki tingkat pertumbuhan PDRB setiap tahunnya namun pertumbuhan tersebut tidak diiringi dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh tingkat pengangguran Terbuka (TPT) Kota Surabaya yang meningkat di tahun 2015,

yaitu sebesar 7,01%. Ditargetkan angka ini semakin menurun pada tahun 2016 dan tahun-tahun yang akan datang.

**Ketiga** : Jaminanketersediaan kebutuhan pangan dan bahan pokok Kota Surabaya yang masih rendah, mengingat Kota Surabaya bukan merupakan sentra penghasil melainkan pengguna sehingga kebutuhan bahan makanan Kota Surabaya seperti sayur-sayuran, beras dan komoditas pertanian lainnya dipenuhi oleh daerah lain. Kondisi tersebut yang mendorong Kota Surabaya memiliki ketergantungan yang tinggi daerah penghasil sehingga jika terjadi ketidakstabilan pasokan maupun distribusi pada daerah penghasil secara otomatis akan berpengaruh pada peningkatan harga bahan pokok di Kota Surabaya yang akhirnya dapat memicu kenaikan inflasi.

**Keempat** : inflasi Kota Surabaya diperkirakan sama seperti sasaran inflasi nasional yaitu pada kisaran 4%-5%. Berdasarkan pemicunya, inflasi Kota Surabaya mayoritas dipicu oleh kelompok bahan makanan (*volatile food*). Namun demikian inflasi kelompok *administered price* juga memiliki potensi besar dalam menyumbang inflasi Kota Surabaya seperti peningkatan harga BBM, penyesuaian tarif kereta api, tarif angkutan umum, harga bahan bakar rumah tangga mengingat jumlah dan komposisi masyarakat Kota Surabaya yang sebagian besar dalam golongan tarif penyesuaian. Selama ini tidak ada yang bisa dilakukan Pemerintah Daerah manapun ketika menghadapi inflasi yang disebabkan dari kelompok *administered price* (inflasi akibat kebijakan Pemerintah Pusat).

**Kelima** : Belum terealisasinya transportasi massal dalam kota yang murah dan cepat di Kota Surabaya sehingga sampai saat ini mayoritas penduduk Kota Surabaya lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi. Akibatnya, konsumsi bahan bakar kendaraan dan volume kendaraan di Kota Surabaya semakin meningkat. Hal ini memicu kemacetan di Kota Surabaya.

**Keenam** : Beban dan belanja infrastruktur Kota Surabaya relatif lebih besar dibandingkan Kabupaten/Kota lainnyadi Jawa Timur. Disadari bahwa ketersediaan infrastruktur dapat mempengaruhi aktivitas perekonomian pada suatu daerah dan selanjutnya berdampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber-sumber pendanaan yang mampu menopang pembiayaan infrastruktur Kota Surabaya kedepannya,

baik dalam format kerjasama dengan pihak swasta maupun mekanisme inovatif lain yang tersedia misalnya melalui surat berharga daerah maupun pinjaman atau pendanaan oleh pemerintah pusat.

**Ketujuh** : Kemudahan berbisnis di Kota Surabaya sebagai ibu kota Jawa Timur yang masih rendah dibanding negara-negara kompetitor. Berdasarkan data *Ease of Doing Business* tahun 2015, indikator iklim investasi di Kota Surabaya dianggap belum baik, dari sisi biaya yang dibutuhkan untuk memulai bisnis dan izin untuk mendirikan bangunan yang dianggap masih cukup lama.

## **b. Analisis Kondisi Eksternal**

### **b.1. Peluang**

**Pertama** : Kota Surabaya sebagai Ibu Kota dari Provinsi Jawa Timur akan memberikan andil besar dalam momen Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dengan adanya MEA tersebut menjadi peluang besar bagi Kota Surabaya untuk membuka jaringan yang lebih mudah dalam melakukan perdagangan internasional. Dengan demikian akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari berbagai aspek

**Kedua** : adanya arus barang dan jasa dalam MEA berpotensi pada melimpahnya barang dan jasa. Disatu sisi menjadi sebuah keuntungan bagi Kota Surabaya, yakni masyarakat Kota Surabaya mendapatkan barang dan jasa dengan mudah dari banyak aneka jenis baik dari sisi kualitas maupun harga. Sisi lainnya, diharapkan Kota Surabaya tidak hanya menjadi tujuan pasar melainkan juga memproduksi sendiri yang mampu bersaing baik dari produk barang dan jasa sertatenaga kerja yang terampil. Salah satu komoditas yang menjadi prioritas adalah produk-produk UKM sehingga Kota Surabaya perlu memperkuat daya saing dari industri UKM.

**Ketiga** : Potensi perekonomian Kota Surabaya yang cukup besar dan menjanjikan dengan berbagai daya dukung infrastruktur yang memadai menjadikan Kota Surabaya sebagai sasaran target investasi dari luar negeri. Disamping itu, ketersediaan dan kemudahan terhadap akses kredit perbankan turut mendukung kinerja investasi di Kota Surabaya.



**Keempat** : Kota Surabaya merupakan kota pelabuhan yang berperan sebagai pintu aktivitas perdagangan barang dan jasa di wilayah Indonesia bagian timur. Disamping itu, adanya pembangunan smelter di Gresik dan pembangunan Pelabuhan Teluk Lamong di wilayah barat semakin mempercepat dan mempermudah aktivitas perdagangan di Kota Surabaya sehingga adanya pengembangan infrastruktur yang semakin lengkap memberikan peluang yang sangat besar untuk menjadikan Kota Surabaya sebagai penghubung perdagangan barang dan jasa baik antara pulau, regional maupun perdagangan internasional.

## **b.2. Ancaman**

**Pertama** : Proses perbaikan ekonomi negara-negara maju masih berjalan lambat berimbas terhadap kinerja ekonomi negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Kondisi ini pada akhirnya juga akan berdampak pada perlambatan perekonomian Kota Surabaya pada sisi ekspor dan impor.

**Kedua** : Menurunnya harga komoditas di pasar internasional yang turut mempengaruhi kinerja ekspor Kota Surabaya yang berpotensi memperbesar defisit neraca perdagangan.

**Ketiga** : Masih tingginya nilai mata uang dolar terhadap rupiah berdampak pada peningkatan biaya impor yang lebih tinggi. Meningkatnya barang impor tersebut secara otomatis meningkatkan biaya produksi yang selanjutnya memicu inflasi.

## **c. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017 Dan 2018**

### **1) Produk Domestik Regional Bruto**

Pada tahun 2017 nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surabaya Atas Dasar Harga Konstan diperkirakan mencapai Rp365.220.600,22 juta. Nilai tersebut diperkirakan dikontribusi oleh peningkatan seluruh kategori lapangan usaha pembentuk PDRB Kota Surabaya khususnya kategori utama yaitu perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; industri pengolahan dan penyediaan akomodasi dan makan minum. Peningkatan tersebut diperkirakan sejalan dengan perkiraan membaiknya perekonomian Indonesia sehingga

mendorong kinerja konsumsi masyarakat dan kinerja ekspor Kota Surabaya yang meningkat selanjutnya akan mendorong kinerja lapangan usaha utama Kota Surabaya. Oleh karena itu, pada tahun 2018 nilai PDRB Kota Surabaya diperkirakan mencapai Rp388.610.226,11 juta. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.11.

Tabel 3.11  
Perkiraan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Surabaya  
Perkiraan Tahun 2017 dan 2018 (dalam Juta)

| Kategori                              | Uraian   | 2017**                | 2018**                |
|---------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| A                                     | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                            | 620.023,65            | 641.206,87            |
| B                                     | Pertambangan dan Penggalian                                    | 21.171,98             | 233.166,14            |
| C                                     | Industri Pengolahan  | 71.986.270,87         | 76.517.353,52         |
| D                                     | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 1.691.823,12          | 1.787.607,04          |
| E                                     | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 577.079,69            | 621.776,36            |
| F                                     | Konstruksi   | 35.807.460,53         | 38.083.802,16         |
| G                                     | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 104.033.972,40        | 110.676.192,40        |
| H                                     | Transportasi dan Pergudangan                                   | 18.052.529,67         | 19.119.623,12         |
| I                                     | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 52.373.762,03         | 55.648.984,38         |
| J                                     | Informasi dan Komunikasi                                       | 23.524.426,54         | 24.987.637,54         |
| K                                     | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 16.777.110,40         | 18.070.375,51         |
| L                                     | Real Estate  | 9.883.906,34          | 10.531.337,13         |
| M,N                                   | Jasa Perusahaan  | 8.388.555,20          | 8.976.896,22          |
| O                                     | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 4.559.509,47          | 4.818.766,80          |
| P                                     | Jasa Pendidikan  | 8.497.971,14          | 9.093.479,29          |
| Q                                     | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 2.844.814,37          | 2.945.665,51          |
| R,S,T,U                               | Jasa lainnya   | 5.580.212,81          | 5.856.356,11          |
| <b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b> |  | <b>365.220.600,22</b> | <b>388.610.226,11</b> |

Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2016 \*\*) Data Proyeksi Bappeko Surabaya

## 2) Pertumbuhan Sektoral

Sama seperti pola sebelumnya, perekonomian Kota Surabaya diperkirakan masih dikontribusi oleh kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; kategori industri pengolahan dan kategori penyediaan akomodasi dan makan minum. Pada kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor masih mampu berakselerasi seiring masih tingginya tingkat konsumsi masyarakat

Kota Surabaya. Disamping itu, diperkirakan membaiknya kondisi ekonomi mitra dagang juga turut mendorong pertumbuhan kategori utama Kota Surabaya ini. Sementara pada kategori industri pengolahan juga diperkirakan kembali tumbuh seiring tekanan biaya operasional yang berkurang dengan meredanya tekanan rupiah untuk permintaan bahan baku impor. Selengkapannya terkait kontribusi sektor ekonomi terhadap PDRB Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel 3.12.

Tabel 3.12  
Perkiraan Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Surabaya  
Perkiraan Tahun 2017 dan 2018 ADHK (dalam Persen)

| Kategori                              | Uraian   | 2017* (%)     | 2018** (%)    |
|---------------------------------------|--|---------------|---------------|
| A                                     | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                            | 0,17          | 0,17          |
| B                                     | Pertambangan dan Penggalian                                    | 0,01          | 0,01          |
| C                                     | Industri Pengolahan  | 19,71         | 19,69         |
| D                                     | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 0,42          | 0,46          |
| E                                     | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 0,15          | 0,16          |
| F                                     | Konstruksi   | 9,76          | 9,80          |
| G                                     | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 28,52         | 28,48         |
| H                                     | Transportasi dan Pergudangan                                   | 4,95          | 4,92          |
| I                                     | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 14,36         | 14,32         |
| J                                     | Informasi dan Komunikasi                                       | 6,45          | 6,43          |
| K                                     | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 4,60          | 4,65          |
| L                                     | Real Estate  | 2,71          | 2,71          |
| M,N                                   | Jasa Perusahaan  | 2,30          | 2,31          |
| O                                     | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 1,25          | 1,24          |
| P                                     | Jasa Pendidikan  | 2,33          | 2,34          |
| Q                                     | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 0,78          | 0,76          |
| R,S,T,U                               | Jasa lainnya   | 1,53          | 1,51          |
| <b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b> |  | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |

Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2016 \*\*) Data Proyeksi Bappeko Surabaya

### 3) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya pada tahun 2017 diperkirakan meningkat namun peningkatannya mencapai 5,9%-6,3%. Nilai pertumbuhan tersebut diperkirakan akan meningkat kembali pada tahun 2018 mencapai 6,0%-6,5% dengan asumsi perekonomian domestik dan luar negeri tetap stabil. Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya diperkirakan didorong oleh

tingginya tingkat konsumsi masyarakat dan penanaman modal baik non bangunan maupun bangunan. Dari sisi lapangan usaha, nilai rupiah yang mulai stabil diperkirakan akan mendorong kinerja kategori utama Kota Surabaya dan upaya percepatan pembangunan infrastruktur massal berpotensi tinggi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya ke depan.

Tabel 3.13  
Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya  
Tahun 2017 dan 2018(dalam Persen)

| Uraian                  | 2017**  | 2018**  |
|-------------------------|---------|---------|
| Pertumbuhan Ekonomi (%) | 5,9-6,3 | 6,0-6,5 |

Sumber data: \*\*) Data Proyeksi Bappeko Surabaya

#### 4) Tingkat Inflasi

Inflasi Kota Surabaya pada tahun 2017 diperkirakan sesuai dengan arah inflasi nasional yaitu pada kisaran 4,0% -5,0% dengan asumsi tidak ada gejolak inflasi akibat dari kebijakan pusat. Berdasarkan kelompoknya, inflasi Kota Surabaya ke depan memiliki pola yang sama, di mana lebih banyak dikontribusi oleh inflasi dari kelompok *volatile food* mengingat ketergantungan kota surabaya dengan kota-kota penghasil produk pertanian seperti malang, Banyuwangi, Nganjuk, kediri dan kota lainnya sangatlah tinggi maka terganggunya ketersediaan dan arus distribusi secara otomatis akan berpengaruh terhadap inflasi Kota Surabaya. akan produk pertanian. Pada tahun 2018 inflasi Kota Surabaya diperkiarkan juga selaras dengan arah inflasi nasional yaitu pada kisaran 4,0% -5,0%.

Tabel 3.14  
Perkiraan Inflasi Kota Surabaya  
Tahun 2017 dan 2018(dalam Persen)

| Uraian      | 2017**   | 2018**   |
|-------------|----------|----------|
| Inflasi (%) | 4,0 -5,0 | 4,0 -5,0 |

Sumber data: \*\*) Data Proyeksi Bappeko Surabaya

#### 5) Tingkat Investasi (PMA dan PMDN)

Kota Surabaya memiliki potensi yang tinggi dalam berbagai aspek baik ekonomi, demografi serta daya dukung infrastruktur, yaitu softinfrastruktur maupun hard infrastruktur. Berdasarkan faktor-faktor

tersebut, Kota Surabaya banyak menjadi target investasi baik dari dalam negeri maupun dari penanaman modal asing. Oleh karena itu, investasi Kota Surabaya pada tahun 2017 dan 2018 diperkirakan meningkat baik yang berasal dari penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. Pada tahun 2017 investasi Kota Surabaya diperkirakan sebesar Rp718,63milyar yang berasal dari PMDN sementara dari PMA sebesar USD 27,79 juta. Performa positif ini diperkirakan akan terus berlanjut di tahun 2018 dengan capaian investasi sebesar Rp765,42 milyar PMDN sementara dari PMA sebesar USD33,18 juta.

Tabel 3.15  
Proyeksi Nilai Investasi PMA dan PMDN Kota Surabaya  
Tahun 2017 dan 2018

| Tahun  | Nilai Investasi         |                |
|--------|-------------------------|----------------|
|        | PMDN ( dalam Milyar Rp) | PMA ( JutaUSD) |
| 2017** | 718,63                  | 27,79          |
| 2018** | 765,42                  | 33,18          |

Sumber data: \*\*) Data Proyeksi Bappeko Surabaya

## 6) Ekspor dan Impor

Sejalan dengan perkiraan perbaikan sebagian mitra dagang Kota Surabaya serta meredanya tekanan nilai tukar rupiah terhadap dollar amerika diperkirakan mampu mengakselerasi kinerja ekspor Kota Surabaya ke depan. Oleh karena itu, pada tahun 2017 kinerja ekspor Kota Surabaya diperkirakan mencapai US\$19.770.629.474 sementara kinerja impor diperkirakan sebesar US\$17.572.200.449 Kemudian kinerja ekspor impor pada tahun 2018 diperkirakan masing-masing mencapai US\$22.583.990.048 untuk ekspor dan US\$19.591.246.281 untuk impor. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel

Tabel 3.16  
Perkiraan Ekspor – Impor Kota Surabaya  
Tahun 2017 dan 2018 (dalam US\$)

| Tahun  | 2017**         | 2018**         |
|--------|----------------|----------------|
| Ekspor | 19.770.629.474 | 22.583.990.048 |
| Impor  | 17.572.200.449 | 19.591.246.281 |

Sumber data: \*\*) Data Proyeksi Bappeko Surabaya

## 7) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Salah satu indikator makro penting lainnya adalah tingkat pengangguran terbuka (TPT). Dengan semakin membaiknya tren pertumbuhan ekonomi, relatif stabilnya angka inflasi diharapkan tingkat pengangguran di Kota Surabaya juga menurun. Oleh karena itu, tingkat pengangguran terbuka Kota Surabaya pada tahun 2017 dan 2018 diperkirakan mengalami penurunan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel

Tabel 3.17  
Perkiraan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya  
Tahun 2017 dan 2018 (dalam persen)

| Tahun  | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) |
|--------|----------------------------------|
| 2017** | 5,5 - 6,5                        |
| 2018** | 5,5 - 6,5                        |

Sumber data: \*\*) Data Proyeksi Bappeko Surabaya

## 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

### 3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan

#### A. Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah. PAD Kota Surabaya mengalami peningkatan yang cukup signifikan hal ini dikarenakan adanya peningkatan dari realisasi pajak daerah yang sangat besar.

Pendapatan daerah kota Surabaya terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan daerah sebagai berikut :

Tabel 3.18  
Kontribusi PAD terhadap Pendapatan daerah  
Tahun 2014-2017

| No | Tahun          | Pendapatan Daerah | Pendapatan Asli Daerah | Kontribusi |
|----|----------------|-------------------|------------------------|------------|
| 1  | Realisasi 2014 | 6.052.441.118.039 | 3.307.323.863.978      | 54,64%     |
| 2  | Realisasi 2015 | 6.619.031.160.937 | 4.035.649.478.398      | 60,97%     |
| 3  | Target 2016    | 6.977.961.370.513 | 3.839.158.391.769      | 55,02%     |
| 4  | Proyeksi 2017  | 7.242.392.799.604 | 4.132.183.835.413      | 57,06%     |

Sumber data : BPKPD dan Bappeko diolah, 2016.

Rincian obyek PAD berdasarkan kontribusi obyek pendapatan adalah sebagai berikut :

1. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD pada tahun 2016 sebesar 73,39% dan pada tahun 2017 sebesar 75,69% atau mengalami peningkatan sebesar 2,29% (tabel 3.19).

Tabel 3.19  
Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD  
Tahun 2014 – 2017

| No | Tahun          | Pendapatan Asli Daerah | Pajak Daerah      | Kontribusi |
|----|----------------|------------------------|-------------------|------------|
| 1  | Realisasi 2014 | 3.307.323.863.978      | 2.427.647.860.148 | 73,40%     |
| 2  | Realisasi 2015 | 4.035.649.478.398      | 2.738.899.424.558 | 67,87%     |
| 3  | Target 2016    | 3.839.158.391.769      | 2.817.640.000.000 | 73,39%     |
| 4  | Proyeksi 2017  | 4.132.183.835.413      | 3.127.522.197.439 | 75,69%     |

Sumber data : BPKPD dan Bappeko diolah, 2016.

2. Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD pada tahun 2016 sebesar 9,70% dan 8,63% pada tahun 2017, atau mengalami penurunan 1,07% (tabel 3.20)

Tabel 3.20  
Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD  
Tahun 2014 – 2017

| No | Tahun          | Pendapatan Asli Daerah | Retribusi Daerah | Kontribusi |
|----|----------------|------------------------|------------------|------------|
| 1  | Realisasi 2014 | 3.307.323.863.978      | 270.112.725.497  | 8,17%      |
| 2  | Realisasi 2015 | 4.035.649.478.398      | 537.319.752.463  | 13,31%     |
| 3  | Target 2016    | 3.839.158.391.769      | 372.365.814.285  | 9,70%      |
| 4  | Proyeksi 2017  | 4.132.183.835.413      | 356.434.317.471  | 8,63%      |

Sumber data : BPKPD dan Bappeko diolah, 2016.

3. Kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD pada tahun 2016 sebesar 3,34% dan pada tahun 2017 sebesar 4,02% atau mengalami peningkatan 0,67% (tabel 3.21).



Tabel 3.21  
Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang  
Dipisahkan terhadap PAD  
Tahun 2014 – 2017

| No | Tahun          | Pendapatan Asli Daerah | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | Kontribusi |
|----|----------------|------------------------|---|------------|
| 1  | Realisasi 2014 | 3.307.323.863.978      | 120.856.635.210                                   | 3,65%      |
| 2  | Realisasi 2015 | 4.035.649.478.398      | 135.324.221.731                                   | 3,35%      |
| 3  | Target 2016    | 3.839.158.391.769      | 128.374.577.382                                   | 3,34%      |
| 4  | Proyeksi 2017  | 4.132.183.835.413      | 165.911.576.799                                   | 4,02%      |

Sumber data : BPKPD dan Bappeko diolah, 2016.

4. Kontribusi lain-lain PAD yang sah terhadap total PAD pada tahun 2016 sebesar 13,56% sedangkan Tahun 2017 diproyeksikan 11,67% atau mengalami penurunan sebesar 1,89%. (tabel 3.22).

Tabel 3.22  
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terhadap  
Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
Tahun 2014 – 2017

| No | Tahun          | Pendapatan Asli Daerah | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | Kontribusi |
|----|----------------|------------------------|---|------------|
| 1  | Realisasi 2014 | 3.307.323.863.978      | 488.706.643.123                           | 14,78%     |
| 2  | Realisasi 2015 | 4.035.649.478.398      | 624.106.079.645                           | 15,46%     |
| 3  | Target 2016    | 3.839.158.391.769      | 520.778.000.102                           | 13,56%     |
| 4  | Proyeksi 2017  | 4.132.183.835.413      | 482.315.743.703                           | 11,67%     |

Sumber data : BPKPD dan Bappeko diolah, 2016.

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Pada Tahun 2016 kontribusi Dana Perimbangan sebesar 24,79% sedangkan proyeksi Tahun 2017 sebesar 28,75% atau meningkat sebesar 3,96% sebagaimana tersaji pada tabel 3.23.

Tabel 3.23  
Kontribusi Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Daerah  
Tahun 2014 – 2017

| No | Tahun          | Pendapatan Daerah | Dana Perimbangan  | Kontribusi |
|----|----------------|-------------------|-------------------|------------|
| 1  | Realisasi 2014 | 6.052.441.118.039 | 1.488.374.891.545 | 24,59%     |
| 2  | Realisasi 2015 | 6.619.031.160.937 | 1.384.772.424.683 | 20,92%     |
| 3  | Target 2016    | 6.977.961.370.513 | 1.729.650.056.310 | 24,79%     |
| 4  | Proyeksi 2017  | 7.242.392.799.604 | 2.082.207.947.854 | 28,75%     |

Sumber data : BPKPD dan Bappeko diolah, 2016

Adapun gambaran dana perimbangan berdasarkan obyek pendapatannya diuraikan sebagai berikut:

1. Kontribusi bagi hasil pajak terhadap Dana Perimbangan pada Tahun 2016 sebesar 20,46% sedangkan Tahun 2017 sebesar 18,09% atau menurun 2,37% sebagaimana tersaji pada tabel 3.24.

Tabel 3.24  
Kontribusi Bagi Hasil Pajak terhadap Dana Perimbangan  
Tahun 2014 – 2017

| No | Tahun          | Dana Perimbangan  | Bagi Hasil Pajak | Kontribusi |
|----|----------------|-------------------|------------------|------------|
| 1  | Realisasi 2014 | 1.488.374.891.545 | 246.211.550.026  | 16,54%     |
| 1  | Realisasi 2015 | 1.384.772.424.683 | 206.314.915.900  | 14,90%     |
| 2  | Target 2016    | 1.729.650.056.310 | 353.963.679.000  | 20,46%     |
| 3  | Proyeksi 2017  | 2.082.207.947.854 | 376.768.897.269  | 18,09%     |

Sumber data : BPKPD dan Bappeko diolah, 2016.

2. Kontribusi bagi hasil bukan pajak terhadap dana perimbangan Tahun 2016 sebesar 1,87% sedangkan Tahun 2017 sebesar 1,44% atau menurun 0,43% sebagaimana tersaji pada tabel 3.25.

Tabel 3.25  
Kontribusi Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Dana Perimbangan  
Tahun 2014– 2017

| No | Tahun          | Dana Perimbangan  | Bagi Hasil bukan Pajak | Kontribusi |
|----|----------------|-------------------|------------------------|------------|
| 1  | Realisasi 2014 | 1.488.374.891.545 | 21.419.313.519         | 1,44%      |
| 2  | Realisasi 2015 | 1.384.772.424.683 | 23.946.332.783         | 1,73%      |
| 3  | Target 2016    | 1.729.650.056.310 | 32.336.748.633         | 1,87%      |
| 4  | Proyeksi 2017  | 2.082.207.947.854 | 29.926.061.989         | 1,44%      |

Sumber data : BPKPD dan Bappeko diolah, 2016

3. Kontribusi Dana Alokasi Umum terhadap Dana Perimbangan Tahun 2016 sebesar 71,31% sedangkan Tahun 2017 sebesar 55,74% atau menurun 15,57% sebagaimana tersaji pada tabel 3.26.

Tabel 3.26  
Kontribusi Dana Alokasi Umum terhadap Dana Perimbangan  
Tahun 2014 – 2017

| No | Tahun          | Dana Perimbangan  | Dana Alokasi Umum | Kontribusi |
|----|----------------|-------------------|-------------------|------------|
| 1  | Realisasi 2014 | 1.488.374.891.545 | 1.200.889.359.000 | 80,68%     |
| 2  | Realisasi 2015 | 1.384.772.424.683 | 1.147.385.486.000 | 82,86%     |
| 3  | Target 2016    | 1.729.650.056.310 | 1.233.380.404.000 | 71,31%     |
| 4  | Proyeksi 2017  | 2.082.207.947.854 | 1.160.532.019.916 | 55,74%     |

Sumber data: BPKPD dan Bappeko diolah, 2016

4. Kontribusi Dana Alokasi Khusus terhadap Dana Perimbangan Tahun 2016 sebesar 6,42% sedangkan Tahun 2017 sebesar 24,73% kontribusinya meningkat signifikan hal ini dikarenakan untuk Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru yang berada pada kode rekening Dana penyesuaian dan otonomi khusus pada Tahun 2016 dipindahkan pada kode rekening DAK pada PAK Tahun 2016.

Tabel 3.27  
Kontribusi Dana Alokasi Khusus terhadap Dana Perimbangan  
Tahun 2014 – 2017

| No | Tahun          | Dana Perimbangan  | Dana Alokas Khusus | Kontribusi |
|----|----------------|-------------------|--------------------|------------|
| 1  | Realisasi 2014 | 1.488.374.891.545 | 19.854.669.000     | 1,33%      |
| 2  | Realisasi 2015 | 1.384.772.424.683 | 7.125.690.000      | 0,51%      |
| 3  | Target 2016    | 1.729.650.056.310 | 111.064.651.680    | 6,42%      |
| 4  | Proyeksi 2017  | 2.082.207.947.854 | 514.980.968.680    | 24,73%     |

Sumber data : BPKPD dan Bappeko diolah, 2016.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Dana Bagi Hasil Lainnya serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pada Tahun 2016 kontribusi Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 20,19% sedangkan proyeksi Tahun 2017 sebesar 13,89% atau menurun sebesar 6,31% sebagaimana tersaji pada tabel 3.28.

Tabel 3.28  
Kontribusi Lain-lain Pendapatan Yang Sah  
Tehadap Pendapatan Daerah  
Tahun 2014 – 2017

| No | Tahun          | Pendapatan Daerah | Lain-lain<br>Pendapatan Daerah<br>yang Sah | Kontribusi |
|----|----------------|-------------------|--|------------|
| 1  | Realisasi 2014 | 6.052.441.118.039 | 1.256.742.362.516                          | 20,76%     |
| 2  | Realisasi 2015 | 6.619.031.160.937 | 1.198.609.257.856                          | 18,11%     |
| 3  | Target 2016    | 6.977.961.370.513 | 1.409.152.922.343                          | 20,19%     |
| 4  | Proyeksi 2017  | 7.242.392.799.604 | 1.028.001.016.337                          | 14,19%     |

Sumber data: BPKPD dan Bappeko diolah, 2016.

Adapun gambaran lain-lain pendapatan daerah yang sah berdasarkan objek pendapatannya diuraikan sebagai berikut:

1. Kontribusi proyeksi dana bagi hasil pajak provinsi dan pemerintah daerah lainnya terhadap lain-lain pendapatan daerah yang sah Tahun 2016 sebesar 70,88% sedangkan Tahun 2017 sebesar 99,53% maka kontribusinya mengalami peningkatan sebesar 28,65% sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 3.29  
Kontribusi Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya terhadap  
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah  
Tahun 2014 – 2017

| No | Tahun          | Lain-lain Pendapatan<br>Daerah yang Sah | Dana Bagi Hasil<br>Pajak Provinsi dan<br>Pemerintah Daerah<br>Lainnya | Kontribusi |
|----|----------------|---|---|------------|
| 1  | Realisasi 2014 | 1.256.742.362.516                       | 779.576.048.153   | 62,03%     |
| 2  | Realisasi 2015 | 1.198.609.257.856                       | 707.673.658.856   | 59,04%     |
| 3  | Target 2016    | 1.409.152.922.343                       | 998.877.266.211   | 70,88%     |
| 4  | Proyeksi 2017  | 1.028.001.016.337                       | 1.023.211.516.337   | 99,53%     |

Sumber data: BPKPD dan Bappeko diolah, 2016.

2. Kontribusi lain-lain pendapatan daerah yang sah untuk Dana Insentif Daerah terhadap lain-lain pendapatan daerah yang sah Tahun 2016 sebesar 0,35% sedangkan Tahun 2017 sebesar 0,47% maka kontribusinya mengalami peningkatan sebesar 0,11% sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3.30  
Kontribusi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap  
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah  
Tahun 2014 – 2017

| No | Tahun          | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | Kontribusi |
|----|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| 1  | Realisasi 2014 | 1.256.742.362.516                    | 23.629.261.000                       | 1,88%      |
| 2  | Realisasi 2015 | 1.198.609.257.856                    | 24.802.882.000                       | 2,07%      |
| 3  | Target 2016    | 1.409.152.922.343                    | 5.000.000.000                        | 0,35%      |
| 4  | Proyeksi 2017  | 1.028.001.016.337                    | 4.789.500.000                        | 0,47%      |

Sumber data: BPKPD dan Bappeko diolah, 2016.

Berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah yang kemudian dituangkan ke dalam tabel 3.31.

Tabel 3.31  
Pendapatan Daerah Kota Surabaya  
Realisasi 2014-2015, Target 2016, Proyeksi 2017

| No                       | Uraian  | Realisasi 2014           | Realisasi 2015           | Target 2016              | Proyeksi 2017            |
|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>PENDAPATAN DAERAH</b> |   |                          |                          |                          |                          |
| <b>1</b>                 | <b>Pendapatan Asli Daerah</b>                                     | <b>3.307.323.863.978</b> | <b>4.035.649.478.398</b> | <b>3.839.158.391.769</b> | <b>4.132.183.835.412</b> |
| a.                       | Pajak Daerah  | 2.427.647.860.148        | 2.738.899.424.558        | 2.817.640.000.000        | 3.127.522.197.439        |
| b.                       | Retribusi Daerah  | 270.112.725.497          | 537.319.752.463          | 372.365.814.285          | 356.434.317.471          |
| c.                       | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan                 | 120.856.635.210          | 135.324.221.731          | 128.374.577.382          | 165.911.576.799          |
| d.                       | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah                         | 488.706.643.123          | 624.106.079.645          | 520.778.000.102          | 482.315.743.703          |
| <b>2</b>                 | <b>Dana Perimbangan</b>   | <b>1.488.374.891.545</b> | <b>1.384.772.424.683</b> | <b>1.729.650.056.310</b> | <b>2.082.207.947.854</b> |
| a.                       | Dana Bagi Hasil Pajak   | 246.211.550.026          | 206.314.915.900          | 353.963.679.000          | 376.768.897.269          |
| b.                       | Bagi Hasil Bukan Pajak  | 21.419.313.519           | 23.946.332.783           | 31.241.321.630           | 29.926.061.989           |
| c.                       | Dana Alokasi Umum   | 1.200.889.359.000        | 1.147.385.486.000        | 1.233.380.404.000        | 1.160.532.019.916        |
| d.                       | Dana Alokasi Khusus   | 19.854.669.000           | 7.125.690.000            | 111.064.651.680          | 514.980.968.680          |
| <b>3</b>                 | <b>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>                       | <b>1.256.742.362.516</b> | <b>1.198.609.257.856</b> | <b>1.409.152.922.434</b> | <b>1.028.001.016.337</b> |
| a.                       | Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah Lainnya | 779.576.048.153          | 707.673.658.856          | 998.877.266.211          | 1.023.211.516.337        |
| b.                       | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus                               | 448.340.154.000          | 463.025.317.000          | 403.916.317.000          |                          |
| c.                       | Bantuan Keuangan dari Provinsi Pemerintah Daerah Lainnya          | 2.836.580.000            | 3.107.400.000            | 1.359.339.223            |                          |
| d.                       | Dana Bagi Hasil Lainnya   | 2.360.319.363            |                          |                          |                          |
| e.                       | Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah                              | 23.629.261.000           | 24.802.882.000           | 5.000.000.000            | 4.789.500.000            |
| <b>JUMLAH PENDAPATAN</b> |   | <b>6.052.441.118.039</b> | <b>6.619.031.160.937</b> | <b>6.977.961.370.513</b> | <b>7.242.392.799.604</b> |

Sumber : BPKPD dan Bappeko diolah, 2016.

Pendapatan daerah berdasarkan realisasi tahun 2015 sebesar Rp6.619.031.160.937,- dan target tahun 2016 sebesar Rp6.977.961.370.513,- maka proyeksi tahun 2017 sebesar Rp7.242.392.799.604,- atau meningkat sebesar Rp264.431.429.091,- (3,79%) dapat dijelaskan dalam rincian sebagai berikut:

**a. Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan realisasi Tahun 2015 sebesar Rp4.035.649.478.398,- dan target tahun 2016 sebesar Rp3.839.158.391.769,- maka Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017 diperkirakan sebesar Rp4.132.183.835.413,- meningkat sebesar Rp293.025.443.644,- atau 7,63%.

Adapun sumber-sumber PAD berdasarkan obyek pendapatannya diuraikan sebagai berikut:

**1. Pajak Daerah**

Jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kota Surabaya terdiri dari 9 jenis yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), pajak parkir, pajak air tanah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pemungutan jenis pajak tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah serta Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.

Berdasarkan realisasi pajak daerah tahun 2015 sebesar Rp2.738.899.424.558,- dan target tahun 2016 sebesar Rp2.817.640.000,- maka proyeksi tahun 2017 sebesar Rp3.127.522.197.439,-

**2. Retribusi Daerah**

Berdasarkan realisasi retribusi daerah tahun 2015 sebesar Rp537.319.752.463,- dan target tahun 2016 sebesar Rp372.365.814.285,- maka proyeksi tahun 2017 sebesar Rp356.434.317.471,-

### **3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Berdasarkan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2015 sebesar Rp135.324.221.731,- dan target tahun 2016 sebesar Rp128.374.577.382,- maka proyeksi tahun 2017 sebesar Rp165.911.576.799,-

### **4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah**

Berdasarkan realisasi tahun 2015 sebesar Rp624.106.079.645,- dan target tahun 2016 sebesar Rp520.778.000.102,- maka proyeksi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah tahun 2017 sebesar Rp482.315.743.703,-

#### **b. Dana Perimbangan**

Dana Perimbangan perumusan dasar alokasi pembagiannya sesuai dengan Undang-undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Realisasi tahun 2015 sebesar Rp1.384.772.424.683,- dan target tahun 2016 sebesar Rp1.729.650.056.310,- maka tahun 2017 diproyeksikan sebesar Rp2.082.207.947.854,- terjadi peningkatan sebesar Rp352.557.891.544,- atau 20,38% dari tahun 2016.

Adapun rincian dana perimbangan menurut obyek pendapatan sebagai berikut :

#### **1. Dana Bagi Hasil Pajak**

Berdasarkan realisasi tahun 2015 sebesar Rp206.314.915.900,- dan target tahun 2016 sebesar Rp353.963.679.000,- maka proyeksi tahun 2017 sebesar Rp376.768.897.269,-.

#### **2. Bagi Hasil Bukan Pajak**

Berdasarkan realisasi tahun 2015 sebesar Rp23.946.332.783,- dan target tahun 2016 sebesar Rp31.241.321.630,- maka proyeksi tahun 2017 sebesar Rp29.926.061.989,-.

3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan realisasi tahun 2015 sebesar Rp1.147.385.486.000,- dan target tahun 2016 sebesar Rp1.233.380.404.000,- maka proyeksi tahun 2017 sebesar Rp1.160.532.019.916,-

4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Berdasarkan realisasi tahun 2015 sebesar Rp7.125.690.000,- dan target tahun 2016 sebesar Rp111.064.651.680,- maka proyeksi tahun 2017 sebesar Rp514.980.968.680,-

**c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Berdasarkan target Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah realisasi tahun 2015 sebesar Rp1.198.609.257.856,- dan target tahun 2016 sebesar Rp1.409.152.922.434,- maka tahun 2017 diproyeksikan sebesar Rp1.028.001.016.337,- atau mengalami penurunan sebesar Rp381.151.906.097,- (27.05%).

Sumber-sumber pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah meliputi:

- 1) Perolehan pendapatan dari bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah berdasarkan realisasi tahun 2015 sebesar Rp707.673.658.856,- dan target tahun 2016 sebesar Rp998.877.266.211,- maka tahun 2017 diproyeksikan tetap yaitu sebesar Rp1.023.211.516.337,- .
- 2) Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah yaitu dari Dana Insentif Daerah realisasi tahun 2015 sebesar Rp24.802.882.000,- target tahun 2016 sebesar Rp5.000.000.000,- maka proyeksi tahun 2017 diproyeksikan sebesar Rp4.789.500.000,- karena Kota Surabaya berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan memperoleh penilaian Wajar Tanpa Pengecualian.



### 3.2.1.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

#### Arah kebijakan pendapatan daerah Kota Surabaya tahun 2017

1. Pengembangan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas, efisiensi dan transparan;
2. Peningkatan kualitas pelayanan dengan mengembangkan konsep pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi (TI) melalui penyederhanaan sistem dan prosedur serta memberikan banyak alternatif model layanan pembayaran kepada masyarakat ;
3. optimalisasi PAD sebagai upaya membangun kemandirian keuangan daerah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
4. peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait penerimaan dana perimbangan dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah;
5. Optimalisasi peran dan kontribusi BUMD pada PAD melalui pembinaan tata kelola BUMD yang efektif dan efisien.

#### Strategi pencapaian Pendapatan Daerah Kota Surabaya Tahun 2017

##### meliputi:

1. *Updating* data pajak dan retribusi daerah dalam mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
2. Mengembangkan pelayanan pajak daerah dengan pembayaran pajak online
3. Melakukan evaluasi terhadap potensi dan regulasi penetapan tarif pendapatan dari pajak dan retribusi daerah sesuai yang diamanatkan di dalam Undang-undang 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
4. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait penerimaan dana perimbangan dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah secara intensif;
5. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

6. Mengoptimalkan penerimaan Dana Perimbangan dengan cara mengirimkan update data-data fiskal dan karakteristik wilayah kepada Pemerintah Pusat.

### 3.2.1.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Arah Kebijakan Belanja Daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

.Berdasarkan visi Kota Surabaya Tahun 2016- 2021 yaitu “**Surabaya Kota Sentosa yang Berkarakter dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi**”, Belanja Daerah Kota Surabaya pada 2017 diarahkan untuk :

1. Menjamin terlaksananya program skala besar dan prioritas;
2. Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan dasar pada masyarakat sesuai dengan prioritas pembangunan yang sudah ditetapkan;
3. Pemanfaatan belanja daerah secara efisien dan efektif yang diarahkan pada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dengan menjaga proporsi belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung;
4. Transparansi pengelolaan belanja daerah dengan didukung sistem informasi yang terintegrasi, meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
5. Optimalisasi pemanfaatan belanja yang bersumber dari pendapatan khusus (Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pajak Rokok, Dana Insentif Daerah dan BLUD) untuk menstimulasi capaian target kinerja sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;

6. Menerapkan sistem manajemen kinerja pegawai melalui Pemberian Tunjangan Profesi Pendidik kepada Pegawai Negeri Sipil Guru dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) non Guru;
7. Meningkatkan aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas pelayanan publik;
8. Menerapkan reformasi birokrasi dan meningkatkan kecerdasan intelektual, mental spiritual dan ketrampilan SDM dalam rangka meningkatkan pelaksanaan program, kegiatan, dan pelayanan kepada masyarakat;
9. Alokasi belanja langsung dioptimalkan pada belanja modal dan belanja barang dan jasa untuk menstimulasi pertumbuhan sektor riil.

Perkiraan belanja tahun 2017 sebesar Rp8.179.056.980.753,- yang terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp2.418.291.491.012,- (29% dari total belanja)
2. Belanja Langsung sebesar Rp5.760.765.489.741,- (71% dari total belanja)

Berdasarkan realisasi belanja tidak langsung tahun 2015 dan target APBD 2016 maka perkiraan belanja tidak langsung tahun 2017 sebesar Rp2.418.291.012,- dengan rincian :

1. Belanja Pegawai sebesar Rp2.291.060.757.818,-
2. Belanja Subsidi sebesar Rp19.005.408.000,-
3. Belanja Hibah sebesar Rp95.398.455.891,-
4. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sebesar Rp750.000.000,-
5. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sebesar Rp2.076.869.303,-
6. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.10.000.000.000,-

Adapun realisasi belanja daerah tahun 2015 serta target belanja daerah tahun 2016 dan proyeksi Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.32  
Belanja Daerah Kota Surabaya  
Realisasi Tahun 2014-2015, Target 2016, Estimasi 2017

| No                          | Uraian   | Realisasi 2014           | Realisasi 2015           | Target 2016              | Proyeksi 2017            |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>1</b>                    | <b>Belanja Tidak Langsung</b>  | <b>2.115.708.274.320</b> | <b>2.202.272.347.768</b> | <b>2.372.326.891.053</b> | <b>2.418.291.491.012</b> |
| a.                          | Belanja Pegawai  | 1.842.969.821.699        | 1.949.428.530.122        | 2.241.967.802.267        | 2.291.060.757.818        |
| b.                          | Belanja Subsidi  |                          |                          | 19.005.408.000           | 19.005.408.000           |
| c.                          | Belanja Hibah  | 271.860.862.621          | 252.111.246.646          | 98.660.397.981           | 95.398.455.891           |
| d.                          | Belanja Bantuan Sosial   | 89.670.000               | -                        | -                        | -                        |
| e.                          | Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa          | -                        | -                        | 610.626.050              | 750.000.000              |
| f.                          | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa | 787.920.000              | 732.571.000              | 2.082.656.755            | 2.076.869.303            |
| g.                          | Belanja Tidak Terduga  | -                        | -                        | 10.000.000.000           | 10.000.000.000           |
| <b>2</b>                    | <b>Belanja Langsung</b>  | <b>3.591.670.191.734</b> | <b>4.288.087.411.764</b> | <b>5.566.748.436.303</b> | <b>5.760.765.489.741</b> |
| a.                          | Belanja Pegawai  | 344.917.914.825          | 376.989.023.238          | 492.278.000.818          | 389.559.186.769          |
| b.                          | Belanja Barang dan Jasa  | 1.842.385.851.488        | 2.125.973.133.026        | 3.015.011.290.025        | 3.300.212.455.800        |
| c.                          | Belanja Modal  | 1.404.366.425.421        | 1.785.125.255.500        | 2.059.459.145.460        | 2.070.993.847.172        |
| <b>TOTAL JUMLAH BELANJA</b> |  | <b>5.707.378.466.054</b> | <b>6.490.359.759.532</b> | <b>7.939.075.327.356</b> | <b>8.179.056.980.753</b> |

Sumber : BPKPD dan Bappeko diolah, 2016.

### 3.2.1.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Selain komponen pendapatan dan belanja daerah, APBD Kota Surabaya mencakup pembiayaan daerah yang meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dana dari cadangan, penerimaan pinjaman dan obligasi, serta hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan.

Kebijakan pembiayaan yang diambil meliputi:

1. Penerimaan pembiayaan diperoleh dari sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya (SILPA) berupa pelampauan target pendapatan dan efisiensi belanja atas dasar kinerja.
2. Pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal (investasi) kepada BUMD
3. Jumlah pengeluaran daerah lebih besar dari penerimaan sehingga menimbulkan defisit yang akan diatasi dengan selisih proyeksi penerimaan dikurangi dengan proyeksi pengeluaran.

Sesuai penerimaan dan target 2017 maka penerimaan pembiayaan diperkirakan sebesar Rp955.671.058.485,- sedangkan pengeluaran pembiayaan tahun 2017 diperkirakan Rp19.006.877.335,- sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 3.33  
Pembiayaan Daerah Kota Surabaya  
Realisasi 2014-2015, Target 2016, Estimasi 2017

| No       | Uraian   | Realisasi 2014         | Realisasi 2015           | Target 2016            | Proyeksi 2017          |
|----------|--|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>1</b> | <b>Penerimaan Pembiayaan</b>                             |                        |                          |                        |                        |
| a.       | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) | 977.089.154.745        | 1.311.544.540.067        | 981.113.956.843        | 955.671.058.485        |
| b.       | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman                    | 29.733.336             | 5.865.433                |                        |                        |
|          | <b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                      | <b>977.118.888.081</b> | <b>1.311.550.405.500</b> | <b>981.113.956.843</b> | <b>955.671.058.485</b> |
| <b>2</b> | <b>Pengeluaran Pembiayaan</b>                            |                        |                          |                        |                        |
| a.       | Penyertaan Modal (Investasi) Daerah                      | 10.637.000.000         | 25.292.000.000           | 20.000.000.000         | 19.006.877.335         |
|          | <b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>                     | <b>10.637.000.000</b>  | <b>25.292.000.000</b>    | <b>20.000.000.000</b>  | <b>19.006.877.335</b>  |

Sumber : BPKPD dan Bappeko diolah 2016.

## **BAB IV**

# **PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH**

### **4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 maka penyusunan RKPD Kota Surabaya berpedoman pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021, mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, serta mengacu pada RPJMN untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah.

Berdasarkan tema pembangunan nasional pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017, dan dengan berpedoman pada Tema Pembangunan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2017, maka tema pembangunan Kota Surabaya tahun 2017 adalah:

**“Peningkatan Daya Saing Ekonomi Lokal melalui Percepatan  
Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan dan  
Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia”**

Dengan ditetapkannya tema pembangunan Kota Surabaya tersebut, maka tujuan dan sasaran yang hendak dicapai pada kerangka perencanaan pembangunan daerah Tahun 2017 harus realistis dan obyektif dengan mempertimbangkan potensi, isu permasalahan, hasil analisis dan evaluasi, capaian kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya serta tingkat kepentingan berdasarkan usulan musrenbang. Tujuan dan sasaran pembangunan ini harus memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintah daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Adapun tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing visi dan misi diuraikan dalam matriks, sebagaimana yang terlihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1  
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan

| VISI KOTA  | MISI KOTA   | TUJUAN   | SASARAN   |
|--|---|--|---|
| SURABAYA<br>KOTA SENTOSA<br>YANG<br>BERKARAKTER<br>DAN<br>BERDAYA<br>SAING GLOBAL<br>BERBASIS<br>EKOLOGI | 1. Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas | Meningkatkan kualitas pendidikan   | Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal  |
|  |   |  | Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan nonformal   |
|  |   | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat                                  | Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat bagi warga miskin  |
|  |   |  | Meningkatnya kualitas layanan kesehatan ibu dan anak  |
|  |   |  | Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan  |
|  |   |  | Mewujudkan lingkungan sehat di masyarakat   |
|  |   |  | Meningkatnya kualitas layanan KB dasar  |
|  |   |  | Meningkatkan ketahanan pangan   |
|  |   | Meningkatkan kualitas dan prestasi generasi muda                           | Meningkatkan ketersediaan, kualitas konsumsi, dan keamanan pangan   |
|  |   |  | Meningkatkan distribusi pangan  |
|  |   | Meningkatkan kompetensi angkatan kerja untuk mengurangi angka pengangguran | Meningkatkan potensi pemuda dan organisasi pemuda dalam hal wawasan dan karakter kebangsaan agar mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan |
|  |   |  | Meningkatkan dan mempertahankan prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional   |
|  |   | Meningkatkan kompetensi angkatan kerja untuk mengurangi angka pengangguran | Meningkatkan pemenuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja   |
|  |   |  | Menciptakan hubungan antar pemangku kepentingan dalam lingkup industrial yang harmonis  |

| VISI KOTA                           | MISI KOTA   | TUJUAN   | SASARAN   |
|-------------------------------------|---|--|---|
|                                     | 2. Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha    | Meningkatkan penanganan PMKS   | Meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS  |
|                                     |   | Menurunkan PMKS melalui pemberdayaan PMKS usia produktif dalam kelompok-kelompok usaha       | Meningkatkan keterampilan PMKS usia produktif   |
|                                     |   | Meningkatkan pemberdayaan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak                   | Meningkatkan pemberdayaan perempuan<br>Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak   |
|                                     | 3. Memelihara keamanan dan ketertiban umum  | Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah | Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah   |
|                                     |   |  | Meningkatkan kualitas pelaksanaan norma masyarakat, toleransi dan kerukunan antar umat beragama   |
|                                     | 4. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota | Mewujudkan sinkronisasi sistem penataan ruang dan sistem pertanahan                          | Meningkatkan sinkronisasi dan integrasi rencana rinci dan rencana induk sektoral dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW)                                     |
|                                     |   |  | Mewujudkan penyediaan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum   |
|                                     |   |  | Meningkatnya pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan  |
|                                     |   | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih dan hijau                            | Meningkatkan manajemen pengelolaan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)   |
|                                     |   |  | Optimalisasi sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan |
| Meningkatkan kualitas udara dan air |   |  |   |



| VISI KOTA | MISI KOTA  | TUJUAN  | SASARAN   |
|-----------|--|---|---|
|           |  | Mewujudkan sistem ketahanan yang handal terhadap bencana  | Pengembangan sistem penanggulangan bencana yang antisipatif dan tanggap   |
|           | 5. Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan                | Memantapkan sarana prasarana pada kawasan perumahan dan permukiman untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas | Meningkatkan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni  |
|           |  | Meningkatkan upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan                         | Meningkatkan upaya penerapan teknologi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif  |
|           |  | Meningkatkan upaya konservasi energi  | Meningkatkan upaya penerapan konservasi energi  |
|           | 6. Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat                      | Melestarikan budaya lokal   | Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal  |
|           |  | Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat   | Mewujudkan peningkatan minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan akses baca  |
|           |  | Mewujudkan wawasan, karakter dan nilai-nilai kebangsaan generasi muda   | Mewujudkan wawasan, karakter dan nilai-nilai kebangsaan   |
|           | 7. Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional | Meningkatkan arus perdagangan internasional dan antar pulau dari dan menuju Surabaya                            | Peningkatan sistem manajemen city logistik  |
|           |  |   | Meningkatnya jaringan bisnis (G to G dan G to B) jasa dan perdagangan komoditi barang dalam skala internasional dan antar pulau yang ditunjang dengan pusat pelayanan informasi yang terintegrasi |
|           | 8. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik  | Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik  | Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan   |
|           |  |   | Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik  |
|           |  |   | Meningkatkan kualitas pelayanan publik  |

| VISI KOTA | MISI KOTA   | TUJUAN   | SASARAN   |
|-----------|---|--|---|
|           |   | Memantapkan kemandirian keuangan daerah  | Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien |
|           | 9. Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif | Mendorong pemantapan daya saing UMKM pada sektor pertanian, barang dan jasa serta koperasi melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri kreatif | Meningkatkan produktivitas UMKM sektor produksi barang dan jasa                                 |
|           |   |  | Meningkatkan produktivitas koperasi   |
|           |   |  | Meningkatkan produktivitas sektor pertanian   |
|           |   |  | Meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan  |
|           |   |  | Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif                       |
|           |   |  | Meningkatkan kinerja pariwisata dalam rangka mewujudkan daya saing global                       |
|           |   | Meningkatkan kinerja investasi dalam rangka mewujudkan daya saing global   | Meningkatkan realisasi PMA dan PMDN (SPIPISE dan non SPIPISE)                                   |
|           | 10. Mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien   | Mengembangkan dan mengoptimalkan kinerja sistem drainase kota  | Penyediaan sistem drainase kota yang terpadu, efektif dan efisien                               |
|           |   | Meningkatkan jaringan dan pelayanan transportasi kota yang terpadu   | Menyediakan dan meningkatkan kinerja jaringan jalan   |
|           |   |  | Menyediakan sistem manajemen transportasi yang berkualitas                                      |
|           |   |  | Penyediaan dan optimalisasi sistem angkutan umum massal yang berkualitas dan ramah lingkungan   |

| VISI KOTA | MISI KOTA | TUJUAN   | SASARAN   |
|-----------|-----------|--|---|
|           |           | Meningkatkan pembangunan dan pelayanan utilitas kota secara terpadu dan merata | Meningkatkan sistem jaringan dan kualitas layanan air bersih<br>Meningkatkan sistem jaringan dan kualitas PJU<br>Meningkatkan pelayanan utilitas kota lainnya |

#### 4.2. Prioritas Pembangunan

Berdasarkan Tema Pembangunan Kota Surabaya Tahun 2017 dan berbagai permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan maka prioritas pembangunan Kota Surabaya Tahun 2017 adalah sebagai berikut (sesuai dengan urutan prioritas) :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;
2. Membangun infrastruktur dan jaringan utilitas kota secara terpadu dan merata;
3. Meningkatkan penanganan dan pemberdayaan PMKS;
4. Meningkatkan kinerja investasi dan produktivitas pada sektor industri kreatif, pertanian dan pariwisata;
5. Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman dengan pembangunan sarana prasarana lingkungan dan pengembangan energi alternatif;
6. Meningkatkan kualitas lingkungan melalui upaya peningkatan kebersihan dan penghijauan;
7. Mengembangkan sistem transportasi dan angkutan masal cepat yang terintegrasi inter moda dan antarmoda;
8. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan keuangan daerah;
9. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum;
10. Meningkatkan pemberdayaan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak;
11. Meningkatkan kualitas generasi muda dan angkatan kerja;
12. Meningkatkan ketahanan pangan;
13. Mewujudkan sistem pengelolaan pertanahan, aset, penataan ruang dan ketahanan bencana yang terintegrasi;
14. Melestarikan budaya lokal dan wawasan kebangsaan berlandaskan Pancasila;
15. Meningkatkan arus perdagangan internasional dan antar pulau.

Tabel 4.2  
Perumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Surabaya

| Permasalahan Pembangunan                     | Faktor Pendorong/Penghambat  |  | Prioritas dan sasaran pembangunan                        |  |
|--|--|--|--|--|
|  | Faktor Pendorong   | Faktor Penghambat  | Prioritas Pembangunan                                    | Sasaran Pembangunan  |
| 1. Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan | Ketersediaan anggaran pendidikan melebihi alokasi minimal yang disyaratkan secara nasional                         | Jumlah sarana dan prasarana pendidikan   | Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan | 1. Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan<br><br>2. Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan nonformal |
|  | Pemerataan dan kemudahan aksesibilitas pendidikan untuk semua jenjang  | Pemenuhan layanan pendidikan anak usia dini  |  |  |
|  | Ketersediaan dan kualifikasi tenaga pendidik sesuai standar untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah            | Mekanisme dan instrumen monitoring dan evaluasi layanan pendidikan                 |  |  |
|  | Sistem IT yang mendukung penyelenggaraan pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah                       | Perencanaan cakupan BOPDA pada PKBM untuk warga miskin                             |  |  |
|  | Dukungan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi (pemberian beasiswa untuk siswa miskin dan tenaga pendidik)            | Pemberian sanksi bagi lembaga pendidikan nonformal dan informal yang tidak berijin |  |  |
|  | Partisipasi dan dukungan dari stakeholder eksternal (perguruan tinggi, CSR, praktisi pendidikan, dewan pendidikan) | Ketersediaan data sarana dan prasarana pendidikan                                  |  |  |
|  | Partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap pendidikan dan kebutuhan pendidikan lifeskill (kursus keterampilan)   | Overlapping regulasi terkait perijinan lembaga kursus                              |  |  |

| Permasalahan Pembangunan | Faktor Pendorong/Penghambat   |  | Prioritas dan sasaran pembangunan |                     |   |
|--------------------------|---|--|-----------------------------------|---------------------|---|
|                          | Faktor Pendorong  | Faktor Penghambat  | Prioritas Pembangunan             | Sasaran Pembangunan |   |
|                          |   | Kebijakan pengelolaan lembaga pendidikan menengah dan khusus yang pindah ke provinsi |                                   |                     |   |
|                          |   | Petunjuk teknis pelaksanaan dana / bantuan dari Pemerintah / Provinsi                |                                   |                     |   |
|                          |   | Penyelenggaraan sistem pendidikan anak usia dini                                     |                                   |                     |   |
|                          |   | Akreditasi lembaga pendidikan nonformal dan informal                                 |                                   |                     |   |
|                          |   | Kenakalan remaja (narkoba, tawuran)  |                                   |                     |   |
|                          |   | Penyerapan lulusan SMK di dunia kerja / industri                                     |                                   |                     |   |
|                          | Anggaran untuk pelayanan kesehatan masyarakat                           | Jumlah medis dan paramedis layanan kesehatan   |                                   |                     | 1. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat bagi warga miskin<br><br>2. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan ibu dan anak<br><br>3. Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan |
|                          | Kompetensi SDM di bidang kesehatan                                      | Kemerataan cakupan layanan kesehatan (Rumah Sakit)                                   |                                   |                     |   |
|                          | Kapasitas dan jumlah sarana prasarana layanan dan operasional kesehatan | SIM rumah sakit belum terintegrasi secara menyeluruh                                 |                                   |                     |   |
|                          | Sistem IT yang mendukung pelayanan kesehatan (e-health)                 | Beberapa regulasi tentang penyelenggaraan BLUD belum terealisasi                     |                                   |                     |   |

| Permasalahan Pembangunan                                | Faktor Pendorong/Penghambat   |   | Prioritas dan sasaran pembangunan |   |
|---|---|---|-----------------------------------|---|
|   | Faktor Pendorong  | Faktor Penghambat   | Prioritas Pembangunan             | Sasaran Pembangunan   |
|   | Inovasi program unggulan untuk layanan kesehatan  | Penyediaan tenaga medis dan paramedis PNS   |                                   | 4. Mewujudkan lingkungan sehat di masyarakat<br><br>5. Meningkatnya kualitas layanan KB dasar                 |
|   | Kebijakan Pemerintah terkait program JKN  | SDM kesehatan asing beroperasi ilegal   |                                   |   |
|   | Dukungan organisasi akademisi, instansi swasta dan LSM dalam implementasi program kesehatan | Penyakit akibat mobilitas penduduk  |                                   |   |
|   | Pemanfaatan perkembangan Teknologi Informasi untuk peningkatan pelayanan kesehatan          | Jumlah dan perkembangan produk RS pesaing   |                                   |   |
|   | Dukungan Pemerintah Pusat dalam hal regulasi dan pembiayaan untuk pelayanan kesehatan       | Fluktuasi harga alat dan bahan kedokteran/kesehatan yang tinggi                     |                                   |   |
|   | Kesadaran masyarakat terhadap kesehatan   |   |                                   |   |
| 2. Ketersediaan dan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat | Adanya kewenangan dalam bidang ketahanan pangan   | Bentuk Kelembagaan institusi Ketahanan Pangan                                       | Meningkatkan ketahanan pangan     | 1. Meningkatkan ketersediaan, kualitas konsumsi, dan keamanan pangan<br><br>2. Meningkatkan distribusi pangan |
|   | Keberadaan Dewan Ketahanan Pangan   | jumlah SDM (termasuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil keamanan pangan) tidak mencukupi |                                   |   |
|   |   | kompetensi SDM dalam hal pangan   |                                   |   |
|   |   | Sarana dan prasarana penunjang kegiatan kurang memadai                              |                                   |   |

| Permasalahan Pembangunan  | Faktor Pendorong/Penghambat   |  | Prioritas dan sasaran pembangunan                      |  |
|---|---|--|--|--|
|   | Faktor Pendorong  | Faktor Penghambat  | Prioritas Pembangunan                                  | Sasaran Pembangunan  |
|   |   | data dan informasi terkait ketahanan pangan tidak mencukupi                    |  |  |
|   |   | tumpang tindih kewenangan dengan SKPD lain                                     |  |  |
| 3. Peran Pemuda sebagai Penggerak Pembangunan dan Capaian Prestasi Olahraga | Agenda kegiatan pembinaan kepemudaan dan pelaksanaan event kejuaraan olahraga skala kota secara rutin | Sistem manajemen data dan informasi yang belum optimal                         | Meningkatkan kualitas generasi muda dan angkatan kerja | 1. Meningkatkan potensi pemuda dan organisasi pemuda dalam hal wawasan dan karakter kebangsaan agar mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan<br><br>2. Meningkatkan dan mempertahankan prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional |
|   | Komitmen dan perhatian terhadap prestasi dan kesejahteraan atlet                                      | Fasilitas penunjang operasional pemeliharaan dan pengawasan prasarana olahraga |  |  |
|   | Sebaran dan jumlah prasarana olahraga di Kota Surabaya  | Cabor unggulan skala kota  |  |  |
|   | Kewenangan untuk mengintervensi kepemudaan dan olahraga   | Pembinaan hanya pada olahraga dibawah naungan KONI Surabaya                    |  |  |
|   | Adanya UPTD yang khusus menangani pengawasan dan pemeliharaan prasarana olahraga                      | Overlapping peran SKPD dalam peningkatan potensi pemuda (pelatihan wirausaha)  |  |  |
|   | Partisipasi masyarakat dalam kegiatan kepemudaan dan olahraga   | Kriminalitas dikalangan generasi muda / pemuda                                 |  |  |



| Permasalahan Pembangunan   | Faktor Pendorong/Penghambat   |  | Prioritas dan sasaran pembangunan                      |   |
|--|---|--|--|---|
|  | Faktor Pendorong  | Faktor Penghambat  | Prioritas Pembangunan                                  | Sasaran Pembangunan   |
|  | Potensi pemuda untuk berperan sebagai penggerak pembangunan                           | Era perdagangan bebas (MEA) yang mengakibatkan ketatnya persaingan dan menuntut peningkatan kemampuan manajerial dan skill |  |   |
|  | Potensi olahraga untuk dikembangkan sebagai kegiatan industri / usaha                 | Perkembangan dan persaingan dunia olahraga yang menuntut peningkatan kualitas atlit dan pelatih                            |  |   |
|  | Kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana olahraga                               | Minat masyarakat terhadap seni dan olahraga tradisional  |  |   |
|  | Perkembangan teknologi untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan        | Keterbatasan jumlah tenaga pelatih profesional   |  |   |
| 4. Kualitas Angkatan Kerja yang Memiliki Karakter dan Berdaya Saing Global | Kewenangan ketenagakerjaan  | Blue print perencanaan tenaga kerja per sektor   | Meningkatkan kualitas generasi muda dan angkatan kerja | 1. Meningkatkan pemenuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja<br><br>2. Menciptakan hubungan antar pemangku kepentingan dalam lingkup industrial yang harmonis |
|  | Kebijakan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja                                      | Ketersediaan balai latihan kerja surabaya  |  |   |
|  | Tingkat kesadaran penyelarasan dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri | Tingkat produktivitas tenaga kerja   |  |   |
|  | Perkembangan industri   | Perbandingan pertumbuhan pencari kerja dengan pertumbuhan lowongan pekerjaan   |  |   |
|  | Partisipasi stakeholder dalam pelayanan ketenagakerjaan                               | Hard dan soft competencies calon tenaga kerja  |  |   |

| Permasalahan Pembangunan | Faktor Pendorong/Penghambat                         |   | Prioritas dan sasaran pembangunan |                     |
|--------------------------|---|---|-----------------------------------|---------------------|
|                          | Faktor Pendorong                                    | Faktor Penghambat   | Prioritas Pembangunan             | Sasaran Pembangunan |
|                          | Kerjasama LKS Tripartit dan Bipartit                |   |                                   |                     |
|                          | Perkembangan teknologi informasi                    |   |                                   |                     |
|                          | Kesempatan bekerja di luar negeri                   |   |                                   |                     |
|                          | Kewenangan ketenagakerjaan                          | Jumlah SDM ketenagakerjaan untuk melakukan pengawasan dan penanganan perselisihan hubungan industrial |                                   |                     |
|                          | pelayanan pendampingan penyusunan persyaratan kerja | keberadaan sanksi terkait pelanggaran ketenagakerjaan   |                                   |                     |
|                          | Kerjasama LKS Tripartit dan Bipartit                | Tingkat kesadaran perusahaan terkait wajib lapor ketenagakerjaan                                      |                                   |                     |
|                          | lembaga jaminan ketenagakerjaan                     | sistem pengupahan dan skala upah nasional   |                                   |                     |
|                          |   | tingkat pemahaman norma kerja, k3 dan prinsip2 hubungan industrial                                    |                                   |                     |
|                          |   | tingkat produktivitas   |                                   |                     |
|                          | kasus/perselisihan ketenagakerjaan                  |   |                                   |                     |

| Permasalahan Pembangunan  | Faktor Pendorong/Penghambat                             |  | Prioritas dan sasaran pembangunan             |   |
|---|---|--|---|---|
|   | Faktor Pendorong  | Faktor Penghambat  | Prioritas Pembangunan                         | Sasaran Pembangunan   |
| 5. Penanganan Penyandang Masalah Sosial (PMKS), Pemberdayaan Masyarakat, Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak | Anggaran untuk penanganan PMKS                          | Kompetensi SDM dalam penanganan PMKS                               | Meningkatkan penanganan dan pemberdayaan PMKS | 1. Meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS<br><br>2. Meningkatkan keterampilan PMKS usia produktif |
|   | Kebijakan penanganan PMKS                               | Jumlah SDM dalam penanganan PMKS                                   |   |   |
|   | Sarana dan prasarana penunjang kegiatan penanganan PMKS | Kesesuaian penerima manfaat dan sasaran                            |   |   |
|   | SOP pelayanan PMKS                                      | Pendataan dan penentuan kriteria PMKS                              |   |   |
|   | Partisipasi PSKS dalam penanganan PMKS                  | PMKS dari luar Surabaya  |   |   |
|   | Dukungan Pemerintah / Provinsi dalam penanganan PMKS    | Kesadaran dan metalitas PMKS                                       |   |   |
|   | Dukungan swasta melalui CSR dalam penanganan PMKS       | Fasilitas penanganan PMKS dimanfaatkan oleh PMKS Non Kota Surabaya |   |   |
|   | Anggaran pelaksanaan kegiatan                           | Jumlah dan kompetensi SDM  |   |   |
|   | Sarana prasarana pendukung kegiatan pemberdayaan        | SOP untuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat             |   |   |
|   | Pendataan keluarga miskin berbasis IT                   | Pemanfaatan data keluarga miskin                                   |   |   |
| Peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah   | Kesesuaian jenis pelatihan dengan penerima manfaat      |  |   |   |

| Permasalahan Pembangunan  | Faktor Pendorong/Penghambat  |  | Prioritas dan sasaran pembangunan  |   |
|---|--|--|--|---|
|   | Faktor Pendorong   | Faktor Penghambat  | Prioritas Pembangunan  | Sasaran Pembangunan   |
|   | Dukungan dari masyarakat dan lembaga berbasis masyarakat                                 | Overlapping program dan kegiatan antar SKPD  |  |   |
|   | Dukungan pihak swasta, akademisi, dan instansi pemerintah lainnya                        | Penduduk luar Surabaya yang memanfaatkan fasilitas dan layanan Kota Surabaya           |  |   |
|   |  | Mentalitas sebagian masyarakat miskin  |  |   |
|   |  | Penambahan data di luar data keluarga miskin yang telah ditetapkan                     |  |   |
|   | Anggaran kegiatan yang menunjang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak | Jumlah dan Kompetensi SDM  | Meningkatkan pemberdayaan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak | 1. Meningkatkan pemberdayaan perempuan<br>2. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak |
|   | Sarana prasarana yang menunjang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak  | SOP untuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak |  |   |
|   | Peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah                                    | Pemanfaatan data keluarga miskin   |  |   |
|   | Dukungan dari masyarakat dan lembaga berbasis masyarakat                                 | Penduduk luar Surabaya yang memanfaatkan fasilitas dan layanan Kota Surabaya           |  |   |
| Dukungan pihak swasta, akademisi, dan instansi pemerintah lainnya | Keterbukaan masyarakat dalam pelaporan   |  |  |   |

| Permasalahan Pembangunan   | Faktor Pendorong/Penghambat   |  | Prioritas dan sasaran pembangunan            |   |
|--|---|--|--|---|
|  | Faktor Pendorong  | Faktor Penghambat  | Prioritas Pembangunan                        | Sasaran Pembangunan   |
|  | Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPTP2A)                              | Pengaruh media sosial terhadap tumbuh kembang anak                                 |  |   |
|  |   | Pengaruh komunitas / orang asing dalam perlindungan perempuan dan anak             |  |   |
| 6. Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman sebagai Sendi Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat | Inovasi dalam sistem dan mekanisme kerja  | Jumlah personil penertiban   | Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum | Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah |
|  | Jumlah sarana pendukung operasional   | Beban pemakaian sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan penertiban        |  |   |
|  | Kompetensi personil penertiban  | Efektifitas regulasi dalam memberikan efek jera kepada pelanggar Perda             |  |   |
|  | Dukungan Pemerintah Pusat/Provinsi, jajaran samping dan lembaga lainnya dalam penegakan Perda | Regulasi yang mengatur tindak lanjut hasil penertiban PKL, tower dan bangunan liar |  |   |
|  | Partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran Perda                                     | Keberadaan PMKS yang mengganggu ketertiban   |  |   |
|  |   | Tingkat kesadaran masyarakat terhadap Perda  |  |   |
|  |   | Pihak ketiga yang mengintervensi terjadinya pelanggaran Perda                      |  |   |

| Permasalahan Pembangunan                  | Faktor Pendorong/Penghambat  |  | Prioritas dan sasaran pembangunan  |   |
|---|--|--|--|---|
|   | Faktor Pendorong   | Faktor Penghambat  | Prioritas Pembangunan  | Sasaran Pembangunan   |
|   | Kecepatan respon terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan   | Perencanaan kebutuhan jumlah tenaga dan peningkatan kompetensi personil  |  | Meningkatkan kualitas pelaksanaan norma masyarakat, toleransi dan kerukunan antar umat beragama                           |
|   | Monitoring dan evaluasi terkait keamanan dan kenyamanan lingkungan   | Pemanfaatan data dan informasi untuk analisa keamanan dan kenyamanan lingkungan  |  |   |
|   | Peraturan di Pemerintah Kota Surabaya terkait dengan semua aspek IPOLEKSOSBUD                                    | Sarana pendukung operasional pengamanan  |  |   |
|   | Kebebasan berdemokrasi dari Parpol, Ormas dan Perguruan Tinggi   | Jumlah potensi permasalahan IPOLEKSOSBUD   |  |   |
|   | Dukungan Pemerintah Pusat/Provinsi, jajaran samping dan lembaga lainnya untuk keamanan dan kenyamanan lingkungan | Kecenderungan aksi demo yang mengarah ke anarkis   |  |   |
| 7. Kualitas Penataan Ruang dan Pertanahan | Kelengkapan data dan informasi tentang rencana tata ruang Kota Surabaya  | Tidak mengetahui data status lahan, sehingga kurang optimal dalam merencanakan kawasan dan tidak dapat mengintervensi langsung/ mendorong peningkatan peran kawasan budidaya | Mewujudkan sistem pengelolaan pertanahan, aset, penataan ruang dan ketahanan bencana yang terintegrasi | Meningkatkan sinkronisasi dan integrasi rencana rinci dan rencana induk sektoral dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) |

| Permasalahan Pembangunan | Faktor Pendorong/Penghambat  |  | Prioritas dan sasaran pembangunan |                     |
|--------------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------|
|                          | Faktor Pendorong   | Faktor Penghambat  | Prioritas Pembangunan             | Sasaran Pembangunan |
|                          | Sebagian besar wilayah di Kota Surabaya direncanakan sebagai kawasan budidaya, sehingga diharapkan dapat mendukung peningkatan perekonomian kota | Belum ada kompilasi data perijinan   |                                   |                     |
|                          | Kewenangan dalam proses penataan ruang mulai dari perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian  | Kegiatan penataan ruang yang belum optimal terutama dalam pengendalian pemanfaatan ruang                     |                                   |                     |
|                          | Dukungan peraturan, SOP dan pedoman  | Adanya rencana rinci tata ruang kota yang belum ditetapkan   |                                   |                     |
|                          | Ketersediaan aplikasi berbasis TIK pelayanan perizinan yang telah terintegrasi   | manajemen kearsipan belum optimal  |                                   |                     |
|                          | Partisipasi dan peran aktif dari berbagai komponen masyarakat (akademisi, pengembang perumahan, swasta dll) dalam penataan ruang                 | Penerapan UU 23 tahun 2014 yang membatasi kewenangan penataan ruang pemerintah kota di wilayah air dan udara |                                   |                     |
|                          | Telah terbentuknya badan koordinasi penataan ruang daerah (BKPRD)  | Munculnya potensi konflik pertanahan akibat penetapan peruntukan tata ruang                                  |                                   |                     |
|                          | Peningkatan minat investasi di Kota Surabaya   | Kurangnya kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi perijinan bangunan                                  |                                   |                     |
|                          | Regulasi perbankan sebagai potensi PAD (IMB menjadi syarat jaminan kredit)   | Sistem informasi yang belum terintegrasi antar SKPD dengan instansi vertikal                                 |                                   |                     |

| Permasalahan Pembangunan | Faktor Pendorong/Penghambat   |  | Prioritas dan sasaran pembangunan |   |  |
|--------------------------|---|--|-----------------------------------|---|--|
|                          | Faktor Pendorong  | Faktor Penghambat  | Prioritas Pembangunan             | Sasaran Pembangunan   |  |
|                          | Kebijakan pemerintah pusat dalam penataan kawasan strategis   |  |                                   |   |  |
|                          | Jumlah dan sebaran aset tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota di berbagai wilayah Kota Surabaya yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum | Sarana dan prasarana pendukung untuk pengadaan, pengelolaan, pengamanan dan pemanfaatan aset yang belum memadai  |                                   |   |  |
|                          | Ketersediaan SOP dan pedoman untuk pelayanan perijinan, pengelolaan, pengamanan dan pemanfaatan aset tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota     | Koordinasi lintas sektor / antar SKPD dalam proses pengadaan tanah dan pengamanan aset belum optimal   |                                   |   |  |
|                          | Kewenangan dalam proses pengadaan tanah dan atau bangunan   | Sistem manajemen informasi dan database pengelolaan aset yang belum memadai  |                                   | Mewujudkan penyediaan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum |  |
|                          | Adanya unit pengelola (UPTD) yang secara khusus dan intensif menangani pengelolaan Gedung Sewa  | Data - data dan informasi tentang manajemen pertanahan yang belum terintegrasi   |                                   |   |  |
|                          | Meningkatnya kebutuhan akan tanah seiring dengan perkembangan kota dan kebutuhan sarana dan prasarana kota  | Ketergantungan proses pengadaan tanah dan atau bangunan kepada instansi lain serta Koordinasi lintas sektor dalam proses pengadaan tanah dan pengamanan aset belum optimal |                                   |   | Meningkatnya pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan |



| Permasalahan Pembangunan  | Faktor Pendorong/Penghambat   |   | Prioritas dan sasaran pembangunan  |   |
|---|---|---|--|---|
|   | Faktor Pendorong  | Faktor Penghambat   | Prioritas Pembangunan  | Sasaran Pembangunan   |
|   | Partisipasi dan peran aktif dari berbagai komponen masyarakat (akademisi, pengembang perumahan, swasta dll) dalam pengamanan aset | Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi dan tertib administrasi pemanfaatan aset dan penghunian Rusunawa |  |   |
|   | Dukungan peraturan terkait penyediaan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum   | Tingginya potensi konflik dan/atau pemanfaatan aset tanah dan bangunan Pemerintah Kota tanpa ijin   |  |   |
|   | Minat masyarakat dalam memanfaatkan aset pemerintah kota  | Kenaikan harga tanah seiring dengan perkembangan kota   |  |   |
| 8. Sistem Mitigasi dan Penanggulangan Bencana Kawasan Perkotaan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Terdapat beberapa peraturan daerah atau perwali sebagai pedoman penyediaan RTH dan makam  | Belum tersusunnya masterplan RTH  | Peningkatan kualitas lingkungan melalui upaya peningkatan kebersihan dan penghijauan | Meningkatkan Manajemen Pengelolaan dan Kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) |
|   | Adanya unit pengelola (UPTD) dan atau sebaran rayon yang secara khusus dan intensif menangani pengelolaan RTH dan makam           | Terbatasnya ketersediaan fasilitas penunjang pengelolaan kebersihan, pemeliharaan RTH   |  |   |
|   | Penyediaan dan sebaran RTH di seluruh kota Surabaya   | Ketersediaan makam yang belum merata  |  |   |
|   | Tingginya partisipasi dan peran aktif dari masyarakat dan swasta dalam penyediaan dan pengelolaan RTH                             | Kualitas sarana dan prasarana pengelolaan pertamanan  |  |   |

| Permasalahan Pembangunan | Faktor Pendorong/Penghambat   |   | Prioritas dan sasaran pembangunan |                     |  |   |
|--------------------------|---|---|-----------------------------------|---------------------|--|---|
|                          | Faktor Pendorong  | Faktor Penghambat   | Prioritas Pembangunan             | Sasaran Pembangunan |  |   |
|                          | Kerjasama regional, nasional dan internasional  | Belum adanya sistem informasi manajemen terkait pengelolaan RTH   |                                   |                     |  |   |
|                          | Perkembangan teknologi dalam penyediaan dan pengelolaan RTH   | Perkembangan kota yang mengakibatkan semakin terbatasnya potensi RTH  |                                   |                     |  |   |
|                          |   | Adanya kenaikan Tarif Dasar Listrik, BBM dan UMK  |                                   |                     |  |   |
|                          |   | Masih terdapat lahan yang telah ditetapkan sebagai RTH namun belum dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya                                   |                                   |                     |  |   |
|                          |   | Peningkatan kebutuhan SDM dan anggaran operasional dan pemeliharaan seiring dengan peningkatan penyediaan RTH                               |                                   |                     |  |   |
|                          | Terdapat beberapa peraturan daerah atau perwali sebagai pedoman pengelolaan kebersihan                  | Belum tersusunnya masterplan pengelolaan kebersihan yang mengatur rencana induk, kebijakan strategis dan operasional pengelolaan kebersihan |                                   |                     |  | Optimalisasi sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan |
|                          | Adanya unit pengelola (UPTD) dan rayon yang secara khusus dan intensif menangani pengelolaan kebersihan | Terbatasnya ketersediaan fasilitas penunjang pengelolaan kebersihan   |                                   |                     |  |   |
|                          | Adanya sistem manajemen pengelolaan kebersihan (SWAT)   | Kelengkapan data dan proses analisa   |                                   |                     |  |   |

| Permasalahan Pembangunan | Faktor Pendorong/Penghambat   |  | Prioritas dan sasaran pembangunan |                     |
|--------------------------|---|--|-----------------------------------|---------------------|
|                          | Faktor Pendorong  | Faktor Penghambat  | Prioritas Pembangunan             | Sasaran Pembangunan |
|                          | Ketersediaan SDM dan manajemen operasional pengelolaan kebersihan   | Laju pertumbuhan penduduk dan aktivitas warga kota surabaya yang berpotensi menambah jumlah sampah yang dihasilkan |                                   |                     |
|                          | partisipasi dan peran aktif dari masyarakat dan swasta dalam pengolahan sampah                                | Perkembangan kota yang mendorong peningkatan kebutuhan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan kebersihan,     |                                   |                     |
|                          | Perkembangan teknologi ramah lingkungan dalam pengolahan sampah   | Peningkatan Biaya pemeliharaan dan operasional   |                                   |                     |
|                          | Potensi penambahan PAD melalui pajak dan retribusi  | Keterbatasan ketersediaan lahan untuk penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan                      |                                   |                     |
|                          | Kerjasama regional, nasional dan internasional  |  |                                   |                     |
|                          | Tersedianya pedoman pengendalian dan antisipasi dampak lingkungan (Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dll) | Keterbatasan jumlah (kuantitas) SDM serta prasarana dan sarana untuk pemantauan dan pengendalian dampak lingkungan |                                   |                     |

| Permasalahan Pembangunan | Faktor Pendorong/Penghambat  |  | Prioritas dan sasaran pembangunan |                                     |
|--------------------------|--|--|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                          | Faktor Pendorong   | Faktor Penghambat  | Prioritas Pembangunan             | Sasaran Pembangunan                 |
|                          | Laboratorium uji kualitas lingkungan hidup yang telah tersertifikasi dan terakreditasi   | Kegiatan pencegahan, pengawasan, pemulihan dan pengendalian dampak lingkungan yang belum optimal   |                                   | Meningkatkan kualitas udara dan air |
|                          | SDM yang berkompeten dalam pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan   | Belum optimalnya kegiatan pengendalian dan pengolahan limbah domestik perkotaan  |                                   |                                     |
|                          | Adanya fasilitas Stasiun monitoring udara ambien   | database informasi lingkungan serta perizinan yang terintegrasi berbasis TIK   |                                   |                                     |
|                          | kewenangan pengelola IPAL perkotaan  | master plan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup  |                                   |                                     |
|                          | Dukungan peraturan perundangan sebagai pedoman pengendalian dan antisipasi dampak lingkungan                                   | Meningkatnya kegiatan industri, usaha dan transportasi yang berpotensi menimbulkan pencemaran air dan udara pada kawasan darat, pesisir dan laut |                                   |                                     |
|                          | Adanya penghargaan dari pemerintah pusat untuk meningkatkan motivasi dalam upaya pelestarian dan pengendalian lingkungan hidup | Pertumbuhan perumahan dan permukiman yang berpotensi mengakibatkan peningkatan limbah cair domestik  |                                   |                                     |

| Permasalahan Pembangunan                                     | Faktor Pendorong/Penghambat   |   | Prioritas dan sasaran pembangunan  |  |
|--|---|---|--|--|
|  | Faktor Pendorong  | Faktor Penghambat   | Prioritas Pembangunan  | Sasaran Pembangunan  |
|  | Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup   | Belum tersusunnya RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) Nasional dan Propinsi                 |  |  |
|  | dukungan kerjasama dari pihak akademis (Universitas), komunitas masyarakat pemerhati lingkungan dan beberapa instansi pemerintah terkait pengelolaan lingkungan | Belum optimalnya pengelolaan DAS secara terpadu sehingga berdampak terhadap Kota Surabaya yang berada di posisi hilir |  |  |
|  | Perkembangan IPTEK yang dapat mendukung upaya pelestarian lingkungan hidup  | Belum adanya kejelasan kewenangan apabila terjadi pencemaran di laut  |  |  |
|  | Cakupan wilayah manajemen kebakaran 90%   | Sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran (Mobil PMK, Mobil Tangga, Mobil Rescue, APD, dll)  | 1. Pengembangan sistem mitigasi dan penanggulangan bencana yang antisipatif dan tanggap. | Pengembangan sistem mitigasi dan penanggulangan bencana yang antisipatif dan tanggap |
| simulasi dan latihan penanggulangan kebakaran secara berkala | Pengawasan terhadap penerapan sarana pencegahan/penanggulangan kebakaran pada gedung/bangunan   | 2. Mewujudkan sistem pengelolaan pertanahan, aset, penataan ruang dan ketahanan bencana yang terintegrasi             |  |  |

| Permasalahan Pembangunan | Faktor Pendorong/Penghambat  |  | Prioritas dan sasaran pembangunan |                     |
|--------------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------|
|                          | Faktor Pendorong   | Faktor Penghambat  | Prioritas Pembangunan             | Sasaran Pembangunan |
|                          | Koordinasi antar SKPD saat penanggulangan kebakaran  | peraturan terkait sistem pencegahan/penanggulangan kebakaran bangunan  |                                   |                     |
|                          | Kecepatan waktu tanggap (response time) dan waktu pemadaman pada saat penanggulangan bencana kebakaran | Jumlah dan kompetensi personil pemadam kebakaran   |                                   |                     |
|                          | Peningkatan kemampuan/skill SDM dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran                   | Sistem manajemen operasional dan mitigasi kebakaran  |                                   |                     |
|                          | kesadaran masyarakat/pengembang untuk memenuhi standar keamanan kebakaran pada gedung/bangunan         | Pertumbuhan permukiman, bangunan tinggi, dan kepadatan penduduk yang berdampak pada peningkatan potensi bahaya kebakaran |                                   |                     |
|                          | Perkembangan teknologi/aplikasi berbasis TIK dalam penanggulangan kebakaran                            | aksesibilitas dan ketersediaan bahan baku pemadaman kebakaran (air, foam, dsb)   |                                   |                     |
|                          | Peran serta masyarakat (Satlakar – Satuan Relawan Kebakaran)/swasta dalam mitigasi kebakaran           | Pengaruh alam (iklim, cuaca, dll) dan non-alam (teknis, manusia, dll) sebagai pemicu kejadian kebakaran                  |                                   |                     |
|                          | Pengembangan sistem tanggap darurat bencana secara terpadu   |  |                                   |                     |

| Permasalahan Pembangunan                               | Faktor Pendorong/Penghambat   |   | Prioritas dan sasaran pembangunan   |  |
|--|---|---|---|--|
|  | Faktor Pendorong  | Faktor Penghambat   | Prioritas Pembangunan   | Sasaran Pembangunan  |
|  | Berkembangnya jenis-jenis material, dan bahan bangunan yang tahan api                         |   |   |  |
| 9. Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Berkualitas | Kebijakan prioritas penanganan kawasan permukiman kumuh                                       | Ketersediaan sarana dan prasarana permukiman yang belum terpadu                       | Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman dengan pembangunan sarana prasarana lingkungan dan pengembangan energi alternatif | Meningkatkan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni |
|  | Ketersediaan sumber daya untuk pembangunan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman      | Strategi perencanaan pembangunan kawasan kumuh  |   |  |
|  | Pengelolaan rumah susun oleh Pemerintah Kota melalui peran UPTD                               | Manajemen/pengelolaan dan pemeliharaan rusunawa                                       |   |  |
|  | Ketersediaan lahan milik pemerintah kota  | Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana permukiman (PSU) terhadap pertumbuhan hunian |   |  |
|  | Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan skala lingkungan                         | Kesadaran penghuni rusunawa terhadap kewajiban administrasi dan pembayaran retribusi  |   |  |
|  | Tingkat investasi properti (perumahan dan rusun) di Kota Surabaya yang diikuti penyediaan PSU | Beban biaya operasional dan pemeliharaan rusunawa seiring meningkat usia bangunan     |   |  |

| Permasalahan Pembangunan                          | Faktor Pendorong/Penghambat   |   | Prioritas dan sasaran pembangunan   |  |
|---|---|---|---|--|
|   | Faktor Pendorong  | Faktor Penghambat   | Prioritas Pembangunan   | Sasaran Pembangunan  |
|   | Dukungan masyarakat dan stakeholder dalam pembangunan kawasan kumuh melalui CSR                                   | Kesadaran penghuni rusunawa terhadap pemeliharaan lingkungan hunian   |   |  |
|   | Dukungan dan komitmen pemerintah pusat dalam penyediaan perumahan (rusunawa) bagi masyarakat                      | Laju urbanisasi   |   |  |
|   | Minat masyarakat untuk menghuni rumah susun   | Status tanah untuk pembangunan RSDK   |   |  |
| 10. Pemanfaatan Energi secara Efektif dan Efisien | Kemampuan penerapan teknologi tepat guna dalam pemanfaatan energi alternatif                                      | Keterbatasan jumlah (kuantitas) SDM serta prasarana dan sarana untuk mendukung upaya konservasi dan konversi energi | Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman dengan pembangunan sarana prasarana lingkungan dan pengembangan energi alternatif | 1. Meningkatkan upaya penerapan teknologi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif<br><br>2. Meningkatkan upaya penerapan konservasi energi |
|   | Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif       | masterplan pengembangan energi sebagai arahan kebijakan dalam bidang energi   |   |  |
|   | Dukungan kerjasama dari pemerintah pusat dan akademisi dalam upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif | SKPD Pemerintah Kota Surabaya yang khusus menangani energi (Dinas ESDM)   |   |  |



| Permasalahan Pembangunan                             | Faktor Pendorong/Penghambat  |   | Prioritas dan sasaran pembangunan                                       |   |
|--|--|---|---|---|
|  | Faktor Pendorong   | Faktor Penghambat   | Prioritas Pembangunan   | Sasaran Pembangunan   |
|  | Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif                         | ketersediaan infrastruktur yang mendukung pemanfaatan energi alternatif   |   |   |
|  | kerjasama lintas sektor dan lintas instansi (Kerjasama Pemerintah dengan Swasta-KPS) dalam upaya pemanfaatan energi alternatif | Peningkatan jumlah kegiatan rumah tangga, industri dan transportasi yang memanfaatkan sumber energi yang tak terbarukan |   |   |
|  |  | Belum adanya teknologi yang handal dan terjangkau untuk pemanfaatan energi alternatif                                   |   |   |
| 11. Penggalan dan Penguatan Budaya dan Tradisi Lokal | Sekolah yang peka terhadap seni dan budaya   | SDM kesenian dan budaya   | Melestarikan budaya lokal dan wawasan kebangsaan berlandaskan Pancasila | 1. Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal<br>2. Memantapkan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan generasi muda |
|  | Penetapan seni dan budaya lokal Kota Surabaya  | Event atau festival seni dan budaya   |   |   |
|  | Adanya seni dan budaya lokal yang berkembang   | Kepekaan masyarakat terhadap seni dan budaya  |   |   |
|  | Adanya bangunan bernilai sejarah   | seni dan budaya asing yang berkembang   |   |   |
|  | Adanya pelaku seni dan budaya  |   |   |   |
|  | Anggaran cukup   | Jumlah dan Jenis Koleksi Buku   |   |   |
|  | Jumlah SDM   | Sarana dan Prasarana Pengelolaan Perpustakaan   |   |   |
|  | Sekolah yang berpartisipasi dalam meningkatkan minat dan budaya baca   | Integrasi Sistem Informasi Perpustakaan   |   |   |

| Permasalahan Pembangunan   | Faktor Pendorong/Penghambat   |  | Prioritas dan sasaran pembangunan                           |   |
|--|---|--|---|---|
|  | Faktor Pendorong  | Faktor Penghambat  | Prioritas Pembangunan                                       | Sasaran Pembangunan   |
|  | Forum pemerhati minat baca masyarakat   | Jumlah pengunjung layanan baca   |   |   |
|  | Layanan baca yang disediakan oleh swasta, masyarakat, dll                         |  |   |   |
|  | Event untuk meningkatkan minat baca   |  |   |   |
| 12. Pengembangan Surabaya sebagai Penghubung Perdagangan/Jasa Antar Pulau, Regional, dan Internasional | Koordinasi dengan distributor terkait ketersediaan dan distribusi barang dan jasa | Kuantitas SDM (pengawasan barang dan jasa)   | Meningkatkan arus perdagangan internasional dan antar pulau | 1. Peningkatan sistem manajemen city logistik<br><br>2. Meningkatnya jaringan bisnis (G to G dan G to B) jasa dan perdagangan komoditi barang dalam skala internasional dan antar pulau yang ditunjang dengan pusat pelayanan informasi yang terintegrasi |
|  | Kewenangan penerbitan dan pengawasan tanda daftar gudang                          | kewenangan pengawasan barang beredar dan jasa (tupoksi)  |   |   |
|  | Standar Pelayanan pengawasan barang dan jasa                                      | Mekanisme pengendalian distribusi barang serta stabilisasi harga barang pokok dan bahan penting lainnya                          |   |   |
|  | Kemudahan pelayanan perijinan usaha   | Sarana Prasarana Pendukung (sarana transportasi)   |   |   |
|  | Kompetensi SDM  | Keterbatasan, koordinasi dan informasi arus lalu lintas barang domestik, regional, nasional dan internasional (ekspor dan impor) |   |   |
|  | Anggaran  | Database potensi perizinan dan UTTP se-Surabaya  |   |   |

| Permasalahan Pembangunan                                       | Faktor Pendorong/Penghambat   |  | Prioritas dan sasaran pembangunan   |   |
|--|---|--|---|---|
|  | Faktor Pendorong  | Faktor Penghambat  | Prioritas Pembangunan   | Sasaran Pembangunan   |
|  | Aturan dan kelembagaan institusi dan standar pelayanan yang telah tersedia  |  |   |   |
|  | Sistem Informasi  |  |   |   |
| 13. Peningkatan Kinerja dan Daya Saing Aktivitas Ekonomi Lokal | Kewenangan dalam pelestarian budaya dan membina pelaku usaha kepariwisataan | Keberadaan blue print pengembangan pariwisata                                  | Meningkatkan kinerja investasi dan produktivitas pada sektor industri kreatif, pertanian dan pariwisata | Meningkatkan produktivitas UMKM sektor produksi barang dan jasa           |
|  | koordinasi dengan stake holder pariwisata dan budaya                        | Kebanggaan masyarakat Surabaya akan obyek wisata surabaya                      |   | Meningkatkan produktivitas koperasi                                       |
|  | Pertumbuhan infrastruktur dan jasa pendukung pariwisata                     |  |   | Meningkatkan produktivitas sektor pertanian                               |
|  | Dukungan stakeholder eksternal bidang pariwisata                            |  |   | Meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan                  |
|  | Data perkembangan Koperasi berbasis IT (SIM K-UMK)                          | Mekanisme penegakan sanksi, Pembinaan / Pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK |   | Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif |
|  | Keberadaan sentra wisata kuliner  | Rencana induk pengembangan koperasi dan UMK                                    |   | Meningkatkan jumlah transaksi keuangan yang dilakukan wisatawan           |
|  |   | Daya tahan berusaha pelaku UMK   |   | Meningkatkan realisasi PMA dan PMDN (SPIPISE dan non SPIPISE)             |
|  | Penetapan Kawasan konservasi  | Blueprint pengembangan kawasan di sektor Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan   |   |   |

| Permasalahan Pembangunan                             | Faktor Pendorong/Penghambat  |   | Prioritas dan sasaran pembangunan  |   |
|--|--|---|--|---|
|  | Faktor Pendorong   | Faktor Penghambat   | Prioritas Pembangunan  | Sasaran Pembangunan   |
|  |  | Validitas data potensi di Sektor Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan  |  |   |
|  | Perkembangan IT dan Inovasi Teknologi di sektor Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan              | Posisi dan Kondisi Geografis Kota Surabaya  |  |   |
|  | Permintaan dan Akses pemasaran produk Pertanian dan Perikanan                                    | Penegakan Hukum terhadap praktek usaha tidak sehat di sektor Pertanian dan Perikanan                          |  |   |
| 14. Pembangunan dan Pengembangan Sistem Transportasi | sistem informasi manajemen transportasi berbasis TIK   | Kondisi angkutan umum dan pengelolaannya  | Pengembangan sistem transportasi dan angkutan masal cepat yang terintegrasi inter moda dan antarmoda | Menyediakan sistem manajemen transportasi yang berkualitas                                    |
|  | sarana dan prasarana penunjang operasional dan perlengkapan jalan                                | Kemacetan lalu lintas   |  |   |
|  | Rencana manajemen transportasi terkait parkir off Street (berupa Gedung Parkir atau Park n Ride) | Peningkatan kapasitas jalan terhadap pertumbuhan kendaraan, antara lain panjang maupun volume/kapasitas jalan |  |   |
|  | regulasi penyediaan angkutan umum yang berkualitas dan berkelanjutan oleh pemerintah             | Sistem jaringan jalan (persimpangan dsb)  |  | Penyediaan dan optimalisasi sistem angkutan umum massal yang berkualitas dan ramah lingkungan |
|  | Kebutuhan masyarakat akan pelayanan transportasi   | Kesesuaian kelas jalan dengan pemanfaatan fungsinya   |  |   |
|  | perkembangan teknologi informasi di sektor transportasi  | Manajemen pengelolaan parkir yang belum optimal   |  |   |

| Permasalahan Pembangunan | Faktor Pendorong/Penghambat   |   | Prioritas dan sasaran pembangunan |                     |
|--------------------------|---|---|-----------------------------------|---------------------|
|                          | Faktor Pendorong  | Faktor Penghambat   | Prioritas Pembangunan             | Sasaran Pembangunan |
|                          | Dukungan dan komitmen pemerintah dan swasta dalam pembangunan dan pengembangan sarana prasarana transportasi di Kota Surabaya | Ketersediaan sistem manajemen & informasi angkutan umum                                     |                                   |                     |
|                          | Minat pengembangan usaha jasa transportasi berupa angkutan penumpang dan barang di Kota Surabaya                              | kualitas pelayanan perijinan bidang lalu lintas dan angkutan jalan                          |                                   |                     |
|                          |   | kesediaan dan kemauan masyarakat menggunakan angkutan umum                                  |                                   |                     |
|                          |   | grand design transportasi terpadu sesuai dengan misi 7 walikota dalam konteks city logistic |                                   |                     |
|                          |   | audit infrastruktur jalan dan jembatan  |                                   |                     |
|                          |   | regulasi tentang pembatasan jumlah kendaraan bermotor (pribadi, umum dan barang)            |                                   |                     |
|                          |   | Kesadaran Masyarakat Untuk Tertib Berlalu Lintas (Perilaku / disiplin pengguna jalan)       |                                   |                     |
|                          |   | Kewenangan pengelolaan prasarana jalan  |                                   |                     |
|                          | dukungan koordinasi oleh kepolisian terkait kanalisasi kendaraan bermotor   |   |                                   |                     |

| Permasalahan Pembangunan                  | Faktor Pendorong/Penghambat  |  | Prioritas dan sasaran pembangunan  |  |
|---|--|--|--|--|
|   | Faktor Pendorong   | Faktor Penghambat  | Prioritas Pembangunan  | Sasaran Pembangunan  |
|   |  | Pertumbuhan penduduk/mobilisasi  |  |  |
| 15. Pembangunan Sarana Prasarana Pematuan | Peraturan/produk hukum tentang operasional pengelolaan dan pelayanan infrastruktur (PJU) | Ketersediaan dan pengolahan database terpadu jaringan utilitas terpasang di Kota Surabaya          | Pembangunan infrastruktur dan jaringan utilitas kota secara terpadu dan merata | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan sistem drainase kota yang terpadu, efektif dan efisien</li> <li>2. Menyediakan dan meningkatkan kinerja jaringan jalan</li> </ol>   |
| 16. Peningkatan Pelayanan Utilitas Kota   | Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan kebersihan dan pertamanan (PJU)                  | Rencana induk, kebijakan strategis&operasional pengelolaan PJU                                     | Pembangunan infrastruktur dan jaringan utilitas kota secara terpadu dan merata | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas layanan air bersih</li> <li>2. Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas PJU</li> <li>3. Meningkatnya pelayanan utilitas kota lainnya</li> </ol> |
|   | Pemanfaatan infrastruktur kota, antara lain gorong-gorong untuk penataan utilitas        | Kapasitas waduk dan boezem kelola pemkot untuk penyediaan air baku kota cadangan                   |  |  |
|   | Tindakan tanggap PJU rusak (pemeliharaan PJU)  | Pengendalian pelaksanaan pembangunan infrastruktur terhadap rencana induk                          |  |  |
|   | Cakupan layanan air bersih   | Penataan utilitas kota   |  |  |
|   | Jumlah pengajuan ijin pemasangan utilitas  | Perkembangan kota (infrastruktur jalan) dan penduduk yang mendorong peningkatan kebutuhan utilitas |  |  |
|   | Perkembangan teknologi ramah lingkungan, konversi dan konservasi energi                  | Biaya pemeliharaan dan operasional utilitas (yang dikelola Pemkot)                                 |  |  |

| Permasalahan Pembangunan                                      | Faktor Pendorong/Penghambat   |  | Prioritas dan sasaran pembangunan   |  |
|---|---|--|---|--|
|   | Faktor Pendorong  | Faktor Penghambat  | Prioritas Pembangunan   | Sasaran Pembangunan  |
|   | Sumber air umbulan di luar wilayah Kota Surabaya  | Pelaksanaan pemasangan utilitas tidak sesuai rekomendasi                             |   |  |
|   |   | Kemandirian kota terhadap penyediaan air baku/bersih                                 |   |  |
|   |   | Pertumbuhan jumlah penduduk terhadap kebutuhan air bersih                            |   |  |
|   |   | Kualitas air baku Kota Surabaya  |   |  |
| 17. Peningkatan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi | Sistem informasi kepegawaian berbasis IT  | Assessment Center  | Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan keuangan daerah | 1. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan<br>2. Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik<br>3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik<br>4. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien |
|   | Kewenangan dalam bidang pengawasan internal   | Kasus pelanggaran disiplin aparatur dan kasus tata kelola administrasi keuangan      |   |  |
|   | Auditor yang kompeten   | SOP untuk beberapa aktivitas pengawasan  |   |  |
|   | Sistem manajemen kinerja, ANJAB dan ABK untuk penataan pegawai                              | Komposisi kompetensi dan kapasitas pegawai   |   |  |
|   | Tuntutan dan keinginan stakeholder untuk menciptakan Pemerintahan yang baik dan profesional | Pemahaman beberapa SKPD terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku |   |  |
|   | Diklat dari pemerintah pusat dan provinsi   | Moratorium pegawai   |   |  |
|   | Kewenangan tentang penataan, penyelamatan dan peelestarian kearsipan (Barpus)               | Implementasi tugas pokok dan fungsi SKPD (bag. Ortala)                               |   |  |

| Permasalahan Pembangunan | Faktor Pendorong/Penghambat  |   | Prioritas dan sasaran pembangunan |                     |
|--------------------------|--|---|-----------------------------------|---------------------|
|                          | Faktor Pendorong   | Faktor Penghambat   | Prioritas Pembangunan             | Sasaran Pembangunan |
|                          | Ketersediaan data dari kecamatan dan kelurahan secara rutin (Bag. Pemerintahan)                                      | Pemahaman SKPD terhadap pentingnya SOP, standar pelayanan (bag. Ortala)               |                                   |                     |
|                          | Kemampuan respons dan adaptasi SDM dalam fasilitasi kegiatan DPRD (Sekwan)   | Beberapa hasil kajian dan telaah belum implementatif (bag. Perekonomian & bag. kesra) |                                   |                     |
|                          | Tuntutan dan keinginan stakeholder untuk menciptakan tata kelola administrasi Pemerintahan yang baik                 | Pemahaman SKPD terhadap produk perencanaan pembangunan (Bappeko)                      |                                   |                     |
|                          | Penawaran kerjasama dari dalam dan luar negeri karena potensi perkembangan Pemerintah Kota Surabaya (bag. Kerjasama) | Mekanisme analisa kebutuhan barang dan penghapusan barang (bag. Perlengkapan)         |                                   |                     |
|                          | Pelayanan administrasi kependudukan berbasis TIK (dispenduk)   | Sinkronisasi peraturan perundang-undangan di Pemerintah pusat (bag. Hukum)            |                                   |                     |
|                          | Pelayanan perizinan yang telah terintegrasi dengan berbasis TIK (SKPD Pelayan perijinan)                             | Kuantitas SDM di bidang kehumasan (bag, humas)  |                                   |                     |
|                          | Kewenangan mempublikasikan kinerja Pemkot (bag, humas)   | Opini publik yang berkembang di media sosial (bag. humas)                             |                                   |                     |
|                          | Komunikasi dengan media massa (bag. Humas)   |   |                                   |                     |



| Permasalahan Pembangunan | Faktor Pendorong/Penghambat   |   | Prioritas dan sasaran pembangunan |                     |
|--------------------------|---|---|-----------------------------------|---------------------|
|                          | Faktor Pendorong  | Faktor Penghambat   | Prioritas Pembangunan             | Sasaran Pembangunan |
|                          | Tuntutan dan keinginan stakeholder untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik |   |                                   |                     |
|                          | Perkembangan mobile apps (bag. Humas)   |   |                                   |                     |
|                          | Reputasi Surabaya dibanding kota lain dalam hal pelayanan publik (disperindag)  |   |                                   |                     |
|                          | Potensi perkembangan dunia usaha yang kondusif (disperindag)                    |   |                                   |                     |
|                          | Kewenangan pengelolaan sumber penerimaan (otonomi daerah)                       | sistem self asesment dalam pemungutan pajak                   |                                   |                     |
|                          | Peraturan daerah terkait pajak dan retribusi                                    | koordinasi dengan pihak ketiga terkait data dan informasi     |                                   |                     |
|                          | sistem informasi yang mendukung pelayanan pajak                                 | penerimaan bagi hasil BUMD                                    |                                   |                     |
|                          | Potensi penerimaan daerah   | tingkat kepatuhan wajib pajak                                 |                                   |                     |
|                          | pertumbuhan pelaku usaha  | Transparansi Wajib Pajak terkait data-data transaksi usahanya |                                   |                     |

Tabel 4.3.  
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2017 dengan  
Bidang-Bidang Pembangunan Nasional

| No        | Bidang-Bidang Pembangunan Nasional                          | Uraian  |   |                | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD   |                |
|-----------|---|---|---|----------------|---|----------------|
|           |   | Program   | Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga | Jumlah (Rp)    | Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga | Jumlah (Rp)    |
| <b>1.</b> | <b>Bidang Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang</b> |   |   |                |   |                |
|           | a. Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan                |   |   |                |   |                |
|           | b. Pengarusutamaan Tatakelola Pemerintah yang Baik          | 1. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan                           |   | 2.884.093.379  |   | 2.884.093.379  |
|           |   | 2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah                                     |   | 23.203.625.250 |   | 23.203.625.250 |
|           |   | 3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal                             |   | 6.452.853.059  |   | 6.452.853.059  |
|           |   | 4. Program Pengendalian Pembangunan Daerah                                    |   | 6.191.655.355  |   | 6.191.655.355  |
|           |   | 5. Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan                              |   | 17.348.806.157 |   | 17.348.806.157 |
|           |   | 6. Program Peningkatan kapasitas lembaga fasilitator perwakilan rakyat daerah |   | 97.938.201.795 |   | 97.938.201.795 |
|           |   | 7. Program Penegakan Peraturan Daerah   |   | 40.921.366.379 |   | 40.921.366.379 |
|           |   | 8. Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan     |   | 31.643.398.787 |   | 31.643.398.787 |

| No        | Bidang-Bidang Pembangunan Nasional                             | Uraian  |   |                 | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD   |                 |
|-----------|--|---|---|-----------------|---|-----------------|
|           |  | Program   | Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga | Jumlah (Rp)     | Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga | Jumlah (Rp)     |
|           |  | 9. Program Penataan, Penyelamatan, dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah |   | 3.216.210.368   |   | 3.216.210.368   |
|           |  | 10. Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah            |   | 2.364.509.959   |   | 2.364.509.959   |
|           |  | 11. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah               |   | 11.114.669.181  |   | 11.114.669.181  |
|           |  | 12. Program Pengelolaan Keuangan Daerah                                 |   | 5.014.560.763   |   | 5.014.560.763   |
|           |  | 13. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan                       |   | 4.817.031.865   |   | 4.817.031.865   |
|           |  | 14. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                          |   | 410.934.256.844 |   | 410.934.256.844 |
|           | c. Pengarusutamaan Gender                                      | 1. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial              |   | 170.155.461.037 |   | 170.155.461.037 |
|           |  | 2. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial                |   | 4.105.835.973   |   | 4.105.835.973   |
|           | d. Pengarusutamaan Anti Narkoba                                |   |   |                 |   |                 |
|           | e. Pembangunan Lintas Bidang Perubahan Iklim                   |   |   |                 |   |                 |
| <b>2.</b> | <b>Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama</b> |   |   |                 |   |                 |
|           | a. Kependudukan dan Keluarga Berencana                         | 1. Program Penataan Administrasi Kependudukan                           |   | 21.631.914.641  |   | 21.631.914.641  |
|           |  | 2. Program Keluarga Berencana   |   | 4.438.044.474   |   | 4.438.044.474   |
|           |  | 3. Program Bina Keluarga  |   | 1.810.148.477   |   | 1.810.148.477   |

| No           | Bidang-Bidang Pembangunan Nasional | Uraian  |   |   | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD   |                 |  |                 |
|--------------|------------------------------------|---|---|---|---|-----------------|--|-----------------|
|              |                                    | Program   | Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga | Jumlah (Rp)   | Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga | Jumlah (Rp)     |  |                 |
| b. Kesehatan |                                    | 1. Program Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin                                  |   | 170.522.501.448   |   | 170.522.501.448 |  |                 |
|              |                                    | 2. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak  |   | 28.583.248.664  |   | 28.583.248.664  |  |                 |
|              |                                    | 3. Program Perbaikan Gizi Ibu dan Anak  |   | 12.183.100.472  |   | 12.183.100.472  |  |                 |
|              |                                    | 4. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu |   | 47.925.214.420  |   | 47.925.214.420  |  |                 |
|              |                                    | 5. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan puskesmas/puskesmas pembantu                             |   | 48.156.531.996  |   | 48.156.531.996  |  |                 |
|              |                                    | 6. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan   |   | 51.850.663.579  |   | 51.850.663.579  |  |                 |
|              |                                    | 7. Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit   |   | 124.972.210.714   |   | 124.972.210.714 |  |                 |
|              |                                    | 8. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan rumah sakit  |   | 97.317.606.882  |   | 97.317.606.882  |  |                 |
|              |                                    | 9. Program Upaya Kesehatan Masyarakat   |   | 74.188.337.186  |   | 74.188.337.186  |  |                 |
|              |                                    | 10. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat  |   | 5.314.088.957   |   | 5.314.088.957   |  |                 |
|              |                                    | c. Pendidikan   |   | 1. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan |   | 852.084.153.619 |  | 852.084.153.619 |
|              |                                    |   |   | 2. Program Penerapan Kurikulum  |   | 50.348.692.212  |  | 50.348.692.212  |

| No | Bidang-Bidang Pembangunan Nasional | Uraian   |   |                 | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD   |                 |
|----|------------------------------------|--|---|-----------------|---|-----------------|
|    |                                    | Program  | Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga | Jumlah (Rp)     | Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga | Jumlah (Rp)     |
|    |                                    | 3. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan                       |   | 108.431.949.643 |   | 108.431.949.643 |
|    |                                    | 4. Program Peningkatan Prestasi  |   | 30.033.853.238  |   | 30.033.853.238  |
|    |                                    | 5. Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Pendidikan                            |   | 12.709.641.384  |   | 12.709.641.384  |
|    |                                    | 6. Program Pendidikan Kesetaraan   |   | 13.583.367.166  |   | 13.583.367.166  |
|    |                                    | 7. Program Pendidikan Masyarakat serta Lembaga Kursus dan Pelatihan                |   | 49.994.051.015  |   | 49.994.051.015  |
|    | d. Perpustakaan                    | 1. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan                     |   | 23.278.163.725  |   | 23.278.163.725  |
|    | e. Pemuda dan Olahraga             | 1. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan                                      |   | 3.876.636.693   |   | 3.876.636.693   |
|    |                                    | 2. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga                                   |   | 109.297.856.979 |   | 109.297.856.979 |
|    | f. Agama                           |  |   |                 |   |                 |
|    | g. Kebudayaan                      | 1. Program perlindungan budaya lokal   |   | 1.682.669.309   |   | 1.682.669.309   |
|    |                                    | 2. Program pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal                               |   | 12.936.002.515  |   | 12.936.002.515  |
|    |                                    | 3. Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal |   | 25.137.335.589  |   | 25.137.335.589  |

| No        | Bidang-Bidang Pembangunan Nasional              | Uraian   |   |                | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD   |                |
|-----------|---|--|---|----------------|---|----------------|
|           |   | Program  | Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga | Jumlah (Rp)    | Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga | Jumlah (Rp)    |
|           | h. Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | 1. Program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan  |   | 2.167.000.932  |   | 2.167.000.932  |
|           | i. Perlindungan Anak                            | 1. Program perlindungan perempuan dan anak   |   | 22.572.711.357 |   | 22.572.711.357 |
| <b>3.</b> | <b>Bidang Pembangunan Ekonomi</b>               |  |   |                |   |                |
|           | a. Stabilitas Harga                             | 1. Program Peningkatan Akses dan Distribusi Pangan   |   | 2.488.274.850  |   | 2.488.274.850  |
|           | b. Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi    | 1. Program Perluasan Jangkauan Pemasaran   |   | 27.648.127.266 |   | 27.648.127.266 |
|           |   | 2. Program perkuatan permodalan usaha mikro  |   | 509.486.527    |   | 509.486.527    |
|           |   | 3. Program standarisasi produk Usaha Mikro   |   | 2.442.872.533  |   | 2.442.872.533  |
|           |   | 4. Program Penguatan Kelembagaan Koperasi  |   | 2.129.386.660  |   | 2.129.386.660  |
|           |   | 5. Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi   |   | 2.863.751.661  |   | 2.863.751.661  |
|           | c. Perdagangan Dalam Negeri                     | 1. Program kerjasama bidang perdagangan  |   | 473.554.254    |   | 473.554.254    |
|           |   | 2. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan                                    |   | 2.888.755.906  |   | 2.888.755.906  |
|           |   | 3. Program pengembangan hub dan simpul logistik untuk mendukung distribusi komoditas potensial |   | 1.348.096.212  |   | 1.348.096.212  |
|           | d. Kerjasama Ekonomi Internasional              | 1. Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi   |   | 3.321.633.221  |   | 3.321.633.221  |
|           | e. Jasa Keuangan                                |  |   |                |   |                |

| No | Bidang-Bidang Pembangunan Nasional | Uraian   |   |                | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD   |                |
|----|------------------------------------|--|---|----------------|---|----------------|
|    |                                    | Program  | Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga | Jumlah (Rp)    | Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga | Jumlah (Rp)    |
|    | f. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) | 1. Program Peningkatan Kinerja BUMD Pendukung Keuangan Daerah          |   | 758.374.638    |   | 758.374.638    |
|    | g. Data dan Informasi Statistik    | 1. Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik                  |   | 2.094.595.529  |   | 2.094.595.529  |
|    | h. Ketenagakerjaan                 | 1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja                                |   | 5.409.599.520  |   | 5.409.599.520  |
|    |                                    | 2. Program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas       |   | 12.915.106.601 |   | 12.915.106.601 |
|    |                                    | 3. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja           |   | 3.138.228.385  |   | 3.138.228.385  |
|    |                                    | 4. Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan                 |   | 1.831.659.032  |   | 1.831.659.032  |
|    |                                    | 1. Program Pemanfaatan Rumah Kreatif                                   |   | 2.677.992.115  |   | 2.677.992.115  |
|    |                                    | 2. Program perkuatan permodalan usaha kreatif                          |   | 399.974.303    |   | 399.974.303    |
|    |                                    | 3. Program legalisasi usaha kreatif                                    |   | 399.974.303    |   | 399.974.303    |
|    |                                    | 4. Program pengembangan destinasi wisata                               |   | 4.302.773.765  |   | 4.302.773.765  |
|    |                                    | 5. Program pengembangan kerjasama dengan stakeholder bidang pariwisata |   | 1.283.986.311  |   | 1.283.986.311  |
|    |                                    | 6. Program Pemasaran Pariwisata  |   | 8.942.210.801  |   | 8.942.210.801  |

| No                                   | Bidang-Bidang Pembangunan Nasional                      | Uraian  |   |                 | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD   |                 |
|--------------------------------------|---|---|---|-----------------|---|-----------------|
|                                      |   | Program   | Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga | Jumlah (Rp)     | Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga | Jumlah (Rp)     |
| 4.                                   | <b>Bidang IPTEK</b>                                     |   |   |                 |   |                 |
|                                      | a. NSPK Pembangunan IPTEK                               |   |   |                 |   |                 |
|                                      | b. Kerangka Regulasi                                    |   |   |                 |   |                 |
| 5.                                   | <b>Bidang Pembangunan Politik</b>                       |   |   |                 |   |                 |
|                                      |   | 1. Program Komunikasi, Informasi, dan Publikasi Masyarakat            |   | 17.987.720.765  |   | 17.987.720.765  |
| 6.                                   | <b>Bidang Aparatur</b>                                  |   |   |                 |   |                 |
|                                      | a. Aparatur Negara                                      | 1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                 |   | 13.214.462.585  |   | 13.214.462.585  |
|                                      |   | 2. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan |   | 240.427.791.099 |   | 240.427.791.099 |
|                                      |   | 3. Program Pendukung Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah      |   | 10.062.316.248  |   | 10.062.316.248  |
| 7.                                   | <b>Bidang Pembangunan Kewilayahan dan Tata Ruang</b>    |   |   |                 |   |                 |
| a. Informasi Geospasial              |   |   |   |                 |   |                 |
| b. Tata Ruang                        | 1. Program Perencanaan Ruang Kota                       |   | 8.649.842.218   |                 | 8.649.842.218   |                 |
|                                      | 2. Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota |   | 7.162.964.937   |                 | 7.162.964.937   |                 |
| c. Pengembangan Kawasan Strategis    |   |   |   |                 |   |                 |
| d. Desentralisasi dan Otonomi Daerah | 1. Program Penataan Daerah Otonom                       |   | 92.209.116.835  |                 | 92.209.116.835  |                 |



| No        | Bidang-Bidang Pembangunan Nasional         | Uraian   |   |                 | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD   |                 |
|-----------|--|--|---|-----------------|---|-----------------|
|           |  | Program  | Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga | Jumlah (Rp)     | Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga | Jumlah (Rp)     |
|           |  | 2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah                  |   | 28.900.161.804  |   | 28.900.161.804  |
| <b>8.</b> | <b>Bidang Sarana dan Prasana</b>           |  |   |                 |   |                 |
|           | a. Perumahan dan Prasarana Dasar Pemukiman | 1. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman                                |   | 351.047.640.880 |   | 351.047.640.880 |
|           | b. Sarana dan Prasarana Transportasi       | 1. Program Peningkatan Sistem Manajemen Transportasi                       |   | 181.570.883.323 |   | 181.570.883.323 |
|           |  | 2. Program pengembangan sistem transportasi berkelanjutan                  |   | 18.553.468.855  |   | 18.553.468.855  |
|           |  | 3. Program manajemen lalu lintas angkutan barang                           |   | 4.604.500.180   |   | 4.604.500.180   |
|           |  | 4. Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan                  |   | 211.577.504.440 |   | 211.577.504.440 |
|           | c. Komunikasi dan Informatika              | 1. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi |   | 45.516.272.151  |   | 45.516.272.151  |
|           | d. Energi dan Ketenagalistrikan            | 1. Program Pengembangan dan Pemanfaatan energi alternatif                  |   | 5.125.664.593   |   | 5.125.664.593   |
|           |  | 2. Program Upaya Konservasi Energi   |   | 1.177.827.220   |   | 1.177.827.220   |
|           | e. Ketahanan Pangan dan Air                | 1. Program Peningkatan Ketersediaan, Keanekaragaman dan Keamanan Pangan    |   | 6.183.205.160   |   | 6.183.205.160   |
|           |  | 2. Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan                       |   | 2.329.365.645   |   | 2.329.365.645   |

| No        | Bidang-Bidang Pembangunan Nasional   | Uraian   |   |   | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD   |                 |
|-----------|--|--|---|---|---|-----------------|
|           |  | Program  | Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga | Jumlah (Rp)   | Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga | Jumlah (Rp)     |
| f.        | Dukungan Terhadap Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana                              | 1. Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum         |   | 359.195.771.039   |   | 359.195.771.039 |
|           |  | 2. Program pengamanan aset   |   | 11.442.465.537  |   | 11.442.465.537  |
|           |  | 3. Program pengelolaan aset  |   | 13.686.455.070  |   | 13.686.455.070  |
|           |  | 4. Program pengembangan dan pengelolaan sistem drainase kota                                 |   | 525.389.637.266   |   | 525.389.637.266 |
|           |  | 5. Program Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan PJU   |   | 199.597.219.845   |   | 199.597.219.845 |
|           |  | 6. Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota   |   | 2.169.824.645   |   | 2.169.824.645   |
|           |  | g.   | Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi dalam Pembiayaan Infrastruktur  | 1. Program Peningkatan Investasi fasilitas pendukung logistik |   | 958.032.920     |
| <b>9.</b> | <b>Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>  |  |   |   |   |                 |
| a.        | Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Hasil Produksi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan | 1. Program Penyediaan Sarana Prasarana Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura              |   | 2.030.896.577   |   | 2.030.896.577   |
|           |  | 2. Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya anaman Pangan dan Hortikultura |   | 2.553.659.017   |   | 2.553.659.017   |
|           |  | 3. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian   |   | 1.378.142.248   |   | 1.378.142.248   |

| No | Bidang-Bidang Pembangunan Nasional   | Uraian   |   |               | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD   |               |
|----|--|--|---|---------------|---|---------------|
|    |  | Program  | Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga | Jumlah (Rp)   | Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga | Jumlah (Rp)   |
|    |  | 4. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan ternak                 |   | 2.029.666.688 |   | 2.029.666.688 |
|    |  | 5. Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Peternakan       |   | 1.565.711.488 |   | 1.565.711.488 |
|    |  | 6. Program Penyediaan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan                  |   | 2.851.148.616 |   | 2.851.148.616 |
|    |  | 7. Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna Budidaya Perikanan dan Kelautan |   | 798.734.015   |   | 798.734.015   |
|    | b. Peningkatan Nilai Tambah Industri Mineral dan Pertambangan Berkelanjutan                        |  |   |               |   |               |
|    | d. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahat serta Restorasi Gambut                                   |  |   |               |   |               |
|    | e. Peningkatan Konservasi, Pengelolaan DAS serta Pelestarian dan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati |  |   |               |   |               |

| No | Bidang-Bidang Pembangunan Nasional  | Uraian   |   |                 | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD   |                 |
|----|---|--|---|-----------------|---|-----------------|
|    |   | Program  | Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga | Jumlah (Rp)     | Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga | Jumlah (Rp)     |
|    | f. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana serta Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Kebencanaan | 1. Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) |   | 81.806.957.976  |   | 81.806.957.976  |
|    |   | 2. Program pengelolaan kebersihan                                |   | 305.393.814.352 |   | 305.393.814.352 |
|    |   | 3. Program pengendalian dan pengawasan dampak lingkungan         |   | 8.973.319.271   |   | 8.973.319.271   |
|    |   | 4. Program penanggulangan bencana                                |   | 57.040.677.044  |   | 57.040.677.044  |

Selanjutnya masing-masing prioritas pembangunan daerah tersebut dijelaskan dalam program-program beserta tolok ukur kinerja sebagaimana Tabel 4.4 tentang Penjelasan Program Pembangunan Kota Surabaya Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 4.4.  
Penjelasan Program Pembangunan Kota Surabaya Tahun 2017

| No | Prioritas / Program  | Kinerja  |        | Perangkat Daerah Penanggung jawab   |
|----|--|--|--------|---|
|    |  | Indikator  | Target |   |
| 1  | <b>Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan</b>              |  |        |   |
|    | Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan | 1. Persentase PAUD yang ditingkatkan sarana prasarananya   | 25%    | Dinas Pendidikan<br>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang |
|    |  | 2. Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SD/MI   | 100%   |   |
|    |  | 3. Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SMP/MTs   | 100%   |   |
|    |  | 4. Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SMA/MA/SMK  | 100%   |   |
|    |  | 5. Persentase lembaga pendidikan SD yang sarana prasarananya sesuai standar  | 70%    |   |
|    |  | 6. Persentase lembaga pendidikan SMP yang sarana prasarananya sesuai standar   | 75%    |   |
|    |  | 7. Persentase lembaga pendidikan SMA yang sarana prasarananya sesuai standar   | 75,89% |   |
|    |  | 8. Persentase lembaga pendidikan SMK yang sarana prasarananya sesuai standar   | 74,76% |   |
|    |  | 9. Persentase fasilitas pendidikan dalam kondisi baik  | 55,77% |   |
|    | Program Penerapan Kurikulum  | 1. Persentase PAUD yang menerapkan kurikulum sesuai ketentuan  | 35,08% | Dinas Pendidikan  |
|    |  | 2. Persentase lembaga pendidikan SD yang memiliki RPP untuk seluruh mata pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum  | 80%    |   |
|    |  | 3. Persentase lembaga pendidikan SMP yang memiliki RPP untuk seluruh mata pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum | 80%    |   |

| No | Prioritas / Program                                       | Kinerja  |        | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|----|---|--|--------|-----------------------------------|
|    |   | Indikator  | Target |                                   |
|    |   | 4. Persentase lembaga pendidikan SMA yang memiliki RPP untuk seluruh mata pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum                                     | 80,14% |                                   |
|    |   | 5. Persentase lembaga pendidikan SMK yang memiliki RPP untuk seluruh mata pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum                                     | 79,61% |                                   |
|    | Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 1. Persentase guru PAUD yang kompeten  | 62,18% | Dinas Pendidikan                  |
|    |   | 2. Persentase guru SD yang memiliki sertifikasi  | 65,66% |                                   |
|    |   | 3. Persentase guru SMP yang memiliki sertifikasi   | 74,39% |                                   |
|    |   | 4. Persentase guru SMA yang memiliki sertifikasi   | 71,88% |                                   |
|    |   | 5. Persentase guru SMK yang memiliki sertifikasi   | 68,49% |                                   |
|    |   | 6. Persentase guru SMP yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang diajar   | 95,43% |                                   |
|    |   | 7. Persentase guru SMA yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang diajar   | 97,93% |                                   |
|    |   | 8. Persentase guru SMK yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang diajar   | 95,17% |                                   |
|    |   | 9. Persentase guru SD yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik yang dibuktikan melalui ijazah S1 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau AKTA 4 | 86,53% |                                   |
|    |   | 10. Persentase tenaga kependidikan PAUD yang kompeten  | 53,63% |                                   |
|    |   | 11. Persentase tenaga kependidikan SD yang kompeten  | 46,37% |                                   |
|    |   | 12. Persentase tenaga kependidikan SMP yang kompeten   | 51,82% |                                   |
|    |   | 13. Persentase tenaga kependidikan SMA yang kompeten   | 55,56% |                                   |

| No | Prioritas / Program  | Kinerja  |        | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|----|--|--|--------|-----------------------------------|
|    |  | Indikator  | Target |                                   |
|    |  | 14. Persentase tenaga kependidikan SMK yang kompeten                           | 49,91% |                                   |
|    | Program Peningkatan Prestasi                                     | 1. Persentase prestasi SD pada event tingkat provinsi/nasional/internasional   | 45,16% | Dinas Pendidikan                  |
|    |  | 2. Persentase prestasi SMP pada event tingkat provinsi/nasional/internasional  | 50%    |                                   |
|    |  | 3. Persentase prestasi SMA pada event tingkat provinsi/nasional/internasional  | 63,64% |                                   |
|    |  | 4. Persentase prestasi SMK pada event tingkat provinsi/nasional/internasional  | 25%    |                                   |
|    |  | 5. Persentase PAUD beprestasi  | 1,14%  |                                   |
|    | Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Pendidikan             | 1. Persentase lembaga pendidikan SD yang tertib administrasi                   | 56,82% | Dinas Pendidikan                  |
|    |  | 2. Persentase lembaga pendidikan MI yang tertib administrasi                   | 39,60% |                                   |
|    |  | 3. Persentase lembaga pendidikan SMP yang tertib administrasi                  | 64,44% |                                   |
|    |  | 4. Persentase lembaga pendidikan MTs yang tertib administrasi                  | 38,78% |                                   |
|    |  | 5. Persentase lembaga pendidikan SMA yang tertib administrasi                  | 50%    |                                   |
|    |  | 6. Persentase lembaga pendidikan MA yang tertib administrasi                   | 25%    |                                   |
|    |  | 7. Persentase lembaga pendidikan SMK yang tertib administrasi                  | 59,60% |                                   |
|    | Program Pendidikan Kesetaraan                                    | 1. Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan Paket A                         | 70%    | Dinas Pendidikan                  |
|    |  | 2. Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan Paket B                         | 88,12% |                                   |
|    |  | 3. Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan Paket C                         | 90,85% |                                   |
|    | Program Pendidikan Masyarakat serta Lembaga Kursus dan Pelatihan | 1. Persentase lembaga kursus dan pelatihan yang mendaftarkan proses akreditasi | 5,53%  | Dinas Pendidikan                  |
|    |  | 2. Persentase pertumbuhan peserta didik yang mengikuti                         | 0%     |                                   |

| No | Prioritas / Program  | Kinerja   |        | Perangkat Daerah Penanggung jawab   |
|----|--|---|--------|---|
|    |  | Indikator   | Target |   |
|    |  | pendidikan masyarakat   |        |   |
|    | Program Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin                                  | 1. Persentase Kepemilikan Jaminan Kesehatan   | 100%   | Dinas Kesehatan   |
|    |  | 2. Persentase penduduk miskin yang memanfaatkan pelayanan kesehatan   | 11%    |   |
|    | Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak  | 1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4   | 98,45% | Dinas Kesehatan   |
|    |  | 2. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Tolinakes)   | 96,94% |   |
|    |  | 3. Cakupan kunjungan neonatal lengkap   | 81%    |   |
|    |  | 4. Cakupan imunisasi dasar lengkap  | 93,81% |   |
|    | Program Perbaikan Gizi Ibu dan Anak  | 1. Prevalensi Balita Gizi kurang  | 9,50%  | Dinas Kesehatan   |
|    |  | 2. Prevalensi Balita gizi buruk   | < 1%   |   |
|    |  | 3. Persentase Penimbangan balita  | 81,30% |   |
|    |  | 4. Persentase ibu hamil yang mendapatkan 90 tablet Fe   | 94,62% |   |
|    | Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu | 1. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu                            | 74%    | Dinas Kesehatan<br>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang                            |
|    |  | 2. Persentase fasilitas kesehatan dalam kondisi baik  | 52,70% |   |
|    | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas/Puskesmas Pembantu                             | 1. Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan                                    | 100%   | Dinas Kesehatan   |
|    | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan   | 1. Persentase tenaga kesehatan yang memiliki izin   | 82%    | UPT Dinas Kesehatan (RSUD Bhakti Dharma Husada)<br>UPT Dinas Kesehatan (RSUD dr. Mohamad Soewandhie)<br>Dinas Kesehatan |
|    |  | 2. Persentase sarana kesehatan yang memiliki izin   | 82%    |   |
|    |  | 3. Persentase pencapaian SPM Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada   | 72%    |   |
|    |  | 4. Persentase pencapaian SPM Rumah Sakit dr. Mohamad Soewandhie   | 76%    |   |
|    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit   | 1. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai standar tipe rumah sakit | 78%    | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta  |



| No  | Prioritas / Program   | Kinerja  |          | Perangkat Daerah Penanggung jawab  |
|---|---|--|----------|--|
|   |   | Indikator  | Target   |  |
|   |   | 2. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai standar tipe rumah sakit          | 85%      | Karya dan Tata Ruang<br>UPT Dinas Kesehatan (RSUD Bhakti Dharma Husada)<br>UPT Dinas Kesehatan (RSUD dr. Mohamad Soewandhie) |
|   |   | 3. Rata-rata waktu tunggu layanan operasi elektif RSUD Bhakti Dharma Husada  | 10 hari  |  |
|   |   | 4. Rata-rata waktu tunggu layanan rawat jalan RSUD Bhakti Dharma Husada  | 47 menit |  |
|   |   | 5. Rata-rata waktu tunggu layanan operasi elektif RSUD dr. Mohamad Soewandhie                                      | 48 hari  |  |
|   | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit                                     | 1. Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD dr. M. Soewandhie                                    | 100%     | UPT Dinas Kesehatan (RSUD Bhakti Dharma Husada)<br>UPT Dinas Kesehatan (RSUD dr. Mohamad Soewandhie)                         |
|   |   | 2. Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada                                 | 100%     |  |
|   | Program Upaya Kesehatan Masyarakat  | 1. Persentase rumah sehat  | 75%      | Dinas Kesehatan  |
|   |   | 2. Persentase TPM memenuhi syarat higienis sanitasi  | 81%      |  |
|   |   | 3. Cakupan Kelurahan Yang Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu)   | 82%      |  |
|   | Program Keluarga Berencana  | 1. Persentase peserta KB baru  | 81,15%   | Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  |
|   |   | 2. Persentase peserta KB aktif   | 77,31%   |  |
|   |   | 3. Persentase peserta KB aktif yang <i>drop out</i> kontrasepsi  | 5,80%    |  |
|   |   | 4. Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi ( <i>unmeet need</i> )   | 20,85%   |  |
|   | Program Bina Keluarga   | 1. Persentase Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)/Bina Keluarga Remaja (BKR)/Bina Keluarga Lansia (BKL) yang aktif | 47,90%   | Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  |
| 2. Persentase Pasangan Usia Subur yang Usia Istrinya Kurang dari 20 Tahun |   | 3,40%  |          |  |
| <b>2</b>  | <b>Pembangunan infrastruktur dan jaringan utilitas kota secara terpadu dan merata</b> |  |          |  |
|   | Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Drainase Kota                             | 1. Luas genangan (ha)  | 1209 ha  | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan   |
|   |   | 2. Tinggi genangan (cm)  | 16 cm    |  |
|   |   | 3. Lama genangan (menit)   | 51 menit |  |

| No       | Prioritas / Program  | Kinerja  |           | Perangkat Daerah Penanggung jawab  |
|----------|--|--|-----------|--|
|          |  | Indikator  | Target    |  |
|          |  | 4. Persentase pembangunan jaringan drainase yang selesai tepat waktu                                   | 80%       |  |
|          | Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan  | 1. Persentase pelanggan baru PDAM (%)  | 9,22%     | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan  |
|          | Program Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan PJU  | 1. Panjang jalan yang sudah mendapatkan penerangan   | 2540250 m | Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau   |
|          |  | 2. Persentase pemasangan PJU hemat energi  | 64,49%    |  |
|          | Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota  | 1. Persentase rekomendasi utilitas yang dikeluarkan dibanding permohonan utilitas yang memenuhi syarat | 100%      | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan<br>Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau  |
| <b>3</b> | <b>Meningkatkan penanganan dan pemberdayaan PMKS</b>   |  |           |  |
|          | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial  | 1. Persentase PMKS yang ditangani  | 60%       | Dinas Sosial dan 31 Kecamatan  |
|          | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial  | 1. Persentase PSKS Yang Berpartisipasi Dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial                   | 45%       | Dinas Sosial   |
|          | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat   | 1. Persentase PMKS usia produktif dari hasil pelatihan atau pembinaan yang berproduksi                 | 75%       | Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  |
| <b>4</b> | <b>Meningkatkan kinerja investasi dan produktivitas pada sektor industri kreatif, pertanian dan pariwisata</b> |  |           |  |
|          | Program Perluasan Jangkauan Pemasaran  | 1. Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya                           | 40%       | Dinas Perdagangan<br>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang<br>Dinas Koperasi dan Usaha Mikro<br>31 Kecamatan |
|          |  | 2. Persentase sentra yang beroperasi secara optimal  | 35%       |  |
|          |  | 3. Persentase pembangunan fasilitas ekonomi rakyat   | 2,40%     |  |

| No | Prioritas / Program  | Kinerja  |        | Perangkat Daerah Penanggung jawab   |
|----|--|--|--------|---|
|    |  | Indikator  | Target |   |
|    | Program Perkuatan Permodalan Usaha Mikro   | 1. Persentase usaha mikro yang berhasil mendapatkan bantuan permodalan   | 4%     | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro  |
|    | Program Standarisasi Produk Usaha Mikro  | 1. Persentase usaha mikro yang mengaplikasikan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam proses usaha                                 | 20%    | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro  |
|    |  | 2. Persentase produk usaha mikro yang layak diuji mutukan  | 20%    |   |
|    | Program Penguatan Kelembagaan Koperasi   | 1. Persentase koperasi berklasifikasi AAB  | 57,81% | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro  |
|    | Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi  | 1. Tingkat pertumbuhan koperasi yang meningkat volume usahanya   | 68%    | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro  |
|    | Program Penyediaan Sarana Prasarana Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura               | 1. Persentase pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana produksi          | 12%    | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian  |
|    | Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura | 1. Persentase pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya    | 25%    | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian  |
|    | Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian  | 1. Persentase pembudidaya yang omzetnya meningkat  | 61%    | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian  |
|    | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Ternak                                | 1. Persentase populasi hewan ternak yang mendapatkan vaksinasi dan pengobatan  | 83%    | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian  |
|    | Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Peternakan                      | 1. Persentase pembudidaya ternak yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya                             | 25%    | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian  |
|    | Program Penyediaan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan                                 | 1. Persentase pembudidaya yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana perikanan dan kelautan                            | 12%    | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian  |
|    | Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna Budidaya Perikanan dan Kelautan                | 1. Persentase pembudidaya perikanan dan kelautan yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya             | 25%    | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian  |
|    | Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif                           | 1. Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif kuliner | 5%     | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata<br>Dinas Koperasi dan Usaha Mikro<br>Dinas Pengendalian |

| No  | Prioritas / Program  | Kinerja   |        | Perangkat Daerah Penanggung jawab  |
|---|--|---|--------|--|
|   |  | Indikator   | Target |  |
|   |  | 2. Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif desain dan fashion | 5%     | Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dinas Perdagangan |
|   |  | 3. Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif handicraft         | 5%     |  |
|   |  | 4. Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif seni pertunjukkan  | 5%     |  |
|   |  | 5. Persentase rumah kreatif yang beroperasi   | 43,75% |  |
|   | Program Perkuatan Permodalan Usaha Kreatif   | 1. Persentase kebutuhan modal kerja dan modal investasi pelaku usaha kreatif yang dapat dipenuhi  | 5%     | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro   |
|   | Program Legalisasi Usaha Kreatif   | 1. Persentase pelaku usaha kreatif yang mendapatkan legalisasi usaha  | 20%    | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro   |
|   | Program Pengembangan Destinasi Wisata  | 1. Persentase ODTW yang berhasil dikembangkan   | 18%    | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  |
|   | Program Pengembangan Kerjasama dengan Stakeholder Bidang Pariwisata  | 1. Tingkat capaian kesepakatan dengan stakeholder bidang pariwisata yang dilaksanakan 5 kesepakatan                                     | 20%    | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  |
|   | Program Pemasaran Pariwisata   | 1. Persentase kunjungan di objek wisata terhadap kunjungan wisatawan  | 43,21% | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  |
|   | Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi  | 1. Tingkat pertumbuhan ijin realisasi investasi   | 8%     | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu   |
| 2. Tingkat pertumbuhan jumlah minat dan rencana investasi |  | 12%   |        |  |
| <b>5</b>  | <b>Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman dengan pembangunan sarana prasarana lingkungan dan pengembangan energi alternatif</b> |   |        |  |
|   | Program Perumahan dan Kawasan Permukiman   | 1. Persentase rumah tinggal tapak tidak layak huni yang diperbaiki  | 20%    | Dinas Sosial<br>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang<br>Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah            |
|   |  | 2. Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni  | 12%    |  |
|   |  | 3. Persentase pembangunan (rehabilitasi) jalan lingkungan dan kelengkapannya  | 49,20% |  |
|   |  | 4. Persentase Pelayanan Sanitasi Permukiman   | 46%    |  |

| No       | Prioritas / Program   | Kinerja  |                               | Perangkat Daerah Penanggung jawab  |
|----------|---|--|-------------------------------|--|
|          |   | Indikator  | Target                        |  |
|          | Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Alternatif  | 1. Akumulasi penerapan teknologi dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif terbarukan         | 33 unit                       | Dinas Lingkungan Hidup   |
|          |   | 2. Akumulasi entitas lingkungan yang berperan serta dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif | 6 lingkungan                  | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang        |
|          | Program Upaya Konservasi Energi   | 1. Akumulasi kegiatan dan/atau usaha yang telah menerapkan konservasi energi                             | 124 kegiatan dan / atau usaha | Dinas Lingkungan Hidup   |
| <b>6</b> | <b>Peningkatan kualitas lingkungan melalui upaya peningkatan kebersihan dan penghijauan</b>                 |  |                               |  |
|          | Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau   | 1. Persentase pertumbuhan luas RTH yang dipelihara dan diawasi   | 3,66%                         | Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau<br>Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
|          |   | 2. Persentase luas RTH yang dibangun dan ditingkatkan fungsinya  | 34,01%                        |  |
|          | Program Pengelolaan Kebersihan  | 1. Persentase pembangunan fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan teknologi 3R                      | 7,69%                         | Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau<br>31 Kecamatan                         |
|          |   | 2. Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan                               | 2,19%                         |  |
|          |   | 3. Persentase pengangkutan sampah dari TPS ke TPA yang ≤ 1 hari  | 81,62%                        |  |
|          | Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan   | 1. Persentase ketaatan/kepatuhan terhadap aspek lingkungan   | 50%                           | Dinas Lingkungan Hidup<br>Dinas Perhubungan                                      |
| <b>7</b> | <b>Pengembangan sistem transportasi dan angkutan masal cepat yang terintegrasi inter moda dan antarmoda</b> |  |                               |  |
|          | Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan  | 1. Persentase jalan yang terbangun (%)   | 0,24%                         | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan                                     |
|          |   | 2. Persentase penyediaan prasarana pejalan kaki (%)  | 11,45%                        |  |
|          |   | 3. Persentase jalan yang mendapatkan perbaikan (%)   | 5,16%                         |  |
|          |   | 4. Persentase Pembangunan Jaringan Jalan dan Jembatan yang selesai tepat waktu                           | 80%                           |  |
|          | Program Peningkatan Sistem Manajemen Transportasi   | 1. Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota  | 29,19 km/jam                  | Dinas Perhubungan  |
|          |   | 2. Persentase selisih tingkat kecelakaan lalu lintas   | 2%                            |  |

| No       | Prioritas / Program  | Kinerja  |             | Perangkat Daerah Penanggung jawab           |
|----------|--|--|-------------|---|
|          |  | Indikator  | Target      |   |
|          | Program Pengembangan Sistem Transportasi Berkelanjutan   | 1. Rata-rata headway angkutan umum (Angkot/feeder)   | 26 menit    | Dinas Perhubungan                           |
|          |  | 2. Rata-rata headway angkutan umum (Bus Kota)  | 43,32 menit |   |
|          |  | 3. Persentase penyediaan sarana prasarana pendukung transportasi berkelanjutan                               | 100%        |   |
| <b>8</b> | <b>Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan keuangan daerah</b> |  |             |   |
|          | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal   | 1. Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah I   | 100%        | Inspektorat<br>Badan Kepegawaian dan Diklat |
|          |  | 2. Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah I   | 100%        |   |
|          |  | 3. Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah II  | 100%        |   |
|          |  | 4. Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah II  | 100%        |   |
|          |  | 5. Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah III   | 100%        |   |
|          |  | 6. Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah III                                       | 100%        |   |
|          | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur   | 1. Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural  | 88,08%      | Badan Kepegawaian dan Diklat                |
|          |  | 2. Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis dan fungsional  | 35,58%      |   |
|          |  | 3. Persentase terbentuknya dan berfungsinya <i>assessment centre</i>   | 20%         |   |
|          |  | 4. Persentase aparatur yang memiliki kinerja baik  | 91%         |   |
|          | Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan   | 1. Persentase Standar Pelayanan (SP), yang di dalamnya mencakup proses bisnis, yang tersusun                 | 100%        | Bagian Organisasi                           |
|          |  | 2. Persentase Pendampingan Penyusunan POS (Prosedur Operasional Standar) SKPD                                | 100%        |   |
|          |  | 3. Persentase Prosedur Operasional Standar (POS) dan Standar Pelayanan (SP) Perangkat Daerah yang dievaluasi | 15%         |   |
|          |  | 4. Persentase Perangkat Daerah (PD) yang dilakukan evaluasi kelembagaan                                      | 100%        |   |

| No | Prioritas / Program  | Kinerja  |        | Perangkat Daerah Penanggung jawab   |
|----|--|--|--------|---|
|    |  | Indikator  | Target |   |
|    | Program Penataan Daerah Otonom   | 1. Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update   | 100%   | Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah<br>31 Kecamatan                           |
|    |  | 2. Persentase nama rupabumi yang memenuhi syarat untuk diajukan pembakuan  | 42,51% |   |
|    | Program Penataan, Penyelamatan, dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah       | 1. Persentase jumlah arsip yang diakuisisi   | 20%    | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  |
|    |  | 2. Persentase perangkat daerah, unit kerja, BUMD dan sekolah negeri yang tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan | 22,60% |   |
|    | Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah                   | 1. Persentase kajian/rekomendasi terkait perekonomian yang termanfaatkan sebagai dasar kebijakan/keputusan             | 25%    | Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah<br>Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat |
|    |  | 2. Persentase kajian/rekomendasi di sektor kesejahteraan rakyat yang termanfaatkan sebagai dasar kebijakan/keputusan   | 100%   |   |
|    | Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Fasilitator Perwakilan Rakyat Daerah | 1. Persentase kegiatan DPRD terkait rapat dan perundang-undangan yang terfasilitasi                                    | 100%   | Sekretariat DPRD  |
|    |  | 2. Persentase kegiatan DPRD terkait informasi dan protokol yang terfasilitasi  | 100%   |   |
|    | Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan         | 1. Persentase pemanfaatan aset   | 91%    | Seluruh Perangkat Daerah  |
|    |  | 2. Persentase sistem informasi pemerintah kota surabaya yang diintegrasikan dengan sistem informasi barang daerah      | 20%    |   |
|    |  | 3. Persentase kendaraan yang berfungsi dengan baik   | 77%    |   |
|    |  | 4. Persentase gedung pemerintahan dalam kondisi baik   | 74,36% |   |
|    |  | 5. Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik  | 100%   |   |
|    |  | 6. Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran   | 100%   |   |
|    | Program Pendukung Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah              | 1. Persentase terlaksananya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar                   | 100%   | Bagian Umum dan Protokol  |

| No | Prioritas / Program                                   | Kinerja  |        | Perangkat Daerah Penanggung jawab           |
|----|---|--|--------|---|
|    |   | Indikator  | Target |   |
|    | Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah | 1. Persentase bidang MoU kerjasama (non perdagangan) antar pemerintah daerah dan pihak ketiga yang ditindaklanjuti             | 42,86% | Bagian Administrasi Kerjasama               |
|    |   | 2. Persentase bidang MoU kerjasama (non perdagangan) luar negeri yang ditindaklanjuti  | 33,33% |   |
|    |   | 3. Persentase MoU kerjasama (non perdagangan) yang dievaluasi  | 42,10% |   |
|    | Program Perencanaan Pembangunan Daerah                | 1. Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral                         | 100%   | Seluruh Perangkat Daerah                    |
|    |   | 2. Persentase PD lingkup bidang kesejahteraan rakyat dan aparatur pemerintahan yang dokumen perencanaan tahunannya berkualitas | 65%    |   |
|    |   | 3. Persentase PD lingkup bidang fisik dan prasarana yang dokumen perencanaan tahunannya berkualitas                            | 65%    |   |
|    |   | 4. Persentase PD lingkup bidang ekonomi yang dokumen perencanaan tahunannya berkualitas  | 65%    |   |
|    | Program Pengendalian Pembangunan Daerah               | 1. Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan di aspek waktu  | 90%    | Badan Perencanaan Pembangunan               |
|    |   | 2. Tingkat capaian keberhasilan kegiatan di aspek <i>output</i>  | 96%    | Bagian Administrasi Pembangunan             |
|    | Program Pengelolaan Keuangan Daerah                   | 1. Tingkat ketepatan penyelesaian dokumen keuangan   | 80%    | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah |
|    | Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan         | 1. Persentase realisasi produk hukum daerah yang dihasilkan  | 100%   | Bagian Hukum                                |
|    |   | 2. Persentase produk hukum daerah yang dievaluasi  | 100%   |   |
|    |   | 3. Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti  | 100%   |   |
|    |   | 4. Persentase Produk hukum yang disebarluaskan   | 100%   |   |
|    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran            | 1. Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran  | 72%    | Seluruh Perangkat Daerah                    |



| No | Prioritas / Program                                | Kinerja  |        | Perangkat Daerah Penanggung jawab  |
|----|--|--|--------|--|
|    |  | Indikator  | Target |  |
|    | Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik | 1. Rata-rata toleransi ( <i>margin of error</i> ) pada data-data terkait perhitungan indikator kinerja dalam RPJMD | 5%     | Badan Perencanaan Pembangunan  |
|    | Program Penataan Administrasi Kependudukan         | 1. Persentase ketepatan waktu pengurusan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian)               | 99,57% | Perangkat Daerah yang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil & 31 Kecamatan   |
|    |  | 2. Cakupan penerbitan akte kelahiran (berdasarkan data SIAK)   | 99,57% |  |
|    |  | 3. Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pendaftaran penduduk (KTP dan KK)                                  | 100%   |  |
|    |  | 4. Cakupan penerbitan akte kematian (berdasarkan data SIAK)  | 86,55% |  |
|    |  | 5. Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian)                | 93,92% |  |
|    |  | 6. Persentase jenis data kependudukan yang dimanfaatkan  | 100%   |  |
|    |  | 7. Persentase sistem pelayanan publik berbasis SIAK  | 100%   |  |
|    |  | 8. Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan   | 100%   |  |
|    | Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan      | 1. Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan  | 72%    | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang<br>Dinas Perhubungan<br>Dinas Lingkungan Hidup<br>Dinas Koperasi dan Usaha Mikro<br>Dinas Perdagangan<br>Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian<br>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |

| No       | Prioritas / Program   | Kinerja   |                | Perangkat Daerah Penanggung jawab                              |
|----------|---|---|----------------|--|
|          |   | Indikator   | Target         |  |
|          |   |   |                | Dinas Tenaga Kerja   |
|          | Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi | 1. Persentase layanan publik administratif yang berbasis TIK  | 31,56%         | Dinas Komunikasi dan Informatika                               |
|          |   | 2. Persentase pengelolaan jaringan telekomunikasi pendukung pelayanan publik  | 100%           |  |
|          | Program Komunikasi, Informasi, dan Publikasi Masyarakat                 | 1. Persentase berita positif Pemerintah Kota Surabaya yang terinformasikan kepada masyarakat  | 83%            | Dinas Komunikasi dan Informatika<br>Bagian Hubungan Masyarakat |
|          |   | 2. Rata-rata pemanfaatan publik terhadap berbagai saluran komunikasi informasi yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya          | 8765 kunjungan |  |
|          | Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan                | 1. Persentase temuan yang ditindaklanjuti   | 70%            | Dinas Perdagangan  |
|          | Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah                  | 1. Persentase Peningkatan Pajak Daerah  | 14,19%         | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah                    |
|          | Program Peningkatan Kinerja BUMD Pendukung Keuangan Daerah              | 1. Persentase BUMD yang berkinerja sesuai standar   | 67%            | Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah              |
| <b>9</b> | <b>Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum</b>                     |   |                |  |
|          | Program Penegakan Peraturan Daerah                                      | 1. Persentase pelanggaran Perda terkait reklame yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti   | 100%           | Satuan Polisi Pamong Praja<br>31 Kecamatan                     |
|          |   | 2. Persentase pelanggaran Perda bidang terkait PKL, PSK, anjal dan gepeng, dan RHU yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti      | 100%           |  |
|          |   | 3. Persentase pelanggaran Perda terkait HO, IMB, Kebersihan, Parkir Umum, Perda Lainnya yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti | 100%           |  |
|          |   | 4. Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum   | 100%           |  |

| No        | Prioritas / Program   | Kinerja   |               | Perangkat Daerah Penanggung jawab  |
|-----------|---|---|---------------|--|
|           |   | Indikator   | Target        |  |
|           | Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan lingkungan            | 1. Persentase tertanganinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum                            | 100%          | Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat<br>Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat<br>Dinas Sosial |
|           |   | 2. Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan dan difasilitasi yang berjalan dengan lancar | 100%          |  |
| <b>10</b> | <b>Meningkatkan pemberdayaan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak</b> |   |               |  |
|           | Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan                              | 1. Persentase indikator PUG tingkat kecamatan yang terpenuhi                                    | 100%          | Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  |
|           | Program Perlindungan Perempuan dan Anak   | 1. Persentase permasalahan perempuan dan anak yang ditangani                                    | 100%          | Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak<br>31 Kecamatan  |
|           |   | 2. Persentase efektivitas pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (PPTP2A)      | 65,21%        |  |
|           |   | 3. Persentase jejaring yang berperan dalam penanganan permasalahan terhadap perempuan dan anak  | 10%           |  |
|           |   | 4. Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan       | 100%          |  |
| <b>11</b> | <b>Meningkatkan kualitas generasi muda dan angkatan kerja</b>                     |   |               |  |
|           | Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan  | 1. Persentase pemuda yang aktif sebagai kader anti kenakalan remaja                             | 80%           | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga   |
|           | Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga                                     | 1. Akumulasi atlet yang dibina dan berprestasi  | 1107 orang    | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga<br>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang                            |
|           |   | 2. Cakupan / sebaran fasilitas olahraga   | 103 kelurahan |  |
|           | Program Peningkatan Kesempatan Kerja  | 1. Persentase pertumbuhan kesempatan kerja yang dapat diinformasikan                            | 5%            | Dinas Tenaga Kerja<br>Dinas Kepemudaan dan Olah Raga   |
|           |   | 2. Persentase pemuda yang membuka wirausaha mandiri   | 15%           |  |

| No        | Prioritas / Program   | Kinerja   |                   | Perangkat Daerah Penanggung jawab   |
|-----------|---|---|-------------------|---|
|           |   | Indikator   | Target            |   |
|           | Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas   | 1. Persentase Angkatan Kerja yang Lulus sertifikasi   | 62%               | Dinas Tenaga Kerja  |
|           |   | 2. Persentase Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi yang lulus pelatihan  | 77%               |   |
|           | Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja   | 1. Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama                            | 6,67%             | Dinas Tenaga Kerja  |
|           | Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan   | 1. Persentase perusahaan yang telah diperiksa dan mematuhi norma ketenagakerjaan dan/norma K3                   | 43%               | Dinas Tenaga Kerja  |
| <b>12</b> | <b>Meningkatkan ketahanan pangan</b>  |   |                   |   |
|           | Program Peningkatan Ketersediaan, Keanekaragaman dan Keamanan Pangan  | Tingkat keamanan bahan pangan segar yang beredar  | 81%               | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian                                      |
|           |   | Persentase <i>sample</i> yang memenuhi syarat keamanan makanan  | 82%               |   |
|           |   | Tingkat keanekaragaman konsumsi masyarakat (PPH)  | 95,5              | Dinas Kesehatan   |
|           | Program Peningkatan Akses dan Distribusi Pangan   | 1. Tingkat frekuensi intervensi ketersediaan komoditas  | 15 kali/ kejadian | Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah                         |
|           |   | 2. Persentase pasar yang dipantau harganya  | 8%                |   |
| <b>13</b> | <b>Mewujudkan sistem pengelolaan pertanahan, aset, penataan ruang dan ketahanan bencana yang terintegrasi</b> |   |                   |   |
|           | Program Perencanaan Ruang Kota  | 1. Persentase rencana induk sektoral yang disusun   | 64,29%            | Badan Perencanaan Pembangunan   |
|           |   | 2. Persentase rencana rinci tata ruang yang disusun   | 46,67%            |   |
|           | Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Kota  | 1. Persentase jumlah bangunan yang ber IMB  | 53,48%            | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang |
|           |   | 2. Persentase tindak lanjut terhadap laporan pelanggaran IMB  | 100%              |   |
|           | Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum                             | 1. Akumulasi luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum | 2,403 Ha          | Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah                                      |

| No        | Prioritas / Program  | Kinerja   |              | Perangkat Daerah Penanggung jawab  |
|-----------|--|---|--------------|--|
|           |  | Indikator   | Target       |  |
|           |  | 2. Akumulasi luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum | 19,30 Ha     | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan   |
|           | Program Pengamanan Aset  | 1. Persentase tanah aset yang telah dilakukan pemagaran, papan, patok   | 14,52%       | Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah   |
|           |  | 2. Persentase tanah aset yang tersertifikasi  | 12,08%       |  |
|           |  | 3. Persentase kasus tanah dan/ atau bangunan yang ditangani   | 100%         |  |
|           | Program Pengelolaan Aset   | 1. Persentase aset tanah dan/atau bangunan yang tercatat pemanfaatannya   | 25,22%       | Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah   |
|           | Program Penanggulangan Bencana   | 1. Angka kejadian kebakaran gedung/bangunan per 1 juta penduduk Surabaya  | 54 kejadian  | Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat<br>Dinas Pemadam Kebakaran<br>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang |
|           |  | 2. Angka kejadian kebakaran non bangunan per 1 juta penduduk Surabaya   | 110 kejadian |  |
|           |  | 3. Persentase waktu tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit   | 95%          |  |
|           |  | 4. Persentase waktu tanggap ≤ 24 jam penanggulangan kejadian bencana alam   | 100%         |  |
|           |  | 5. Persentase kelurahan tangguh bencana   | 29%          |  |
| <b>14</b> | <b>Melestarikan budaya lokal dan wawasan kebangsaan berlandaskan Pancasila</b> |   |              |  |
|           | Program Perlindungan Budaya Lokal  | 1. Persentase cagar budaya yang terpelihara   | 91,50%       | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  |
|           | Program Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Lokal                              | 1. Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil   | 44%          | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata<br>Dinas Pendidikan  |
|           |  | 2. Persentase hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal pada 17 lokasi                        | 52,90%       |  |
|           | Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan                    | 1. Persentase pertumbuhan event literasi yang diselenggarakan   | 10%          | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan<br>Dinas Pendidikan   |
|           |  | 2. Persentase koleksi buku  | 86,18%       |  |
|           |  | 3. Persentase siswa yang terlibat dalam tes <i>reading text levelling</i>   | 20,50%       |  |
|           |  | 4. Persentase perpustakaan yang berhasil dibina   | 12,90%       |  |

| No        | Prioritas / Program   | Kinerja   |               | Perangkat Daerah Penanggung jawab   |
|-----------|---|---|---------------|---|
|           |   | Indikator   | Target        |   |
|           | Program Pengembangan Wawasan dan Karakter Kebangsaan dalam Konteks Budaya Lokal             | 1. Persentase partisipasi peserta dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan  | 15%           | Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat<br>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata<br>Dinas Pendidikan<br>Dinas Sosial<br>31 Kecamatan |
|           |   | 2. Persentase kader wawasan kebangsaan  | 100%          |   |
| <b>15</b> | <b>Meningkatkan arus perdagangan internasional dan antar pulau</b>                          |   |               |   |
|           | Program Pengembangan Hub dan Simpul Logistik untuk Mendukung Distribusi Komoditas Potensial | 1. Persentase realisasi pengembangan hub dan simpul logistik                            | 25%           | Dinas Perdagangan   |
|           |   | 2. Tingkat kelengkapan data gudang terdaftar  | 30%           |   |
|           | Program Manajemen Lalu Lintas Angkutan Barang   | 1. Rata-rata waktu tempuh kendaraan barang dari dan menuju hub                          | 112,875 menit | Dinas Perhubungan   |
|           | Program Peningkatan Investasi Fasilitas Pendukung Logistik                                  | 1. Tingkat pertumbuhan investasi fasilitas pendukung logistik                           | 18%           | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  |
|           | Program Kerjasama Bidang Perdagangan  | 1. Persentase MoU yang memuat sektor perdagangan yang telah ditandatangani              | 42,86%        | Bagian Administrasi Kerjasama   |
|           |   | 2. Persentase MoU yang memuat sektor perdagangan tertandatangani yang telah terealisasi | 66,67%        |   |

## **BAB V**

# **RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH**

Penyelenggaraan program kegiatan prioritas daerah dilaksanakan berdasarkan urusan pemerintahan daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Pada tahun 2017, rencana program prioritas pembangunan daerah yang disusun berdasarkan pada perumusan sasaran serta evaluasi hasil capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan rancangan kerangka ekonomi daerah, sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab II dan Bab III. Adapun rencana program Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2017 beserta tolok ukur kinerja dan pagu indikatif sesuai urusan pemerintahan daerah dan Perangkat Daerah, diuraikan secara detail pada Tabel 5.1 tentang Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2017 sebagaimana berikut.

## **BAB VI PENUTUP**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 serta RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021. Dokumen RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta digunakan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan tahunan agar bisa berjalan dengan baik. Penyusunan RKPD dilakukan dengan memperhatikan sinergitas antara program pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.

RKPD Kota Surabaya tahun 2017 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2017, memusatkan pada pencapaian tujuan, sasaran, prioritas dan tema pembangunan tahun 2017 yang mengacu pada isu-isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta dilaksanakan melalui program dan kegiatan.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan pembangunan dalam mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. RKPD Tahun 2017 sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), berupa program/kegiatan PD dan/atau lintas PD;



2. RKPD Tahun 2017 sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2017 untuk menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2017;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RKPD, perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RKPD yang dijadikan bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya;
4. Dalam hal RKPD Tahun 2017 tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan yang berpengaruh terhadap sasaran, kebutuhan keuangan daerah serta program dan kegiatan, maka dapat dilakukan penyesuaian RKPD melalui penyusunan Perubahan RKPD yang menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan PPAS untuk menyusun Perubahan RAPBD Tahun 2017.

**WALIKOTA SURABAYA**

ttd.

**TRI RISMAHARINI**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**IRA TURSILOVATI, SH. MH.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19691017 199303 2 006